





2027

RKPD
Kabupaten Pesawaran

BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 563);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 46);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 102);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 103);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2026 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
20. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
21. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

Pasal 2

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2027 dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program bupati yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.
(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    (a) rancangan kerangka ekonomi daerah;
    (b) perioritas pembangunan daerah;
    (c) rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun;
    (d) Program Strategis Nasional ; dan
    (e) kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2026.
(3) RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RKP Tahun 2027 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
(4) Tahap penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2027.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.
(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh rencana kerja perangkat daerah yang mempedomani pada strategis perangkat daerah.
(3) Penyusunan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN.
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
   c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.
   d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
   e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
   f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
   g. BAB VII : PENUTUP.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI PESAWARAN,

NANDA INDIRA B.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2026 NOMOR 741

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1-1
1.1 LATAR BELAKANG 1-1
1.2 TAHAPAN PENYUSUNAN 1-3
1.3 DASAR HUKUM 1-3
1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1-6
1.4.1 Hubungan dengan RKP Nasional 1-6
1.4.2 Hubungan dengan RKPD Provinsi Lampung 1-7
1.4.3 Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran 1-7
1.4.4 Hubungan dengan Renja OPD 1-7
1.4.5 Hubungan dengan RTRW Kabupaten Pesawaran 1-7
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN 1-7
1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 1-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 2-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-38
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2-61
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2-133
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025 DAN REALISASI RPJMD TAHUN 2021-2026 2-148
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 2-148
2.2.2 Evaluasi Indikator Kerja Utama Pembangunan Daerah 2-451
2.2.3 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2-453
2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2-453
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 2-456
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 2-456
2.3.2 Isu Strategis Daerah 2-467
2.4 TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 2-480
2.3 INOVASI DAERAH 2-481

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3-1
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3-2
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 3-4
3.1.3 Inflasi 3-6
3.1.4 PDRB per Kapita 3-7
3.1.5 Ketenagakerjaan 3-8
3.1.6 Kemiskinan 3-9
3.1.7 Ketimpangan Pendapatan 3-9
3.1.8 Pembangunan Sumber Daya Manusia 3-10
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3-11
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3-12
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 3-18
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 3-21
3.3 PENDANAAN NON-APBD 3-28

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH 4-1
4.1.1 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran 4-2
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027 4-7
4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027 4-8
4.2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027 4-18
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 4-21
4.2.4 Program Prioritas Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 4-41
4.3 SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN PESAWARAN 4-136
4.4 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN 4-140

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5-1
5.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Prioritas Kabupaten Tahun 2027 5-1
5.2 Rencana Pagu Indikatif Belanja 5-3

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6-1
6.1 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 6-1
6.2 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 6-2

BAB VII PENUTUP 7-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah 2-2
Tabel 2.2 Kemiringan Lereng 2-3
Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi Tahun 2025 2-4
Tabel 2.4 Formasi Geologi 2-5
Tabel 2.5 Karakteristik Penggunaan Lahan 2-8
Tabel 2.6 Risiko Bencana Alam 2-9
Tabel 2.7 Nilai Indeks Risiko Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2025 2-11
Tabel 2.8 Nilai Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2025 Berdasarkan Jenis Bencana 2-11
Tabel 2.9 Luasan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesawaran Per Kecamatan 2-13
Tabel 2.10 Data Bencana Banjir ROB yang Telah Terjadi 2-20
Tabel 2.11 Daftar Bencan Angin Puting Beliung yang Telah Terjadi 2-22
Tabel 2.12 Luas Panen Dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 2-27
Tabel 2.13 Luas Panen Dan Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Semusim Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 2-27
Tabel 2.14 Luas Areal Dan Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 2-28
Tabel 2.15 Populasi dan Produksi Sektor Peternakan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 2-29
Tabel 2.16 Jumlah Produksi Sektor Perikanan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 2-30
Tabel 2.17 Sebaran Potensi Pariwisata Kabupaten Pesawaran 2-31
Tabel 2.18 Jumlah, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025 2-35
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Tahun 2019-2025 2-36
Tabel 2.20 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025 2-37
Tabel 2.21 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025 2-39
Tabel 2.22 Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen) 2-40
Tabel 2.23 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2020-2025 .. 2-42
Tabel 2.24 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025 (dalam Miliar) 2-45
Tabel 2.25 Struktur Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025 2-46
Tabel 2.26 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2025 (dalam Miliar) 2-47
Tabel 2.27 Jumlah Kasus Stunting per Kecamatan Tahun 2020-2025 2-55
Tabel 2.28 Kondisi Pembangunan Gender Tahun 2018-2025 2-59
Tabel 2.29 Persentase Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2025 2-61
Tabel 2.30 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025 2-64

Tabel 2.31 Persentase Capaian Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2020-2025 2-67
Tabel 2.32 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Jenjang SD Tahun 2020-2025 2-72
Tabel 2.33 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Jenjang SMP Tahun 2020-2025 2-73
Tabel 2.34 Jumlah Sekolah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 2-74
Tabel 2.35 Persentase Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2025 2-78
Tabel 2.36 Angka Anak Tidak Sekolah Tahun 2025 2-78
Tabel 2.37 Hasil Asesmen Nasional terkait Kompetensi Minimum dan Survei Karakter di Provinsi Lampung Tahun 2023-2025 2-79
Tabel 2.38 Persebaran Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2025 2-82
Tabel 2.39 Penilaian Akreditasi Puskesmas Tahun 2025 2-82
Tabel 2.40 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Tahun 2020-2025 2-83
Tabel 2.41 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2020-2025 2-86
Tabel 2.42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2020-2025 2-86
Tabel 2.43 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2020-2025 2-86
Tabel 2.44 Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian Tahun 2020-2025 2-88
Tabel 2.45 Angka Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2020-2025 2-89
Tabel 2.46 Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit TBC BTA Tahun 2020-2025 2-89
Tabel 2.47 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Tahun 2020-2025 2-91
Tabel 2.48 Rekapitulasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2025 2-95
Tabel 2.49 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2024 2-96
Tabel 2.50 Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pesawaran 2-98
Tabel 2.51 Persentase Bangunan yang Memiliki PBG Tahun 2020-2024 2-99
Tabel 2.52 Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2020-2025 2-100
Tabel 2.53 Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 2-100
Tabel 2.54 Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2025 2-101
Tabel 2.55 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2025 2-104
Tabel 2.56 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2025 2-104
Tabel 2.57 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 2-106
Tabel 2.58 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2021-2025 2-107
Tabel 2.59 Kinerja Persampahan Tahun 2020-2024 2-108
Tabel 2.60 Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Tahun 2016-2024 2-108
Tabel 2.61 Lahan Bersertifikat Tahun 2020-2024 2-109
Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2025 2-111

Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2025 2-113
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2024 2-115
Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2025 2-116
Tabel 2.66 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2024 2-119
Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2024 2-120
Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2024 2-121
Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024 2-122
Tabel 2.70 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2025 2-122
Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2025 2-123
Tabel 2.72 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2025 2-124
Tabel 2.73 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2025 2-124
Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2025 2-125
Tabel 2.75 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2024 2-127
Tabel 2.76 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2024 2-128
Tabel 2.77 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017-2024 2-129
Tabel 2.78 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2019-2024 2-129
Tabel 2.79 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2020-2024 2-130
Tabel 2.80 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2019-2025 2-130
Tabel 2.81 Indikator Urusan Keuangan Tahun 2018-2024 2-131
Tabel 2.82 Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Tahun 2020-2025 2-132
Tabel 2.83 Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2020-2025 2-133
Tabel 2.84 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017-2024 2-134
Tabel 2.85 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2019-2024 2-134
Tabel 2.86 Program Pelatihan Kewirausahaan 2-135
Tabel 2.87 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2024 2-136
Tabel 2.90 Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Pesawaran ... 2-140
Tabel 2.91 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2025 2-141
Tabel 2.92 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa Tahun 2020-2025 2-141
Tabel 2.93 Rumah Layak Huni Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2024 2-143
Tabel 2.94 Rasio Luas Lahan Pertanian terhadap Jumlah Penduduk 2-144
Tabel 2.95 Status Kemandirian dan Kemajuan Desa Tahun 2020-2025 ... 2-145
Tabel 2.96 Trend Laju Inflasi Tahun 2019 s.d 2023 2-147
Tabel 2.97 Kategori Pencapaian Kinerja 2-150
Tabel 2.98 Rekapitulasi Tabel T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2025 2-152
Tabel 2.99 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 2-452
Tabel 2.100 Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025 2-455

Tabel 2.101 Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran 2-468
Tabel 2.102 Sebaran Desa Wisata 2-471
Tabel 2.103 Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan 2-473
Tabel 2.104 Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura 2-474
Tabel 2.105 Luas Panen dan Produksi Komoditas Perkebunan 2-475
Tabel 2.106 Populasi dan Produksi Sektor Peternakan 2-476
Tabel 2.107 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Sektor Perikanan 2-477
Tabel 2.108 Progres Rencana Pembangunan Kawasan Industri 2-477
Tabel 2.88 Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2020-2025 2-481
Tabel 2.89 Inovasi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran 2-482

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024–2028 3-17
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2024-2028 3-20
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2028 3-23
Tabel 3.4 Tabel Persandingan Pagu RPJMD Tahun 2025-2029 pada Tahun 2027 dan Proyeksi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2027 3-24
Tabel 3.5 Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis beserta Sumber Pendanaannya 3-29

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 4-1
Tabel 4.2 Asumsi Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 4-20
Tabel 4.3 Sasaran pembangunan tahun 2027 berdasarkan Dokumen RPJMD Pesawaran Tahun 2025-2029 4-21
Tabel 4.4 Gambaran Kesesuaian Pencapaian Target Indikator Makro Tahun 2027 4-22
Tabel 4.5 Penyandingan Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 4-23
Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 4-23
Tabel 4.7 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2027 4-26
Tabel 4.8 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2027 4-38
Tabel 4.9 Program Prioritas Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 4-41
Tabel 4.10 Gambaran Konsistensi Program antara RPJMD dan RKPD Tahun 2027 4-48
Tabel 4.11 Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita pada RKPD Tahun 2027 4-50
Tabel 4.12 Keselarasan Pro-SN/Tematik Pembangunan Hasil Kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 4-111

Tabel 4.13 Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan 4-133
Tabel 4.14 Program Pembangunan Daerah pendukung SPM Tahun 2027 4-139
Tabel 4.15 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 4-140

Tabel 5.1 Pagu Indikatif Fungsi Pendidikan 5-3
Tabel 5.2 Pagu Indikatif Fungsi Kesehatan 5-5
Tabel 5.3 Pagu Indikatif Fungsi Infrastruktur 5-6
Tabel 5.4 Pagu Indikatif Belanja Alokasi Dana Desa 5-8
Tabel 5.5 Rencana Pagu Indikatif Belanja Per Perangkat Daerah Tahun 2027 5-9
Tabel 5.6 Rekapitulasi Daftar Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 5-13
Tabel 5.7 Rekapitulasi Daftar Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2027 5-42
Tabel 5.8 Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Tahun 2027 5-73
Tabel 5.9 Daftar Program Pendukung Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 5-113

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 6-1
Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Kunci pada Tahun 2027 6-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Pesawaran ... 2-2
Gambar 2.2 Peta Kelerengan ... 2-4
Gambar 2.3 Peta Geologi ... 2-6
Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai ... 2-7
Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan ... 2-9
Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Alam ... 2-10
Gambar 2.7 Bencana Menurut Waktu di Kabupaten Pesawaran ... 2-12
Gambar 2.8 Grafik Komposisi Bencana Tahun 2024 ... 2-12
Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pesawaran ... 2-14
Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Pesawaran ... 2-15
Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Pesawaran ... 2-17
Gambar 2.12 Peta Rawan Banjir Kabupaten Pesawaran ... 2-18
Gambar 2.13 Grafik Intensitas Bencana Banjir Tahun 2020-2024 ... 2-19
Gambar 2.14 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya ... 2-24
Gambar 2.15 Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2019-2039 ... 2-26
Gambar 2.16 Wisata Air Terjun di Kabupaten Pesawaran ... 2-33
Gambar 2.17 Wisata Pantai di Kabupaten Pesawaran ... 2-33
Gambar 2.18 Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran ... 2-34
Gambar 2.19 Wisata Kerajinan Tangan Produk Tapis Kabupaten Pesawaran ... 2-34
Gambar 2.20 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2025 ... 2-41
Gambar 2.21 Grafik Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020-2025 ... 2-42
Gambar 2.22 Grafik Perkembangan PDRB ADHB Perkapita Tahun 2019-2024 (dalam Juta) ... 2-47
Gambar 2.23 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2025 ... 2-48
Gambar 2.24 Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2025 ... 2-50
Gambar 2.25 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2025 ... 2-50
Gambar 2.26 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2025 ... 2-50
Gambar 2.27 Grafik Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Kabupaten Pesawaran, 2020-2025 ... 2-51
Gambar 2.28 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2025 ... 2-52
Gambar 2.29 Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2020-2025 ... 2-52
Gambar 2.30 Trend Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran menurut Survey Kesehatan ... 2-53
Gambar 2.31 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran menurut EPPGBM Tahun 2020-2025 ... 2-54
Gambar 2.32 Target Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 ... 2-54
Gambar 2.33 Grafik Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2020-2025 ... 2-58
Gambar 2.34 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2025 ... 2-60
Gambar 2.35 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2025 ... 2-60
Gambar 2.36 Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024-2025 ... 2-63
Gambar 2.37 Grafik Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Pesawaran 2020-2025 ... 2-65

Gambar 2.38 Grafik Survei Penilaian Integritas Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 2-66
Gambar 2.39 Indeks Demokrasi Provinsi Lampung dan Indonesia 2-68
Gambar 2.40 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (Clearance Rate) Tahun 2022 dan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 di Provinsi Lampung 2-69
Gambar 2.41 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2020-2025 2-74
Gambar 2.42 Grafik Angka Kelulusan Tahun 2020-2025 2-76
Gambar 2.43 Grafik Angka Melanjutkan Tahun 2020-2025 2-77
Gambar 2.44 Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Tahun 2020-2025 2-80
Gambar 2.45 Grafik Kasus Kematian Ibu di Tahun 2020-2025 2-81
Gambar 2.46 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2020-2025 2-84
Gambar 2.47 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2020-2025 2-85
Gambar 2.48 Grafik Cakupan Cure Rate & Success Rate (SR) Penderita TB Paru BTA + Tahun 2020-2025 2-90
Gambar 2.49 Cakupan Pelayanan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2020-2025 2-93
Gambar 2.50 Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi Tahun 2020-2025 2-94
Gambar 2.51 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Minum Aman Tahun 2020-2024 2-97
Gambar 2.52 Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2020-2025 2-109
Gambar 2.53 Grafik Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran Tahun 2020-2025 2-110
Gambar 2.54 Grafik Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2020-2024 2-110
Gambar 2.55 Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016-2024 2-115
Gambar 2.56 Jumlah UMKM di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025 2-119
Gambar 2.57 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2020-2024 2-125
Gambar 2.58 Grafik Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2019-2024 2-127
Gambar 2.59 Grafik Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2024 2-134
Gambar 2.60 Grafik Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2024 2-137
Gambar 2.61 Grafik Share PMTB Tahun 2020-2024 2-138
Gambar 2.62 Grafik Perkembangan ICOR Tahun 2020-2024 2-139
Gambar 2.63 Grafik Perkembangan Net Ekspor Tahun 2020-2024 2-140
Gambar 2.64 Grafik Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2024 2-146
Gambar 2.66 Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 2-149
Gambar 2.67 Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD dan APBD Tahun 2025 2-149
Gambar 2.68 Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025 2-150
Gambar 2.69 Irisan Kesesuaian Jumlah Sub Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025 2-150

Gambar 2.65 Grafik Realisasi Capaian SPM Tahun 2025 2-454
Gambar 2.70 Grafik Capaian Indikator TPB Kabupaten Pesawaran 2-456
Gambar 2.71 Peta Sebaran Potensi Wisata 2-472
Gambar 2.72 Grafik Kunjungan Wisatawan..... 2-473

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan PDRB Tahun 2020-2027 (dalam miliar) .. 3-3
Gambar 3.2 Grafik Kontribusi Sektor Utama PDRB Tahun 2020-2025 3-4
Gambar 3.3 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2027 3-5
Gambar 3.4 Grafik Pertumbuhan Sektor Ekonomi Tahun 2025..... 3-5
Gambar 3.5 Grafik Perkembangan Inflasi Tahun 2020-2027 3-6
Gambar 3.6 Grafik Perkembangan PDRB per Kapita Tahun 2020-2027 (dalam Juta Rupiah) 3-7
Gambar 3.7 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Tahun 2020-2027 3-8
Gambar 3.8 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2027 3-9
Gambar 3.9 Grafik Perkembangan Rasio Gini Tahun 2020-2027..... 3-10
Gambar 3.10 Grafik Perkembangan IPM Tahun 2020-2027..... 3-11

Gambar 4.1 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran 4-3
Gambar 4.2 Rencana Tahapan Pengembangan Kawasan Industri Tegineneng 4-4
Gambar 4.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan 4-5
Gambar 4.4 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran 4-6
Gambar 4.5 Peta Rencana Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran 4-7
Gambar 4.6 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2027 4-8
Gambar 4.7 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027 4-9
Gambar 4.8 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1 4-10
Gambar 4.9 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2 4-11
Gambar 4.10 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 4-12
Gambar 4.11 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 4-13
Gambar 4.12 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5 4-14
Gambar 4.13 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6 4-16
Gambar 4.14 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 4-17
Gambar 4.15 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8 4-18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan nasional. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 mencakup pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bawah-atas (*bottom-up*), dan atas-bawah (*top-down*) dengan deskripsi sebagai berikut:

- Proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesawaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.
- Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pembangunan sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif pendekatan perencanaan secara teknokratik maupun partisipatif; substansi RKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah diperkaya pula dengan informasi berupa saran/masukan yang dihimpun dari kelompok akademisi, asosiasi profesi, pelaku dunia usaha, kalangan pers, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya; yang dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027. Dengan demikian, produk perencanaan yang akan dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan telah pula memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan *good governance*.
- Penyusunan RKPD merupakan kesatuan rangkaian dari proses pendekatan perencanaan pembangunan secara bawah-atas (*bottom-up*), dimulai dari

Musrenbang Desa dan Kecamatan, Musrenbang Kabupaten Pesawaran, hingga Musrenbang Provinsi Lampung serta Musrenbang Nasional, bertujuan untuk menyerap aspirasi dan penyampaian usulan kegiatan pembangunan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang dilaksanakan secara berjenjang.

- Dalam hal proses pendekatan perencanaan secara atas-bawah (*top-down*), penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 juga dipaduserasikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung serta prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan maupun kebijakan nasional lainnya.

Penyusunan RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana:

1. Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan prakiraan maju, berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode 1 (satu) Tahun;
2. Secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, RKPD menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 disusun dengan mencermati capaian pembangunan pada Tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada Tahun perencanaan, serta merupakan tahapan kedua untuk meletakkan dasar-dasar transformasi lima Tahun pertama (2025-2029).

Disisi lain, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian

target pembangunan Provinsi Lampung dan pembangunan nasional. Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

1.2 TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai representasi fungsi pengawasan lembaga legislatif. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran dimulai dari analisis hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya, serta memperhatikan kondisi daerah, kebijakan nasional dan provinsi, yang selanjutnya dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik yakni berupa analisis isu strategis daerah. Selanjutnya dalam rangka menjamin keberhasilan pembangunan yang menyentuh permasalahan dan kebutuhan daerah maka disusun prioritas pembangunan daerah yang merupakan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam merespon isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Tahap penyusunan RKPD dimulai dengan orientasi penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, pelaksanaan reviu oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah, pelaksanaan fasilitasi Gubernur Lampung, dan penetapan RKPD Tahun 2027.

1.3 DASAR HUKUM

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 102);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 103); dan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2026 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 98).

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD adalah dokumen pembangunan Tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029, serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi Lampung. Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penentuan priotitas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4.1 Hubungan dengan RKP Nasional

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 mengacu berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesawaran, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu Tahunan tidak dapat diabaikan.

Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Pesawaran.

1.4.2 Hubungan dengan RKPD Provinsi Lampung

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Lampung. Dinamika regional Tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Wilayah Kabupaten Pesawaran yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Lampung, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota/kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Pesawaran.

1.4.3 Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 merupakan Tahun kedua RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 yang mengakomodir Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2025. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja Tahunan dalam mendukung target capaian 5 (lima) Tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

1.4.4 Hubungan dengan Renja OPD

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Renja OPD Tahun 2027. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja OPD, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan. RKPD Kabupaten Pesawaran dan Renja OPD ini harus bersesuaian.

1.4.5 Hubungan dengan RTRW Kabupaten Pesawaran

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 mengacu kepada RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga Tahun 2039 perlu diakomodir dalam RKPD Tahun 2027. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pesawaran.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara substansi, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawara Tahun 2027 memuat deskripsi tentang gambaran umum daerah, capaian sasaran pembangunan sebelumnya, arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, berdasarkan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang akan

dilaksanakan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun mendatang. Seluruh uraian dalam RKPD tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran yang disinergikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RKP Tahun 2026, serta RKPD Provinsi Lampung.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

1. Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
4. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
5. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi tahapan dan mekanisme antara perencanaan dan penganggaran, dimana RKPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menyusun Kebijakan Umum (KUA) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 yang diusulkan oleh Bupati Pesawaran untuk disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Pesawaran sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.
6. Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Tahun 2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

1.2 Tahapan Penyusunan
Menjelaskan proses tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

1.3 Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

1.4 Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2027 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran.

1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD

Memberikan gambaran penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH

2.1 Kondisi Umum dan Kondisi Daerah.

Menjelaskan tentang Kondisi Umum dan Kondisi Daerah yang melingkupi data capaian pembangunan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2025.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran sampai dengan Tahun 2025 serta persandingan pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tinjauan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran hingga Tahun 2025, serta arah kebijakan, tantangan dan proyeksi pembangunan ekonomi Tahun 2026 dan Tahun 2027.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan Tahun 2027.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan Tinjauan RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RKPD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 Serta Tujuan dan Sasaran, strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Menjelaskan tentang Prioritas dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

4.3 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran
Menjelaskan sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

4.4 Sasaran Pencapaian SPM Kabupaten Pesawaran
Menjelaskan Pencapaian SPM Kabupaten Pesawaran

4.5 Sasaran Pencapaian SDG's Kabupaten Pesawaran
Menjelaskan Sasaran Pencapaian SDG's Kabupaten Pesawaran

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2027, indikator dan target program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan prakiraan maju pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah serta sinkronisasi dan dukungan Program Prioritas Daerah dan Nasional.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja Tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP
Berisi rangkuman singkat dan penegasan tentang pelaksanaan RKPD Tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang terletak di bagian selatan Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung selaku ibukota provinsi. Berdasarkan karakteristik topografi dan penggunaan lahan, wilayah Kabupaten Pesawaran dibagi menjadi tiga zona yakni wilayah utara, tengah, dan selatan. Dengan karakteristik yang demikian menyebabkan kecenderungan perbedaan karakteristik kegiatan ekonomi pada tiap zona.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten, karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta karakteristik kependudukan. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada kedudukan 104,920-105,340 Bujur Timur (BT) dan 5,120-5,840 Lintang Selatan (LS). Luas Kabupaten Pesawaran secara keseluruhan adalah 1.286,843 km^2 termasuk 36 pulau yang ada disekitarnya.

Secara terperinci batas-batas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Bangunrejo, Bumi Ratu Nuban, dan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kecamatan Kelumbayan, dan Cukuh Balak (Kabupaten Tanggamus).
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Gadingrejo, dan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu).
d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan), Kecamatan Kemiling, dan Teluk Betung Barat (Kota Bandar Lampung).

Pada awal terbentuknya Kabupaten Pesawaran hanya terdiri dari tujuh Kecamatan dan seiring kebutuhan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sampai saat ini Kabupaten Pesawaran telah berkembang menjadi sebelas kecamatan. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

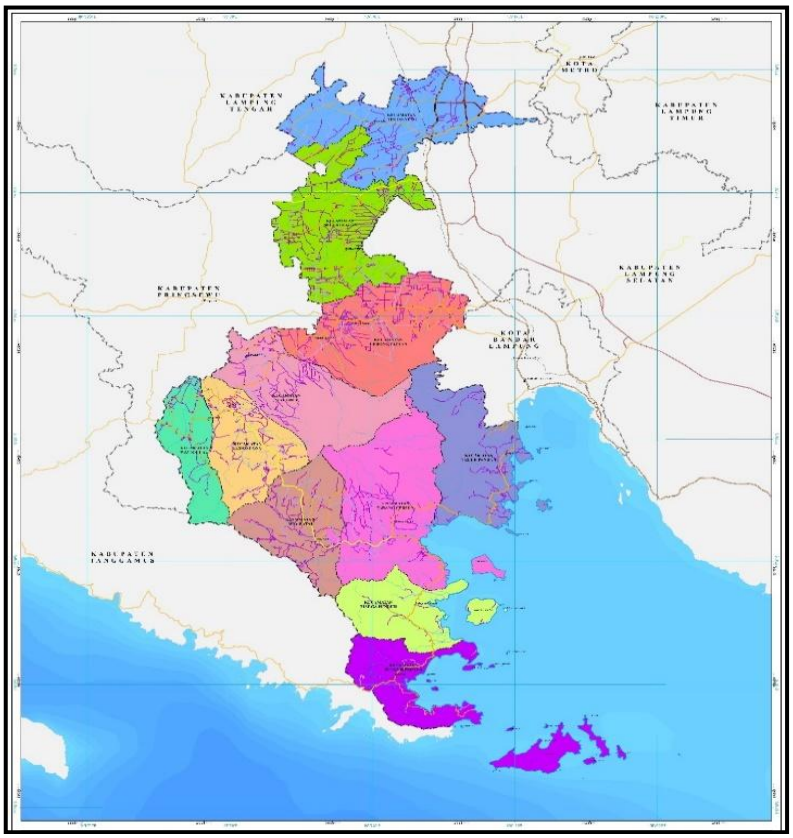
Tabel 2.1 Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas (km²)	Persentase (%)
1	Punduh Pedada	95,35	7,41
2	Marga Punduh	78,88	6,13
3	Padang Cermin	173,98	13,52
4	Teluk Pandan	119,55	9,29
5	Way Ratai	97,54	7,58
6	Kedondong	88,66	6,89
7	Way Khilau	62,67	4,87
8	Way Lima	128,81	10,01
9	Gedong Tataan	147,47	11,46
10	Negeri Katon	151,07	11,74
11	Tegineneng	142,84	11,10
Jumlah		**1.286,84**	**100,00**

Sumber: Kepmedagri 300.2.2-2138 Tahun 2025

Kecamatan Padang Cermin merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pesawaran dengan luas 173,98 km² atau persentase sebesar 13,52%, sedangkan Kecamatan Way Khilau memiliki luas wilayah terkecil seluas 62,67 km² dengan persentase 4,87% dari Luas Kabupaten Pesawaran yaitu 1.286,84 km² yang terdistribusi menjadi 148 desa. Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan kecil sejumlah 36 pulau. Tiga pulau terbesar yaitu pulau Legundi, Pahawang dan Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga memiliki beberapa gunung dengan puncak tertinggi berada di Gunung Way Ratai dan Pesawaran yang memiliki ketinggian 1.681 m dari permukaan laut.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Pesawaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

2.1.1.2 Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan kemiringan lerengnya dapat dibedakan menjadi 5 kelas yaitu <8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% dan >40%. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode interpolasi dapat diketahui sebagian wilayah merupakan wilayah berbukit terjal yang hampir tersebar di seluruh bagian wilayah. Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi lahan yang cukup datar berada di wilayah bagian utara. Kelerengan tanah menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Kemiringan Lereng

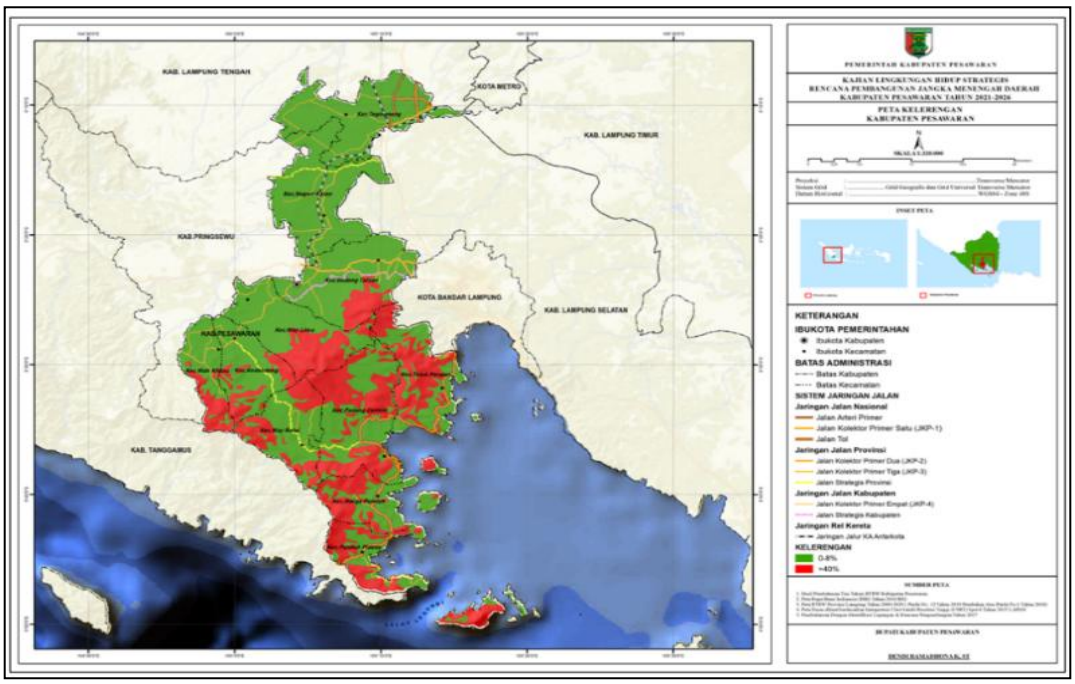
No	Kecamatan	Kelas Lereng (Ha)					Jumlah (Ha)
		<8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
1	Punduh Pedada	2.033,25	1.211,62	1.750,67	2.935,67	1.535,43	9.466,64
2	Marga Punduh	2.140,07	891,91	1.450,63	2.742,13	610,55	7.835,29
3	Padang Cermin	4.129,66	2.641,90	2.992,18	5.782,23	1.732,50	17.278,47
4	Teluk Pandan	2.485,77	1.510,72	2.024,37	4.325,64	1.530,71	11.877,21
5	Way Ratai	1.802,86	2.066,14	2.003,93	2.971,50	847,85	9.692,28
6	Kedondong	3.418,22	1.376,63	1.345,06	2.363,15	300,59	8.803,65
7	Way Khilau	2.519,39	505,50	797,55	1.815,74	581,84	6.220,02
8	Way Lima	5.184,28	2.259,09	1.466,93	2.305,05	1.584,38	12.799,73
9	Gedong Tataan	9.745,76	1.741,54	1.193,98	1.389,16	580,81	14.651,25
10	Negeri Katon	14.565,02	293,81	95,62	44,38	6,55	15.005,38
11	Tegineneng	13.755,01	317,77	81,80	24,35	11,42	14.190,35
Jumlah							**127.960,27**

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui luas wilayah terbesar dengan kemiringan <8% seluas 14.565,02 ha berada di wilayah Kecamatan Negeri Katon, selanjutnya wilayah terbesar dengan kemiringan 8-15% seluas 2.641,90 ha, wilayah terbesar dengan kemiringan 15-25% seluas 2.992,18 ha, wilayah terbesar dengan kemiringan 25-45% seluas 5.782,23 ha, dan wilayah terbesar dengan kemiringan >45% seluas 1.732,50 ha berada di wilayah Kecamatan Padang Cermin. Adapun pengelompokkan luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

a. Kemiringan lereng <8% : 61.779,29 ha (48,33%)
b. Kemiringan lereng 8-15% : 14.816,63 ha (11,59%)
c. Kemiringan lereng 15-25% : 15.202,72 ha (11,89%)
d. Kemiringan lereng 25-45% : 26.699,00 ha (20,88%)
e. Kemiringan lereng >45% : 9.322,63 ha (7,29%).

Gambar 2.2 Peta Kelerengan



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

2.1.1.3 Klimatologi

Kabupaten Pesawaran memiliki iklim tropis, suhu tertinggi mencapai 27,79^{0}C pada bulan mei dan terendah mencapai 26,33^{0}C pada bulan Januari. Adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari mencapai 465,20 mm dan terendah pada bulan Juli mencapai 35,10 mm, dengan rata-rata kelembaban udara tahunan antara 81,60% sampai 86,90%. Berdasarkan data curah hujan pada tabel berikut, kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Pesawaran namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi Tahun 2025

No	Bulan	Curah Hujan (mm^3)	Hari Hujan	Suhu Rata-rata (^{0}C)	Kelembaban (%)
1	Januari	465,20	17,00	26,33	86,90
2	Februari	217,80	12,00	26,79	84,30
3	Maret	191,00	11,00	27,20	84,40
4	April	132,70	7,00	27,08	83,90
5	Mei	99,60	7,00	27,79	83,40
6	Juni	142,70	9,00	26,77	85,30
7	Juli	35,10	5,00	26,84	82,30
8	Agustus	56,50	5,00	26,68	82,80
9	September	139,10	10,00	26,68	84,70
10	Oktober	102,60	8,00	27,47	81,60
11	November	93,00	12,00	27,37	82,10
12	Desember	187,60	15,00	26,70	85,80

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

2.1.1.4 Geologi

Secara geologi, wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa Formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuarter. Formasi Qhv (Batuan Gunung Api kuarter muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di wilayah Kecamatan Gedong Tatan dan Way Lima. Di Kecamatan Padang Cermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian timur. Formasi Tov/Qvt (Batuan Gunung Api Kuarter tua) mendominasi wilayah Kecamatan Punduh Pedada. Formasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat dan selatan. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Formasi Qt (Endapan Fluvial) terdapat di timur wilayah Kecamatan Padang Cermin dan timur wilayah Kecamatan Punduh Pedada. Sementara formasi lainnya tersebar di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Tegineneng dan Punduh Pedada. Untuk kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Pesawaran berkisar antara 30 – 100 cm. Kondisi ini dasarnya sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian baik lahan basah, lahan kering dan tanaman keras, karena kegiatan pertanian memerlukan kedalaman efektif tanah lebih besar dari 30 cm. Oleh sebab itu, khusus untuk tanaman pangan lahan basah dipersyaratkan pada kedalamam lebih dari 60 cm, sedangkan tanaman pangan lahan kering dan tanaman tahunan/keras cukup sesuai untuk kedalaman efektif tanah lebih dari 30 cm, dan untuk kedalaman tanah kurang dari 30 cm dapat dijadikan lahan konservasi. Kedalaman efektif tanah > 90 cm, meliputi daerah-daerah lembah, bantaran sungai dan dataran banjir yang tersebar di Kabupaten Pesawaran. Kedalaman efektif tanah antara 30 – 90 cm, meliputi daerah-daerah yang berada disekitar perbukitan (Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh).

Tabel 2.4 Formasi Geologi

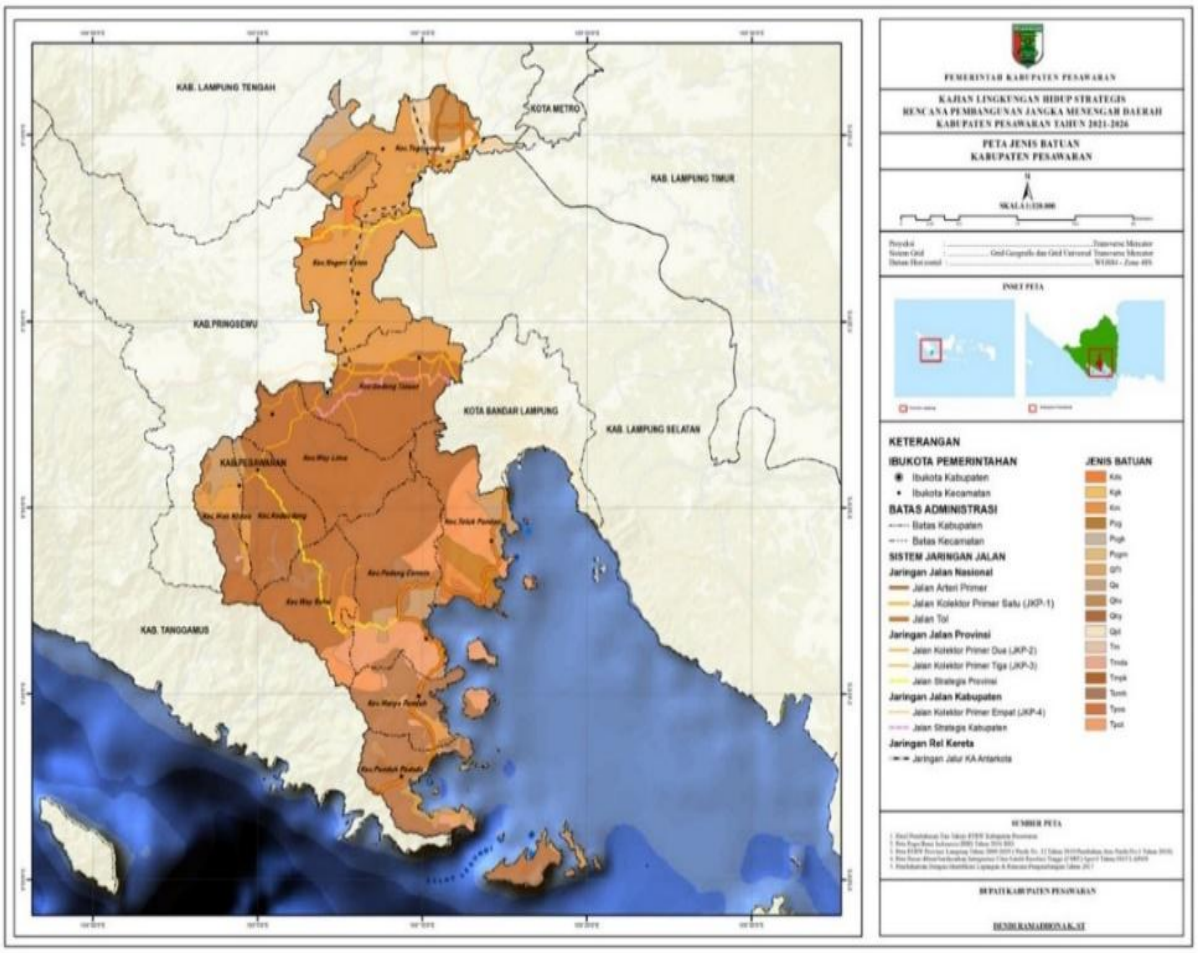
No	Formasi Batuan	Luas (Ha)	Persentase
1	Kds	1.064,62	0,83
2	Kgk	157,70	0,12
3	Km	1.570,88	1,23
4	Pzg	1.802,49	1,41
5	Pzgk	1.910,32	1,49
6	Pzgm	723,46	0,57
7	Qa	6.924,63	5,42
8	Qhv	3.218,04	2,52
9	Qhy	50.793,75	39,74

No	Formasi Batuan	Luas (Ha)	Persentase
10	Qpt	2.514,92	1,97
11	QTl	26.670,49	20,87
12	Tm	52,87	0,04
13	Tmda	6.011,69	4,70
14	Tmpk	157,73	0,12
15	Tomh	16.886,60	13,21
16	Tpos	848,40	0,66
17	Tpot	6.511,97	5,09
	Jumlah	**127.960,27**	

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Untuk kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm meliputi sebagian daerah-daerah perbukitan yaitu Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh. Tekstur tanah ikut menunjang bagi pertumbuhan tanaman dimana tanah yang teksturnya sedang sampai halus relatif lebih mudah diolah dengan kandungan unsur hara serta penyuburnya relatif terjaga. Kondisi tekstur tanah sedang sampai halus sangat cocok pembudidayaan tanaman lahan basah dan tanaman lahan kering sedangkan tekstur kasar lebih sesuai untuk tanaman keras/tahunan.

Gambar 2.3 Peta Geologi

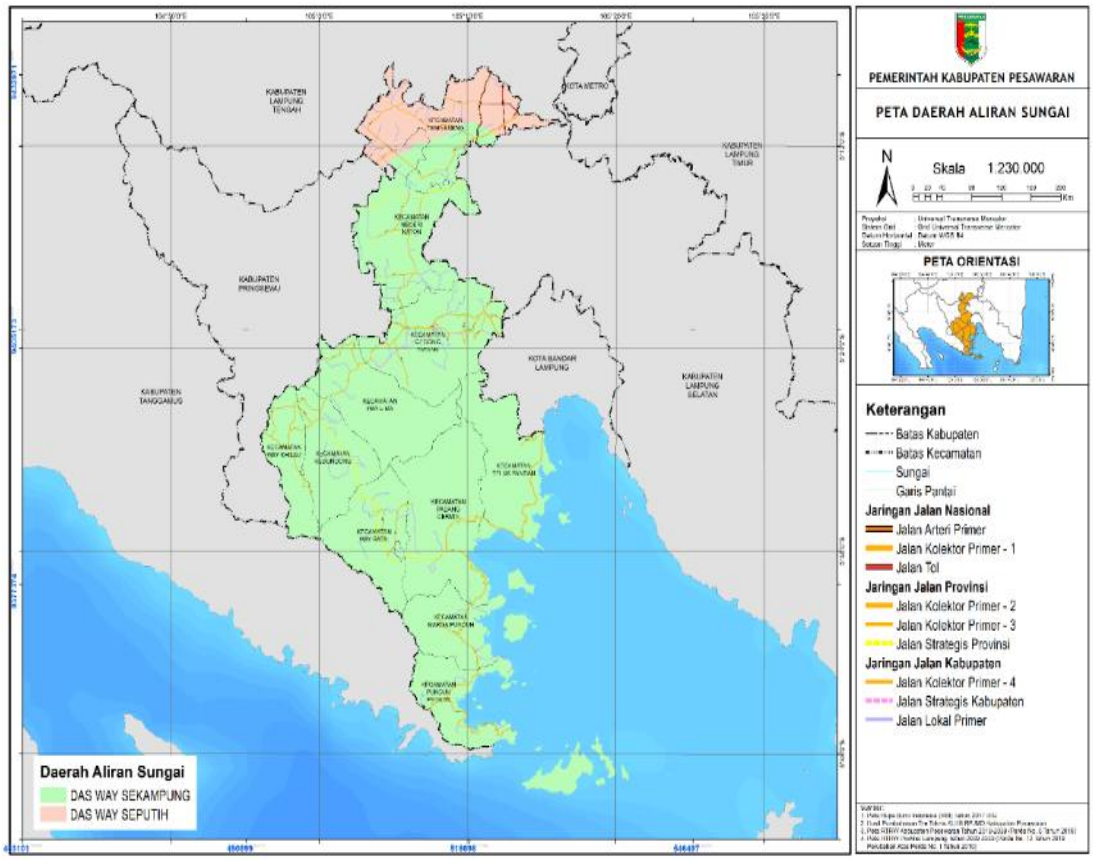


Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

2.1.1.5 Hidrologi

Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah di Kecamatan Gedong Tataan dengan panjang 53 km dan daerah aliran sungai seluas 135 km2 dan sungai terpendek adalah sungai Way Kepayang di Kecamatan Kedondong dengan panjang 4 km. Bentukan morfologis, jenis batuan, proses-proses geomorfik serta keadaan tata air yang ada di Kabupaten Pesawaran sangat menentukan pola drainasenya. Daerah pegunungan dan perbukitan yang pada umumnya mempunyai gradient yang cukup besar membentuk pola drainase dendritik, sedang di daerah dimana proses tektonik nyata mempunyai pola drainase rectangular. Daerah volkan dengan bentukan-bentukan kerucut yang masih utuh membentuk pola radial di daerah puncak dan lereng atas, sedang di lereng tengah dan bawah paralel dan sub-paralel. Kabupaten Pesawaran dilintasi oleh dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Sekampung seluas 1.165,47 km2 dan DAS Seputih seluas 113,60 km2, sehingga Kabupaten Pesawaran memiliki potensi yang relatif besar, khususnya berupa ketersediaan air permukaan yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian, antara lain dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, budidaya perikanan air tawar, sarana penyediaan air bersih, dan sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat, dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), baik secara konvensional maupun inkonvesional, yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

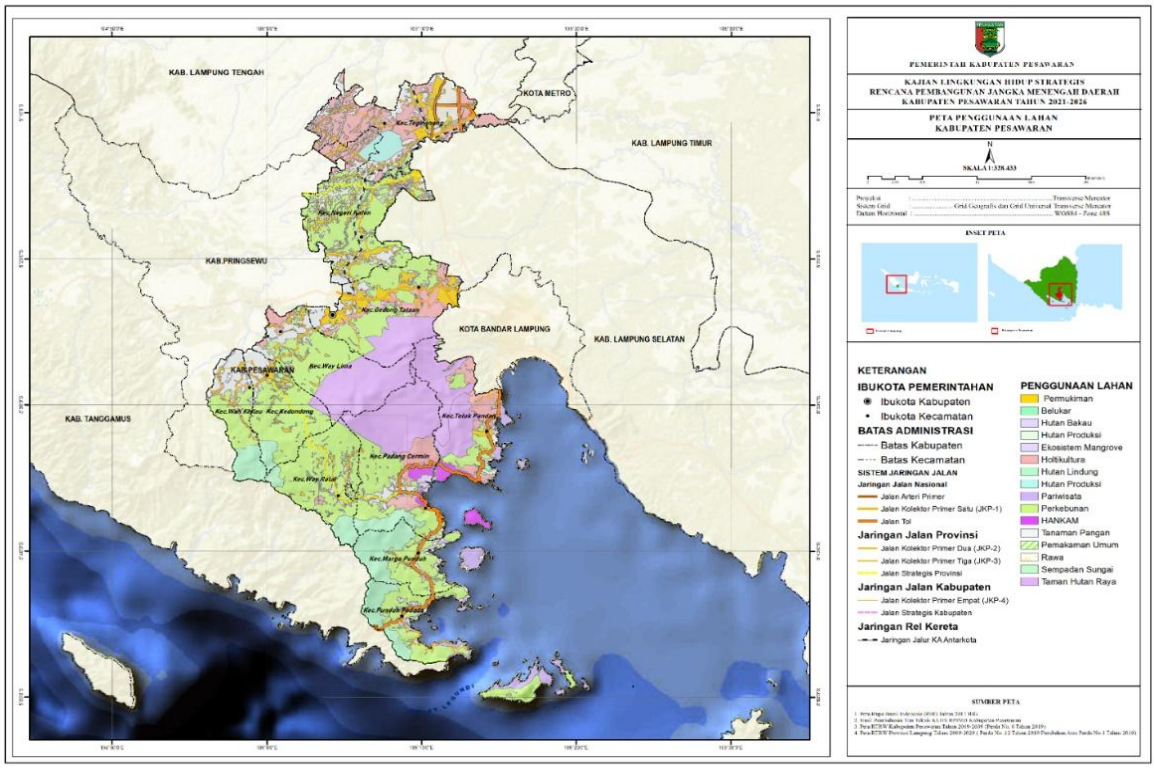
Aspek penting lainnya yang perlu diketahui dan digunakan sebagai bahan kajian adalah pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Hal ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran pada dasarnya masih didominasi oleh hutan, perkebunan, sawah dan semak belukar dengan masing-masing persentase mencapai 45,70%; 27,91%; 9,27%; dan 7,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian masyarakat masih berada pada sektor primer pertanian dan perkebunan sehingga masih banyak potensi lahan untuk pengembangan wilayah terbangun yang dapat menggeser sektor perekonomian primer ke sekunder (industrialisasi) untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Adapun karakteristik penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Karakteristik Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (km^2)	Persentase (%)
1	Belukar	93,64	7,33
2	Hamparan Pasir Pantai	0,01	0,00
3	Hutan Bakau	6,96	0,54
4	Hutan Campuran	584,11	45,70
5	Ladang	21,40	1,67
6	Pelabuhan antar pulau	0,02	0,00
7	Pemakaman Umum	0,14	0,01
8	Perkebunan	356,76	27,91
9	Permukiman	77,81	6,09
10	Rawa	0,01	0,00
11	Sawah	125,04	9,78
12	Sungai	2,62	0,20
13	Tambak Ikan	9,25	0,72
14	Tanah Kosong	0,31	0,02
15	Waduk	0,13	0,01
	Jumlah	**1.279,60**	

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039, diolah dari data CSRT Spot 6 LAPAN

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

2.1.1.7 Risiko Bencana Alam

Wilayah Kabupaten Pesawaran memiliki risiko bencana alam berupa rawan banjir, rawan gerakan tanah, rawan tsunami dan rawan gempa bumi. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran merupakan daerah rawan gempa bumi dengan skala MMI yang beragam dari IV hingga VIII. Untuk daerah dengan risiko bencana alam rawan banjir berada pada wilayah barat menuju selatan Kabupaten Pesawaran yakni di Kecamatan Kedondong, Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, Way Khilau, Way Lima dan Way Ratai. Daerah dengan risiko bencana alam rawan gerakan tanah berada pada wilayah yang juga memiliki risiko bencana alam rawan banjir dan pada wilayah pegunungan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya pada Kecamatan Teluk Pandan, Kedondong, Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, Way Khilau, dan Way Ratai. Selanjutnya untuk wilayah dengan risiko bencana alam rawan tsunami berada pada daerah pesisir dengan tingkat kerawanan yang tinggi pada Kecamatan Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, dan Teluk Pandan.

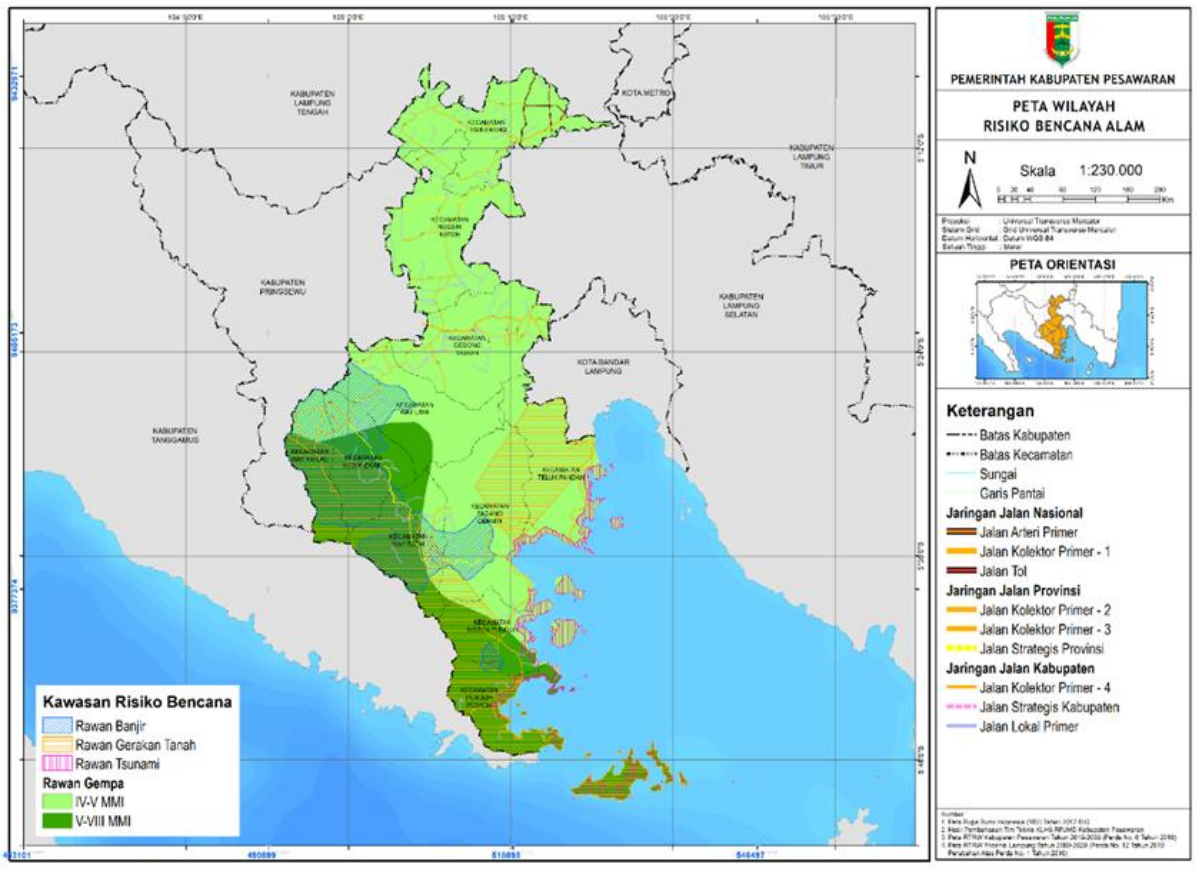
Tabel 2.6 Risiko Bencana Alam

No	Kecamatan	Rawan Banjir	Rawan Gerakan Tanah	Rawan Tsunami	Rawan Gempa Bumi
1	Gedong Tataan	-	-	-	Skala IV-V MMI
2	Kedondong	Ada	Ada	-	Skala V-VIII MMI

No	Kecamatan	Rawan Banjir	Rawan Gerakan Tanah	Rawan Tsunami	Rawan Gempa Bumi
3	Marga Punduh	Ada	Ada	Ada	Skala V-VIII MMI
4	Negeri Katon	-	-	-	Skala IV-V MMI
5	Padang Cermin	Ada	Ada	Ada	Skala IV-V MMI
6	Punduh Pedada	Ada	Ada	Ada	Skala IV-V MMI
7	Tegineneng	-	-	-	Skala IV-V MMI
8	Teluk Pandan	-	Ada	Ada	Skala IV-V MMI
9	Way Khilau	Ada	Ada	-	Skala V-VIII MMI
10	Way Lima	Ada	-	-	Skala IV-V MMI
11	Way Ratai	Ada	Ada	-	Skala V-VIII MMI

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Alam



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Kabupaten Pesawaran termasuk dalam wilayah di Provinsi Lampung, Indonesia yang memiliki berbagai potensi bencana, baik alam maupun non alam, seperti gempa bumi, longsor, banjir, serta pembakaran lahan dan hutan. Karakteristik fisik Kabupaten Pesawaran memiliki bentuk yang bervariasi. Sebagaimana wilayah lainnya, pengaruh kondisi alam dan iklim, serta keanekaragaman

penduduk dan budaya menyebabkan timbulnya risiko bencana yang bervariasi pula. Risiko bencana yang dihasilkan sudah seharusnya ditangani semaksimal mungkin. Adapun indeks risiko bencana di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Nilai Indeks Risiko Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2025

Kabupaten	2020	2021	2022	2024	2024	2025
Pesawaran	181,60	181,60	179,08	174,04	167,66	176,77

**Catatan: nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan*
Sumber: Inarisk BNPB, 2026

Berdasarkan tabel nilai indeks risiko tersebut diketahui bahwasannya indeks risiko bencana di Kabupaten Pesawaran cenderung menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2025 dengan nilai awal sebesar 181,60. Sejak 2022 capaian indeks risiko bencana terus mengalami penurunan hingga tahun 2025 pada angka terendah yakni 167,66 dan pada akhir periode berada pada posisi 176,77. Nilai tersebut masuk kategori kelas risiko bencana tinggi dan menjadikan Pesawaran menduduki peringkat ketiga sebagai kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko bencana tertinggi di Provinsi Lampung, menyusul Lampung Selatan dengan risiko tertinggi (205,36) dan Pesisir Barat (199,54). Adapun detail risiko bencana untuk setiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8 Nilai Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2025 Berdasarkan Jenis Bencana

JENIS BENCANA	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Banjir	36.00	36.00	30.44	27.12	25.90	13.02
Gempa Bumi	21.60	21.60	18.27	16.27	15.54	17.18
Tsunami	14.40	14.40	12.18	10.85	10.36	17.18
Kebakaran Hutan	24.00	24.00	20.30	18.08	17.27	6.51
Tanah Longsor	24.00	24.00	20.30	18.08	17.27	16.40
Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	24.00	24.00	20.30	18.08	17.27	17.18
Kekeringan	24.00	24.00	20.30	18.08	17.27	11.45
Cuaca Ekstrim	13.60	13.60	11.50	10.25	9.78	13.54

Sumber: BNPB, 2026

Berdasarkan data Indeks Risiko Kabupaten Pesawaran tahun 2020–2024 dari BNPB, terlihat tren penurunan risiko pada seluruh jenis bencana, meskipun tingkat ancamannya berbeda-beda. Banjir tercatat sebagai bencana dengan risiko tertinggi, meski menurun dari 36,00 pada 2020 menjadi 13,02 pada 2025, menunjukkan adanya upaya mitigasi yang cukup efektif. Gempa bumi, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim/abrasi, serta kekeringan

berada pada level risiko menengah dengan penurunan cukup signifikan hingga kisaran 15–17 pada 2025. Sementara itu, tsunami dan cuaca ekstrim menjadi bencana dengan risiko terendah, masing-masing turun hingga 17,18 dan 13,54 pada 2025. Secara umum, penurunan indeks risiko ini mencerminkan adanya perbaikan kapasitas mitigasi, pembangunan infrastruktur, serta kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Pesawaran, meskipun banjir tetap menjadi ancaman utama yang perlu diantisipasi.

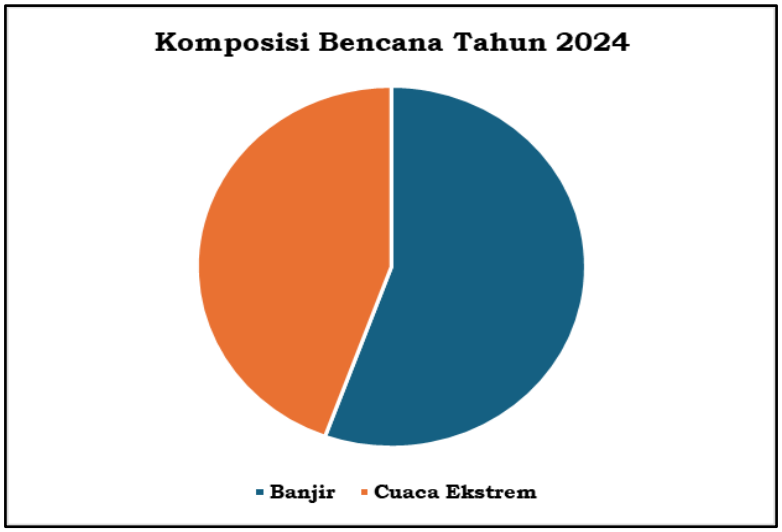
Gambar 2.7 Bencana Menurut Waktu di Kabupaten Pesawaran



Sumber: https://lampung.bps.go.id/, 2025

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwasannya intensitas bencana di Kabupaten Pesawaran berdasarkan kuantitasnya terjadi secara fluktuatif atau cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2023 hingga tahun 2024 intensitas bencana yang terjadi cenderung konstan terjadi sebanyak 9 kali dalam satu tahun, dengan jenis bencana yang terjadi adalah banjir dan cuaca ekstrem.

Gambar 2.8 Grafik Komposisi Bencana Tahun 2024



Sumber: https://lampung.bps.go.id/, 2025

Wilayah Kabupaten Pesawaran memiliki risiko bencana alam berupa rawan banjir, rawan gerakan tanah, rawan tsunami dan rawan gempa bumi. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran merupakan daerah rawan gempa bumi dengan skala MMI yang beragam dari IV hingga VIII.

Tabel 2.9 Luasan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesawaran Per Kecamatan

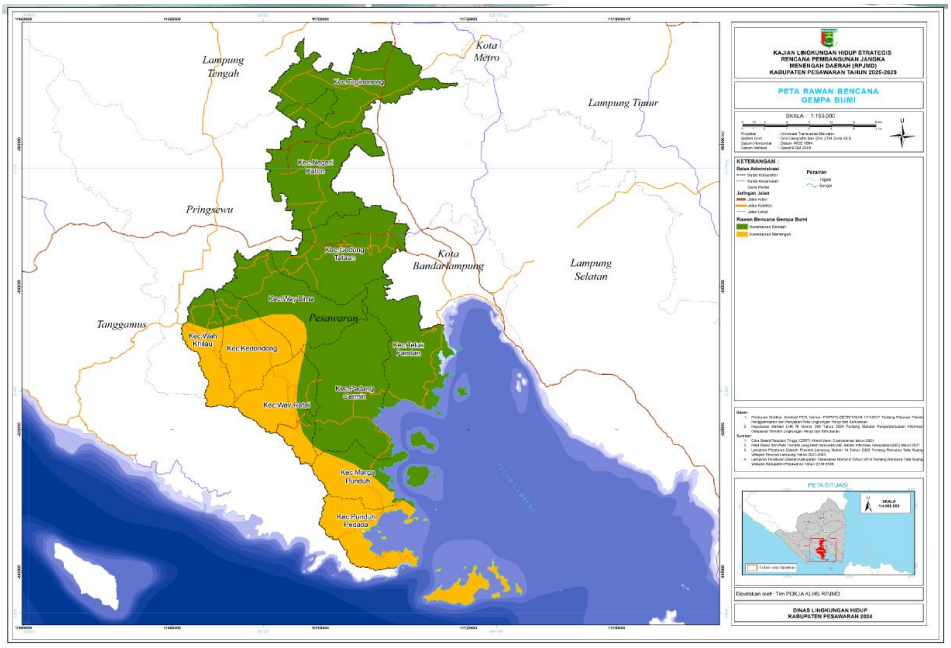
Kecamatan	Gempa Bumi (Ha)	Banjir (Ha)	Tanah Longsor (Ha)	Karhutla (Ha)	Tsunami (Ha)
Gedong Tataan	14,307.06	8,150.12	13,322.25	14,358.29	-
Kedondong	9,303.34	2,364.44	9,300.60	9,149.82	-
Marga Punduh	7,732.48	1,307.16	7,835.73	7,820.92	7,837.78
Negeri Katon	15,155.73	15,605.93	13,950.69	14,621.51	-
Padang Cermin	13,242.92	3,032.30	8,469.42	13,265.06	6,936.50
Punduh Pidada	9,121.75	1,105.42	9,283.11	9,412.91	1,443.12
Tegineneng	13,962.33	12,916.91	14,158.24	14,130.74	-
Teluk Pandan	14,130.05	2,195.44	14,158.24	14,316.39	
Way Khilau	7,126.50	2,999.79	7,210.07	7,202.00	-
Way Lima	10,890.70	4,223.28	7,702.34	9,399.29	-
Way Ratai	10,996.96	555.76	8,134.95	10,124.39	

Sumber : BPBD Kabupaten Pesawaran, 2025

Upaya mitigasi pada saat bencana gempa bumi terjadi adalah dengan melakukan jangan berdiri di dekat tiang, pohon atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh, jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan, gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan, dan ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

Upaya mitigasi setelah bencana gempa bumi terjadi adalah dengan melakukan waspada terhadap gempa bumi susulan, ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi, jika di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor, dan jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas.

Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pesawaran



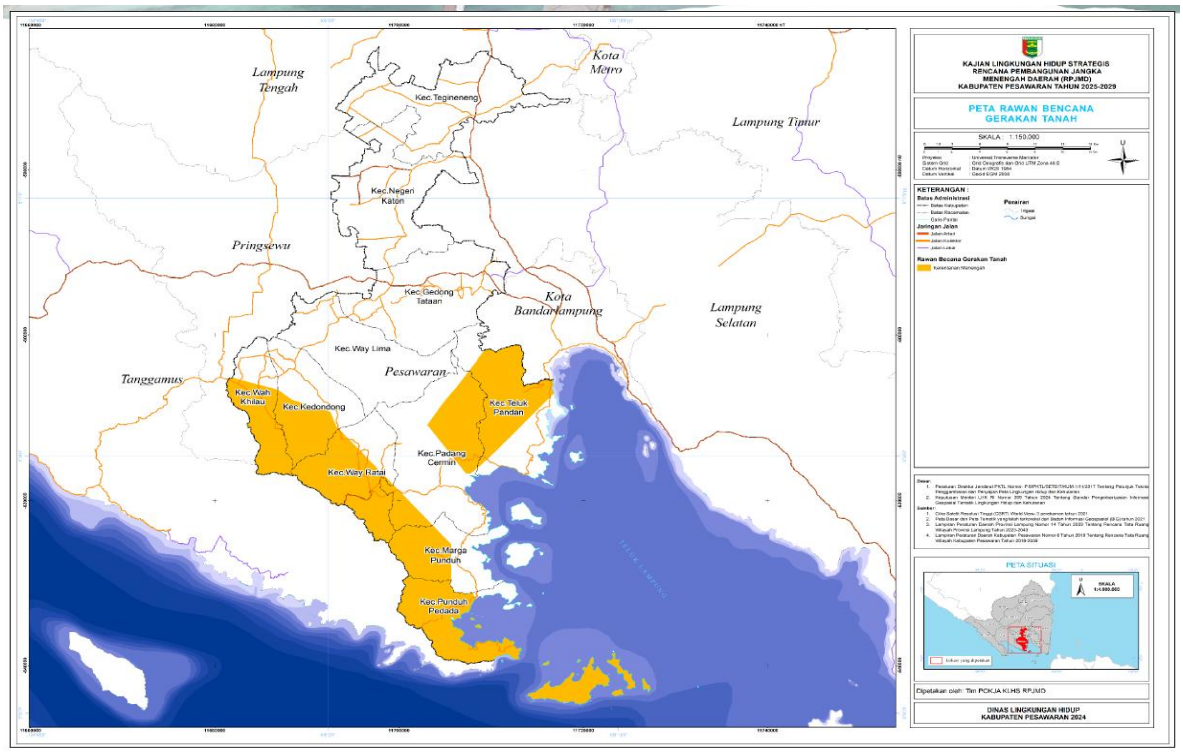
Sumber: InaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Tanah longsor di Kabupaten Pesawaran banyak dijumpai pada bagian morfologi perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng yang terjal, serta beberapa kawasan yang dekat dengan sungai. Secara geologi biasanya tanah longsor terjadi pada batu-batuan vulkanik yang bersifat lepas atau yang telah mengalami pelapukan dengan banyak adanya retakan/rekahan. Kondisi tersebut apabila terletak di atas lapisan yang kedap air (lapisan tergelincir) pada saat hujan turun dengan curah hujan yang tinggi dapat dipastikan longsor. Dapat diketahui bahwa daerah yang memiliki risiko tinggi terjadi tanah longsor berada pada bagian barat daya Kabupaten Pesawaran yang berbatas langsung dengan Kabupaten Pesisir Barat. Terdapat tiga lokasi yang masuk pada daerah risiko tinggi pada bagian barat daya yaitu Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Kedondong, dan Kecamatan Way Khilau. Zona risiko tinggi juga muncul pada daerah tengah Kabupaten Pesawaran yaitu pada Kecamatan Way Lima, Kecamatan Kedondong, dan Kecamatan Way Ratai. Indeks risiko tinggi juga muncul pada Kecamatan Gedong Tataan bagian tenggara. Indeks risiko sedang muncul pada sebagian kecamatan dengan dominan pada Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Tegineneng.

Berdasarkan peta pada gambar dibawah terlihat bahwasannya terdapat dua jenis zona kerentanan terhadap bencana tanah longsor, yaitu zona kerentanan gerak tanah menengah dan zona kerentanan gerak tanah rendah. Secara garis besar, zona kerentanan gerak tanah menengah terbagi menjadi dua sebaran zona yang berada di sebelah barat hingga hingga selatan Kabupaten Pesawaran, serta di sebelah timur Kabupaten Pesawaran. Adapun kecamatan yang berada pada zona kerentanan gerakan tanah longsong menengah adalah seluruh

Kecamatan Punduh Pidada, serta sebagian Kecamatan Marga Punduh, Padang Cermin, Way Ratai, Kedondong, Way Khilau, dan Teluk Pandan.

Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Pesawaran



Sumber: InaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

a. Bencana Tsunami

Tsunami adalah bencana sekunder yang terjadi akibat gempa bumi di dalam laut. Gempa bumi memicu kenaikan gelombang air laut yang bergerak dengan kecepatan tinggi (Sunarto, 2010). Menurut catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012. Berdasarkan sumber pembangkitnya diketahui bahwa 90% dari tsunami tersebut disebabkan oleh aktivitas gempa bumi tektonik, 9% akibat aktivitas vulkanik dan 1% oleh tanah longsor yang terjadi dalam tubuh air (danau atau laut) maupun longsoran dari darat yang masuk ke dalam tubuh air (BNPB, 2012).

Tsunami arti harfiah: "ombak besar di pelabuhan") atau semong[1] adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil (umumnya 30–60 cm) sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa (terutama pada tsunami-tsunami besar), tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15–30 meter, menyebabkan banjir dengan

kecepatan arus hingga 90 km/jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar.

Dampak bencana tsunami yang bersifat destruktif sangat merugikan berbagai aspek kehidupan. Tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik Anak Krakatau menyebabkan terjadinya longsor material Anak Krakatau dan masuk kedalam laut. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan di Kabupaten Serang dan Pandeglang, Provinsi Banten serta Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dikutip dari tempo.co, Vindry Florentin (2019) menulis dalam situsnya www.nasional.tempo.com, BNPB menyatakan bahwa terdapat sekitar 437 korban meninggal, 1.459 korban luka dan 10 korban hilang.

Selat Sunda merupakan wilayah tsunamigenik di Indonesia. Beberapa peristiwa alam yang terjadi dapat berpotensi menyebabkan tsunami. Salah satu peristiwa tersebut adalah gempa bumi yang berkaitan dengan zona subduksi Sunda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN), gempa bumi maksimum di Megathrust Selat Sunda dapat mencapai 8,2- 8,7 Mw. Selain itu, erupsi gunungapi bawah laut (Gunung api Anak Krakatau), longsoran di kawasan pantai (Teluk Semangko dan Teluk Lampung), atau longsoran bawah laut (submarine landslide) di perbatasan antara perairan Selat Sunda dengan Laut Jawa menjadi faktor pemicu terjadinya tsunami. Dasar laut Selat Sunda merupakan daerah labil karena berkaitan dengan struktur terban Semangko di antara Tinggian Semangko, Tinggian Tabuan, Tinggian Tanggang dan Tinggian Krakatau. Apabila terdapat guncangan akibat gempa bumi, daerah ini berpotensi mengalami longsor dan memicu terjadinya tsunami (Yudhicara dan K. Budiono, 2008).

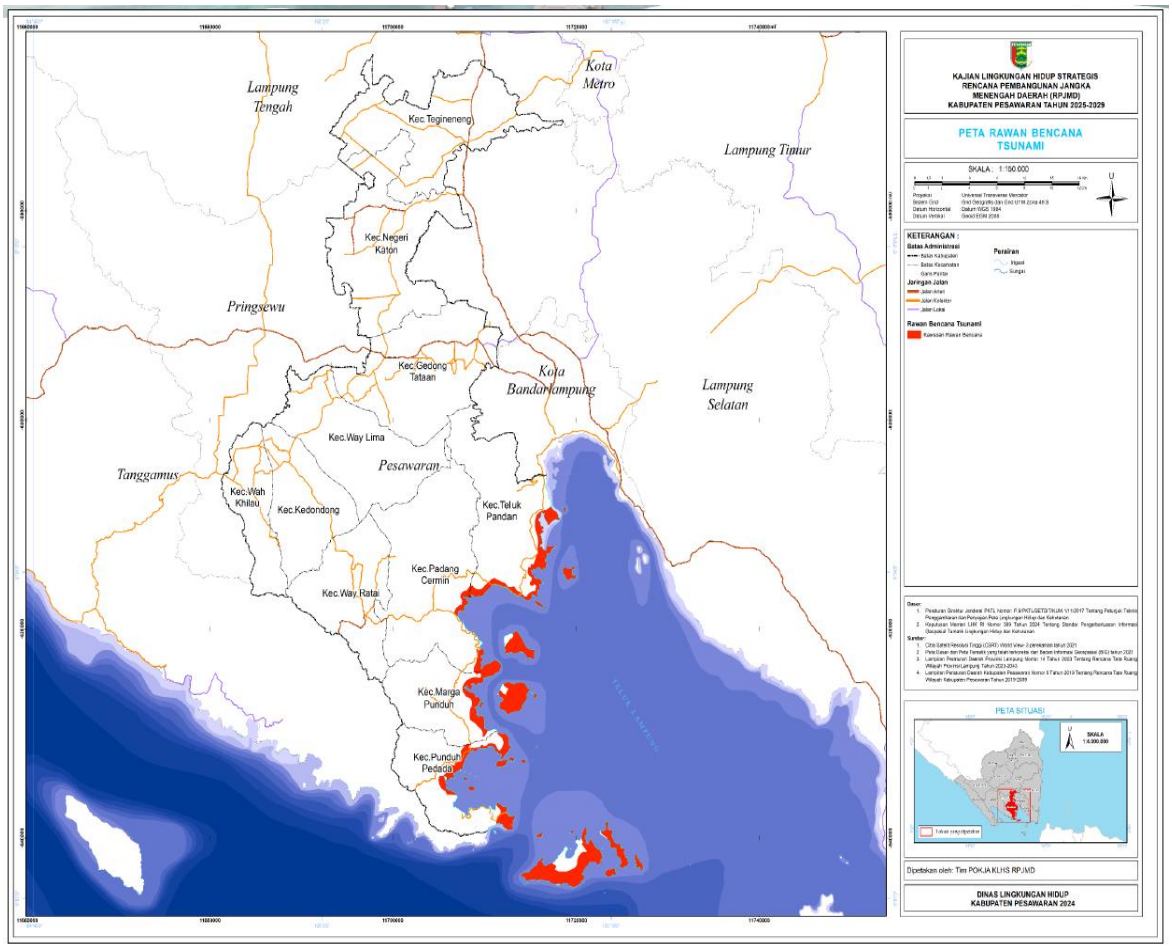
Berdasarkan Peta Rawan Bencana Tsunami terlihat bahwasannya daerah rawan tsunami di Kabupaten Pesawaran berada hampir diseluruh pinggiran kawasan pesisir. Risiko tsunami di Kabupaten Pesawaran terletak di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Marga Punduh, dan Kecamatan Punduh Pidada. Risiko tsunami di Kabupaten Pesawaran terbagi menjadi dua jenis yaitu pada kelas sedang dan kelas rendah.

Kejadian gempa sebagai bencana primer yang menyebabkan tsunami memang terus secara rutin terjadi setiap tahunnya dengan magnitude yang beragam. Akan tetapi, sebagian besar gempa yang terjadi tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Kejadian besar dimana gempa memicu terjadinya tsunami adalah pada tahun 2018. Kejadian tsunami pada tahun ini mengakibatkan kerugian nyawa dan materi di Kabupaten Pesawaran,

dimana 1 orang meninggal dunia, 1 orang luka- luka, 231 orang mengungsi, 53-unit rumah rusak berat, 81-unit rumah rusak ringan, dan 14-unit perahu nelayan rusak.

Upaya mitigasi pada saat bencana tsunami terjadi adalah dengan melakukan jika berada di sekitar pantai dan terasa guncangan gempa bumi dan disusul air laut surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut terlihat, segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi (perbukitan atau bangunan tinggi) dan juga bisa mengikuti rute evakuasi yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Pesawaran



Sumber: InaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

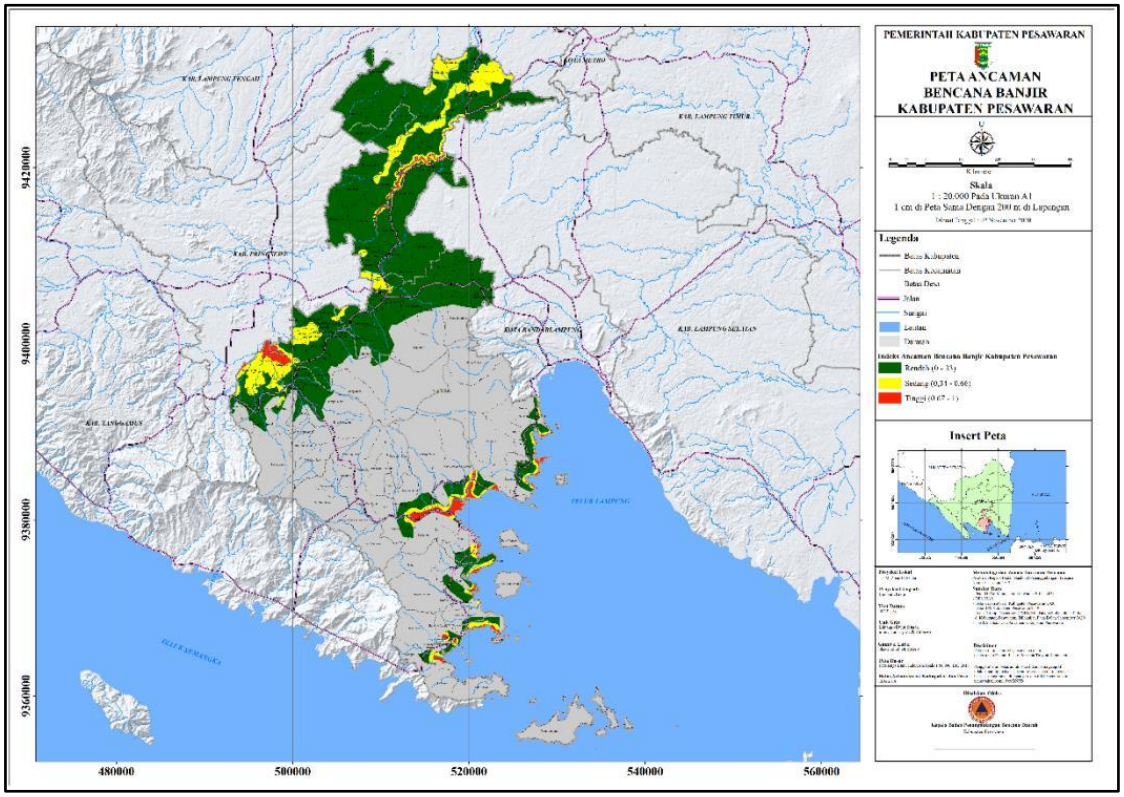
b. Bencana Banjir

Banjir merupakan suatu keadaan dimana wilayah yang dalam keadaan normal kering menjadi tergenang air. Jika dikaitkan dengan konteks siklus hidrologi, banjir dapat diartikan sebagai limpasan air permukaan (Chow dkk., 1988). Banjir dapat berupa limpasan permukaan yang melebihi kapasitas saluran pembuangan sehingga meluap ke daerah sekitarnya maupun berupa air hujan yang tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga menggenangi suatu wilayah (Asdak, 1995). Banjir merupakan fenomena alam yang terjadi pada saat hujan ekstrem. Banjir terjadi karena volume air yang

mengalir tidak dapat ditampung dan melimpah ke sisi-sisi saluran yang mengakibatkan genangan. Banjir merupakan suatu proses alam, namun dalam kondisi saat ini, faktor-faktor penyebab banjir dapat dipicu oleh kegiatan manusia seperti alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian serta penebangan pohon untuk keperluan produksi.

Banjir dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu banjir bandang dan banjir genangan. Banjir bandang adalah luapan air yang datang cepat dengan debit yang sangat besar yang biasanya membawa material dari hulu dan surut dengan waktu yang cepat. Banjir genangan adalah banjir yang menimbulkan genangan di sekitar saluran air maupun sungai yang surut dengan waktu yang lambat.

Gambar 2.12 Peta Rawan Banjir Kabupaten Pesawaran

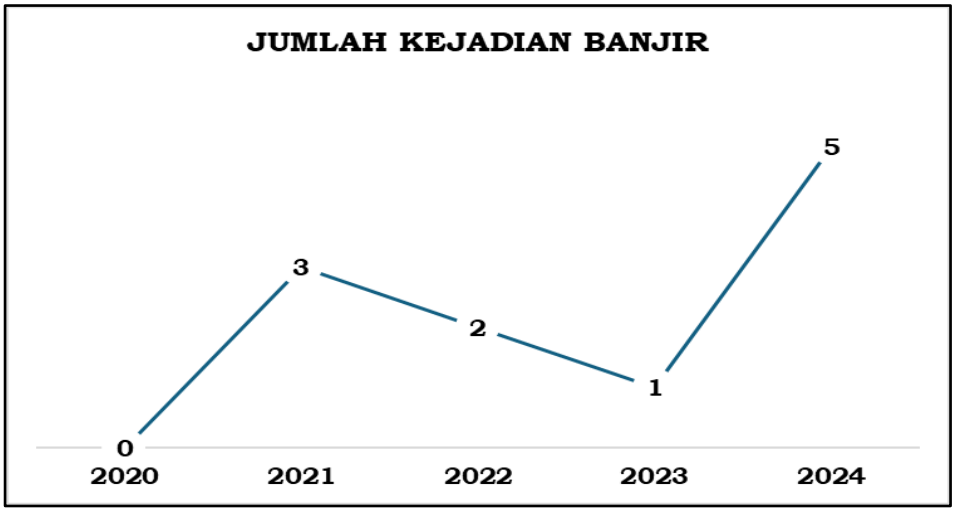


Sumber: BPBD Kabupaten Pesawaran, 2025.

Peta yang ditunjukkan pada peta diatas merupakan gambaran spasial sebaran potensi ancaman banjir di Kabupaten Pesawaran. Penentuan genangan ancaman banjir Kabupaten Pesawaran menggunakan pemodelan genangan banjir dengan dasar data DEMNAS. Daerah genangan didapatkan dengan menentukan parameter keberadaan sungai yang data sungai didapatkan dari data RBI Kabupaten Pesawaran. Daerah yang terlalui sungai dominan memiliki tingkat ancaman yang beragam dari tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Tingkatan yang didapatkan didasarkan dengan kedekatan dengan bibir sungai dan tinggi daerah. Berikut merupakan

statistik kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Pesawaran dalam beberapa tahun terakhir:

Gambar 2.13 Grafik Intensitas Bencana Banjir Tahun 2020-2024



Sumber: BPBD Kab. Pesawaran, 2025

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwasannya bencana terjadi di setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2020. Kejadian banjir pada tahun 2021, 2022, dan 2023 terjadi kejadian benjir yang fluktuatif, sedangkan kejadian banjir pada Tahun 2024 mencapai hingga 5 kasus banjir. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwasannya terdapat sejumlah persoalan yang mengakibatkan banjir, selain dari pendangkalan sungai dan curah hujan yang tinggi, kondisi aliran sungai yang juga berkelok, sehingga perlu dilakukan rekayasa untuk mengatasinya. Kemudian, masih terdapatnya permukiman warga yang berada di DAS (Daerah Aliran Sungai) juga menyebabkan sungai tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, serta adanya penyumbatan di beberapa jembatan juga pada akhirnya bermuara kepada terjadinya banjir.

Salah satu kejadian banjir yang dalam waktu dekat terakhir ini terjadi dan cukup menarik perhatian publik adalah banjir yang terjadi pada bulan Desember Tahun 202, yang mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran melaporkan sebanyak 338 unit rumah yang terdampak, sedangkan tempat ibadah rusak ringan 1 unit. Banjir terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan di Kecamatan Kedongdong, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Way Khilau. Tidak ada laporan korban jiwa maupun warga mengungsi akibat kejadian ini.

c. Banjir ROB

Banjir rob adalah banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Banjir rob secara

khusus diartikan sebagai banjir yang diakibatkan oleh air laut yang menggenangi daratan yang lebih rendah, tetapi sebenarnya tidak terbatas pada banjir yang berakibat oleh air laut melainkan juga curah hujan tinggi di daratan yang menyebabkan air melambat mengalir ke laut yang hasilnya akan mengakibatkan air tertahan dalam waktu yang relatif lama di daratan pesisir pantai. Fenomena ini juga diperparah oleh kondisi pasang naik air laut di waktu-waktu tertentu. Permasalahan banjir rob merupakan permasalahan serius yang dihadapi beberapa wilayah pesisir di Indonesia salah satunya adalah wilayah pesisir pada Kabupaten Pesawaran.

Faktor utama yang mengakibatkan terjadinya banjir rob adalah kenaikan permukaan air laut, penurunan muka tanah dan abrasi pantai dalam hal ini di daratan pesisir. Penurunan muka tanah merupakan faktor yang meningkatkan intensitas banjir rob di beberapa wilayah pesisir pantai Kabupaten Pesawaran. Berikut ini adalah daftar bencana banjir ROB yang ada di Kabupaten Pesawaran:

Tabel 2.10 Data Bencana Banjir ROB yang Telah Terjadi

Lokasi Bencana	Waktu Kejadian	Jenis Kerusakan
Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan	2020-05-25	rumah terendam setinggi 25 cm
Desa Durian Kecamatan Padang Cermin	2020-05-25	rumah terendam setinggi 30 cm
Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan	2020-05-25	rumah terendam setinggi 30 cm
Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang kecamatan Teluk pandan	2021-11-06	rumah warga yang terdampak 30 rumah
Desa Sidodai Kecamatan Teluk Pandan	2021-11-06	rumah warga yang terdampak 24 rumah

Sumber : Sistem Informasi Bencana - Kabupaten Pesawaran

d. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat kejadian terbakarnya kawasan hutan/lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran hutan dan lahan seringkali tidak terkendali dan bila ini terjadi maka api akan melahap apa saja dihadapannya mengikuti arah angin. Kebalikannya, penyebaran api kebakaran di lahan gambut justru tidak mengikuti arah angin. Titik api justru berada di kedalam lebih dari 2 meter. Pada kawasan gambut rambatan api justru berada di kedalaman lebih dari 2 meter. Pada kawasan gambut rambatan api akan meluas ke segala arah dan sulit untuk diperkirakan penyebarannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan

asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara.

Kebakaran hutan merupakan bencana yang diakibatkan oleh perubahan pemanfaatan lahan dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia seperti pembukaan lahan. Kebakaran hutan diperparah lagi oleh banyaknya pengusaha/ pemegang hak penguasaan hutan yang melakukan penebangan kayu tanpa mengindahkan peraturan dan lingkungan.

Kebakaran hutan menimbulkan dampak negatif cukup besar dalam hal kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunnya kesehatan masyarakat dan terganggunya transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara. Kebakaran hutan mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian ekonomis dan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak jarang juga mengakibatkan bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas. Mengacu pada data historis pada website Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan bencana yang rutin terjadi setiap tahunnya. Akan tetapi, terdapat kejadian di Tahun 2019 dimana kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi mencapai 20 kejadian.

e. Bencana Angin Puting Beliung

Angin Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Bencana angin puting beliung sering terjadi di pada musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Namun, tidak semua awan cumulonimbus menyebabkan pembentukan angin puting beliung. Angin puting beliung terjadi karena adanya gesekan antara arus udara yang naik dan turun. Terdapat fase atau tahapan dalam proses pembentukan angin puting beliung, yaitu fase tumbuh dan fase dewasa. Pada fase tumbuh atau fase pertama ini, terdapat arus udara di dalam awan dengan tekanan yang cukup kuat, naik ke atas. Di fase ini, titik air masih tertahan oleh arus udara

yang terus bergerak menuju puncak awan. Pada Fase Dewasa, mulai terjadi hujan karena arus udara tidak lagi menahan titik-titik air. Hujan yang turun menyebabkan gesekan antara arus udara yang naik, dan udara yang turun. Gesekan tersebut kemudian membentuk pusaran yang semakin lama, semakin cepat. Berikut ini adalah daftar bencana banjir ROB yang telah terjadi di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.11 Daftar Bencan Angin Puting Beliung yang Telah Terjadi

Lokasi Bencana	Waktu Kejadian	Jenis Kerusakan
Dusun 6 Desa Harapan Jaya Kecamatan Kedondong	2020-06-22	4 unit rumah rusak berat, 15 unit rumah rusak ringan
Desa Cimanuk Kec Waylima	2021-02-08	9 unit rumah rusak ringan dan 3 rumah rusak berat
Pantai Klara Kec Padang Cermin	2021-02-08	Tempat wisata porak poranda
Kecamatan Punduh Pidada	2021-02-10	10 unit rumah tertimpa pohon
Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau	2021-10-24	1 Dusun, Dusun Waringin, 6 rumah rusak ringan
Desa Mada Jaya Kecamatan Way Khilau	2021-10-24	2 Dusun, 12 rumah terdampak, 6 rumah di Dusun kampung masjid, 6 rumah di Dusun kebon pisang
Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng	2021-11-21	5 rumah rusak ringan
Dusun Pekon Jambu Desa Kedondong Kecamatan Kedondong	2021-12-10	6 Rumah Warga Rusak Ringan
Kecamatan Way Lima, Desa Way Layap	2025-05-23	Gedung DPRD Terdampak
Kecamatan Way Lima, Desa Gedong Dalem, Way Harong dan Suka Mandi	2025-05-28	2 rumah terdampak di gedong dalem, 3 rumah di way harong, 2 rumah di suka mandi
Kecamatan Way Lima, Desa Batu Mandi dan Gedong Dalem	2025-05-29	1 rumah terdampak di Batu mandi dan 1 rumah di Gedong dalom

Sumber : Sistem Informasi Bencana - Kabupaten Pesawaran

2.1.1.8 Ketahanan Daerah

Selanjutnya pada konteks ketahanan daerah yang diukur melalui indeks ketahanan daerah yang merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRBI. Semakin tinggi nilai IKD, makin tinggi pula kapasitas yang dimiliki sebuah daerah dan otomatis menekan skor IRBI.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan

penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. IRBI ini diperoleh sebagai hasil analisa risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari suatu bahaya berdasarkan analisa bahaya, kerentanan dan kapasitas dari suatu daerah. Indeks Risiko Bencana ini memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) yang ada pada suatu daerah.

Kabupaten Pesawaran memiliki skor IKD tahun 2022 sebesar 0,38 berkatagori rendah dan IRBI tahun 2022 sebesar 173,19 yang berkatagori tinggi sedangkan IKD tahun 2023 sebesar 0,43 berkatagori sedang dan IRBI tahun 2023 sebesar 162,28. Hal ini menunjukan bahwa IKD Kabupaten Pesawaran cenderung mengalalami kenaikan 0,5 sedangkan IRBI Kabupaten Pesawaran mengalami penurunan sebesar 10,91 dari tahun sebelumnya. Dengan adanya IRBI Kabupaten Pesawaran mengalami penurunan dan IKD mengalami kenaikan menandakan adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran semakin meningkat.

2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah meliputi aspek letak wilayah (administratif dan geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan maupun kondisi geografi lainnya.

Gambar 2.14 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber: Bappeda, 2025

Potensi pngembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039. Berdasarkan Perda dimaksud Kawasan Budidaya Kabupaten Pesawaran terdiri atas:

1) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan produksi Register 18 Tangkit Titi Bungur ditetapkan seluas kurang lebih 1.350 hektar berada di Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng.

2) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan. Kawasan tanaman pangan ditetapkan seluas lebih dari sama dengan13.318 hektar yang tersebar di Kecamatan Kedondong, Punduh Pedada, Marga Punduh, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Way Khilau, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, dan Tegineneng.Kawasan hortikultura ditetapkan seluas kurang lebih 13.849 hektar tersebar diKecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai,Marga Punduh, dan Punduh Pedada. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 13.847 hektar yang tersebar pada peruntukkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan perkebunan ditetapkan seluas kurang lebih 47.414 hektar tersebardiKecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, danPunduhPedada.

3) Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budi daya, dan sarana penunjang perikanan. Kawasan perikanan tangkap berada di wilayah perairan Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh dan Punduh Pedada.Kawasan perikanan budi daya ditetapkan seluas kurang lebih 703 hektar yang tersebar diKecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh,dan Punduh Pedada. Adapun sarana untuk menunjang kegiatan perikanan berupa pelabuhan perikanan yang terdiri dari

pelabuhan perikanan Durian dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Kecamatan Padang Cermin.

4) Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi terdiri dari kawasan pertambangan mineral dan kawasan panas bumi. Kawasan pertambangan mineral meliputi:

a) Kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh danPunduh Pedada;
b) Kawasan pertambangan mineral bukan logamberada di Kecamatan Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada; dan
c) Kawasan pertambangan batuanberada di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada.

Adapun kawasan panas bumi sebagai potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berada di Kecamatan Way Ratai, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin.

5) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan industridan sentra industri kecil dan menengah.Kawasan industri ditetapkan seluas kurang lebih 1.341 hektar yang berada di Kecamatan Tegineneng dan Teluk Pandan. Sedangkan sentra industri kecil dan menengah dikembangkan diseluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

6) Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata ditetapkan seluas kurang 2.193 hektar yang meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada dengan daya tarik wisata berupa wisata alam pesisir pantai, laut, air terjun, perbukitan, dan wisata buatan.

7) Kawasan Permukiman

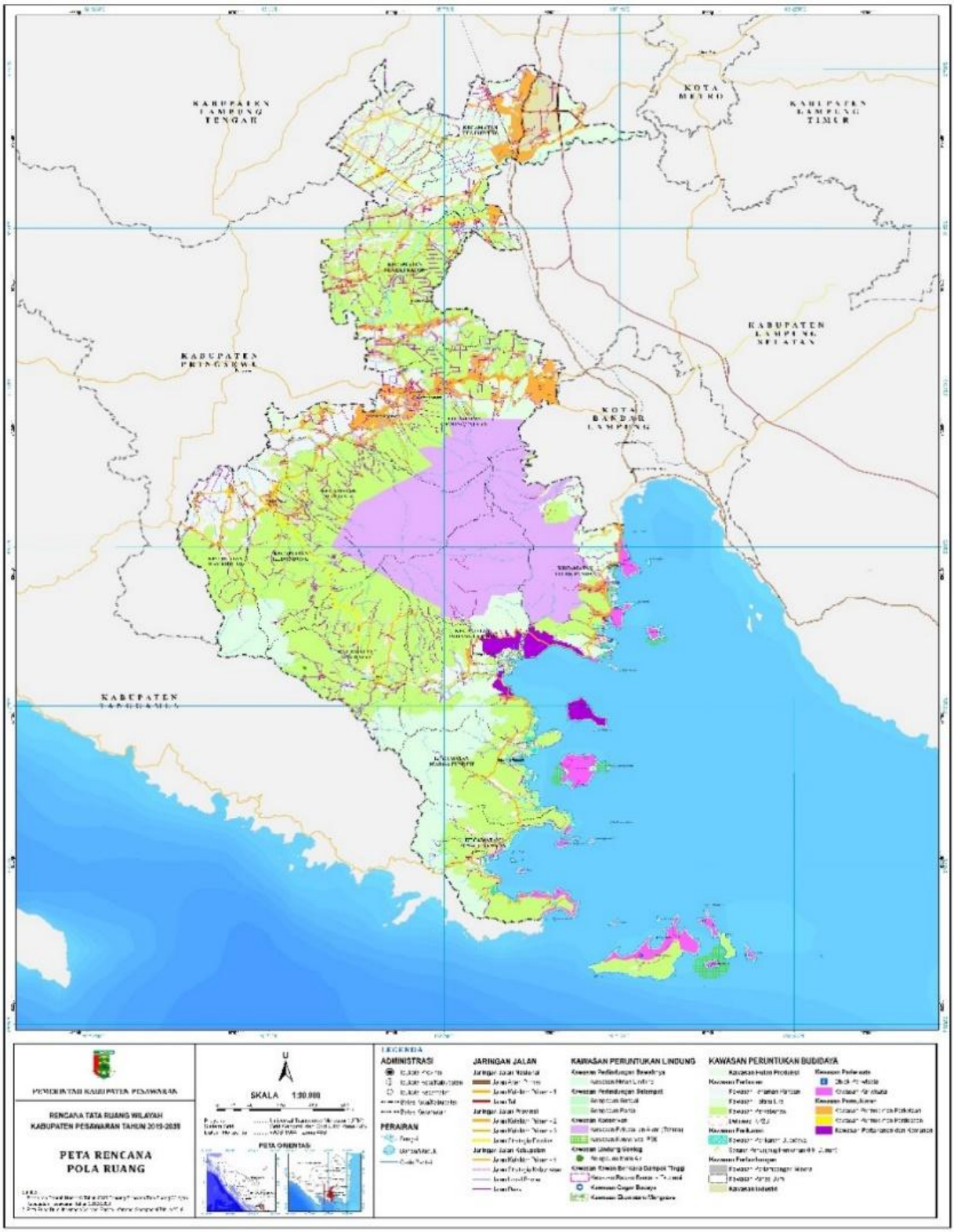
Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan pemukiman perkotaan ditetapkan seluas lebih kurang 7.758 hektar tersebar di pusat-pusat kegiatan di Kecamatan Gedong Tataan, Tegineneng, Negeri Katon, Padang Cermin, Teluk Pandan, Kedondong, Way Lima, danWay Ratai. Sedangkan untuk kawasan pemukiman perdesaan ditetapkan seluas lebih kurang 3.147 hektar yang tersebar diKecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada.

8) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

a) Kawasan Terpadu Kepentingan Pertahanan dan Keamanan ditetapkan seluas kurang lebih 1.474 hektar berada di Kecamatan Teluk Pandan dan Padang Cermin;
b) Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir di Kecamatan Padang Cermin;
c) Kepolisian Resor (Polres)berada di Kecamatan Gedong Tataan;
d) Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Gedong Tataan;
e) Kompi Senapan A Batalyon 143 di Kecamatan Gedong Tataan;
f) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan
g) Kepolisian Sektor (Polsek)berada di seluruh kecamatan.

Gambar 2.15 Peta Rencana Pola Ruang Tahun 2019-2039



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

2.1.1.10 Potensi Unggulan Daerah

1. Kawasan Pertanian dan Perkebunan

Dalam sektor pertanian terbagi menjadi dua, yaitu produksi tanaman hortikultura dan produksi tanaman pangan. Sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian yang tangguh, yang

mampu mendukung terciptanya struktur ekonomi yang seimbang serta meningkatkan kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai tukar petani.

1) Tanaman Pangan

Komoditas di sektor pertanian khususnya tanaman pangan di Kabupaten Pesawaran terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu. Untuk produksi komoditi pertanian di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Luas Panen Dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Pesawaran Tahun 2025

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (ton/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi	30.348,41	5,18	157.353,95
2	Jagung	10.143,10	7,87	79.844,32
3	Kedelai	-	-	-
4	Ubi Kayu	2.105,10	33,44	70.386,33
5	Ubi Jalar	73,20	24,99	1.828,96
6	Kacang Tanah	75,60	1,26	95,09
7	Kacang Hijau	47,60	1,11	52,60

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pesawaran, 2026

2) Tanaman Hortikultura

Komoditas di sektor pertanian khususnya tanaman hortikultura selama semusim dari bulan Januari – September di Kabupaten Pesawaran terdiri dari bawang daun, bawang (bawang merah dan bawang putih), kembang kol, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel, bayam, buncis, cabai (cabai besar/TW/teropong, cabai keriting, dan cabai rawit), jamur (jamur tiram, jamur merang, jamur lainnya), kacang panjang, kangkung, mentimun, labu siam, paprika, terong, tomat, melon, semangka, dan stroberi. Untuk produksi komoditi pertanian di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Luas Panen Dan Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Semusim Kabupaten Pesawaran Tahun 2025

No	Komoditi	Hasil Produksi yang Dibuat	Total	
			Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)
1	Bawang Daun	Daun segar	17.00	1,094.85
2	Bawang Merah	Umbi basah dengan daun (konde basah)	20.96	2,515.20
3	Bawang Putih	Umbi basah dengan daun (konde basah)	0.00	0.00
4	Bayam	Sayuran segar	54.34	2,907.82

No	Komoditi	Hasil Produksi yang Dibuat	Total	
			Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)
5	Buncis	Polong basah	22.00	1,530.00
6	Cabai Besar/ TW / Teropong	Buah segar	52.15	3,908.25
7	Cabai Keriting	Buah segar	85.52	6,011.40
8	Cabai Rawit	Buah segar	187.69	10,877.80
9	Jamur Lainnya	Sayuran segar	0.00	0.00
10	Jamur Merang	Sayuran segar	0.00	0.00
11	Jamur Tiram	Sayuran segar	0.50	0.18
12	Kacang Panjang	Polong basah	65.53	3,735.20
13	Kangkung	Sayuran segar	100.22	6,075.08
14	Kembang Kol	Sayuran segar	0.00	0.00
15	Kentang	Umbi basah	0.00	0.00
16	Kubis	Daun krop	0.00	0.00
17	Labu Siam	Buah segar	0.25	21.25
18	Melon	Buah segar	4.38	546.88
19	Mentimun	Buah segar	63.67	8,328.88
20	Paprika	Buah segar	0.00	0.00
21	Petsai/Sawi	Sayuran segar	50.83	3,365.25
22	Semangka	Buah segar	17.88	3,812.50
23	Stroberi	Buah segar	0.00	0.00
24	Terung	Buah segar	64.62	4,668.48
25	Tomat	Buah segar	71.13	5,792.16
26	Wortel	Umbi dengan daun	0.00	0.00

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Pesawaran, 2026

Perkebunan merupakan modal dasar yang cukup potensial di Kabupaten Pesawaran, sehingga pemanfaatannya harus dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistemnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kondisi sumber daya alam yang telah rusak diantaranya dengan program rehabilitasi serta program produktivitas usaha perkebunan melalui pengembangan tanaman perkebunan dan usaha agribisnis perkebunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Luas Areal Dan Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2025

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kakao	25.829	21.803,40
2	Kelapa	11.338	8.822,19
3	Kopi Robusta	2.504	1.267,04
4	Karet	1.089	1.079,39
5	Kelapa Sawit	489,34	1.115,49
6	Cengkeh	619	290,91
7	Lada	212,32	122,83
8	Pala	141	109,3
9	Tembakau	85	81,64

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
10	Pinang	29	9,55
11	Aren	59	19,44
12	Kemiri	24	17,15
13	Cabe Jamu	33	10,8

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran, 2026

Tanaman kakao, kelapa, dan kopi mendominasi sektor perkebunan di Kabupaten Pesawaran. Produksi dan luas areal tanaman perkebunan terbesar di Kabupaten Pesawaran berasal dari komoditi kakao dengan masing-masing sebesar 25.829-ton dan 21.803,40Ha. Sedangkan produksi dan luas areal tanaman perkebunan terkecil di Kabupaten Pesawaran berasal dari komoditi pinang dengan masing-masing sebesar 29 Ha dan 9,55 ton.

2. Kawasan Peternakan dan Perikanan

Dalam sektor peternakan terdiri dari beberapa jenis hewan ternak diantaranya sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, domba, babi, dan jenis unggas, yaitu ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Dari beberapa jenis ternak terbanyak yang ada di Kabupaten Pesawaran adalah kambing dan ayam pedaging. Untuk jumlah populasi ternak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Populasi dan Produksi Sektor Peternakan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2025

No	Hewan	Jumlah Ternak/Unggas	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (Kg)
	HEWAN TERNAK			
1	Sapi Perah	-	-	
2	Sapi Potong	21,527	338,433	
3	Kerbau	578	760	
4	Kuda	4	-	
5	Kambing	65,052	72,681	
6	Domba	4,145	3,979	
7	Babi	192	-	
	HEWAN UNGGAS			
8	Ayam Kampung	231,460	53,468	319,948
9	Ayam Petelur	721,920	264,441	5,653,604
10	Ayam Pedaging	6,675,938	18,025,038	-
11	Itik/Itik Manila	46,037	14,433	231,489

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran, 2026

Berdasarkan jumlah rumah tangga perikanan dan produksi perikanan yang ada di Kabupaten Pesawaran, sektor perikanan terbagi menjadi 3, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan produk olahan hasil perikanan. Untuk jumlah rumah tangga perikanan terbesar terdapat pada perikanan budidaya dan produksi terbanyak diperoleh dari perikanan air tangkap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Jumlah Produksi Sektor Perikanan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2025

BULAN	PERIKANAN TANGKAP (TON)	PERIKANAN BUDIDAYA (TON)
JANUARI	999,52	375.822
FEBRUARI	856,73	378.423
MARET	999,52	363.251
APRIL	1.142,31	378.947
MEI	1.285,10	360.345
JUNI	1.427,89	368.982
JULI	1.570,68	356.212
AGUSTUS	1.570,68	371.332
SEPTEMBER	1.427,89	341.245
OKTOBER	1.285,10	329.25
NOVEMBER	999,52	331.485
DESEMBER	713,94	347.054
TOTAL	**14.279**	**4.302.348**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, 2026

3. Potensi Pariwisata

Wisata alam di Kabupaten Pesawaran terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok wisata alam bahari dan non bahari. Dari segi jenis dan objek yang dimiliki, potensi wisata bahari Kabupaten Pesawaran sangat besar. Lebih dari 10 pulau (Pulau Legundi Besar, Legundi Kecil, Siuncal, Umang Umang, Pahawang, Tegal, Balak, Lunik dan Tanjung Putus) yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata, juga pantai di sepanjang Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada (Pantai Kelapa Rapet/Klara, Mutun dan lainnya). Potensi wisata itu belum dikembangkan secara optimal sehingga belum banyak menarik minat wisatawan asing maupun lokal.

Potensi wisata bawah laut Kabupaten Pesawaran adalah kawasan ekosistem terumbu karang yang terdapat hampir di setiap pulau kosong maupun pulau yang telah berpenghuni. Selain terumbu karang berbagai jenis ikan karang/ikan hias sangat menarik untuk dinikmati oleh wisatawan. Sedangkan potensi wisata alam non bahari yang banyak diminati di Kabupaten Pesawaran adalah lokasi air terjun. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran 2017-2031 destinasi wisata yang diprioritaskan dalam pengembangannya adalah Kawasan Strategis Pengembangan Wisata Daerah (KSPD), yang dibagi menjadi 6 kawasan strategis. Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai (Marina Teluk Ratai) dengan merencanakan dan merealisasikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata seluas 647 Ha di Kecamatan Teluk Pandan yang terdiri dari Blok Pantai Queen Artha seluas 29 Ha, Pulau Tangkil seluas 12 Ha, Blok Pantai Mutun seluas 253 Ha, Pulau Lahu 2 Ha, Blok Pantai Ringgung seluas 186 Ha, Pulau Tegal seluas 120 Ha, Blok Mangrove Ketapang seluas 18 Ha, dan Blok Mahitam seluas 27 Ha.

Terdapat 45 objek potensial di Kabupaten Pesawaran dengan jenis wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam unggulan ini bervariasi dari wisata alam pantai, air terjun, pegunungan, bukit, dan ekowisata alam (mangrove). Sedangkan wisata budaya di Kabupaten Pesawaran berupa rumah adat dan tempat ibadat. Adapun potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17 Sebaran Potensi Pariwisata Kabupaten Pesawaran

No	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Obyek Wisata	Daya Tarik
1	Padang Cermin	Air Terjun Sinar Tiga	Alam	Panorama Alam Air Terjun
2	Padang Cermin	Air Terjun Anglo	Alam	Panorama Alam Air Terjun
3	Way Ratai	Air Terjun Mandiri	Alam	Panorama Alam Air Terjun
4	Way Ratai	Air Terjun Kembar	Alam	Panorama Alam Air Terjun
5	Padang Cermin	Air Terjun Ciupang	Alam	Panorama Alam Air Terjun
6	Padang Cermin	Air Terjun Tundo Telu	Alam	Panorama Alam Air Terjun
7	Hutan	Air Terjun Talang Rabun	Alam	Panorama Alam Air Terjun
8	Padang Cermin	Air Terjun Tanah Longsor	Alam	Panorama Alam Air Terjun
9	Hutan	Air Terjun Gunung Betung	Alam	Panorama Alam Air Terjun
10	Padang Cermin	Air Terjun Penantian	Alam	Panorama Alam Air Terjun
11	Way Ratai	Air Terjun Randu Kembar	Alam	Panorama Alam Air Terjun
12	Padang Cermin	Muncak Teropong Laut/Tirtayasa	Alam	Panorama Keindahan Alam dari Puncak
13	Padang Cermin	Pantai Mutun	Alam	Panorama Alam Pantai
14	Padang Cermin	Ekowisata Mangrove Petengoran	Alam	Panorama Alam Pantai dan Wisata Edukasi
15	Marga Punduh	Pulau Pahawang	Alam	Panorama Alam Pantai
16	Padang Cermin	Pulau Tegal Mas Resort	Alam	Panorama Alam Pantai
17	Teluk Pandan	Ekowisata Mangrove Cuku Nyinyi	Alam	Panorama Alam Pantai dan Wisata Edukasi
18	Gedong Tataan	Islamic Center	Budaya	Tempat Ibadat dengan Arsitektur yang indah
19	Negeri Katon	Wisata Embung Desa Purworejo	Alam	Panorama Alam Embung
20	Padang Cermin	Pantai Tembikil	Alam	Panorama Alam Pantai
21	Teluk Pandan	Pantai Sari Ringgung	Alam	Panorama Alam Pantai
22	Teluk Pandan	Pantai Dewi	Alam	Panorama Alam

No	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Obyek Wisata	Daya Tarik
		Mandapa		Pantai
23	Padang Cermin	Pantai Klara	Alam	Panorama Alam Pantai
24	Teluk Pandan	Pantai Bensam	Alam	Panorama Alam Pantai
25	Punduh Pidada	Pantai Teluk Hantu	Alam	Panorama Alam Pantai
26	Punduh Pidada	Pantai Pancur Permai	Alam	Panorama Alam Pantai
27	Punduh Pidada	Pantai Centiqi	Alam	Panorama Alam Pantai
28	Punduh Pidada	Pantai Kucing Riang	Alam	Panorama Alam Pantai
29	Padang Cermin	Pulau Kelagian	Alam	Panorama Alam Pantai
30	Punduh Pidada	Pulau Legundi	Alam	Panorama Alam Pantai
31	Punduh Pidada	Pulau Lelangga	Alam	Panorama Alam Pantai
32	Padang Cermin	Pulau Mahitam	Alam	Panorama Alam Pantai
No	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Obyek Wisata	Daya Tarik
33	Padang Cermin	Pulau Lahu	Alam	Panorama Alam Pantai
34	Punduh Pidada	Pulau Tanjung Putus	Alam	Panorama keindahan alam
35	Punduh Pidada	Pulau Balak	Alam	Panorama Alam Pantai
36	Punduh Pidada	Pulau Lok/Helok	Alam	Panorama Alam Pantai
37	Punduh Pidada	Pulau Siuncal	Alam	Panorama Alam Pantai
38	Padang Cermin	Wisata Villa Gardenia Lampung	Buatan	Panorama Alam Taman di Lereng Bukit
39	Way Lima	Lamban Balak Bandar Agung	Budaya	Rumah Adat Sub-etnis Saibatin
40	Hutan	Bukit Lantana	Alam	Panorama Alam Perbukitan
41	Gedong Tataan	Desa Wisata Sungai Langka	Buatan	Panorama Alam Pertanian dan Perkebunan Durian dan Salak
42	Negeri Katon	Taman Bukit Raya Pelayangan	Buatan	Panorama Keindahan Alam
43	Way Lima	Destinasi Wisata Bronjong	Alam	Wahana Air River Tubing
44	Way Ratai	Bukit Cendana	Alam	Panorama Alam Pegunungan
45	Padang Cermin	Air Terjun Lubuk Lau	Alam	Panorama Alam Air Terjun
46	Tegineneng	Kebun Jeruk Dieng Paris	Buatan	Perkebunan Jeruk
47	Teluk Pandan	Hutan Mangrove	Alam	Panorama Hutan Mangrove
48	Gedongtataan	Kolam Renang Pesawaran City	Buatan	Kolam renang dan rekreasi lainnya

No	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Obyek Wisata	Daya Tarik
49	Punduh Pidada	Taman Nemo Pahawang	Alam	Panorama alam taman Nemo
50	Negeri Katon	Embung Desa Purworejo	Buatan	Panorama waduk dan wahana rekreasi lainnya

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2024

Selain itu, terdapat juga rencana kawasan pedesaan yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu:

- Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Air Terjun, ditetapkan pada Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Sumber Jaya; Desa Ceringin Asri; Desa Poncorejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; dan Desa Wates Way Ratai. Kemudian ditetapkan juga pada Kecamatan Padang Cermin, yang meliputi: Desa Way Urang; Desa Paya; dan Desa Tambangan.

Gambar 2.16 Wisata Air Terjun di Kabupaten Pesawaran



Sumber: pariwisata.Pesawarankab.co.id

- Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner Dan Ekonomi Kreatif, yang ditetapkan pada Kecamatan Teluk Pandan, meliputi: Desa Sukajaya Lempasing; Desa Sidodadi; Desa Batumenyan; Desa Hanura; Desa Hurun; Desa Cilimus; Desa Talangmulya; Desa Munca; dan Desa Tanjung Agung. Kemudian ditetapkan juga pada Kecamatan Padang Cermin, meliputi: Desa Sanggi; Desa Gebang; dan Desa Durian.

Gambar 2.17 Wisata Pantai di Kabupaten Pesawaran




Sumber: keliling lampung.net

- Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Bahari Dan Warisan Budaya, ditetapkan pada: Kecamatan Punduh Pidada, yang meliputi: Desa Pagar Jaya; Desa Pulau Legundi; dan Desa Sidodadi. Ditetapkan juga pada Kecamatan Marga Punduh, meliputi: Desa Pulau Pahawang; Desa Kekatang; Desa Kampung Baru; Desa Pekon Ampai; Desa Kunyaiyan; Desa Cilimus; dan Desa Tajur. Kemudian pada Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Batumenyan.

Gambar 2.18 Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran




Sumber: kumparan.com

- Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Kerajinan Tangan Tapis ditetapkan pada Kecamatan Negeri Katon yang meliputi Desa Kagungan Ratu, Desa Negeri Katon, Desa Tanjung Rejo, Desa Halangan Ratu, dan Desa Pujo Rahayu.

Gambar 2.19 Wisata Kerajinan Tangan Produk Tapis Kabupaten Pesawaran




Sumber: edukasi news,2024

Dengan adanya berbagai macam lokasi potensi pariwisata, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Pesawaran atau wisatawan domestik, hingga wisatawan mancanegara.

2.1.1.11 Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada semester I tahun 2025 sebanyak 507.656 jiwa yang terdiri atas 260.486 laki-laki dan 247.170 perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran tahun 2025 mencapai 397,01 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Gedong Tataan dengan kepadatan sebesar 771,92 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Punduh Pedada sebesar 166,55 jiwa/km2. Masyarakat Kabupaten Pesawaran merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tionghoa, Bugis, dan beberapa suku dari wilayah kepulauan Indonesia lainnya. Adapun jumlah penduduk, distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2025 menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Jumlah, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas km²	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan (jiwa/km²)
1	Punduh Pedada	94,67	16.094	3,17	170,00
2	Marga Punduh	78,35	16.303	3,21	208,08
3	Padang Cermin	172,78	30.520	6,01	176,64
4	Teluk Pandan	118,77	40.389	7,96	340,06
5	Way Ratai	96,92	37.377	7,36	385,65
6	Kedondong	88,04	40.827	8,04	463,73
7	Way Khilau	62,2	32.889	6,48	528,76
8	Way Lima	128	40.277	7,93	314,66
9	Gedong Tataan	146,51	113.094	22,28	771,92
10	Negeri Katon	150,05	77.448	15,26	516,15
11	Tegineneng	141,9	62.438	12,30	440,01
Jumlah		**1.278,19**	**507.656**	**100,00**	**397,01**

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

Peningkatan jumlah penduduk utamanya dipengaruhi oleh migrasi masuk dan tingkat kelahiran. Peningkatan kepadatan penduduk memberikan 2 (dua) dampak sekaligus, bagaikan dua sisi dalam satu mata uang, yaitu dampak negatif dan dampak positif secara bersamaan. Terpusatnya penduduk pada

suatu wilayah (aglomerasi), akan berdampak pada aktivitas ekonomi dengan intensitas tinggi, di mana dalam perspektif ekonomi timbulnya aglomerasi akan menciptakan efesiensi "biaya" dalam proses transformasi sumberdaya-sumberdaya yang ada serta multiplier effect berupa peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat sebagai penggerak ekonomi utama.

Di sisi lain, terpusatnya penduduk pada suatu wilayah tertentu, bukan saja akan berimplikasi terhadap masalah kependudukan, seperti permukiman kumuh, peningkatan pelayanan publik, disfungsi tata guna lahan dan akan berimplikasi pula terhadap masalah keamanan, ketertiban, ketenteraman dan masalah sosial lainnya.

Pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, daya dukung lingkungan serta sarana prasarana lainnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesawaran dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar rata-rata 2,34% per tahun. Perkembangan penduduk Kabupaten Pesawaran terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Tahun 2019-2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Punduh Pedada	13.619	15.500	15.640	15.820	15.533	15.767	16.094
2	Marga Punduh	13.744	15.360	15.500	15.620	15.616	15.907	16.303
3	Padang Cermin	29.181	29.200	29.460	29.670	29.280	29.701	30.520
4	Teluk Pandan	38.007	39.210	39.560	40.070	38.599	39.187	40.389
5	Way Ratai	36.740	35.290	35.600	35.560	36.016	36.546	37.377
6	Kedondong	34.573	38.020	38.360	38.690	39.089	39.674	40.827
7	Way Khilau	27.448	30.890	31.160	31.570	31.606	32.082	32.889
8	Way Lima	31.148	37.400	37.730	38.530	38.721	39.400	40.277
9	Gedong Tataan	99.982	107.370	108.320	110.470	107.317	109.696	113.094
10	Negeri Katon	66.860	71.630	72.270	72.770	74.036	75.283	77.448
11	Tegineneng	53.078	57.600	58.110	58.380	50.858	60.940	62.438
Jumlah		**444.380**	**477.470**	**481.710**	**487.150**	**485.671**	**494.183**	**507.656**
Pertumbuhan		**0,95%**	**7,45%**	**0,88%**	**1,12%**	**1,49%**	**1,75%**	**2,73%**
Pertumbuhan Rata-rata per Tahun								**2,34%**

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2019-2025

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi untuk melakukan percepatan pembangunan daerah yang diiringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat juga menjadi beban/masalah jika tidak disertai dengan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mumpuni. Dari aspek rasio jenis kelamin (sex ratio), secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dari sex ratio yang nilainya lebih dari 100. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 sebesar 105,39 yang berarti dari tiap 100 penduduk perempuan tedapat sekitar 105 penduduk laki-laki. Kecamatan Teluk Pandan memiliki nilai sex ratio tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu, sebesar 107,87.

Tabel 2.20 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Total	Laki-Laki	Perempuan	
1.	Punduh Pedada	16.094	8.289	7.805	106,20
2.	Marga Punduh	16.303	8.428	7.875	107,02
3.	Padang Cermin	30.520	15.733	14.787	106,40
4.	Teluk Pandan	40.389	20.959	19.430	107,87
5.	Way Ratai	37.377	19.303	18.074	106,80
6.	Kedondong	40.827	20.923	19.904	105,12
7.	Way Khilau	32.889	17.038	15.851	107,49
8.	Way Lima	40.277	20.561	19.716	104,29
9.	Gedong Tataan	113.094	57.611	55.483	103,84
10.	Negeri Katon	77.448	39.838	37.610	105,92
11.	Tegineneng	62.438	31.803	30.635	103,81
Jumlah		**507.656**	**260.486**	**247.170**	**105,39**

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2025

Adat istiadat di Kabupaten Pesawaran tidak jauh berbeda dengan daerah di Provinsi Lampung lainnya. Dengan penduduk yang terdiri dari etnis Lampung, Sunda dan Jawa, adat istiadat atau tradisi masyarakat Kabupaten Pesawaran adalah campuran dari beberapa etnis tersebut. Walaupun ada sedikit perbedaan dengan daerah lain di Provinsi Lampung, hal ini hanya karena secara geografis.

Peran Kabupaten Pesawaran sebagai kota penyangga Bandar Lampung juga berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Sebagai kota penyangga, Kabupaten Pesawaran telah menjadi pilihan tempat tinggal bagi para pendatang yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda dengan penduduk asli. Interaksi antara penduduk asli dan pendatang yang berlangsung intensif dan dalam waktu yang lama telah mengakibatkan terjadinya proses akulturasi budaya yang kemudian juga memunculkan tradisi baru yang berbeda dengan tradisi masyarakat sebelumnya.

Secara garis besar suku di Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk pendatang. Dimana penduduk Asli Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir umumnya berdiam di sepanjang pesisir pantai seperti di Kecamatan Padang Cermin dan

Punduh Pidada dan sebagian Kedondong. Sedangkan sub suku Lampung lainnya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Penduduk yang bermukim di Kabupaten Pesawaran terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia seperti; Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan lainnya. Dimana dari semua suku tersebut, yang merupakan penduduk pendatang yang dominan adalah Jawa dan Minang/Melayu. Besarnya suku Jawa dimungkinkan karena adanya kolonisasi pada zaman penjajahan belanda dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping itu juga karena secara geografis lokasinya yang dekat dengan Pulau Jawa.

Sejarah mengenai masuknya transmigrasi di wilayah Kabupaten Pesawaran khususnya dan wilayah Kabupaten Lampung Selatan umumnya adalah sebagai berikut:

1 Pertama kali adalah kegiatan kolonisasi tahun 1905 yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lokasinya di Kecamatan Gedongtataan dengan membuka desa baru, yaitu Desa Bagelan.
2 Kolonisasi kedua dilakukan di wilayah Teluk Semangka, Kecamatan Wonosobo dan Kota Agung pada tahun 1921.
3 Kolonisasi ke tiga dicoba sistem spontan tahun 1923 di wilayah Kota Agung dan Gedongtataan.
4 Selanjutnya kolonisasi sistem sisipan yaitu disisipkan pada penduduk setempat, tidak dengan membuka lahan baru di Kecamatan kalianda.
5 Kolonisasi berikutnya tahun 1935 – 1939 dengan sistem Bedol Desa yaitu di tempatkan di Kecamatan Talang Padang dengan daerah asal dari Kediri Jawa Timur.
6 Pada tahun 1950-1956 telah dilaksanakan sistem transmigrasi di Kecamatan Sidomulyo, Palas, Penengahan, Tajungan dan Balau Kedaton.

Asal-usul penduduk pendatang di Kabupaten Pesawaran, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa yang saat ini sudah berkembang pesat. Berdasarkan studi Basis data Kepariwisataan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2005 diketahui warisan budaya yang masih ada di Kabupaten Pesawaran adalah di Wisata Budaya Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Selanjutnya pada aspek sosial ditinjau dengan indikator indeks pembangunan manusia dan pembangunan

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan indikator makro yang masih relevan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi, variabel lainnya, dan distribusi pendapatan (distribution of income) antar golongan masyarakat. Dengan demikian ukuran pertumbuhan ekonomi masih tetap digunakan sebagai tolok ukur terutama oleh negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya jika negatif menunjukkan adannya penurunan perekonomian. Berdasarkan tabel dibawah ini ditampilkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha. Pada Tahun 2025 Perekonomian Kabupaten Pesawaran tumbuh sebesar 5,38% dengan pertumbuhan di setiap lapangan usaha dimana yang tertinggi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,60% dan terendah pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi hingga sebesar -1,64%.

Pasca Pandemi Covid-19 perekonomian Kabupaten Pesawaran dapat dikatakan telah memasuki fase pulih. Pada periode pra Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada pada angka 5%, dimana pada Tahun 2020, tahun pertama Covid-19 menyebabkan perekonomian terkontraksi hingga -1,26%. Seiring dengan berjalannya waktu aktivitas perekonomian mulai tumbuh namun masih ada Lapangan Usaha yang terkoreksi hingga pada Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran telah mencapai kembali diatas angka 5% tepatnya pada posisi 5,38%.

Tabel 2.21 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,07	-1,38	1,63	2,19	-2,43	3,96
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,03	1,87	-2,84	4,38	4,58	-1,64
3	Industri Pengolahan	-4,77	6,64	2,30	0,54	6,15	8,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,11	4,62	6,09	6,02	5,27	5,11
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,06	8,52	1,13	1,65	0,13	3,50
6	Konstruksi	-2,18	2,34	6,86	6,95	8,10	5,75
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,87	5,63	10,64	9,03	9,43	6,80

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
8	Transportasi dan Pergudangan	-4,02	5,25	19,13	17,46	11,01	8,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,81	0,27	14,82	13,56	9,80	7,07
10	Informasi dan Komunikasi	9,05	6,67	5,14	7,96	9,56	4,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	0,90	-1,56	4,10	4,99	5,00
12	Real Estate	-2,29	1,32	7,59	1,30	7,20	3,48
13	Jasa Perusahaan	-2,24	2,11	14,31	5,44	9,49	3,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	2,45	-1,61	0,25	5,90	3,64
15	Jasa Pendidikan	3,85	3,32	2,47	2,54	2,22	3,08
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,26	5,13	0,01	3,03	10,23	1,52
17	Jasa Lainnya	-11,57	4,27	28,55	16,39	11,02	6,82
KABUPATEN PESAWARAN		**-1,26**	**2,08**	**4,55**	**4,49**	**3,90**	**5,38**

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

Tabel 2.22 Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)

Jenis Pengeluaran	Distribusi PDRB Kabupaten Pesawaran Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	57.52	58.17	58.15	59.25	60.29	60.36
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.39	1.4	1.34	1.4	1.46	1.45
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.91	6.79	5.93	5.67	5.58	5.32
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31.03	31.67	30.66	30.45	29.72	30.12
Perubahan Inventori	1.12	-1.46	0.03	0.16	-0.42	1.64
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.03	3.44	3.89	3.07	3.36	1.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

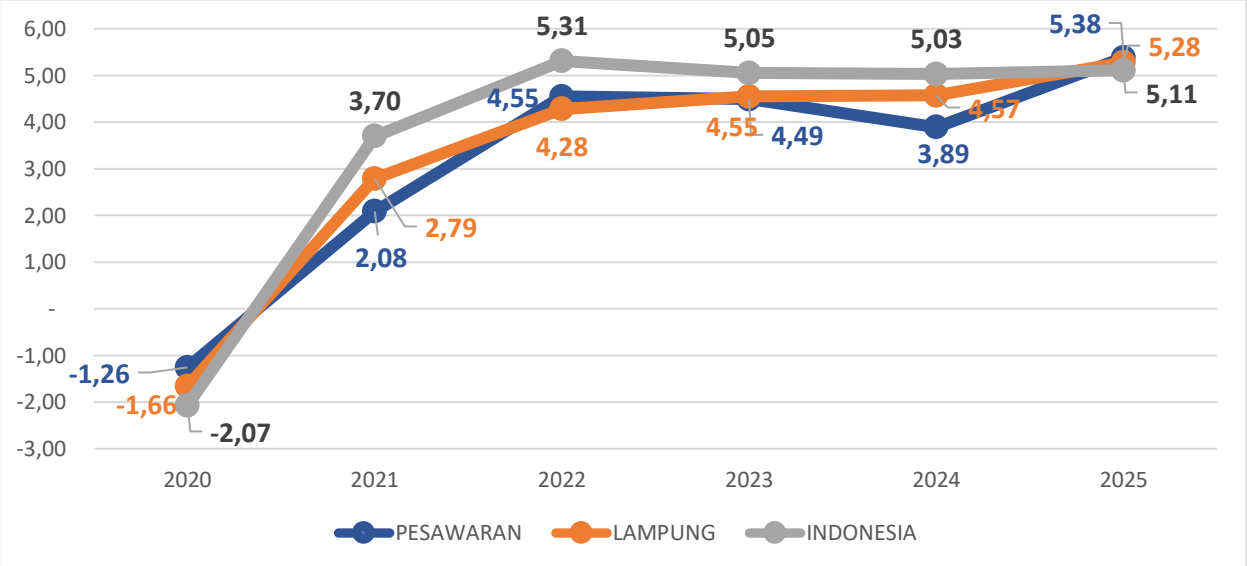
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

Perekonomian daerah secara dominan digerakkan oleh sektor domestik, khususnya konsumsi dan investasi. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi penopang utama dengan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya, dari 57,52% pada tahun 2020 hingga mencapai 60,36% pada tahun 2025. Di posisi kedua, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik menyumbang porsi yang relatif stabil di kisaran 30%, pada tahun 2025 berada diangka 30,12%.

Sebaliknya, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menunjukkan tren penurunan proporsi secara konsisten dari 6,91% (2020) menjadi 5,32% (2025). Sementara itu, komponen penyokong lainnya seperti Pengeluaran Konsumsi LNPRT berada di angka yang sangat kecil (sekitar 1,4%), dan Net Ekspor Barang dan Jasa tetap bernilai positif meskipun mengalami penurunan kontribusi menjadi 1,1% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, struktur permintaan ekonomi Kabupaten Pesawaran sangat bergantung pada daya beli masyarakat (konsumsi rumah tangga) dan aktivitas investasi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran berdasarkan PDRB harga konstan Tahun 2010, pasca Pandemi Covid-19 menunjukan tren positif, Tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,26%, Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 selalu meningkat hingga mencapai 4,55%. Pada Tahun 2023 sampai Tahun 2024 mengalami pelambatan sedikit pada posisi 4,49% dan 3,89%. Kemudian pada Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi berhasil mencapai 5,38% diatas pertumbuhan Provinsi Lampung dan Nasional, dengan kata lain tercapainya kembali pertumbuhan ekonomi rata-rata sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.20 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2025



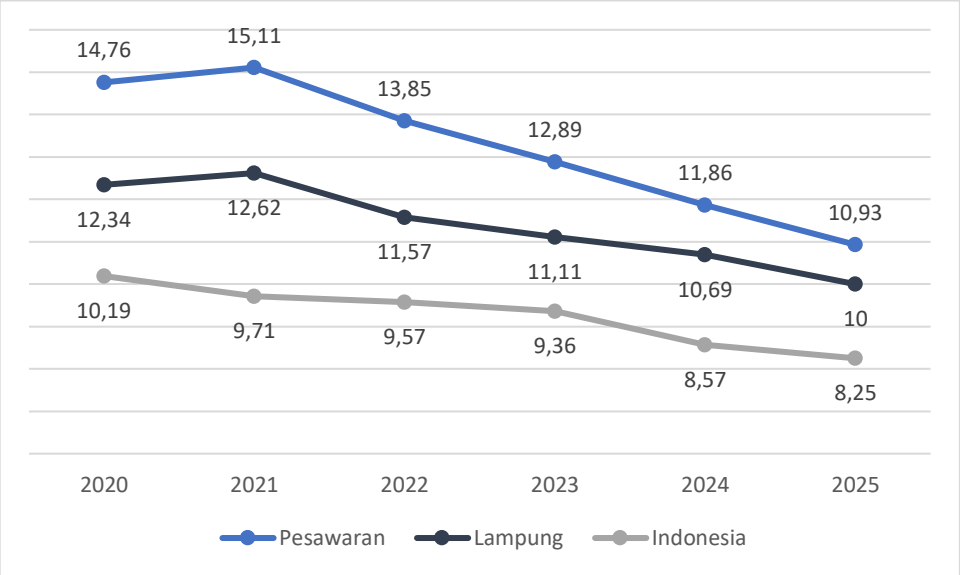
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

B. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Pada Tahun 2025 persentase kemiskinan Kabupaten Pesawaran mencapai 10,93% atau secara absolut sebesar 551 ribu jiwa menempati peringkat ke 5 tertinggi di Provinsi Lampung dan masih diatas rata-rata Provinsi Lampung yakni 10,00% atau secara absolut sebesar 887,0 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pesawaran secara umum mengalami tren menurun, kecuali tahun 2021. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten

Pesawaran sebesar 15,11 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai angka 14,76 persen. Akan tetapi, ditahun-tahun berikutnya, persentase penduduk miskin di Pesawaran terus mengalami penurunan hingga di tahun 2025 mencapai 10,93 persen sejalan dengan penurunan angka kemiskinan Provinsi Lampung dan nasional.

Gambar 2.21 Grafik Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

Tabel 2.23 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2020-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah Per kapita per bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Gini
		Jumlah (Ribu Jiwa)	Persentase (%)	
2020	403.444	66,04	14,76	0,288
2021	420.032	68,31	15,11	0,299
2022	452.521	63,17	13,85	0,251
2023	491.249	59,29	12,89	0,287
2024	524.588	55,01	11.86	0,300
2025	551.496	51,09	10,93	0,269

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

Secara umum pada periode satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren penurunan, dari 17,61 persen pada tahun 2015 menjadi 10,93 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, pada tahun 2021 sempat terjadi peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin. Kenaikan ini bertepatan dengan diberlakukannya pembatasan mobilitas masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang turut berdampak hingga ke wilayah Kabupaten Pesawaran. Setelah periode tersebut, mulai tahun 2022 hingga 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran kembali mengalami penurunan. Penurunan persentase kemiskinan ini tergolong signifikan, dengan tingkat penurunan berturut-turut sebesar 1,26 persen poin

pada tahun 2022, 0,96 persen poin pada tahun 2023, 1,03 persen poin pada tahun 2024, serta 0,93 persen poin pada tahun 2025.

Mayoritas penduduk miskin Kabupaten Pesawaran masih didominasi oleh mereka yang hanya menamatkan pendidikan dasar, yaitu SD atau SMP, dengan proporsi yang konsisten di sekitar 50 persen. Sebagian besar didominasi oleh kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Salah satu faktor penyebabnya yaitu lapangan pekerjaan yang ditopang sektor pertanian yang memegang peranan penting masih didominasi oleh pertanian tradisional yang sangat bergantung pada variasi iklim, penurunan harga komoditas, dan keterbatasan teknologi pertanian sehingga dapat menimbulkan kehilangan peluang kerja tetap. Penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran selama periode 2015 hingga 2024, yang terbagi dalam tiga kategori utama yaitu tidak bekerja, pekerja informal, dan pekerja formal. Selama satu dekade terakhir, sektor informal secara konsisten menjadi penyumbang terbesar dalam struktur ketenagakerjaan penduduk miskin di Pesawaran, dengan proporsi berkisar antara 37,21 persen hingga 53,23 persen. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan di sektor yang cenderung tidak memiliki perlindungan sosial dan kepastian pendapatan. Penduduk miskin secara konsisten mengalokasikan lebih dari 60 persen total pengeluarannya untuk makanan dan Akses terhadap air bersih merupakan salah satu indikator penting kesejahteraan rumah tangga.
Hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesawaran yaitu :

1. Data kemiskinan belum sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpengaruh terhadap akurasi penerima manfaat. Hal ini disebabkan karena belum ada basis data tunggal yang seragam di setiap OPD pelaksana.
2. Peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) belum maksimal sesuai dengan tugas pokoknya.
3. Proses perencanaan dalam penentuan kebijakan belum sepenuhnya berbasis data kemiskinan yang ada.
4. Pelaksanaan kegiatan prioritas kemiskinan terkendala dalam proses pengadaan dan administratif
5. Kemampuan fiskal daerah yang masih rendah sehingga berpengaruh terhadap jalannya kegiatan prioritas kemiskinan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan hambatan pelasanaan yang ada antara lain :

1. Pengelolaan Data Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Terpadu menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
2. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima Manfaat
3. Memaksimalkan kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
4. Merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui :
   a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melaluipeningkatan cakupan bantuan sosial (program bina murid, bantuan insentif marbot,

penjaga makam, guru ngaji, bantuan bagi disabilitas dll), peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial

b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui Pelatihan Keterampilan Kerja, Perluasan Akses Pasar Tenaga Kerja (pembinaan LPK)
c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui Peningkatan Akses Pasar Lokal dan Mancanegara (Pameran Luar/Dalam Negeri), Pemberdayaan Sektor Usaha (IKM dan UKM) serta Koperasi, SATE PUAN (Satu Desa Satu Kelompok Usaha Perempuan), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), Regulasi kemudahan berusaha dan investasi daerah
d. Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan melalui Perluasan Cakupan Layanan Dasar dan Konektivitas Wilayah, Perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi, Menjaga stabilitas distribusi harga pangan

5. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dengan kemitraan pemerintah dan non pemerintah
6. Peningkatan kebijakan pendapatan daerah dan kapasitas fiskal

Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren fluktuatif, pada Tahun 2020 berada pada angka 0,288. Pada Tahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 0,299 poin di Tahun 2021, kemudian kembali mengalami penurunan menjadi 0,251 point di Tahun 2022, selanjutnya kembali meningkat meningkat mencapai angka 0,287 poin di Tahun 2023 dan pada Tahun berikutnya terus mengalami peningkatan menjadi 0,300 poin di Tahun 2024 serta pada akhir periode Tahun 2025 berhasil mencapai 0,269. Hal ini bermakna bahwa terjadi penurunan angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesawaran.

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha pada tahun 2025 adalah sebesar 23.446,54 miliar rupiah. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan

penyumbang PDRB terbesar yaitu 8.641,88 miliar rupiah. Kategori dengan penyumbang nilai PDRB terbesar kedua di Kabupaten Pesawaran adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu 4.056,96 miliar rupiah. Sedangkan kategori dengan penyumbang nilai PDRB terbesar ketiga adalah Kategori Industri Pengolahan yaitu 3.317,94 miliar rupiah. Perkembangan PDRB ADHB per sektor lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.24 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025 (dalam Miliar)

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.787,28	6.789,60	7.367,12	7.888,05	8.038,06	8.641,88
2	Pertambangan dan Penggalian	220,63	230,05	229,66	253,38	290,07	312,97
3	Industri Pengolahan	2.242,32	2.468,63	2.635,80	2.701,80	2.972,99	3.317,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,63	9,34	10,01	10,68	10,64	11,21
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,23	11,18	11,43	11,74	12,46	13,26
6	Konstruksi	1.647,12	1.736,52	1.905,81	2.089,32	2.264,70	2.405,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.211,87	2.364,09	2.872,81	3.277,39	3.682,20	4.056,96
8	Transportasi dan Pergudangan	447,42	478,45	637,42	839,06	948,62	1.046,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	224,88	226,18	264,79	306,75	344,98	377,63
10	Informasi dan Komunikasi	576,94	600,81	636,66	697,57	761,40	784,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	68,23	71,44	75,41	80,18	85,36	91,47
12	Real Estate	350,05	354,86	392,90	405,93	441,05	466,24
13	Jasa Perusahaan	9,52	9,79	11,59	12,70	14,29	14,95
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	629,34	642,44	650,04	661,53	717,19	760,32
15	Jasa Pendidikan	550,75	581,03	616,55	656,03	714,84	753,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112,29	120,31	123,01	130,30	146,98	152,00
17	Jasa Lainnya	114,24	119,86	160,24	194,97	220,95	239,93

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produk Domestik Regional Bruto Kab. Pesawaran		**16.211,74**	**16.814,58**	**18.601,24**	**20.217,38**	**21.666,78**	**23.446,54**

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

Tabel diatas menunjukkan perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran yang mengalami kenaikan setiap tahunnya persektor lapangan usaha dari tahun 2020-2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing sektor masih sangat memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan kemajuan daerah Kabupaten Pesawaran. Walaupun tidak dapat menunjukkan unsur pemerataan pendapatan perorang sebagai cerminan kesejahteraan daerah namun demikian ukuran kesejahteraan pada umumnya PDRB menjadi proxi yang masih dipakai hingga saat ini.

Tabel 2.25 Struktur Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,87	40,38	39,61	39,02	37,10	36,86
2	Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,37	1,23	1,25	1,34	1,33
3	Industri Pengolahan	13,83	14,68	14,17	13,36	13,72	14,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	10,16	10,33	10,25	10,33	10,45	10,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,64	14,06	15,44	16,21	16,99	17,30
8	Transportasi dan Pergudangan	2,76	2,85	3,43	4,15	4,38	4,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,39	1,35	1,42	1,52	1,59	1,61
10	Informasi dan Komunikasi	3,56	3,57	3,42	3,45	3,51	3,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39
12	Real Estate	2,16	2,11	2,11	2,01	2,04	1,99
13	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,82	3,49	3,27	3,31	3,24
15	Jasa Pendidikan	3,40	3,46	3,31	3,24	3,30	3,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,72	0,66	0,64	0,68	0,65
17	Jasa Lainnya	0,70	0,71	0,86	0,96	1,02	1,02
Produk Domestik Regional Bruto Kab. Pesawaran		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

Berdasarkan tabel diatas sektor basis ekonomi yang menunjang perekonomian Kabupaten Pesawaran berturut-turut yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,86 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,30 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 14,15 persen.

Berdasarkan Struktur PDRB Atas Harga Berlaku menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Pesawaran (miliar rupiah) Tahun 2025, distribusi terbesar terdapat pada Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yaitu sebesar 14.153,22 miliar Rupiah, Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu 7.063,16 miliar Rupiah, serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu sebesar 1.247,01 miliar Rupiah. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Pesawaran (miliar rupiah) Tahun 2020-2025 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.26 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2025 (dalam Miliar)

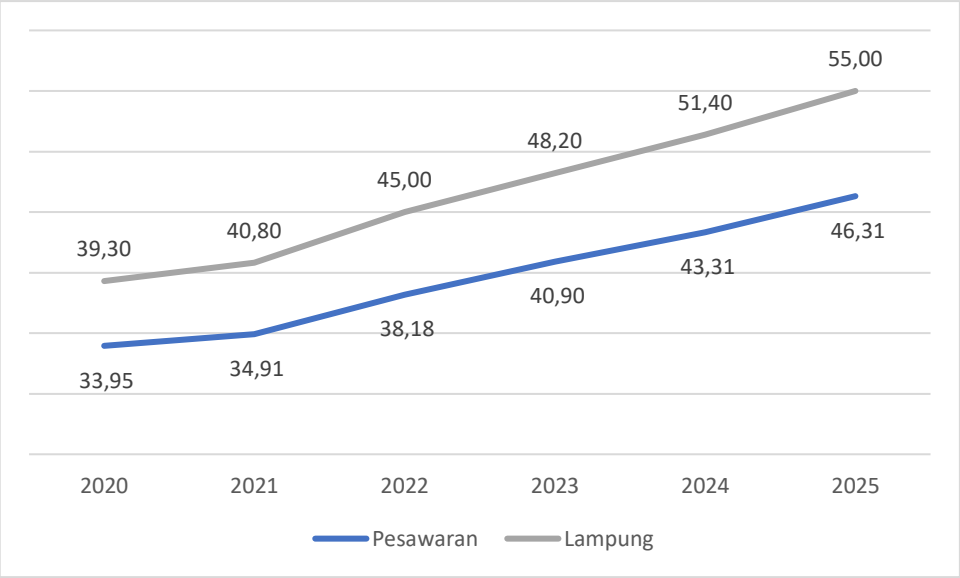
Jenis Pengeluaran Expenditure	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.325,11	9.780,52	10.816,88	11.978,48	13.063,42	14.153,22
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH	225,11	234,90	250,07	282,85	316,64	339,72
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.119,81	1.141,64	1.103,13	1.146,73	1.208,22	1.247,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.029,77	5.324,66	5.702,62	6.156,14	6.440,36	7.063,16
Perubahan Inventori	182,34	-245,34	5,49	31,87	-89,94	385,38
Net Ekspor Barang dan Jasa	329,60	578,21	723,05	621,30	728,07	258,04
Produk Domestik Regional Bruto	**16.211,74**	**16.814,58**	**18.601,24**	**20.217,38**	**21.666,78**	**23.446,53**

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

D. PDRB per Kapita

PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran berdasarkan data BPS Tahun 2020-2025 menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun meskipun secara keseluruhan masih berada dibawah angka provinsi. Pada Tahun 2020 PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran sebesar 33,95 juta per tahun, tahun 2021 meningkat menjadi 34,91 juta per tahun dan terus mengalami tren peningkatan hingga tahun 2025 yang mencapai 46,31 juta per tahun.

Gambar 2.22 Grafik Perkembangan PDRB ADHB Perkapita Tahun 2019-2024 (dalam Juta)

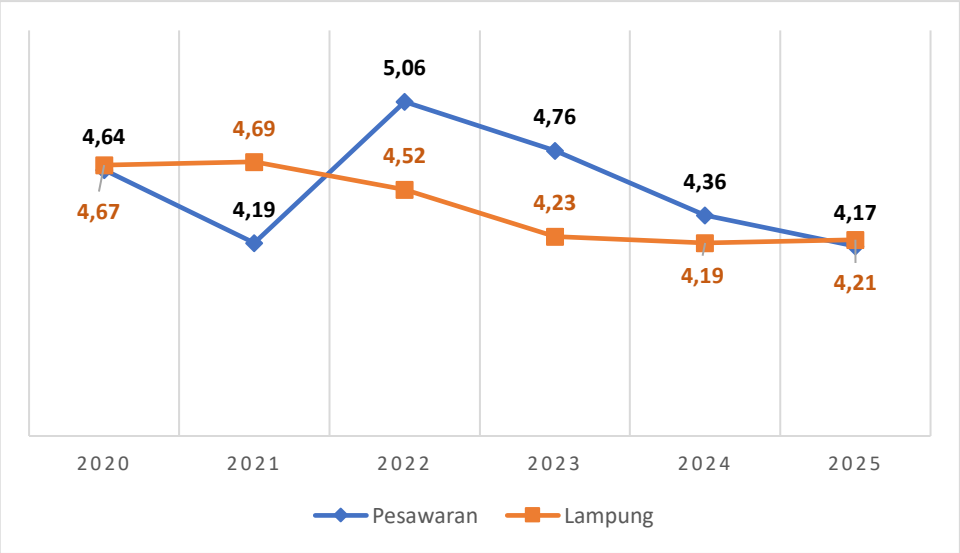


Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data pada tabel dibawah, secara umum capaian tingkat pengangguran rata-rata masih diatas Provinsi Lampung namun pada akhir periode berhasil mencapai angka yang lebih rendah dari Provinsi Lampung. Tingkat Pengangguran Terbuka berfluktuasi dimana pada Tahun 2020 tingkat pengangguran mencapai 4,64 persen lalu menurun menjadi 4,19 pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,06 persen. Selanjutnya Pada Tahun 2023 hingga 2025 tingkat pengangguran menurun menjadi 4,17 persen berada sedikit dibawah capaian Provinsi Lampung pada angka 4,21 persen.

Gambar 2.23 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

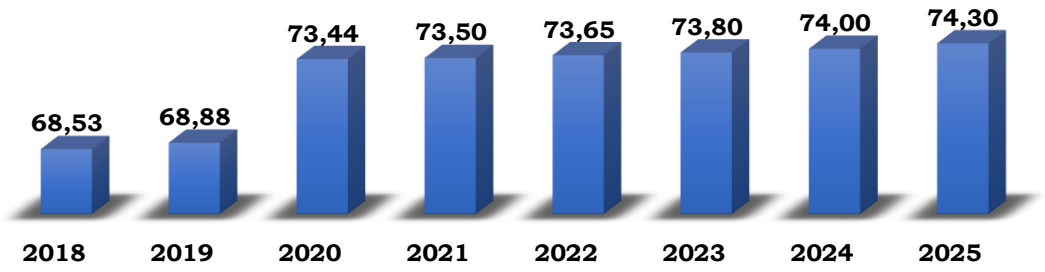
F. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling tidak ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak Tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan metode perhitungan. Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2018 sampai 2025 menunjukkan tren yang baik. Pada Tahun 2018 berada pada angka 68,53 poin dan meningkat menjadi 68,88 di Tahun 2019. Selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2025 berada pada angka 74,30 poin.

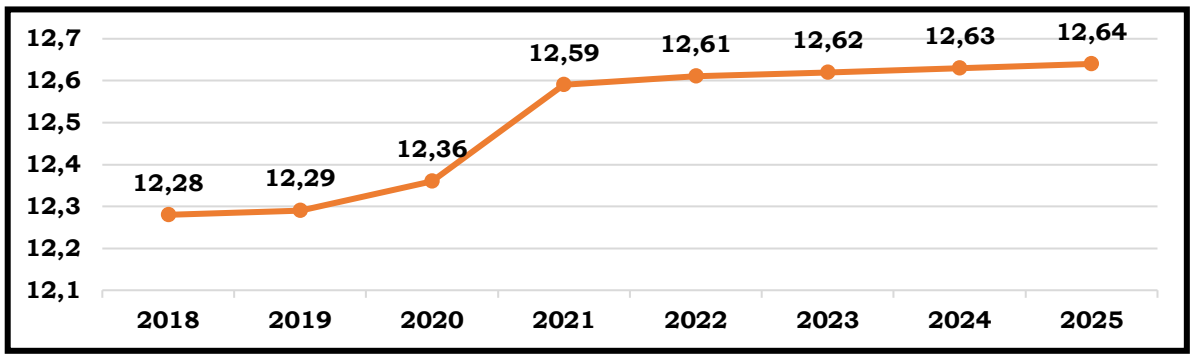
Gambar 2.24 Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2025



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

Angka harapan lama sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan lama sekolah pada rentang waktu Tahun 2018-2025 meningkat dari angka 12,28 menjadi 12,64. Harapan lama sekolah di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang paling besar dalam lima tahun terakhir sebesar 0,23 poin. Secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2025 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,64 tahun atau setara dengan Diploma I.

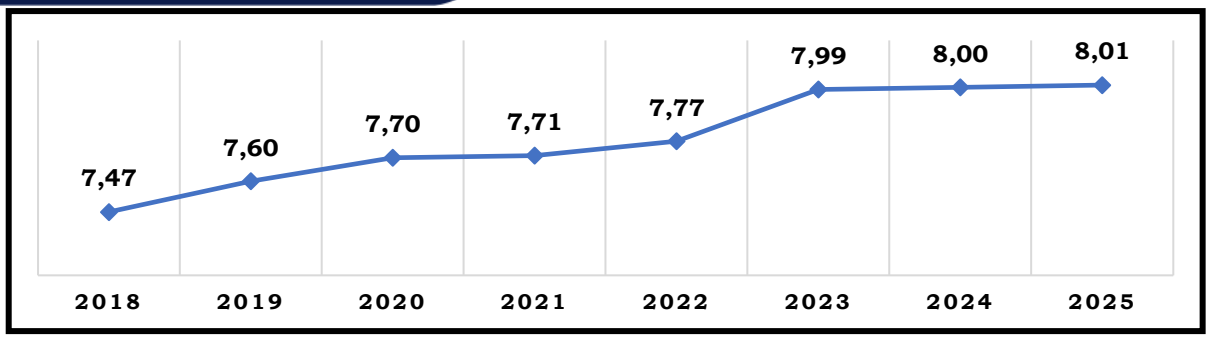
Gambar 2.25 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan dari Tahun 2018 pada angka 7,47 menjadi 8,01 pada Tahun 2025. Rata-rata lama sekolah pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk di Kabupaten Pesawaran yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,01 tahun atau hampir menyelesaikan kelas VIII (Pendidikan menengah pertama kelas 2).

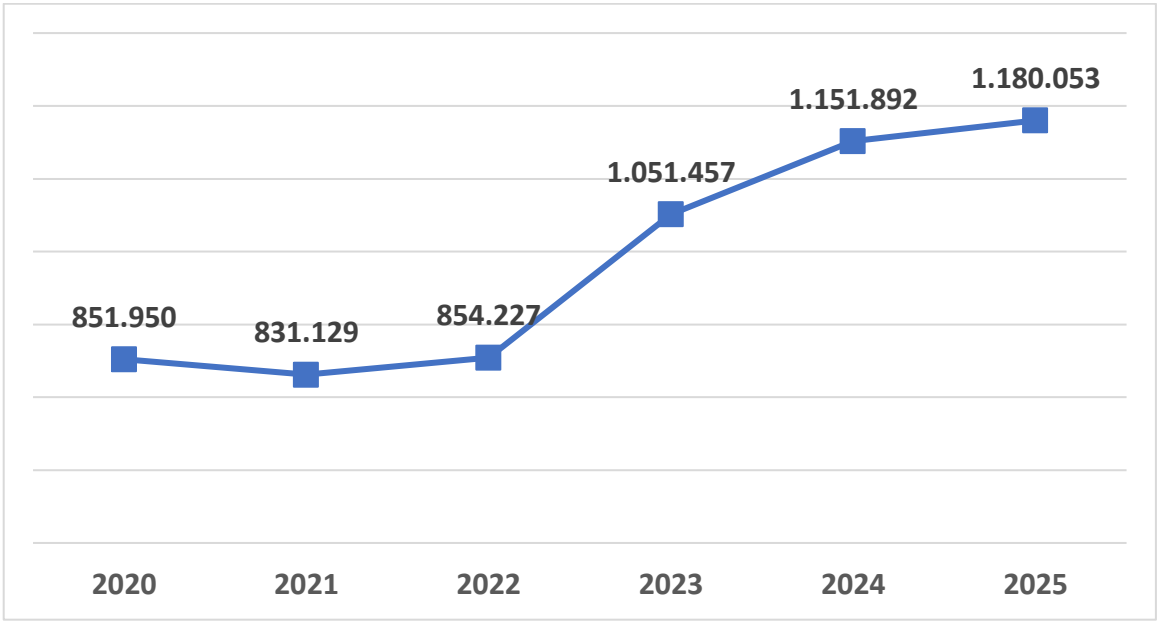
Gambar 2.26 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2025



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

Daya beli adalah kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan daya beli menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk selalu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp 851.590, kemudian menurun menjadi Rp 831.129 pada tahun 2021, tetapi kemudian meningkat menjadi Rp 854.277 pada tahun 2022. Pada Tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan kemudian meningkat cukup signifikan sebesar Rp 1.051.457, tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan mencapai Rp 1.151.892 dan di tahun 2025 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan mencapai Rp 1.180.053.

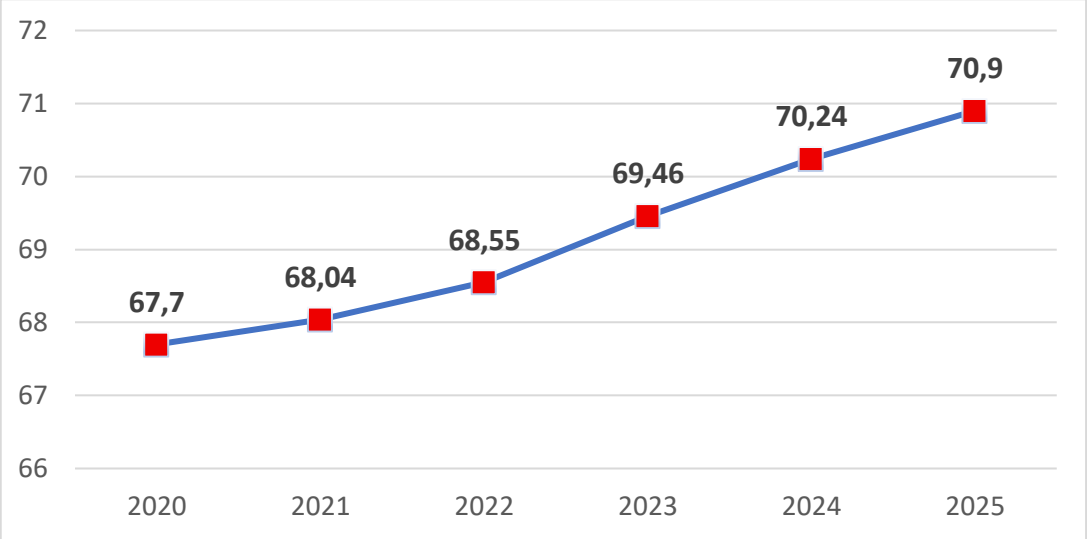
Gambar 2.27 Grafik Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan Kabupaten Pesawaran, 2020-2025



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

Perkembangan IPM Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2020 hingga 2025 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 tercatat 67,70 poin yang terus meningkat menjadi 70,90 poin di Tahun 2025 yang artinya nilai IPM tersebut masih masuk ke dalam kategori tinggi.

Gambar 2.28 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2025



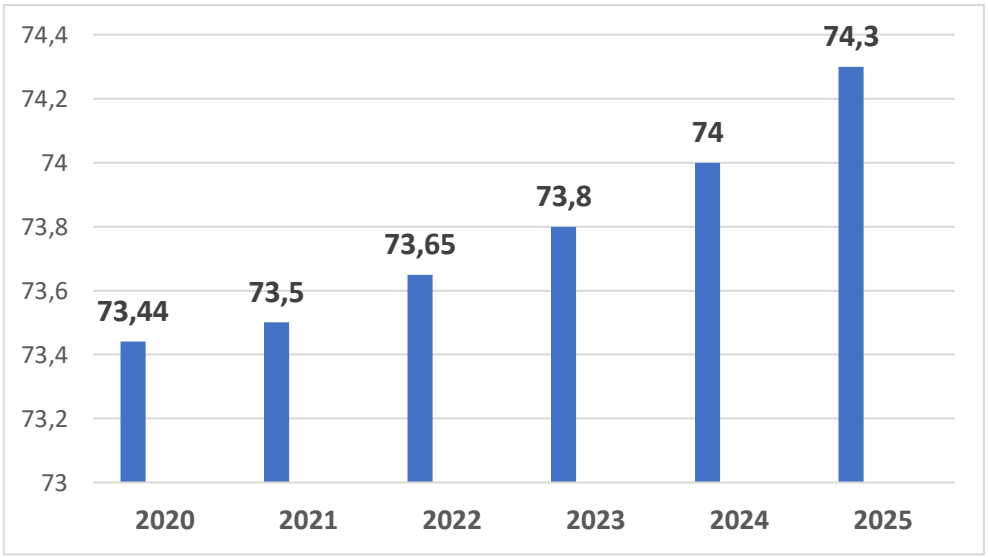
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

A. Angka Harapan Hidup

Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2020 sampai 2025 menunjukkan tren yang baik. Pada Tahun 2020 berada pada angka 73,44 poin dan meningkat menjadi 73,50 di Tahun 2021. Selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2025 berada pada angka 74,30 poin.

Gambar 2.29 Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

B. Prevalensi Stunting

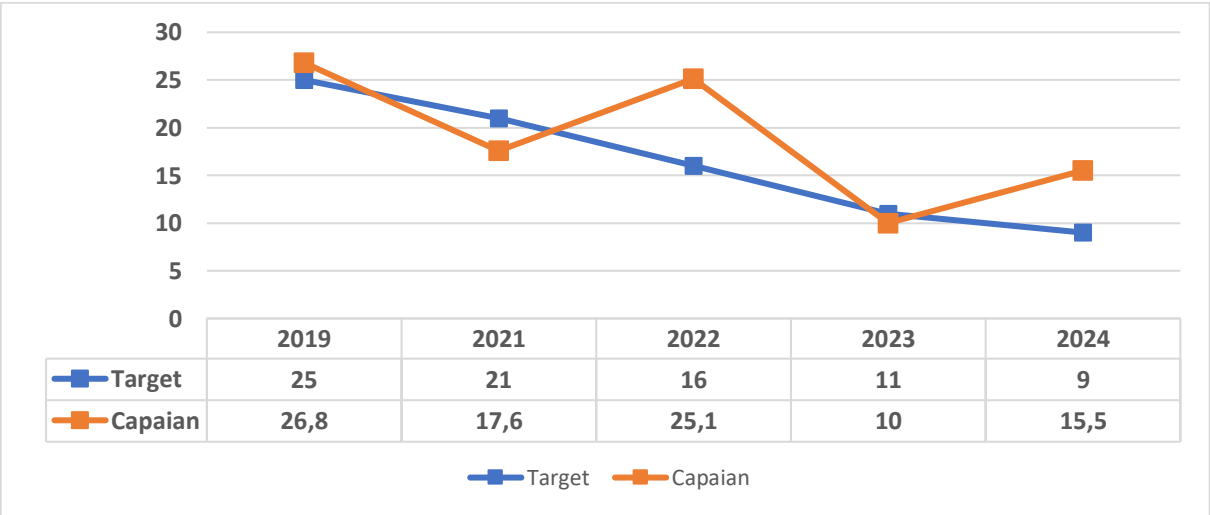
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya.

Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Upaya penurunan stunting dilaksanakan melalui Intervensi Gizi Spesifik seperti intervensi dengan sasaran ibu hamil, intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan serta intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan serta intervensi Gizi Sensitif seperti menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan KB, JKN, Jampersal, Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua dan PAUD Universal, Pendidikan Gizi masyarakat, edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta Gizi pada Remaja, menyediakan bantuan dan jamsos bagi keluarga miskin serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah membentuk tim percepatan penurunan stunting Tingkat Kabupaten. Selain itu juga dibentuk TPPS tingkat Kecamatan dan Desa. Saat ini di Kabupaten Pesawaran telah terbentuk 256 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan 768 kader yang terdiri dari bidan, Tim Penggerak PKK dan kader institusi masyarakat pedesaan.

Gambar 2.30 Trend Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran menurut Survey Kesehatan



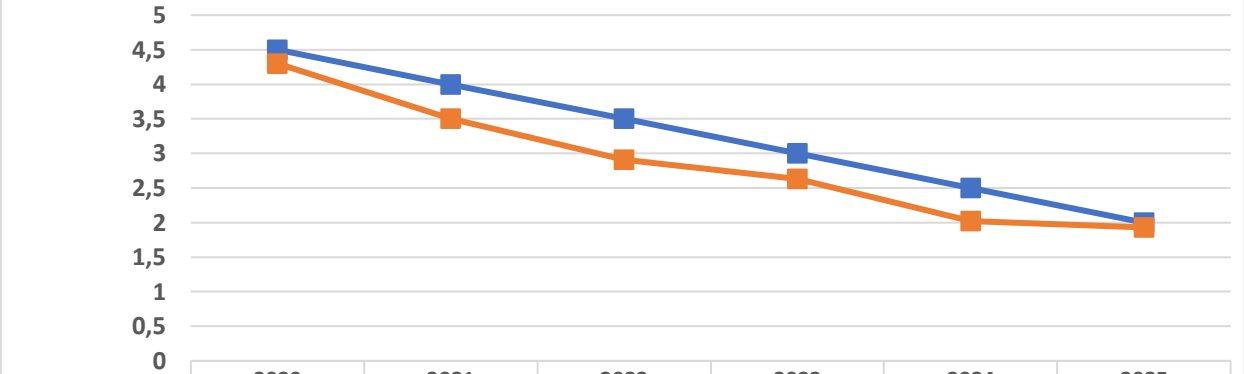
	2019	2021	2022	2023	2024
Target	25	21	16	11	9
Capaian	26,8	17,6	25,1	10	15,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Stunting di Kabupaten Pesawaran terus mengalami penurunan. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan Prevalensi stunting dari tahun ketahun, yaitu Tahun 2019: 26,80 (SSGBI), pada tahun 2020 tidak dilaksanakan survey dikarenakan wabah covid-19, Tahun 2021: 17,60% (SSGI); Tahun 2022 : 25,1% (SSGI); Tahun 2023 : 10% (SSGI) dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,5% persen menjadi 15,5%. Pada tahun 2025 tidak ada survei SSGI stunting.

Adapun Untuk hasil penghitungan EPPGBM yang dilakukan oleh Puskesmas, pada pengukuran EPPGBM data hasil pengukuran diinput kedalam aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang di entry oleh petugas gizi puskesmas, dan apabila ada data yang bermasalah gizi dikonfirmasi dan divalidasi oleh petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Gambar 2.31 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran menurut EPPGBM Tahun 2020-2025



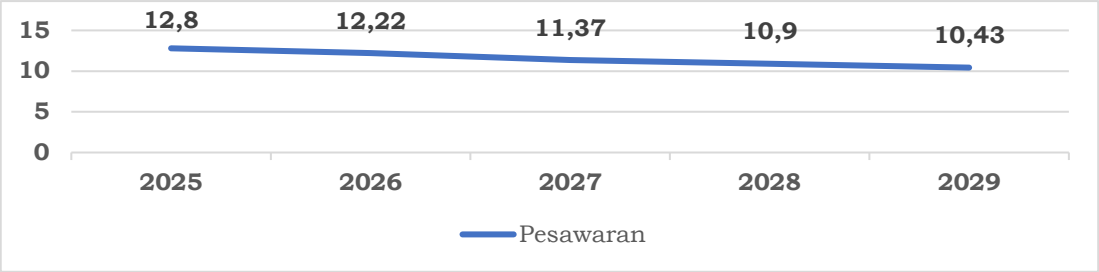
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target	4,5	4	3,5	3	2,5	2
Realisasi	4,3	3,5	2,91	2,63	2,02	1,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Dari grafik terlihat bahwa terjadi Penurunan prevalensi balita stunting sebesar 0,8% dari 4,30 % di Tahun 2020 menjadi 3,50 % di Tahun 2021, kemudian penurunan sebesar 0,28% dari pada tahun 2022 turun menjadi 2,91 dan 2,63% pada tahun 2023, dan terjadi penurunan sebesar 0,61% dari pada tahun 2023 turun menjadi 2,02% pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 turun menjadi 1,93%. Sebaran kasus stunting di wilayah Kabupaten Pesawaran didapatkan dari data EPPGBM yang telah di validasi dan telah dianalisis pertahun. Berikut hasil sebaran kasus stunting Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 sampai tahun 2025.

Stunting di Kabupaten Pesawaran terus mengalami penurunan. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan Prevalensi stunting dari tahun ketahun, yaitu Tahun 2019: 26,80 (SSGBI), pada tahun 2020 tidak dilaksanakan survey dikarenakan wabah covid-19, Tahun 2021: 17,60% (SSGI); Tahun 2022 : 25,1% (SSGI); Tahun 2023 : 10% (SSGI) dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,5% persen menjadi 15,5%. Pada tahun 2025 tidak ada survei SSGI stunting. Adapun target penurunan stunting Kabupaten Pesawaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.32 Target Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Tabel 2.27 Jumlah Kasus Stunting per Kecamatan Tahun 2020-2025

No	Kecamatan	Puskesmas	Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pedada	Pedada	99	66	50	47	52	44
2	Marga Punduh	Maja	158	55	38	32	8	12
3	Padang Cermin	Padang Cermin	58	31	5	14	11	15
4	Way Ratai	Bunut	9	9	9	13	14	15
5	Kedondong	Kedondong	194	215	92	119	120	105
6	Way Lima	Kota Dalam	286	101	96	73	57	65
7	Teluk Pandan	Hanura	127	82	126	70	58	48
8	Gedong Tataan	Gedong Tataan	111	83	70	67	63	46
9		Bernung	6	104	0	8	9	9
10	Negeri Katon	Kalirejo	93	52	46	22	17	12
11		Roworejo	118	131	51	21	9	3
12	Tegineneng	Tegineneng	59	0	1	25	9	3
13		Trimulyo	6	8	28	25	38	9
14	Way Khilau	Gunung Sari	-	-	-	5	6	7
		Kota Jawa	-	-	-	6	8	7
Kabupaten			**1.324**	**937**	**620**	**547**	**478**	**400**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Tahun 2025 tidak ada surve sehingga data kami ambil dari data EPPGBM , dan prevalensi stunting di tahun 2025 sebesar 1,93 % dengan jumlah kasus 400 kasus , data surve tahun 2024 prevalensi stunting 15,5 % dan data prevalensi stunting di EPPGBM 2,02 % dengan jumlah kasus 478 kasus.

Penyebab kejadian stunting antara lain:

1. Faktor Ibu Hamil dan Pra-Hamil

Kekurangan gizi kronis (KEK) pada ibu hamil dimana masih terdapat ibu hamil dengan Lingkar Lengan Atas (LILA) < 23,5 cm, sehingga risiko bayi lahir pendek meningkat. Pengetahuan gizi ibu hamil masih rendah di beberapa wilayah pedesaan. Anemia pada ibu hamil, Cakupan konsumsi tablet tambah darah (TTD) belum optimal. Kepatuhan minum TTD rendah karena mual atau kurang pengawasan serta usia kehamilan berisiko, Kehamilan usia <20 tahun atau >35 tahun masih terjadi.

2. Faktor Kualitas Asuhan Bayi dan Balita

Pemberian ASI Eksklusif rendah, Sebagian ibu bekerja di sektor informal sehingga tidak optimal memberikan ASI serta Kurangnya dukungan keluarga dalam praktik menyusui. Pengenalan MP-ASI Belum maksimal, MP-ASI tidak cukup protein hewani dan frekuensi makan Belum mencukupi. Pola pengasuhan kurang optimal, Pengetahuan orang tua tentang stimulasi tumbuh kembang belum merata.

3. Faktor Penyakit Infeksi

Diare dan ISPA, masih ditemukan kejadian diare terutama di wilayah dengan sanitasi buruk dan perilaku cuci tangan belum optimal. Cacingan yang disebabkan sanitasi lingkungan belum memadai.

4. Faktor Sanitasi dan Lingkungan

Akses jamban layak masih rendah di beberapa Desa, infrastruktur sanitasi belum merata. Akses air bersih dimana sebagian rumah tangga masih menggunakan sumber air sesuai setandar atau tidak terlindungi. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga masih ada rumah tangga yang membuang sampah sembarangan atau ke sungai.

5. Faktor Sosial-Ekonomi Keluarga,

Kemiskinan rumah tangga disebabkan pendapatan rendah mempengaruhi pemenuhan gizi anak serta ketergantungan pada satu jenis makanan pokok. Tingkat pendidikan orang tua menyebabkan pengetahuan gizi, kesehatan, dan pola asuh rendah di beberapa daerah dan konsumsi protein hewani masih terbatas.

6. Faktor Akses Pelayanan Kesehatan

Cakupan ANC/PNC belum optimal Ibu tidak melakukan pemeriksaan kehamilan lengkap (6 kali). Cakupan imunisasi dasar dimana masih terdapat daerah dengan cakupan imunisasi belum 100%. Pemantauan pertumbuhan balita dimana balita tidak rutin datang ke posyandu.

Upaya penurunan stunting memerlukan pendekatan konvergensi yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, sosial, hingga pemangku desa. Upaya penurunan stunting dilaksanakan melalui Intervensi Gizi Spesifik yang dilaksanakan dinas kesehatan dalam rangka percepatan penurunan stunting yaitu:

- 8000 HPK, Remaja diberikan TTD dan diminum 1 minggu sekali dan pemeriksaan HB Pada Rematri Tiap 6 Bulan Sekali
- Pembentukan dan Pembinaan Posyandu Remaja, Dilakukan dalam rangka meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan TTD Rematri
- Peningkatan Kegiatan Aksi Bergizi
- Pembinaan Kespro Catin. Mengadakan MOU antara Puskesmas dan KUA Setempat
- Dilakukan dengan 10 T dan pemberian TTD pada ibu hamil minimal 90 butir selama kehamilan, Pemeriksaan HB pada ibu hamil pada awal kehamilan dan trimester III

- Pemberian PMT kepada ibu hamil dan balita gizi kurang
- Pelaksanaan P4K, Pengisian Stiker P4K dan amanat persalinan pada buku KIA
- Persalinan dengan tenaga yang kompeten dan berkualitas di Fasyankes
- Pemeberian Vitamin A pada ibu hamil
- Pembentukan Posyandu Stunting di Puskesmas
- Melaksanakan IMD Pada Setiap Persalinan, dilanjutkan dengan ASI Eksklusif 6 Bulan dan dilanjutkan dengan ASI sampai 2 Tahun
- Pemberian makanan pendamping ASI Dilakukan setelah anak usia 6 bulan, dengan penerapan dan Sosialisasi PMBA
- Konseling Bahaya Merokok
- Verifikasi ODF dan Perbaikan Sanitasi

Intervensi Gizi Sensitif seperti menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan KB, JKN, Jampersal, Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua dan PAUD Universal, Pendidikan Gizi masyarakat (program Gemar Ikan), edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta Gizi pada Remaja (Bimbingan Perkawinan Remaja), menyediakan bantuan dan jamsos bagi keluarga miskin seperti perbaikan rumah layak huni serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Intervensi Gizi Sensitif yang dilaksanakan oleh OPD diluar dinas kesehatan menyumbang 70% upaya pencegahan stunting , seperti menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, melakukan fortifikasi bahan pangan (Dinas Ketahanana Pangan), menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan KB (Dinas P3AP2KB) JKN, Jampersal, Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua dan PAUD Universal (Dinas Pendidikan), Pendidikan Gizi masyarakat (program Gemar Ikan) oleh Dinas Perikanan, edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta Gizi pada Remaja (Bimbingan Perkawinan Remaja) oleh Kementerian Agama, menyediakan bantuan dan jamsos bagi keluarga miskin seperti perbaikan rumah layak huni oleh Dinas Sosialserta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui pemanfaatan lahanpekarangan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah membentuk tim percepatan penurunan stunting Tingkat Kabupaten. Selain itu juga dibentuk TPPS tingkat Kecamatan dan Desa. Saat ini di Kabupaten Pesawaran telah terbentuk 256 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan 768 kader yang terdiri dari bidan, Tim Penggerak PKK dan kader institusi masyarakat pedesaan. Kabupaten

Pesawaran memiliki 432 KPM dan Operasional untuk Rumah Desa Sehat yang mendapatkan dukungan dari dana desa.

C. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Kemajuan pembangunan keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yakni; ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan.

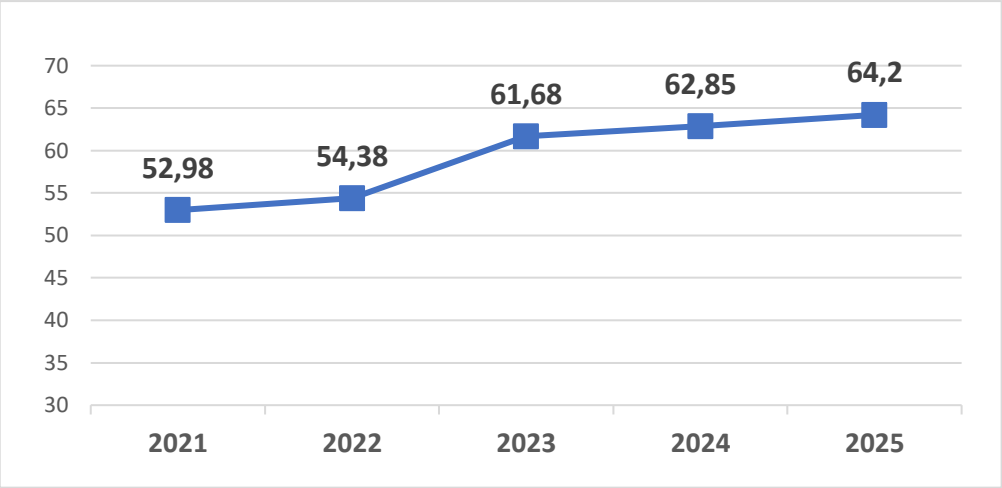
Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga, yang diukur dari kegiatan beribadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, keharmonisan keluarga dan keluarga mengalami cerai hidup.

Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain yang diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga dan akses media online.

Kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri yang diukur dari interaksi keluarga dan interaksi sosial.

Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Indeks Pembangunan keluarga Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 sebesar 52,98 % dan terus meningkat mencapai 64,20% pada kategori berkembang pada tahun 2025.

Gambar 2.33 Grafik Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2020-2025



Sumber : Dinak P3AP2KB Kabupaten Pesawaran, 2026

D. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Indikator yang menjadi pengukuran dalam hal pengarusutamaan gender adalah Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). IPG terdiri dari 4 (empat) indikator komposit yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) , Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan.

Pembangunan perempuan dalam suatu pembangunan wilayah yang diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sejak Tahun 2017 hingga 2025, IPG Kabupaten Pesawaran mengalami tren peningkatan kecuali pada Tahun 2019 menurun 0,27 dan di Tahun 2020 kembali menurun 0,10 kemudian pada Tahun 2021 kembali meningkat sampai dengan Tahun 2025 yaitu berada pada angka 89,14. Hal tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan pembangunan SDM perempuan untuk meningkakan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM.

Tabel 2.28 Kondisi Pembangunan Gender Tahun 2018-2025

Indikator Gender	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,57	87,30	87,20	87,22	87,77	88,04	88,32	89,14
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,03	72,59	72,21	73,70	73,70	71,98	65,03	65,03

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran, 2025

Sedangkan IDG terdiri dari 3 (tiga) indikator komposit yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2018-2025 mengalami tren

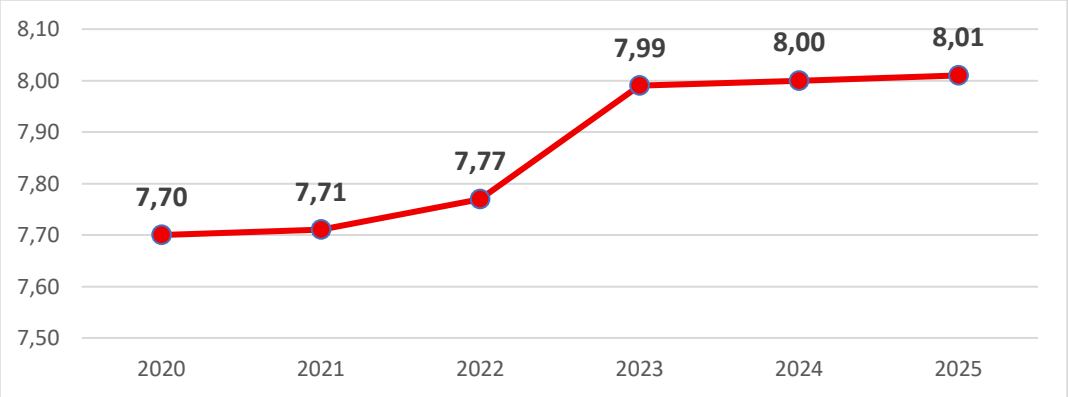
fluktuatif, pada Tahun 2018 berada pada poin 67,03, kemudian meningkat ditahun 2018 pada angka tertinggi 72,59 pada Tahun 2019 kemudian mengalami penurunan sedikit menjadi 72,21 di Tahun 2020. Pada Tahun 2021 meningkat di angka 73,70 dan tetap berada pada angka yang sama di Tahun 2022. Kemudian pada Tahun 2023 mengalami penurunan dan pada Tahun 2025 berada pada angka 65,03.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan dari Tahun 2020 pada angka 7,70 menjadi 8,01 pada Tahun 2025. Rata-rata lama sekolah pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk di Kabupaten Pesawaran yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,00 tahun atau hampir menyelesaikan kelas VIII (Pendidikan menengah pertama kelas 2).

Gambar 2.34 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2025

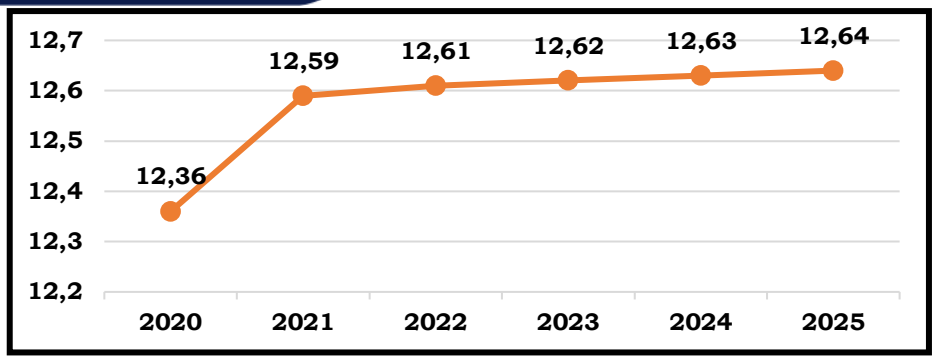


Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2026

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan lama sekolah pada rentang waktu Tahun 2020-2025 meningkat dari angka 12,36 menjadi 12,64. Harapan lama sekolah di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang paling besar dalam lima tahun terakhir sebesar 0,23 poin. Secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,64 tahun atau setara dengan Diploma I.

Gambar 2.35 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

C. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menggambarkan Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dan melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka Melek Huruf Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 sebesar 97,10 dan terus menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2024 telah mencapai 98,17 persen, Pada Tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 96,94, capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Pesawaran masih tergolong tinggi, hal ini menunjukan bahwa sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan di Kabupaten Pesawaran cukup baik sehingga memungkinkan sebagian besar penduduk dapat memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Tabel 2.29 Persentase Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2025

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Presentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf	97,10	97,10	97,10	98,31	98,17	96,94

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2026

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020–2024, pelaksanaan reformasi birokrasi kini diarahkan pada dua fokus utama, yaitu reformasi birokrasi general dan tematik. Dalam konteks ini, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi penggerak pada aspek reformasi hukum melalui pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRH).

IRH bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum dilakukan di tingkat daerah, termasuk pemetaan terhadap regulasi yang perlu disempurnakan, disederhanakan, atau dicabut, baik di level pusat maupun daerah. Untuk tahun 2024, Kabupaten Pesawaran meraih skor 66,20 dengan kategori Cukup Baik (B). Pada tahun 2025 capaian Kabupaten Pesawaran meningkat menjadi Istimewa 96,66 (AA) Capaian ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penyederhanaan regulasi dan penguatan tata kelola hukum yang lebih adaptif dan efisien, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan yang berkelanjutan.

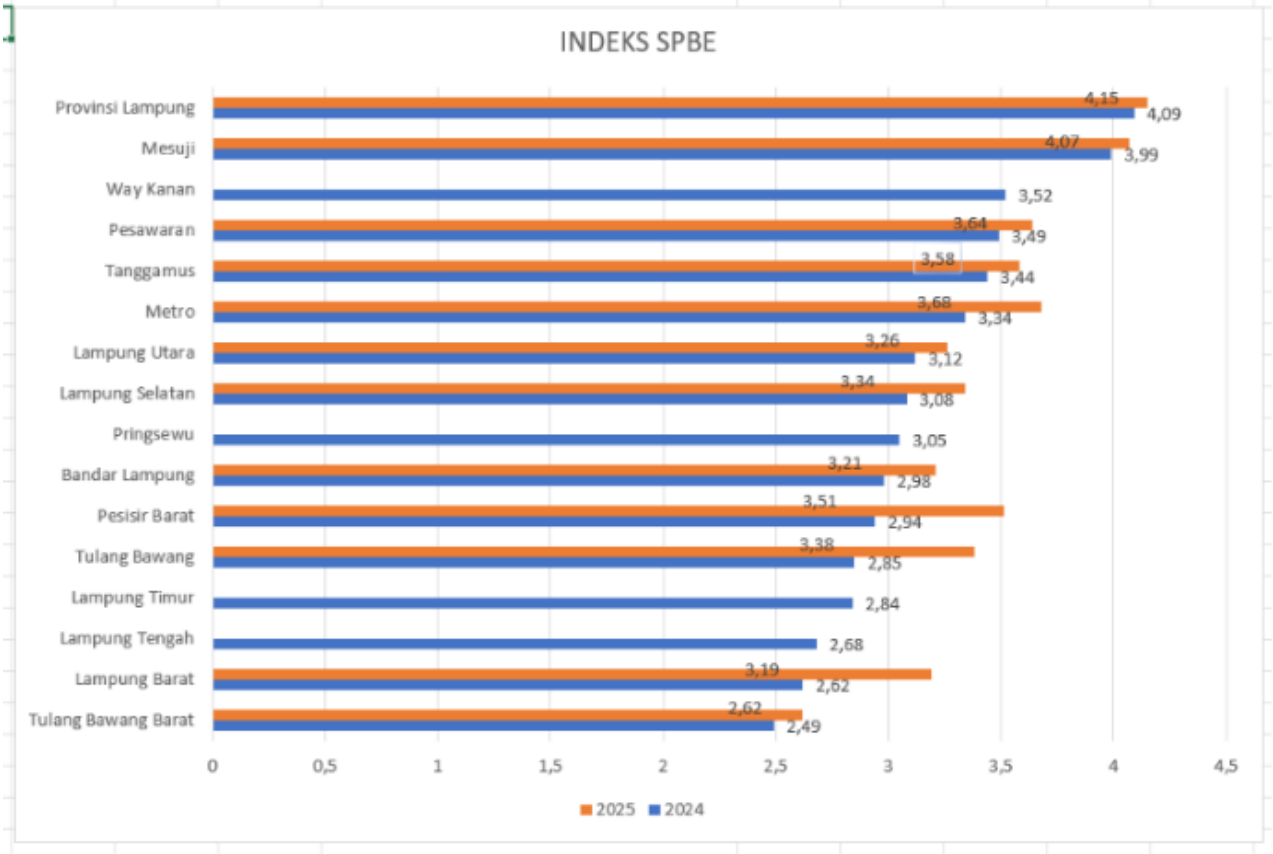
B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.

Bagi Kabupaten Pesawaran, penerapan SPBE menjadi peluang penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan melalui pemanfaatan TIK. SPBE mendorong terciptanya pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah, memperluas jangkauan layanan publik, serta meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui sistem pengawasan dan pengaduan berbasis digital.

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pesawaran menunjukkan peningkatan pada tahun 2025. Nilai indeks SPBE meningkat dari 3,49 pada tahun 2024 menjadi 3,64 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya berkelanjutan masih diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi, memperkuat keterbukaan informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel melalui transformasi digital yang berkelanjutan.

Gambar 2.36 Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2024-2025



Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Pesawaran, 2026

C. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Layanan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan good governance menuju clean governance. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam machinery of government (MoG) yakni interconnected between structural and process, belum semuanya memiliki standard operational procedure (SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang belum menerapkanthe right man in the right place.

Melalui reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, equity (rasa adil), dan ekonomis (hemat dan optimal). Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang

teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan nilai indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2025 berada pada angka 76,28 dengan predikat BB (Baik Sekali). Oleh karena itu kedepan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mengupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Misi ke-1 pembangunan daerah periode 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melakukan pencermatan dan penyelarasan terhadap seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2027 konsisten dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029. Penyelarasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan memiliki keterkaitan yang jelas dan terukur terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus berupaya memperkuat implementasi SAKIP melalui penyusunan perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), penyelarasan sasaran dan indikator kinerja pada setiap level perencanaan, serta penerapan prinsip money follow program dan money follow outcome dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan pendekatan tersebut, alokasi sumber daya diharapkan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga setiap program dan kegiatan mampu memberikan kontribusi yang nyata, terukur, dan berkelanjutan terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029.

Tabel 2.30 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025

NO	PENILAIAN	BOBOT	2023	2024	2025
A.	RB GENERAL	100	57,98	64,93	
B.	RB TEMATIK	20	10,29	11,16	
C.	INDEKS RB	120	68,27	76,09	76,28
			B	**BB**	**BB**

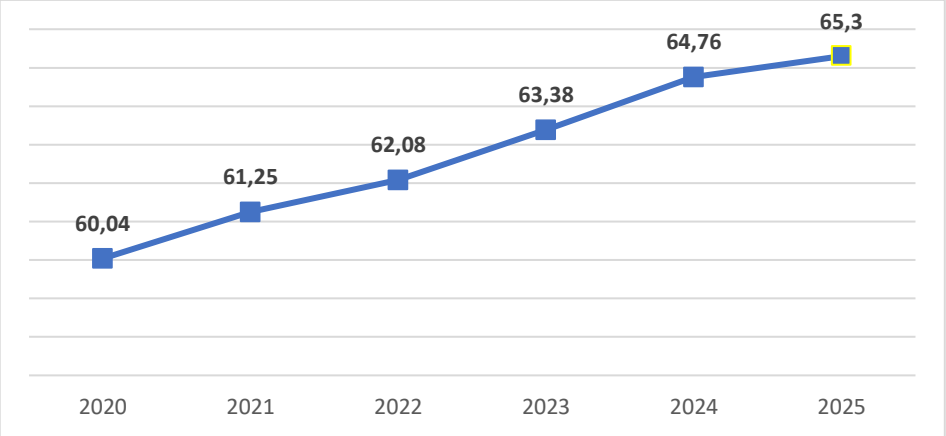
Sumber : Kemenpan RB, 2026

D. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja yang diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat empat komponen penilaian SAKIP yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Oleh karena itu, nilai SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.

Gambar 2.37 Grafik Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Pesawaran 2020-2025



Sumber : LHE Sakip Kabupaten Pesawaran, 2026

Sepanjang periode Tahun 2020 hingga 2025, pencapaian Nilai SAKIP terus mengalami peningkatan mulai dari angka 60,04 dengan predikat B berhasil meningkat menjadi 65,30 dengan predikat B. Dengan peningkatan nilai SAKIP ini, menunjukkan bahwa adanya peningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas dan transparan.

Permasalahan yang dihadapi yakni:

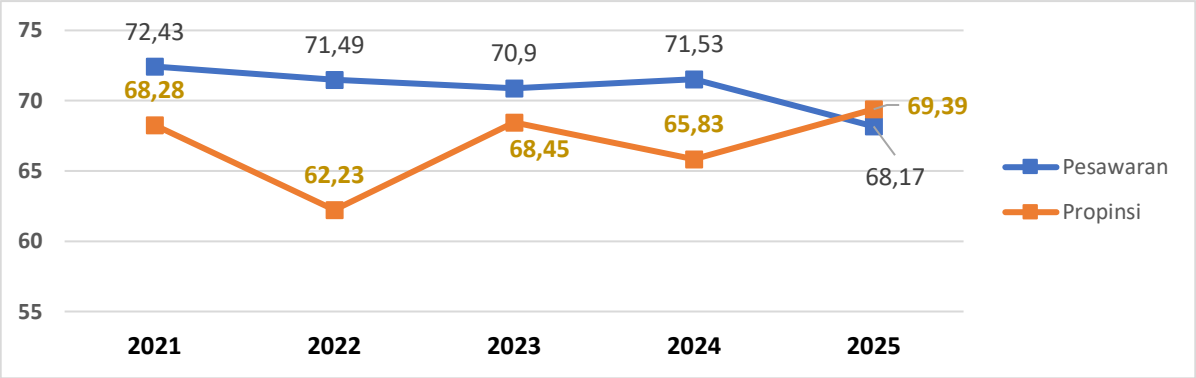
1. Logical framework yang disusun belum memetakan leveling kinerja berdasarkan pada pemetaan kondisi yang diperlukan saat mengidentifikasi CSF untuk setiap misi tersebut.
2. Masih terdapat formulasi indikator yang belumsesuai dengan kondisi sasaran yang ingin dicapai.
3. Penetapan target kinerja daerah maupun taret kinerja PD belum sepenuhnya melihat capaian kinerja tahun sebelumnya.
4. Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi pada Perangkat Daerah belum berjalan secara optimal dikarenakan feedback yang diberikan belum berjalan dua arah. Selain itu masih banyak capaian Perangkar Daerah yang belum tercapai.
6. LPPD belum sepenuhnya menjawab kinerja yang diperjanjikan di dalam perencanaan. Kinerja yang dijelaskan dalam LPPD hanya meliputi rangkuman capaian dan realisasi indikator sasaran tahun berjalan, serta perbandingan dengan target RPJMD dan tahun sebelumnya. LPPD tidak menjelaskan dan mengungkapkan dengan baik analisis ketercapaian atau kegagalan untuk setiap indikator sasaran maupun indikator tujuan, serta tidak ada penjelasan terkait factor penghambat/pendukung, solusi atas permasalahan dan analisis efesiensi ketercapaian kinerjanya.
7. Pelaporan kinerja pada beberapa PD tidak berbasis pada kinerja organisasi melainkan akumulasi kinerja bidang.
8. LPPD dan Laporan Kinerja PD belum di informasikan secara luas kepada publik sehingga proses transparasi atas informasi kinerja yang telah dilakukan belum berjalan optimal.
9. Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
10. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja yang disampaikan belum dilakukan secara berkala.

E. Indeks Integritas Kabupaten Pesawaran

Indeks Integritas Nasional bertujuan untuk mengukur tingkat resiko korupsi pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat serta data obyektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan dan para pihak pemangku kepentingan. Indeks Integritas Nasional atau Indeks Integritas Kabupaten Pesawaran (pada tingkat daerah) diperoleh nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dinilai dengan meliputi 7 (tujuh) elemen yaitu pengelolaan pengadaan barang dan jasa; integritas dalam pelaksanaan tugas; pengelolaan anggaran; transparansi; perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*); pengelolaan sumber daya manusia dan sosialisasi anti korupsi. Untuk capaian SPI Kabupaten Pesawaran dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 masih tergolong dalam kategori rentan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2.38 Grafik Survei Penilaian Integritas Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025



Sumber : Inspektorat Kabupaten Pesawaran, 2025

Dari hasil survey tersebut kemudian dihasilkan beberapa poin rekomendasi yakni meminimalisir perdagangan pengaruh dalam pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan daerah, memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal untuk mendeteksi kejadian korupsi, optimalisasi pengawasan internal dan eksternal, penguatan sosialisasi, kampanye dan pelatihan antikorupsi terhadap pegawai/pejabat dan pengguna layanan, peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan Conflict of Interest (COI), dan pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait korupsi.

2.1.3.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan indikator yang selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, berpotensi terjadi. Capaian angka kriminalitas yang ditangani tercatat selama periode Tahun 2020-2025 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2020 berada pada posisi 58,30 persen, kemudian Tahun 2021 sampai 2022 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2023 dan 2024 menurun ke angka 61,0% hinga tahun 2025 naik menjadi 108%. Dengan masih adanya jumlah kejahatan, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.31 Persentase Capaian Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2020-2025

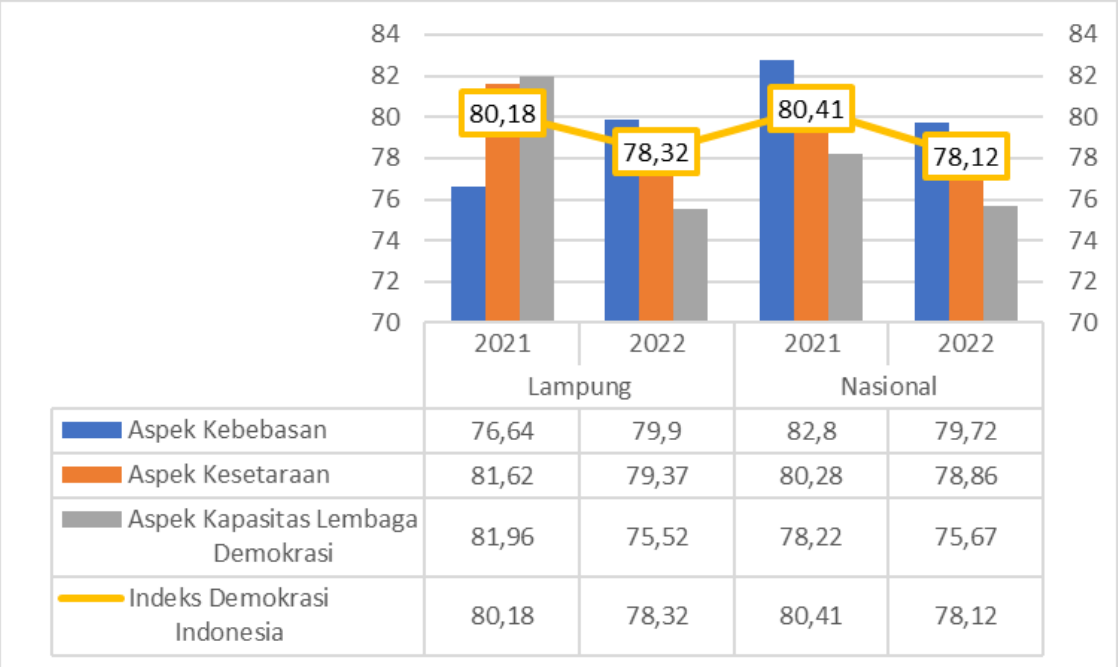
Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kriminalitas	58,30	70,81	92,00	72,00	61,00	108

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2026

B. Indeks Demokrasi

Daerah dengan indeks demokrasi yang tinggi biasanya menikmati stabilitas politik yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintahan yang demokratis cenderung lebih transparan dan akuntabel, mengurangi risiko politik dan membuat daerah tersebut lebih menarik bagi investasi. Sistem demokrasi yang kuat sering kali juga berkaitan dengan sistem hukum yang lebih andal, di mana hak-hak properti dan kontrak bisnis dilindungi dengan baik. Hal ini sangat penting bagi investor yang mencari jaminan bahwa investasi mereka aman dari tindakan sewenang-wenang. Pada tahun 2022, Indeks Demokrasi Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 80,18 pada tahun 2021 menjadi 78,32. Meskipun aspek kebebasan meningkat, penurunan ini disebabkan oleh penurunan dalam aspek kesetaraan dan kapasitas lembaga. Penurunan di Lampung ini sejalan dengan tren nasional, di mana Indeks Demokrasi Nasional juga mengalami penurunan di seluruh aspek, termasuk kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas demokrasi baik di Lampung maupun di tingkat nasional.

Gambar 2.39 Indeks Demokrasi Provinsi Lampung dan Indonesia

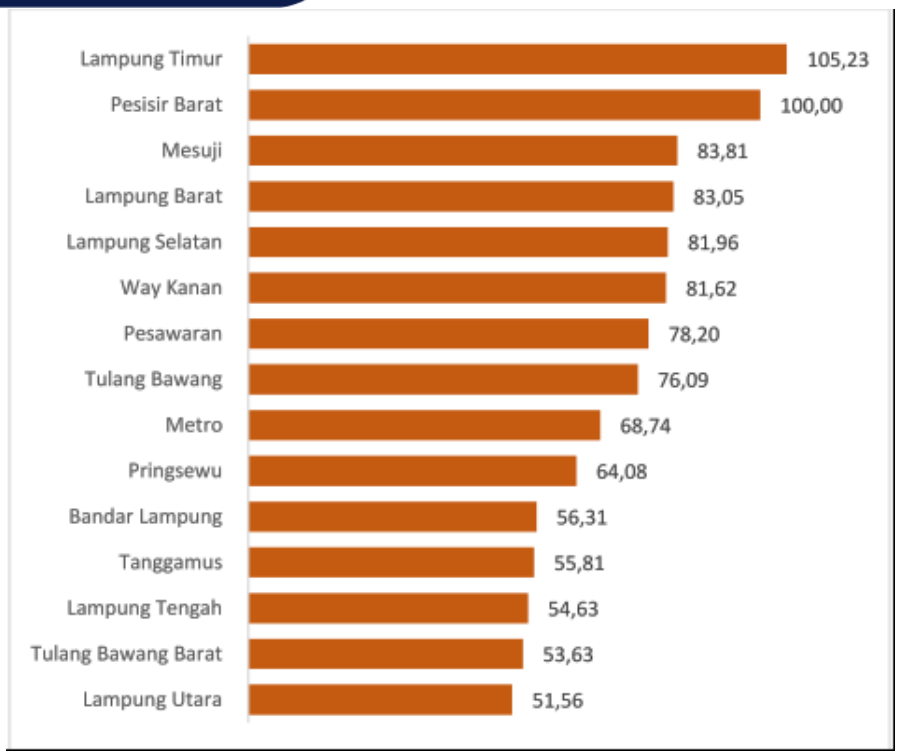


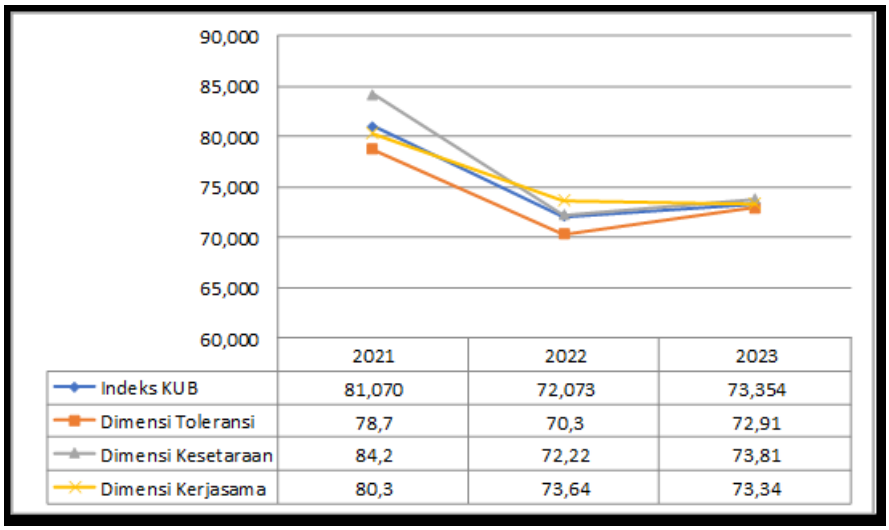
Sumber : BPS RI, 2023

C. Rasa Aman dan Kerukunan Umat Beragama

Dalam konteks daya saing investasi, Rasa Aman dan Kerukunan Umat Beragama memainkan peran kunci. Meskipun Indeks Rasa Aman mungkin belum tersedia, Clearance Rate atau tingkat penyelesaian tindak kriminal dapat memberikan gambaran tentang keefektifan penegakan hukum dan tingkat keamanan suatu wilayah. Semakin tinggi Clearance Rate, semakin efisien penegakan hukum dan semakin rendah tingkat kejahatan yang terjadi, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi investasi. Jika tingkat kejahatan berhasil ditekan dan kasus-kasus kriminal ditangani dengan baik, maka investor cenderung merasa lebih percaya diri dalam berinvestasi di wilayah tersebut, yang dapat meningkatkan daya saing investasi secara keseluruhan.

Gambar 2.40 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (Clearance Rate) Tahun 2022 dan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 di Provinsi Lampung





	2021	2022	2023
Indeks KUB	81,070	72,073	73,354
Dimensi Toleransi	78,7	70,3	72,91
Dimensi Kesetaraan	84,2	72,22	73,81
Dimensi Kerjasama	80,3	73,64	73,34

Sumber : Laporan Polres/Polresta se Provinsi Lampung, 2022 & Balitbang Kemenag RI, 2023

Meskipun rerata Indeks Rasa Aman dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Lampung pada tahun 2023 tergolong tinggi dengan angka 73.35, menunjukkan kondisi keamanan dan kerukunan yang baik secara umum, namun kenyataannya, Kabupaten Tanggamus masih menghadapi tantangan signifikan dalam penanganan tindak kriminal. Dengan Clearance Rate sebesar 55.81 pada tahun 2022, yang merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Lampung, hanya sebagian kecil dari kasuskasus kriminal yang berhasil diselesaikan. Hal ini menempatkan Kabupaten Tanggamus di posisi keempat terbawah di tingkat provinsi. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Indeks KUB Provinsi Lampung mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perubahan atau pergeseran dalam situasi keamanan dan kerukunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, meskipun

secara umum Provinsi Lampung memiliki tingkat keamanan yang tinggi, perlu perhatian khusus dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan menangani tantangan keamanan di tingkat lokal, terutama di Kabupaten Pesawaran.

2.1.3.3 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Pesawaran mencerminkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Urusan pemerintahan daerah terbagi menjadi dua kategori, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib mencakup sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Sementara itu, urusan pilihan meliputi bidang-bidang seperti pariwisata, pertanian, kelautan, dan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi unggulan daerah.

Penilaian kinerja atas pelaksanaan urusan-urusan ini tidak hanya dilihat dari realisasi program dan serapan anggaran semata, melainkan juga dari sejauh mana hasil kebijakan dan program pemerintah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan mencakup kualitas layanan, efisiensi penggunaan anggaran, keterjangkauan program terhadap kebutuhan masyarakat, serta dampaknya terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kinerja yang baik pada setiap urusan pemerintahan menunjukkan bahwa perencanaan yang dibuat mampu diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program yang efektif dan berdampak. Hal ini juga mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal dan akuntabel. Selain itu, keberhasilan dalam berbagai urusan pemerintahan menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran secara konsisten berupaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu perencanaan yang berbasis data, pelaksanaan yang transparan, serta pelaporan dan evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga menjadi dasar penting dalam melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Peningkatan kinerja pada setiap urusan pemerintahan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan daerah. Selain itu, kinerja yang terus membaik akan menjadi fondasi kuat bagi Kabupaten Tanggamus dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efisien dalam penggunaan anggaran, serta demokratis dalam proses pengambilan keputusan. Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan komitmennya untuk terus bergerak menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

A. Pelayanan Urusan Wajib

1). Urusan Pendidikan

2.1.3.3.A.1.1 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Indikator ini berguna untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid, agar tercapai mutu, baik proses maupun hasil pengajaran yang diharapkan. Hal ini dapat dibaca, makin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata jenjang SD Kabupaten Pesawaran Pada Tahun 2020 sebesar 12 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 15. Pada tahun 2022 mengalami penurun menjadi 14 terus stabil sampai dengan Tahun 2025. Hal ini menggambarkan ketersediaan guru di Kabupaten Pesawaran sudah ideal dan mencukupi terkhusus untuk guru sekolah dasar.

Tabel 2.32 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Jenjang SD Tahun 2020-2025

Indikator		Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Guru	2.959	2.888	3.045	3.021	3,032	3,040
Jumlah Peserta Didik	35.511	42.291	41.799	41.947	42.012	42.075
Rasio Guru terhadap Murid per Kelas	1:12	1:15	1:14	1:14	1:14	1:14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, 2026

Selanjutnya untuk rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata jenjang SMP pada tahun 2020 sebesar 9 yang terus menunjukan trend meningkat sampai dengan Tahun 2025 berada pada angka 14 Hal ini menggambarkan ketersediaan guru di Kabupaten Pesawaran sudah ideal dan mencukupi terkhusus untuk guru sekolah Menengah Pertama.

Tabel 2.33 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Jenjang SMP Tahun 2020-2025

Indikator		Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Guru	1.150	1.137	1.131	1.111	1.125	1.118
Jumlah Peserta Didik	10.307	15.195	15.542	15.737	16.318	16.082
Rasio Guru terhadap Murid per Kelas	1:9	1:13	1:14	1:14	1:15	1:14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, 2026

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang optimal di seluruh satuan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyadari pentingnya ketersediaan tenaga pendidik yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih adanya kekurangan guru di beberapa jenjang dan mata pelajaran tertentu, terutama pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil atau kurang terjangkau.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melakukan upaya strategis dengan mengusulkan formasi penambahan guru melalui mekanisme penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dalam bentuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku secara nasional.

Usulan formasi ini disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan guru yang dilakukan secara sistematis oleh Dinas Pendidikan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dengan mempertimbangkan rasio ideal antara jumlah siswa dan guru, peta sebaran guru di setiap sekolah, serta proyeksi kebutuhan tenaga pengajar di masa mendatang. Dalam proses penyusunan formasi, pemerintah daerah juga mengacu pada hasil pendataan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem manajemen ASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dengan pengajuan formasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap agar kebutuhan tenaga guru yang saat ini belum terpenuhi dapat segera dilengkapi melalui proses seleksi nasional. Penambahan jumlah guru tidak hanya diharapkan mampu mengurangi beban kerja guru yang ada, tetapi juga meningkatkan efektivitas pembelajaran, memperkuat mutu layanan pendidikan, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah kabupaten.

Lebih lanjut, langkah ini merupakan bagian integral dari kebijakan jangka menengah dan panjang pemerintah daerah dalam pembangunan sektor pendidikan. Pemenuhan kebutuhan guru secara terencana dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan, sejalan dengan visi misi pembangunan daerah serta tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Tabel 2.34 Jumlah Sekolah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2025

No	Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah				
		Kemendikbud		Kemenag		Total
		Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	
1	PAUD	139	2	54		195
2	Sekolah Dasar	24	277	77	2	380
3	Sekolah Menengah	28	42	54	2	126
Total		191	321	185	4	701

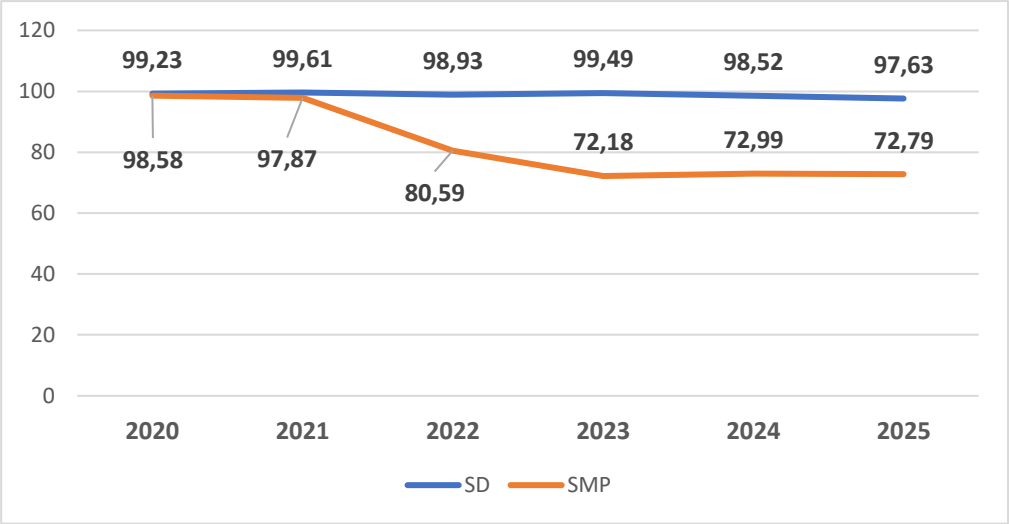
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, 2026

Dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan di Kabupaten Pesawaran saat ini terdapat fasilitas pendidikan mulai dari PAUD, SD dan Pendidikan menengah dimana pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa jumlah sekolah negeri yang ada di Kabupaten Pesawaran adalah 325 dengan rincian 321 merupakan sekolah negeri dibawah Kemendikbud dan 4 Sekolah negeri dibawah Kemenag.

2.1.3.3.A.1.2 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perkembangan APM di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2020-2025 secara umum berfluktuatif. Pada Tahun 2020 APM jenjang SD berada pada angka 99,23% menurun menjadi 97,63% pada Tahun 2025. Sedangkan APM jenjang SMP pada Tahun 2020 berada pada angka 98,58% dan menurun menjadi 72,79% pada Tahun 2025. Secara umum APM jenjang SD lebih tinggi daripada jenjang SMP sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat anak usia pada pendidikan menengah yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari jenjang SD.

Gambar 2.41 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2026

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan sejumlah intervensi strategis yang difokuskan pada peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah di wilayah tersebut. Intervensi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menurunkan angka putus sekolah serta mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tergolong rentan secara sosial dan ekonomi.

Salah satu bentuk intervensi yang telah dilaksanakan adalah pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang kerap menjadi kendala utama dalam keberlangsungan proses belajar siswa di tingkat SMP. Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar siswa seperti seragam sekolah, tas, sepatu, alat tulis, dan perlengkapan penunjang belajar lainnya. Pendistribusian bantuan dilakukan secara selektif berdasarkan hasil verifikasi data yang dihimpun dari satuan pendidikan dan pemerintah desa, sehingga bantuan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan sekolah siswa penerima manfaat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga telah melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara menyeluruh sebagai langkah awal untuk menyusun kebijakan berbasis data. Pendataan ini bertujuan untuk mengidentifikasi anak usia sekolah yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal maupun nonformal, serta menggali faktor-faktor penyebab ketidakterlibatan mereka dalam sistem pendidikan.

Melalui pelaksanaan intervensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan peran aktifnya dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi

pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan, yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga untuk membangun fondasi pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan capaian APM jenjang SMP di Kabupaten Pesawaran dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan membaiknya kualitas layanan pendidikan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran akan memperkuat upaya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP melalui kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, UPTD Pendidikan, serta seluruh satuan pendidikan. Kolaborasi ini diwujudkan Untuk memastikan keberlanjutan siswa ke jenjang berikutnya.

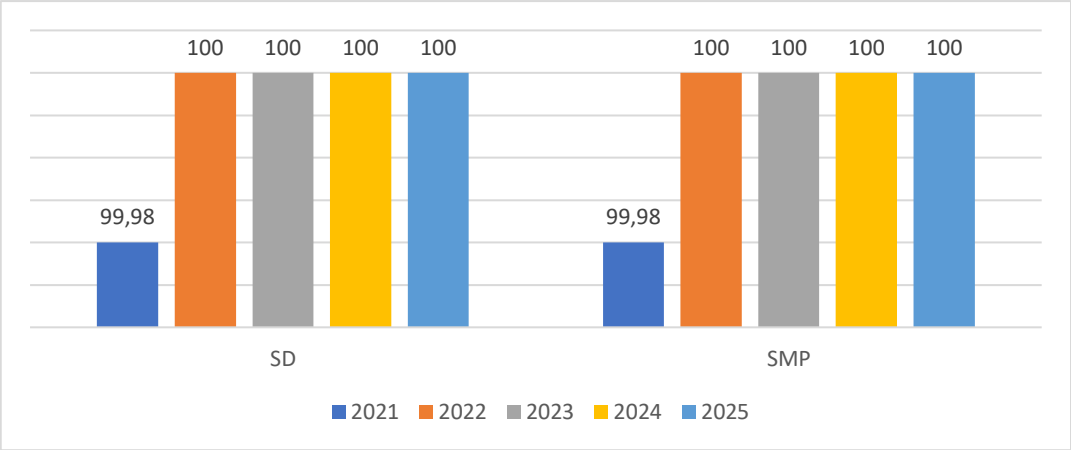
Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan berkoodinasi dengan Camat, Kepala Desa, dan Kepala Sekolah untuk melakukan skrining dini terhadap peserta didik maupun anak usia sekolah yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, geografis, maupun faktor lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran akan menjadikan hasil Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi guru melalui penguatan KKG, MGMP, komunitas belajar, pendampingan oleh pengawas sekolah, serta penerapan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Selain itu, budaya membaca, asesmen diagnostik, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran akan terus dioptimalkan di seluruh satuan pendidikan. Untuk memastikan keberhasilan program, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian Rapor Pendidikan setiap sekolah, disertai pendampingan khusus bagi satuan pendidikan yang masih memiliki capaian rendah. Melalui langkah tersebut diharapkan terjadi peningkatan hasil Asesmen Nasional, baik pada aspek literasi, numerasi, karakter, maupun iklim pembelajaran, sehingga mutu pendidikan dasar di Kabupaten Pesawaran meningkat secara berkelanjutan

2.1.3.3.A.1.3 Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2020-2025 untuk SD dan SMP rekatif stabil pada rentang 2020-2025. Pada akhir periode Tahun 2025 angka kelulusan SD dan SMP telah mencapai 100% dan perlu dipertahankan untuk kedepannya.

Gambar 2.42 Grafik Angka Kelulusan Tahun 2020-2025

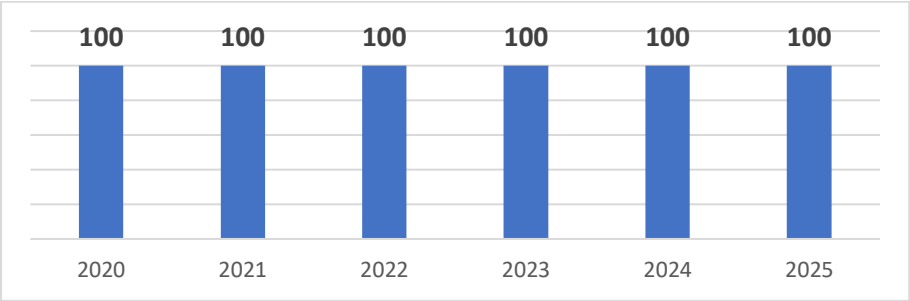


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2026

2.1.3.3.A.1.4 Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP 100 persen selama lima tahun. Pada Tahun 2020 tercatat seluruh murid SD/MI telah lulus dan melanjutkan ke jenjang SMP dan sampai dengan Tahun 2025 Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP bertahan di angka 100%. Hal ini menunjukkan minat murid SD/MI di Kabupaten Pesawaran untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya tetap tinggi.

Gambar 2.43 Grafik Angka Melanjutkan Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, 2026

2.1.3.3.A.1.5 Data Presentase Penduduk Melek Huruf

Angka Melek Huruf menggambarkan Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dan melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka Melek Huruf Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 sebesar 97,10 dan terus menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2025 telah mencapai 96,94 persen, hal ini menunjukan bahwa sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan di Kabupaten Pesawaran cukup baik sehingga memungkinkan sebagian besar penduduk dapat memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Tabel 2.35 Persentase Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2025

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Presen Presentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf	97,10	97,10	97,10	98,31	98,17	96,94

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2026

2.1.3.3.A.1.6 Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)

Salah satu tantangan pembangunan pendidikan Indonesia terkait partisipasi sekolah adalah masih adanya anak yang tidak sekolah (ATS). Anak Tidak Sekolah adalah persentase penduduk usia jenjang pendidikan tertentu yang tidak sedang bersekolah. Penduduk yang sedang prasekolah dianggap sebagai bersekolah. Penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi namun telah memiliki ijazah SMA ke atas dianggap sebagai bersekolah. Umur yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah umur pada saat awal tahun pembelajaran.

Keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi indikator langsung bahwa masih terdapat hambatan akses, keterbatasan layanan pendidikan, kurang optimalnya pendataan, atau belum tersedianya intervensi afirmatif bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penanganan ATS merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti secara sistematis dan berkelanjutan.

Anak tidak sekolah di Kabupaten Pesawaran berjumlah 3.511 jiwa, sebagian besar disebabkan karena mereka tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah dan sisanya mereka yang tidak memliki motivasi dan keinginan untuk bersekolah. Sebaran anak tidak sekolah di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.36 Angka Anak Tidak Sekolah Tahun 2025

No	Kecamatan	Kelompok Umur				Total
		<7	7 – 12	13 -15	> 15	
1	Kec. Padang Cermin	0	38	47	151	236
2	Kec. Punduh Pedada	0	19	30	81	130
3	Kec. Kedondong	0	66	92	241	399
4	Kec. Way Lima	0	45	69	190	304
5	Kec. Gedung Tataan	0	78	122	355	555
6	Kec. Negeri Katon	0	52	79	259	390
7	Kec. Tegineneng	0	57	63	231	351
8	Kec. Marga Punduh	0	31	28	80	139
9	Kec. Way Khilau	0	65	91	196	352
10	Kec. Teluk Pandan	0	57	95	265	415

No	Kecamatan	Kelompok Umur				Total
		<7	7 – 12	13 -15	> 15	
11	Kec. Way Ratai	0	38	48	154	240
	Residu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen, 2024

Upaya penanganan ATS di Kabupaten Pesawaran meliputi membentuk tim kerja yang melibatkan lintas sektor dan memastikan peran masing-masing sektor, Sosialisasi Program ATS kepada Aparatur Desa dan masyarakat mengenai pentingnya penanganan ATS, pendataan dan validasi data ATS untuk mendapatkan data yang akurat dan mengidentifikasi penyebab ATS (kondisi sosial, ekonomi, geografis, motivasi, budaya dan layanan sekolah), intervensi program, menyusun intervensi untuk ATS agar kembali bersekolah, memastikan keberlanjutan pendidikan ATS yang sudah kembali bersekolah, hingga monitoring dan evaluasi.

2.1.3.3.A.1.7 Angka Literasi (Numerasi)

Nilai skor PISA, hanya didapat nilainya secara Nasional, belum dapat diturunkan menjadi nilai masing-masing Provinsi. Oleh sebab itu untuk menilai kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter, Provinsi Lampung menggunakan Asesman Kompetensi Literasi, numerasi dan pendidikan karakter yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional yang diambil dari Platform Rapor Pendidikan Provinsi Lampung, pada tahun 2025, Kompetensi Literasi, numerasi dan pendidikan karakter Kabupaten Pesawaran pada jenjang SD dan SMP dapar dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Hasil Asesmen Nasional terkait Kompetensi Minimum dan Survei Karakter di Provinsi Lampung Tahun 2023-2025

No	Indikator	2023	2024	2025
1	Kemampuan Literasi			
	SD	65,51	63,49	54,79
	SMP	67,12	62,24	65,68
2	Kemampuan Numerasi			
	SD	57,96	60,20	48,34
	SMP	64,14	67,65	63,78
3	Iklim Keamanan			
	SD	70,56	69,59	68,1
	SMP	66,98	66,45	66,23
4	Iklim Kebinekaan			

No	Indikator	2023	2024	2025
	SD	71,04	68,41	62,42
	SMP	70,27	67,55	63,09
5	Iklim inklusivitas			
	SD	53,48	54,58	53,82
	SMP	54,41	54,22	55,59

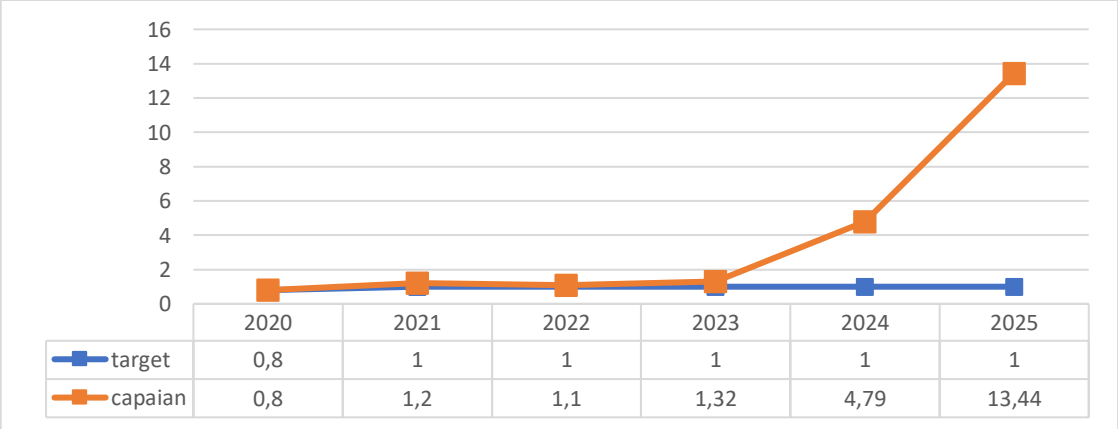
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, 2026

2). Urusan Kesehatan

2.1.3.3.A.2.1 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Infant Mortality Rate atau Angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi. AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita.

Gambar 2.44 Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Tahun 2020-2025



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
target	0,8	1	1	1	1	1
capaian	0,8	1,2	1,1	1,32	4,79	13,44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

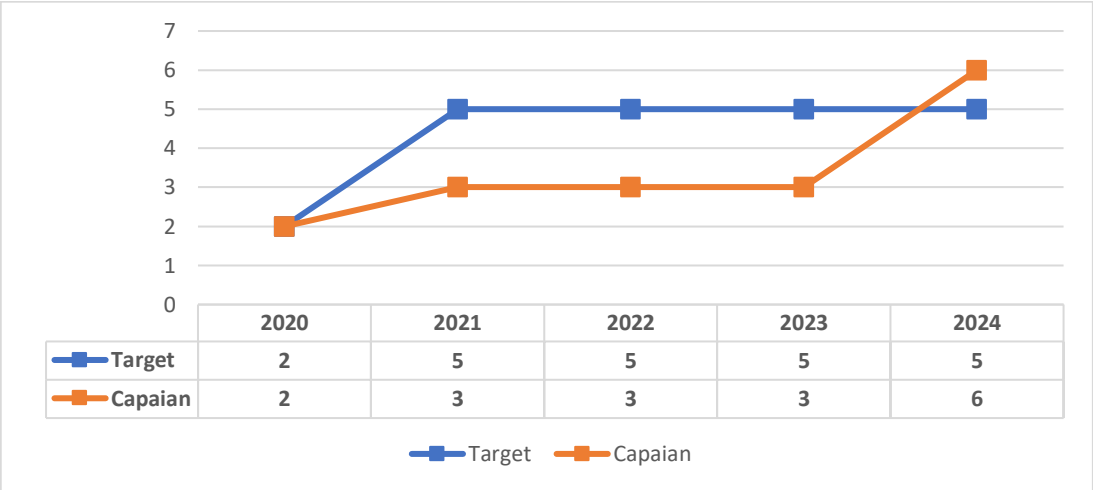
Dalam kurun waktu 6 tahun (2020-2025), Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pesawaran berfluktuasi, pada tahun 2020 sebesar 0,80 per1000KH, selanjutnya tahun 2021 menjadi 1,20 per 1000KH, pada tahun 2022 turun menjadi 1,10 per 1000KH, tahun 2022 menurun menjadi 1,10 per 1000KH, tahun 2023 meningkat kembali menjadi 1,32 per 1000KH dan pada tahun 2025 meningkat cukup signifikan menjadi 13,44 per 1000KH, seperti tampak pada berikut:.

2.1.3.3.A.2.2 Kasus Kematian Ibu

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa

kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Maternal berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu kondisi Kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.Untuk Kabupaten Pesawaran jumlah kelahiran hidup masih belum mencapai 100.000 sehingga belum bisa diperkirakan angka kematian ibu (AKI), sehingga menggunakan jumlah kasus kematian ibu maternal. Untuk jumlah kasus kematian ibu maternal selama kurun waktu tahun 2023-2025 cenderung meningkat seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 2.45 Grafik Kasus Kematian Ibu di Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Jumlah kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus, tahun 2021 meningkat menjadi 3 kasus, sampai tahun 2023 tidak ada peningkatan yaitu sebanyak 3 kasus. Selanjutnya di tahun 2024 meningkat sebanyak dua kali lipat menjadi 6 kasus, tahun 2025 turun menjadi 5 kasus. Adapun penyebab kematian ibu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ibu mengalami pendarahan 1 kasus, ibu mengalami gangguan hipertensi 1 kasus, ibu mengalami infeksi 1 kasus, dan ibu mengalami komplikasi obstetrik 1 kasus dan komplikasi non obstetrik 1 kasus. Target Kabupaten Pesawaran untuk indikator Kasus Kematian Ibu dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 ditetapkan mencapai 6 kasus pada akhir periode di tahun 2029. Angka ini meningkat dari baseline yang berada di posisi 8 kasus . Pada tahun 2027 target Kasus kematian ibu sebesar 7 kasus.

2.1.3.3.A.2.3 Persentase Cakupan Mutu Pelayanan Kesehatan

Untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali, hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 40 ayat 1, menyatakan bahwa, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit

wajib dilakukan akreditasi secara berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi wajib bagi semua rumah sakit baik rumah sakit publik/pemerintah maupun rumah sakit privat/swasta/BUMN. Pada tahun 2025 Kabupaten Pesawaran memiliki 1 Rumah sakit milik pemerintah, 15 Puskesmas dan 38 Puskesmas Pembantu.

Tabel 2.38 Persebaran Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2025

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PUSKESMAS PEMBANTU	STATUS	
				BLUD	AKREDITASI
1.	Punduh Pedada	Pedada	3	✓	✓
2.	Padang Cermin	Padang Cermin	1	✓	✓
3.	Way Ratai	Bunut	3	✓	✓
4.	Teluk Pandan	Hanura	2	✓	✓
5.	Kedondong	Kedondong	5	✓	✓
6.	Way Lima	Kota Dalam	4	✓	✓
7.	Gedong Tataan	Gedong Tataan	3	✓	✓
		Bernung	3	✓	✓
8.	Negeri Katon	Roworejo	3	✓	✓
		Kalirejo	2	✓	✓
9.	Tegineneng	Tegineneng	2	✓	✓
		Trimulyo	3	✓	✓
10.	Marga Punduh	Maja	2	✓	✓
11.	Way Khilau	Gunung Sari	1	✓	✓
		Kota Jawa	1	✓	✓
JUMLAH			**38**	**15**	**15**

Sumber : Pendataan Puskesmas Tahun 2026

Dari 15 Puskesmas yang berada di 11 kecamatan pada Kabupaten Pesawaran, 15 Puskesmas telah menerapkan pola tatakelola keuangan BLUD dan 15 puskesmas berstatus terakreditasi. Berikut adalah hasil dari akreditasi Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.39 Penilaian Akreditasi Puskesmas Tahun 2025

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	AKREDITASI	
			HASIL	KETERANGAN
1.	Punduh Pedada	Pedada	Utama	Re-Akreditasi
2.	Padang Cermin	Padang Cermin	Utama	Re-Akreditasi
3.	Way Ratai	Bunut	Utama	Re-Akreditasi
4.	Teluk Pandan	Hanura	Paripurna	Re-Akreditasi
5.	Kedondong	Kedondong	Utama	Re-Akreditasi
6.	Way Lima	Kota Dalam	Utama	Re-Akreditasi

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	AKREDITASI	
			HASIL	KETERANGAN
7.	Gedong Tataan	Gedong Tataan	Paripurna	Re-Akreditasi
		Bernung	Paripurna	Re-Akreditasi
8.	Negeri Katon	Roworejo	Paripurna	Re-Akreditasi
		Kalirejo	Paripurna	Re-Akreditasi
9.	Tegineneng	Tegineneng	Utama	Re-Akreditasi
		Trimulyo	Madya	Re-Akreditasi
10.	Marga Punduh	Maja	Utama	Akreditasi
11.	Way Khilau	Gunung Sari	Utama	Akreditasi
		Kota Jawa	Utama	Akreditasi

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

Pada tahun 2024 dilakukan Akreditasi pada 3 puskesmas yaitu Puskesmas Maja, Puskesmas Gunung Sari dan Puskesmas Kota Jawa, dan 12 Puskesmas melakukan Re-Akreditasi. Pada awalnya setiap tahunnya ada 4 puskesmas yang melakukan penilaian reakreditasi, namun karena terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi secara global termasuk Indonesia, maka proses reakreditasi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 tertunda.

2.1.3.3.A.2.4 Rasio Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Tabel dibawah ini, rasio tenaga kesehatan dan dokter secara umum masih belum ideal terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2020 rasio dokter yaitu 1 dokter melayani 9.182 penduduk yang mana rasio ini perkembangannya berfluktuasi dan sampai dengan Tahun 2025 rasio dokter mencapai 1 dokter untuk 4.402 penduduk. Adapun untuk rasio tenaga kesehatan perkembangannya berfluktuasi dimana pada Tahun 2018, 1 tenaga kesehatan melayani 446 penduduk dan pada Tahun 2025 berada pada rasio 1 berbanding 467. Oleh karena itu perlunya penambahan jumlah dokter dan tenaga medis sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada penduduk dengan harapan dapat mencapai kondisi ideal rasio 1 dokter melayani 1.000 penduduk.

Tabel 2.40 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Dokter	52	59	53	57	68	115
Jumlah Tenaga Kesehatan	1.193	1.193	1.238	1.273	1.646	1.084
Jumlah Penduduk	477.470	481.708	487.150	492.474	500.298	506.261
Rasio Dokter per Satuan Penduduk	1 : 9.182	1 : 8.165	1 : 9.192	1 : 8.639	1 : 7.357	1 : 4.402
Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk	1 : 400	1 : 404	1 : 393	1:387	1 : 304	1 : 467

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Rasio dokter terus diupayakan melalui usulan formasi pengadaan dokter. Sedangkan untuk daerah sulit akses dan pedesaan selain membentuk dan memberikan bantuan transport kepada petugas homecare, Kabupaten Pesawaran melalui dinas kesehatan juga menjalankan program Integrasi Layanan Primer ILP, dimana di setiap desa akan dilengkapi faskes dan petugas kesehatan yang terdiri 1 bidan, 1 perawat dan 1 kader kesehatan yg terlatih dan ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

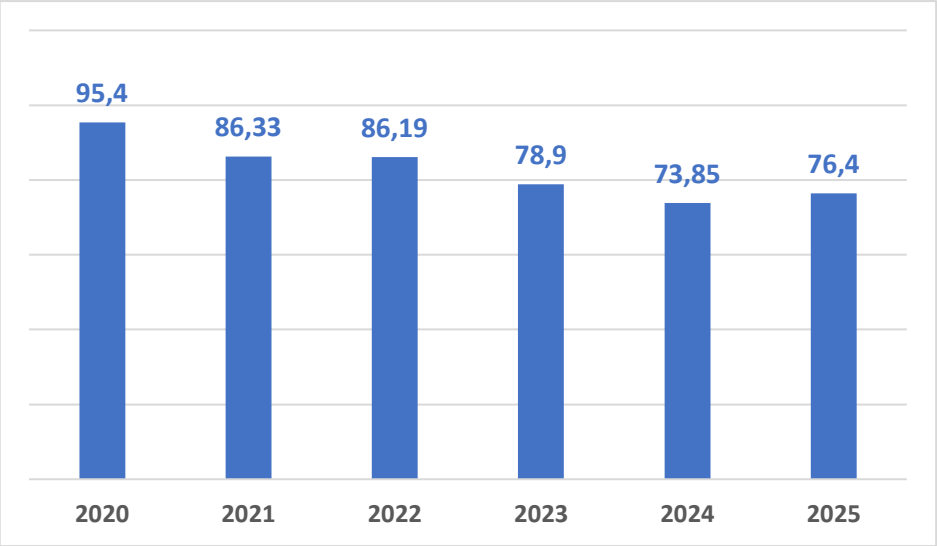
Program Layanan Primer ILP difokuskan dilaksanakan dalam bentuk:

a. Edukasi Penduduk, yaitu dengan melakukan penguatan peran kader, kampanye, dan membangun gerakan, menggunakan platform digital dan tokoh masyarakat.
b. Pencegahan Primer, dilakukan dengan melakukan penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.
c. Pencegahan Sekunder, yaitu dengan melakukan skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining, stunting, dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi.
d. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer, dengan melakukan revitalisasi network dan standarisasi pelayanan di Puskesmas, posyandu, dan kunjungan Rumah.

2.1.3.3.A.2.5 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di FASYANKES

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang berada pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pesawaran dari periode Tahun 2020 sampai Tahun 2024 menurun. Tercatat pada tahun 2024 telah mencapai 73,85%, namun pada tahun 2025 meningkat menjadi 76,4%, artinya bahwa proses persalinan sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi SPM (tercapai 100%).

Gambar 2.46 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2020-2025

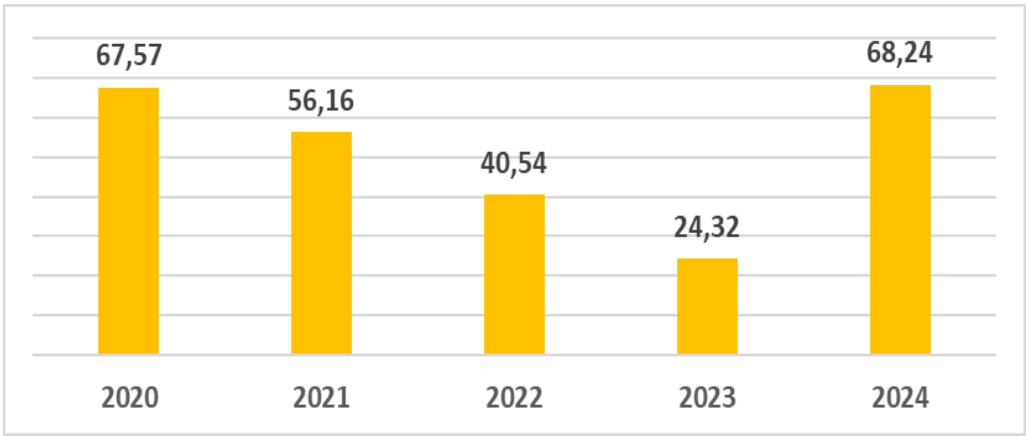


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

2.1.3.3.A.2.6 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Perkembangan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2020-205 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020-2023 terus menurun mencapai angka terendah yaitu 24,32 kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang berada pada 68,24.

Gambar 2.47 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

2.1.3.3.A.2.7 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Pesawaran selama periode 2020-2025 sudah mencapai 100% . Hal ini menunjukan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk di Tahun 2020-2025 telah tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM Kementerian Kesehatan (100%). Kemudian pada Tahun 2023-2025 mencatat bahwa tidak

terdapat kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kabupaten Pesawaran .

Tabel 2.41 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100	100	100	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	100
Standar Minimal	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 2026

2.1.3.3.A.2.8 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Berdasarkan Tabel dibawah ini, perkembangan kasus penyakit DBD berfluktuasi setiap tahunnya, pada Tahun 2020 terdapat 372 kasus pada dan 2021, selanjutnya meningkat menjadi 432 kasus pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 kembali menurun menjadi 148 dan pada Tahun 2024 jumlah kasus yang terjadi mengalami peningkatan yang tinggi menjadi 500 dan pada tahun 2025 mencapai 541 kasus. Hal tersebut disebabkan terjadinya curah hujan yang lebih tinggi pada Tahun 2025 namun dapat ditangani dengan baik dari periode 2020 sampai 2025.

Tabel 2.42 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus	372	372	432	148	500	541

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

2.1.3.3.A.2.9 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika melihat angka pada tabel di bawah maka terlihat bahwa sampai ada Tahun 2025 Kabupaten Pesawaran sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Tabel 2.43 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun

	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	100	100	100	100
Standar Minimal	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Kepesertaan Jaminan pemeliharaan kesehatan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 mencakup 485.294 peserta atau sebesar 95,60% dari jumlah total penduduk Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 507.656 penduduk. Jumlah keaktifan peserta adalah sebesar 69,72%. Peserta jaminan pelayanan kesehatan terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI. Peserta PBI di Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah peserta sebanyak 322.344 atau sebesar 63,67%. Sedangkan Peserta Non PBI memiliki jumlah peserta sebanyak 137.646 atau sebesar 27,19%. Target cakupan kepesertaan tahun 2025 adalah sebesar 100% dan target keaktifan peserta tahun 2025 adalah sebesar 80%.

Cakupan keaktifan JKN sebesar 69,72% masih dibawah target disebabkan Penonaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan (JK) dan kurangnya Anggaran untuk Pengaktifan Jamkesda PBI APBD. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial untuk reaktivasi Peserta yang terdaftar PBI JK serta berkooordinasi dengan BAPPEDA dan BPKAD untuk penambahan anggaran.

2.1.3.3.A.2.10 Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian

Kasus penyakit malaria dalam rentang waktu Tahun 2020-2025 jumlahnya berfluktuasi dari Tahun awal sebanyak 63 kasus per 100.000 penduduk menjadi 402 kasus per 100.000 pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 312 kasus. Banyaknya jumlah kasus malaria tersebut masih dapat diimbangi dengan penanganan yang baik oleh pelayanan kesehatan sehingga tidak terdapat kasus kematian akibat kejadian malaria. Target orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria tahun 2027 sebesar 980 orang.

Penemuan kasus aktif (Active Case Detection / ACD) belum dilakukan secara optimal dan berkesinambungan di desa - desa endemis, sehingga masih terdapat keterlambatan diagnosis dan pengobatan yang berpotensi meningkatkan penularan.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran untuk mendeteksi kasus secara dini di desa-desa berisiko tinggi

1. Menyusun pemetaan desa berdasarkan stratifikasi risiko malaria sebagai dasar penentuan prioritas intervensi.

2. Melaksanakan Active Case Detection (ACD) secara berkala di desa berisiko tinggi melalui kunjungan rumah oleh petugas Puskesmas bersama kader malaria.
3. Meningkatkan kapasitas kader malaria yang saat ini berjumlah 85 orang melalui pelatihan dan penyegaran mengenai deteksi dini, edukasi masyarakat, dan pelaporan k2asus
4. Menjamin ketersediaan alat diagnostik cepat (RDT), mikroskopi, obat antimalaria, dan logistik surveilans di seluruh Puskesmas endemis.
5. Memperkuat surveilans berbasis masyarakat serta pelaporan kasus secara cepat dan real time.
6. Melaksanakan promosi kesehatan mengenai pencegahan gigitan nyamuk, penggunaan kelambu berinsektisida, dan pengendalian tempat perindukan nyamuk.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian ACD setiap bulan serta tindak lanjut terhadap desa dengan peningkatan kasus.

Tabel 2.44 Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penderita Malaria	301	392	427	819	2.015	1.582
Penderita Malaria terhadap Jumlah Penduduk per 100.000	63.04	81,38	87,65	142,2	402,7	312,48
Jumlah Kematian Akibat Malaria terhadap Jumlah Penduduk per 1.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

2.1.3.3.A.2.11 Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan kesehatan ibu adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu agar mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Upaya kesehatan ibu meliputi kegiatan peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu yaitu dengan melihat angka kematian ibu (AKI). AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Upaya pemeliharaan kesehatan pada Ibu dan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Upaya pemeliharaan kesehatan anak ini ditunjukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya kesehatan anak diharapkan mampu menurunkan angka kematian yang terjadi pada anak. Indikator angka kematian yang berhubungan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Sebagai gambaran Kesehatan ibu dan

anak di Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesawaran kurun waktu 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Angka Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2020-2025

NO	TAHUN	AKB	AKI	AKABA
1.	2020	0,53	2	0
2.	2021	1,20	3	0
3.	2022	1,11	3	0
4.	2023	1,60	3	0
5.	2024	4,79	6	0,15
6.	2025	5,38	5	0,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

2.1.3.3.A.2.12 Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam (TBC BTA)

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. TBC pada umumnya menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Penularan penyakit TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup udara yang mengandung kuman Mycrobacterium Tuberculosis. Kasus penyakit Tuberkulosis BTA dalam rentang waktu Tahun 2020-2025 jumlahnya fluktuatif dari Tahun awal sebanyak 774 kasus menjadi 1.216 kasus pada Tahun 2025. Dari sekian banyaknya kasus tersebut perkembangan penanganan kesehatan setiap tahunnya cendeung mengalami peningkatan meskipun belum secara maksimal sehingga diperlukan upaya penanganan lebih lanjut agar seluruh penderita penyakit TBC BTA dapat tertangani dengan baik.

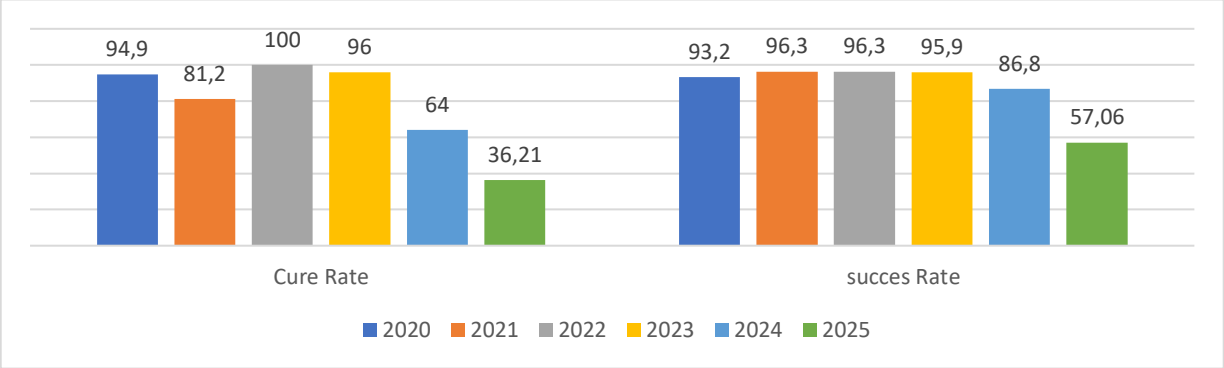
Tabel 2.46 Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit TBC BTA Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penderita yang Tertangani	372	250	245	739	637	679
Jumlah Penderita Seluruhnya	774	512	483	794	742	1.190
Cakupan Penanganan	48,06	48,83	50,72	93,1	85,8	57,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Pada kasus TBC salah satu indikator yang sangat penting untuk dilihat yaitu angka kesembuhan penderita kasus TBC (Cure Rate). Cure Rate adalah sebutan untuk pasien yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan apusan dahak ulang (follow up) dengan hasil negatif pada akhir pengobatan dan pada satu pemeriksaaan sebelumnya. Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ (cure rate) di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2025 sebesar 36,21% dan angka keberhasilan pengobatan (success rate) penderita TB Paru BTA + sebesar 57,06%.

Gambar 2.48 Grafik Cakupan Cure Rate & Success Rate (SR) Penderita TB Paru BTA + Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Kabupaten Pesawaran memiliki 11 Kecamatan dengan tantangan geografis yang tidak semuanya mudah di jangkau, banyak daerah - daerah yang memiliki akses jalan yang sulit dan menimbulkan tantangan dalam pengiriman logistik Program TBC dalam memberikan layanan kesehatan ke daerah terpencil dan sangat terpencil. Keterbatasan akses fasilitas kesehatan juga menghambat deteksi dini dan diagnosis TBC di beberapa daerah Kabupaten pesawaran seperti masih belum terpenuhinya mesin TCM sebagai alat diagnostik *gold standard* pemeriksaan TBC. Target Kabupaten Pesawaran untuk indikator Cakupan penemuan kasus Tuberculosis dalam dokumen RPJMD TAHUN 2025–2029 ditetapkan mencapai 962 kasus pada akhir periode di tahun 2029 Pada tahun 2027 target sebesar 1199 kasus. Untuk target indikator Keberhasilan pengobatan Tuberculosis Pada tahun 2027 target sebesar 1199 kasus. Target Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar tahun 2027 sebesar 1332 orang.

Penderita TB Tahun 2025 sebanyak 1.190 orang perlu dilakukan pelacakan dan pengobatan penderita secara masif hal ini disebabkan Penemuan kasus TB Aktif belum optimal, investigasi kontak serumah belum menjangkau seluruh kontak, masih terdapat keterlambatan diagnosis, serta kepatuhan pengobatan pasien belum maksimal sehingga berpotensi meningkatkan penularan dan risiko putus berobat.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus TB di Kabupaten Pesawaran yaitu:

1. Melaksanakan pelacakan kontak (contact investigation) secara masif terhadap seluruh kontak serumah dan kontak erat pasien TB terntegrasi dengan Pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), terutama pada kelompok berisiko tinggi.
2. Meningkatkan penemuan kasus secara aktif (Active Case Finding / ACF) melalui skrining di masyarakat, sekolah, tempat kerja, pesantren, dan kelompok rentan.

3. Memastikan seluruh suspek TB memperoleh pemeriksaan diagnostik sesuai standar (Tes Cepat Molekuler/TCM, mikroskopis, atau pemeriksaan lain yang tersedia).
4. Menjamin seluruh pasien TB mendapatkan pengobatan sesuai standar nasional hingga tuntas dengan pendampingan oleh Pengawas Menelan Obat (PMO).
5. Memperkuat peran kader TB, Puskesmas, rumah sakit, klinik, praktik mandiri dokter, dan jejaring pelayanan kesehatan dalam penemuan, pelaporan, dan pendampingan pasien.
6. Melaksanakan edukasi masyarakat secara intensif mengenai gejala TB, pentingnya pemeriksaan dini, etika batuk, dan kepatuhan pengobatan.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap indikator program TB di setiap Puskesmas serta memberikan pembinaan bagi wilayah dengan capaian rendah.

2.1.3.3.A.2.13 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Penyakit HIV/AIDS disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga penderitanya mengalami penurunan ketahanan tubuh. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, seperti darah, air susu ibu, air mani dan cairan vagina. Penyakit ini ditularkan melalui proses hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik secara bergantian dan penularan dari ibu ke anak dalam kandungan melalui plasenta dan kegiatan menyusui. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari biasa seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan atau air.

Pada dasarnya kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil dari pada kenyataan di lapangan. Hal ini terjadi mengingat penderita HIV tidak dapat terdeteksi sejak dini hingga beberapa tahun kemudian. Namun dengan semakin giatnya usaha petugas dalam penemuan kasus HIV/AIDS maka semakin banyak pula kasus yang ditemukan sehingga semakin tinggi pula upaya dalam pengendaliannya. Tren jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Pesawaran pada rentang waktu Tahun 2020-2025 tumbuh dengan lambat dari 9 kasus pada Tahun 2020,namun kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2024 mencapai 104 pasien, kemudian ditahun 2025 menurun menjadi 35 kasus.

Tabel 2.47 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pasien HIV/AIDS	9	14	18	31	104	35
Jumlah Penduduk	477.470	481.710	487.153	492.474	500.298	506.261

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi HIV/AIDS (%)	0,0019	0,0029	0,003695	0,003655	0,02078	0,00691

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2026

Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui pelayanan kesehatan telah melakukan upaya untuk mencegah perkembangan penyakit HIV/AIDS melalui sosialisasi, publikasi, dan seminar wawasan terhadap penduduk yang berusia 15-24 tahun. Target Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar pada tahun 2027 sebesar 9589 orang.

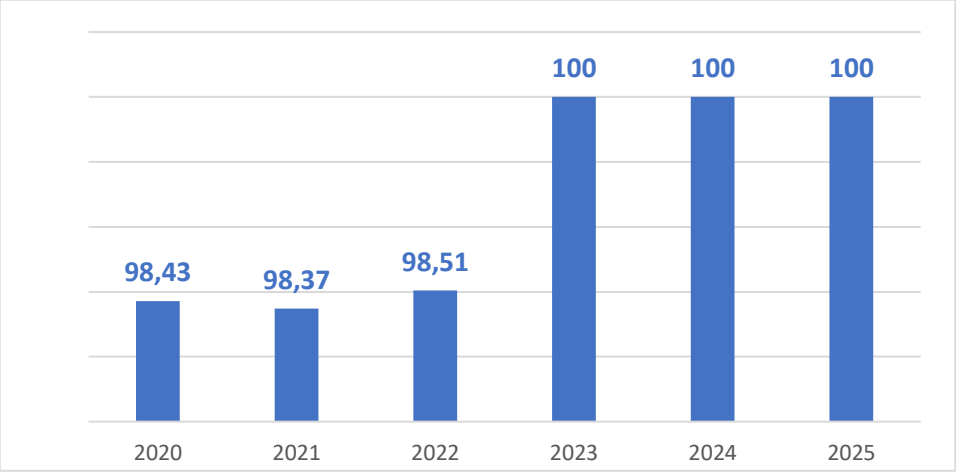
Tahun 2025 masih di temukan 35 kasus HIV Dinas Kesehatan harus terus menggencarkan pelacakan, pemeriksaan (skrining), dan penyuluhan untuk menekan angka penularan hal ini disebabkan Skrining HIV pada populasi berisiko dan ibu hamil belum menjangkau seluruh sasaran, pelacakan pasangan dan kontak belum optimal, masih terdapat stigma terhadap HIV sehingga menghambat akses layanan, serta belum semua pasien yang terdiagnosis segera memulai terapi antiretroviral (ARV).
Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pelacakan, pemeriksaan (skrining), dan penyuluhan kasus HIV di kabupaten pesawaran yaitu:

1. Meningkatkan skrining HIV secara aktif pada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, populasi berisiko, serta kelompok sasaran lainnya sesuai pedoman nasional.
2. Melaksanakan pelacakan pasangan (partner notification) dan kontak secara rahasia, aman, dan sesuai prinsip kerahasiaan untuk menemukan kasus lebih dini.
3. Memastikan seluruh kasus HIV yang terdiagnosis segera mendapatkan terapi ARV dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan berobat
4. Memperkuat layanan konseling, tes HIV sukarela, dan rujukan di Puskesmas serta rumah sakit.
5. Mengintensifkan promosi kesehatan dan penyuluhan mengenai pencegahan HIV, mengurangi stigma dan diskriminasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang deteksi dini dan pengobatan.
6. Memperkuat jejaring layanan dengan rumah sakit Pemerintah maupun swasta, Klinik Swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas pendamping untuk mendukung penjangkauan dan retensi pasien.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian program HIV secara berkala berdasarkan data surveilans

2.1.3.3.A.2.14 Diabetes Melitus (DM)

Diabetes adalah penyakit menahun (kronis) berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Diabetes tidak hanya menyebabkan kematian premature di seluruh dunia. Penyakit ini juga menjadi penyebab utama kebutaan, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Diabetes militus hal ini dimaksudkan agar orang yang sehat tetap sehat dan orang yang sudah memiliki factor risiko dapat mengendalikan factor risikonya agar tidak sampai menderita penyakit DM tersebut. Pengobatan untuk penderita DM harus di lakukan sesuai standar. Pelayanan kesehatan pada semua penderita DM di FKTP sesuai standar meliputi: edukasi gaya hidup sehat, edukasi aktivitas fisik, edukasi nutrisi medis dan edukasi kepatuhan minum obat. Pada tahun 2025, penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berjumlah 3.765 kasus dengan persentase cakupan pelayanan sebesar 100%. Berikut ini merupakan gambaran perkembangan cakupan pelayanan kesehatan penderita DM di Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2025. Target Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2027 sebesar 3427 orang.

Gambar 2.49 Cakupan Pelayanan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2020-2025



Sumber : Tim Kerja P2 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 2026

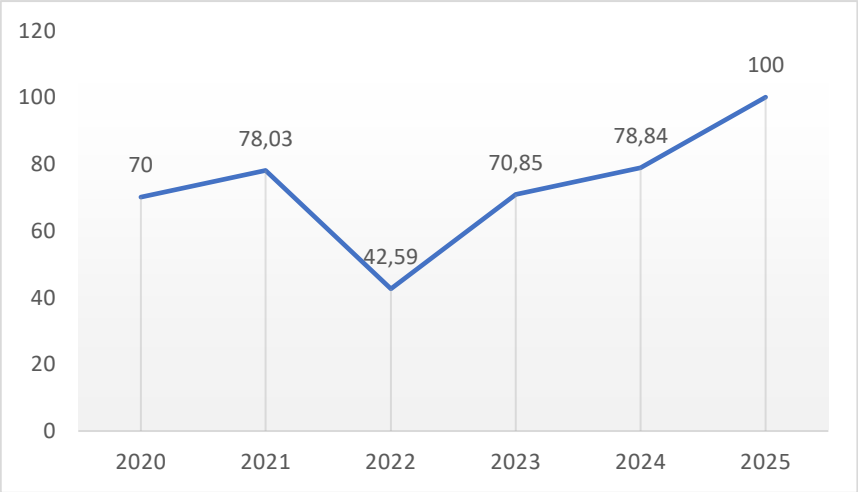
Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus dari tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2023 sampai 2025 cakupan pelayanan pada penderita diabetes melitus mencapai puncaknya dengan cakupan sebesar 100%.

2.1.3.3.A.2.15 Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit jantung dan pembuluh darah yang paling banyak terjadi. Hipertensi saat ini tumbuh subur akibat pola hidup masyarakat yang cenderung tidak sehat. Menurut WHO, hipertensi ditandai dengan pembacaan tekanan darah sistolik ≥ 140 dan tekanan diastolik

≥ 90 mmHg pada pemeriksaan yang berulang dan saat orang tersebut dalam kondisi istirahat. Sistolik adalah tekanan tertinggi saat jantung memompa, sedang diastolik adalah tekanan terendah saat jantung istirahat.

Gambar 2.50 Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 2026

Pada tahun 2025, penduduk Kabupaten Pesawaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan terkait hipertensi berjumlah 105.051 dengan estimasi penderita hipertensi sebesar 105.051 penduduk berusia ≥ 15 tahun. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa persentase capaian penduduk berusia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan hipertensi sebesar 100,00%.

Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan pada penderita hipertensi selama tahun 2020-2025 berfluktuatif. Pada Tahun 2021 cakupan pelayanan hipertensi sebesar 78,03%. Sedangkan di tahun 2022 cakupan pelayanan hipertensi mengalami penurunan hingga mencapai 42,59%. Hingga pada tahun 2025 cakupan pelayanan hipertensi kembali mengalami peningkatan hingga mencapai angka cakupan 100,00%. Target Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar tahun 2027 sebesar 97964 orang.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan teknis pemenuhan kebutuhan Kesehatan secara minimal baik jenis maupun kualitas yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Secara teknis, SPM Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Dalam mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah, capaian kinerja Dinas Kesehatan diukur salah satunya berdasarkan capaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran .SPM kesehatan di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2025 dilaksanakan pada 15 wilayah kerja Puskesmas. Target capaian yang harus dicapai setiap jenis layanan SPM Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun adalah 100%. Gambaran capaian pelaksanaan SPM Kesehatan

berdasarkan jenis layanan dasar di Kabupaten Pesawaran tahun 2020-2025 disajikan pada grafik berikut.

Tabel 2.48 Rekapitulasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2025

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian (%)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,79	91,8	84,69	83,28	79,48	81,38
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	95,40	95,32	84,82	80,95	73,89	76,42
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,44	99,96	89,61	84,51	80,70	79,55
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	12,38	61,16	87,29	77,46	92,72	95,17
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6,50	44,27	88,73	89,04	98,89	100
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	94,68	60,43	41,15	83,34	80,10	98,64
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59,04	78,98	89,07	89,93	95,90	96,88
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70,00	78,03	51,41	73,42	78,84	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	98,43	85,71	95,63	96,69	100,00	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	67,59	84,29	67,98	90,09	100,00	100
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	26,14	21,86	72,83	83,39	84,76	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	58,07	52,69	64,49	66,75	62,65	70,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 2026

Capaian SPM kesehatan tahun 2025 belum optimal disebabkan Analisis capaian SPM belum disusun secara komprehensif, sehingga belum menggambarkan akar permasalahan, hambatan pelaksanaan di lapangan, faktor pendukung, serta tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan. Hal ini menyebabkan laporan belum menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan program secara optimal.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM Kesehatan yaitu”

1. Menyusun analisis setiap indikator SPM Bidang Kesehatan yang belum mencapai target dengan mengidentifikasi akar penyebab menggunakan pendekatan berbasis data.
2. Mewajibkan seluruh Puskesmas menyampaikan laporan yang memuat capaian, penyebab ketidaktercapaian, upaya yang telah dilakukan, kendala, dan rencana tindak lanjut.

3. Melaksanakan review dan validasi data SPM secara berkala bersama bidang teknis dan Puskesmas untuk memastikan akurasi data.
4. Menetapkan rencana aksi percepatan bagi indikator SPM Kesehatan yang belum tercapai, lengkap dengan target, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan sumber daya.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap pelaksanaan rencana aksi serta memberikan pembinaan kepada Puskesmas dengan capaian rendah.
6. Memanfaatkan hasil evaluasi SPM Kesehatan sebagai dasar penyusunan perencanaan, penganggaran, dan kebijakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

3). Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.3.A.3.1 Urusan Pekerjaan Umum

2.1.3.3.A.3.1.1 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Selama Tahun 2018 hingga 2024 persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2018 tercatat 33,80%, kemudian selama lima tahun meningkat menjadi 75,00% di Tahun 2024. Meskipun secara tren meningkat perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Selain itu rasio jaringan irigasi juga mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 75,00% dari semula 69,00% di Tahun 2018. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi di Kabupaten Pesawaran minimal dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk menunjang produktifitas pertanian yang lebih baik.

Tabel 2.49 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (persen ha)	48,80	61,30	67,50	70,00	75,00
Rasio Jaringan Irigasi (persen panjang)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

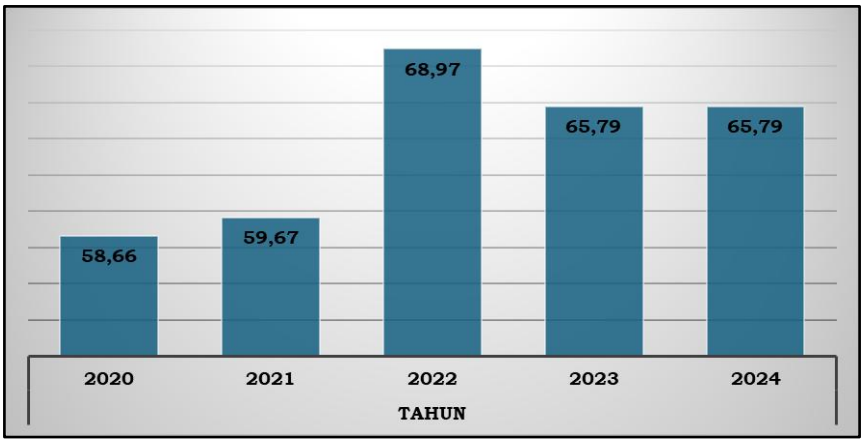
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2025

2.1.3.3.A.3.1.2 Rumah Tangga Pengguna Air Minum

Kewajiban pemerintah dalam penyediaan air minum di Indonesia meliputi pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), menjamin kualitas dan kuantitas air, memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta mengawasi dan mengevaluasi SPAM. Kewajiban ini diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 122 Tahun 2015 tentang SPAM.

Capaian akses air minum aman di Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 65,79% pada tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pesawaran. Capaian ini menunjukkan persentase rumah tangga di Pesawaran yang memiliki akses terhadap air minum yang aman sesuai standar yang berlaku. Berikut persentase capaian Rumah Tangga Pengguna Air Minum Aman Kabupaten Pesawaran 2020-2024:

Gambar 2.51 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Minum Aman Tahun 2020-2024

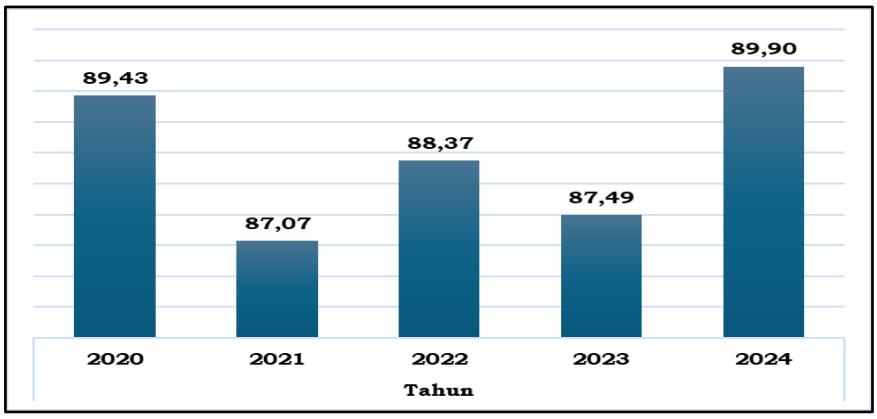


Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

2.1.3.3.A.3.1.3 Rumah Tangga Bersanitasi

Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat kita ketahui bahwa rumah tangga yang memiliki sanitasi di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2020-2023 belum mencapai target 100% namun sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik namun belum mencapai target. Padal Tahun 2016 terjadi akses sanitasi pada rumah tanggal berada pada angka 89.43% dan meningkat pada akhir Tahun 2024 menjadi 89.90% rumah tangga yang berakses terhadap sanitasi.

Gambar 2.60 Grafik Rumah Bersanitasi Tahun 2016-2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam upaya untuk pencapaian target 100% sanitasi melalui program kegiatan yang terintegrasi yang melibatkan OPD teknis dalam penanganannya seperti peran Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan lebih difokuskan pada penangan sanitasi layak, Dinas PUPR melalui program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Air Limbah Domistik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Pengembangan Sistim Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Individu/Komunal.

2.1.3.3.A.3.2 Urusan Penataan Ruang

2.1.3.3.A.3.2.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau dari Luas Wilayah Kota

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota yang terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Tabel 2.50 Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pesawaran

No	Nama RTH	Luas (m^2)
1	Taman Jejama Sidototo	10.000
2	Taman Andan Jejama	15.000
3	Tugu Pengantin	2.500

No	Nama RTH	Luas (m^2)
4	Taman Komplek Pemda	50.000
5	Taman Kantor DPRD	1.000
6	Taman RSUD Pesawaran	1.000
7	Taman Tugu Perbatasan	1.000
8	Taman Tugu Juang	1.000
9	Taman Tugu Cokelat	100
10	Taman Desa Negeri Sakti	100
11	Taman Desa Sukaraja	5.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2025

2.1.3.3.A.3.2.2 Persentase Bangunan yang Memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021, IMB telah digantikan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin yang dikeluarkan untuk keperluan rencana pembangunan bangunan baru, rehabilitasi, dan revonasi. PBG dikeluarkan atas dasar kesesuaian pemanfaatan ruang dan pertimbangan terhadap keamanan dan keselamatan penghuni bangunan tersebut. Dalam rentang waktu Tahun 2020 sampai 2024 persentase bangunan yang memiliki PBG di Kabupaten Pesawaran masih rendah. Oleh karena itu perlunya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat perlunya mengurus PBG sebagai dokumen penting dalam pembangunan rumah dan prasyarat untuk mengurus pajak bumi bangunan.

Tabel 2.51 Persentase Bangunan yang Memiliki PBG Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bangunan ber IMB	405	506	618	778	1.187
Jumlah Bangunan	111.398	113.529	115.700	114.145	114.145
Persentase	0,36	0,45	0,53	0,68	1,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2025

4). Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.3.A.4.1 Lingkungan Permukiman Kumuh

Perkembangan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Pesawaran sampai dengan Tahun 2025 adalah seluas 1,3 hektar. Upaya penanganan kawasan permukiman kumuh sebagai bentuk pelayanan pemerintah untuk menyehatkan masyarakat agar dapat menurunkan tingkat resiko penyakit dan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan. Namun dari sisi jumlah dan persentase rumah tangga yang tinggal dipermukiman kumuh

meningkat cukup besar dari periode 2020 sebanyak 3.966 rumah tangga kumuh atau 17,47 persen dan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 menjadi 2.803 rumah tangga kumuh atau sekitar 2,48 persen dan terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 2.162 rumah tangga kumuh atau sekitar 1,65 persen dan pada tahun 2025 sebanyak 2.123 rumah tangga kumuh atau 1,58 persen.

Tabel 2.52 Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Luas Penanganan Permukiman Kumuh (ha)	278,84	2,50	6,5	8,62	2,00	1,3
Jumlah Rumah Tangga Kumuh	3.966	2.803	2.803	2.803	2.162	2.123
Jumlah Keseleruhan Rumah Tangga	112.836	112.836	113.171	114.883	131.156	134.270
Proporsi Rumah Tangga Kumuh	17,47	2,48	2,48	2,44	1,65	1,58

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pesawaran 2026

2.1.3.3.A.4.2 Cakupan Rumah Layak Huni

Cakupan rumah layak huni dihitung berdasarkan ketersediaan rumah layak huni dan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara jumlah seluruh rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah, sedangkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dihitung berdasarkan persentase perbandingan rumah tangga MBR yangmenghuni rumah layak terhadap jumlah rumah tangga MBR.

Cakupan rumah layak huni di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2024 tercatat 93,38% sedangkan cakupan MBR yang menguni rumah layak telah mencapai belum dapat diukur, hal tersebut mengondisikan bahwa perlu ditingkatkan kembali agar MBR juga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak. Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%, maka capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Pesawaran telah mencapai target.

Tabel 2.53 Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	95,4	96,7	88,30	73,84	93,38
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	49,86	51,7	50,86	50,76	49,86

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pesawaran 2026

5). Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dengan mengacu pada Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat pada Tahun 2025 tercatat 40,00%, sehingga indikator ini perlu ditingkatkan untuk mencapai perlindungan masyarakat yang lebih luas. Penegakan Perda Kabupaten Pesawaran selama Tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran perda telah ditindaklanjuti. Selanjutnya indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Pesawaran selama Tahun 2020-2025 mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah diselesaikan. Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten selama Tahun 2020 hingga 2025 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 100%. Sementara itu sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2025 waktu tanggap di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 100%. Secara numerik penjelasan lebih lanjut mengenai data kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54 Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	25,73	26,00	26,00	32,65	36,22	40
Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	15,00	15,00	15,00	100,00	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Pesawaran 2026

6). Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Pada tahun 2020 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 65,58% dan terus mengalami peningkatan sampai pada Tahun 2025 menjadi 69,21%. Perkembangan bantuan sosial tersebut perlu ditingkatkan lagi pada periode berikutnya agar dapat meningkatkan kelayakan hidup PMKS di Kabupaten Pesawaran. Sementara itu pada indikator lainnya yaitu persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan korban yang dievakuasi menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap sudah terlayani 100% dengan baik selama periode Tahun 2020-2025. Pencapaian ini perlu ditingkatkan kedepannya sebagai bentuk tanggap darurat pasca bencana.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola program perlindungan sosial yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Sosial melaksanakan penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan pendekatan berbasis data yang terstruktur dan terverifikasi, yakni melalui skema by name by address (BNBA) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS merupakan basis data nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan memuat informasi individu dan rumah tangga yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Data ini diperoleh melalui proses pendataan, verifikasi, dan validasi secara berkala oleh pemerintah daerah, serta menjadi dasar utama dalam penetapan sasaran penerima berbagai program bantuan sosial, baik yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Melalui penggunaan skema BNBA yang bersumber dari DTKS, Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran memastikan bahwa setiap penerima bantuan tercatat secara jelas dan lengkap, mencakup nama, alamat, nomor identitas, dan kategori status sosial ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penerima manfaat, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan.

Pendekatan ini telah diterapkan dalam berbagai bentuk bantuan sosial, antara lain bantuan pangan, bantuan kebutuhan dasar, bantuan untuk lanjut usia, penyandang disabilitas, serta bantuan lainnya yang bersifat afirmatif bagi kelompok rentan. Dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi,

pelaksanaan program bantuan dapat dipantau secara real time dan terdokumentasi dengan baik.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga secara aktif melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait lainnya guna memastikan validitas dan aktualisasi data penerima manfaat. Mekanisme pengusulan, perbaikan, dan penghapusan data dalam DTKS dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (musdes) dan forum-forum koordinasi lainnya.

Dengan demikian, pemanfaatan DTKS dalam pelaksanaan perlindungan sosial di Kabupaten Pesawaran tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan sosial, tetapi juga mendukung upaya transformasi sistem perlindungan sosial menuju sistem yang berbasis data, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial di Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Daerah tetap menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, meskipun pada tahun berjalan terjadi penyesuaian anggaran. Penurunan anggaran perlindungan sosial tercatat hanya sebesar Rp11Juta dari alokasi awal, yang menunjukkan bahwa secara substansial anggaran tersebut tetap dipertahankan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial di daerah. Menanggapi keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Sosial telah mengambil langkah strategis dengan melakukan konsolidasi lintas sektor dalam pelaksanaan program sosial. Konsolidasi ini dilakukan bersama perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sinergi lintas dinas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial serta memperluas cakupan layanan kepada masyarakat sasaran tanpa harus sepenuhnya bergantung pada tambahan anggaran.

Sebagai bagian dari implementasi kegiatan perlindungan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran juga telah mengalokasikan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak dua kali dalam tahun anggaran berjalan. Kegiatan rakor ini berfungsi sebagai media koordinasi, pembinaan, serta penguatan kapasitas para TKSK dalam menjalankan tugas di lapangan, khususnya dalam menjangkau masyarakat rentan dan memastikan akses mereka terhadap program-program sosial yang tersedia. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap peran strategis TKSK, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Sosial juga telah mengalokasikan tambahan penghasilan bagi TKSK, yang tercantum secara

resmi dalam sub kegiatan "Peningkatan Kemampuan dan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan" yang merupakan kewenangan kabupaten/kota. Kebijakan ini tidak hanya mendorong semangat kerja para TKSK di lapangan, tetapi juga memperkuat sistem pelaksanaan program perlindungan sosial di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, meskipun terdapat penyesuaian anggaran, pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial di Kabupaten Pesawaran tetap berjalan secara optimal melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pengalokasian kegiatan strategis, serta dukungan terhadap para pelaksana program di tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran tetap berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan kelompok masyarakat yang membutuhkan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.55 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	65,58	65,58	92,31	69,34	60,47	69,21
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial Pesawaran, 2026

7). Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran yang mencakup indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	9.95	7.81	34.78	50.55	67.98	74.26

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
	melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota							
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	-	-	-	-	-
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	69.83	30.72	76.36	78.15	82.19	90.37
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	-	-	-	23.12	27.19	23.19

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab Pesawaran, 2026

Capaian urusan tenaga kerja Kabupaten Pesawaran periode 2020–2025 secara umum menunjukkan tren penguatan yang signifikan pada aspek penempatan dan produktivitas, meskipun masih menghadapi tantangan pada perluasan jaminan sosial. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja melonjak pesat dari hanya 9,95% pada tahun 2020 menjadi 74,26% pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pulih kuat setelah sempat turun di tahun 2021 (30,72%), lalu tumbuh konsisten hingga mencapai angka tertinggi sebesar 90,37% di tahun 2025. Namun, aspek perlindungan pekerja yang tercermin dari Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja cenderung jalan di tempat; setelah mulai tercatat sebesar 23,12% pada 2023 dan naik sedikit di 2024 (27,19%), indikator ini kembali turun ke level 23,19% pada tahun 2025, yang menandakan perlunya optimalisasi program perlindungan ketenagakerjaan ke depan. Kabupaten Pesawaran telah mengupayakan perlindungan tenaga kerja rentan melalui program asuransi nelayan dan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian pekerja perkebunan.

Perkembangan tersebut masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi agar tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran memiliki kompetensi yang dapat bersaing dalam dunia kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja pada umumnya dipengaruhi oleh struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Pada Tahun 2020 terdapat 3,78% perempuan yang berpartisipasi di lembaga pemerintah, kemudian menurun menjadi 3,02% di Tahun 2024. Selanjutnya persentase perempuan yang menduduki kursi DPRD juga menurun dari 32,25% ke 15,00%. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 sejumlah 34,08% perempuan dan meningkat menjadi 48,84% di Tahun 2024. Angka partisipasi tersebut menggambarkan bahwa peluang dan tingkat partisipasi perempuan semakin seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam berkarir pada lingkungan pekerjaan, baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.

Indikator rasio KDRT pada Tahun 2020-2022 tercatat dibawah 0,01 kasus. Angka tersebut tergolong kecil sehingga mengindikasikan bahwa di Kabupaten Pesawaran tergolong aman terhadap kekerasan rumah tangga. Adapun realisasi indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu telah mencapai angka 100% sepanjang Tahun 2020 hingga 2024. Dalam perspektif kedepan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga diharapkan dapat ditangani secara cepat dan pelaku tindak kekerasa dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Indikator (dalam persen)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,78	3,50	3,50	3,07	2,44
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	32,35	26,67	26,67	26,67	15,00
3	Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	34,08	44,3	44,3	34,81	49,14
4	Rasio KDRT	0,003	0,007	0,003	0,00	0,002
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	94,87	91	91	90,78	93,05
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas PPPA serta PPKB Kabupaten Pesawaran, 2025

9). Urusan Pangan

Berdasarkan Tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa realisasi indikator urusan pangan di Kabupaten Pesawaran meliputi ketersediaan pangan utama dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Sejak Tahun 2017 hingga 2024 persentase rasio ketersediaan pangan mengalami peningkatan dari angka 22,32% ke 75,84%, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan yang berada pada angka 65,50% selanjutnya kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu berada di angka 25,71% di Tahun 2023 dan kembali mengalami penurunan yaitu berada di angka 0,00% di Tahun 2024. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah pengampu untuk tetap meningkatkan pasokan ketersediaan pangan agar tidak terjadi kelangkaan bahan pangan dimasa depan. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan untuk memastikan kualitas dan distribusi bahan bangan dapat terjamin dan merata. Adapun persentase pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan mengalami peningkatan dengan jumlah sampel yang dilakukan pengawasan adalah 61 sampel bahan pangan.

Tabel 2.58 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.98	77.86	77.89	80.85	72.62
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	12.68	16.18	8.43	11.36	10.23
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	30	23	21	19	5,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pesawaran 2026

Capaian urusan pangan Kabupaten Pesawaran selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif cenderung menurun pada beberapa indikator utama. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sempat menguat hingga mencapai angka tertinggi sebesar 80,85 pada tahun 2024, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 72,62 pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, Persentase Jumlah Cadangan Pangan terus merosot tajam setiap tahunnya, dari yang semula berada di angka 30% pada tahun 2021 hingga menyisakan hanya 5,9% pada tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran bantuan beras ke daerah bencana namun tidak sebanding dengan pengadaan beras CPPD. Di sisi lain, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) menunjukkan perbaikan di tahun 2025 dengan turun ke angka 10,23% setelah sempat melonjak di tahun sebelumnya, meskipun angka ini masih fluktuatif jika dibanding capaian terbaiknya di tahun 2023 (8,43%). Secara keseluruhan, penurunan tajam pada cadangan pangan dan indeks ketahanan pangan di tahun terakhir menjadi catatan penting yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga stabilitas pangan daerah.

10). Urusan Lingkungan Hidup

2.1.3.3.A.10.1 Persampahan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran pada periode Tahun 2020-2024 masih belum terlaksana secara optimal. Skema pengelolaan ditempuh melalui penanganan dan pengurangan di sumber sampah. Persentase penanganan sampah sampai akhir Tahun 2024 baru mencapai 21,39% atau ± 13.505 m3 sampah diangkut ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dari total timbulan sampah ± 63.131,88 m3. Sampah terangkut ke TPAS dimaksud terutama berasal dari wilayah perkotaan yang merupakan area pelayanan persampahan. Upaya pengurangan sampah dilakukan melalui pendekatan 3R *(Ruduce, Reuse, Recycle).* Dalam perspektif pembangunan target penanganan dan pengurangan sampah di sumber sampah perlu lebih

ditingkatkan lagi untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Adapun sebagian besar timbulan sampah yang belum tertangani diharapkan dapat dikelola dan ditangan oleh individu masyarakat sehingga secara bersama-sama Kabupaten Pesawaran dapat mencapai tingkat pencemaran yang rendah.

Tabel 2.59 Kinerja Persampahan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sampah yang dapat ditangani (m^3)	828	1.445	7.300	19.710	13.505
Sampah yang terkurangi melalui 3R (m^3)	599	24.590	28.275	7.081	3.685,27
Jumlah sampah yang tertangani (m^3)	1.427	26.035	35.575	26.791	13.505
Total timbunan sampah (m^3)	68.559	71.892	70.329	70.907	63.131,88
Rasio	**2,08**	**36,21**	**50,58**	**37,78**	**21,39**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pesawaran 2025

2.1.3.3.A.10.2 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan

Realisasi indikator cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Kabupaten Pesawaran pada periode Tahun 2020-2024 berfluktuasi. Pada Tahun 2020 tercatat 63 kemudian terus meningkat mencapai 111 pada Tahun 2020, kemudian mengalami penurunan tajam pada Tahun 2021 yang tercatat pada angka 46 kemudian kembali mengalami peningkatan sejak Tahun 2022 yang berada pada angka 72 dan berada pada angka 100 di Tahun 2024. Capaian Tahun 2024 tersebut akan dipertahanan dan masih harus terus ditingkatkan mengingat usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas investasi di Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.60 Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Tahun 2016-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	111	46	72	100	100

Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran 2025

11). Urusan Pertanahan

2.1.3.3.A.11.1 Lahan Bersertifikat

Perkembangan lahan bersertifikat dari Tahun 2017-2024 menunjukkan tren yang baik dari semula Tahun 2017 lahan bersertifikat berjumlah 28.045.421

dan terus meningkat menjadi 38.465.400 pada Tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 23.300.995, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 60.007.707 ; kemudian sejak Tahun 2022 - 2023 terus mengalami penurunan menjadi 5.948.599 ; dan pada Tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 8.871.518. Pencapaian ini perlu ditingkatkan kembali dengan harapan seluruh bidang tanah dapat tersertifikasi sehingga kepemilikan lahan di Kabupaten Pesawaran dapat terdata dengan baik.

Tabel 2.61 Lahan Bersertifikat Tahun 2020-2024

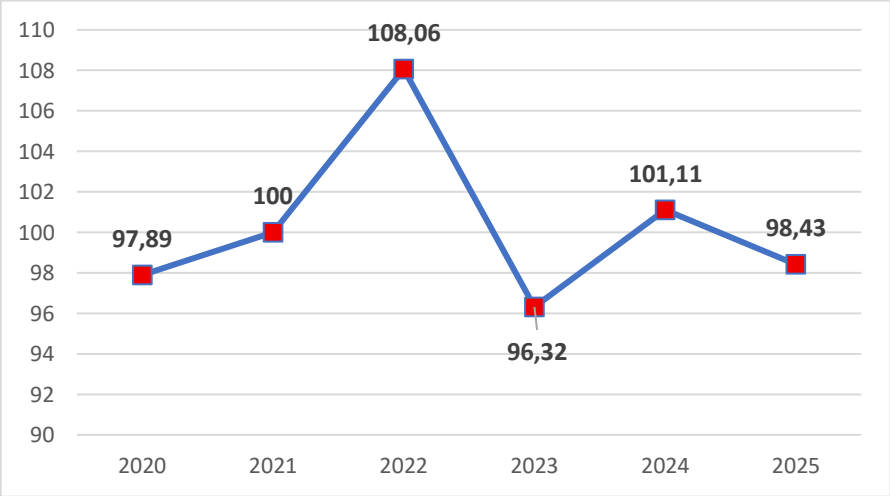
Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lahan Bersertifikat	23.300.995	83.308.702	97.846.272	103.794.871	112.666.389
Jumlah Bidang Lahan Seluruhnya	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221	965.770.000
Persentase	**2,28**	**8,16**	**9,58**	**10,16**	**11,67**

Sumber: Dinas Pertanahan dan LH Kab. Pesawaran, 2025

12). Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase kepemilikan KTP, berdasarkan Gambar dibawah ini tren rasio penduduk ber-KTP mengalami fluktuasi dari Tahun 2020 hingga 2025. Pada Tahun 2020 tercatat 97,89%, pada Tahun 2022 terus mengalami peningkatan yakni mencapai 108,06%. Walaupun menurun pada Tahun 2023 pada angka 96,32%, selanjutnya kembali meningkat pada Tahun 2024 pada angka 101,11%, Pada tahun 2025 turun menjadi 98,43%. Pencapaian ini perlu dipertahankan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Gambar 2.52 Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2020-2025

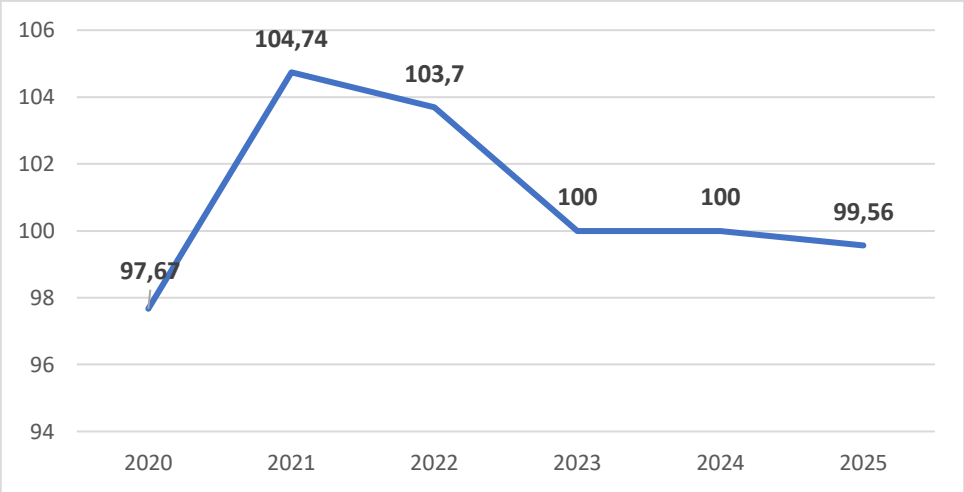


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran, 2026

Sedangkan indikator rasio bayi berakte kelahiran secara tren menunjukkan peningkatan, pada Tahun 2020 persentase bayi lahir memiliki akte kelahiran sebesar 97,67%, terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2024

persentase rasio bayi ber-akte kelahiran sebesar 100%. Pada tahun 2025 capaian sebesar 99,56 (Gambar berikut).

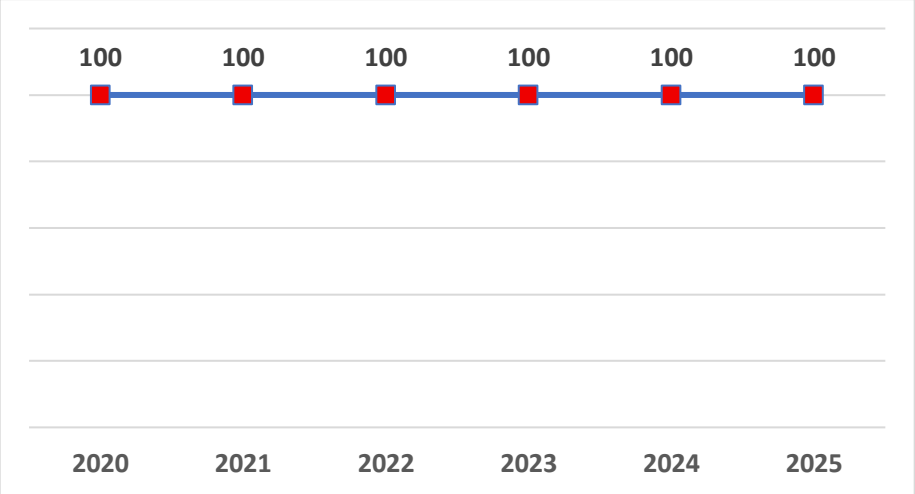
Gambar 2.53 Grafik Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran 2026

Pada indikator rasio pasangan berakte nikah (Gambar berikut), Tahun 2018 hingga 2025 sudah tercatat 100% pasangan yang memiliki akte nikah. Pencapaian ini perlu dipertahankan dikemudian hari agar kelengkapan data administrasi pendudukan memiliki kinerja yang baik.

Gambar 2.54 Grafik Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran 2026

Selanjutnya indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan data base kependudukan skala provinsi di Kabupaten Pesawaran telah terpenuhi sejak Tahun 2016. Dalam rangka pemanfaatan pemanfaatan database kependudukan pemerintah daerah, seyogyanya diperlukan pengadaan server (warehouse) pada Disdukcapil yang terintegrasi. Pemanfaatan database kependudukan ini penting kedepannya, misalnya saja dalam penentuan penerima bansos.

13). Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum pencapaian target dalam merealisasikan indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2025

No	Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	144	144	144	144	144	144
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	144	144	144	144	144	144
4	Rata-rata jumlah LSM aktif	90	109	142	142	142	Belum ada data
5	Posyandu aktif	461	466	464	464	464	445
6	Persentase swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	94,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	664	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2026

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dari Tahun 2020 hingga 2025 telah mencapai 100% sehingga diharapkan Pemerintah Desa dapat menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sangat baik dan menjaga kualitas pelayanan yang dicapai pada Tahun 2025. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan PKK dari Tahun 2020-2025 jumlahnya tetap sebanyak 144, sedangkan jumlah LSM aktif selalu mengalami penambahan tiap tahunnya dari sejumlah 90 organisasi pada Tahun 2020 menjadi 142 organisasi pada Tahun 2024.

Untuk capaian target indikator kinerja posyandu aktif sejak Tahun 2020 sampai dengan 2025 mengalami tren fluktuatif. Pada Tahun 2020 tercatat 461 kemudian meningkat menjadi 466 di Tahun 2021 dan stabil di angka 464 sampai tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah posyandu aktif seanyak 445 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah balita, maka rasio posyandu per satuan balita pada Tahun 2025 mencapai 1:345 atau dengan kata lain satu posyandu dapat melayani 345 balita, angka tersebut telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni 1:100.

14). Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa secara umum realisasi indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah menunjukkan tren yang baik, secara berurutan penjelasan indikator tersebut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya.

Indikator laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2020 sempat mengalami peningkatan tertinggi pada angka 7,45%. Namun tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,89% dan di tahun 2025 cenderung stagnan pada angka 1,69%. Selanjutnya dari sisi rata-rata jumlah anak per keluarga jumlahnya menurun dari Tahun 2020 hingga 2025 yang mencapai angka 2,28 anak per keluarga.

Indikator Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) selama Tahun 2020-2025 menunjukkan realisasi yang cenderung stagnan. Selanjutnya dari indikator rasio akseptor KB sebesar 72,37% pada Tahun 2020 menggunakan jenis konstrasepsi jangka panjang. Angka tersebut meningkat menjadi 72,68% pada Tahun 2022, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 71,70 persen.

Sementara itu untuk indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun memiliki trend menurun dari tahun 2020 sampai Tahun 2022. Namun terjadi peningkatan di tahun 2023-2025 menjadi 18 persen. Secara ideal perempuan sebaiknya menikah sesuai dengan program BKKBN yaitu pendewasaan usia perkawinan (PUP) wanita menikah umur 20 tahun sedangkan untuk laki-laki umur 25 tahun. Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun mulai terjadi proses regeneratif. Selain itu, secara psikologis, pada usia 20 tahun mulai matangnya emosional dan nalar seseorang. Di masyarakat masih ditemui PUS dimana istri berusia kurang dari 20 tahun. Pada tahun 2024 tercatat 18%. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup besar perkawinan yang terjadi pada usia dini sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan persentase usia muda menikah minimal 20 tahun. Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) di Kabupaten Pesawaran juga mengalami progres yang baik dimana selama periode 2020-2025 memiliki trend menurun dari 13,21% sampai 7,37% yang belum terpenuhi, masih sedikit diatas capaian nasional yang berada pada angka 8,55%. Namun demikian perlu terus diupayakan agar angka indikator ini menurun sehingga semua pasangan usia subur dapat terpenuhi program KB.

Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB selama Tahun 2020-2025 bersifat fluktuatif dan cenderung menurun dari angka 68,61% menjadi angka 60,8% sehingga kedepan perlu terus diupayakan

perbaikan kebijakan sebagai upaya untuk menunda kehamilan pada keluarga yang memiliki balita sebagai upaya salah satu aspek pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mematangkan psikologis anak balita.

Selanjutnya indikator Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah mencapai target setiap tahunnya, sejak Tahun 2020 hingga 2024 realisasi telah mencapai 100%.

Indikator Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri selama Tahun 2020 mencapai angka 83,38% dan meningkat ke angka 90,00% pada Tahun 2024. Untuk realisasi Indikator Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan selama Tahun 2020-2025 telah mencapai realisasi 100% sehingga kedepan perlu dipertahankan.

Indikator Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat perlu dipertahankan dimana pada periode 2020-2024 terealisasi 100,00%, sehingga capaian ini perlu dipertahankan untuk mendukung indikator rasio akseptor KB dan mengurangi persentase cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi. Kemudian indikator Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa telah mencapai realisasi diseluruh desa di Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2025

No	Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	7,45	0,89	1,15	1,13	1.69	1.69
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,55	2,34	2,31	2,31	2.32	2.28
3	Ratio Akseptor KB	72,37	72,38	72,68	69,99	70,00	71,7
4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,75	33,95	34,15	34,15	30.07	30
5	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49	68,00	69,00	70,00	75,00	76.00	71,72
6	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah 20 tahun	11,70	11,60	11,50	18,00	18.00	18.00
7	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	13,21	10,70	9,00	9,00	9.03	7,37
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	68,61	66,45	70,00	72,00	83.04	60,8
9	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00
10	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	83,38	83,59	85,00	85,00	90.00	90.00

No	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri						
11	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00
12	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100,00	100.00	100.00
13	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	100	100	100	100	100.00	100.00

Sumber: Dinas PPPA dan PPKB, 2026

15). Urusan Perhubungan

Sejak periode Tahun 2020-2024 jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 tercatat 3.672 dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2024. Pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 3.914 penumpang dan terus bertambah menjadi 4.576 penumpang di Tahun 2024. Namun peningkatan penumpang tidak diiringi dengan ketersedian terminal di Kabupaten Pesawaran. Terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lokal dan regional. Sampai sejauh ini, di Kabupaten Pesawaran belum ada terminal Penumpang Angkutan Jalan yang memenuhi fungsi-fungsi secara sempurna. Maka perlu direncanakan terminal yang representatif dan memadai untuk menampung aktivitas transportasi darat, khususnya transportasi massal penumpang. Terminal yang akan kita bangun ini merupakan kelengkapan prasarana transportasi Di Kabupaten Pesawaran. Untuk mewujudkan pembangunan terminal telah disusun dokumen perencanaan seperti pada tahun 2020 telah menyusun Studi Kelayakan Pembangunan Terminal.

Selanjutnya pada indikator jumlah orang/barang melalui Dermaga per hari mencapai 469 orang/barang pada Tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 9.030 orang/barang di Tahun 2024 yang didominasi untuk penyebarangan wisatawan ke objek wisata pulau-pulau.

Sementara itu indikator persentase jumlah uji KIR angkutan umum pada Tahun 2018 tercatat 45,56% kendaraan yang melakukan uji KIR, akan tetapi terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 10,39% di Tahun 2019. Kemudian pada terjadi peningkatan yang tercatat sebesar 11,59% di Tahun 2020 dan perlahan terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2024 yang telah mencapai catatan angka sebesar 26,67%. Peningkatan persentase uji KIR tersebut dapat bermakna meningkatnya pengawasan terhadap ketertiban administrasi kendaraan yang wajib KIR. Hal ini didukung oleh indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang pada periode Tahun 2018-2023 konsisten terus berada pada nilai 100,00%, akan tetapi pada Tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan yang berada pada nilai 25,00%,. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pengawasan secara khusus

pada angkutan umum atau menurunnya jumlah angkutan umum di Kabupaten Pesawaran juga terindikasi karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi secara berangsur-angsur dari tahun ke tahun serta tersedianya transportasi online.

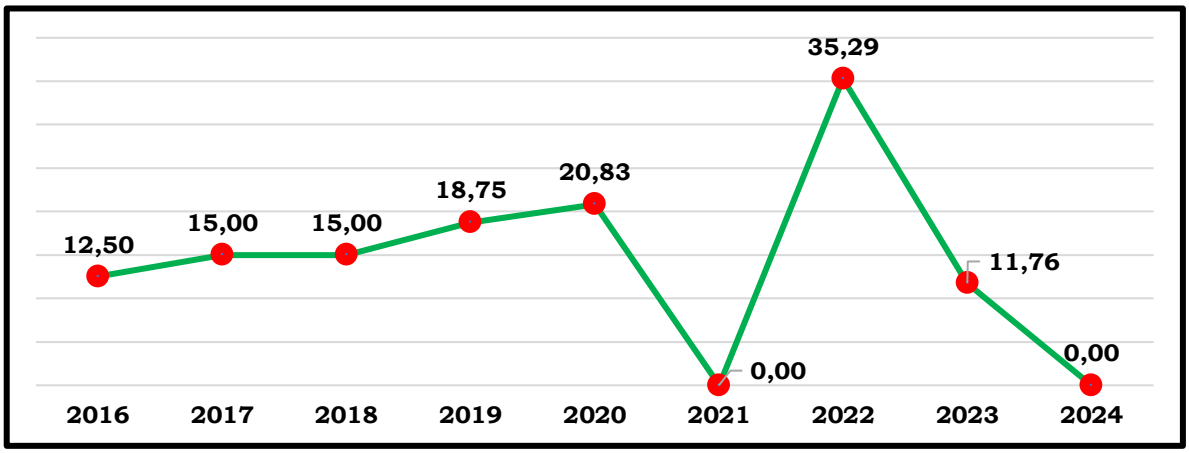
Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.672	3.914	4.305	4.437	4.576
Jumlah orang/barang melalui Dermaga per hari	500	2.090	6.989	7.852	9.030
Persentase uji KIR angkutan umum	11,59	13,33	15,38	26,67	26,67
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	100	100	100	100	25,00

Sumber: Dinas Perhubungan 2025

Selanjutnya untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, data pada Gambar dibawah ini menunjukkan progres yang tumbuh bertahap. Pada Tahun 2016 sebesar 12,50% namun pada akhir periode Tahun 2024 menjadi 0,00%. Kedepan pemasangan rambu lalu lintas perlu ditargetkan lebih tinggi lagi, karena hal ini terkait dengan keselamatan para pengguna jalan.

Gambar 2.55 Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016-2024



Sumber: Dinas Perhubungan 2025

16). Urusan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari Program Universal Service Obligation (USO) atau kewajiban pelayanan universal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (realtime). Dalam

konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hal ini ditunjang oleh adanya pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Sepanjang periode Tahun 2018-2024 cakupan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan hanya mencapai 13,00%, artinya belum seluruh kecamatan mendapatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society), sarana prasarana telepon pintar / komputer / desktop / notebook dan ketersediaan akses internet di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2024 sebesar 60,00%, dengan demikian masih terdapat sebagian besar rumah tangga yang tidak memiliki akses internet.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan, salah satu indikatornya adalah Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Eelektronik (SPBE). Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB untuk menggambarkan sejauh mana penerapan SPBE telah terintegrasi dalam operasional dan pelayanan publik. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 adalah sebesar 1,95; kemudian pada Tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 2,91 dan terus meningkat menjadi sebesar 3,49 pada Tahun 2024. Selanjutnya terus mengalami peningkatan menjadi 3,64 pada Tahun 2025. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	11,00	11,00	11,00	11,00	13,00	16,00
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Indeks SPBE	-	-	1,95	2,91	3,49	3,64

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2026

Pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, telah terjadi perubahan pagu anggaran. Meskipun terdapat penyesuaian pada alokasi anggaran, perubahan tersebut tidak disertai dengan penyesuaian terhadap target kinerja program yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun perubahan anggaran terbesar terjadi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang

terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Sampai dengan saat ini, tercatat sebanyak 46 perangkat daerah telah terhubung dengan jaringan dimaksud. Jumlah tersebut dinilai telah memadai dan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung operasionalisasi jaringan intra pemerintah yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, meskipun terjadi perubahan pada besaran anggaran, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap target capaian, karena target indikator yaitu jumlah perangkat daerah yang terhubung telah tercapai sepenuhnya.

Selain itu, keterhubungan dari 46 perangkat daerah ini juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pesawaran. Dengan demikian, meskipun terdapat realokasi atau perubahan dalam struktur pembiayaan, hasil atau output yang diharapkan dari sub kegiatan tetap dapat dicapai secara optimal. Secara keseluruhan, perubahan anggaran yang terjadi lebih bersifat teknis dan administratif, tanpa mengganggu substansi dan target program. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tetap terjaga, serta mendukung arah kebijakan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Pesawaran.

Status simpul jaringan pada penilaian kinerja Tahun 2025 Kabupaten Pesawaran masih pada kategori OPERASIONAL yang tercantum pada aplikasi simojang.big.go.id, dan diharapkan pada Tahun 2026 Kabupaten Pesawaran dapat menigkatkan kinerja simpul jaringan pada kategori BERKEMBANG atau OPTIMAL. Dalam penyelenggaraan eWalidata SIPD Tahun 2025 di Kabupaten Pesawaran, keterisian DSSD (data statistik sektoral daerah) eWalidata hampir mencapai 100%.

17). Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Secara umum tren persentase koperasi aktif di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2019-2024 menunjukkan tren peningkatan, pada Tahun 2019 tercatat sebesar 56,70% koperasi aktif, kemudian meningkat menjadi 64,66% pada Tahun 2024. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keaktifan koperasi di Kabupaten Pesawaran masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat bermakna perlunya kebutuhan sumber daya manusia peserta/anggota koperasi yang memahami manajemen koperasi dan upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerja setempat dan memiliki resistensi terhadap gejolak perekonomian eksternal. Jumlah UMKM yang produktif di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi , di awal Tahun 2019 tercatat 1.259 pelaku usaha, pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan karena efek pandemi Covid-19 namun pasca pandemi Covid-19 terus meningkat signifikan mencapai 7.394 pelaku usaha pada Tahun 2024.

Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang produktif di Kabupaten Pesawaran merupakan hasil nyata dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja. Upaya tersebut mencakup pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas usaha, fasilitasi pemasaran produk, serta program kemitraan strategis antara pelaku UMKM dengan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta. Selama kurun waktu Tahun 2021 hingga 2024, jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan terus mengalami peningkatan secara konsisten. Pelatihan ini dirancang untuk membekali para pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan, baik dalam aspek manajerial, keuangan, digitalisasi, maupun strategi pemasaran. Namun demikian, pada Tahun 2025, terjadi penurunan jumlah peserta pelatihan sebesar 150 pelaku usaha, atau setara dengan 2,2% dari jumlah UMKM aktif.

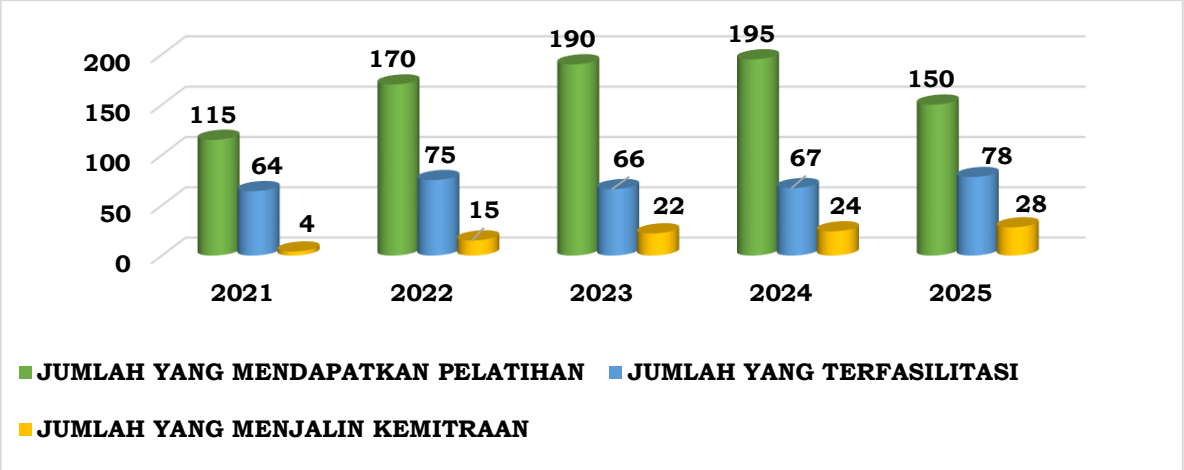
Sementara itu, dari sisi fasilitasi pemasaran, tren yang terjadi justru menunjukkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Sepanjang Tahun 2021 hingga 2025, jumlah UMKM yang telah difasilitasi dalam hal pemasaran produk terus meningkat. Fasilitasi ini mencakup penyediaan akses ke platform digital, promosi melalui event dan pameran, serta pembukaan akses ke pasar lokal, regional, dan nasional. Hingga Tahun 2025, tercatat sebanyak 78 pelaku UMKM telah memperoleh dukungan dalam hal pemasaran, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha dan memperluas jangkauan konsumen.

Selain itu, aspek kemitraan usaha juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jumlah UMKM yang berhasil menjalin kemitraan strategis dengan pihak lain menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga Tahun 2025, tercatat sebanyak 28 pelaku UMKM telah menjalin kemitraan yang mencakup kerja sama dalam distribusi, permodalan, penyediaan bahan baku, hingga peningkatan kapasitas produksi. Kemitraan ini menjadi salah satu kunci keberlanjutan usaha karena memberikan peluang sinergi yang menguntungkan bagi pelaku UMKM dan mitra usahanya.

Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan bahwa kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran telah memberikan dampak positif

terhadap produktivitas dan kemandirian pelaku usaha. Meskipun terdapat tantangan seperti penurunan peserta pelatihan di Tahun 2025, secara umum arah pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren yang konstruktif dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus memperkuat program-program tersebut dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM, memperluas kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan kualitas fasilitasi agar UMKM mampu bersaing secara berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.

Gambar 2.56 Jumlah UMKM di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, 2025

Adapun untuk perkembangan IKM yang produktif juga berpola sama dimana pada Tahun 2019 terdapat 509 pelaku usaha dan meningkat menjadi 712 pada Tahun 2024. Lebih lanjut data kinerja koperasi dan UMKM disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi aktif	56,70	58,42	59,61	67,37	69,14	64,66
Jumlah UMKM yang produktif	1.259	1.055	1.213	1.371	3.806	7.394
Jumlah IKM yang produktif	509	482	521	615	712	712

Sumber: Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, 2025

18). Urusan Penanaman Modal

Jumlah investor di Kabupaten Pesawaran berfluktuasi pada 2019-2024 namun memiliki tren menurun dimana pada Tahun 2019 jumlah investor mencapai 392 dan terus menurun mencapai 116 pada Tahun 2024. Hal tersebut juga sejalan dengan penurunan nilai investasi dari 403,732 miliar pada

Tahun 2019 menjadi 240,16 miliar pada Tahun 2024 dan memberikan dampak terhadap serapan tenaga kerja. Sejak Tahun 2019, rasio tenaga kerja yang terserap melalui PMDN maupun PMA sebesar 16,78 poin yang menurun menjadi 11,81 poin pada Tahun 2023 dan pada Tahun 2024 rasio tenaga kerja yang terserap melalui PMDN maupun PMA mengalami peningkatan yang berada pada nilai sebesar 32,76 poin. Kemudian pada indikator kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN juga terus mengalami penurunan yaitu dari 2,01% pada Tahun 2019 yang terus menurun pada Tahun 2024 menjadi -0,96%.

Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	392	337	352	337	213	116
Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam juta)	403,732	414,196	283,595	314,88	156,36	240,16
Rasio daya serap tenaga kerja	16,78	13,86	17,19	11,75	11,81	32,76
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Jutaan rupiah) (%)	2,01	2,59	-0,32	-0,32	-0,71	-0,96

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025

19). Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan kabupaten urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota melalui sistem yang terintegrasi. Adapun Buku Kabupaten Pesawaran Dalam Angka selama periode Tahun 2018-2024 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Selain itu, dalam penyelenggaraan eWalidata SIPD Tahun 2025 di Kabupaten Pesawaran, keterisian DSSD (data statistik sektoral daerah) eWalidata hampir mencapai 100%.

Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Pesawaran yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Pesawaran selama periode 2018-2024 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesawaran. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Selanjutnya untuk indikator perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah telah mencapai 83% pada Tahun 2024. Dalam upaya memenuhi kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas

informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mencapai 100% di Tahun 2024 dan perlu dipertahakan kedepannya. Untuk capaian konten informasi dalam menjawab narasi negatif atau missleading informasi berkembang cukup baik dari angka 36% di Tahun 2020 dan terus meningkat pada Tahun 2024 hingga berada pada angka 100%. Adapun untuk capaian informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan regulasi keterbukaan informasi publik pada Tahun 2024 telah mencapai angka sebesar 70%. Capaian Indikator Indeks Pembangunan Statistik di Kabupaten Pesawaran memperlihatkan peningkatan sejak tahun 2023 yang berada pada nilai 1,47 pada tahun 2023 yang kemudian meningkat menjadi sebesar 2,92 di tahun 2024. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan guna menunjang capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik.

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2024

Indikator	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Buku "kabupaten Pesawaran dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Presentase (%) perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	80	80	80	80	80	83	83
Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik	NA	NA	NA	50	100	100	100
Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	NA	NA	36	54	72	80	100
Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik	NA	NA	14	30	48	60	70
Indeks Pembangunan Statistik	NA	NA	NA	NA	NA	1,47	2,92

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2026

20). Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan indikator Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dan security cyber baik dalam komunikasi Perangkat Daerah maupun dalam pemanfaatan IT di Pemerintah Daerah. Berdasarkan Tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa selama enam tahun hanya terdapat 6 Perangkat Daerah yang setiap tahunnya menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	1	1	6	6	6

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2025

21). Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa Pada Tahun 2025 festival seni dan budaya yang diselenggarakan sebanyak 2 event. Dengan adanya penyelenggaraan festival, bukan berarti hanya melestarikan seni dan budaya namun juga dapat memberi nilai tambah ekonomi khususnya terhadap penggiat seni dan budaya, umumnya terhadap aktivitas perekonomian lokal. Pelaksanaan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilakukan pada Tahun 2025 sebanyak 2 lokasi. Lebih lanjut jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola secara terpadu pada Tahun 2025 berjumlah 1 benda, sehingga kedepan masih perlu dilakukan upaya tersebut agar dapat membuka peluang kegiatan festival seni dan budaya yang berdampak pada kegiatan perekonomian. Selain itu kedepan perlu mengintegrasikan kegiatan budaya dengan pendidikan karakter siswa berupa pengenalan, pengembangan dan pemberdayaan muatan lokal dan kearifan lokal di sekolah. Juga, cagar budaya yang ada di kabupaten akan dimaksimalkankan sesuai dengan masukan, dan di sinergi kan dengan dinas terkait termasuk untuk pariwisata.

Adapun indikator kinerja urusan kebudayaan disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2025

Indikator		Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	12	11	1	7	2
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	7	9	10	1	6	2
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	3	4	1	2	1
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	3	3	1	4	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2026

22). Urusan Perpustakaan

Berdasarkan tren data series empat indikator kinerja urusan perpustakaan pada Tabel berikut ini selama periode Tahun 2020-2025 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif. Jumlah perpustakaan pada Tahun 2020 sebanyak 339 yang kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2025

sebanyak 421 perpustakaan. Adapun perkembangan kunjungan perpustakaan per tahun pada Tahun 2020 mencapai 1.700, dan sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan menjadi sebanyak 4.400 pengunjung dan Pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi sebanyak 2.430 pengunjung Pada Tahun 2025 meningkat kembali menjadi 2.541 pengunjung. Selanjutnya koleksi judul buku pada Tahun 2025 tersedia 9.398 judul buku. Dalam konteks ini jumlah perpustakaan adalah jumlah perpustakaan yang terdapat di seluruh Kabupaten Pesawaran (mencakup perpustakaan SD-SMP Perpus di Kantor OPD) dan jumlah setiap tahunnya merupakan agregat dari tahun sebelumnya, begitu pula jumlah pengunjung merupakan jumlah pengunjung seluruh perpustakaan di Kabupaten Pesawaran.

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi. Serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Terutama dukungan untuk perpustakaan desa yang terintegrasi dengan program Smart Village Provinsi Lampung.

Adapun Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat sebanyak 6 orang sehingga trategi manajemen perpustakaan mulai dari pengelolaan sarpras perpustakaan, hingga strategi peningkatan minat baca melalui perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam perspektif kedepan perlu terus diupayakan agar pelayanan urusan perpustakaan dapat berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah perpustakaan	339	463	472	472	487	421
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1.700	2.700	4.400	4.400	2.430	2.541
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	6.959	7.241	8.180	23.526	9.398	9.398
Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	0	2	4	4	4	6

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

23). Urusan Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan periode Tahun 2020-2025 dapat digambarkan oleh indikator pada Tabel berikut ini. Indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku secara tren menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sejumlah 22,22% meningkat menjadi 45,23% pada tahun 2025 OPD yang mengelola arsip secara baku. Rasio ini perlu ditingkatkan kembali agar setiap OPD memiliki kelengkapan arsip untuk dipergunakan

sebagai evaluasi dan mengukur kinerja kualitas OPD. Kemudian untuk indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 terdapat 10 arsiparis, kemudian pada Tahun 2025 terdapat 65 arsiparis.

Tabel 2.72 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	22,22	22,22	33,33	30,71	41,83	45,23
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	10	36	22	22	58	65

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2026

B. Pelayanan Urusan Pilihan

1). Urusan Pertanian

Bahan makanan utama penduduk di Kabupaten Pesawaran adalah beras, secara umum, tren produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal mengalami peningkatan sepanjang Tahun 2019-2025. Adapun capaian produksi (panen) sebesar 111.281 ton dengan luas lahan 20.565 hektar di Tahun 2019 yang terus mengalami kenaikan mencapai 157.586,5 ton dengan luas lahan 30.305,10 hektar di Tahun 2025.

Tabel 2.73 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019-2025

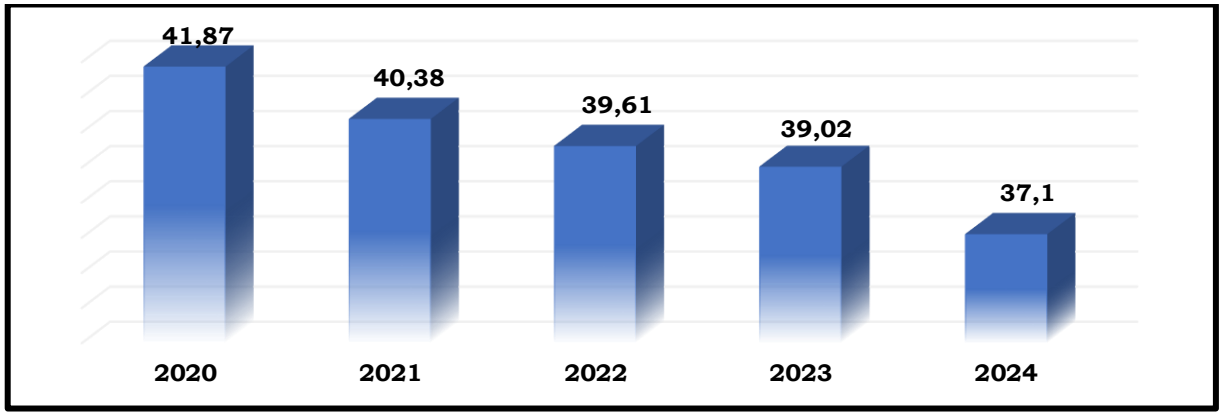
Indikator	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produktivitas Padi (Ton/Ha)	5,41	5,13	5,33	5,59	5,28	5,29	5,20
Luas Panen Padi (Ha)	20.565	22.068	21.260	23.360	23.010	21.910	30.305,10
Produksi Padi (Ton)	111.281	113.207	113.403	130.559	121.693	115.934	157.586,5

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

Sementara itu, kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap PDRB memiliki tren yang turun, pada Tahun 2020 tercatat 41,87%. Walaupun pada periode Tahun 2021-2024 terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 37,10% di Tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya

perubahan aktivitas ekonomi yang berdampak pada perubahan guna lahan dari pertanian ke lahan terbangun serta perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor lainnya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.57 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

2). Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (agent of development) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adapun daerah tujuan wisata di Kabupaten Pesawaran didominasi oleh objek wisata alam pesisir, informasi mengenai hal ini telah diuraikan pada pembahasan pola ruang kawasan budidaya dalam sub bab kawasan pariwisata.

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Pesawaran masih didominasi wisata berskala lokal dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya, selain itu juga belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata yakni warung makan (kuliner) dan penginapan serta akses transportasi yang memadai. Dalam konteks pengembangan pariwisata hal ini dapat bermakna bahwa daerah tujuan wisata tersebut belum mampu berperan optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2025

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kunjungan Wisatawan	Ribu Orang	873.83	1135.98	776.47	705.18	960.19	1038.39

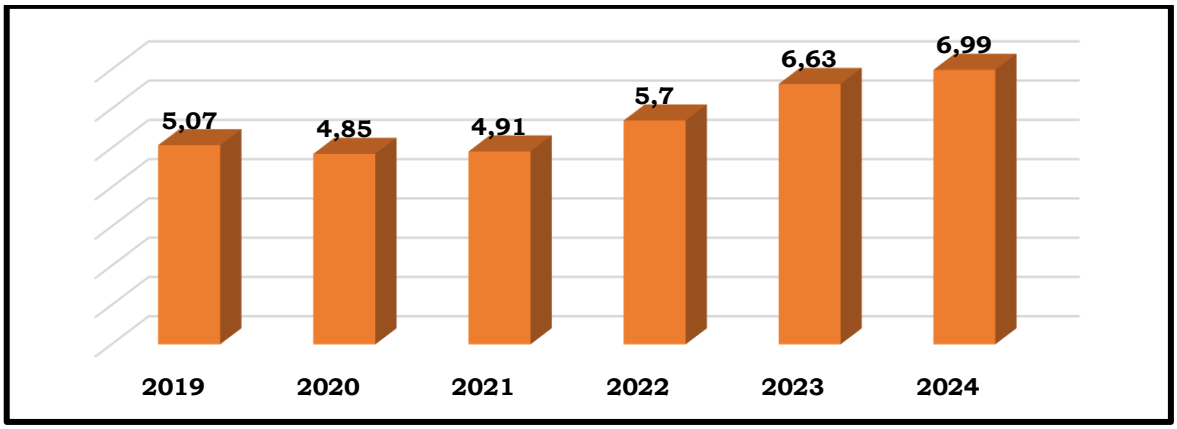
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	%	-37.00	30.00	-31.64	-9.18	36.16	8.14
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	-	-	-	2.68	2.46	1.99
Rata-Rata Lama Tinggal	Hari per Kunjungan	-	-	-	-	-	4.75
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.39	1.35	1.42	1.52	1.59	1.61
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	4.85	4.91	5.7	6.63	6.99	7.09

Sumber: Dinas Pariwisata 2025

Sektor parwisata Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren pemulihan dan kontribusi ekonomi yang terus menguat hingga tahun 2025. Setelah mengalami fluktuasi signifikan pada periode 2020–2023 akibat dinamika kunjungan wisatawan, jumlah kunjungan kembali meningkat secara konsisten dalam dua tahun terakhir hingga mencapai 1.038,39 ribu orang pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 8,14%. Sejalan dengan itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku terus merangkak naik setiap tahunnya dari 4,85% di tahun 2020 hingga menyentuh angka tertinggi sebesar 7,09% pada tahun 2025. Peningkatan kontribusi ini juga didukung oleh rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yang konsisten menguat dari 1,39% menjadi 1.61%. Di sisi lain, meskipun jumlah tamu wisatawan mancanegara di hotel berbintang cenderung menurun menjadi 1,99 ribu orang pada tahun 2025, rata-rata lama tinggal wisatawan tercatat cukup solid di angka 4,75 hari per kunjungan, yang menandakan bahwa daya tarik kawasan wisata di Pesawaran berhasil mempertahankan durasi kunjungan pelancong secara optimal.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan dinamika sektor pariwisata yang sangat dipengaruhi oleh kondisi global dan regional, dengan fluktuasi yang tajam antara tahun-tahun tertentu. Pemulihan yang terjadi pada tahun 2024 memberikan harapan besar bagi keberlanjutan dan pengembangan sektor pariwisata ke depannya. Sementara itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang dihitung dari nilai PDRB (diproksi dari agregasi sektor usaha Transportasi dan pergudangan; akomodasi makan minum; dan jasa lainnya) selalu tumbuh positif meskipun sempat tumbuh melambat akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Pada Tahun 2019 tercatat 5,07%, kemudian menurun pada angka 4,54% pada Tahun 2020. Pasca pandemi sektor pariwisata tumbuh positif dan pulih pada 2022 sebesar 5,7% dan selanjutnya pada Tahun 2023 tumbuh mencapai 6,63%, serta meningkat menjadi 6,99% pada Tahun 2024.

Gambar 2.58 Grafik Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

3). Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Pesawaran mengalami tren yang menurun namun dengan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2019 tercatat 43.921 ton produksi yang terus menurun hingga Tahun 2022 sebesar 19.667 ton kemudian pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 21.330 ton dan kembali mengalami penurunan menjadi 18.843,40 ton di Tahun 2024. Dari total produksi perikanan tersebut pada Tahun 2019, 28% berasal dari tangkapan nelayan yang proporsinya berfluktuasi selama periode hingga Tahun 2024 yang mencapai 88,44%. Hal tersebut sejalan dengan adanya tren perkembangan cakupan bina kelompok nelayan dimana pada awal Tahun 2019 tercakup 28,59% dan meningkat menjadi 22,00% pada Tahun 2024.

Selanjutnya, jumlah konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Pesawaran per kapita sudah menunjukkan capaian yang fluktuatif pada Tahun 2019-2024 dimana pada Tahun 2019 sebanyak 42 kg/kapita dan meningkat menjadi 56 kg/kapita pada Tahun 2021 namun menurun sesuai dengan ketersediaan produksi perikanan menjadi 17 di Tahun 2024 kg/kapita. Upaya untuk menyosialisasikan gerakan makan ikan terjadi seiring dengan kampanye GEMARIKAN (Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan) untuk meningkatkan cakupan nutrisi penduduk. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.75 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan (Ton)	43.921	30.017	31.149	19.667	21.330	18.843,40
Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	28,60	35,53	36,87	23,28	26,5	88,44
Cakupan bina kelompok nelayan	28,59	28,59	29,66	18,73	0,00	22,00
Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42	54	56	35	24	17

Sumber: Dinas Perikanan 2025

4). Urusan Pedagangan

Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran tercatat 16,99%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh pedagang/usaha formal dan pedagang/usaha informal, dengan jumlah kelompok pedagang/usaha yang dibina sampai Tahun 2024 mencapai 46,49%.

Tabel 2.76 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2024

Indikator	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran	13,06	13,36	14,05	13,64	14,06	15,44	16,16	16,99
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	38,72	38,72	38,72	42,24	43,59	45,52	46,47	46,49

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025

5). Urusan Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan eceran pada Tahun 2024 tercatat 13,72%. Dalam konteks ini, industri berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri sekala besar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan perindustrian untuk kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri rumah tangga. Adapun realisasi cakupan bina kelompok pengrajin mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2017 tercatat bina kelompok pengrajin dengan cakupan mencapai 64,43%, kemudian pada Tahun 2024 cakupan pembinaan mencapai 99,65%. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam

mendukung usaha industri kecil menengah sehingga kedepan perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar usaha tersebut dapat mandiri.

Tabel 2.77 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017-2024

Indikator	Tahun							
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Cakupan bina kelompok pengrajin	64,43	80,9	89,71	99,57	99,58	99,60	99,63	99,65

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025

Tabel 2.78 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2019-2024

Indikator	**Tahun**					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Industri Pengolahan (%)	14,41	13,83	14,68	14,17	13,36	13,72

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

Dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka mewujudkan pembangunan industri di Kawasan Industri Pesawaran (Kecamatan Tegineneng) dan untuk mendukung kebijakan pembangunan industri pengolahan sesuai janji kerja Gubernur Lampung telah dilaksanakan melalui kebijakan penyusunan feasibility study (studi kelayakan) Kawasan Industri Tegineneng pada Tahun 2017, penyusunan Masterplan Kawasan Industri Tegineneng pada Tahun 2018, MoU dengan SDCP Holdings PTY LTD pada Tahun 2019, Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tegineneng Tahun 2022-2042, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Koridor Kawasan Industri Tegineneng – Negeri Katon Tahun 2022-2042, dan penjajakan yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP Provinsi Lampung terkait rencana Investasi Angel Yeast.Co.Ltd pada Bulan Maret 2023.

6). Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (rowing) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (steering), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi

dilakukan dengan pendekatan demand side, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota.Selama periode Tahun 2020-2024 transmigran swakarsa tercatat sebanyak 4 orang yang sebagian besar merupakan tenaga kerja indonesia di luar negeri.

Tabel 2.79 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Transmigran Swakarsa	0	0	4	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Urusan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2011-2025 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. RPJMD Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2021-2026 juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Selain itu, selama periode Tahun 2018-2024 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019. Secara lebih lengkap, gambaran indikator kinerja urusan perencanaan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2019-2025

Indikator	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (persen)	100	100	100	100	100	100	100

Indikator	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (persen)	100	100	100	100	100	100	100
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (persen)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025

Berdasarkan Tabel diatas selama Tahun 2019-2025 bahwa penjabaran konsistensi program dalam RPJMD pada dokumen RKPD telah terakomodir 100%, termasuk penjabaran konsistensi program dalam RKPD pada APBD. Selanjutnya untuk tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan pola ruang dan/atau struktur ruang dalam RTRW juga telah mencapai 100%.

2). Urusan Keuangan

Berdasarkan pada tabel di bawah, secara keseluruhan kinerja urusan penunjang keuangan dapat dikatakan baik. Beberapa indikator telah memenuhi target dan sebagian kecil belum tercapai. Namun demikian, pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah baik dengan dapat dipertahankannya opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI selama 7 tahun berturut-turut. Begitu juga kinerja pelaksanaan program dan kegiatan juga sangat baik dengan tidak ada satupun program pembangunan daerah yang tidak dilaksanakan (0%) sehingga terdapat keyakinan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan yaitu RPJMD. Selanjutnya persentase PAD terhadap APBD memiliki tren positif, pada Tahun 2018 berada pada angka 4,53% dan meningkat menjadi 6,79% pada Tahun 2024. Fenomena adanya penurunan SILPA dan kebijakan alokasi anggaran serta bagaimana perkembangan kinerja realisasinya akan dibahas lebih lanjut pada Bab III.

Tabel 2.81 Indikator Urusan Keuangan Tahun 2018-2024

Indikator	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA terhadap APBD	4,33	0,25	0,97	0,81	0,63	0,84	0,65
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
Persentase PAD terhadap APBD	4,53	5,13	5,66	6,61	6,50	6,67	6.79
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

3). Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Tabel berikut ini, dapat diketahui kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Secara umum indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan diklat selama periode Tahun 2020-2025 telah sesuai dengan standar, kemudian untuk indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal telah mencapai nilai maksimum, hal ini menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan kompetensi ASN. Indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural secara tren mengalami peningkatan selama periode Tahun 2020-2025, hal ini terjadi karena adanya pembagian skala prioritas untuk pelaksanaan diklat struktural. Selanjutnya pada indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural serta pada indikator Jumlah jabatan administrasi terus meningkat menjadi 23,04% pada Tahun 2025. Selanjutnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 menjadi 2.673 orang pegawai.

Tabel 2.82 Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	95,00	100,00	99,90	99,90	100.00	100.00
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	21,04	21,04	21,11	21,11	21.96	23,04
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	39	38	38	38	38	30
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	163	174	179	162	179	143
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu	2.884	3.207	3.142	3.075	2.887	2.673
Jumlah pemangku jabatan fungsional umum	984	102	712	356	316	301

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2026

D. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

1). Urusan Pengawasan

Seiring dengan mampu dipertahankannya peroleh predikat opini WTP pada LKPD Kabupaten Pesawaran oleh BPK RI selama 6 tahun terakhir, menunjukkan adanya kualitas kinerja pengawasan, terutama di bidang keuangan. Indeks kapabilitas APIP menunjukkan capaian yang cukup baik yakni pada level 3 (integrated) dari 5 (optimized). Kinerja pengawasan terkait dengan tindak lanjut hasil temuan BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan OPD terkait mencapai peningkatan dari 78,00% ke angka 81,28%. Namun demikian, jika dilihat dari kecenderungan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan penurunan. Hal ini perlu

adanya perhatian terkait dengan penurunan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat berdampak pada kualitas akuntabilitas dalam penyajian LKPD sehingga akan berdampak pada penurunan opini LKPD. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM auditor fungsional serta peningkatan sarana penunjang perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.83 Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2020-2025

Indikator		Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3
Persentase tindak lanjut temuan	59,26	72,96	73,51	78,00	81,28	Blm Ada Data
Persentase pelanggaran pegawai	0,07	0,00	0,00	0,0542	0,138	0,205
Jumlah temuan BPK	0	19	0	8,82	18	Blm Ada Data

Sumber : Inspektorat, 2026

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

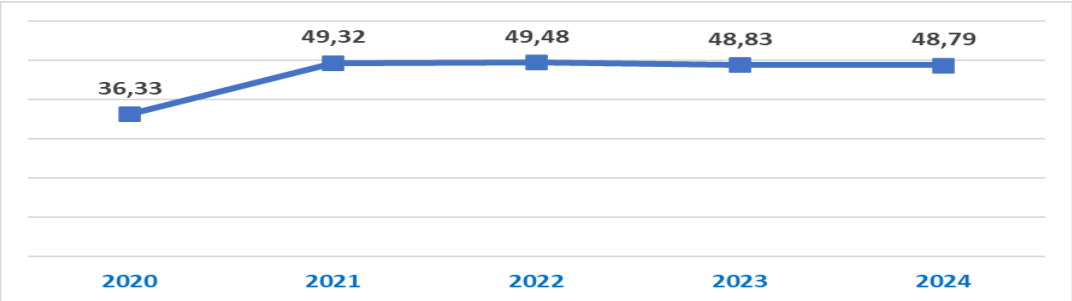
2.1.4.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Pada Tahun 2018, angka ketergantungan Kabupaten Pesawaran sebesar 40,58% kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 dan 2020 hingga menjadi 36,33%. Namun angka ketergantungan naik kembali pada angka 49,32% di Tahun 2021 dan 49,48% pada Tahun 2022. Kemudian angka ketergantungan kembali mengalami penurunan pada angka 48,83% di Tahun 2023 dan 48,79% pada Tahun 2024. Artinya pada Tahun 2024, penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung kurang lebih sebanyak 48 penduduk usia non produktif (usia <15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, keahlian, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.59 Grafik Rasio Ketergantungan Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; BPS Kabupaten Pesawaran 2024

2.1.4.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan eceran pada Tahun 2024 tercatat 13,72%. Dalam konteks ini, industri berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri sekala besar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan perindustrian untuk kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri rumah tangga. Adapun realisasi cakupan bina kelompok pengrajin mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2017 tercatat bina kelompok pengrajin dengan cakupan mencapai 64,43%, kemudian pada Tahun 2024 cakupan pembinaan mencapai 99,65%. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mendukung usaha industri kecil menengah sehingga kedepan perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar usaha tersebut dapat mandiri.

Tabel 2.84 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017-2024

Indikator	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan bina kelompok pengrajin	64,43	80,9	89,71	99,57	99,58	99,60	99,63	99,65

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025

Tabel 2.85 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan (%)	14,41	13,83	14,68	14,17	13,36	13,72

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

Mempertimbangkan bahwa aspek Tata Ruang KI Pesawaran telah disesuaikan (RTRW Provinsi Lampung pada peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029; Perda No. 6 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Pesawaran tahun 2019 – 2039; dan Perbup No. 53 Tahun 2022 RDTR Kawasan Perkotaan Tegineneng 2022 – 2042), menyatakan bahwa di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung akan dikembangkan Kawasan Industri Pesawaran, maka hal ini perlu diupayakan untuk didorong realisasinya. Potensi konektivitas lokasi KI Pesawaran yang mudah diakses dari beberapa exit tol, jalur lintas tengah, bandara Radin Inten II, Pelabuhan Panjang, beberapa stasiun dan jalur Kereta Api, serta kemudahan akses ke Kota Metro dan Kota Bandar Lampung menjadi potensi dari KI Pesawaran. Pemerintah Daerah terutama Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran perlu berupaya bersama-sama untuk mewujudkan pengembangan KI Pesawaran yang sampai saat ini belum bisa terealisasi dikarekanan belum ada pengelola KI. Langkah strategis perlu dilakukan seperti pembebasan lahan dan pemenuhan dokumen perencanaan seperti FS, DED dan dokumen lainnya agar bisa diterbitkannya Izin Usaha Kawasan Industri. Pemerintah daerah bersama Kementerian Investasi/BKPM perlu memasukan KI Pesawaran sebagai proyek investasi yang siap ditawarkan di Provinsi Lampung.

B. Rasio Kewirausahaan

Transformasi ekonomi menjadi prasyarat untuk mewujudkan Indonesia yang berpendapatan tinggi. Keberhasilan transformasi ekonomi salah satunya ditandai dengan peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Rasio kewirausahaan nasional saat ini tercatat baru sebesar 3,47 persen dan ditargetkan setidaknya mencapai 12 persen di tahun 2045. Semangat berwirausaha di Indonesia dewasa ini masih tergolong rendah. Berasarkan data Kemenkop UKM, saat ini rasio kewirausahaan Indonesia berada di angka 3,47 persen dan berada di peringkat 75 dari 150 negara. Meskipun rasio kewirausahaan di Indonesia sudah melampaui standar internasional, yakni sebesar 2 persen, Indonesa perlu menggenjot lagi untuk mengejar capaian negara tetangga. Misalnya, Singapura saat ini sudah mencapai angka 7 persen, sedangkan Malaysia berada di level 5 persen.

Tabel 2.86 Program Pelatihan Kewirausahaan

No	Indikator (dalam persen)	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18,18	18,18	23,64	52,73	60,00	80,00	0	2,94

No	Indikator (dalam persen)	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0	0,00
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	23,81	28,57	28,57	42,86	50,00	0,00	0	0,00

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, 2025

Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah berupaya dalam melakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan. Capaian masing-masing indikator mengalami peningkatan pada periode 2018-2024 khususnya pada besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi kecuali di tahun 2023, karena kegiatan tidak terlaksana. Selanjutnya besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan pada kurun waktu 2017-2021 meningkat dengan capaian terbesar pada tahun 2021 sebesar 50,00%, namun pada kurun waktu 2022-2024 kegiatan tidak terlaksana. Sementara itu capaian besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat cenderung stagnan sebesar 5,00% selama periode 2017-2021, namun pada kurun waktu 2022-2024 kegiatan tidak terlaksana.

Perkembangan tersebut masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi agar tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran memiliki kompetensi yang dapat bersaing dalam dunia kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja pada usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan data pada tabel dibawah, TPAK Kabupaten Pesawaran pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan menuju tren yang berfluktuatif. Selama kurun waktu tersebut persentase jumlah angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja mengalami perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2019 persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja sebesar 67,75 persen yang meningkat menjadi 69,49 persen pada Tahun 2020 namun mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 65,42 persen akibat Pandemi Covid-19. Pasca Pandemi Covid-19 terus meningkat terkakhir pada Tahun 2024 sebesar 70,69 persen. Selanjutnya cerminan angka tersebut tidak berpengaruh terhadap progress menurunnya tingkat pengangguran.

Tabel 2.87 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2024

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2019	67,75
2020	69,49
2021	65,42
2022	71,27
2023	70,45
2024	70,69

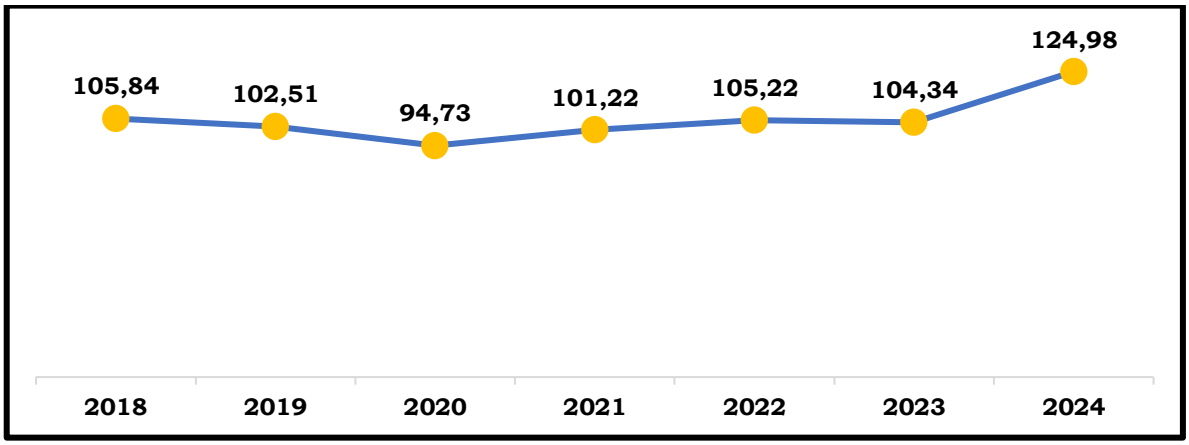
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

D. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP< 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Gambar 2.60 Grafik Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

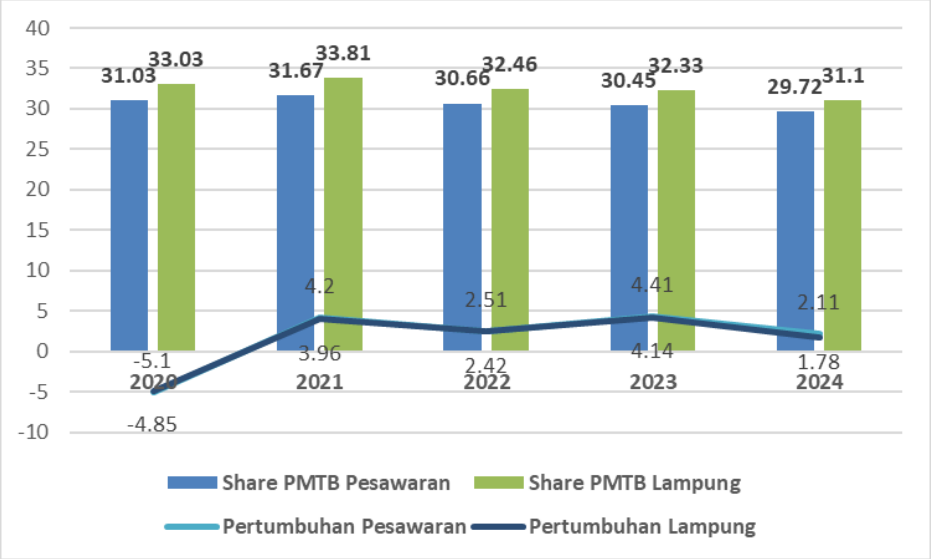
Mengacu pada gambar di atas dapat diketahui bahwa NTP di Kabupaten Pesawaran yang diambil datanya dari NTP Provinsi Lampung, selama periode Tahun 2018-2024 mengalami penurunan signifikan akibat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 dan meningkat kembali pulih hingga Tahun 2024 berada pada angka 124,98.

2.1.4.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Gambar 2.61 Grafik Share PMTB Tahun 2020-2024



Sumber : Hasil Analisis, BPS 2025

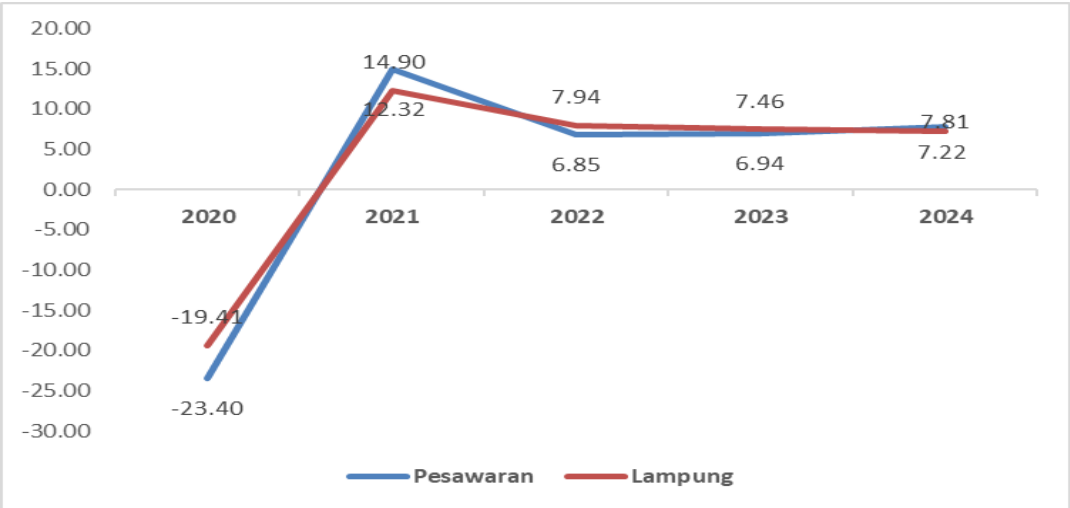
Dalam struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran dari sisi pengeluaran, PMTB memiliki kontribusi (share) terbesar setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga sama halnya dengan struktur ekonomi Provinsi Lampung dan nasional. PMTB dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan PMTB mengalami kontraksi sebesar 5,10 persen. Kemudian pada tahun 2021, aktivitas ekonomi mengalami pemulihan sehingga

pertumbuhan untuk pengeluaran pada komponen ini mengalami peningkatan hingga mencapai 4,20 persen. Pada tahun 2022, pengeluaran untuk komponen PMTB mengalami perlambatan sebesar 2,51 persen, kemudian kembali tumbuh pada tahun 2023 mencapai 4,41 persen dan mengalami perlambatan kembali tahun 2024 hingga mencapai 2,11 persen.

B. Efisiensi Modal dalm Perekonomian (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output, semakin rendah nilai ICOR maka semakin efisien kebutuhan investasi yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian. Nilai ICOR Kabupaten Pesawaran tahun 2024 sebesar 7,81 menunjukan bahwa kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap satu unit output rata-rata sebesar 7,81 unit kapital. Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Lampung yakni 7,22 pada tahun 2024. Pada tahun 2020 ICOR Kabupaten Pesawaran terkontraksi karena adanya penurunan output, lalu selanjutnya tahun 2021 meningkat ke angka 14,90 dan terus menurun dikisaran 6,85-7,81 pada periode 2022-2024. Nilai ICOR Pesawaran cenderung besar sehingga diartikan Kabupaten Pesawaran masih sangat membutuhkan banyak investasi untuk mendongkrak perekonomiannya.

Gambar 2.62 Grafik Perkembangan ICOR Tahun 2020-2024



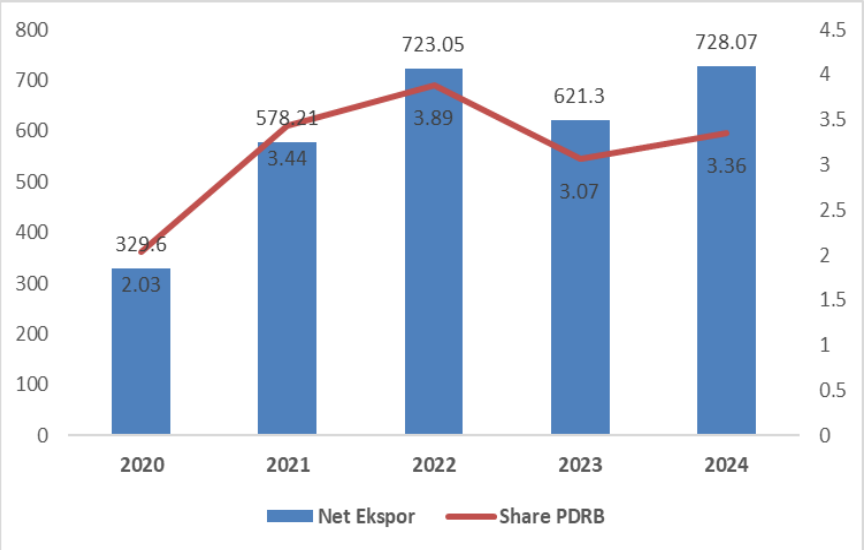
Sumber : Hasil Analisis, 2025

C. Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor yang merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor menggambarkan kinerja perdagangan luar daerah Kabupaten Pesawaran. Secara total, dalam kurun waktu 2020-2024 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan nilai positif setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang di ekspor ke luar Kabupaten Pesawaran dibandingkan dengan produk yang di impor masuk. Dengan kata lain, selama lima tahun

terakhir Kabupaten Pesawaran mengalami surplus perdagangan luar kabupaten.

Gambar 2.63 Grafik Perkembangan Net Ekspor Tahun 2020-2024



Sumber : Hasil Analisis, BPS 2025

Pada periode 2020-2024 kinerja net ekspor memiliki tren naik dan terbesar pada tahun 2024 sebesar 728,07 Miliar Rupiah. Meskipun surplus perdagangan ke luar daerah Kabupaten Pesawaran mencatatkan kinerja yang positif selama lima tahun terakhir, namun konstribusi surplus perdagangan tersebut terhadap PDRB masih di bawah lima persen. Dalam kurun waktu 2020-2024 net ekspor barang dan jasa sumbangan net ekspor barang dan jasa terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesawaran tidak banyak berubah yaitu berada di bawah kisaran 4 persen.

2.1.4.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Kondisi Infrastruktur Jalan

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan yang menjadi kewenangan kabupaten. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel berikut). Pada Tahun 2020 tercatat 918,96 km, kemudian meningkat menjadi 1.053,92 km di Tahun 2023. Selain jalan kabupaten terdapat 2 status jalan yang terdapat di Kabupaten Pesawaran yaitu 6 Ruas Jalan Nasional sepanjang 109,62 km dan 6 Ruas Jalan Provinsi sepanjang 142,44 km.

Tabel 2.88 Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Pesawaran

Status Jalan	Tahun											
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Nasional	109,62	9,36	109,62	9,36	109,62	9,36	109,62	8,39	109,62	8,39		
Provinsi	142,44	12,16	142,44	12,16	142,44	12,16	142,44	10,91	142,44	10,91		
Kabupaten	918,96	78,48	918,96	78,48	918,96	78,48	1.053,92	80,70	1.053,92	80,70	**1.053,92**	
JUMLAH	**1.171,02**	**100,0**	**1.171,02**	**100,0**	**1.171,02**	**100,0**	**1.305,98**	**100,0**	**1.305,98**	**100,0**	**1.305,98**	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran, 2026

Pada tahun 2020 panjang jalan mantab di Kabupaten Pesawaran sepanjang 601,35 selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 665,05 km di Tahun 2021 yang kemudian kembali mengalami penurunan menjadi 568,20 di Tahun 2022 dan terus mengalami penurunan menjadi 558,62 km di Tahun 2023. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 571,51 km di Tahun 2024. Dengan demikian pada Tahun 2024 terdapat 54,32% jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pesawaran dari total panjang jalan sebesar 1.053,92 km.

Tabel 2.89 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Panjang Jalan	918,96	918,96	918,96	1.053,92	1.053,92	1.053,92
Panjang Jalan Kondisi Mantap	601,35	665,05	568,2	558,62	571,51	582,57
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap (>40 km per jam)	65,44	72,37	61,83	60,79	54,32	55,28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2026

Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang jalan per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang melayani jumlah penduduk di wilayah tertentu. Dalam kurun waktu Tahun 2018-2024 rasio panjang jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2018 tercatat sebesar 20,88 km/10.000 jiwa, dan mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 21,32 km/10.000 jiwa (Tabel berikut).

Tabel 2.90 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa Tahun 2020-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Panjang Jalan Seluruhnya	918.96	918.96	1,053.92	1,053.92	1,053.92
Jumlah Penduduk	481,708	487,150	485,671	494,183	
Rasio	0.001908	0.001886	0,002170	0.002132	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2025

Jika mengacu pada Lampiran II Permen PU Nomor 14 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk kategori wilayah dengan kepadatan penduduk 100 ≤ KP < 500 jiwa/km2 (kepadatan penduduk Kabupaten Pesawaran yakni 386,62 km2), maka SPM rasio ideal panjang jalan per 10.000 jiwa adalah 11 km/10.000 jiwa. Mengacu pada tabel diatas rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran telah memenuhi target SPM yaitu mencapai 0,002132 atau 21,32 km /10.000 jiwa.

B. Akses Transportasi

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (farm gate price) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupaun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

C. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (livable), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti belum optimalnya penanganan RTLH, dan kawasan kumuh, ketersediaan dan akses air minum serta sanitasi.

Cakupan rumah layak huni dihitung berdasarkan ketersediaan rumah layak huni dan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara jumlah seluruh rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah, sedangkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dihitung berdasarkan persentase perbandingan rumah tangga MBR yangmenghuni rumah layak terhadap jumlah rumah tangga MBR.

Cakupan rumah layak huni di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2024 tercatat 93,38% sedangkan cakupan MBR yang menguni rumah layak telah mencapai belum dapat diukur, hal tersebut mengondisikan bahwa perlu ditingkatkan kembali agar MBR juga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak. Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%, maka capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Pesawaran telah mencapai target.

Tabel 2.91 Rumah Layak Huni Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	95,4	96,7	88,30	73,84	93,38

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	49,86	51,7	50,86	50,76	49,86

Sumber: Dinas PRKP Pesawaran 2025

rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sanitasi layak merujuk pada fasilitas dan layanan yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan untuk pembuangan limbah manusia, seperti air kotor dan kotoran. Sanitasi layak mencakup akses terhadap toilet yang aman dan higienis, pembuangan limbah yang tepat, serta praktik-praktik kebersihan yang baik, seperti mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan toilet.

D. Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Tabel 2.92 Rasio Luas Lahan Pertanian terhadap Jumlah Penduduk

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Lahan Pertanian	13.304,53	13.304,53	13.304,53	13.304,53	12.926,02
2	Jumlah Penduduk	477.470	481.710	487.150	485.671	494.183
3	Rasio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pesawaran 2025

E. Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan

prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

F. Persentase Desa Mandiri

Dalam upaya mensejahterakan rakyatnya, khususnya di kawasan perdekaan pemerintah membuat beberapa langkah dan strategi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah program pembangunan desa. Untuk pelaksanaan program tersebut diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah indikator yang mengukur tingkat pembangunan di tingkat desa, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencerminkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui IDM, kita dapat melihat seberapa baik desa dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, serta sejauh mana desa memberikan akses dan peluang bagi warganya untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, IDM dapat memberikan gambaran yang holistik tentang kesejahteraan sosial budaya di suatu wilayah.

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan siginifikan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, tercatat Tahun 2020 sebesar 94,86% menjadi 100% di Tahun 2024. Adapun indikator pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan angka yang signifikan sejak 2020 hingga 2024 tercatat meningkat sudah 100%. Selanjutnya pada tahun 2025 telah dilakukan penghitungan Indeks Desa untuk mengukur dan memetakan tingkat kemadirian desa di Kabupaten Pesawaran. Hasil penghitungan Indeks Desa Tahun 2025 jumlah Desa Mandiri 37, Desa Maju 50 dan Desa Berkembang 61.

Tabel 2.93 Status Kemandirian dan Kemajuan Desa Tahun 2020-2025

No	Status Desa	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mandiri	6	7	10	28	28	37
2	Maju	12	13	31	51	49	50
3	Berkembang	123	123	103	69	71	61
4	Tertinggal	3	1	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2026

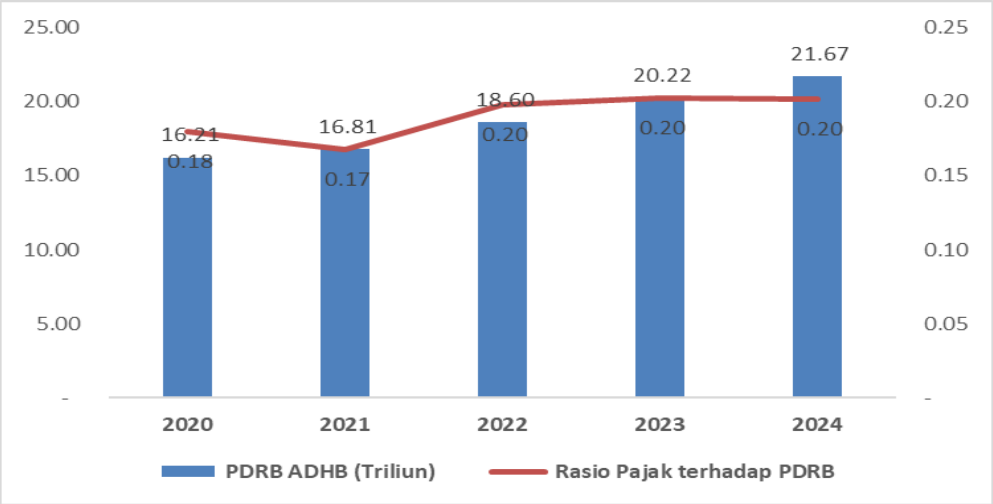
2.1.4.5 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak daerah dan retribusi daerah cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berharap rasio pajak daerah setidaknya bisa mencapai 2%. Rasio pajak daerah yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah tersebut baik. Pemerintah daerah perlu

memperhatikan dampak peningkatan rasio pajak daerah terhadap kondisi ekonomi. Pada periode 2020-2024 rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran memiliki tren meningkat namun cenderung melambat yakni sebesar 0,18% pada tahun 2020 menjadi 0,20% pada tahun 2024.

Gambar 2.64 Grafik Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran, 2025

Upaya peningkatan rasio pajak daerah melalui:

a. Melakukan perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi
b. Mengimplementasi Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)
c. Menaikkan tarif pajak
d. Memanfaatkan kebijakan yang bersifat jangka panjang
e. Target rasio pajak daerah
f. Kemenkeu dan Pemda menargetkan rasio pajak daerah 3 persen.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Di Kabupaten Pesawaran, untuk penghitungan inflasi tidak dilakukan oleh BPS setiap tahunnya tetapi hanya mengacu kepada Kabupaten/Kota terdekat yakni Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2019 inflasi Provinsi Lampung sebesar 3,44 dan angka ini masih di atas nasional, sampai dengan tahun 2023 angka inflasi Provinsi Lampung masih di atas angka nasional kecuali pada tahun 2022 angka inflasi Provinsi Lampung sama dengan nasional.

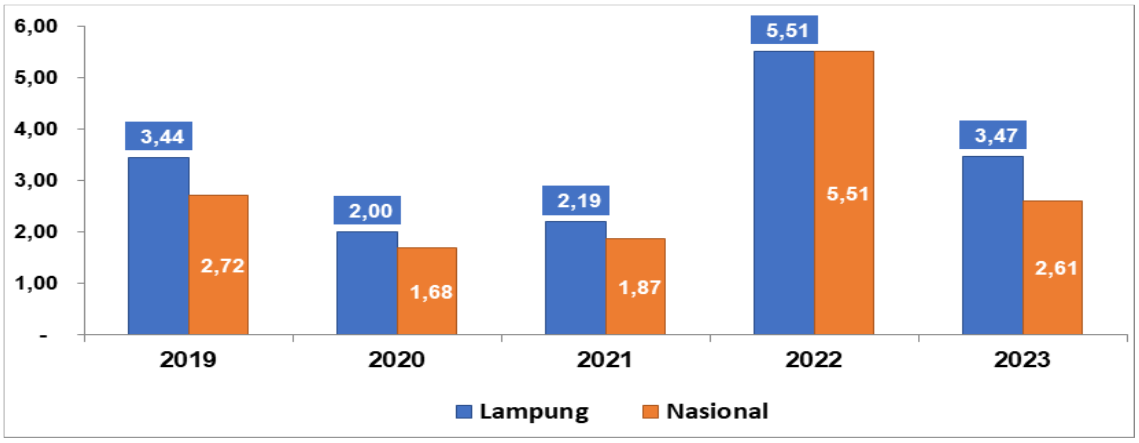
Pada Desember 2024, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 1,57 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,43.

Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 1,78 persen, dengan IHK sebesar 111,14 dan terendah terjadi Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,37 persen dengan IHK sebesar 110,55.

Tabel 2.94 Trend Laju Inflasi Tahun 2019 s.d 2023

Kabupaten/Kota	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
Kabupaten Lampung Timur	110,55	1,37	0,68
Kabupaten Mesuji	111,14	1,78	0,53
Kota Bandar Lampung	107,40	1,67	0,36
Kota Metro	106,43	1,51	0,46

Tingkat inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 1,78 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 1,37 persen.



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Inflasi year-on-year (y-on-y) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,83 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 2,78 persen; kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga 0,58 persen; kelompok kesehatan 1,19 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 2,27 persen; kelompok pendidikan 5,67 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,97 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 4,86 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok transportasi 0,51 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,62 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m)

Desember 2024 tercatat inflasi sebesar 0,47 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Desember 2024 mengalami inflasi sebesar 1,57 persen.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025 DAN REALISASI RPJMD TAHUN 2021-2026

Indikator makro pembangunan, memberikan gambaran secara makro terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya. Upaya pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam membangun daerah diarahkan pada pencapaian visi : "PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF" sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 serta "Pesawaran Sejahtera dan Berdaya Saing Menjadi Bumi Wisata 2025" yang merupakan visi jangka panjang Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025.

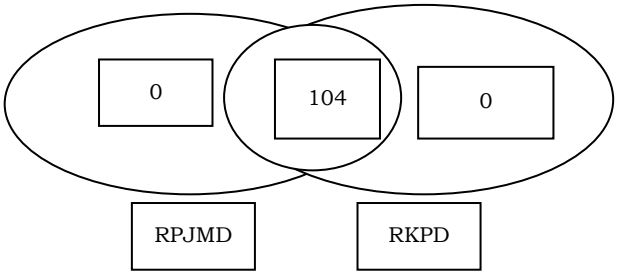
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025

Tujuan pembangunan Kabupaten Pesawaran telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesawaran disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

A. Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025

Setelah dilakukan perbandingan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, dapat diketahui bahwa Jumlah Program dalam RPJMD sebanyak 104 program, dan Jumlah Program dalam P-RKPD tahun 2025 sebanyak 104 program, sehingga Tidak terdapat Program dalam P-RKPD tahun 2024 yang berbeda dengan program RPJMD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keselarasan program Perubahan RKPD dengan RPJMD telah mencapai 100% yang memiliki arti bahwa tidak ada program Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran yang berbeda/menyimpang dari Program RPJMD.

Gambar 2.65 Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025

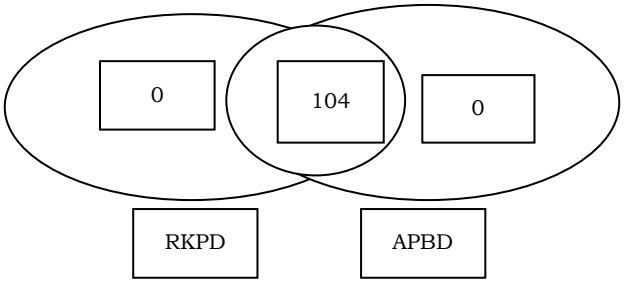


Sumber : Bappeda, 2025

B. Kesesuaian Jumlah Program Antara RKPD dan APBD Tahun 2025

Setelah dilakukan perbandingan antara P-RKPD dan P-APBD Tahun 2025 di dapat bahwa Jumlah Program dalam P-RKPD tahun 2025 sebanyak 104 program. Jumlah Program dalam P-APBD tahun 2025 sebanya 104 program. Tidak ada Program dalam P-APBD tahun 2025 yang berbeda dengan program P-RKPD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan Program P-APBD tahun 2025 dengan P-RKPD tahun 2025 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada Program P-APBD yang menyimpang dari Program P-RKPD.

Gambar 2.66 Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD dan APBD Tahun 2025

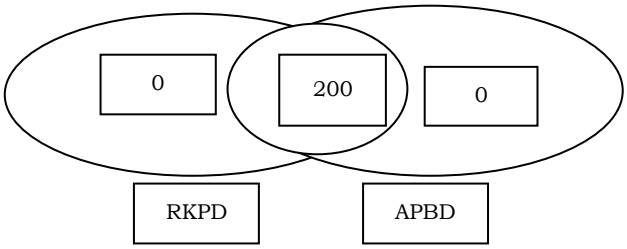


Sumber : Bappeda, 2025

C. Kesesuaian Jumlah Kegiatan Antara RKPD dan APBD Tahun 2025

Setelah dilakukan perbandingan antara Kegiatan P-RKPD dan Kegiatan P-APBD Tahun 2025 di dapat bahwa Jumlah Kegiatan dalam P-RKPD tahun 2025 sebanyak 200 Kegiatan. Jumlah Kegiataan dalam P-APBD tahun 2025 sebanyak 200 Kegiatan. Tidak ada Kegiatan dalam P-APBD tahun 2025 yang berbeda dengan Kegiatan P-RKPD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan Kegiatan P-APBD tahun 2025 dengan PRKPD tahun 2025 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada Kegiatan P-APBD yang menyimpang dari Kegiatan P-RKPD.

Gambar 2.67 Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025

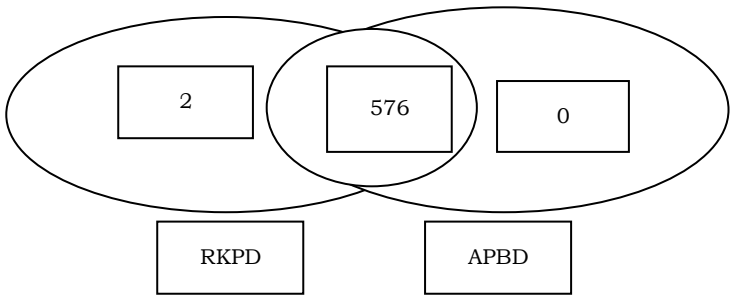


Sumber : Bappeda, 2025

D. Kesesuaian Jumlah Sub Kegiatan Antara RKPD dan APBD Tahun 2025

Setelah dilakukan perbandingan antara Sub Kegiatan P-RKPD dan Sub Kegiatan PAPBD Tahun 2025 di dapat bahwa Jumlah Sub Kegiatan dalam P-RKPD tahun 2025 sebanyak 576 Sub Kegiatan. Jumlah Sub Kegiataan dalam P-APBD tahun 2025 sebanyak 578 Sub Kegiatan, Sehingga terdapata 2 Sub Kegiatan dalam P-APBD tahun 2025 yang berbeda dengan Sub Kegiatan pada P-RKPD Tahun 2025. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan Sub Kegiatan P-APBD tahun 2025 dengan P-RKPD tahun 2025 adalah sebesar 99,65%.

Gambar 2.68 Irisan Kesesuaian Jumlah Sub Kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025



Sumber : Bappeda, 2025

Tingkat capaian kinerja program prioritas RKPD adalah rasio capaian kinerja dan anggaran program prioritas bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. kategori pencapaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.95 Kategori Pencapaian Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Tabel 2.96 Rekapitulasi Tabel T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**144**	**Bln**	**304.318.000**	**128**	**291.368.000**	**7**	**12.950.000**	**7**	**12.950.000**	**100,00**	**100,00**	**135**	**304.318.000**	**93,75**	**100,00**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72	Bln	110.000.000	65	105.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	100,00	100,00	70	110.000.000	97,22	100,00	
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72	Bln	194.318.000	63	186.368.000	2	7.950.000	2	7.950.000	100,00	100,00	65	194.318.000	90,28	100,00	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Tersediaan Jasa Administrasi Keuangan**	**504**	**Bln**	**6.451.897.850**	**420**	**4.785.570.599**	**84**	**332.807.000**	**84**	**327.780.751**	**100,00**	**99,35**	**504**	**5.113.351.350**	**100,00**	**89,63**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	1.01.01.2.06.01	Tersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	Bln	100.800.000	60	84.453.000	12	9.800.000	12	9.800.000	100,00	100,00	72	94.253.000	100,00	93,50	
	1.01.01.2.06.02	Tersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	Bln	5.311.895.500	60	3.980.151.000	12	68.909.000	12	68.909.000	100,00	100,00	72	4.049.060.000	100,00	76,23	
	1.01.01.2.06.03	Tersediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72	Bln	163.535.500	60	84.118.500	12	10.253.000	12	10.253.000	100,00	100,00	72	94.371.500	100,00	57,71	
	1.01.01.2.06.04	Tersediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	72	Bln	253.759.200	60	187.759.200	12	66.000.000	12	66.000.000	100,00	100,00	72	253.759.200	100,00	100,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Kantor yang Disediakan																
	1.01.01.2.06.05	Tersediaan barag cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	Bln	79.432.700	60	54.712.000	12	24.721.000	12	24.720.700	100,00	100,00	72	79.432.700	100,00	100,00	
	1.01.01.2.06.06	Tersediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Bln	215.500.000	60	109.100.000	12	111.400.000	12	106.400.000	100,00	95,51	72	215.500.000	100,00	100,00	
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Bln	326.974.950	60	285.276.899	12	41.724.000	12	41.698.051	100,00	99,94	72	326.974.950	100,00	100,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,67			96,88	94,82	
												Predikat kinerja	ST	ST			ST	ST	
	1.01.01.2.07	**Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**72**	**Bln**	**5.022.334.983**	**60**	**55.792.000**	**3**	**5.007.450.000**	**3**	**4.966.542.983**	**100,00**	99,18	**63**	**5.022.334.983**	**87,50**	**100,00**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72	Bln	5.022.334.983	60	55.792.000	3	5.007.450.000	3	4.966.542.983	100,00	99,18	63	5.022.334.983	**87,50**	**100,00**	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,18			87,50	100,00	
												Predikat kinerja	ST	ST			T	ST	
	1.01.01.2.08	**Tersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**144**	**Bln**	**4.377.782.817**	**120**	**2269497017**	**24**	**2.151.800.000**	**24**	**2.108.285.800**	**97,98**	107,00	**144**	**4.377.782.817**	**100,00**	**100,00**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	1.01.01.2.08.02	Tersediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Bln	128.482.817	60	72.597.017	12	67.800.000	12	55.885.800	100,00	82,43	72	128.482.817	100,00	100,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	1.01.01.2.08.04	Tersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Bln	4.249.300.000	60	2.196.900.000	12	2.084.000.000	12	2.052.400.000	100,00	98,48	72	4.249.300.000	100,00	100,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	90,46			100,00	100,00	
												Predikat kinerja	ST	ST			ST	ST	
	1.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**144**	**Bln**	**955.872.549**	**120**	**630344700**	**12**	**332.800.000**	**12**	**325.527.849**	**97,81**	63,00	**132**	**955.872.549**	**91,67**	**100,00**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	1.01.01.2.09.02	Tersediaan Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72	Bln	662.165.549	60	336.637.700	12	332.800.000	12	325.527.849	100,00	97,81	72	662.165.549	100,00	100,00	
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	Bln	293.707.000	60	293.707.000			0	-	0,00	0,00	60	293.707.000	83,33	100,00	
											0	-							
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	97,81			91,67	100,00	
												Predikat kinerja	ST	ST			ST	ST	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**####**	**-**	**386.436.591.543**	**11781**	**152.278.415.929**	**7460**	**102.520.977.201**	**5786**	**83.254.569.291**	**77,56**	81,21	**17567**	**235.532.985.220**	**95,31**	**60,95**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	1.01.02.2	**Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar**		**7628**		**242.946.682.215**	**2775**	**74.228.507.314**	**5698**	**61.101.277.140**	**3910**	**50.675.023.128**	**68,62**	82,94	**6685**	**124.903.530.442**	**87,64**	**51,41**	
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - SD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	60	lokal	16.987.071.000	45	527.181.360	0	-	0	-	0,00	0,00	45	527.181.360	75,00	3,10	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	240	Unit	21.249.616.200	140	2.233.387.425	29	3.962.326.540	29	3.898.045.465	100,00	98,38	169	6.131.432.890	70,42	28,85	
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - SD	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	96	lokal	18.608.585.000	40	782.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	40	782.000.000	41,67	4,20	
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	30	Lokal	333.758.000	30	330.473.950	0	-	0	-	0,00	0,00	30	330.473.950	100,00	99,02	
	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	55	Lokal	863.500.000	55	857.043.750	0	-	0	-	0,00	0,00	55	857.043.750	100,00	99,25	
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana, Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	730	Lokal	267.500.000	730	264.511.550	0	-	0	-	0,00	0,00	730	264.511.550	100,00	98,88	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah penyelenggaraan bagi Peserta Didik	360	Unit	2.000.000.000	60	1.001.946.045	300	474.155.000	300	465.077.206	100,00	98,09	360	1.467.023.251	100,00	73,35	
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	78	Unit	19.338.720.000	42	1.374.000.000	6	249.296.000	6	246.074.016	100,00	98,71	48	1.620.074.016	61,54	8,38	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Satuan Perlengkapan peserta didik	1461	Unit	4.500.000.000	730	1.896.130.000	731	2.551.500.000	731	2.534.906.560	100,00	99,35	1461	4.431.036.560	100,00	98,47	
	1.01.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	385	Peserta	15.966.273.700	335	5.687.692.000	50	148.860.000	50	144.200.000	100,00	96,87	385	5.831.892.000	100,00	36,53	
	1.01.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	3212	Peserta	27.354.441.365	1013	22.018.024.484	3981	15.746.658.000	2199	5.505.743.881	55,24	34,96	3212	27.523.768.365	100,00	100,62	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																
	1.01.02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah SD	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	370	Peserta	1.927.536.950	70	370.000.000	300	116.620.000	300	116.220.000	100,00	99,66	370	486.220.000	100,00	25,22	
	1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Danas BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1366	Sekolah	115.014.438.000	300	38.338.146.000	301	37.764.756.000	301	37.764.756.000	100,00	100,00	601	76.102.902.000	44,00	66,17	
	1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Pemabngunan Laboratorium Sekolah Dasar	314	Lokal	1.260.000.000	314	1.251.037.340	0	-	0	-			314	1.251.037.340	100,00	99,29	
	1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pendampingan Kemudahan akses ilmu pengetahuan tekniligi informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	335	peserta	5.687.692.000	0	-	150	42.838.800	150	39.071.500	100,00	91,21	335	5.687.692.000	100,00	100,00	
	1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Jumlah Dokumen koordinasi, Perencanaan Supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	335	dokumen	5.687.692.000	0	-	1	35.518.800	0	-			335	5.687.692.000	100,00	100,00	
	1.01.02.2.01.41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi	355	komunitas	5.687.692.000	0	-	1	8.748.000	1	8.748.000	100,00	100,00	335	5.687.692.000	94,37	100,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	95,52	91,72			87,47	67,14	
												Predikat kinerja	ST	ST			T	S	
	1.01.02.2	**Pengelolaan Pendidikan**		**7522**		**116.012.313.949**	**6538**	**62.169.977.900**	**956**	**25.602.634.683**	**956**	**24.939.375.392**	**100,00**	97,41	**7494**	**87.109.353.292**	**99,63**	**75,09**	**Dinas Pendidikan dan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		sekolah menengah Pertama																	**kebudayaan**
	1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah	60	lokal	16.987.071.000	32	2.264.773.700	0	-	0	-	0,00	0,00	32	2.264.773.700	53,33	13,33	
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Smp	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	23	Lokal	13.500.000.000	5	8.827.576.970	18	2.567.275.683	18	2.549.619.333	100,00	99,31	23	11.377.196.303	100,00	84,28	
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10	Lokal	3.214.867.500	10	3.207.273.020	0	-	0	-	0,00	0,00	10	3.207.273.020	100,00	99,76	
	1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Lokal	78.977.000	3	77.932.540	0	-	0	-	0,00	0,00	3	77.932.540	100,00	98,68	
	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Lokal	1.019.000.000	4	1.006.659.540	0	-	0	-	0,00	0,00	4	1.006.659.540	100,00	98,79	
	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Direhabilitasi Sedang/Berat	14	Lokal	1.710.780.720	4	584.305.410	10	1.131.250.000	10	1.126.475.310	100,00	99,58	14	1.710.780.720	100,00	100,00	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	374	Unit	3.574.858.900	24	1.842.474.600	350	2.195.500.000	350	1.732.384.300	100,00	78,91	374	3.574.858.900	100,00	100,00	
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	361	Unit	3.072.319.360	354	2.846.140.000	7	230.381.000	7	226.179.360	100,00	98,18	361	3.072.319.360	100,00	100,00	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	800	Unit	737.788.099	730	398.302.200	70	360.496.000	70	339.485.899	100,00	94,17	800	737.788.099	100,00	100,00	
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	135	orang	12.155.863.000	45	12.010.998.000	90	148.860.000	90	144.865.000	100,00	97,32	135	12.155.863.000	100,00	100,00	
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan TenagaKependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5393	Unit	14.233.963.590	5093	13.625.799.400	300	625.000.000	300	608.164.190	100,00	97,31	5393	14.233.963.590	100,00	100,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	1.01.02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah SMP	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	180	Unit	11.429.550.000	110	11.241.190.000	70	320.030.000	70	188.360.000	100,00	58,86	180	11.429.550.000	100,00	100,00	
	1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	219		53.820.900.000	150	17.940.300.000	69	18.023.842.000	69	18.023.842.000	100,00	100,00	219	35.964.142.000	100,00	66,82	
	1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Direhabilitasi Sedang /Berat	64	Lokal	462.000.000	64	458.564.390	0	-	0	-	0,00	0,00	64	458.564.390	100,00	99,26	
	1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	70	Lokal	389.500.000	70	389.143.800	0	-	0	-	0,00	0,00	70	389.143.800	100,00	99,91	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Lokal	771.000.000	4	765.078.640	0	-	0	-	0,00	0,00	4	765.078.640	100,00	99,23	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	91,51			97,08	91,25	
												Predikat kinerja	ST	ST			ST	ST	
	1.01.02.2.	**Pengelolaan Pendidikan anak usia Dini (PAUD)**		**1872**		**23.677.595.379**	**1071**	**14.160.047.415**	**793**	**13.912.081.378**	**793**	**9.421.004.464**	**100,00**	67,72	**1864**	**23.581.051.879**	**99,57**	**99,59**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		5		207.419.000	5	205.953.050	0	-	0	-	0,00	0,00	5	205.953.050	100,00	99,29	
	1.01.02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang,Berat Gedung,Ruang Kelas,Ruang Guru PAUD	Terpenuhinya Rehab gedung	50	Unit	536.000.000	40	429.033.675	2	10.422.878	2	10.422.825	100,00	100,00	42	439.456.500	84,00	81,99	
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terpenihi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	750	Unit	1.135.784.730	435	387.180.250	315	749.935.000	315	748.604.480	100,00	99,82	750	1.135.784.730	100,00	100,00	
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terpenihi Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	651	peserta	21.865.850.649	305	13.251.353.490	346	11.786.224.500	346	8.614.497.159	100,00	73,09	651	21.865.850.649	100,00	100,00	
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada	Terpenihi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	421	peserta	139.960.000	291	92.480.000	130	47.480.000	130	47.480.000	100,00	100,00	421	139.960.000	100,00	100,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Satuan Pendidik PAUD	Kependidikan Pada Satuan Pendidik PAUD																
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah satuan pendidikan PAUD yang mendapatkan pembinaan kelembagaan manajemen PAUD	346	lembaga	729.494.000	0	-	346	732.694.000	346	729.494.000	100,00	99,56	346	729.494.000	100,00	100,00	
	1.01.02.2.03.39	Bimbingan Teknis Pelatihan dan Atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Kepala Satuan Pendidikan yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pelatihan dan Atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	692	lembaga	1.170.000.000	0	-	346	585.325.000	346	580.525.000	100,00	99,18	346	580.525.000	50,00	49,62	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	95,28			90,57	90,13	
												Predikat kinerja	ST	ST			ST	ST	
	1.01.02.2	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**1410**		**3.800.000.000**	**1397**	**1.719.883.300**	**13**	**1.904.984.000**	**127**	**1.895.260.950**	**976,92**	**99,49**	**1524**	**3.615.144.250**	**108,09**	**95,14**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan													0	-	0,00	0,00	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1410		3.800.000.000	1397	1.719.883.300	13	1.904.984.000	13	1.895.260.950	100,00	99,49	1410	3.615.144.250	100,00	95,14	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	99,49			100,00	95,14	
												Predikat kinerja	ST	ST			ST	ST	
	1.01.05	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**		**80**		**600.000.000**	**40**	**140.000.000**	**9**	**10.000.000**	**9**	**10.000.000**	**100,00**	**100,00**	**49**	**150.000.000**	**61,25**	**25,00**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian	20	Dok	125.000.000	10	30.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	10	30.000.000	50,00	24,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																
	1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20	Dok	175.000.000	10	40.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	10	40.000.000	50,00	22,86	
	1.01.05.2.01.03	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20	Dok	125.000.000	10	30.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	100,00	100,00	15	35.000.000	75,00	28,00	
	1.01.05.2.01.04	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20	Dok	175.000.000	10	40.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	100,00	100,00	14	45.000.000	70,00	25,71	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			61,25	25,14	
												Predikat kinerja	ST	ST			R	SR	
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		**1200**		**461.990.000**	**415**	**198.790.000**	**30**	**118.400.000**	**30**	**263.200.000**	**100,00**	**222,30**	**445**	**461.990.000**	**37,08**	**100,00**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	2.22.02.2.02	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1200	sangrar	461.990.000	415	198.790.000	30	264.490.000	30	263.200.000	100,00	99,51	445	461.990.000	37,08	100,00	
													Rata-rata capaian kinerja (%)						
													Predikat kinerja						
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		**651**		**807.013.000**	**490**	**397.398.000**	**5**	**424.000.000**	**5**	**409.615.000**	**100,00**	**96,61**	**495**	**807.013.000**	**76,04**	**100,00**	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**
	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	600	peserta	101.760.000	440	68.088.000	3	42.900.000	3	33.672.000	100,00	78,49	443	101.760.000	73,83	100,00	
	2.22.05.2.02.0001	Perlindungan Cagar Budaya	Perlindungan Cagar Budaya	51		705.253.000	50	329.310.000	2	381.100.000	2	375.943.000	100,00	98,65	52	705.253.000	101,96	100,00	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	88,57			87,90	100,00	
													Predikat kinerja	ST	T			T	ST	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			110.911.184.201	91.678.471.674				
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)	99,59	95,75			85,22	87,60	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)	ST	ST			T	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**						**274.123.696,77**		**47.208.708**									
1.	**02.**	**Urusan Pemerintahan**						**274.123.696,77**		**47.208.708**									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Bidang Kesehatan																
1.	**02.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**Persen**	**238.575.842,58**	**451**	**95.560.409,03**	**96**	**1.007.586**	**96**	**889.231,216**	**100,00**	**88,25**	**547**	**96.449.640**	**547,00**	**40,43**	Dinkes
1.	**02.**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**persen**	**150.000,00**	**12**	**47.650,00**	**3**	**17.630**	**3**	**17.630,00**	**100,00**	**0,00**	**15**	**65.280**	**15,00**	**43,52**	
1.	02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Dinas Kesehatan	6	Dokumen	60.000	4	24.875	1	10.000	1	10.000	100,00	100,00	5	34.875	83,33	58,13	
1.	02.	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD Dinas Kesehatan	12	Dokumen	90.000	8	22.775	2	7.630	2	7.630	100,00	100,00	10	30.405	83,33	33,78	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			83,33	45,95	
												Predikat kinerja	ST	ST			T	SR	
1.	**02.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan**	**100**	**persen**	**1.605.840,00**	**40**	**766.850,00**	**24**	**307.854**	**24**	**300.039,000**	**100,00**	**97,46**	**64**	**1.066.889**	**64,00**	**66,44**	
1.	02.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan	72	bulan	1.515.840	36	736.850	12	273.560	12	265.881	100,00	97,19	48	1.002.731	66,67	66,15	
1.	02.	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	laporan	90.000	4	30.000	12	34.294	12	34.158	100,00	99,60	16	64.158	133,33	71,29	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	97,19			100,00	68,72	
												Predikat kinerja	ST	ST			ST	S	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	**02.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Umum pada Dinas Kesehatan**	**100**	**persen**	**1.254.000**	**236**	**546.722,60**	**51**	**189.456,300**	**51**	**140.574,300**	**100,00**	**74,20**	**287**	**687.297**	**287,00**	**54,81**	
1.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan	120.000	48	84.663	4	67.529	4	66.032	100,00	97,78	52	150.695	72,22	125,58	
1.	02.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	120.000	48	45.000	12	25.000	12	19.700	100,00	78,80	60	64.700	83,33	53,92	
1.	02.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian dan Buku Perundang-Undangan	72	bulan	216.000	48	57.084	12	27.000	12	26.300	100,00	97,41	60	83.384	83,33	38,60	
1.	02.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Rapat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	66	bulan	390.000	44	110.540	11	31.850	11	5.500	100,00	17,27	55	116.040	83,33	29,75	
1.	02.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Kepala Dinas,Sekretaris dan Sub Bagian Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan	408.000	48	249.436	12	38.077	12	23.043	100,00	60,52	60	272.478	83,33	66,78	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	70,35			81,11	62,93	
												Predikat kinerja	ST	S			T	R	
1	**02.**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang pada Dinas Kesehatan**	**100**	**persen**	**169.590**	**7**	**41.435**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**7**	**41.435**	**7,00**	**24,43**	
01.	02.	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Sofa Ruangan Kepala Dinas Kesehatan	5	unit	89.490	1	14.915	0	-	0	-	0,00	0,00	1	14.915	20,00	16,67	
01.	02.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Personal Computer (PC), peralatan Printer, AC, Wireless dan Awning parkir Dinas Kesehatan	30	unit	80.100	6	26.520	0	-	0	-	0,00	0,00	6	26.520	20,00	33,11	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			20,00	24,89	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan**	**100**	**persen**	**216.000**	**48**	**148.696**	**12**	**84.500**	**12**	**36.777,967**	**100,00**	**43,52**	**60**	**185.474**	**60,00**	**85,87**	
1.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya jasa listrik pada Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi	72	bulan	216.000	48	148.696	12	84.500	12	36.778	100,00	43,52	60	185.474	83,33	85,87	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	43,52			83,33	85,87	
												Predikat kinerja	ST	SR			T	T	
1.	**02.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah pada Dinas Kesehatan**	**100**	**persen**	**1.552.466**	**24**	**961.948**	**6**	**408.146**	**6**	**394.209,949**	**100,00**	**96,59**	**30**	**1.356.158**	**30,00**	**87,36**	
1.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas Kesehatan	30	unit	1.477.466	22	949.448	6	408.146	6	394.210	100,00	96,59	28	1.343.658	93,33	90,94	
1.	02.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Kesehatan	12	unit	75.000	2	12.500	0	-	0	-	0,00	0,00	2	12.500	16,67	16,67	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	96,59			55,00	53,81	
												Predikat kinerja	ST	ST			R	R	
1.	**02.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan**	**100**	**persen**	**233.627.947**	**84**	**93.047.107**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**84**	**93.047.107**	**84,00**	**39,83**	
	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (13 Puskesmas)	72	bulan	179.027.947	48	76.983.561	0	-	0	-	0,00	0,00	48	76.983.561	66,67	43,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.			Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan JKN di RSUD	72	bulan	54.600.000	36	16.063.546	0	-	0	-	0,00	0,00	36	16.063.546	50,00	29,42	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			58,33	36,21	
												Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
1.	02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	Persen	599.928.081	875313	148.918.610	666211	38.549.184	157673	34.160.049	23,67	88,61	1032986	183.078.659	1032985,50	30,52	
1.	**02.**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal**	**100**	**persen**	**297.230.923**	**642**	**54.937.940**	**156**	**8.319.768,400**	**156**	**8.208.569,31**	**100,00**	**98,66**	**798**	**63.146.509**	**798,00**	**21,24**	
1.	02.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) LB3 Cold Storage	2	Unit	100.000.000	1	373.975	0	-	0	-	0,00	0,00	1	373.975	50,00	0,37	
			Jumlah Pembangunan Rumah sakit tipe D beserta sarana dan prasarana pendukungnya	2	unit	100.000.000	0	-	0	-			0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.	02.	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	26	paket	37.843.299	8	2.894.888	0	-	0	-	0,00	0,00	8	2.894.888	30,77	7,65	
			Jumlah Peralatan Kantor rumah sakit	16	paket	1.274.162	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
			Jumlh Ketersediaan Tempat pembuangan sampah (TPS) LB3 Cold Storage, instalasi jaringan air PDAM,pembangunan ruang bedah sentral	5	Unit	9.654.500	1	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	-	20,00	0,00	
1.	02.	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pembangunan peningkatan puskesmas	2	unit	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			menjadi puskesmas rawat inap																
1.	02.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit (gedung rawat inap)	5	unit	4.450.000	2	149.336	0	-	0	-	0,00	0,00	2	149.336	40,00	3,36	
			Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit	21	kali	285.000	8	-	0	-	0	-	0,00	0,00	8	-	38,10	0,00	
			Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Sakit	72	bulan	145.000	24	9.568	0	-	0	-	0,00	0,00	24	9.568	33,33	6,60	
			Jumlah Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	48	kali	120.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
			Jumlah Pemeliharaan perlengkapan rumah sakit	72	bulan	775.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.	02.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pemeliharaan puskesmas	6	pkm	630.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
1.	02.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Pustu	4	pustu	4.000.000	3	2.448.497	2	497.396	2	480.144	100,00	96,53	5	2.928.641	125,00	73,22	
1.	02.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan pusling rawat inap dan rawat jalan	9	unit	2.854.135	3	150.840	0	-	0	-	0,00	0,00	3	150.840	33,33	5,28	
			Jumlah Pengadaaan Ambulance	6	unit	3.022.025	1	605.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1	605.000	16,67	20,02	
1.	02.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan alat kesehatan dipuskesmas dan jaringannya	40	paket	11.112.080	47	4.578.515	0	-	0	-	0,00	0,00	47	4.578.515	117,50	41,20	
			Jumlah monitoring evaluasi pertemuan aspak	6	kali	381.306	1	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	-	16,67	0,00	
1.	02.	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin dipuskesmas dan jaringannya	600	item	23.657.021	374	37.201.166	100	7.535.549	100	7.465.700	100,00	99,07	474	44.666.866	79,00	188,81	
			jumlah distribusi obat dan logistik	72	bulan	915.765	48	-	12		12	-	100,00	0,00	60	-	83,33	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas (DAK dan APBD)	180	item	6.939.986	120	6.474.726	30	147.745	30	139.345,000	100,00	0,00	150	6.614.071	83,33	95,30	
1.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan	45	pkm	210.544	1	51.428	12	139.078	12	123.381	100,00	88,71	13	174.809	0,00	83,03	
Rata-rata capaian kinerja (%)													83,33	71,08			54,79	37,49	
Predikat kinerja													SR	SR			R	SR	
1.	02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	persen	302.204.854	87462 6	93.692.196	66605 4	30.204.105,8	63053 3	25.930.970	94,67	85,85	150515 9	119.623.165	1505159,00	39,58	
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Pertemuan Peningkatan Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	6	kali	46.240	5	182.025	12	10.000	12	7.910	100,00	79,10	17	189.935	283,33	410,76	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran	6	RTK	13.100.645	7	2.094.207	1	83.300	1	32.394	100,00	38,89	8	2.126.601	133,33	16,23	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumah pertemuan Rapat perjanjian kasus kematian ibu dan anak	56	pkm	79.148	29	454.604	12	10.000	12	9.520	100,00	95,20	41	464.124	73,21	586,40	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Pertemuan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Bagi Kader Paud dan TK/RA	56	pkm	406.954	29	498.841	12	10.000	12	9.520	100,00	95,20	41	508.361	73,21	124,92	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah pelatihan pelayanan kesehatan korban kekerasan perempuan dan anak	144	orang	350.700	93	7.570	12	10.000	12	9.520	100,00	95,20	105	17.090	72,92	4,87	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah pertemuan dalam rangka validasi data pelayanan kesehatan	22	kali	56.100	20	505.150	12	10.000	12	10.000	100,00	100,00	32	515.150	145,45	918,27	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Kesehatan Pada Usia Produktif	(deteksi dini penyakit tidk menular) pada usia produktif berbasis web																
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Pertemuan peningkatan pengetahuan kader lansia diwilayah kabupaten pesawaran	6	Kali	75.000	16	26.225	12	26.800	12	21.600	100,00	80,60	28	47.825	466,67	63,77	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kasus Hipertensi di Masyarakat	88	pkm	340.400	57	47.150	12	10.000	12	10.000	100,00	100,00	69	57.150	78,41	16,79	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Miletus	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kasus Diabetes Mellitus (DM) di Masyarakat	88	pkm	306.100	57	715.380	12	10.000	12	10.000	100,00	100,00	69	725.380	78,41	236,97	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kasus dan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar terhadap ODGJ	88	pkm	164.000	57	99.710	12	10.000	12	10.000	100,00	100,00	69	109.710	78,41	66,90	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada orang dengan terduga TBC disemua layanan kesehatan	90	Pkm dan RS	1.030.000	47	880.222	12	10.000	12	9.600	100,00	96,00	59	889.822	65,56	86,39	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada orang dengan resiko Terinfeksi HIV disemua layanan kesehatan	75	pkm dan RS	200.000	45	157.500	12	10.000	12	9.300	100,00	93,00	57	166.800	76,00	83,40	
1.	02.	Penggelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	72	bulan	22.260.000	24	7.310.902	0	-	0	-			24	7.310.902	33,33	32,84	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Berpotensi Bencana																	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk di tangani	24	blita gizi buruk	149.890.000	20	76.681	0	-	0	-			20	76.681	83,33	0,05	
			Jumlah Balita Gizi kurang yang mendapat PMT	420	balita BGM	-	35	-		-	0	-			35	-	8,33	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT	300	ibu hamil KEK	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
			Jumah Peserta Pertemuan evaluasi spesifik stunting	45	pkm	94.230	15	29.610	0	-	0	-			15	29.610	33,33	0,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar	75	pkm	152.628	30	20.000	15	39.450	15	25.000	100,00	63,37	45	45.000	60,00	29,48	
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olahraga	75	pkm	152.628	15	-	0	-	0	-			15	-	20,00	0,00	
			Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah Puskesmas	75	pos	109.650	5	-	0	-	0	-			5	-	6,67	0,00	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Olahraga bagi anak SD	75	pkm	162.750	1	-	0	-	0	-			1	-	1,33	0,00	
			Jumlah Calon Jamaah Haji yang diperiksa kebugarannya	750	orang	152.628	150	-	0	-	0	-			150	-	20,00	0,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa ODF	70	desa	600.000	86	83.163	15	39.000	15	21.900,0	100,00	56,15	101	105.063	144,29	17,51	
			jumlah sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	180	lokasi	152.628	41	-	15	-	15	-	100,00		56	-	31,11		
			jumlah pembinaan fasyankes (Rs dan PKM) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	75	pkm dan RS	122.102	32	-	15	-	15	-	100,00		47	-	62,67		
			jumlah pembinaanTempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	90	lokasi	122.102	35	-	15	-	15	-	100,00		50	-	55,56		
			jumlah pengadaan reagen sanitarian kit	45	lokasi	122.102	9	299.385	0	-	0	-			9	299.385	20,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pelaksanaan Gerakan cegah stunting, Aktifkan posyandu, Jambore kader, Aksi bergizi, Bumil sehat,pemeriksaan kebugaran jasmani calon jamaah haji, dan senam germas bagi anak sekolah dan pegawai	18	keg	625.356	6	207.827	1	95.441	1	89.675	100,00	93,96	7	297.502	38,89	47,57	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisonal Lainnya	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	20	pkm	130.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan berbisa beracun, NTD's, dan penyakit menular lainnya	4	kali	160.000	2	146.100	1	139.800	1	119.548	100,00	85,51	3	265.648	75,00	166,03	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah pertemuan orientasi upaya promotif dan preventif keswa bagi petugas puskesmas	45	pkm	182.250	15	46.730	0	-	0	-			15	46.730	33,33	25,64	
1.	02.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan pada hari-hari besar dan Pelayanan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan, PMI	780	posko	1.074.050	272	662.750	0	-	0	-			272	662.750	34,87	61,71	
			Jumlah Peserta Sunatan Massal	570	anak	420.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
1.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah Larvaciding, Pemeriksaan darah Malaria, Pengangkatan lumut dan Penyemprotan Rumah	432	lokasi	1.175.000	144	132.000	0	-	0	-			144	132.000	33,33	11,23	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Jumlah Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk	1350	focus	1.000.000	40	-	1	314.381	1	301.131	100,00	95,79	41	301.131	3,04	30,11	
			Jumlah Pengadaan BMHP SHK dan BMHPdan pemeriksaan IVA dan pemeriksaan sampel SHK	9	item	1.769.889	5	270.633	0	-	0	-			5	270.633	55,56	15,29	
1.	02.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (dinkes dan pkm)	Jumlah pasien BPJS yang dilayani di RSUD , (57.479) jiwa	72	bulan	81.140.000	48	56.440.752	12	28.878.341	12	25.071.117	100,00	86,82	60	81.511.869	83,33	100,46	
			jumlah masyarakat yang ditanggung jamkesda	227500	jiwa	135.640.000	772898	-	496080	-	478792	-	96,52		1251690	-	550,19	0,00	
			jumlah bantuan jasa pelayanan kesehatan peserta tidak mampu yang tidak memiliki JKN	7500	jiwa	-	99662	-	169704	-	151458	-	89,25		251120	-	3348,27	0,00	
			jumlah bantuan transportasi dan akomodasi pendamping pasien	1950	jiwa	-	140	-	40	-	55	-	137,50		195	-	10,00	0,00	
1.	02.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan /Nasional	Jumlah Pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke Laboratorium rujukan tingkat provinsi (surveilans rutin, sentinel) Spek: Specimen penyakit potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging/penyakit yang tidak lazim, media lingkungan, sampel PD3I, sampel ILI SARI, SHK	3	keg	78.000	0	-	1	13.000	1	7.020	100,00	54,00	1	7.020	33,33	9,00	
1.	02.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rumah Sakit	72	kali	809.218	24	15.576.823	0	-	0	-			24	15.576.823	33,33	1924,92	
			Jumlah pencetakan administrasi dan surat menyurat, list pasien dan labeling rumah sakit	72	kali	537.500	24	-	0	-	0	-			24	-	33,33	0,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Jumlah pemeliharaan ambulance dan mobil jenazah	72	kali	596.750	24	-	0	-	0	-			24	-	33,33	0,00	
			Jumlah Obat-Obatan, BMHP dan Bahan Reagen Laboratorium & Radiologi, Obat Hemodialisa	72	kali	793.023.000	24	-	0	-	0	-			24	-	33,33	0,00	
			Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan Gizi Pasien Rawat Inap serta Petugas Shift Malam RSUD	72	kali	5.131.620	24	-	0	-	0	-			24	-	33,33	0,00	
			Terpenuhinya SDM dr umum, spesialis dan dokter gigi RSUD	72	kali	22.996.000	24	-	0	-	0	-			24	-	33,33	0,00	
			Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	72	kali	2.340.000	24	-	0	-	0	-			24	-	33,33	0,00	
			Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga medis RSUD	34	kali	327.000	5	-	0	-	0	-			5	-	14,71	0,00	
			Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga paramedis RSUD	30	kali	327.000	6	-	0	-	0	-			6	-	20,00	0,00	
			Jumlah survei kepuasan pasien RSUD	20	kali	368.000	4	-		-	0	-			4	-	20,00	0,00	
			Jumlah promosi kesehatan kepada pengunjung RSUD	120	kali	368.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
			Jumlah kegiatan PPI RSUD	5	paket	621.000	1	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Puskesmas	88	pkm	18.120.000	32	5.153.859	0	-	0	-			32	5.153.859	36,36	28,44	
1.	02.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pelaksnaan saksos PMI Kabupaten Pesawaran	3	pkt	949.020	2	200.000	2	229.897	1	134.200	50,00	58,37	3	334.200	100,00	35,22	
1.	02.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi di Kabupaten Pesawaran.	10	pkm	1.662.081.708	8	374.403	1	13.050	1	10.875	100,00	83,33	9	385.278	90,00	0,02	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Re-Akreditasi di Kabupaten Pesawaran.	33	pkm	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
1.	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (KIPI)	88	pkm	170.000	57	66.140	0	-	0	-			57	66.140	64,77	38,91	
1.	02.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kegiatan Pelaksananan Kewaspadaan Dini dan respon Wabah	88	pkm	370.000	42	120.791	0	-	0	-			42	120.791	47,73	32,65	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Pertemuan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penangulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia / schistosomiasis / Filariasis / cacingan)	88	pkm	416.837.000	46	98.972	0	-	0	-			46	98.972	52,27	0,02	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Kegiatan OJT Kader Pendamping ODHIV	88	pkm	40.000	45	25.400	0	-	0	-			45	25.400	51,14	63,50	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	JumlahPertemuan Pemetaan Daerah Reseptif Malaria	88	pkm	2.462.835	15	597.306	2	30.000	2	1.140	100,00	3,80	17	598.446	19,32	24,30	
			Jumlah Pengadaan bahan pemeriksaan malaria (34 paket), larvasida malaria (70 liter), dan RDT Malaria (50 kotak)	9	item	252.317	3	83.386	0	-	0	-			3	83.386	33,33	33,05	
1.	02.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2	dok	403.292	0	-	1	201.646	1	142.996	100,00	70,91	1	142.996	50,00	35,46	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	99,08	76,05			40,00	51,58	
												Predikat kinerja	ST	T			SR	R	
1.	**02.**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase cakupan pengelolaan data dan informasi kesehatan**	**100**	**Persen**	**427.204**	**8**	104.604	**1**	**25.310**	**1**	**20.510,00**	**100,00**	**0,00**	**9**	**125.114**	**9,00**	**29,29**	
1.	02.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten Pesawaran	6	Dokumen	302.600	6	98.083	1	25.310	1	20.510	100,00	81,04	7	118.593	116,67	39,19	
1.	02.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Sisten Informasi Puskesmas (SIP)	6	laporan	135.000	2	6.521	0	-	0	-	0,00	0,00	2	6.521	33,33	4,83	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	81,04			75,00	22,01	
												Predikat kinerja	SR	T			S	SR	
1.	**02.**	**Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase FKTP sesuai standar**	**100**	**Persen**	**65.100**	**37**	**183.870,00**	**0**	-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	**37**	**183.870**	**37,00**	**282,44**	
1.	02.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pembinaan n di fasyankes (RS, Puskesmas, Klinik, Bidan Praktek mandiri, Dokter Praktek Mandiri, apotek, dan Optik) di Kabupaten Pesawaran	76	Fasyankes	274.950	37	183.870,00	0	-	0	-	0,00	0,00	37	183.870	48,68	66,87	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			48,68	66,87	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	S	
1.	**02.**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk**	**9**	**Persen**	**37.487.411**	**85**	**23.303.933**	**16**	**5.888.348**	**16**	**4.927.200,00**	**100,00**	**83,68**	**101**	**28.231.133**	**1103,83**	**75,31**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	**02.**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga kesehatan Di wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga kesehatan teregistrasi**	**23**	**Persen**	**141.561**	**24**	**16.986,00**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**24**	**16.986**	**104,35**	**12,00**	
1.	02.	Pengendalian izin Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga kesehatan teregistrasi	140	orang	149.575	24	16.986	0	-	0	-	0,00	0,00	24	16.986	17,14	11,36	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			17,14	11,36	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayaagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Puskesmas dengan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan**	**100**	**Persen**	**37.193.600**	**53**	**22.561.800**	**12**	**5.077.000**	**12**	**4.235.000,00**	**100,00**	**83,42**	**65**	**26.796.800**	**65,00**	**72,05**	
1.	02.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM tenaga home care, tenaga kontrak RSUD, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan	72	bulan	37.053.600	48	22.518.000	12	5.077.000	12	4.235.000	100,00	83,42	60	26.753.000	83,33	72,20	
1.	02.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan	11	kec	132.750	5	43.800	0	-	0	-	0,00	0,00	5	43.800	45,45	32,99	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	41,71			64,39	52,60	
												Predikat kinerja	SR	SR			R	R	
1.	**02.**	**Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia**	**Persentase cakupan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan**	**100**	**Persen**	**152.250**	**8**	**725.147**	**4**	**811.348**	**4**	**692.200,00**	**0,00**	**0,00**	**12**	**1.417.347**	**12,00**	**930,93**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota.																
1.	02.	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota.	jumlah sosialisasi dan penilaian dupak pada jabatan fungsional kesehatan Keluaran	12	Semester	1.115.334	8	725.147	4	811.348	4	692.200	100,00	85,31	12	1.417.347	100,00	127,08	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	85,31			100,00	127,08	
												Predikat kinerja	ST	T			ST	ST	
1.	**02.**	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**Rasio Puskesmas,Poliklinik,pustu per satuan penduduk**	**7**	**Persen**	**1.223.410**	**241**	**1.738.535**	**4**	**363.071**	**4**	**342.434,91**	**100,00**	**94,32**	**245**	**2.080.970**	**3597,65**	**170,10**	
1.	**02.**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga**	**Persentase PIRT yang memiliki SPP-IRT**	**100**	**Persen**	**996.308**	**166**	**1.715.485**	**4**	**363.071**	**4**	**342.434,91**	**100,00**	**94,32**	**170**	**2.057.920**	**170,00**	**206,55**	
1.	02.	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi sarana PIRT dan pembinaan ke sarana	216	sarana	2.010.423	166	1.715.485	4	363.071	4	342.435	100,00	94,32	170	2.057.920	78,70	102,36	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		pengawasan sertifikat produksi pangan, industri rumah tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga																	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	94,32			78,70	102,36	
											Predikat kinerja		ST	ST			T	ST	
1.	**02.**	**Penerbitan Serifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase cakupan tempat pengelolaan makanan dan DAM yng memenuhi syarat kesehatan**	**100**	**Persen**	**125.000**	**75**	**23.050**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**75**	**23.050**	**75,00**	**18,44**	
1.	**02.**	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Jumlah rumh makan/restoran/depot air mnum yang memenuhi syarat kesehatan	390	Sarana	125.000	75	23.050	0	-	0	-	0,00	0,00	75	23.050	19,23	18,44	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00			19,23	18,44	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**9.752.216**	**59**	**4.602.210**	**12**	**1.400.518**	**12**	**1.384.572,80**	**100,00**	**98,86**	**71**	**5.986.783**	**80,38**	**61,39**	
1.	**02.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**960.000**	**8**	**208.313**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**8**	**208.313**	**8,00**	**21,70**	
1.	02.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lomba desa kesrak PKK-KB Kes, P3KSS Tingkat Provinsi dan Nasional	24	lomba	960.000	8	208.313	0	-	0	-	0,00	0,00	8	208.313	33,33	21,70	
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00			33,33	21,70	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Pelaksanaan Hidup Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota**	**Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat**	**100**	**Persen**	**595.000**	**3**	**184.098,00**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**184.098**	**3,00**	**30,94**	
1.	02.	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup	Jumlah pameran pembangunan tingkat Kabupaten Pesawaran	10	Kali	710.000	3	184.098,00	0	-	0	-	0,00	0,00	3	184.098	30,00	25,93	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		bersih dan sehat																
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00			30,00	25,93	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu**	**100**	**Persen**	**8.197.216**	**48**	**4.209.799**	**12**	**1.400.518**	**12**	**1.384.572,80**	**100,00**	**98,86**	**60**	**5.594.372**	**60,00**	**68,25**	
1.	02.	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	jumlah transport kader posyandu (2.220)	72	bulan	8.239.058	48	4.209.799	12	1.400.518	12	1.384.573	100,00	98,86	60	5.594.372	83,33	67,90	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	98,86			83,33	67,90	
Predikat kinerja													ST	ST			S	S	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**47.208.707,539**		**41.703.487,739**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													90,20	79,67			80,18	72,13	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													ST	T			S	R	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*		*7*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 12/7*100*		*14 = 6 + 12*		*15 = 14/5*100*		*16*
1.		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**						**88.545.947,198**		**38.555.464,694**		**35.001.785,388**				**123.547.732,586**			
1.	02.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**						**88.545.947,198**		**38.555.464,694**		**35.001.785,388**				**123.547.732,586**			
1.	02.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Persen**	**54.600.000,00**	**72**	**55.738.912,608**	**12**	**29.292.261,653**	**9**	**26.692.632,003**	**75,00**	**91,13**	**81**	**82.431.544,611**	**81**	**150,97**	RSUD
		Administrasi Keuangan Daerah	**Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada RSUD**	**100**	**persen**	**38.496.765,93**	**12**	**11.365.675,080**		**13.610.021,653**		**13.430.839,250**	**100,00**	**98,68**	**24**	**24.796.514**	**24,00**	**64,41**	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	bulan	38.496.765,93	12	11.365.675,080	12	13.610.021,653	12	13.430.839,250	100,00	98,68	24	24.796.514	66,67	64,41	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya jasa penunjang Urusan RSUD Pesawaran**	**100**	**persen**	**1.885.200,00**	**12**	**605.228,048**		**637.200**		**597.708,138**	**100,00**	**93,80**	**24**	**1.202.936**	**24,00**	**63,81**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	bulan	1.885.200,00	12	605.228,048	12	637.200	12	597.708,138	100,00	93,80	24	1.202.936	66,67	63,81	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah pada RSUD Pesawaran**	**100**	**persen**	**436.980,00**	**12**	**220.041,300**	**12**	**220.040**		**172.281,241**	**100,00**	**78,30**	**24**	**392.323**	**24,00**	**89,78**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peorangan RSUD atau kendaraan operasional RSUD yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24	bulan	436.980,00	12	220.041,300	12	220.040	12	172.281,241	100,00	78,30	24	392.323	100,00	89,78	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan**	**100**	**persen**	**54.600.000**	**36**	**43.547.968,180**	**12**	**14.825.000**	**12**	**12.491.803,374**	**100,00**	**58,41**	**48**	**56.039.772**	**48,00**	**102,64**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan JKN di RSUD	72	bulan	54.600.000	36	43.547.968,180	12	14.825.000	12	12.491.803,374	100,00	84,26	48	56.039.772	66,67	102,64	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	88,76		27.346.407,36	75,00	80,16	
												Predikat kinerja	ST	T			S	T	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin**	**100**	**Persen**	**599.928.081**	**284**	**30.180.034,590**	**67**	**6.268.703,041**	**66**	**5.463.653,385**	**98,51**	**87,16**	**350**	**35.643.688**	**350**	**5,94**	
1.	**02.**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal**	**100**	**persen**	**297.230.923**	**119**	**12.116.874,176**	**18**	**4.904.769,344**	**17**	**4.277.719,689**	**94,44**	**87,22**	**136**	**16.394.594**	**136**	**5,52**	
1.	02.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit (gedung rawat inap)	5	unit	4.450.000	5	392.235,176	-	55.459,940	-	51.330,000	-	92,55	5	443.565	100	9,97	
			Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit	21	kali	285.000	6	-	-	-	-	-	-	0,00	6	-	29	-	
			Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Sakit	72	bulan	145.000	48	-	12	-	12	-	100,00	0,00	60	-	83	-	
			Jumlah Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	48	kali	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
			Jumlah Pemeliharaan perlengkapan rumah sakit	72	bulan	775.000	36	-	5	-	5	-	100,00	0,00	41	-	57	-	
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	26	paket	37.843.299	16	11.724.639	-	74.900	-	-	-	0,00	16	11.724.639	62	30,98	
			Jumlah Peralatan Kantor rumah sakit	16	paket	1.274.162	6	-	-	-	-	-	-	0,00	6	-	38	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Jumlh Ketersediaan Tempat pembuangan sampah (TPS) LB3 Cold Storage, instalasi jaringan air PDAM,pembangunan ruang bedah sentral	5	Unit	9.654.500	2	-	1	-	-	-	-	0,00	2	-	40	-	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman difasilitas kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan, bahan habis pakai, vaksin dan makanan dan minuman pasien dan petugas shift malam di RSUD Pesawaran	24	bulan	5.980.511	12	1.897.560,200	12	4.774.409,404	9	4.226.389,689	75,00	88,52	21	6.123.950	88	102,40	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	91,67	90,54			61,92	35,84	
												Predikat kinerja	SR	SR			R	SR	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan**	**100**	**persen**	**302.204.854**	**165**	**18.063.160**	**49**	**1.363.933,697**	**49**	**1.185.933,70**	**100,00**	**86,95**	**214**	**19.249.094**	**214**	**6,37**	
1.	02.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah penyediaan Jasa Outsourching instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD	72	kali	30.204.854	48	18.063.160,414	12	1.363.933,697	12	1.185.933,696	100,00	86,95	60	19.249.094	83	63,73	
			Jumlah pencetakan administrasi dan surat menyurat, list pasien dan labeling rumah sakit	72	kali	-	48	-	12	-	12	-	100,00	0,00	60	-	83	-	
			Jumlah pemeliharaan ambulance dan mobil jenazah	72	kali	-	48	-	12	-	12	-	100,00	0,00	60	-	83	-	
			Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga medis RSUD	34	kali	-	10	-	6	-	6	-	100,00	0,00	16	-	47	-	
			Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga paramedis RSUD	30	kali	-	11	-	7	-	7	-	100,00	0,00	18	-	60	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	86,95			51,01	63,73	
												Predikat kinerja	ST	T			R	R	
1.	**02.**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan**	**100**	**persen**	**28.534.000**	**120**	**2.627.000**	**36**	**2.994.500**	**36**	**2.845.500,00**	**100,00**	**95,02**	**156**	**5.472.500**	**156**	**19,18**	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	**Persentase Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan RSUD Pesawaran**	**100**	**persen**	**28.534.000**	**120**	**2.627.000**	**36**	**2.994.500**	**36**	**2.845.500**	**300**	**95,02**	**156**	**5.472.500**	**267**	**23,80**	
1.	02.	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar	Terpenuhinya SDM dr umum, spesialis dan dokter gigi RSUD	72	kali	22.996.000	48	2.627.000	12	2.994.500	12	2.845.500,00	100,00	95,02	60	5.472.500	83	23,80	
			Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	72	kali	2.340.000	48	-	12	-	12	-	100,00	0,00	60	-	83	-	
			Jumlah penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Rumah Sakit	36	bulan	3.198.000	24	-	12	-	12	-	100,00	0,00	36	-	100	-	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	95,02			88,89	23,80	
												Predikat kinerja	ST	ST			T	SR	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**38.555.464,694**		**35.001.785,388**							
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)										97,92	90,32			80,34	81,22	
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)										ST	ST			T	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*		*7*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 12/7*100*		*14 = 6 + 12*		*15 = 14/5*100*		*16*
1.		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																	
1.	**02.**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																	
1.	**02.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik**	**100**	**Persen**	**10.369.152**	**36**	**4.591.824**	**12**	**1.778.577**	**12**	**1.467.526**	**100,00**	**82,51**	**48**	**6.059.349**	**48**	**58,44**	Puskesmas Kota Dalam
1.	**02.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Kalirejo**	**100**	**persen**	**10.369.152**	**36**	**4.591.824**	**12**	**1.778.577**	**12**	**1.467.526**	**100,00**	**82,51**	**48**	**6.059.349**	**48**	**58,44**	
1.	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	bulan	10.369.152	36	4.591.824	12	1.778.577	12	1.467.526	100,00	82,51	48	6.059.349	66,67	58,44	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	82,51			33,33	29,22	
												Predikat kinerja	ST	T			SR	SR	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk Yang mendapatkan jaminan Pelayanan Kesehatan**	**100**	**persen**	**3.158.080**	**41015**	**1.833.872**	**9077**	**742.345**	**2023**	**-**	**22,29**	**0,00**	**43038**	**1.833.872**	**43.038**	**58,07**	
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2788	orang	230.400	1196	71.550	697	57.600	685	57.600	98,28	100,00	1881	129.150	67,47	56,05	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	30116		165.600	13893	140.400	7529	41.400	7529	41.400	100,00	100,00	21422	181.800	71,13	109,78	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	272	orang	144.000	221	2.100	68	36.000	68	33.000	100,00	91,67	289	35.100	106,25	24,38	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Jiwa Berat Sesuai Standar																
1.	02.	Pengelolaan Orang Dengan Terduga Tubercolusis	Jumlah Orang Terduga menderita Tubercolusis yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2476	orang	56.700	1155	28.350	619	5.625	619	5.625	100,00	100,00	1774	33.975	71,65	59,92	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	Dokumen	640.040	17	501.215	12	160.010	6	158.836	50,00	99,27	23	660.051	47,92	103,13	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	Dokumen	25.200	18	14.785	12	6.300	6	6.300	50,00	100,00	24	21.085	50,00	83,67	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	Dokumen	37.820	14	22.350	12	9.455	6	8.059	50,00	85,24	20	30.409	41,67	80,40	
1.	02.	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	272	orang	31.200	0	-	68	7.800	68	7.800	100,00	100,00	68	7.800	25,00	25,00	
1.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	48	Dokumen	621.280	12	228.150	12	155.320	12	148.475	100,00	95,59	24	376.625	50,00	60,62	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	Dokumen	916.940	23	407.972	12	229.235	12	163.506	100,00	71,33	35	571.478	72,92	62,32	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	48	Dokumen	15.000	12	12.900	12	3.750	12	3.450	100,00	92,00	24	16.350	50,00	109,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	48	Dokumen	158.700	12	79.350	12	1.050	12	1.050	100,00	100,00	24	80.400	50,00	50,66	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Kesehatan Ibu dan Anak																
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	48	Dokumen	115.200			12	28.800	12	28.800	100,00	100,00	12	28.800	25,00	25,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	88,33	72,65			56,08	65,38	
												Predikat kinerja	T	S			R	S	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**48**	**Persen**	**81.460**	**12**	**5.440**	**12**	**20.365**	**12**		**100,00**	**0,00**	**24**	**5.440**	**50**	**6,68**	
1.	**02.**	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat diPosyandu**	**48**	**Persen**	**81.460**	**12**	5.440	**12**	**20.365**	**12**		**100,00**	**0,00**	**24**	**5.440**	**50**	**6,68**	
1.	02.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengenbangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengenbangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**48**	Dokumen	81.460	12	5.440	12	20.365	12	20.305,00	100,00	99,71	24	25.745	50	31,60	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,71			50,00	31,60	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**2.541.287**		**1.467.525,569**							
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											96,11	84,96			82,13	87,10	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											ST	T			T	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*		*7*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 12/7*100*		*14 = 6 + 12*		*15 = 14/5*100*		*16*
1.		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
1	02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
1	02.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	15.231.548,98	36	2.015.404,15	12	1.889.988,535	12	1.816.177,41	100,00	96,09	48	3.831.582	48,00	25,16	Puskesmas Roworejo
1	02.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPTD Puskesmas Roworejo	100	persen	15.231.549	36	2.015.404	12	1.889.988,535	12	1.816.177,41	100,00	96,09	48	3.831.582	48,00	25,16	
1	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	72	bulan	15.231.548,981	36	2.015.404,150	12	1.889.989	12	1.816.177	100,00	96,09	48	3.831.582	66,67	25,16	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	96,09			33,33	12,58	
													ST	ST			SR	SR	
1.	02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	Persen	45.360	2	11.164	0	731.782	0	618.323,467	0,00	84,50	2	629.487	2,00	1.387,76	
1.	02.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan	100	persen	45.360	2	11.164	0	-	0	-	0,00	0,00	2	11.164	2,00	24,61	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**kesehatan secara optimal**															
1.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	kali	45.360	2	11.164	0	-	0	-	0,00	0,00	2	11.164	50,00	24,61	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			50,00	24,61	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan**	**100**	**persen**	**9.091.183**	**78599**	**1.907.313**	**43227**	**731.782**	**36881**	**618.323,47**	**85,32**	**84,50**	**115.480**	**2.525.636**	**115480**	**27,78**	
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2592	orang	293.000	1806	149.550	647	132.000	452	108.000	69,86	81,82	2.258	257.550	87,11	87,90	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2576	orang	95.800	1664	347.150	644	-	351	-	54,50	0,00	2.015	347.150	78,22	362,37	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								0	-	#DIV/0!	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	12376	orang	715.700	9789	215.850	2459	-	2327	-	94,63	0,00	12.116	215.850	97,90	30,16	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Kesehatan Sesuai Standar															
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21856	orang	273.000	17782	109.800	5549	17.100	5549	17.100	100,00	100,00	23.331	126.900	106,75	46,48	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86500	orang	117.540	30683	40.665	27694	-	22329	-	80,63	0,00	53.012	40.665	61,29	34,60	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9900	orang	128.000	12313	40.000	4422	-	4293	-	97,08	0,00	16.606	40.000	167,74	31,25	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1020	orang	39.900	852	9.975	277	-	259	-	93,50	0,00	1.111	9.975	108,92	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	228	orang	22.800	402	7.200	63	18.900	63	18.900	100,00	0,00	465	26.100	203,95	114,47	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2312	orang	17.640	1327	28.140	567	11.550	576	11.550	101,59	100,00	1.903	39.690	82,31	225,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3168	orang	18.000	1479	5.400	648	-	516	-	79,63	0,00	1.995	5.400	62,97	30,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	Dokumen	1.232.744	6	399.296	12	139.296	12	118.689	100,00	85,21	18	517.985	37,50	42,02	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24	Dokumen	1.350	0	-	12	675	12	675	100,00	100,00	12	675	50,00	50,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	Dokumen	54.000	6	28.560	12	12.600	12	12.600	100,00	100,00	18	41.160	37,50	76,22	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	Dokumen	28.800	6	24.180	12	5.025	12	4.950	100,00	98,51	18	29.130	37,50	101,15	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalaj Kesehatan Jiwa (ODMK) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	126	Orang	18.900	0	-	78	9.450	7	9.450	8,97	100,00	7	9.450	5,56	50,00	
1.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48	Dokumen	382.275	12	155.145	12	140.355	12	138.850	100,00	98,93	24	293.995	50,00	76,91	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	Dokumen	5.540.614	24	313.942	12	236.303	12	171.256	100,00	72,47	36	485.198	50,00	8,76	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	428	orang	111.120	448	32.460	107	-	87	-	81,31	0,00	535	32.460	125,00	29,21	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	48	Dokumen	111.120	24	4.500	12	2.870	12	2.650	100,00	92,33	36	7.150	75,00	6,43	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		kesehatan Reproduksi	pelayanan kesehatan Reproduksi															
1.	02.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	48	Dokumen	111.120	24	82.500	12	685	12	450	100,00	65,69	36	82.950	75,00	74,65	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayananan Kelanjutusiaan	24	Dokumen	3.600	0	-	12	1.800	12	1.800	100,00	100,00	12	1.800	50,00	50,00	
1.	02.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	48	Dokumen	111.120	12	-	0	-	6	-	0,00	0,00	18	-	37,50	-	
1.	02.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48	Dokumen	111.120	12	31.865	12	3.173	12	3.053	100,00	96,22	24	34.918	50,00	31,42	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	87,64	76,24			81,61	71,70	
												Predikat kinerja	T	T			T	S	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**9.200**	**1**	**-**	**1**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**-**	**1,14**	**-**	
1.	**02.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di Kabupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**9.200**	**1**	**-**	**1**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**-**	**1,00**	**-**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	9.200	1	-	1	-			0,00	0,00	1	-	25,00	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00			25,00	-	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**2.621.770,535**						**2.434.500,876**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													93,82	86,17			79,56	83,99	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													ST	T			T	T	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																	
1.	**02.**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																	
1.	**02.**	**01.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik**	**100**	**Persen**	**13.129.370**	**24**	**1.128.755**	**12**	**2.127.983,663**	**9**	**1.256.219,503**	**75,00**	**59,03**	**33**	**2.384.975**	**33**	**18,17**	Puskesmas Padang Cermin
1.	**02.**	**01.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Padang Cermin**	**100**	**persen**	**13.129.370**	**24**	**1.128.755**	**12**	**2.127.983,663**	**9**	**1.256.219,503**	**75,00**	**59,03**	**33**	**2.384.975**	**33**	**18,17**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	bulan	13.129.370	24	1.128.755	12	2.127.984	12	1.256.219,503	100,00	59,03	36	2.384.975	50,00	18,17	
				Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	59,03			25,00	9,08	
				Predikat kinerja										ST	R			SR	SR	
1.	**02.**	**02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin**	**100**	**Persen**	**55.440**	**1**	**13.636**	**1**	**1.032.345**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**13.636**	**1**	**24,60**	
1.	**02.**	**02.**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal**	**100**	**persen**	**55.440**	**1**	**13.636**	**1**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**13.636**	**1**	**24,60**	
1.	02.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	kali	55.440	1	13.636	1	-	0	-	-	-	1	13.636	25,00	24,60	
				Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-			25,00	24,60	
				Predikat kinerja										SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan**	**100**	**persen**	**7.377.995**	**29409**	**1.071.774**	**47796**	**1.032.345**	**46821**	**741.297,345**	**97,96**	**71,81**	**76230**	**1.813.071**	**76.230**	**24,57**	
1.	02.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	2492	orang	417.720	416	104.430	623	100.800	409	43.200	65,65	42,86	825	147.630	33,11	35,34	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				Kesehatan Sesuai Standar																
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2380	orang	119.280	372	29.670	595	1.730	353	-	59,33	-	725	29.670	30,46	24,87	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2272	orang	14.400	372	3.600	568	-	354	-	62,32	-	726	3.600	31,95	25,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8256	orang	716.740	1892	179.185	2064	-	2064	-	100,00	-	3956	179.185	47,92	25,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24248	orang	216.000	6093	5.400	6062	21.300	6062	51.300	100,00	240,85	12155	56.700	50,13	26,25	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99948	orang	180.000	9986	45.000	24987	-	24987	-	100,00	-	34973	45.000	34,99	25,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17176	orang	432.000	2684	108.000	4294	-	4294	1.500	100,00	-	6978	109.500	40,63	25,35	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi	Jumlah Penduduk Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27116	orang	-	6161	-	6779	-	6779	-	100,00	-	12940	-	47,72	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1320	orang	-	250	-	330	-	330	-	100,00	-	580	-	43,94	-	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	272	orang	56.400	51	14.100	68	-	68	30.600	100,00	-	119	44.700	43,75	79,26	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2364	orang	73.800	462	18.450	591	21.300	591	12.300	100,00	57,75	1053	30.750	44,54	41,67	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2920	orang	54.000	607	-	730	18.000	470	-	64,38	-	1077	-	36,88	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen	1.307.480	1	299.809	1	266.440	1	153.308	100,00	57,54	2	453.117	16,67	34,66	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen	60.000	1	15.000	1	7.650	1	5.700	100,00	74,51	2	20.700	16,67	34,50	
1.	02.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	Dokumen	39.525	1	-	1	13.175	1	21.658	100,00	164,39	2	21.658	50,00	54,80	
1.	02.	02.	Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	4	Dokumen	460.203	0	-	1	153.401	1	125.892	100,00	82,07	1	125.892	25,00	27,36	
1.	02.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	Dokumen	3.147.247	12	235.290	12	271.349	9	290.740	75,00	107,15	21	526.030	43,75	16,71	
1.	02.	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	umlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	Laporan	14.400	1	3.600	1	3.600	0	1.500	-	41,67	1	5.100	25,00	35,42	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	352	orang	68.800	47	10.240	88	6.000	47	3.600	53,41	60,00	94	13.840	26,70	20,12	
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	4	Laporan	5.400	0	-	1	1.800	0	-	-	-	0	-	-	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak	4	Laporan	437.400	0	-	1	145.800	1	75.750	100,00	51,95	1	75.750	25,00	17,32	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	92,95	70,56			40,58	31,25	
													Predikat kinerja	ST	S			SR	SR	
1.	**02.**	**05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**144.792**	**1**	**-**	**1**	**48.264**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	
1.	**02.**	**05.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**144.792**	**1**	**-**	**1**	**48.264**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	
1.	02.	05.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	144.792	1	-	1	48.264	0	-	-	-	1	-	25,00	-	
1.	**02.**	**05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**144.792**	**0**	**-**	**1**	**48.264**	**1**	**-**	**100,00**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			BIDANG KESEHATAN																	
1.	**02.**	**05.**	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu**	**100**	**Persen**	**144.792**	**0**	**-**	**1**	**48.264**	**1**	**-**	**100,00**	**-**	**1**	**-**	**1**	**-**	
1.	02.	05.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	Dokumen	144.792	0	-	1	48.264	1	48.264	100,00	100,00	1	48.264	25,00	33,33	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			25,00	-	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**3.256.856,663**		**1.256.220**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														97,65	76,53			89,00	84,38	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														**ST**	**T**			**T**	**T**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	**02.**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																	
1.	**02.**	**01.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik**	**100**	**Persen**	**16.350.135,30**	**24**	**4.225.157,000**	**12**	**2.798.424,226**	**9**	**2.070.249**	**75,00**	**73,98**	**33**	**6.295.406**	**33**	**38,50**	Puskesmas Hanura
1.	**02.**	**01.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Gedong Tataan**	**100**	**persen**	**16.350.135**	**24**	**4.225.157,000**	**12**	**2.798.424,226**	**12**	**2.070.249**	**100,00**	**73,98**	**36**	**6.295.406**	**36**	**38,50**	
1.	02.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	bulan	16.350.135,300	24	4.225.157,000	12	2.798.424,226	12	2.070.249	100,00	73,98	36	6.295.406	50,00	38,50	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	73,98			50,00	38,50	
													Predikat kinerja	ST	S			SR	SR	
1.	**02.**	**02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin**	**100**	**Persen**	**12.000**	**1**	**-**	**1**	**766.685**	**0**	**183683,00**	**0,00**	**23,96**	**1**	**183.683**	**1**	**1530,69**	
1.	**02.**	**02.**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal**	**100**	**persen**	**12.000**	**1**	**-**	**1**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**-**	**1**	**-**	
1.	02.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	4	kali	12.000	1		1		0	-	0,00	0,00	1	-	25,00	-	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				pelayanan kesehatan	Terpelihara Sesuai Standar																
															Rata-rata capaian kinerja (%)				25,00	-	
															Predikat kinerja						
1.	**02.**	**02.**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan**	**100**	**persen**	**5.024.852**	**36932**	**917.922,000**	**49237**	**766.685**	**42779**	**685.752,430**	**86,88**	**89,44**	**79711**	**1.603.674**	**79.711**	**31,91**	
1.	02.	02.		Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3032	orang	92.400	576	22.500	644	126.880	460	103.950	71,43	81,93	1036	126.450	34,17	136,85	
1.	02.	02.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2776	orang	32.800	535	13.650	640	-	471	-	73,59	0,00	1006	13.650	36,24	41,62	
1.	02.	02.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2776	orang	120.000	529	-	584	-	467	-	79,97	0,00	996	-	35,88	-	
1.	02.	02.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14280	orang	353.200	2967	-	2489		2119	-	85,13	0,00	5086	-	35,62	-	
1.	02.	02.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia sekolah dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30244	orang	222.600	4047	59.325	4047	48.150	4115	46.950	101,68	97,51	8162	106.275	26,99	47,74	
1.	02.	02.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	102088	orang	233.500	18051	-	27511	-	22899	-	83,24	0,00	40950	-	40,11	-	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				Kesehatan Sesuai Standar																
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14476	orang	144.000	3675	-	3825	-	3825	-	100,00	0,00	7500	-	51,81	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi	Jumlah Penduduk Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38370	orang	90.000	5288	-	7674	-	6970	-	90,83	0,00	12258	-	31,95	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1168	orang	88.800	272	-	275	-	275	-	100,00	0,00	547	-	46,83	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	244	orang	6.000	63	-	63	7.200	63	7.200	100,00	0,00	126	7.200	51,64	120,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3648	orang	19.800	331	31.050	572	8.250	572	7.200	100,00	87,27	903	38.250	24,75	193,18	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3316	orang	3.600	428	1.500	750		420	-	56,00	0,00	848	1.500	25,57	41,67	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	Dokumen	1.369.720	12	234.290	12	139.665	12	178.145	100,00	127,55	24	412.435	50,00	30,11	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	48	Dokumen	5.400	0	-	1	900	1	600	100,00	66,67	1	600	2,08	11,11	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Kerja dan Olahraga	esehatan Kerja dan Olahraga																
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen	57.900	3	7.650	3	14.850	4	14.850	133,33	100,00	7	22.500	58,33	38,86	
1.	02.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	Dokumen	280.200	12	46.700	12	54.320	12	54.300	100,00	99,96	24	101.000	50,00	36,05	
1.	02.	02.	'Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4	Dokumen	18.000	0	-	2	4.500	4	4.500	200,00	100,00	4	4.500	100,00	25,00	
1.	02.	02.	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan kesehatan penyakit menular dan penyakit tidak menular	48	Dokumen	963.060	12	160.510,000	12	98.550	12	98.400	100,00	99,85	24	258.910	50,00	26,88	
1.	02.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	Dokumen	889.672	12	228.247,000	12	247.310	6	154.658	50,00	62,54	18	382.905	37,50	43,04	
1.	02.	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	umlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	Laporan	13.200	1	300	1		1		100,00	0,00	2	300	50,00	2,27	
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	432	orang	21.000	118	1.500	108		71		65,74	0,00	189	1.500	43,75	7,14	
2.	02.	42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang daerah endemis malaria yang mendapatkan	147.960	0rang	21.600	36.990	5.400	36.990	5.400	18.494	3.600	50,00	66,67	55.484	9.000	37,50	41,67	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				pelayanan kesehatan sesuai standar																
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	4	Laporan	334.800	1	55.800	4	7.500	2	4.200	50,00	56,00	3	60.000	75	17,92	
1.	02.	02.	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak	4	Laporan	297.000	1	49.500	4	1.410	4	900	100,00	63,83	5	50.400	125,00	16,97	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah orang dengan pengelolaan Kelanjut Usiaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12	laporan	90.000	-	-	12	1.800	9	12.600	75,00	700,00	9	12.600	75,00	14,00	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	94,41	75,41			49,82	37,17	
													Predikat kinerja	ST	T			SR	SR	
1.	**02.**	**05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**26.500**	**1**	**24.185**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**24.185**	**1**	**91,26**	
1.	**02.**	**05.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**26.500**	**1**	24.185	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**24.185**	**1**	**91,26**	
1.	02.	05.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	26.500	1	24.185	0	-	0	-	0,00	0,00	1	24.185	25,00	91,26	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	05.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**26.500**	**0**	**22.455**	**1**	**7.840**	**1**	**-**	**100,00**	**0,00**	**1**	**22.455**	**1**	**84,74**	
1.	02.	05.	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu**	**100**	**Persen**	**26.500**	**0**	22.455	**1**	**7.840**	**1**	**-**	**100,00**	**0,00**	**1**	**22.455**	**1**	**84,74**	
1.	02.	05.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	Dokumen	26.500	0	22.455	1	7.840	1	-	100,00	0,00	1	22.455	25,00	84,74	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	0,00			25,00	91,26	
Predikat kinerja														ST	SR			SR	ST	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**3.572.949,226**		**2.253.932**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														98,14	37,35			88,31	82,68	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														**ST**	**SR**			**T**	**T**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
1.	02.		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
1.	02.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100	Persen	17.211.451,84	24	1.704.226,426	12	2.482.029,609	6	696.979	50,00	28,08	30	2.401.206	30,00	13,95	Puskesmas Gedung Tataan
1.	02.	01.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Gedong Tataan	100	persen	17.211.452	24	1.704.226,426	12	2.482.029,609	6	696.979	50,00	28,08	30	2.401.206	30,00	13,95	
1.	02.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	bulan	17.211.451,836	24	1.704.226,426	12	2.482.029,609	12	1.440.316	100,00	58,03	36	3.144.542	50,00	18,27	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	58,03			50,00	18,27	
													Predikat kinerja	ST	R			SR	SR	
1.	02.	02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	Persen	55.240	1	-	1	883.970	0	285.452,660	-	32,29	1	285.453	1,00	516,75	
1.	02.	02.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	persen	55.240	1	-	1	-	0	-	-	-	1	-	1,00	0,00	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	
1.	02.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	kali	55.240	1		1		0	-	-	-	1	-	25,00	0,00	
														Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			25,00	0,00	
														Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan**	**100**	**persen**	**7.368.432**	**61774**	**962.886,563**	**85288**	**883.970**	**73477**	**843.114,205**	**86,15**	**95,38**	135251	**1.806.001**	**135251**	**24,51**	
1.	02.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4320	orang	236.400	774	59.400	1080	150.480	983	122.760	91,02	81,58	1757	182.160	40,67	77,06	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4296	orang	87.540	691	10.320	1074		902	-	83,99	-	1593	10.320	37,08	11,79	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3916	orang	13.200	694	-	979		902	-	92,13	-	1596	-	40,76	0,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16392	orang	639.640	3743	-	4098		4050	-	98,83	-	7793	-	47,54	0,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang	35728	orang	351.900	8838	42.750	8932	44.400	9284	44.400	103,94	100,00	18122	87.150	50,72	24,77	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184620	orang	143.920	30782	-	46155	-	34807	-	75,41	-	65589	-	35,53	0,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28688	orang	224.400	5593	-	7172	-	6734	1.800	93,89	-	12327	1.800	42,97	0,80	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi	Jumlah Penduduk Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51512	orang	-	8395	-	12878	-	13355	-	103,70	-	21750	-	42,22	0,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1848	orang	18.060	456	-	462	-	487	-	105,41	-	943	-	51,03	0,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	420	orang	58.800	104	-	105	6.750	106	6.750	100,95	-	210	6.750	50,00	11,48	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3844	orang	86.080	858	31.050	961	19.200	961	19.200	100,00	100,00	1819	50.250	47,32	58,38	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	4780	orang	96.000	718	5.400	1195		854	65.820	71,46	-	1572	71.220	32,89	74,19	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			dengan risiko terinfeksi HIV	Pelayanan Sesuai Standar																
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen	1.718.820	1	266.662	1	172.865	1	171.440	100,00	99,18	2	438.102	16,67	25,49	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan esehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen	1.718.820			1	1.500	1	1.500	100,00	100,00	1	1.500	8,33	0,09	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen	73.200	1	10.950	1	12.600	1	12.600	100,00	100,00	2	23.550	16,67	32,17	
1.	02.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	Dokumen	88.560	1	27.655	1	22.140	1	20.363	100,00	91,97	2	48.018	50,00	54,22	
1.	02.	02.	'Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4	Dokumen	39.600			1	9.900	1	9.900	100,00	100,00	1	9.900	25,00	25,00	
1.	02.	02.	Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	4	Dokumen	610.640	1	168.452,500	1	152.660	1	152.165	100,00	99,68	2	320.618	50,00	52,51	
1.	02.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	Dokumen	1.128.652	12	210.197,063	12	284.005	1	211.257	8,33	74	13	421.454	27,08	37,34	
1.	02.	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	umlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	Laporan	13.200	1	1.650	1		1	-	100,00	-	2	1.650	50,00	12,50	
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan	Jumlah orang dengan	712	orang	21.000	111	5.250	178		44	-	24,72	-	155	5.250	21,77	25,00	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			kesehatan orang dengan tuberkulosis	Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1																
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	4	Laporan	19.400	1	15.000	1	4.850	1	4.450	100,00	91,75	2	19.450	50,00	100,26	
1.	02.	02.	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak	4	Laporan	178.060	1	108.150	1	820	1	635	100,00	77,41	2	108.785	50,00	61,09	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah orang dengan pengelolaan Kelanjut Usiaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4	Laporan	178.060	0	-	1	1.800	1	1.800	100,00	100,00	1	1.800	25,00	1,01	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		89,74	93,53			37,89	28,55	
													Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**26.500**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	
1.	**02.**	**05.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**26.500**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	
1.	02.	05.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi,	4	Dokumen	26.500				-	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																
1.	**02.**	**05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**29.745**	**0**	**22.455**	**1**	**7.840**	**1**	**7.290,00**	**100,00**	**92,98**	**1**	**29.745**	**1,14**	**100,00**	
1.	**02.**	**05.**	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu**	**100**	**Persen**	**29.745**	**0**	22.455	**1**	**7.840**	**1**	**7.290,00**	**100,00**	**92,98**	**1**	**29.745**	**1,00**	**100,00**	
1.	02.	05.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	Dokumen	29.745	0	22.455	1	7.840	1	7.290	100,00	92,98	1	29.745	25,00	100,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	92,98			25,00	100,00	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	ST	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**3.373.839,609**		**982.432**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														96,58	81,52			90,32	89,45	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														**ST**	**T**			**ST**	**T**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
1.	02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
1.	02.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	13.669.490,26	48	3.558.494,66	12	2.429.866,08	12	1.383.183,00	100,00	56,92	60	4.941.678	60,00	36,15	Puskesmas Kedondong
1.	02.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	persen	13.669.490	48	3.558.495	12	2.429.866,08	6	717.852,00	50,00	29,54	54	4.276.347	54,00	31,28	
1.	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Maja	72	bulan	13.669.490,3	48	3.558.495	12	2.429.866	12	1.383.183	100,00	56,92	60	4.941.678	83,33	36,15	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	56,92			41,67	18,08	
													ST	R			SR	SR	
1.	02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	persen	12.081.566	19855	1.760.204	9389	856.320	9849	724.897,00	104,90	84,65	29704	2.485.101	29704	20,57	
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4206	orang	449.280	3881	140.725	701	112.320	746	95.040	106,42	84,62	4627	235.765	110,01	52,48	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	47406	orang	278.400	14305	137.700	7901	69.600	7901	57.600	100,00	82,76	22206	195.300	46,84	70,15	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	414	orang	75.960	62	16.800	69	18.990	90	18.900	100,00	99,53	152	35.700	36,71	47,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3732	orang	150.000	1223	84.750	622	37.500	1016	37.500	100,00	100,00	2239	122.250	30,49	81,50	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	72	Dokumen	718.860	48	532.690	12	179.715	12	160.268	100,00	89,18	60	692.958	83,33	96,40	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja & Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja & Olahraga	72	Dokumen	3.300	48	17.500	12	825	12	825	100,00	100,00	60	18.325	83,33	555,30	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	72	Dokumen	59.440	48	9.450	12	14.860	12	14.850	100,00	99,93	60	24.300	83,33	40,88	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	Dokumen	59.400	48	22.590	12	14.850	12	9.900	100,00	66,67	60	32.490	83,33	54,70	
1.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72	Dokumen	541.360	48	228.600	12	135.340	12	132.950	100,00	98,23	60	361.550	83,33	66,79	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	Dokumen	9.616.756	48	449.889	12	268.130	12	193.064,000	100,00	72,00	60	642.953	83,33	6,69	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	72	Dokumen	18.900	48	9.600	12	2.390	12	2.200	100,00	92,05	60	11.800	83,33	62,43	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	72	Dokumen	109.910	48	109.910	12	1.800	12	1.800	100,00	100,00	60	111.710	83,33	101,64	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	92,80	83,46			68,52	95,07	
												Predikat kinerja	ST	T			S	ST	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**100**	**Persen**	**71.880**	**12**	**22.405**	**12**	**17.970**	**12**	**16.600,00**	**100,00**	**92,38**	**24**	**39.005**	**24,00**	**54,26**	
1.	**02.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**71.880**	**12**	22.405	**12**	**17.970**	**12**	**16.600,00**	**100,00**	**92,38**	**24**	**39.005**	**24,00**	**54,26**	
1.	02.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	72	Dokumen	71.880	12	22.405	12	17.970	12	16.600	100,00	92,38	24	39.005	33,33	54,26	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	92,38			33,33	54,26	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**3.304.156,080**		**2.124.680,000**								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													97,60	77,59			83,60	81,22	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													**ST**	**T**			**T**	**T**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Dengan Pelayanan Dasar																	
1.	**02.**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																	
1.	**02.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**Persen**	**8.136.612,63**	**36**	**4.285.664,95**	**12**	**1.374.028**	**3**	**241.071,19**	**25,00**	**17,54**	**39**	**4.526.736**	**39,00**	**55,63**	Puskesmas Trimulyo
1.	**02.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan**	**100**	**persen**	**8.136.613**	**36**	**4.285.665**	**12**	**1.374.028,1**	**3**	**241.071,19**	**25,00**	**17,54**	**39**	**4.526.736**	**39,00**	**55,63**	
1.	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas Trimulyo	72	bulan	8.136.613	36	4.285.665	12	1.374.028	12	1.002.946	100,00	72,99	48	5.288.611	66,67	65,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	72,99			66,67	65,00	
												Predikat kinerja	ST	S			S	R	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan**	**100**	**persen**	**3.034.000**	**13180**	**1.530.496**	**6370**	**760.300**	**5166**	**496.190,28**	**81,10**	**65,26**	**18346**	**2.026.686**	**18346,00**	**66,80**	
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2104	orang	376.320	951	141.495	526	94.080	340	51.840	64,64	55,10	1291	193.335	61,36	51,38	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20712	orang	196.800	11133	143.100	5178	49.200	4268	36.900	82,43	75,00	15401	180.000	74,36	91,46	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	204	orang	72.000	151	13.800	51	18.000	44	12.600	21,57	70,00	195	26.400	95,59	36,67	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		dengan Gangguan Jiwa Berat	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1872	orang	27.600	846	53.440	468	6.900	402	4.350	85,90	63,04	1248	57.790	66,67	209,38	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	Dokumen	620.800	21	426.769	12	155.200	11	141.126	91,67	90,93	32	567.895	66,67	91,48	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48	Dokumen	3.000	0	-	12	750	12	750	100,00	100,00	12	750	25,00	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	Dokumen	50.400	5	7.650	12	12.600	9	10.200	75,00	80,95	14	17.850	29,17	35,42	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	Dokumen	20.400	13	26.450	12	5.100	12	3.450	100,00	67,65	25	29.900	52,08	146,57	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	204	orang	74.400	0	-	51	18.600	44	10.500	86,27	56,45	44	10.500	21,57	14,11	
1.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	48	Dokumen	615.040	12	206.430	12	153.760	12	104.400	100,00	67,90	24	310.830	50,00	50,54	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	Dokumen	969.480	24	431.562	12	242.370	12	118.544	100,00	48,91	36	550.106	75,00	56,74	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	48	Dokumen	5.360	12	3.600	12	1.340	0	1.080	0,00	80,60	12	4.680	25,00	87,31	
1.	02.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak	48	Dokumen	2.400	12	76.200	12	600	0	450	0,00	75,00	12	76.650	25,00	3193,75	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	48	Dokumen	7.200	0	-	12	1.800	9	900	75,00	50,00	9	900	18,75	12,50	
Rata-rata capaian kinerja (%)													89,32	89,23			44,10	57,77	
Predikat kinerja													T	T			SR	R	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**97.960**	**12**	**48.980**	**12**	**9.560**	**4**	**-**	**33,33**	**0,00**	**16**	**48.980**	**18,18**	**50,00**	
1.	**02.**	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu**	**100**	**Persen**	**97.960**	**12**	48.980	**12**	**9.560**	**4**	**8.440,00**	**33,33**	**88,28**	**16**	**57.420**	**16,00**	**58,62**	
1.	02.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48	Dokumen	97.960	12	48.980	12	9.560	4	8.440	**33,33**	**88,28**	16	57.420	33,33	58,62	
Rata-rata capaian kinerja (%)													**33,33**	**88,28**			33,33	58,62	
Predikat kinerja													SR	T			SR	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**2.143.888,065**		**737.261,475**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													**74,22**	**83,50**			89,00	81,44	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													**S**	**T**			**T**	**T**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
1.	02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
1.	02.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	10.848.104,00	36	7.269.304,00	12	2.191.480	12	1.999.274,00	100,00	91,23	48	9.268.578	48,00	85,44	Puskesmas Bunut
1.	02.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	persen	10.848.104	36	7.269.304	12	2.191.480,0	12	1.999.274,00	100,00	91,23	48	9.268.578	48,00	85,44	
1.	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Bunut	72	bulan	10.848.104	36	7.269.304	12	2.191.480	12	1.999.274	100,00	91,23	48	9.268.578	66,67	85,44	
													9	100,00	91,23			33,33	42,72	
														ST	ST			SR	SR	
1.	02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	Persen	53.840	1	13.460	1	848.769	0	-	0,00	0,00	1	13.460	1,00	25,00	
1.	02.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	persen	53.840	1	13.460	1	-	0	-	0,00	0,00	1	13.460	1,00	25,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	kali	53.840	1	13.460	1	-	0	-	0,00	0,00	1	13.460	25,00	25,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			25,00	25,00	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan**	**100**	**persen**	**15.927.694**	**19394**	**3.722.918**	**11020**	**848.769**	**9788**	**712.551,03**	**88,82**	**83,95**	**29182**	**4.435.469**	29182	**27,85**	
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3280	orang	257.400	824	113.850	725	138.600	335	105.606	46,21	76,19	1159	219.456	35,34	85,26	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3128	orang	200.200	837	57.700	722	-	371	-	51,39		1208	57.700	38,62	28,82	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Kesehatan pada usia pendidikan dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34044	orang	271.200	15295	146.400	7775	35.400	7779	35.400	100,05	100,00	23074	181.800	67,78	67,04	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	280	orang	132.000	140	-	71	33.000	71	33.000	100,00	100,00					
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2740	orang	24.360	970	34.740	644	17.850	644	17.850	100,00	100,00	1614	52.590	58,91	215,89	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan	3736	orang	6.000	882	8.100	868	-	465	-	53,57		1347	8.100	36,05	135,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		dengan risiko terinfeksi HIV	Pelayanan Sesuai Standar															
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	72	Dokumen	1.614.000	36	572.194	12	160.940	12	136.580	100,00	84,86	48	708.774	66,67	43,91	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	72	Dokumen	1.800	0	-	12	450	12	450	100,00	100,00					
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	72	Dokumen	5.880.000	48	23.100	12	12.600	12	12.600	100,00	100,00	60	35.700	83,33	0,61	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	Dokumen	9.000	48	18.240	12	1.950	12	1.950	100,00	100,00	60	20.190	83,33	224,33	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	72	Dokumen	39.600	0	-	12	9.900	12	9.900	100,00	100,00					
1.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72	Dokumen	629.400	48	470.400	12	169.070	12	166.805	100,00	98,66	60	637.205	83,33	101,24	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	Dokumen	6.711.954	48	2.238.699	12	263.715	12	192.410	100,00	72,96	60	2.431.109	83,33	36,22	
1.	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Dokumen Investigasi KIPI	72	Dokumen	1.800	48	900	12	-	12	-	100,00		60	900	83,33	50,00	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	436	orang	148.980	170	38.595	119	-	27	-	22,69		197	38.595	45,18	25,91	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	104196	Orang	133.560	31290	38.940	30963	2.720	30963	2.720	100,00	100,00	62253	41.660	59,75	31,19	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen pelayanan Kesehatan Ibu dan anak dipuskesmas	72	Dokumen	90.450	48	180.900	12	774	12	774	100,00	100,00	60	181.674	83,33	200,86	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan kelanjut usiaan Sesuai Standar	17496	0rang	7.200	0	-	4374	1.800	4374	1.800	100,00	100,00	4374	1.800	25,00	25,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	84,93	68,85	0	-	45,01	59,66	
												Predikat kinerja	T	S			SR	R	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**72**	**Dokumen**	**71.754**	**14**	**52.190**	**12**	**20.859**	**12**	**19.564,00**	**100,00**	**93,79**	**26**	**71.754**	**36,11**	**100,00**	
1.	**02.**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan di posyandu**	**72**	**Dokumen**	**71.754**	**14**	52.190	**12**	**20.859**	**12**	**19.564,00**	**100,00**	**93,79**	**26**	**71.754**	**36,11**	**100,00**	
1.	02.	Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen bimbingan dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	72	Dokumen	71.754	14	52.190	12	20.859	12	19.564	100,00	93,79	26	71.754	36,11	100,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	93,79			36,11	100,00	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	ST	
										3.061.108,000		**2.018.838,000**							
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	71,23	63,47			81,25	77,11	
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**S**	**R**			**T**	**T**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
1.	02.		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
1.	02.	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	13.669.490,26	48	2.887.500,37	12	886.264,97	6	367.019,25	50,00	41,41	54	3.254.520	54,00	23,81	Puskesmas Maja
1.	02.	01.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	persen	13.669.490	48	2.887.500	12	886.264,97	6	367.019,25	50,00	41,41	54	3.254.520	54,00	23,81	
1.	02.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Maja	72	bulan	13.669.490,260	48	2.887.500,365	12	886.264,965	12	769.263	100,00	86,80	60	3.656.764	83,33	26,75	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	86,80			41,67	13,38	
														ST	T			SR	SR	
1.	02.	02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	persen	6.858.758	45598	2.652.994,740	37948	720.165	31560	522.796,145	83,17	72,59	77158	3.175.791	77.158	46,30	
1.	02.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1132	orang	220.000	599	79.050	283	163.200	258	122.350	91,17	74,97	857	201.400	75,71	91,55	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1124	orang	3.000	543	25.140	281	-	237	-	84,34		780	25.140	69,40	838,00	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1084	orang	3.600	543	1.050	271	-	237	-	87,45		780	1.050	71,96	29,17	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4292	orang	514.000	3112	108.600	1073	-	821	-	76,51		3933	108.600	91,64	21,13	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Sesuai Standar	9460	orang	144.000	6008	46.800	2365	14.250	2236	12.000	94,55	84,21	8244	58.800	87,15	40,83	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48320	orang	169.800	13694	6.398	12080	-	12080	-	100,00		25774	6.398	53,34	3,77	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6448	orang	527.520	2726	64.620	1612	-	1520	-	94,29		4246	64.620	65,85	12,25	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13480	orang	37.000	4512	9.250	3370		3370	-	100,00		7882	9.250	58,47	25,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes	Jumlah Penderita Diabetes yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	484	orang	38.220	226	9.555	121		121	-	100,00		347	9.555	71,69	25,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112	orang	31.200	52	3.000	28	4.500	28	4.500	100,00	100,00	80	7.500	71,43	24,04	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga Menderita	1004	orang	75.000	408	16.800	251	6.900	240	6.000	95,62	86,96	648	22.800	64,54	30,40	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1432	orang	49.500	161	4.500	358	-	192	-	53,63		353	4.500	24,65	9,09	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	Dokumen	1.262.920	24	455.368	12	134.285	12	83.504	100,00	62,18	36	538.872	75,00	42,67	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	Dokumen	77.520	24	17.500	12	3.750	12	3.750	100,00	100,00	36	21.250	75,00	27,41	
1.	02.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	Dokumen	134.240	24	34.960	12	14.550	12	13.200	100,00	90,72	36	48.160	75,00	35,88	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	160	orang	6.688	0	-	40	1.505	40	1.500	100,00	99,67	40	1.500	25,00	22,43	
1.	02.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	48	Dokumen	441.000	12	167.175	12	141.355	12	122.225	100,00	86,47	24	289.400	50,00	65,62	
1.	02.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	Dokumen	2.583.250	36	1.464.064	12	228.680	12	146.577,645	100,00	64,10	48	1.610.641	100,00	62,35	
1.	02.	02.	'Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3	Laporan	18.000	1	4.500	0	-	0	-			1	4.500	33,33	25,00	
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan	188	orang	19.200	89	3.600	47	-	37	-	78,72		126	3.600	67,02	18,75	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			dengan tuberkulosis	pelayanan kesehatan sesuai standar 1																
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan malaria	62688	orang	100.800	12780	9.600	15672	2.700	10050	2.700	64,13	100,00	22830	12.300	36,42	12,20	
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	48	Dokumen	18.900	12	28.500	12	2.390	12	2.390	100,00	100,00	24	30.890	50,00	163,44	
1.	02.	02.	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	48	Dokumen	343.800	12	92.965	12	300	12	300	100,00	100,00	24	93.265	50,00	27,13	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	48	Dokumen	39.600	0	-	12	1.800	9	1.800	75,00	100,00	9	1.800	18,75	4,55	
													Rata-rata capaian kinerja (%)			91,10	89,23			60,89	69,07	
													Predikat kinerja			ST	T			R	S	
1.	**02.**	**05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**100**	**Persen**	**41.476**	**12**	**19.530**	**12**	**10.369**	**12**	**10.369,00**	**100,00**	**100,00**	**24**	**29.899**	**24,00**	**72,09**	
1.	**02.**	**05.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**41.476**	**12**	19.530	**12**	**10.369**	**12**	**10.369,00**	**100,00**	**100,00**	**24**	**29.899**	**24,00**	**72,09**	
1.	02.	05.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	72	Dokumen	41.476	12	19.530	12	10.369	12	10.369	100,00	100,00	24	29.899	33,33	72,09	
													Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00	100,00			33,33	72,09	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
											Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		1.616.798,965						900.184,396							
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)									97,03	92,01			87,55	83,90	
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)									**ST**	**ST**			**T**	**T**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 202		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1			**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																
1.	**02.**		**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																
1.	**02.**	**01.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik**	**100**	**Persen**	**12.975.236.452**	**24**	**1.896.725,60**	**12**	**2.238.551**	**12**	**1.713.439,87**	**100,00**	**76,54**	**36**	**3.610.165**	**36**	**0,03**	Puskesmas Kalirejo
1.	**02.**	**01.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Kalirejo**	**100**	**persen**	**12.975.236.452**	**24**	**1.896.726**	**12**	**2.238.551,5**	**12**	**1.713.439,87**	**100,00**	**76,54**	**36**	**3.610.165**	**36**	**0,03**	
1.	02.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	bulan	12.975.236.452	24	1.896.726	12	2.238.551	12	**1.713.439,87**	100,00	76,54	36	3.610.165	50,00	0,03	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	76,54			50,00	0,03	
														ST	T			SR	SR	
1.	**02.**	**02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan**	**100**	**Persen**	**46.280**	**1**	**11.469**	**0**	**2.809.740**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**11.469**	**1**	**24,78**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 202		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rujukan pasien masyarakat miskin**																
1.	**02.**	**02.**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal**	**100**	**persen**	**46.280**	**1**	**11.469**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**11.469**	**1**	**24,78**	
1.	02.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	kali	46.280	1	11.469	0	-	0	-	-	-	1	11.469	25,00	24,78	
														Rata-rata capaian kinerja (%)						
														Predikat kinerja						
1.	02.	02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang mendapatkan jaminan Pelayanan Kesehatan	100	persen	8.960.034	50695	764.169	47514	2.809.740	44100	1.848.484,67	92,81	65,79	94795	2.612.654	94.795	29,16	
1.	02.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3004	orang	245.400	748	38.500	756	129.360	524	101.310	69,31	78,32	1272	139.810	42,34	56,97	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2868	orang	111.800	707	-	668	-	623	-	-	-		-	-	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2732	orang	9.000	1161	-	638	-	621	-	-	-	1782	-	65,21	-	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 202		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17456	orang	500.240	7213	-	2536	-	2586	-	-	-	9799	-	56,14	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	31192	orang	283.200	1127	59.100	7851	44.400	4961	44.400	63,19	100,00	6088	103.500	19,52	36,55	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89212	orang	220.080	30817	-	28564	-	28591	-	-	-	59408	-	66,59	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10212	orang	149.600	6840	-	4561	-	4479	-	-	-	11319	-	110,84	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1056	orang	16.100	264	-	286	-	477	-	-	-	741	-	70,17	-	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	240	orang	58.200	60	-	65	9.900	65	9.900	-	100,00	125	9.900	52,08	17,01	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1736	orang	25.080	629	19.950	594	6.225	570	6.225	95,96	100,00	1199	26.175	69,07	104,37	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3244	orang	21.600	832	7.425	801	-	0	-	-	-	832	7.425	25,65	34,38	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 202		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16	Dokumen	1.296.540	24	175.696	24	137.060	24	136.540	100,00	99,62	48	312.236	300,00	24,08	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen	37.500	12	-	12	375		375	-	100,00	12	375			
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen	90.000	3	6.450	12	12.600	12	12.600	100,00	100,00	15	19.050	125,00	21,17	
1.	02.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	Dokumen	15.000	12	21.000	12	25.660	12	23.560	100,00	91,82	24	44.560	600,00	297,07	
1.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	umlah Orang dengan Masalah Kejiwaan(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50	Dokumen	3.900	50	-	50	3.900	50	3.900	100,00	100,00	100				
1	02.	02	Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24	Dokumen		24	161.493	24	128.645	24	126.400	100,00	98,25					
1.	02.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	Dokumen	5.739.754	24	175.581	24	2.307.000	24	1.653.443	100,00	71,67	48	1.829.024	100,00	31,87	
1.	02	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	Dokumen	-	9	900	0	-	0	-	-	-					
1.	02.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	412	orang	135.240	115	1.500	0	-	0	-	-	-	52	33.210	12,62	24,56	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 202		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah orang dengan kesehatan reproduksi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12	Dokumen	-	12	7.425	12	2.420	12	1.890	100,00	78,10					
1.	02	02.	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah orang dengan kesehatan ibu dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12	Dokumen	-	12	89.150	12	395	12	300	100,00	75,95					
1.	03	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12	Dokumen	1.800	0	-	12	1.800	12	1.800	100,00	100,00					
													Rata-rata capaian kinerja (%)	94,04	92,41			100,90	38,12	
													Predikat kinerja	ST	ST			ST	SR	
1.	**02.**	**05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**49.280**	**1**	**12.320**	**0**	**13.842**	**0**	**12.967,00**	**100,00**	**93,68**	**1**	**25.287**	**1**	**51,31**	
1.	**02.**	**05.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di Kabupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**49.280**	**1**	12.320	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**12.320**	**1**	**25,00**	
1.	02.	05.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	49.280	1	12.320	0	-	0	-	-	-	1	12.320	25,00	25,00	
1.	02	05.	Pengelolaan bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	Dokumen		1	30.250	1	13.842	1	12.967	100,00	93,68	2	43.217			

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 202		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	mendapatkan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM																
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	93,68			25,00	25,00	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.062.133,50		**1.726.406,874**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														98,01	87,54			83,41	82,33	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														**ST**	**T**			**T**	**T**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																	
1.	**02.**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																	
1.	**02.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik**	**100**	**Persen**	**7.160.598,47**	**36**	**5.409.108,168**	**12**	**1.756.419,618**	**3**	**319.174**	**25,00**	**18,17**	**39**	**5.728.282**	**39,00**	**80,00**	Puskesmas Tegineneng
1.	**02.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Tegineneng**	**100**	**persen**	**7.160.598**	**36**	**5.409.108,168**	**12**	**1.756.419,618**	**3**	**319.174**	**25,00**	**18,17**	**39**	**5.728.282**	**39,00**	**80,00**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	bulan	7.160.598,472	36	5.409.108,168	12	1756419,62	12	1.399.606	100,00	79,69	48	6.808.715	66,67	95,09	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	79,69			33,33	47,54	
												Predikat kinerja	ST	T			SR	SR	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin**	**100**	**Persen**	**55.240**	**1**	**13.140**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**13.140**	**1,00**	**23,79**	
1.	**02.**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal**	**100**	**persen**	**55.240**	**1**	**13.140**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**13.140**	**1,00**	**23,79**	
1.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	kali	55.240	1	13.140	0	-	0	-	0,00	0,00	1	13.140	25,00	23,79	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			25,00	23,79	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan**	**100**	**persen**	**5.931.231**	**70500**	**3.786.177**	**43864**	**735.305**	**40946**	**646.985,000**	**93,35**	**87,99**	**111446**	**4.433.162**	**111446**	**74,74**	
1.	02.	Pengelola Pelayanan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	2388	orang	482.680	1041	169.870	530	86.400	403	72.000	76,04	83,33	1444	241.870	60,47	50,11	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar															
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2280	orang	87.540	991	35.840	526	-	319	-	60,65	0,00	1310	35.840	57,46	40,94	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2172	orang	13.200	966	2.400	505	-	317	-	62,77	0,00	1283	2.400	59,07	18,18	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13880	orang	639.640	5439	119.775	2463	-	1947	-	79,05	0,00	7386	119.775	53,21	18,73	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia sekolah dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24800	orang	351.900	9964	125.625	5656	36.000	3982	36.000	70,40	100,00	13946	161.625	56,23	45,93	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70588	orang	143.920	33459	46.780	22665	-	22665	-	100,00	0,00	56124	46.780	79,51	32,50	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26944	orang	224.400	9874	20.400	3492	-	3492	-	100,00	0,00	13366	20.400	49,61	9,09	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi	Jumlah Penduduk Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25296	orang	-	5721	-	6324	-	6324	-	100,00	0,00	12045	-	47,62	0,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	908	orang	-	224	-	227	-	227	-	100,00	0,00	451	-	49,67	0,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	188	orang	58.800	98	27.900	52	10.200	52	10.200	100,00	0,00	150	38.100	79,79	64,80	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Gangguan Jiwa Berat	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1348	orang	21.520	697	49.140	472	16.200	472	16.200	100,00	100,00	1169	65.340	86,72	303,62	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5332	orang	178.060	1800	5.400	766	-	619	-	80,81	0,00	2419	5.400	45,37	3,03	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	Dokumen	1.282.520	24	527.682	12	171.550	12	170.030	100,00	99,11	36	697.712	75,00	54,40	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga	2	Dokumen	11.250	0	-	1	5.625	1		100,00		1				
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	Dokumen	73.200	24	15.750	12	12.600	12	12.600	100,00	100,00	36	28.350	75,00	38,73	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	Dokumen	74.370	24	24.715	12	13.425	12	13.425	100,00	100,00	36	38.140	75,00	51,28	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	3300	orang	17.400	0	-	2	8.700	2				2				
1.	02.	Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	36	Dokumen	503.589	12	163.679	12	129.835	12	127.100	100,00	97,89	24	290.779	66,67	57,74	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	Dokumen	1.276.732	36	2.315.701	12	235.650	12	175.105	100,00	74,31	48	2.490.806	66,67	195,09	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	Laporan	13.200	2	3.300	0	-	0	-	0,00	0,00	2	3.300	50,00	25,00	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	320	orang	178.060	80	33.670	87	-	55	-	63,22	0,00	135	33.670	42,19	18,91	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	36	Laporan	14.850	12	4.950	12	6.120	12	5.625	100,00	91,91	24	10.575	66,67	71,21	
1.	02.	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak	36	Laporan	280.800	12	93.600	12	1.200	12	1.200	100,00	100,00	24	94.800	66,67	33,76	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	24	Dokumen	3.600	0	-	12	1.800	12	1.800	100,00	100,00	12	1.800	50,00	50,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	90,59	95,14			79,92	69,59	
												Predikat Kinerja	ST	ST			T	S	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**104.940**	**4**	**26.235**	**4**	**7.405**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**26.235**	**4,55**	**25,00**	
1.	**02.**	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu**	**100**	**Persen**	**104.940**	**4**	26.235	**4**	**7.405**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4**	**26.235**	**4,00**	**25,00**	
1.	02.	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi	16	Dokumen	104.940	4	26.235	4	7.405	4	6.860	100,00	92,64	8	33.095	50,00	31,54	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	92,64			50,00	31,54	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.499.129,618		966.159							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													96,86	89,16			84,91	81,78	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													ST	T			T	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
1.	02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
1.	02.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100	Persen	7.370.679,10	36	4.297.265,735	12	1.284.639,525	12	1.283.296	100,00	99,90	48	5.580.561,426	48,00	75,71	Puskesmas Pedada

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	**02.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Pedada**	**100**	**persen**	**7.370.679,10**	**36**	**4.297.265,735**	**12**	**1.284.639,525**	**12**	**1.283.296**	**100,00**	**99,90**	**48**	**5.580.561,426**	**48,00**	**75,71**	
1.	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	bulan	7.370.679,10	36	4.297.265,735	12	1.284.639,525	12	1.283.296	100,00	99,90	48	5.580.561,426	66,67	75,71	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,90			33,33	37,86	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin**	**100**	**Persen**	**52.160**	**1**	**12.845**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**12.845**	**1,00**	**24,63**	
1.	**02.**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal**	**100**	**persen**	**52.160**	**1**	**12.845**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**12.845**	**1,00**	**24,63**	
1.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	kali	52.160	1	12.845	0	-	0	-	-	-	1	12.845	25,00	24,63	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			25,00	24,63	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan**	**100**	**persen**	**6.766.888**	**50301**	**3.670.813,249**	**20148**	**822.475**	**18424**	**730.339**	**91,44**	**88,80**	**68725**	**4.401.152,038**	**68725,00**	**65,04**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**pelayanan kesehatan**															
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280	orang	220.000	610	101.200	286	132.066	285	108.900	99,65	82,46	895	210.100	69,92	95,50	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1224	orang	3.000	594	10.100	285	-	239	-	83,86	-	833	10.100	68,06	336,67	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1164	orang	3.600	553	900	242	-	239	-	98,76	-	792	900	68,04	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7440	orang	514.000	2692	128.500	1329	-	1083	-	81,49	-	3775	128.500	50,74	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Sesuai Standar	13292	orang	144.000	5696	85.650	2371	22.950	2371	22.950	100,00	100,00	8067	108.600	60,69	75,42	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36216	orang	169.800	18148	42.450	12231	-	11633	-	95,11	-	29781	42.450	82,23	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4352	orang	527.520	5153	131.880	2501	-	1778	-	71,09	-	6931	131.880	159,26	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	100	orang	31.200	55	7.800	28	11.250	28	11.250	100,00	-	83	19.050	83,00	61,06	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	708	orang	75.000	500	40.050	254	14.100	254	14.100	100,00	100,00	754	54.150	106,50	72,20	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1107	orang	49.500	173	16.500	344	-	256	-	74,42	-	429	16.500	38,75	33,33	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	Dokumen	1.262.920	24	484.775	12	161.825	12	161.595	100,00	99,86	36	646.370	75,00	51,18	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	Dokumen	77.520	24	32.520	12	8.250	12	8.250	100,00	100,00	36	40.770	75,00	52,59	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	Dokumen	134.240	24	62.460	12	22.800	12	22.800	100,00	100,00	36	85.260	75,00	63,51	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	88	orang	6.688	0	-	44	3.344	44	3.300	100,00	98,68	44	3.300	50,00	49,34	
1.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	36	Dokumen	441.000	12	183.900	12	142.395	12	141.150	100,00	99,13	24	325.050	66,67	73,71	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	Dokumen	2.583.250	36	2.184.778,249	12	269.145	12	201.844	100,00	74,99	48	2.386.622,038	66,67	92,39	
1.	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3	Laporan	1.350	1	450	0	-	0	-	-	-	1	450	33,33	33,33	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	168	orang	19.200	70	10.800	47	-	28	-	59,57		98	10.800	58,33	56,25	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan malaria	63648	orang	100.800	15912	25.200	90	3.000	90	3.000	100,00	100,00	16002	28.200	25,14	27,98	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	36	Dokumen	18.900	12	6.300	12	11.400	12	11.400	100,00	100,00	24	17.700	66,67	93,65	
1.	02.	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	36	Dokumen	343.800	12	114.600	12	150	12	-	100,00	-	24	114.600	66,67	33,33	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	24	Dokumen	39.600	0	-	12	19.800	12	19.800	100,00	100,00	12	19.800	50,00	50,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	98,10	96,26			72,28	70,07	
												Predikat kinerja	ST	ST			S	S	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**616.200**	**24**	**168.990**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**24**	**168.990**	**27,27**	**27,42**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	**02.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**616.200**	**24**	168.990	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**24**	**168.990**	**24,00**	**27,42**	
1.	02.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	48	Dokumen	616.200	24	168.990	0	-	0	-	-	-	24	168.990	50,00	27,42	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			50,00	27,42	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**2.107.114,525**		**2.013.634**					
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	99,05	98,08			79,00	78,20	
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	**ST**	**ST**			**T**	**T**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																	
1.	**02.**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																	
1.	**02.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik**	**100**	**Persen**	**360.000**	**24**	**-**	**12**	**360.000**	**10**	**103.126**	**83,33**	**28,65**	**34**	**103.126**	**34,00**	**28,65**	Puskesmas Kotajawa

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	**02.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Kalirejo**	**100**	**persen**	**360.000**	**24**	**-**	**12**	**360.000,0**	**10**	**103.126**	**83,33**	**28,65**	**34**	**103.126**	**34,00**	**28,65**	
1.	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	bulan	360.000	24	-	12	360.000	10	103.126	83,33	28,65	34	103.126	47,22	28,65	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	83,33	28,65			23,61	14,32	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk Yang mendapatkan jaminan Pelayanan Kesehatan**	**100**	**persen**	**2.779.260**	**2038**	**643.363**	**2697**	**694.815**	**2685**	**598.364,00**	**99,56**	**86,12**	**4723**	**1.241.727**	**4723,00**	**44,68**	
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.076	orang	360.000	248	41.100	269	90.000	257	66.000	95,54	73,33	505	107.100	46,93	29,75	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	8.512	orang	114.000	1732	58.800	2128	28.500	2128	28.500	100,00	100,00	3860	87.300	45,35	76,58	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	104	orang	54.000	0	-	26	13.500	26	13.500	100,00	100,00	26	13.500	25,00	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Orang Dengan Terduga Tubercolusis	Jumlah Orang Terduga menderita Tubercolusis yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	956	orang	78.000	51	19.050	239	19.500	239	19.050	100,00	97,69	290	38.100	30,33	48,85	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	3	Dokumen	545.480	1	168.925	1	136.370	1	135.175	100,00	99,12	2	304.100	66,67	55,75	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Kesehatan Gizi Masyarakat																
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kerja dan olahraga	1	Dokumen	16.500	0	-	1	4.125	1	4.125	100,00	100,00	1	4.125	100,00	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	Dokumen	75.600	1	11.550	1	18.900	1	18.900	100,00	100,00	2	30.450	66,67	40,28	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	Dokumen	33.500	1	18.790	1	8.375	1	6.225	100,00	74,33	2	25.015	66,67	74,67	
1.	02.	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (OJMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	104	orang	24.000	0	-	26	6.000	26	6.000	100,00	100,00	26	6.000	25,00	25,00	
1.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	2	Dokumen	469.260	1	104.550	1	117.315	1	114.490	100,00	97,59	2	219.040	100,00	46,68	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2	Dokumen	873.320	1	146.223	1	218.330	1	154.399	100,00	70,72	2	300.622	100,00	34,42	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2	Dokumen	124.200	1	25.400	1	31.050	1	29.450	100,00	94,85	2	54.850	100,00	44,16	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	4.200	0	-	1	1.050	1	750	100,00	71,43	1	750	100,00	17,86	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	3	Dokumen	7.200	1	48.975	1	1.800	1	1.800	100,00	100,00	2	50.775	66,67	705,21	
Rata-rata capaian kinerja (%)													99,68	91,36			67,09	89,23	
Predikat kinerja													ST	ST			S	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**53.804**	**1**	**37.750**	**1**	**13.451**	**1**	**-**	**100,00**	**0,00**	**2**	**37.750**	**2,27**	**70,16**	
1.	**02.**	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat diPosyandu**	**100**	**Persen**	**53.804**	**1**	37.750	**1**	**13.451**	**1**	**6.300,00**	**100,00**	**46,84**	**2**	**44.050**	**2,00**	**81,87**	
1.	02.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengenbangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengenbangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	Dokumen	53.804	1	37.750	1	13.451	1	6.300	100,00	46,84	2	44.050	100,00	81,87	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	46,84			100,00	81,87	
Predikat kinerja													ST	SR			ST	S	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**1.068.266,000**		**701.490,289**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													94,34	55,61			87,15	84,06	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													ST	R			T	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																	
1.	**02.**	**Urusan Pemerintahan**																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Bidang Kesehatan																	
1.	**02.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik**	**100**	**Persen**	**1.773.681**	**24**	**1.486.156**	**12**	**1.773.681**	**12**	**1.445.585**	**100,00**	**81,50**	**36**	**2.931.741**	**36,00**	**165,29**	Puskesmas Bernung
1.	**02.**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Kalirejo**	**100**	**persen**	**1.773.681**	**24**	**1.486.156**	**12**	**1.773.681,0**	**12**	**1.445.585**	**100,00**	**81,50**	**36**	**2.931.741**	**36,00**	**165,29**	
1.	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	bulan	1.773.681	24	1.486.156	12	1.773.681	12	1.445.585	100,00	81,50	36	2.931.741	50,00	165,29	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	81,50			25,00	82,65	
												Predikat kinerja	ST	T			SR	T	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk Yang mendapatkan jaminan Pelayanan Kesehatan**	**100**	**persen**	**3.522.270**	**10881**	**562.756**	**10136**	**848.440**	**12012**	**762.047,32**	**118,51**	**89,82**	**22893**	**1.324.803**	**22893,00**	**37,61**	
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.672	orang	444.720	884	52.800	918	111.180	915	97.700	99,67	87,88	1799	150.500	48,99	33,84	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.648	Orang	48.800	1.800	48.595	0	-	875	-	0,00	0,00	2675	48.595	73,33	99,58	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	32.356	orang	154.800	6.334	41.325	8089	38.700	8089	38.700	100,00	100,00	14423	80.025	44,58	51,70	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	360	orang	38.400	89	-	90	9.600	90	9.600	100,00	100,00	179	9.600	49,72	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Orang Dengan Terduga Tubercolusis	Jumlah Orang Terduga menderita Tubercolusis yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.260	orang	78.000	481	20.550	815	19.500	815	15.525	100,00	79,62	1296	36.075	39,75	46,25	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.724	Orang	57.600	1.283	14.400	0	-	1003	1.200			2286	15.600	48,39	27,08	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	Dokumen	753.700	-	-	1	188.425	1	188.425	100,00	100,00	1	188.425	33,33	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kerja dan olahraga	1	Dokumen	10.200	-	-	1	2.550	1	2.550	100,00	100,00	1	2.550	100,00	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	Dokumen	59.400	1	3.600	1	14.850	1	14.850	100,00	100,00	2	18.450	66,67	31,06	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	Dokumen	114.600	1	17.985	1	28.650	1	28.650	100,00	100,00	2	46.635	66,67	40,69	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (OJMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	864	orang	36.000	-	-	216	9.000	216	9.000	100,00	100,00	216	9.000	25,00	25,00	
1.	02.	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pelayanan	2	Dokumen	547.900	1	162.261	1	136.975	1	133.175	100,00	97,23	2	295.436	100,00	53,92	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Penyakit Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Tidak Menular																
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2	Dokumen	1.046.600	1	183.890	1	261.650	1	194.487	100,00	74,33	2	378.377	100,00	36,15	
1.	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	16	Laporan	1.800	4	450			0	-	0,00	0,00	4	450	25,00	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2	Dokumen	20.310	1	7.350			1	12.960	0,00	0,00	2	20.310	100,00	100,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2	Dokumen	51.840	1	9.550	1	12.960	1	825	100,00	6,37	2	10.375	100,00	20,01	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	3	Dokumen	57.600	-	-	1	14.400	1	14.400	100,00	100,00	1	14.400	33,33	25,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	99,97	88,11			62,04	40,61	
												Predikat kinerja	ST	R			T	SR	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**22.964**	**1**	**22.960**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**22.960**	**1,14**	**99,98**	
1.	**02.**	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat diPosyandu**	**100**	**Persen**	**22.964**	**1**	22.960	**0**	**-**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**22.960**	**1,00**	**99,98**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		kabupaten/Kota																	
1.	02.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengenbangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengenbangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4	Dokumen	22.964	1	22.960	0	-			0,00	0,00	1	22.960	25,00	99,98	
Rata-rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00			25,00	99,98	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	ST	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**2.622.121,035**		**2.207.632,6**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													99,99	84,81			91,22	87,60	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													ST	T			ST	R	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.		**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**																	
1.	**02.**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**																	
1.	**02.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**Persen**	**4.786.182.547,00**	**24**	**469.918,70**	**12**	**855.236**	**12**	**484.501,00**	**100,00**	**56,65**	**36**	**954.420**	**36,00**	**0,02**	Puskesmas Gunungsari

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Kabupaten/Kota																	
1.	02.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	persen	4.786.182.547	24	469.919	12	855.236,0	12	484.501,00	100,00	56,65	36	954.420	36,00	0,02	
1.	02.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Gunung Sari	72	bulan	4.786.182.547	24	469.919	12	855.236	12	484.501	100,00	56,65	36	954.420	50,00	0,02	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	56,65			25,00	0,01	
													ST	R			SR	SR	
1.	02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	Persen	55.240	1	11.000	0	707.080	0	-	-	-	1	11.000	1,00	19,91	
1.	02.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	persen	55.240	1	11.000	0	-	0	-	-	-	1	11.000	1,00	19,91	
1.	02.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kalibrasi alat kesehatan dipuskesmas	4	kali	55.240	1	11.000			0	-	-	-	1	11.000	25,00	19,91	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			25,00	19,91	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1.	**02.**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan**	**100**	**persen**	**6.324.814**	**22214**	**1.698.764**	**23139**	**707.080**	22366	**581.671,30**	**96,66**	**82,26**	**44580**	**2.280.435**	**44580,00**	**36,06**	
1.	02.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4796	orang	236.400	608	46.100	302	64.800	302	53.100	100,00	81,94	910	99.200	18,97	41,96	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4580	orang	87.540	440	22.050	300	-	300	-	100,00		740	22.050	16,16	25,19	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4360	orang	13.200	439	3.000	288	-	288	-	100,00		727	3.000	16,67	22,73	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23660	orang	639.640	3049	121.030	1167	-	1167	-	100,00		4216	121.030	17,82	18,92	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49804	orang	351.900	4991	65.100	2243	20.400	2243	20.400	100,00	100,00	7234	85.500	14,52	24,30	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	139284	orang	143.920	6493	27.410	13192	-	13192	-	100,00		19685	27.410	14,13	19,05	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan	16308	orang	224.400	2730	50.700	2086	-	2086	-	100,00		4816	50.700	29,53	22,59	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Kesehatan Sesuai Standar															
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1652	orang	18.060	2547	18.690	158	-	158	-	100,00		2705	18.690	163,74	103,49	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	368	orang	58.800	409	11.100	29	18.000	25	12.000	86,21	66,67	434	23.100	117,93	39,29	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2696	orang	21.520	198	7.150	268	30.450	268	18.900	100,00	62,07	466	26.050	17,28	121,05	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5088	orang	24.000	217	6.000	363		257	-	70,80		474	6.000	9,32	25,00	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen	1.718.820	4	295.540	12	147.715	12	126.789	100,00	85,83	16	422.329	133,33	24,57	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen	11.520			12	2.880	12	2.850	100,00	98,96	12	2.850	100,00	24,74	
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen	73.200	1	9.100	12	14.850	12	14.850	100,00	100,00	13	23.950	108,33	32,72	
1.	02.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	4	Dokumen	9.000	2	13.200	12	17.915	12	14.925	100,00	83,31	14	28.125	350,00	312,50	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Surveilans Kesehatan																
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	10320	orang	2.000			2580	9.600	1935	9.600	75,00	100,00	1935	9.600	18,75	480,00	
1.	02.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	48	Dokumen	413.700	24		12	103.425	12	99.600,000	100,00	96,30	36	99.600	75,00	24,08	
1.	02.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	Dokumen	1.870.534	30	977.754	12	223.195	12	159.157	100,00	71,31	42	1.136.911	58,33	60,78	
1.	02.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	umlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	Laporan	13.200	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	680	orang	178.060	20	24.840	55	-	43	-	78,18		63	24.840	9,26	13,95	
1.	02.	Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	48	Dokumen	202.800	12		12	50.700	12	46.800	100,00	92,31	24	46.800	50,00	23,08	
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	48	Dokumen	5.400			12	1.350	9	900	75,00	66,67					
1.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	48	Dokumen	7.200			12	1.800	9	1.800	75,00	100,00	9	1.800	18,75	25,00	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Pelayanan Kelanjut Usiaan															
											Rata-rata capaian kinerja (%)		93,64	54,79			61,72	67,50	
											Predikat kinerja		ST	R			R	S	
1.	**02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**88**	**Persen**	**66.000**	**1**	**16.500**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**16.500**	**1,14**	**25,00**	
1.	**02.**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di Kabupaten Pesawaran**	**100**	**Persen**	**66.000**	**1**	16.500	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**1**	**16.500**	**1,00**	**25,00**	
1.	02.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	66.000	1	16.500			0	-	-	-	1	16.500	25,00	25,00	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			25,00	25,00	
											Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
1.	**02.**	**Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota**	**Persentase pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu**	**100**	**Persen**	**-**	**0**	-	**12**	**12.165**	**0**	**-**	**-**	**-**	**24**	**87.955**	**50,00**	**44,89**	
1.	02.	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi	48	Dokumen	195.920	12	76.515	12	12.165	12	11.440	100,00	94,04	24	87.955	50,00	44,89	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	94,04			50,00	44,89	
Predikat kinerja												ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1.562.316,000		484.501,000							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												97,88	68,49			90,85	85,67	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												**ST**	**S**			**ST**	**T**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	**03**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**730**	**20.344.153.710**	**62**	**14.489.580.737**	**120**	**7.942.934.297**	**120**	**7.270.489.819**	**100,00**	**91,53**	**182**	**21.760.070.556**	**24,93**	106,96	**DINAS PUPR**
1	**03**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																
1	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya rencana strategis SKPD	5	352.125.000	1	113.644.000	1	6.137.900	1	6.132.400	100,00	99,91	2	119.776.400	40,00	34,02	DINAS PUPR
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	5	2.400.000.000	1	593.205.582	1	23.341.000	1	19.020.500	100,00	81,49	2	612.226.082	40,00	25,51	DINAS PUPR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	39.746.000	1		1	7.949.200	1	7.949.200	100,00	100,00	2	7.949.200	40,00	20,00	
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Neraca Dinas Pekerjaan Umum	5	560.080.000	1	149.350.000	1	6.627.500	1	6.609.500	100,00	99,73	2	155.959.500	40,00	27,85	DINAS PUPR
1	**03**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																
1	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	70	27.755.762.595	14	9.199.023.960	14	5.551.152.519	14	5.068.532.123	100,00	91,31	28	14.267.556.083	40,00	51,40	DINAS PUPR
1	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanannya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60				12	702.540.000	12	634.420.000	100,00	90,30	12	634.420.000	20,00	-	
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5				1	5.280.000	1	5.280.000	100,00	100,00	1	5.280.000	20,00	-	
1	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	60	9.228.663.960	12	9.199.023.960	12	4.940.000	12	4.890.000	100,00	98,99	24	9.203.913.960	40,00	99,73	DINAS PUPR
1	**03**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
1	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	300	1.150.286.250	12	477.128.050	12	21.138.400	12	21.053.000	100,00	99,60	24	498.181.050	8,00	43,31	DINAS PUPR
1	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	35	228.662.500	7	84.260.000	7	45.732.500	7	45.732.500	100,00	100,00	14	129.992.500	40,00	56,85	DINAS PUPR
1	03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	60	125.000.000	1	20.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1	20.000.000	1,67	16,00	DINAS PUPR
1	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelancaran komunikasi dan tugas pegawai	60	249.740.000	12	255.443.451	12	49.948.000	12	33.369.200	100,00	66,81	24	288.812.651	40,00	115,65	DINAS PUPR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	**03**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
1	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.400.000				1.400.000	0	1.400.000		100,00	0	1.400.000	-	100,00	
1	**03**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
1	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	10	765.000.000	2	244.900.694	2	153.000.000	2	126.696.396	100,00	82,81	4	371.597.090	40,00	48,57	DINAS PUPR
1	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	60	5.172.000.000	12	3.352.625.000	12	1.034.400.000	12	974.400.000	100,00	94,20	24	4.327.025.000	40,00	83,66	DINAS PUPR
1	**03**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																
1	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	35	1.573.886.390	7	491.704.400	7	314.777.278	7	300.445.000	100,00	95,45	14	792.149.400	40,00	50,33	DINAS PUPR
1	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	125	72.850.000			25	14.570.000	25	14.560.000	0,00	99,93	25	14.560.000	-	-	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)	93,33	93,78	13,53	2096719927,73	28,80	45,46	
											Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
1	**03**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**47**	**57.414.044.315**	**9**	**21.165.499.916**	**9**	**3.554.635.385**	**9**	**3.271.014.540**	**100,00**	**92,02**	**18**	24.436.514.456	**37,89**	**42,56**	**DINAS PUPR**
1	**03**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengama Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1	03	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengerukan Sungai	25	18.250.000.000	5	7.291.926.540	5	500.000.000	5	496.610.000	100,00	99,32	10	7.788.536.540	40,00	42,68	DINAS PUPR
1	03	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terlaksananya Rehabilitasi Tanggul Sungai	3	8.275.234.425	1	5.670.163.577	1	1.655.046.885	1	1.501.830.778	100,00	90,74	1	7.171.994.355	40,00	86,67	DINAS PUPR
1	**03**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**																
1	03	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5	1.396.203.000	1	896.203.000	1	500.000.000	1	499.115.000,00	100,00	99,82	1	1.395.318.000	20,00	99,94	DINAS PUPR
1	03	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengerukan Sungai	14	29.492.606.890	3	7.307.206.799	3	899.588.500	3	773.458.762	100,00	85,98	6	8.080.665.561	40,00	27,40	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	93,97	4,49	6109128614,00	35,00	64,17	DINAS PUPR
											Predikat kinerja	ST	ST			SR	R	
1	**03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**5605**	**29.471.119.003**	**5**	**8.387.056.516**	**1124**	**10.115.890.123**	**1124**	**9.741.451.914**	**100,00**	**96,30**	**1129**	**18.128.508.430**	**20,14**	**61,51**	**DINAS PUPR**
1	**03**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**																
1	03	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terlaksanannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5	6.521.807.903	1	995.780.000	4	5.526.027.903	4	5.444.579.889	100,00	98,53	5	6.440.359.889	100,00	98,75	DINAS PUPR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	03	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	5600	22.949.311.100	4	7.391.276.516	1120	4.589.862.220	1120	4.296.872.025	100,00	93,62	1124	11.688.148.541	20,07	50,93	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	96,07	565	9064254215	60,04	74,84	
											Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
1	**03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**6**	**5.526.018.000**	**0**	-	**301**	**5.126.018.000**	**301**	5.101.101.387	**100,00**	99,51	301	5.101.101.387	5.472,73	92,31	**DINAS PUPR**
1	**03**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**																
1	03	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Terlaksanannya Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1	5.026.018.000			300	5.026.018.000	300	5.002.199.787	100,00	99,53	300	5.002.199.787	-	99,53	DINAS PUPR
1	03	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5	500.000.000			1	100.000.000	1	98.901.600	100,00	98,90	1	98.901.600	**20,00**	19,78	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,21	150,50	2550550693,50	10,00	59,65	
											Predikat kinerja	ST	ST			SR	R	
1	**03**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**63**	**86.040.977.430**	**33**	**32.431.268.669**	**22**	**17.208.195.486**	**22**	**12.412.481.783**	**100,00**	**72,13**	**55**	**44.843.750.452**	**87,30**	**52,12**	**DINAS PUPR**
1	**03**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	03	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	50	82.698.977.430	20	31.531.816.319	10	16.539.795.486	**10**	**11.751.081.783**	**100,00**	**71,05**	30	43.282.898.102	60,00	52,34	DINAS PUPR
1	03	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	pembangunan gedung, pematangan lahan, dan rehabilitasi gedung	13	3.342.000.000	13	899.452.350	12	668.400.000	**12**	**661.400.000**	**100,00**	**98,95**	25	1.560.852.350	192,31	46,70	DINAS PUPR
												Rata-rata capaian kinerja (%)		27,50	22421875226,00	126,15	49,52	
												Predikat kinerja				ST	SR	
1	**03**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**258**	**266.194.501.895**	**31**	**219.181.726.131**	**52**	**58.452.788.048**	**52**	**33.499.861.903**	**100,00**	**57,31**	**83**	**252.681.588.034**	**32,16**	**94,92**	**DINAS PUPR**
1	**03**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**																
1	03	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	65	5.660.000.000	6	3.489.220.650	13	1.132.000.000	13	1.005.664.200	100,00	88,84	19	4.494.884.850	29,23	79,41	DINAS PUPR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	03	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	65	6.431.956.600	6	3.489.220.650	13	1.286.391.320	13	795.666.800	100,00	61,85	19	4.284.887.450	29,23	66,62	DINAS PUPR
1	03	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan di Kabupaten Pesawaran	40	88.204.075.950	13	135.522.009.945	8	29.771.987.728	8	15.761.785.813	100,00	52,94	21	135.522.009.945	52,50	153,65	DINAS PUPR
1	03	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Jalan di Kabupaten Pesawaran	64	113.334.545.000	1	58.604.777.520	13	22.666.909.000	13	12.368.623.090	100,00	54,57	14	70.973.400.610	21,57	62,62	DINAS PUPR
1	03	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan di Kabupaten Pesawaran	8	34.563.924.345	2	10.407.247.000	2	2.185.500.000	2	2.165.627.000	100,00	99,09	4	10.407.247.000	46,67	30,11	DINAS PUPR
1	03	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Pesawaran	17	18.000.000.000	3	7.669.250.366	3	1.410.000.000	3	1.402.495.000	100,00	99,47	7	9.071.745.366	40,00	50,40	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	76,13	13,81	39125695870,17	36,53	73,80	
											Predikat kinerja	SR	SR			SR	S	
1	**03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**10**	**3.052.268.970**	**2**	**514.760.000**	**2**	**610.453.794**	**2**	**268.180.200**	**100,00**	**43,93**	4	782.940.200	40,00	25,65	**DINAS PUPR**
1	**03**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**																
1	03	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Terlasananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	5	1.929.896.470	1	257.380.000	1	385.979.294	1	85.588.000	100,00	22,17	2	342.968.000	40,00	17,77	DINAS PUPR
1	**03**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**																
1	03	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,	Terlasananya Pembinaan Tertib Usaha, Tertib	5	1.122.372.500	1	257.380.000	1	224.474.500	1	182.592.200	100,00	81,34	2	439.972.200	40,00	39,20	DINAS PUPR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi															
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	51,76	1,00	195735050,00	40,00	28,49	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
1	**03**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		5	1.969.729.000	3	2.039.588.850	1	1.170.597.000	**1**	**1.015.043.300**	**100,00**	**86,71**	4	3.054.632.150	80,00	155,08	**DINAS PUPR**
1	**03**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**																
1	03	Penyusunan Peta Dasar	Terlaksananya Penyusunan Peta Dasar	5	959.415.000	3	2.039.588.850	1	191.883.000	1	188.943.800	100,00	98,47	4	2.228.532.650	80,00	232,28	DINAS PUPR
1	03	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		793.537.000				751.737.000	0	633.292.300	0,00	84,24	0	633.292.300	-	79,81	
1	**03**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**																
1	03	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlaksanannya Pelaksananaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang		146.784.000				182.284.000	0	148.886.000	0,00	81,68	0	148.886.000	-	101,43	
1	03	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Terlaksanannya sinkronisasi program pemanfaatan ruang		69.993.000				44.693.000	0	43.921.200	0,00	98,27	0	43.921.200	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)												25,00	90,67	1,00	763658037,50	20,00	103,38	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	ST	
				6718	**464.486.794.323**	**145**	**298.209.480.819**	**1330**	**104.181.512.133**	**1631**	**72.579.624.846**			**210,69**	**52241143468,29**			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**72.579.624.846**	0,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												83,54	85,82	625,83	79777066940,40	77,09	75,69	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												T	T			T	T	

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	**BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**20.043.291.747**		**10.960.081.541**		**4.666.808.237**		**4.068.208.825**							
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**305.380.000**		**127.433.000**		**55.000.000**		**47.960.000**							
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	62.880.000	4	38.537.500	1	10.000.000	1	8.460.000	100,00	84,60	5	46.997.500	83,33	74,74	DINAS PRKP
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dok	60.000.000	2	19.968.000	1	10.000.000	1	7.800.000	100,00	78,00	3	27.768.000	50,00	46,28	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dok	60.000.000	2	20.000.000	1	10.000.000	1	8.900.000	100,00	0,00	3	28.900.000	50,00	48,17	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	dok	62.500.000	12	30.940.000	4	15.000.000	2	15.000.000	50,00	100,00	14	45.940.000	58,33	73,50	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dok	60.000.000	2	17.987.500	1	10.000.000		7.800.000	0,00	78,00	2	25.787.500	33,33	42,98	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**19.567.579.456**		**7.543.794.084**		**2.959.932.137**		**2.714.823.081**							

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173	0rg/bln	19.506.528.456	57	7.361.449.084	28	2.702.367.137	28	2.517.379.081	100,00	93,15	85	9.878.828.165	49,13	50,64	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	laporan	712.695.000		164.050.000	12	237.565.000	12	181.085.000	100,00	76,23	12	345.135.000	33,33	48,43	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	61.051.000	2	18.295.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00	3	28.295.000	50,00	46,35	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	JumlahLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	laporan	20.000.000				10.000.000	2	6.359.000		63,59	2	6.359.000	100,00	31,80	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**170.332.290**				**32.200.000**		**31.999.080**							
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	168	paket	170.332.290		-	55	32.200.000	55	31.999.080	100,00	99,38	55	31.999.080	32,74	18,79	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.428.841.211**		**508.143.995**		**246.408.500**		**123.152.474**							
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	360	paket	385.794.200	74	184.322.400	12	78.882.500	12	64.583.000	100,00	81,87	86	248.905.400	23,89	64,52	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1152	paket	338.318.551	216	112.049.000	12	21.952.000	9	19.740.000	75,00	89,92	225	131.789.000	19,53	38,95	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3024	dok	426.324.460	672	64.600.000	12	25.000.000	0	1.440.000	0,00	5,76	672	66.040.000	22,22	15,49	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	laporan	179.627.500	24	36.890.000	12	16.500.000	0	-	0,00	0,00	24	36.890.000	33,33	20,54	

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	laporan	98.776.500	36	110.282.595	12	104.074.000	9	37.389.474	75,00	35,93	45	147.672.069	62,50	149,50	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**84.726.578**		**21.998.250**		**244.467.600**		**242.154.007**							
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	Unit	84.726.578	4	21.998.250	16	244.467.600	16	242.154.007	100,00	99,05	20	264.152.257	83,33	311,77	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**6.482.497.206**		**2.106.985.926**		**429.000.000**		**414.497.503**							
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	256.414.200	36	79.583.626	12	42.000.000	9	27.497.503	75,00	65,47	45	107.081.129	75,00	41,76	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	laporan	6.226.083.006	36	2.027.402.300	12	387.000.000	9	387.000.000	75,00	100,00	45	2.414.402.300	75,00	38,78	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.100.085.246**		**651.726.286**		**699.800.000**		**493.622.680**							
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	unit	1.920.376.596	12	640.226.286	5	343.100.000	5	327.925.200	100,00	95,58	17	968.151.486	70,83	50,41	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit	89.708.650	16	11.500.000	9	6.700.000	1	780.000	11,11	11,64	17	12.280.000	14,17	13,69	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah luas Pemeliharaan/Rehabilit	600	unit	90.000.000			1	350.000.000	1	164.917.480	0,00	0,00	1	164.917.480	0,17	183,24	

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya per tahun																
													Rata-rata capaian kinerja (%)	64,81	64,67	72,6	15.028.290.366	48,57	58,43	
													Predikat kinerja	R	R			SR	R	
2		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan pemukiman kumuh					**2.730.877.140**		**1.637.599.600**		**7.545.800,00**							
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar kawasan permukiman kumuh	420		3.957.107.000		2.730.877.140		1.637.599.600		7.545.800							DINAS PRKP
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1660	unit/rumah	3.957.107.000	134	2.730.877.140	70	1.601.899.600	0	145.327.756	0,00	9,07	134	2.876.204.896	8,07	72,68	
		Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	200	orang	71.400.000	0		100	35.700.000	100	7.545.800	100,00	21,14	100	7.545.800	50,00	10,57	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	15,10	100	7.545.800	58,07	83,25	
													Predikat kinerja	ST	SR			R	T	
3		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau					267.712.075		426.238.400		281.662.410							
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kab/Kota yang terverifikasi			1.262.000.000		245.703.675		195.200.000		174.126.410							

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	dok	600.000.000	1	245.703.675	1	195.200.000	1	174.126.410	100,00	89,20	2	419.830.085	50,00	69,97	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	3	dok	662.000.000	0	-			0	-			0	-	0,00	0,00	
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	150	0rang	248.250.000				-		-							
		Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	150	orang	248.250.000	0				0	-			0	-	0,00	0,00	
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase operasional, rehabilitasi, dan pemeliharaan perumahan bagi korban bencana	200		2.750.000.000	0	3.423.400		87.438.400	0	-			0		0,00	0,00	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	100	unit/rumah	2.500.000.000	0	3.423.400	5	87.438.400	0	-			0	3.423.400	0,00	0,14	
		Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1	unit/rumah	250.000.000	0				0	-			0	-	0,00	0,00	

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen perencanaan dan pengembangan perumahan	5	dok	2.415.115.000				143.600.000		107.536.000							
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	4	dok	1.951.015.000	1				0	-			1	-	25,00	0,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4	laporan	464.100.000	0		1	143.600.000	1	107.536.000	100,00	74,89	1	107.536.000	25,00	23,17	
		Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah tersusunnya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5	laporan	610.510.000		18.585.000				-						0,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5	laporan	610.510.000	1	18.585.000			0	-	0,00	0,00	1	18.585.000	20,00	3,04	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	82,04	2,5	549.374.485	15,00	12,04	
												Predikat kinerja	ST	T			SR	SR	
4		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						3.678.404.644		2.705.559.800		1.472.034.860							
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	5	dok/laporan	1.379.865.000		49.548.400		-		-							

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	5	dok	915.765.000	1	49.548.400			0	-	0,00	0,00	1	49.548.400	20,00	5,41	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	4	laporan	464.100.000	0				0	-			0	-	0,00	0,00	
		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	5	dok	1.799.610.000		1.191.723.000		1.099.439.000		479.704.010							
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	dok	150.000.000	0				0	-			0	-	0,00	0,00	
		Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	dok	250.000.000	0	107.886.048	4	758.793.400	4	299.237.360	100,00	39,44	4	407.123.408	400,00	162,85	
		Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2	dok	350.000.000	0				0	-			0	-	0,00	0,00	
		Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	4	laporan	278.460.000	2	327.505.750	1	340.645.600	0	180.466.650	0,00	52,98	2	507.972.400	50,00	182,42	

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4	laporan	348.075.000	0				0	-			0	-	0,00	0,00	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4	laporan	348.075.000	0				0	-			0	-	0,00	0,00	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	30	keluarga	75.000.000	0				0	-			0	-	0,00	0,00	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman			32.628.302.510		3.628.856.244		1.606.120.800		992.330.850							
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	3	dok	464.100.000	2	89.060.200				-	0,00	0,00	2	89.060.200	66,67	19,19	
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	330	unit/rumah	30.344.932.510	100	3.492.077.644	29	826.563.900	29	826.563.900	100,00	100,00	129	4.318.641.544	39,09	14,23	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3	laporan	248.250.000	0	-	1	43.722.600	1	12.003.600	100,00	27,45	1	12.003.600	33,33	4,84	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	3	ha	1.221.020.000	1	47.718.400		-	0	-	0,00	0,00	0,5	47.718.400	20,00	3,91	

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2	dok	250.000.000	0	-	1	96.522.500	1	5.312.500	100,00	5,50	1	5.312.500	50,00	2,13	
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10	unit	250.000.000	0	-	10	419.387.200	10	416.832.500	100,00	99,39	10	416.832.500	100,00	166,73	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang dipugar	1	Ha	250.000.000	0	-	0,5	219.924.600	0,5	153.763.350	100,00	69,92	0,5	153.763.350	100,00	61,51	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	65,78	10,8	6.007.976.302	54,94	38,95	
												Predikat kinerja	ST	S			R	SR	
5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	581	persen			44.776.563.162		25.510.579.000		15.268.105.531							
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU perumahan			267.084.186.011		44.776.563.162		25.510.579.000		15.268.105.531							
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	562	lokasi	259.802.947.237	34	44.558.545.362	12	25.510.579.000	12	15.268.105.531	100,00	59,85	46	59.826.650.893	8,19	23,03	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4	laporan	232.050.000		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	44	dok	6.701.113.774		218.017.800	0	-	0	-	0,00	0,00	0	218.017.800	0,00	3,25	
		Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU	Jumlah Dokumen Kerja Sama	4	dok	348.075.000		-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegitan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s.d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Permukiman dari Pengembang	Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan															
												100,00	59,85	50,2	60.044.668.693	2,05	6,57	
												ST	R			SR	SR	
											15.832.678.766							
											21.097.557.426							
												92,96	57,49			86,64	73,41	
												ST	R			T	S	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	*1*	*05*	***Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota***		***100***	***%***	***96.715.135.280***	***861***	***73.268.539.905***	***141***	***16.495.162.962***	***129***	***14.902.643.178***	***91,49***	***90,35***	***1210***	***88.171.183.083***	***91,17***	***91,17***	
	1	***05***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD***	***100***	***%***	***98.872.000***	***15***	***24.445.800***	***4***	***3.000.000***	***4***	***1.800.000***	***100,00***	***60,00***	***19***	***26.245.800***	***48,01***	***60,51***	***Satpol PP Damkar***
	1	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dok	1.362.000	2	3.225.800	0	-	***0***	-	***0,00***	***0,00***	***2***	***3.225.800***	***236,84***	***236,84***	
	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	4	Dok	11.550.000	0	-	0	-	***0***	-	***0,00***	***0,00***	***0***	-	***0,00***	***0,00***	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan SKPD	4	Dok	11.550.000	0	-	0	-	*0*	-	*0,00*	*0,00*	*0*	-	*0,00*	*0,00*	
	1	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	6	Laporan	20.850.000	4	13.730.000	0	-	*0*	-	*0,00*	*0,00*	*4*	*13.730.000*	*65,85*	*65,85*	
	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Perubahan SKPD	4	Dok	13.550.000	0	-	0	-	*0*	-	*0,00*	*0,00*	*0*	-	*0,00*	*0,00*	
	1	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	38.820.000	8	6.300.000	4	3.000.000	*4*	*1.800.000*	*100,00*	*60,00*	*12*	*8.100.000*	*20,87*	*20,87*	
	1	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	1.190.000	1	1.190.000	0	-	*0*	-	*0,00*	*0,00*	*1*	*1.190.000*	*12,50*	*100,00*	
	1	***05***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran***	***100***	***%***	***17.842.498.280***	***132***	***15.508.066.051***	***39***	***5.370.011.662***	***27***	***4.712.229.082***	***100,00***	***74,06***	***159***	***20.220.295.133***	***101,52***	***81,32***	
	1	05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	bulan	16.430.155.868	67	14.520.066.051	15	5.185.611.662	15	4.553.139.082	100,00	87,80	82	19.073.205.133	97,62	116,09	
	1	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	1.412.342.412	65	988.000.000	12	181.400.000	12	159.090.000	100,00	87,70	77	1.147.090.000	106,94	81,22	
	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12	bulan	3.000.000	0	-	12	3.000.000	12	1.400.000	100,00	46,67	12	1.400.000	100,00	46,67	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
	1	***05***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100***	***%***	***1.914.908.000***	***12***	***6.800.000***	***13***	***94.550.000***	***13***	***93.207.390***	***100,00***	***79,92***	***25***	***100.007.390***	***20,02***	***12,82***	
	1	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2480	stel	1.873.500.000	0	-	1	91.550.000	1	91.407.390	100,00	99,84	1	91.407.390	0,04	4,88	
	1	05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	60	bulan	41.408.000	12	6.800.000	12	3.000.000	12	1.800.000	100,00	60,00	24	8.600.000	40,00	20,77	
	1	***05***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum SKPD***	***100***	***%***	***657.714.300***	***612***	***390.859.698***	***48***	***59.230.000***	***48***	***50.405.000***	***100,00***	***68,22***	***660***	***441.264.698***	***58,43***	***62,67***	
	1	05	Penyediaan Peralatan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	bulan	15.770.000	12	3.920.000	0	-	0	-	0,00	0,00	12	3.920.000	16,67	24,86	
	1	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	bulan	152.141.000	18	113.164.915	12	27.140.000	12	27.140.000	100,00	100,00	30	140.304.915	41,67	92,22	
	1	05	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	60	bulan	25.633.000	36	6.583.000	0	-	0	-	0,00	0,00	36	6.583.000	60,00	25,68	
	1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan	60	bulan	36.397.300	42	41.351.783	12	7.000.000	12	6.950.000	100,00	99,29	54	48.301.783	90,00	132,71	
	1	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Peraturan Perundang-undangan	540	eksemplar	46.848.000	486	19.710.000	12	960.000	12	60.000	100,00	6,25	498	19.770.000	92,22	42,20	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
	1	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	60	bulan	380.925.000	18	206.130.000	12	24.130.000	12	16.255.000	100,00	67,36	30	222.385.000	50,00	58,38	
	1	***05***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***100***	***%***	***250.500.000***	***-***	***-***	***-***	***94.220.000***	***0***	-	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	
	1	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perangkat Komputer yang tersedia	10	unit	90.500.000	0	-	0	94.220.000	0	-	***0,00***	***0,00***	0	-	***0,00***	***0,00***	
	1	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan gedung Kantor yang tersedia	1	unit	160.000.000	0	-	0	-	0	-	***0,00***	***0,00***	0	-	***0,00***	***0,00***	
	1	***05***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***100***	***%***	***72.443.226.400***	***44***	***55.431.780.000***	***25***	***10.040.000.000***	***25***	***9.589.680.000***	***100,00***	***97,75***	***69***	***65.021.460.000***	***36,79***	***67,28***	
	1	05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	720	buah	72.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	***0,00***	***0,00***	
	1	05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pembayaran Listrik, Air, dan Komunikasi Kantor	60	bulan	108.000.000	21	93.000.000	12	28.000.000	12	28.000.000	100,00	100,00	33	121.000.000	55,00	112,04	
	1	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerimaan Gaji dan Uang Makan (Anggota Satpol - PP)	65	Bulan	72.263.226.400	23	55.338.780.000	13	10.012.000.000	13	9.561.680.000	100,00	95,50	36	64.900.460.000	55,38	89,81	
	1	***05***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***100***	***%***	***3.507.416.300***	***46***	***1.906.588.356***	***12***	***834.151.300***	***12***	***455.321.706***	***100,00***	***54,59***	***58***	***2.361.910.062***	***33,92***	***30,72***	

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
	1	05		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	60	bulan	3.355.566.300	42	1.898.588.356	12	834.151.300	12	455.321.706	100,00	54,59	54	2.353.910.062	90,00	70,15	
	1	05		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34	unit	36.350.000	4	8.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	4	8.000.000	11,76	22,01	
	1	05		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	4	unit	115.500.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
														Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	72,42			42,67	45,05	
														Predikat Kinerja	ST	S			SR	SR	
2	***1***	***05***		***Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum***		***100***	***%***	***1.598.550.000***	***193***	***403.425.200***	***23***	***656.695.600***	***19***	***113.159.000***	***82,61***	***17,23***	***48***	***516.584.200***	***32,32***	***32,32***	
	1	***05***		***Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***		***100***	***%***	***1.352.650.000***	***129***	***311.150.000***	***16***	***621.331.300***	***13***	***101.795.500***	100,00	71,56	142	412.945.500	35,32	41,38	
	1	05		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Kegiatan	60	bulan	513.850.000	36	200.606.000	12	108.000.000	12	89.240.500	100,00	82,63	48	289.846.500	80,00	56,41	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
	1	05	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Penindakan terhadap Gangguan Trantibum	60	bulan	58.400.000	33	16.925.000	1	5.500.000	1	5.500.000	100,00	100,00	34	22.425.000	56,67	38,40	
	1	05	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten/Kota	72	bulan	59.400.000	15	22.205.000	1	55.431.300	0	-	0,00	0,00	15	22.205.000	20,83	37,38	
	1	05	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Wilayah Pembinaan Anggota LINMAS	60	bulan	122.500.000	30	12.914.000	1	15.000.000	1	4.225.000	100,00	28,17	31	17.139.000	51,67	13,99	
	1	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Anggota SATPOL-PP	575	peserta	598.500.000	15	58.500.000	1	3.800.000	1	2.090.000	100,00	55,00	16	60.590.000	2,78	10,12	
	2	05	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Jumlah Laporan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan	12	Laporan	433.600.000	0	-	1	433.600.000	1	398.830.000	100,00	91,98	1	398.830.000	0,00	91,98	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
			Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
	1	*05*	***Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum***		***100***	***%***	***245.900.000***	***64***	***92.275.200***	***7***	***35.364.300***	***4***	***11.363.500***	75,00	44,60	68	103.638.700	68,00	42,15	
	1	05	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Wilayah Sosialisasi	60	bulan	103.350.000	4	18.350.000	2	6.243.800	2	6.243.000	100,00	99,99	6	24.593.000	10,00	23,80	
	1	05	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Wilayah Pengawasan atas Kepatuhan Perda/Perkada	60	bulan	85.750.000	33	52.325.200	1	18.600.500	1	3.600.500	100,00	19,36	34	55.925.700	56,67	65,22	
	1	05	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Waktu Penanganan atas Pelanggaran Perda	60	bulan	56.800.000	27	21.600.000	4	10.520.000	1	1.520.000	25,00	14,45	28	23.120.000	46,67	40,70	
													Rata-Rata Capaian Kinerja	87,50	58,08			51,66	41,76	
													Predikat Kinerja	T	R			R	SR	
3	*1*	*05*	***Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran***		***100***	***%***	***634.440.000***	***56***	***115.959.000***	***25***	***157.295.000***	***25***	***151.230.000***	***100,00***	***96,14***	***21***	***267.189.000***	***42,11***	***42,11***	
	1	*05*	***Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran***		***100***	***%***	***402.800.000***	***20***	***50.715.000***	***25***	***157.295.000***	***25***	***151.230.000***	***100,00***	***96,92***	***57***	***211.945.000***	***40,83***	***58,82***	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
			Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
	1	05	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	60	Laporan	14.650.000	12	10.000.000	12	4.650.000	12	4.650.000	100,00	100,00	24	14.650.000	40,00	100,00	
	2	05	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Laporan	87.000.000	0	-	12	87.000.000	12	87.000.000	100,00	100,00	12	87.000.000	100,00	100,00	
	1	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Kebakaran	90	unit	312.800.000	20	50.715.000	1	65.645.000	1	59.580.000	100,00	90,76	21	110.295.000	23,33	35,26	
	1	05	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang terlatih	45	orang	90.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	1	***05***	***Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran***		***100***	***%***	***231.640.000***	***36***	***65.244.000***	***0***	***-***	***-***	***-***	0,00	0,00	36	65.244.000	60,00	28,17	
	1	05	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Waktu Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran dalam Rangka Pemungutan PAD	60	bulan	231.640.000	36	65.244.000	0	-	0	-	0,00	0,00	36	65.244.000	60,00	28,17	
Rata-Rata Capaian Kinerja														100,00	96,92			50,42	43,49	
Predikat Kinerja														ST	ST			R	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											17.309.153.562		15.167.032.178							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)														95,83	75,81			82,30	80,16	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)														ST	T			T	T	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	***Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Perkantoran***	***1286***	**Bln**	**3.194.461.303**	**85**	**422.950.000**	**76**	**409.707.100**	**76**	**404.387.822**	**800,00**	**773,85**	**161**	**827.337.822**	**283,35**	**792,21**	Dinas Sosial
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	100	org	1.792.304.733	12	137.590.000	12	133.040.000	12	133.040.000	100,00	100,00	24	270.630.000	24,00	15,10	
		10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	165	Item	286.739.000	12	15.274.000	8	6.431.100	8	6.411.100	100,00	99,69	20	21.685.100	12,12	7,56	
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan	65	Item	84.615.000	12	15.000.000	7	6.000.000	7	5.984.800	100,00	99,75	19	20.984.800	29,23	24,80	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Komponen Instalasi/ Penerangan	80	Item	81.512.450	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	170	Item	56.410.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran dan buku peraturan perundang - undangan	300	koran	38.358.800	12	10.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	100,00	100,00	18	40.000.000	6,00	104,28	
		17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat dan lembur	200	kotak	101.538.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi	75	kali	415.693.320	12	46.086.000	12	40.946.000	12	41.726.800	100,00	101,91	24	87.812.800	32,00	21,12	
		07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	unit	20.290.000	0	-	6	23.290.000	6	22.990.000	100,00	98,71	6	22.990.000	100,00	113,31	
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	60	bln	252.000.000	12	30.000.000	12	22.000.000	12	16.235.122	100,00	73,80	24	46.235.122	40,00	18,35	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Tenaga Kontrak (PTK)	65	orang	65.000.000	13	169.000.000	13	148.000.000	13	148.000.000	100,00	100,00	26	317.000.000	40,00	487,69	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	96,73			25,76	72,02	
													Predikat kinerja	ST	ST			SR	S	
2	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor***	***104***	**Bln**	**1.444.762.155**	**8**	**233.981.300**	**9**	**305.976.000**	**9**	**304.017.088**	**200,00**	**199,35**	**17**	**537.998.388**	**49,63**	**46,24**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			DAERAH KABUPATEN / KOTA																	
		23	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops	54	unit	1.373.732.155	8	233.981.300	8	302.700.000	8	300.741.088	100,00	99,35	16	534.722.388	29,63	38,92	
		26	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5	kali	44.780.000	0	-	1	3.276.000	1	3.276.000	100,00	100,00	1	3.276.000	20,00	7,32	
		28	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	45	unit	26.250.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,68			16,54	15,41	
													Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
3	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	***Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur***	***450***	**Bln**	**191.000.000**	**-**	**-**	**38**	**32.450.000**	**38**	**31.725.000**	**0,00**	**0,00**	**38**	**31.725.000**	**8,44**	**16,61**	
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Batik	450	stell	191.000.000	0	-	38	32.450.000	38	31.725.000	0,00	0,00	38	31.725.000	8,44	16,61	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			8,44	16,61	
													Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
4	1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	***Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas***	***20***	**Bln**	**25.000.000**	**6**	**5.000.000**	**1**	**5.730.400**	**7**	**5.728.800**	**200,00**	**199,94**	**14**	**15.728.800**	**70,00**	**44,52**	
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dok	58.608.960	1	5.000.000	6	3.020.000	6	3.020.000	100,00	100,00	7	8.020.000	35,00	13,68	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Dok	25.000.000	6	5.000.000	1	2.710.400	1	2.708.800	100,00	99,94	7	7.708.800	35,00	30,84	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,97			35,00	22,26	
													Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
5	**1**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal***	***1175***		**5.566.825.031**	**38**	**195.000.000**	**132**	**671.765.500**	**121**	**409.350.500**	**400,00**	**332,13**	**159**	**604.350.500**	**62,75**	**107,90**	
		02	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kelompok usaha peningkatan kesejahteraan sosial (KUPKS) Perdesaan di Kabupaten Pesawaran	19	Kelompok	374.625.250	0	-	11	103.570.500	0	2.650.500	0,00	2,56	0	2.650.500	0,00	0,71	
		03	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah TKSM/PSM di Kabupaten Pesawaran	275	TKSM/PSM	746.473.200	0	-	11	70.070.000	11	49.500.000	100,00	70,64	11	49.500.000	4,00	6,63	
		01	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesawaran	556	org	3.649.576.581	0	-	73	343.125.000	73	202.200.000	100,00	58,93	73	202.200.000	13,13	5,54	
		04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Pesawaran	160	Lembaga	232.050.000	5	75.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	100,00	100,00	9	130.000.000	5,63	56,02	
		05	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah warga karang taruna peserta lomba desa	165	org	564.100.000	33	120.000.000	33	100.000.000	33	100.000.000	100,00	100,00	66	220.000.000	40,00	39,00	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	80,00	66,43			12,55	21,58	
													Predikat kinerja	T	S			SR	SR	
6	**1**		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial***	***160***		**631.920.000**	**24**	**60.000.000**	**24**	**68.521.000**	**24**	**57.596.000**	**100,00**	**84,06**	**48**	**117.596.000**	**40,00**	**38,12**	
		01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah penanggulangan masalah - masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB	40	Kejadian	323.460.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Kejadian bencana alam / bencana sosial dan Buffer Stock	120	Paket	308.460.000	24	60.000.000	24	68.521.000	24	57.596.000	100,00	84,06	48	117.596.000	40,00	38,12	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	84,06			20,00	19,06	
				Predikat kinerja										ST	T			SR	SR	
9	1		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase Program Rehabilitasi Sosial***	**1.336**		**2.311.655.000**	**200**	**220.000.000**	**185**	**205.794.500**	**185**	**184.409.500**	**200,00**	**169,40**	**385**	**404.409.500**	**126,85**	**82,18**	
		01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penerima bantuan bagi Disabilitas dan Lansia	1285	org	1.913.580.000	170	180.000.000	175	180.794.500	175	164.854.500	100,00	91,18	345	344.854.500	26,85	18,02	
		03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penerima bantuan alat bantu bagi Disabilitas dan Lansia	40	org	92.820.000	30	40.000.000	10	25.000.000	10	19.555.000	100,00	78,22	40	59.555.000	100,00	64,16	
		12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kabupaten Pesawaran	11	Puskesos	305.255.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
				Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	84,70			42,28	27,39	
				Predikat kinerja										ST	T			SR	SR	
11	1		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase Pencapaian Validasi data PMKS versi Kementerian***	***60***	**Kali**	**551.446.500**	**4**	**95.000.000**	**4**	**23.483.000**	**4**	**19.413.000**	**100,00**	**82,67**	**8**	**114.413.000**	**40,00**	**31,59**	
		02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	20	Laporan	362.216.500	4	95.000.000	4	23.483.000	4	19.413.000	100,00	82,67	8	114.413.000	40,00	31,59	
		03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	60	Laporan	189.230.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
				Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	82,67			20,00	15,79	
				Predikat kinerja										ST	T			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**1.723.427.500**		**1.416.627.710**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .....)										97,14	87,75			91,40	87,11	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .....)										ST	T			ST	T	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	432	-	5.067.427.000	87	738.703.046	87		707.507.000	75	425.947.602	337,50	366,24	-	40.955.444	2,50	36,10	Dinas Koperasi UMKM
2.17.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	20	Dkm	15.000.000	3	5.000.000	3		1.865.000	0	1.860.000	99,73	99,73	3	6.860.000	15,00	45,73	-
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	20	Dkm	15.000.000	3	5.000.000	3		1.865.000		1.860.000	99,73	99,73	3	6.860.000	15,00	45,73	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	72		2.028.500.000	12	194.710.000	12		109.320.000	12	108.480.000	62,50	99,62	-	86.230.000	2,50	44,83	-
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Pejabat Penata usahaan Keuangan	72	Bulan	2.028.500.000	12	194.710.000	12		109.320.000	12	108.480.000	100,00	99,23	-	86.230.000	0,00	4,25	
2.17.01.2.02.07	Koordinasindan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	lprn	7.645.000		5.000.000	4		1.529.000	1	1.529.000	25,00	100,00	1	6.529.000	5,00	85,40	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	216		849.870.500	39	89.671.456	39		18.887.000	39	18.887.000	75,00	75,00	0	70.784.456	0,00	6,10	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyedia Alat Tulis Kantor	72	Bulan	191.722.500	12	27.280.000	12		6.854.000	12	6.854.000	100,00	100,00	-	20.426.000	0,00	10,65	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan	72	Bulan	124.660.000	12	9.000.000	12		2.000.000	12	2.000.000	100,00	100,00	-	7.000.000	0,00	5,62	
2.17.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi kedinasan	72	Bulan	533.488.000	15	53.391.456	15		10.033.000	15	10.033.000	100,00	100,00	-	43.358.456	0,00	8,13	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	72		1.289.400.000	24	288.312.620	24		299.300.000	12	23.688.010	100,00	93,45	-	- 7.175.390	0,00	-2,72	-
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Langganan Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	119.400.000	12	16.512.620	12		26.400.000	12	23.688.010	100,00	89,73	-	(7.175.390)	0,00	-6,01	
2.17.01.2.08.4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayar Honor Tenaga Kontrak	72	Bulan	1.170.000.000	12	271.800.000	12		272.900.000	12	265.200.000	100,00	97,18	-	6.600.000	0,00	0,56	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	72		899.656.500	12	166.008.970	12		280.000.000	12	274.892.592	100,00	98,18	-	- 108.883.622	0,00	- 12,10	-
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Mobil dinas Roda 4 dan Pembayaran Pajak	72	Bulan	899.656.500	12	166.008.970	12		280.000.000	12	274.892.592	100,00	98,18	-	(108.883.622)	0,00	- 12,10	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	84,38	91,56			0,63	9,03	
												Predikat kinerja	T	ST			SR	SR	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Cakupan Sistem Pendukung Usaha Koperasi terhadap Koperasi	150	koperasi	1.025.728.032	50	63.505.000	50	%	18.698.700	40	18.698.700	80,00	100,00	10	44.806.300	6,67	4,37	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	PERLINDUNGAN KOPERASI																		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi	150	koperasi	1.025.728.032	50	63.505.000	50	%	18.698.700	40	18.698.700	80,00	100,00	10	44.806.300	6,67	4,37	-
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daearah Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Koperasi keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	148	Koperasi	78.852.000	-	-	148		78.852.000	148	78.852.000	100,00	100,00	100	-			
2.17.06.2.01.0009	Pemerdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penetapan Manajemen, Standarrisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapat Pendampingan dan Bantuan, Jumlah Koperasi yang Mendapat Pendampingan untuk Mendapatkan Dana Bantuan dari LPDB	150	koperasi	1.025.728.032	50	63.505.000	50	%	18.698.700	40	18.698.700	80,00	100,00	10	44.806.300	6,67	4,37	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	90,00	100,00			6,67	4,37	
												Predikat kinerja	T	ST			SR	SR	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA		805	unit usaha	750.000.000	101	47598000	71		39.796.600	61	33.123.000	183,33	169,46	162	80.721.000	58,67	21,53	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	MIKRO (UMKM)																		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang di lakukan melalui pendataan kemitraan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Cakupan Jumlah UMKM yang mendapat Sapras	805	unit usaha	750.000.000	101	47598000	71		39.796.600	61	33.123.000	183,33	169,46	162	80.721.000	58,67	21,53	-
2.17.07.2.01.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	750	unit usaha	375.000.000	90	25.450.000	60		23.647.000	50	18.153.000	83,33	76,77	140	43.603.000	18,67	11,63	
2.17.07.2.01.14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	55	unit usaha	375.000.000	11	22.148.000	11		16.149.600	11	14.970.000	100,00	92,70	22	37.118.000	40,00	9,90	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	91,67	84,73			58,67	21,53	
												Predikat kinerja	ST	T			R	SR	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Jumlah UMKM yang mendapat sapras	50	Expos	2.289.591.600	10	146.320.000	10		228.101.400	10	222.467.000	100,00	97,53	-	- 76.147.000	0,00	-3,33	-
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orintasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitasi Pemasaran dan Pelatihan	50	Expos	2.289.591.600	10	146.320.000	10		228.101.400	10	222.467.000	100,00	97,53	-	- 76.147.000	0,00	-3,33	-
2.17.08.2.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM, serta	Jumlah Event Promosi hasil pelaku usaha kecil dan menengah pada Pesawaran	50	Expos	2.289.591.600	10	146.320.000	10		228.101.400	10	222.467.000	100,00	97,53	-	(76.147.000)	0,00	-3,33	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	Desain dan Teknologi	Fair, Lampung Fair dan Jumlah Pameran Lainnya.																	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	97,53			0,00	-3,33	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA		545	org	500.000.000	159	95389840	109		56.391.300	109	56.391.300	200,00	200,00	268	151.781.140	90,00	60,71	-
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Produktifits Tenaga Kerja	500	org	250.000.000	150	47720000	100		38.922.300	100	38.922.300	100,00	100,00	250	86.642.300	50,00	34,66	-
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	500	org	250.000.000	150	47.720.000	100		38.922.300	100	38.922.300	100,00	100,00	250	86.642.300	50,00	34,66	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Produktifits Tenaga Kerja	45	lmbg	250.000.000	9	47669840	9		17.469.000	9	17.469.000	100,00	100,00	18	65.138.840	40,00	26,06	-
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	45	lmbg	250.000.000	9	47.669.840	9		17.469.000	9	17.469.000	100,00	100,00	18	65.138.840	40,00	26,06	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	100,00			45,00	30,36	
Predikat kinerja													ST	ST			SR	SR	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		25	lmbg	250.000.000	5	27090000	5		25.718.000	5	12.893.000	100,00	50,13	10	39.983.000	40,00	15,99	-
2/07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Produktifits Tenaga Kerja	25	lmbg	250.000.000	5	27.090.000	5		25.718.000	5	12.893.000	100,00	50,13	10	39.983.000	40,00	15,99	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota																		
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasioal Lembaga Kerja Sama Tripartit	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	25	lmbg	250.000.000	5	27.090.000	5		25.718.000	5	12.893.000	100,00	50,13	10	39.983.000	40,00	15,99	
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	50,13			40,00	15,99	
Predikat kinerja													ST	R			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.076.213.000		769.520.602				40.955.444			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													**94,34**	**87,33**			**85,23**	**83,73**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													ST	T			T	T	

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**																		

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahKabupaten/kota	%	100					4.189.933,79		4.100.456,938							
2.14.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100														
2.14.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penyusunan Renja	dokumen	6	127.500,00	2	30.500,00	1	15.000,00		15.000,000	0,00	100,00	2	45.500	33,33	35,69	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	laporan	6	100.000,00	2	25.000,00	1	15.000,00		15.000,000	0,00	100,00	2	40.000	33,33	40,00	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100														
2.14.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	240	20.699.080,00	133	13.925.514,64	26	3.177.702,49	26	3.124.169,458	100,00	98,32	159	17.049.684	66,25	82,37	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	72	2.907.800,00	48	1.523.220,00	12	147.840,00	12	145.820,000	100,00	98,63	60	1.669.040	83,33	57,40	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	125.000,00	2	25.000,00	0	-	0	-	0,00	0,00	2	25.000	16,67	20,00	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100														
2.14.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	232	100.000,00	36	19.950,00	0	-	0	-	0,00	0,00	36	19.950	15,52	19,95	Dinas P3AP2KB

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.14.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**														
2.14.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	72	10.000,00	24	4.000,00	0	-	0	-	0,00	0,00	24	4.000	33,33	40,00	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	72	364.975,00	36	140.790,20	12	20.000,00	12	20.000,000	100,00	100,00	48	160.790	66,67	44,06	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	72	32.768,00	24	9.815,70	0	-	0	-	0,00	0,00	24	9.816	33,33	29,96	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	66	250.000,00	22	115.660,00	0	-	0	-	0,00	0,00	22	115.660	33,33	46,26	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	72	47.990,00	36	43.601,43	12	23.240,00	12	23.240,000	100,00	100,00	48	66.841	66,67	139,28	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	144	150.000,00	36	49.420,00	12	125.600,00	12	125.600,000	100,00	100,00	48	175.020	33,33	116,68	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	540.410,00	36	199.162,00	12	39.440,00	12	35.068,458	100,00	88,92	48	234.230	48,00	43,34	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**														
2.14.01.2.07.05		Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	set	1	10.945,00	1	10.945,00	0	-	0	-	0,00	0,00	1	10.945	100,00	100,00	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	24	25.000,00	17	10.000,00	0	-	0	-	0,00	0,00	17	10.000	70,83	40,00	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.07.10		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	9	165.000,00	3	55.000,00	3	55.000,00	3	55.000,000	100,00	100,00	6	110.000	66,67	66,67	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**														

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.14.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	72	60.000,00	48	44.966,22	12	12.000,00	12	8.518,724	100,00	70,99	60	53.485	83,33	89,14	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	48	1.560.000,00	24	522.000,00	12	194.000,00	12	181.000,000	100,00	93,30	36	703.000	75,00	45,06	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**														
2.14.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	186	2.514.457,80	63	1.175.017,73	4	365.111,30	4	352.040,298	100,00	96,42	67	1.527.058	36,02	60,73	Dinas P3AP2KB
2.14.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	18	330.000,00	9	185.000,00	0	-	0	-	0,00	0,00	9	185.000	50,00	56,06	Dinas P3AP2KB
												Rata-rata capaian kinerja (%)	83,33	95,55			52,25	58,63	
												Predikat kinerja	T	ST			R	R	
2.14.02		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**persentase cakupan PUS <20 thn yang didampingi**	**%**	**70**					-		-							
2.14.02.2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	%	100														
2.14.02.2.01.01		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kegiatan Rakerda dan Revieu Program KKBPK Dan Terlaksananya Rakernas Program KKBPK yang di ikuti	kegiatan	4	170.000,00	4	170.000,00			0	-	0,00	0,00	4	170.000	100,00	100,00	Dinas P3AP2KB
2.14.02.2.01.05		Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Pembinaan Saka Kencana Pramuka	kegiatan	1	11.000,00	1	11.000,00			0	-	0,00	0,00	1	11.000	100,00	100,00	Dinas P3AP2KB
2.14.02.2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk**	**Persentase cakupan pengendalian penduduk**	%	100														

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
2.14.02.2.02.02		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan	kecamatan	11	29.050,00	11	29.050,00			0	-	0,00	0,00	11	29.050	100,00	100,00	Dinas P3AP2KB
			Jumlah Pemutahiran Data Kependudukan Keluarga Berencana	kecamatan	11														
2.14.02.2.02.13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Penyusunan Pelaporan Program KKBPK Berbasis Teknologi Informasi	kecamatan	11	20.000,00	11	20.000,00			0	-	0,00	0,00	11	20.000	100,00	100,00	Dinas P3AP2KB
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			100,00	100,00	
												Predikat kinerja	SR	SR			ST	ST	
2.14.03		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase cakupan PUS <20 thn yang didampingi**	**%**	**80**					**6.055.410,20**		**5.087.044,50**							
2.14.03.2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**%**	**50**														
2.14.03.2.01.01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK NF-BOKB)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	66	11.481,25	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.01.02		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	dokumen	6	82.750,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.01.04		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak	dokumen	6	233.818,40	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			dan Elektronik serta Media Luar Ruang																
2.14.03.2.01.06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	18	567.996,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.01.07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	66	1.474.605,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.01.08		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	6	132.400,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Pemberdayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)**	%	51,39														
2.14.03.2.02.01		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	organisasi	66	66.200,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.02.02		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK NON FISIK)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	unit	66	24.679.147,90	44	15.971.432,90	11	4.880.900,00	11	3.561.010,000	100,00	72,96	55	19.532.443	83,33	79,15	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.02.03		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana	laporan	66	2.304.116,00	44	698.979,50	11	38.158,20	11	37.970,600	100,00	99,51	55	736.950	83,33	31,98	Dinas P3AP2KB

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																
2.14.03.2.02.04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	6282	7.651.292,00	4188	3.442.615,00	1047	915.372,00	###	1.335.330,000	100,00	145,88	5235	4.777.945	83,33	62,45	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten dan Kota**	%	51,39														
2.14.03.2.03.01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	44	29.700,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.03.03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	6515	2.860.958,54	5050	1.035.863,10	100	8.221,00	100	8.221,000	100,00	100,00	5150	1.044.084	79,05	36,49	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.03.06		Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	kecamatan	44	66.200,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.03.08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	66	1.583.000,00	39	795.832,50	11	87.500,00	11	38.500,000	100,00	44,00	50	834.333	75,76	52,71	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.03.13		Peningkatan kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang mendapat peningkatan Kesertaan KB Pria	orang	50	66.200,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2.14.03.2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB**	%	51,39														
2.14.03.2.04.01		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	organisasi	12	2.499.825,00	5	920.518,99	2	68.747,00	2	61.985,900	100,00	90,17	7	982.505	58,33	39,30	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.04.03		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung	132	1.079.995,00	77	1.597.416,60	11	56.512,00	11	44.027,000	100,00	77,91	88	1.641.444	66,67	151,99	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.04.04		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	132	99.300,00	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	90,06			29,43	25,23	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
2.14.04		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR, BKL,PIK-R dan pemberdayaan ekonoi keluarga/UPPKA**	**%**	**52,31**					**437.078,60**		**348.608,80**							
2.14.04.2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter,PIK remaja dan BKR yang mendapat pembinaan genre, kelompok BKL yang**	**%**	**51,31**														

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dan keluarga yang mengakses PPKA															
2.14.04.2.01.01		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera(UPPKS) dan Pemberdayaan ekonomi keluarga)	Jumlah terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera(UPPKS) dan Pemberdayaan ekonomi keluarga)	kelompok	44	284.000,00					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.04.2.01.02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	unit	132	1.999.981,81	88	507.000,00	23	93.298,80	0	34.954,400	0,00	37,47	88	541.954	66,67	27,10	Dinas P3AP2KB
2.14.04.2.01.04		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	laporan	30	5.516.345,00	26	1.984.831,20	6	265.655,80	5	247.080,400	83,33	93,01	31	2.231.912	103,33	40,46	Dinas P3AP2KB
2.14.04.2.01.05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	6282	6.093.180,40	0	-			0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas P3AP2KB
2.14.04.2.01.07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	laporan	66	2.594.041,54	44	1.632.731,80	11	30.234,00	7	18.984,000	63,64	62,79	51	1.651.716	77,27	63,67	Dinas P3AP2KB

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																
2.14.04.2.01.08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	66	481.895,00	44	267.500,00	11	47.890,00	11	47.590,000	100,00	99,37	55	315.090	83,33	65,39	Dinas P3AP2KB
												Rata-rata capaian kinerja (%)	61,74	73,16			55,10	33,49	
												Predikat kinerja	R	S			R	SR	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																		
2.08.02		**PROGRAM PENGARUSUTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta (Pekerja perempuan di lembaga swasta / Jumlah pekerja perempuan) x 100**	**%**	**34,076**					**230.861,00**		**198.623,43**							
2.14.04.2.01		**Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan kabupaten/kota**	**Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan & penganggaran responsif gender (PPRG)**	**%**	**100**														
2.14.04.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	6	307.100,00	3	81.600,00	1	8.200,00	1	8.200,000	100,00	100,00	4	89.800	66,67	29,24	Dinas P3AP2KB
2.14.04.2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,**	**Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR**	%	32,353														

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																
2.14.04.2.02.01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	25	1.048.605,00	13	434.711,00	2	95.756,00	2	77.891,429	100,00	81,34	15	512.602	60,00	48,88	Dinas P3AP2KB
2.14.04.2.02.02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumenn hasil Sosialisasi Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	dokumen	6	167.445,00	6	166.092,00	0	-	0	-	0,00	0,00	6	166.092	100,00	99,19	Dinas P3AP2KB
2.14.04.2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase anggota DWP yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan**	%	100														
		Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat advokasi	lembaga	7	54.350,00	7	54.350,00	0	-	0	-	0,00	0,00	7	54.350	100,00	100,00	Dinas P3AP2KB
2.14.04.2.03.02		Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Peyedia layanan Pemberdayaan Prempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	360	900.000,00	360	746.868,10	130	126.905,00	130	112.532,000	100,00	88,67	490	859.400	136,11	95,49	Dinas P3AP2KB
												Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	90,01			92,56	74,56	
												Predikat kinerja		ST	ST			ST	S	
2.08.03		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di**	**%**	**100**					**161.770,00**		**114.235,00**							

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			dalam unit pelayanan terpadu																
2.08.03.2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota**	**Rasio KDRT (Jumlah KDRT/Jumlah Rumah Tangga)**	nilai	0														
2.08.03.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	12	852.289,50	21	337.215,00	2	30.500,00	2	30.100,000	100,00	98,69	23	367.315	191,67	43,10	Dinas P3AP2KB
2.08.03.2.02		**Penyediaan layanan rujukan lanjutanbagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota**	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit**	**%**	**100**														
2.08.03.2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	60	84.650,00	44	41.800,00	12	16.200,00	12	16.200,000	100,00	100,00	56	58.000	93,33	68,52	Dinas P3AP2KB
2.08.03.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NF)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	72	1.748.615,00	48	326.440,80	12	115.070,00	12	67.935,000	100,00	59,04	60	394.376	83,33	22,55	Dinas P3AP2KB
2.08.03.2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas terlatih**	**%**	**100**														
2.08.03.2.03.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban	laporan	6	96.200,00	2	27.205,30	0	-	0	-	0,00	0,00	2	27.205	33,33	28,28	Dinas P3AP2KB

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah pelayanan operasional rumah penampungan sementara/rumah perlindungan	bulan	72		12		0		0		0,00		12		16,67		
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	85,91			83,67	40,61	
												Predikat kinerja	ST	T			T	SR	
2.08.04		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada kelompok usaha perempuan dan keluarga TKI**	**%**	**80**					**88.321,00**		**85.815,00**							
2.08.04.2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan subkegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi**	**%**	**100**														
2.08.04.2.01.03		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	18	607.756,00	9	291.164,60	1	88.321,00	1	85.815,000	100,00	97,16	10	376.980	55,56	62,03	Dinas P3AP2KB
2.08.04.2.03		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga TKI**	**%**	**100**														
2.08.04.2.03.01		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	layanan	6	72.150,00	2	22.500,00	0	-		-	0,00	0,00	2	22.500	33,33	31,19	Dinas P3AP2KB
			Jumlah peserta pembinaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia	orang	270		95		0		0		0,00		95		35,19		

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	97,16			41,36	46,61	
													Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
2.08.05		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**%**	**100**					-		-							
2.08.05.2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data**	**%**	**100**														
2.08.05.2.01.01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	dokumen	1	5.700,00	1	5.700,00	0	-	0	-	0,00	0,00	1	5.700	100,00	100,00	Dinas P3AP2KB
2.08.05.2.01.02		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	dokumen	1	6.600,00	1	6.600,00	0	-	0	-	0,00	0,00	1	6.600	100,00	100,00	Dinas P3AP2KB
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			100,00	100,00	
													Predikat kinerja	SR	SR			ST	ST	
2.08.06		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan berperan aktif**	**%**	**100**					**136.471,00**		**135.371,00**							
2.08.06.2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase satuan pendidikan ramah anak, masjid ramah anak dan puskes ramah anak yang terlatih Konvensi hak anak	%	25														
2.08.06.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	24	247.400,00	20	392.125,00	3	65.000,00	3	65.000,000	100,00	100,00	23	457.125	95,83	184,77	Dinas P3AP2KB
2.08.06.2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga**	**Persentase kelompok PATBM yang aktif di desa**	**%**	**100**														

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2.08.06.2.02.01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	250	553.200,00	160	178.650,00	40	56.000,00	40	56.000,000	100,00	100,00	200	234.650	80,00	42,42	Dinas P3AP2KB
2.08.06.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	6	272.021,00	5	139.385,26	1	15.471,00	1	14.371,000	100,00	92,89	6	153.756	100,00	56,52	Dinas P3AP2KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)			100,00	97,63			91,94	94,57	
										Predikat kinerja			ST	ST			ST	ST	
2.08.07		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Pengaduan tindak kekerasan anak yang ditangani**	**%**	**100**					**255.090,00**		**151.975,00**							
2.08.07.2.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota**	**Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten**	**%**	**100**														
2.08.07.2.01.04		Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	orang	100	142.000,00	0	-	50	71.000,00	50	69.400,000	100,00	97,75	50	69.400	50,00	48,87	Dinas P3AP2KB
2.08.07.2.03		**Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota**	**Persentase penydiaan layanan yang memerlukan perlindungan khusus**	**%**	**100**														
2.08.07.2.03.02		Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapat layanan	orang	60	235.480,00	30	73.145,00	30	115.070,00	30	88.525,000	100,00	76,93	60	161.670	100,00	68,66	Dinas P3AP2KB
2.08.07.2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi**	**Perentase pelaksanaan kegiatan pengutan dan pengembangan lembaga**	**%**	**100**														

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**																
2.08.07.2.03.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	18	455.938,00	10	236.221,85	3	69.020,00	3	63.450,000	100,00	91,93	13	299.672	72,22	65,73	Dinas P3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)													100,00	56,29			74,07	61,09	
Predikat kinerja													ST	R			S	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								11.554.935,59				10.222.129,667	88,47						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)													93,13	85,72			92,65	87,90	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)													ST	T			ST	T	

N0	Urusan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Peresentase Penerapan Kepatuhan pelayanan Publik	2704	Rp 17.366.004.430	1507	Rp 11.572.744.446	460	Rp 3.620.563.954	441	Rp 3.254.872.810	62,79	57,24	1948	Rp 14.827.617.256	54,30	55,79	Dinas Ketahanan Pangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penrencanaan Perangkat Daerah	50	65.200.000	14	Rp 21.375.000	2	Rp 6.000.000	2	Rp 6.000.000	100,00	100,00	16	Rp 27.375.000	100,00	41,99	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Berupa Renja dan Renja Perubahan	10	Rp 28.570.000	4	10.714.000	2	Rp 6.000.000	2	Rp 6.000.000	100,00	100,00	6	Rp 16.714.000	100,00	58,50	

NO	Urusan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	5	Rp 5.075.000	1	1.015.000			0	Rp -	-	-	1	Rp 1.015.000	100,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Rp 4.915.000	1	983.000			0	Rp -	-	-	1	Rp 983.000	100,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	5	Rp 5.405.000	1	1.081.000			0	Rp -	-	-	1	Rp 1.081.000	100,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Rp 6.235.000	1	1.247.000			0	Rp -	-	-	1	Rp 1.247.000	100,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LPPD dan LKPJ	10	Rp 10.000.000	4	5.335.000			0	Rp -	-	-	4	Rp 5.335.000	100,00	53,35	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LAKIP dan Laporan Akhir Tahun	10	Rp 5.000.000	2	1.000.000			0	Rp -	-	-	2	Rp 1.000.000	100,00	20,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan Keuangan, Hasil Kegiatan dan Pertanggungjawaban OPD	2010	14.288.880.630	1233	Rp 9.668.373.150	325	Rp 2.599.449.754	294	Rp 2.482.340.362	90,46	95,49	1527	Rp 12.150.713.512	100,00	85,04	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1848	Rp 13.517.970.630	1167	9.190.903.150	308	Rp 2.495.219.754	278	Rp 2.384.860.362	90,26	95,58	1445	Rp 11.575.763.512	100,00	85,63	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan OPD	72	Rp 722.160.000	48	467.720.000	12	Rp 89.230.000	12	Rp 82.480.000	100,00	92,44	60	Rp 550.200.000	100,00	76,19	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	60	Rp 11.250.000	12	2.250.000			0	Rp -	-	-	12	Rp 2.250.000	100,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	5	Rp 15.000.000	1	3.000.000			0	Rp -	-	-	1	Rp 3.000.000	100,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Berupa Laporan Fungsional, Laporan Konsolidasi, Laporan Keuangan Per Semester	20	Rp 10.000.000	4	2.000.000	4	Rp 10.000.000	4	Rp 10.000.000	100,00	100,00	8	Rp 12.000.000	100,00	120,00	

NO	Urusan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 12.500.000	1	2.500.000	1	Rp 5.000.000	0	Rp 5.000.000	-	100,00	1	Rp 7.500.000	100,00	60,00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Laporan Barang Milik Daerah dan Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah	65	Rp 10.445.000	13	Rp 2.089.000	0	Rp -	0	Rp -	-	-	13	Rp 2.089.000	100,00	20,00	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp 2.775.000	1	555.000			0	Rp -	-	-	1	Rp 555.000	100,00	20,00	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Tersusunnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	60	Rp 7.670.000	12	1.534.000			0	Rp -	-	-	12	Rp 1.534.000	100,00	20,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210	Rp 93.405.000	36	Rp 10.861.000	54	Rp 49.100.000	54	Rp 49.000.000	100,00	99,80	90	Rp 59.861.000	100,00	64,09	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Layanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	Rp 18.555.000	12	3.711.000	12	Rp 5.000.000	12	Rp 5.000.000	100,00	100,00	24	Rp 8.711.000	100,00	46,95	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Terlaksananya Koordinasi, Pelayanan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	Rp 15.000.000	12	3.000.000			0	Rp -	-	-	12	Rp 3.000.000	100,00	20,00	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60	Rp 20.750.000	12	4.150.000	12	Rp 5.000.000	12	Rp 5.000.000	100,00	100,00	24	Rp 9.150.000	100,00	44,10	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30	Rp 39.100.000			30	Rp 39.100.000	30	Rp 39.000.000	100,00	99,74	30	Rp 39.000.000	100,00	99,74	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	174	Rp 621.486.000	83	Rp 462.225.516	30	Rp 257.654.200	25	Rp 136.244.200	83,33	52,88	108	Rp 598.469.716	100,00	96,30	
		Penyediaan Komponen Instalasi istrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya anggaran komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	6	Rp 32.130.000	2	7.695.000			0	Rp -	-	-	2	Rp 7.695.000	100,00	23,95	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sebagai Penunjang Operasional Kantor	6	Rp 46.800.000	3	62.507.500	5	Rp 80.250.000	0	Rp -	-	-	3	Rp 62.507.500	100,00	133,56	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Untuk Menjaga Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	6	Rp 36.000.000	2	11.019.000			0	Rp -	-	-	2	Rp 11.019.000	100,00	30,61	
		Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai Kantor	6	Rp 41.760.000	2	13.920.000			0	Rp -	-	-	2	Rp 13.920.000	100,00	33,33	

NO	Urusan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Sebagai Media Publikasi dan Fungsi Kearsipan Kantor	6	Rp 50.508.000	2	22.432.200	1	Rp 16.113.000	1	Rp 12.050.000	100,00	74,78	3	Rp 34.482.200	100,00	68,27	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Terbayarnya Biaya Berlangganan Media Koran	72	Rp 57.600.000	36	32.420.000	12	Rp 14.860.000	12	Rp 9.860.000	100,00	66,35	48	Rp 42.280.000	100,00	73,40	
		PenyeIenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	72	Rp 356.688.000	36	312.231.816	12	Rp 146.431.200	12	Rp 114.334.200	100,00	78,08	48	Rp 426.566.016	100,00	119,59	
		Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Rp 147.000.000	0	Rp -	1	Rp 172.000.000	1	Rp 99.405.000	100,00	57,79	1	Rp 99.405.000	100,00	67,62	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau angunan Lainnya yang Disediakan	1	Rp 147.000.000			1	Rp 172.000.000	1	Rp 99.405.000	100,00	57,79	1	Rp 99.405.000	100,00	67,62	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan SKPD	144	Rp 1.224.000.000	96	Rp 801.410.720	24	Rp 198.700.000	21	Rp 188.952.576	87,50	95,09	117	Rp 990.363.296	100,00	80,91	
		Penyediaan Jasa, Komunikasi Sumber Daya Air dan Iistrik	Terealisasinya Pembayaran Jasa Langganan Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	72	Rp 54.000.000	48	37.655.120	12	Rp 24.000.000	12	Rp 14.252.576	100,00	59,39	60	Rp 51.907.696	100,00	96,13	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Petugas Tenaga Kontrak OPD	72	Rp 1.170.000.000	48	763.755.600	12	Rp 174.700.000	9	Rp 174.700.000	75,00	100,00	57	Rp 938.455.600	100,00	80,21	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51	Rp 1.062.587.800	32	Rp 606.410.060	24	Rp 337.660.000	8	Rp 292.930.672	33,33	86,75	40	Rp 899.340.732	100,00	84,64	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya Kendaraan Dinas dan terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	36	Rp 1.046.587.800	29	603.210.060	9	Rp 321.390.000	7	Rp 292.240.672	77,78	90,93	36	Rp 895.450.732	100,00	85,56	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Rp 16.000.000	3	3.200.000	15	Rp 16.270.000	1	Rp 690.000	6,67	4,24	4	Rp 3.890.000	100,00	24,31	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	88,38	86,69			100,00	56,96	
											Predikat Kinerja	T	T			ST	R	

NO	Urusan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		12	Rp 12.739.590.000	5	Rp 1.705.217.858	2	Rp 4.000.000	0	Rp 4.000.000	-	50,00	5	Rp 1.709.217.858	79,55	132,98	
		Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya infrastruktur lumbung pangan pokok masyarakat	12	Rp 12.739.590.000	5	Rp 1.705.217.858	2	Rp 4.000.000	1	Rp 4.000.000	50,00	100	6	Rp 1.709.217.858	100,00	13,42	100
		*Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan)**	*Terlaksananya Pembangunan Lumbung Pangan Desa*	11	Rp 12.710.200.000	2	1.556.489.858			0	Rp -	-	-	2	Rp 1.556.489.858	100,00	12,25	
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Terlaksananya Pembangunan Lantai Jemur	1	Rp 152.728.000	3	148.728.000	2	Rp 4.000.000	2	Rp 4.000.000	100,00	100,00	5	Rp 152.728.000	100,00	100,00	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**75,00**	**100,00**			**100,00**	**41,89**	
											Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**T**	**ST**	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		147	Rp 4.071.864.900	45	Rp 4.164.642.300	16	Rp 286.390.000	6	Rp 114.240.000	50,00	44,35	51	Rp 4.278.882.300	40,05	184,62	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Stabilisasi Penyaluran dan Harga Pangan Pokok Sesuai Kebutuhan	66	Rp 2.206.768.800	29	Rp 772.211.500	6	Rp 152.390.000	6	Rp 110.240.000	100,00	72,34	35	Rp 882.451.500	62,50	28,23	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	6	Rp 205.818.500	5	47.365.000			0	Rp -	-	-	5	Rp 47.365.000	83,33	23,01	

NO	Urusan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tercapainya Target Komsumsi Pangan Masyarakat Pesawaran Per Kapita/Tahun	12	Rp 1.571.275.000	8	638.238.500	2	Rp 147.590.000	2	Rp 105.440.000	100,00	71,44	10	Rp 743.678.500	83,33	47,33	
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Meningkatnya Pemantauan Harga Pangan Utama Di Pasar	24	Rp 203.489.000	8	39.428.500	4	Rp 4.800.000	4	Rp 4.800.000	100,00	100,00	12	Rp 44.228.500	50,00	21,74	
		Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan	Terpantaunya Ketersediaan dan Penyerapan Beras/Gabah Sesuai Kebutuhan	24	Rp 226.186.300	8	47.179.500			0	Rp -	-	-	8	Rp 47.179.500	33,33	20,86	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Cadangan Pangan Kabupaten	63	Rp 3.198.824.600	10	Rp 3.194.824.600	10	Rp 134.000.000	0	Rp 4.000.000	-	2,99	10	Rp 3.198.824.600	15,98	100,00	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten Pesawaran	63	Rp 3.198.824.600	10	3.194.824.600	10	Rp 134.000.000	0	Rp 4.000.000	-	2,99	10	Rp 3.198.824.600	15,98	100,00	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Komsumsi Pangan Masyarakat Pesawaran Per Kapita/Tahun	18	Rp 1.224.892.500	6	Rp 197.606.200	0	Rp -	0	Rp -	-	-	6	Rp 197.606.200	41,67	25,98	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terpantaunya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Per Tahun	6	Rp 230.178.500	2	26.356.200			0	Rp -	-	-	2	Rp 26.356.200	33,33	11,45	
		*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal)**	*Memberdayakan masyarakat dalam penyediaan makanan dari Sumber Daya Lokal*	12	Rp 994.714.000	6	403.000.000			0	Rp -	-	-	6	Rp 403.000.000	50,00	40,51	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**49,95**			**46,95**	**41,91**	
											Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**ST**	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		7	Rp 925.000.000	7	Rp 1.532.351.400	3	Rp 29.490.000	0	Rp 3.794.000	25,00	20,98	7	Rp 1.536.145.400	116,67	44,70	
		Penanganan kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Terpetakanya daerah rawan pangan di Kabupaten Pesawaran	7	Rp 3.198.824.600	7	Rp 1.532.351.400	3	Rp 29.490.000	0	Rp 3.794.000	-	12,87	10	Rp 3.198.824.600	15,98	100,00	

NO	Urusan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat daerah tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	6	Rp 3.198.824.600	3	153.490.000	1	Rp 3.490.000	1	Rp 2.794.000	100,00	80,06	10	Rp 3.198.824.600	15,98	100,00	
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp 3.198.824.600	4	1.378.861.400	2	Rp 26.000.000	0	Rp 1.000.000	-	3,85	10	Rp 3.198.824.600	15,98	100,00	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**32,26**			**15,98**	**100,00**	
											Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**ST**	**SR**	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		30	Rp 248.678.500	19	Rp 59.837.000	0	Rp -	0	Rp -	-	-	19	Rp 59.837.000	63,33	24,06	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	30	Rp 248.678.500	19	Rp 59.837.000	0	Rp -	0	Rp -	-	-	19	Rp 59.837.000	63,33	24,06	
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30	Rp 248.678.500	19	59.837.000			0	Rp -	-	-	19	Rp 59.837.000	63,33	24,06	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**			**63,33**	**24,06**	
											Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**R**	**SR**	
								481	**3.940.443.954**	**447**	**3.376.906.810**							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												**90,84**	**67,22**	**2030**	**22.411.699.814**	**70,78**	**88,43**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												**ST**	**S**			**S**	**T**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	2.10.04.2.01	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa tanah dalam kabupaten/kota	16	348.810.000	8	146.079.500	4	22.537.800	4	22.537.800	100,00	100,00	12	168.617.300	60,00	48,34	Dinas Pertanahan dan LH
	2.10.042.01.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16	348.810.000	8	146.079.500	4	22.537.800	4	22.537.800	100,00	0,00	12	168.617.300	60,00	48,34	Bidag Pertanahan
	2.10.042.01.01.02	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43	837.605.000	11	82.199.500	0	-	0	-	0,00	0,00	11	82.199.500	25,58	9,81	Bidag Pertanahan
	2.10.042.01.01.02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	348.810.000	8	63.880.000	4	22.537.800	4	22.537.800	100,00	100,00	12	86.417.800	60,00	24,78	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00	12	**168.617.300**	60,00	48,34	
											Predikat Kinerja	ST	ST			SR	SR	
	2.10.05.2.01	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15	978.647.530	14	176.321.000	4	23.953.000	5	22.753.000	0,00	0,00	14	176.321.000	93,33	18,02	
	2.10.042.01.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15	978.647.530	14	176.321.000	0	-	0	-	0,00	0,00	14	176.321.000	93,33	18,02	
	2.10.042.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkornisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian	15	978.647.530	14	176.321.000	4	23.953.000	4	22.753.000	100,00	94,99	18	135.561.000	120,00	13,85	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
												Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	94,99	18	**176.321.000**	93,33	18,02	
												Predikat Kinerja		ST	ST			ST	SR	
	2.11.01.2.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**712**	**27.261.754.176**	**422**	**11.189.536.176**	**137**	**6.600.358.328**	**112**	**4.394.846.492**	**81,75**	**66,58**	**534**	**15.584.382.668**	**75,00**	**57,17**	
	2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	74.615.000	8	35.000.000	37	2.813.404.836	37	2.106.208.601	100,00	74,86	45	2.141.208.601	450,00	**2869,68**	
	2.11.01.2.01.06	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	74.615.000	2	5.000.000	25	2.630.474.836	25	2.582.641.059	100,00	98,18	27	2.587.641.059	270,00	3467,99	Sekretariat
	2.11.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	74.615.000	8	30.000.000	12	182.930.000	12	176.870.000	100,00	96,69	20	206.870.000	200,00	277,25	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Dearah**	% Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	**156**	**19.461.842.299**	**107**	**7.479.131.642**	**37**	**2.837.266.392**	**20**	**1.446.819.931**	**54,05**	**50,99**	**129**	**8.935.951.573**	**82,69**	**45,92**	
	2.05.2.05.01.01.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	18.023.688.889	60	6.818.415.642	25	2.651.306.392	14	1.361.129.931	56,00	51,34	74	8.179.545.573	88,10	45,38	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	1.438.153.410	47	660.716.000	12	185.960.000	6	85.690.000	50,00	46,08	53	746.406.000	73,61	51,90	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	74.615.000	2	10.000.000	0	0	0	-			2	10.000.000	FALSE	13,40	Sekretariat
1	2.05.2.05.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Dearah	%Administrasi Umum Perangkat Daerah	252	564.400.698	142	243.623.213	24	147.567.100	21	66.478.100	87,50	45,05	163	310.101.313	**64,68**	**54,94**	
	2.05.2.05.01.01.02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	219.693.619	36	74.883.500	12	93.265.300	8	12.765.300	66,67	13,69	44	87.648.800	61,11	39,90	Sekretariat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	2.05.2.05.01.01.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	35.525.500	4	7.873.200	0	0	0	-	0,00	0,00	4	7.873.200	33,33	22,16	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	72	35.525.500	24	7.895.000	0	-	0	-	0,00	0,00	24	7.895.000	33,33	22,22	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	72	41.418.665	45	25.392.100	12	1.762.800	10	1.762.800	100,00	100,00	55	27.154.900	76,39	65,56	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24	10.000.000	24	21.980.000	0	0	0	-	0,00	0,00	24	21.980.000	100,00	219,80	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.06.09	Sub Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan luar Provinsi lampung	72	441.931.033	45	180.482.913	12	52.539.000	11	51.950.000	98,88	98,88	56	232.432.913	77,78	52,59	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**150**	**3.546.865.920**	**90**	**1.995.060.876**	**24**	**378.000.000**	**22**	**362.235.750**	91,67	95,83	**112**	**2.357.296.626**	**74,67**	**66,46**	
	2.05.2.05.01.01.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	122.207.720	41	31.766.824	12	18.000.000	10	10.235.750	83,33	56,87	51	42.002.574	70,83	34,37	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.08.03	Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlenkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlenkapan Kantor	72	219.693.619	24	62.678.000	0	-	0	-	0,00	0,00	24	62.678.000	33,33	28,53	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78	3.424.658.200	49	1.963.294.052	12	360.000.000	12	352.000.000	97,78	**97,78**	61	2.315.294.052	78,21	67,61	Sekretariat
	2.05.2.05.01.01.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**144**	**3.614.030.259**	**75**	**1.436.720.445**	**15**	**424.120.000**	**12**	**413.104.110**	**97,40**	**97,40**	**87**	**1.849.824.555**	**60,42**	**51,18**	
	2.05.2.05.01.01.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72	3.574.504.759	51	1.428.000.695	15	424.120.000	12	413.104.110	97,40	97,40	63	1.841.104.805	87,50	51,51	Sekretariat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	2.05.2.05.01.01.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	39.525.500	24	8.719.750	0	0	0	-	0,00	0,00	24	8.719.750	33,33	22,06	Sekretariat
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**81,75**	**66,58**	**534**	**15.584.382.668**	**75,00**	**57,17**	
											Predikat Kinerja	T	S			S	R	
	2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	TERINTERGRITASNYA RPPLH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN	**1**	**654.892.881**	1	**654.892.881**	0	**99.160.200**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	-	-	0,00	0,00	
	2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/kota**	Terintergitasnya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	**1**	**456.540.700**	1	**310.000.000**	2	**99.160.200**	**0**	-	**0,00**	**0,00**	-	-	100,00	67,90	
	2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kab/kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1	456.540.700	1	310.000.000	2	99.160.200	0	-	0,00	0,00	1	310.000.000	100,00	67,90	B. Penataan & Penataan RPPLH
	2.11.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota**	Terintergitasnya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	**1**	**654.892.881**	1	**654.892.881**	0	-	**0**	-	**0,00**	**0,00**	-	-	100,00	100,00	
	2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1	654.892.881	1	654.892.881	0	0	0	-	0,00	0,00	1	654.892.881	100,00	100,00	B. Penataan & Penataan RPPLH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	0,00	-	-	100,00	83,95	
											Predikat Kinerja	SR	SR			ST	T	
	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	INDEKS KUALITAS AIR(IKA)	**20**	**262.050.000**	15	**101.516.000**	8	**44.127.000**	8	**41.124.000**	93,19	93,19	-	-	**0,00**	**0,00**	
	2.11.03.2.01	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	% penurunan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**20**	**262.050.000**	15	**101.516.000**	8	**44.127.000**	8	**41.124.000**	93,19	93,19	-	-	0,00	0,00	
	2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkornisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup	20	262.050.000	12	63.705.000	8	28.214.000	8	28.114.000	100,00	99,65	20	91.819.000	100,00	35,04	B. Pengendalian

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut															Pencemaran & Kerusakan LH
	2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	122.102.000	3	37.811.000	1	15.913.000	1	13.010.000	100,00	81,76	4	50.821.000	100,00	41,62	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH
												Rata-rata capaian kinerja (%)	93,19	93,19	-	-	100,00	38,33	
												Predikat Kinerja	SR	SR			S	SR	
	2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN (IKTL)	**60**	**1.131.176.700**	32	**791.201.700**	10	**353.461.000**	**10**	**339.975.000**	**100,00**	**96,18**	**42**	**1.131.176.700**	**70,00**	**100,00**	
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	% Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**60**	**1.131.176.700**	32	**791.201.700**	10	**353.461.000**	**10**	**339.975.000**	**100,00**	**96,18**	**42**	**1.131.176.700**	**70,00**	**100,00**	
	2.05.2.05.01.01.20.04	Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	60	1.131.176.700	32	791.201.700	10	353.461.000	10	339.975.000	100,00	96,18	42	1.131.176.700	70,00	100,00	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	96,18	42	1.131.176.700	70,00	100,00	
												Predikat Kinerja	ST	ST			S	ST	
	2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	PERSENTASE IZIN PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 YANG DITERBITKAN	**161**	**517.690.000**	**71**	**75.379.000**	**34**	**13.291.800**	**31**	**11.512.200**	**180,89**	**173,27**	**73**	**86.891.200**	**45,34**	**16,78**	
	2.11.05.2.01	**Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Jumlah Rekomendasi TPS Limbah B3	**85**	**212.435.000**	50	**45.035.000**	25	**6.792.800**	**23**	**5.812.200**	**92,00**	**85,56**	**73**	**50.847.200**	**85,88**	**23,94**	
	2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan	85	212.435.000	50	45.035.000	25	6.792.800	23	5.812.200	**92,00**	85,56	73	50.847.200	85,88	**23,94**	B. Pengelolaan Sampah LB3 dan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		penyimpanan sementara limbah B3	Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3															Peningkatan Kapasitas
	2.11.05.2.02	**Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	Jumlah Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**76**	**305.255.000**	21	**30.344.000**	9	**6.499.000**	8	**5.700.000**	**88,89**	**87,71**	**29**	36.044.000	**38,16**	**11,81**	
	2.11.05.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkornisai Pengelolalaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	76	305.255.000	21	30.344.000	9	6.499.000	8	5.700.000	**88,89**	**87,71**	29	36.044.000	38,16	**11,81**	B. Pengelolaan Sampah LB3 dan Peningkatan Kapasitas
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**90,44**	**86,63**	29	**36.044.000**	**38,16**	**11,81**	
											Predikat Kinerja	ST	T			SR	SR	
	2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN**	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT LINGKUNGAN	**270**	**332.050.000**	**97**	**83.088.000**	**60**	**33.887.900**	**54**	**30.972.200**	**90,00**	**91,40**	151	**101.877.200**	**55,93**	**30,68**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	**270**	**332.050.000**	**97**	**83.088.000**	**60**	**33.887.900**	**54**	**30.972.200**	**90,00**	**91,40**	151	**101.877.200**	**55,93**	**30,68**	
	2.11.06.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	270	332.050.000	40	35.610.000	40	14.282.700	30	12.183.000	75,00	85,30	70	47.793.000	25,93	14,39	B. Penataan & Penataan RPPLH
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270	332.050.000	97	83.088.000	60	19.605.200	54	18.789.200	90,00	95,84	151	101.877.200	55,93	30,68	B. Penataan & Penataan RPPLH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**90,00**	**91,40**	**151**	**101.877.200**	**55,93**	**30,68**	
											Predikat Kinerja	T	ST			SR	SR	
	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH	**61**	**4.967.923.250**	**50**	**3.705.018.750**	**13**	**1.660.018.000**	**10**	**1.667.402.800**	**76,92**	**100,44**	**70**	**5.372.421.550**	**114,75**	**108,14**	
	2.11.11.2,01	**Pengelolaan Sampah**	% Pengelolaan Sampah	**61**	**4.967.923.250**	**50**	**3.705.018.750**	**13**	**1.660.018.000**	**10**	**1.667.402.800**	**76,92**	**100,44**	**62**	**5.372.421.550**	**101,64**	**108,14**	
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	15	272.050.000	6	46.097.500	3	8.433.000	2	4.300.000	66,67	50,99	8	50.397.500	53,33	18,53	B. Pengendalian Pencemaran &

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis															Kerusakan LH
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	66	4.636.950.800	44	3.658.921.250	10	1.651.585.000	10	1.663.102.800	100,00	100,70	54	5.322.024.050	81,82	60,50	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**76,92**	**100,44**	**62**	**5.372.421.550**	**67,58**	**39,51**	
											Predikat Kinerja	**T**	**ST**			**S**	**SR**	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**8.850.795.028**						**6.531.123.492**							
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**91,54**	**91,18**	**481**	**10.144.949.852**	**88,90**	**72,18**	
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**ST**	**ST**			**T**	**S**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021,2022,2023,2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	1 2	3	**Program pencatatan sipil**		**20**	**perse n**	**184.906.850**	**12**	**94.575.925,00**	**4**	**6.872.300**	**3**	**5.982.400**	**75,00**	**87,05**	**15,00**	**156.594.250**	**37,50**	**42,34**	
2	1 2	3	pelayanan pencatatn sipil	tersedianya layanan pencatatn sipil	20	dok	184.906.850	12,00	150.611.850,00	4	6.872.300	3	5.982.400	75,00	87,05	15	156.594.250	75,00	84,69	Dinas Dukcapil
													Rata-rata capaian kinerja (%)	75,00	87,05			37,50	42,34	
													Predikat kinerja	S	T			SR	SR	
2	1 2	4	**program pengolahan informasi administrasi kependudukan**		**220**	**perse n**	**1.364.788.600**	**52**	**566.084.300,00**	**16**	**232.620.000**	**16**	**30.560.900**	**100,0 0**	**22,55**	**34,00**	**1.162.729.500**	**33,7 5**	**86,38**	
2	1 2	4	pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan	Tersedianya Profil Perkembangan Kependudukan	160	buku	574.915.500	32,00	514.500.500,00	12	60.415.000	12	25.460.900	100,00	42,14	44	539.961.400	27,50	93,92	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021,2022,2023,2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				penyajian data kependudukan																		
2	1 2		4	tersedianya layanan administrasi keendudukan	tersedianya layanan administrasi keendudukan	60	dok	789.873.100	20,00	617.668.100,00	4	172.205.000	4	5.100.000	100,00	2,96	24	622.768.100	40,00	78,84	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	22,55			33,75	86,38		
Predikat kinerja															ST	SR			SR	T		
2	**1 2**		**0 1**	**Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**2257**	**persen**	**41.280.599.045**	**620**	**15.546.103.928**	**156**	**4.518.152.375**	**-**	**4.229.921.891**	**112,12**	**91,42**	**74,45**	**19.776.025.819**	**81,04**	**0,00**	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	75	dok	150.000.000		1.452.600,00	12	5.000.000	12	535.000	100,00	10,70	39	1.987.600	52,00	1,33	Disdukcapil
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	60	lap	100.000.000		3.639.100,00	12	5.000.000	4	1.811.200	33,33	36,22	39	5.450.300	65,00	5,45	
2	1 2		0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70	bln	17.069.244.045	36	8.138.294.312,00	12	2.364.069.595	12	2.187.969.896	100,00	92,55	48	10.326.264.208	68,57	60,50	
2	1 2		0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian keuangan OPD (semesteran dan tahunan)	70	bln	12.000.000.000	36	2.462.550.000,00	12	127.320.000	12	102.560.000	100,00	80,55	48	2.565.110.000	68,57	21,38	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	400	stell	220.000.000					-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya ASN yang mengikuti diklat/bimtek dan sosialisasi	100	0rg	110.000.000					-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
				Penyedia komponen instakasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan listrik dan penenrangan kantor	60	bln	24.500.000	24	5.545.000,00	12	5.000.000	12	3.215.000	100,00	64,30	36	8.760.000	60,00	35,76	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021,2022,2023,2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	bln	5.301.855.000	36	1.422.207.406,00	12	555.167.680	12	555.167.680	100,00	100,00	48	1.977.375.086	80,00	37,30	
			Penyedia peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	60	bln	25.000.000	12	3.101.000,00			-	-	0,00	0,00	12	3.101.000	20,00	12,40	
			penyedia bahan logistik kantor	Tersedianya makan minum tamu	55	bln	100.000.000	23	7.846.000,00	11	10.000.000	11	5.780.000	100,00	57,80	34	13.626.000	61,82	13,63	
			penyedia barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	bln	40.000.000	24	9.949.000,00	11	4.347.100	-	-	0,00	0,00	24	9.949.000	40,00	24,87	
			penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan acaan	720	eks	90.000.000	288	30.370.000,00	12	10.000.000	12	10.000.000	100,00	100,00	300	40.370.000	41,67	44,86	
			penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	50	kec	750.000.000	33	534.340.819,00	12	87.998.000	12	81.257.273	100,00	92,34	45	615.598.092	90,00	82,08	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5	unit	520.000.000					-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	52	bln	500.000.000			2	15.000.000	2	13.897.200	100,00	92,65	2	13.897.200	3,85	2,78	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bln	372.000.000	36	149.379.622,00	12	57.600.000	12	51.004.904	100,00	88,55	48	200.384.526	80,00	53,87	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor	60	bln	18.000.000				-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan dan layanan umum kantor	60	bln	2.650.000.000	12	1.792.000.000,00	12	858.000.000	12	832.000.000	100,00	96,97	24	2.624.000.000	40,00	99,02	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021,2022,2023,2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin dan berkala	60	bln	1.100.000.000	36	970.090.069,00	12	413.650.000	12	384.723.738	100,00	93,01	48	1.354.813.807	80,00	123,16	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya jasa layanan perbaikan peralatan dan mesin	60	bln	40.000.000					-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/ bangunan kantor	60	bln	100.000.000	24	15.339.000,00			-	-	0,00	0,00	24	15.339.000	40,00	15,34	
												-	-	0,00	0,00	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)														94,87	77,36			42,45	30,18	
Predikat kinerja														ST	T			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**4.757.644.675**	**4.266.465.191**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)														**89,96**	**62,32**			**79,00**	**75,64**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)														T	R			T	T	

NO	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	2.13.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**4.488**		**18.466.074.700**	**663**	**3.323.524.480**	**790**	**3.686.108.813**	**675**	**3.675.962.456**	**85,44%**	**99,72 %**	**1338**	**6.999.486.936**	**29,81 %**	**37,90%**	**Dinas PMD**
	2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan**	**36**		**50.000.000**	**7**	**10.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	0,00%	0,00%	**7**	**10.000.000**	19,44%	**20,00%**	DPMD

NO	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			Yang Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi																
	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	6	Laoran	25.000.000	**1**	5.000.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	5.000.000	16,67%	20,00%	DPMD
	2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Laoran	25.000.000	**6**	5.000.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	6	5.000.000	20,00%	20,00%	DPMD
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00%	0,00%	7	20.000.000	18,33%	20,00%	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
	2.13.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi**	**1992**		**14.597.234.200**	**328**	**2.731.337.730**	**426**	**3.008.163.013**	366	**3.031.072.956**	85,92%	100,76 %	694	**5.762.410.686**	34,84%	**39,48%**	DPMD
	2.13.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai	1.260	org	13.535.280.600	**308**	2.603.175.830	322	2.879.093.013	276	2.909.272.956	85,71%	101,05 %	584	5.512.448.786	46,35%	40,73%	DPMD
	2.13.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan	720	org	1.033.506.000	**20**	128.161.900	84	121.270.000	70	114.000.000	83,33%	94,01%	90	242.161.900	12,50%	23,43%	DPMD
	2.13.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	12	lap	28.447.600	**-**	-	20	7.800.000	20	7.800.000	100,00 %	100,00 %	20	7.800.000	166,67 %	27,42%	DPMD
												Rata-rata capaian kinerja (%)	89,68%	98,35%	694	5.762.410.686	75,17%	30,53%	
												Predikat kinerja	T	ST			T	SR	

NO	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	2.13.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**504**		**925.884.000**	**48**	**128.053.900**	**72**	**126.814.500**	**72**	**125.354.500**	**100,00 %**	**0,00%**	**120**	**253.408.400**	**23,81 %**	**27,37%**	**DPMD**
	2.13.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik	72	bln	22.500.000	-	-	12	1.435.000	12	1.435.000	100,00 %	100,00 %	12	1.435.000	16,67%	6,38%	DPMD
	2.13.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulus kantor tersedia	72	bln	124.140.000	12	20.174.300	12	14.466.500	12	14.418.500	100,00 %	99,67%	24	34.592.800	33,33%	27,87%	DPMD
	2.13.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	72	bln	23.616.000	-	-	12	2.159.400	12	2.159.400	100,00 %	100,00 %	12	2.159.400	16,67%	9,14%	DPMD
	2.13.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah konsumsi peserta rapat	72	bln	106.920.000	-	-			0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DPMD
	2.13.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kesekretariatan	72	bln	97.326.000	12	20.000.000	12	3.421.600	12	3.421.600	100,00 %	100,00 %	24	23.421.600	33,33%	24,07%	DPMD
	2.13.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah referensi perundang-undangan	72	bln	201.840.000	12	10.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	100,00 %	100,00 %	24	70.000.000	33,33%	34,68%	DPMD
	2.13.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	72	bln	349.542.000	12	77.879.600	12	45.332.000	12	43.920.000	100,00 %	96,89%	24	121.799.600	33,33%	34,85%	DPMD
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00 %	99,43%	120	253.408.400	23,81%	19,57%	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
	2.13.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**50**	**-**	**227.350.000**	**12**	**20.000.000**	**12**	**37.350.000**	**7**	**35.825.000**	**58,33%**	**95,92 %**	**19**	**55.825.000**	**38,00 %**	**24,55%**	**DPMD**
	2.13.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14	Unit	167.350.000			4	17.350.000	4	15.825.000	100,00 %	91,21%	4	15.825.000	28,57%	9,46%	DPMD
	2.13.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36	bln	60.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	3	20.000.000	25,00%	100,00 %	15	40.000.000	41,67%	66,67%	DPMD
												Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50%	50,00%	15	40.000.000	20,83%	33,33%	

NO	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
													Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
	2.13.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1512**		**1.684.800.000**	**220**	**249.229.500**	**220**	**233.400.000**	**183**	**214.572.600**	**83,18%**	**91,93 %**	**403**	**463.802.100**	**26,65 %**	**27,53%**	**DPMD**
	2.13.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bln	124.800.000	**12**	9.249.500	12	24.000.000	9	19.172.600	75,00%	79,89%	21	28.422.100	29,17%	22,77%	DPMD
	2.13.01.2.08.04	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa Pelayanan Umum Kantor	1440	Org	1.560.000.000	208	239.980.000	208	209.400.000	174	195.400.000	83,65%	93,31%	382	435.380.000	26,53%	27,91%	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	79,33%	86,60%	21	28.422.100	27,85%	25,34%	
													Predikat kinerja	S	T			SR	SR	
	2.13.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**444**		**1.208.156.500**	**60**	**184.903.350**	**72**	**280.381.300**	**54**	**269.137.400**	**75,00%**	**95,99 %**	**114**	**454.040.750**	**25,68 %**	**37,58%**	**DPMD**
	2.13.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara	300	unit	962.156.500	60	184.903.350	60	271.481.300	45	260.877.400	75,00%	96,09%	105	445.780.750	35,00%	46,33%	DPMD
	2.13.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang terpelihara	72	bln	126.000.000	0	-	12	8.900.000	9	8.260.000	75,00%	92,81%	9	8.260.000	12,50%	6,56%	DPMD
	2.13.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor	72	bln	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DPMD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	75,00%	94,45%	**114**	**454.040.750**	**23,75 %**	**26,44%**	
													Predikat kinerja	**T**	**ST**			**SR**	**SR**	
	2.13.04.	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**73774**		**15.953.130.000**	**14048**	**1.846.214.948**	**14262**	**3.245.243.342**	14179	**3.130.265.512**	**99,42%**	**96,46 %**	28227	**4.976.480.460**	**38,26 %**	**31,19%**	DPMD
	2.13.04.2.	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**73774**		**15.953.130.000**	**14048**	**1.846.214.948**	**14262**	**3.245.243.342**	**14179**	**3.130.265.512**	**99,42%**	**96,46 %**	**28227**	**4.976.480.460**	**38,26 %**	**31,19%**	**DPMD**

NO	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	2.13.04.2.01.01.	*Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	Jumlah Rapat Koordinasi Kepala Desa yang dilaksanakan	*15*	*kali*	*1.197.950.000*	*2*	*208.860.000*	2	115.738.000	2	86.688.000	100,00 %	74,90%	4	295.548.000	26,67%	24,67%	DPMD
	2.13.04.2.01.03.	*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*	Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan	*30*	*dok*	*235.000.000*	*0*	-	1	3.125.000	1	3.125.000	100,00 %	100,00 %	1	3.125.000	3,33%	1,33%	DPMD
	2.13.04.2.01.04.	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	Jumlah aparatur desa yang terlatih dalam pengelolaan keuangan desa	*720*	*desa*	*554.500.000*	*4*	*20.000.000*	148	14.163.000	148	5.981.000	100,00 %	42,23%	152	25.981.000	21,11%	4,69%	DPMD
	2.13.04.2.01.05.	*Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*	Jumlah Kepala Desa serta Aparatur desa yang mengikuti pelatihan	496	keg	695.000.000	4	10000000	4	1.039.384.800	3	1.039.077.564	75,00%	99,97%	7	1.049.077.564	1,41%	150,95 %	DPMD
	2.13.04.2.01.08.	*Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa*	Jumlah BUMDes yang Terbina	*720*	*desa*	*340.000.000*	*148*	*8.000.000*	148	15.655.300	148	15.655.300	100,00 %	100,00 %	296	23.655.300	41,11%	6,96%	DPMD
	2.13.04.2.01.09.	*Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*	Jumlah Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran	*496*	*desa*	*2.996.000.000*	*0*	-	0		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DPMD
	2.13.04.2.01.11.	*Fasilitasi Penyusunan Profil Desa*	Jumlah desa yang Terbina dan Terdata se Kabupaten Pesawaran dalam Sistem Informasi Profil Desa	*5*	*dok*	*230.000.000*	*0*	-	1	2.830.000	0	2.830.000	0,00%	100,00 %	0	2.830.000	0,00%	1,23%	DPMD
	2.13.04.2.01.12.	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa dan Aparatur Desa yang memperoleh tanggungan BPJS	69.120	org/bln	6.955.680.000	13.890	1.599.354.948	13512	1.806.389.042	13512	1.731.950.448	100,00 %	95,88%	27402	3.331.305.396	39,64%	47,89%	DPMD

NO	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			Ketenagakerjaan di Kabupaten Pesawaran																
	2.13.04.2.01.13.	*Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*	Jumlah Data Inventaris Aset dan Kekayaan Desa se-Kabupaten Pesawaran	*720*	*desa*	*375.000.000*	*0*	-	148	3.765.000	111	3.765.000	75,00%	100,00 %	111	3.765.000	15,42%	1,00%	DPMD
	2.13.04.2.01.14.	*Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD*	Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Terbina	*720*	*desa*	*570.000.000*	*0*	-	148	232.400.000	148	232.400.000	100,00 %	100,00 %	148	232.400.000	20,56%	40,77%	DPMD
	2.13.04.2.01.16.	*Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa*	Jumlah Laporan Penyenggelaraan Pemerintahan Desa	*720*	*desa*	*340.000.000*	*0*	-	148	3.546.000	104	3.546.000	70,27%	100,00 %	104	3.546.000	14,44%	1,04%	DPMD
	2.13.04.2.01.18.	*Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa yang dilaksanakan baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	*12*	*event*	*1.464.000.000*	*0*	-	2	8.247.200	2	5.247.200	100,00 %	63,62%	2	5.247.200	16,67%	0,36%	DPMD
												Rata-rata capaian kinerja (%)	83,66%	88,78%	28227	4.976.480.460	16,70%	23,41%	
												Predikat kinerja	T	T			SR	SR	
	2.13.05.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**1455**		**2.532.737.000**	**2**	**99.460.000**	**152**	**276.734.000**	**152**	**224.882.200**	**100,00 %**	81,26%	**154**	**324.342.200**	**10,58 %**	**12,81%**	**DPMD**
	2.13.05.2.01.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat**		**1455**		**2.532.737.000**	**2**	**99.460.000**	**152**	**276.734.000**	**152**	**224.882.200**	**100,00 %**	81,26%	**154**	**324.342.200**	**10,58 %**	**12,81%**	**DPMD**

NO	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
	2.13.05.2.01.02.	*Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan*	Jumlah pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia (KPM)	720	desa	300.000.000	**0**	-	0		0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DPMD
	2.13.05.2.01.03.	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	Jumlah Pokjanal/ Pokja di Kabupaten Pesawaran yang terbina	*720*	*desa*	*300.000.000*	*0*	-	148	99.375.000	148	93.449.000	100,00 %	94,04%	148	93.449.000	20,56%	31,15%	DPMD
	2.13.05.2.01.06.	*Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	Jumlah Pembinaan dan Keikutsertaan dalam TTG Tingkat Provinsi dan Nasional	*5*	*keg*	*345.000.000*	*2*	*99.460.000*	2	57.879.000	2	16.629.000	100,00 %	28,73%	4	116.089.000	80,00%	33,65%	DPMD
	2.13.05.2.01.07.	*Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	Jumlah Kegiatan BBGRM tingkat Kabupaten dan Keikutsertaan Tingkat Provinsi	*10*	*event*	*1.587.737.000*	*0*	-	2	119.480.000	2	114.804.200	100,00 %	96,09%	2	114.804.200	20,00%	7,23%	DPMD
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00 %	72,95%	154	324.342.200	30,14%	18,01%	
												Predikat kinerja	ST	T			SR	SR	
	3.32.03.	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**75**		**1.006.000.000**	**12**	**17.960.000**	**12**	**4.747.000**	**12**	**4.747.000**	100,00 %	100,00 %	**24**	**22.707.000**	**32,00 %**	**2,26%**	**DPMD**
	3.32.03.2.1.	**Penataan Pesebaran Penduduk yang Berasl dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**75**		**1.006.000.000**	**12**	**17.960.000**	**12**	**4.747.000**	**12**	**4.747.000**	100,00 %	100,00 %	**24**	**22.707.000**	**32,00 %**	**2,26%**	**DPMD**
	3.32.03.2.01.01.	*Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan*	Jumlah calon peserta transmigrasi	25	bulan	264.412.000	12	17.960.000	12	4.747.000	12	4.747.000	100,00 %	100,00 %	24	22.707.000	96,00%	8,59%	DPMD

NO	Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Transmigrasi yang Berasal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
	3.32.03.2.01.04.	*Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah peserta transmigrasi yang diberangkatkan	*25*	kk	*449.289.000*	*0*	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DPMD
	3.32.03.2.01.05.	*Penyuluhan Transmigrasi (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)*	Jumlah calon peserta transmigrasi yang mendapat pelatihan	*25*	kk	*292.299.000*	*0*	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	DPMD
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00 %	100,00 %	24	22.707.000	32,00%	2,86%	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**37.957.941.700**		**5.287.159.428**		**7.212.833.155**		**7.035.857.168**				**12.323.016.596**			
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)												**80,02**	**86,32**			**82,31**	**79,75**	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)												**T**	**T**			**R**	**T**	

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2 15	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**3771**	**62.104.751.606**	**790**	**9.746.444.051**	**856**	**5.167.384.432**	**846**	**4.949.506.141**	**98,39**	**93,33**	**1636**	**14.695.950.192**	**43,38**	**23,66**	**Dinas Perhubungan**
	2 15	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**15**	**13.817.600**	**9**	**6.933.000**	**6**	**6.884.600**	**6**	**5.899.600**	**100,00**	**85,69**	**15**	**12.832.600**	**100,00**	**92,87**	**Sekretariat Dinas**

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Perangkat Daerah															
	2 15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	10.383.600	5	3.499.000	6	6.884.600	6	5.899.600	100,00	85,69	11	9.398.600	100,00	90,51	Sekretariat Dinas
	2 15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	3.434.000	4	3.434.000		-	0	-	0,00	-	4	3.434.000	100,00	100,00	Sekretariat Dinas
	2 15	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan**	**2172**	**25.053.976.875**	**455**	**3.018.770.556**	**522**	**3.540.926.832**	**522**	**3.377.719.299**	**100,00**	**95,39**	**977**	**6.396.489.855**	**44,98**	**25,53**	**Sekretariat Dinas**
	2 15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100	17.258.261.155	443	2.837.070.556	510	3.385.046.832	510	3.235.339.299	100,00	95,58	953	6.072.409.855	45,38	35,19	Sekretariat Dinas
	2 15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	7.795.715.720	12	181.700.000	12	155.880.000	12	142.380.000	100,00	91,34	24	324.080.000	33,33	4,16	Sekretariat Dinas
	2 15	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**360**	**638.609.901**	**122**	**88.942.500**	**124**	**88.033.000**	**114**	**81.526.000**	**91,94**	**92,61**	**236**	**170.468.500**	**65,56**	**26,69**	**Sekretariat Dinas**
	2 15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	180.000.000	12	30.088.500	12	38.876.000	12	38.876.000	100,00	100,00	24	68.964.500	33,33	38,31	Sekretariat Dinas
	2 15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	72	144.000.000	12	17.305.000	12	17.701.000	12	17.701.000	100,00	100,00	24	35.006.000	33,33	24,31	Sekretariat Dinas

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Penggandaan yang Disediakan															
	2 1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	144	14.664.000	72	5.600.000	72	9.064.000	72	5.800.000	100,00	63,99	144	11.400.000	100,00	77,74	Sekretariat Dinas
	2 1 5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	299.945.901	26	35.949.000	28	22.392.000	18	19.149.000	64,29	85,52	44	55.098.000	61,11	18,37	Sekretariat Dinas
	2 1 5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat**	**144**	**33.584.860.496**	**24**	**6.149.200.086**	**24**	**933.880.000**	**24**	**919.517.294**	**100,00**	**98,46**	**48**	**7.068.717.380**	**33,33**	**21,05**	**Sekretariat Dinas**
	2 1 5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	32.661.860.496	12	5.226.200.086	12	38.880.000	12	24.517.294	100,00	63,06	24	5.250.717.380	33,33	16,08	Sekretariat Dinas
	2 1 5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	923.000.000	12	923.000.000	12	895.000.000	12	895.000.000	100,00	100,00	24	1.818.000.000	33,33	196,97	Sekretariat Dinas
	2 1 5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara**	**1080**	**2.813.486.734**	**180**	**482.597.909**	**180**	**597.660.000**	**180**	**564.843.948**	**100,00**	**94,51**	**360**	**1.047.441.857**	**33,33**	**37,23**	**Sekretariat Dinas**
	2 1 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	1080	2.813.486.734	180	482.597.909	180	597.660.000	180	564.843.948	100,00	94,51	360	1.047.441.857	33,33	37,23	Sekretariat Dinas

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
											Rata-rata capaian kinerja (%)	98,39	93,33			55,44	40,67	
											Predikat kinerja	ST	ST			R	SR	
2	2 15	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas**	**420**	**1.798.190.050**	**55**	**237.178.400**	**72**	**6.639.869.192**	**36**	**5.714.744.522**	**50,00**	**86,07**	**91**	**5.951.922.922**	**21,67**	**331,00**	**Bidang LLA**
	2 15	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Presentase Terpasangnya Perlengkapan Lalu Lintas Jalan dan Pemeliharaannya yang ada di Kabupaten**	**348**	**960.000.000**	**43**	**98.553.400**	**60**	**6.374.669.192**	**60**	**5.451.384.522**	**100,00**	**85,52**	**103**	**5.549.937.922**	**29,60**	**578,12**	**Bidang LLA**
	2 15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	348	960.000.000	43	98.553.400	60	6.374.669.192	60	5.451.384.522	100,00	85,52	103	5.549.937.922	29,60	578,12	Bidang LLA
	2 15	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**72**	**838.190.050**	**12**	**138.625.000**	**12**	**265.200.000**	**12**	**263.360.000**	**100,00**	**99,31**	**24**	**401.985.000**	**33,33**	**47,96**	**Bidang LLA**
	2 15	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	72	838.190.050	12	138.625.000	12	265.200.000	12	263.360.000	100,00	99,31	24	401.985.000	33,33	47,96	Bidang LLA
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	92,41			31,47	313,04	
											Predikat kinerja	ST	ST			SR	ST	

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	2 15	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase orang/barang melalui dermaga per tahun**	**30**	**357.882.000**	**13**	**78.930.000**	**14**	**47.427.800**	**13**	**40.698.000**	**92,86**	**85,81**	**26**	**119.628.000**	**86,67**	**33,43**	**26**
	2 15	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Tersedianya Alur Penyeberangan Rakyat**	**24**	**113.678.000**	**12**	**72.930.000**	**12**	**40.748.000**	**12**	**34.048.000**	**100,00**	**83,56**	**24**	**106.978.000**	**100,00**	**94,11**	**Bidang LLA**
3	2 15	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendaliam dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	24	113.678.000	12	72.930.000	12	40.748.000	12	34.048.000	100,00	83,56	24	106.978.000	100,00	94,11	Bidang LLA
	2 15	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Presentase Pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**6**	**244.204.000**	**1**	**6.000.000**	**2**	**6.679.800**	**1**	**6.650.000**	**50,00**	**99,55**	**2**	**12.650.000**	**33,33**	**5,18**	**Bidang LLA**
	2 15	Fasilitasi Pemenuhan	Jumlah Dokumen Pemenuhan	6	244.204.000	1	6.000.000	2	6.679.800	1	6.650.000	50,00	99,55	2	12.650.000	33,33	5,18	Bidang LLA

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal															
												Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	91,56			66,67	49,64	
												Predikat kinerja		S	ST			S	SR	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**942**	**11.854.681.424**	**JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM**				**1753**	**20.767.501.114**			
												TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		91,13	92,43			87,21	73,86	
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		ST	ST			T	S	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	*2*	*16*	***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota***		***100***	***%***	***26.136.108.542***	***158***	***13.571.287.504***	***98***	***5.207.303.917***	***167***	***5.014.415.198***	***600,00***	***546,50***	***361***	***18.585.702.702***	***232,49***	***381,92***	***Dinas Kominfo***
	2	*16*	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***100***	***%***	***21.018.619.142***	***26***	***10.655.038.961***	***14***	***3.409.063.734***	***14***	***3.370.944.419***	***100,00***	***98,88***	***40***	***14.025.983.380***	***27,78***	***60,96***	
	2	*16*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	bulan	17.402.099.142	14	8.768.748.961	14	3.409.063.734	14	3.370.944.419	100,00	98,88	28	12.139.693.380	38,89	69,76	
	2	*16*	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	3.616.520.000	12	1.886.290.000				-			12	1.886.290.000	16,67	52,16	
	2	**16**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**%**	**7.000.000**	**12**	**-**	**24**	**2.183.400**	**42**	**2.046.666**	**100,00**	**93,22**	**54**	**2.046.666**	**37,50**	**29,24**	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
	2	16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72	bulan	3.500.000	12	-	12	992.000	21	868.966	100,00	87,60	33	868.966	45,83	24,83	
	2	16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72	bulan	3.500.000		-	12	1.191.400	21	1.177.700	100,00	98,85	21	1.177.700	29,17	33,65	
	2	***16***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***100***	***%***	***2.799.418.100***	***84***	***2.183.501.725***	***36***	***25.068.783***	***39***	***25.068.783***	***100,00***	***100,00***	***123***	***2.208.570.508***	***24,40***	***41,57***	
	2	16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	72	bulan	22.775.000	12	7.775.000				-	0,00	-	12	7.775.000	16,67	34,14	
	2	16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK Belanja Pakai Habis	72	bulan	174.750.000	12	75.277.000	12	5.186.003	12	5.186.003	100,00	100,00	24	80.463.003	33,33	46,04	
	2	16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	72	bulan	16.429.700	12	3.377.000				-	0,00	-	12	3.377.000	16,67	20,55	
	2	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minuman Tamu	72	bulan	24.996.200	12	8.391.100				-	0,00	-	12	8.391.100	16,67	33,57	
	2	16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Keperluan Kantor	72	bulan	60.467.200	12	22.785.800	12	5.491.180	12	5.491.180	100,00	100,00	24	28.276.980	33,33	46,76	
	2	16	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Rapat antar SKPD	72	bulan	400.000.000	12	39.140.128	12	14.391.600	12	14.391.600	100,00	100,00	24	53.531.728	33,33	13,38	
	2	16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Operasional Kantor PIPPD di Jakarta	72	bulan	2.100.000.000	12	2.026.755.697			3	-	0,00	-	15	2.026.755.697	20,83	96,51	
	2	***16***	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***100***	***%***	663.790.000	24	-	24	732.868.000	24	679.048.934	100,00	76,78	48	679.048.934	33,33	116,31	
	2	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	bulan	46.790.000	12	-	12	115.868.000	12	62.048.934	100,00	53,55	24	62.048.934	33,33	132,61	
	2	16	Pengadaan Gedung Kantor Bangunan Lainnya	TersedianyaPengadaan Gedung Kantor Bangunan Lainnya	72	bulan	617.000.000	12	-	12	617.000.000	12	617.000.000	100,00	100,00	24	617.000.000	33,33	100,00	
	2	***16***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		***100***	***%***	***837.540.000***	***24***	***82.311.933***	***24***	***710.420.000***	***24***	***610.456.471***	***100,00***	***78,07***	***48***	***692.768.404***	***76,14***	***76,14***	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
	2 16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	72	bulan	222.000.000	12	82.311.933	12	82.000.000	***12***	*55.646.471*	100,00	67,86	24	***137.958.404***	***62,14***	***62,14***	
	2 16	Penyedia Jasa Pelayan Umum Kantor	Terlaksananya Penyedia Jasa Pelayan Umum Kantor	72	bulan	615.540.000	12	-	12	628.420.000	***12***	*554.810.000*	100,00	88,29	24	***554.810.000***	***90,13***	***90,13***	
	2 16	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***100***	***%***	***1.480.531.300***	***24***	***650.434.885***	***24***	***327.700.000***	***24***	***326.849.925***	***100,00***	***99,55***	***48***	***977.284.810***	***33,33***	***57,71***	
	2 16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Operasional / BBM Kendaraan Dinas PP dan PA : roda 4 (3 Unit) roda 2 (2 Unit)	72	bulan	1.225.531.300	12	550.434.885	12	312.700.000	12	311.949.925	100,00	99,76	24	862.384.810	33,33	70,37	
	2 16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Halaman dan Bangunan Gedung Kantor	72	bulan	255.000.000	12	100.000.000	12	15.000.000	12	14.900.000	100,00	99,33	24	114.900.000	33,33	45,06	
												Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	91,08			38,75	63,65	
												Predikat Kinerja	ST	ST			SR	SR	
2	***2 16***	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik**	***100***	***%***	***24.215.020.000***	***36***	***11.678.021.497***	***12***	***4.999.878.700***	***36***	***4.568.744.397***	***300,00***	***237,04***	***96***	***16.388.448.894***	***133,33***	***299,09***	
	2 16	***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***100***	***%***	***24.215.020.000***	***36***	***11.678.021.497***	***12***	***4.999.878.700***	***36***	***4.568.744.397***	***300,00***	***237,04***	***96***	***16.388.448.894***	***133,33***	***299,09***	
	2 16	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	72	bulan	500.000.000	12	78.842.800				-	0,00	-	12	78.842.800	16,67	15,77	
	2 16	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	72	bulan	3.015.000.000	12	831.870.000	12	344.962.200	12	271.594.597	100,00	78,73	24	1.103.464.597	33,33	36,60	
	2 16	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	72	bulan	2.726.990.400	12	112.000.000	12	4.397.290.000	12	4.131.338.300	100,00	93,95	24	4.243.338.300	33,33	155,61	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
	2	16	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	72	bulan	500.000.000	12	29.683.000	12	257.626.500	12	165.811.500	100,00	64,36	24	195.494.500	33,33	39,10	
	2	16	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Layanan Hubungan Media	72	bulan	20.700.020.000	12	10.767.308.697			-	-			12	10.767.308.697	16,67	52,02	
													Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	79,01			26,67	59,82	
													Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
	2	**16**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**-Meningkatnya penerapan SPBE (e-Government)**	***100***	**%**	**13.060.160.100**	**108**	**7.023.774.245**	**48**	**687.850.000**	**24**	**506.656.040**	**100,00**	**59,18**	**108**	**7.530.430.285**	**116,67**	**344,26**	
	2	***16***	***Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota***		***100***	***%***	***11.728.228.100***	***48***	***6.544.793.218***	***48***	***687.850.000***	***24***	***506.656.040***	***100,00***	***59,18***	***48***	***7.051.449.258***	***33,33***	***56,94***	
	2	16	Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dab Sub Domain dalam Penelenggara Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penelenggara Pemerintah Daerah	72	bulan	366.279.650	12	184.912.776	12	25.890.000	12	11.065.275	100,00	42,74	24	195.978.051	33,33	53,51	
	2	16	Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Terselenggaranya SPBE di lingkup Pemerintah Daerah Pesawaran	72	bulan	3.340.000	12	-	12	3.340.000	12	3.338.000	100,00	99,94	24	3.338.000	33,33	99,94	
	2	16	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Manajemen SPBE	72	bulan	3.318.000	12	-	12	3.318.000	12	3.199.500	100,00	96,43	24	3.199.500	33,33	96,43	
	2	16	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	72	bulan	11.355.290.450	12	6.359.880.442	12	655.302.000	12	495.590.765	100,00	75,63	24	6.855.471.207	33,33	60,37	
	2	***16***	***Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***		***100***	***%***	1.331.932.000	60	478.981.027	0	-	-	-	0,00	-	60	478.981.027	83,33	287,32	
	2	16	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	*72*	bulan	39.440.000	12	39.436.000				-	0,00	-	12	39.436.000	16,67	99,99	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
	2	16	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	72	bulan	47.961.000	12	47.820.500				-	0,00	-	12	47.820.500	16,67	99,71	
	2	16	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	72	bulan	780.000.000	12	290.695.000			-	-	0,00	-	12	290.695.000	16,67	37,27	
	2	16	Pengelolaan Government cief Information Officer(GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government cief Information Officer(GCIO)	72	bulan	345.000.000	12	62.493.127				-	0,00	-	12	62.493.127	16,67	18,11	
	2	16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistemSPBE	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistemSPBE	72	bulan	119.531.000	12	38.536.400			-	-	0,00	-	12	38.536.400	16,67	32,24	
													Rata-Rata Capaian Kinerja	0,00	-			16,67	57,46	
													Predikat Kinerja	SR	SR			SR	R	
3	***2***	***20***	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggaranya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Kabupaten/Kota**	***100***	***%***	***22.155.800***	***12***	***-***	***12***	***22.155.800***	***12***	***18.015.800***	***100,00***	***81,31***	***24***	***18.015.800***	***33,33***	***81,31***	
	2	***20***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**		***100***	***%***	***22.155.800***	***12***	***-***	***12***	***22.155.800***	***12***	***18.015.800***	***100,00***	***81,31***	***24***	***18.015.800***	***33,33***	***81,31***	
	2	20	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	TerlaksananyaPengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	72	bulan	22.155.800	12	-	12	22.155.800	12	18.015.800	100,00	81,31	24	18.015.800	33,33	81,31	
													Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	81,31			33,33	81,31	
													Predikat Kinerja	ST	T			SR	T	
3	***2***	***20***	**PROGRAM PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL DAERAH**	**TERLAKSANANYA PENYELENGGARA STATISTIK DAERAH**	***100***	***%***	***1.109.630.000***	***36***	***205.349.300***	***12***	***156.350.000***	***12***	***1.660.000***	***100,00***	***44,96***	***48***	***207.009.300***	***66,67***	***66,66***	
	2	***20***	**Penyelenggara Statistik Sektoral di**		***100***	***%***	***1.109.630.000***	***36***	***205.349.300***	***12***	***156.350.000***	***12***	***1.660.000***	***100,00***	***44,96***	***48***	***207.009.300***	***66,67***	***66,66***	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
		Lingkup Daerah Kab/ kota																	
	2 20	Koordinasi dan Sinkronissi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronissi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	72	bulan	250.000.000	12	68.924.400		-	-				12	68.924.400	16,67	27,57	
	2 20	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yangTerintegrasi	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yangTerintegrasi	72	bulan	360.000.000	12	61.485.000		-	-	-			12	61.485.000	16,67	17,08	
	2 20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	72	bulan	348.000.000	12	74.939.900	12	4.720.000	12	1.660.000	100,00	35,17	24	76.599.900	33,33	22,01	
	2 20	Peningkatan Kualitas Data Statistik sektoral	Meningkatnya data Statistik sektoral	72	bulan	146.240.000	12	-	12	146.240.000	12	145.800.000	100,00	99,70	24	145.800.000	33,33	99,70	
	2 20	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terselenggaranya Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	72	bulan	5.390.000	12	-	12	5.390.000	12	-	100,00	-	24	-	33,33	0,00	
												Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	44,96			26,67	33,27	
												Predikat Kinerja	ST	SR			R	R	
	2 21	***PROGRAM PENYELENGGARA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI***	***TERLAKSANANYA PENYELENGGARA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI***	***100***	***%***	***230.000.000***	***12***	***40.831.000***	***12***	***4.715.000***	***12***	***3.315.000***	***100,00***	***70,31***	***24***	***44.146.000***	***33,33***	***19,19***	
	2 21	***Penyelenggara persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota***		***100***	***%***	***230.000.000***	***12***	***40.831.000***	***12***	***4.715.000***	***12***	***3.315.000***	***100,00***	***70,31***	***24***	***44.146.000***	***33,33***	***19,19***	
	2 21	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	72	bulan	230.000.000	12	40.831.000	12	4.715.000	12	3.315.000	100,00	70,31	24	44.146.000	33,33	19,19	
												Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	70,31			33,33	19,19	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
											Predikat Kinerja	ST	S			SR	SR	
					64.750.918.642		32.519.263.546		11.056.097.617		10.094.790.635				42.614.054.181			
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)									100,00	73,34			91,22	83,97	
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)									ST	S			SR	R	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
	2,18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**29.774.688.373**		**8.356.654.383**		**3.615.277.590**									
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.075.622.082**		**7.155.287.423**		**3.553.248.290**		**3.250.581.773**							
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**17.371.219.255**		**5.153.920.062**		**2.785.885.990**		**2.615.664.052**				**7.769.584.114**			
1	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	14.607.873.022	37	4.796.629.562	19	2.698.142.990	19	2.528.061.052	100,00	93,70	56	7.324.690.614	66,67	50,14	DPMPTSP
2	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106	1.311.238.228	40	333.940.500	18	84.284.000	18	84.144.000	100,00	99,83	58	418.084.500	54,72	31,88	DPMPTSP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	762	1.452.108.005	10	23.350.000	4	3.459.000	4	3.459.000	100,00	100,00	14	26.809.000	1,84	1,85	DPMPTSP
	2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**30.000.000**		**54.121.400**		**3.501.900**		3.501.500							
4	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	30.000.000	8	54.121.400	3	3.501.900	3	3.501.500	100,00	99,99	11	57.622.900	73,33	192,08	DPMPTSP
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2.219.553.383**		**649.640.600**		**113.419.400**		113.341.400				762.982.000			
5	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	228	309.512.987	72	114.077.200	40	28.723.000	40	28.645.000	100,00	99,73	112	142.722.200	49,12	46,11	DPMPTSP
6	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	64	317.930.391	20	90.629.300	14	12.874.400	14	12.874.400	100,00	100,00	34	103.503.700	53,13	32,56	DPMPTSP
7	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	1179	140.002.000	350	36.100.000	250	22.000.000	250	22.000.000	100,00	100,00	600	58.100.000	50,89	41,50	DPMPTSP
8	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	762	1.452.108.005	211	408.834.100	141	49.822.000	141	49.822.000	100,00	100,00	352	458.656.100	46,19	31,59	DPMPTSP
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.365.923.853**		**693.779.961**		**299.000.000**		278.895.821		93,28		972.675.782			
9	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	18	443.230.260	7	123.779.961	4	51.000.000	4	30.895.821	100,00	60,58	11	154.675.782	61,11	34,90	DPMPTSP
10	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	126	1.922.693.593	51	570.000.000	20	248.000.000	20	248.000.000	100,00	100,00	71	818.000.000	56,35	42,54	DPMPTSP
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.438.932.554**		**491.237.200**		**301.000.000**		196.279.000							
11	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan	18	1.438.932.554	7	491.237.200	3	291.000.000	3	196.279.000	100,00	67,45	10	687.516.200	55,56	47,78	DPMPTSP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan pajak dan perizinannya															
12	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	-	-	1	10.000.000	1	9.763.000	100,00	97,63					
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**75,49**			**49,38**	**48,07**	
												Predikat kinerja	**ST**	**T**			**SR**	**SR**	
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**1.632.110.500**		**280.120.700**		**8.836.700**		177.695.300								
	2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**1.632.110.500**		**280.120.700**		**8.836.700**		177.695.300								
13	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	21	1.632.110.500	3	280.120.700	2	177.695.300	2	177.695.300	100,00	100,00	5	457.816.000	23,81	28,05	DPMPTSP
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**100,00**			**23,81**	**28,05**	
												Predikat kinerja	**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	
	2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**1.373.915.526**		**163.795.400**		**53.192.600**		**46.142.600**				**209.938.000**			
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**			**1.373.915.526**		**163.795.400**		**53.192.600**		46.142.600				209.938.000			
14	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusahaa	6	376.668.290	556	82.031.700	473	28.476.800	473	28.176.800	100,00	98,95	1029	110.208.500	171,50	29,26	DPMPTSP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Terintegrasi secara Elektronik	Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik															
15	2.18.04.2.01.00 08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	2.510	997.247.236	596	81.763.700	473	24.715.800	473	17.965.800	100,00	72,69	1069	99.729.500	42,59	10,00	DPMPTSP
16	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah							20.717.400	473	18.241.600		88,05	473	18.241.600	0,00	0,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)						
												Predikat kinerja						
	2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**114**	**2.693.040.265**	**15**	**757.450.860**	**0**	**0**		**0**				**845.309.169**			
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**2.693.040.265**		**757.450.860**		**0**		-				757.450.860			
16	2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (DAKNF)	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	114	495.227.825	15	87.858.309	-	-	-	-			15	87.858.309	13,16	17,74	DPMPTSP
17	2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha (DAKNF)	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1.060	1.358.780.506	10	471.682.551	-	-		-			10	471.682.551	0,94	34,71	DPMPTSP
18	2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal (DAKNF)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi	475	839.031.934	25	197.910.000	-	-	-	-			25	197.910.000	5,26	23,59	DPMPTSP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inpseksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha															
Rata-rata capaian kinerja (%)												**0,00**	**16,67**			**25,35**	**25,35**	
Predikat kinerja												**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**4.131.972.819**		**1.248.688.060**		**301.000.000**		**196.279.000**				**845.309.169**			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)												**100,00**	**92,66**			**92,45**	**84,63**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)												**ST**	**ST**			**ST**	**T**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	16
		Urusan Wajib																
		Kepemudaan dan Olahraga																
1.	**2 19 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.610.645.471**	**-**	**2.365.644.017**	*100	**3.081.430.983**	**-**	**850.007.141**	**380**	**269**	**-**	**3.169.490.658**		19,08	
	2 19 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**125.000.000**		**29.900.000**		**29.924.000**	4	16.160.500	**75**	**54**	17	46.060.500	16,50	39,50	
	2 19 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	75.000.000	1	13.000.000	2	14.996.000	1	6.687.500	50	45	2	19.687.500	8,00	26,25	
	2 19 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	50.000.000	12	16.900.000	3	14.928.000	3	9.473.000	100	63	15	26.373.000	25,00	52,75	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	16
	2 19 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**13.650.515.192**		**2.158.768.792**		**2.529.644.483**	**-**	**723.906.560**	100,00	99,90	**-**	**2.882.675.352**	15,00	25,27	
	2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	11.397.244.884	-	2.049.608.792	14	2.374.254.483	14	2.374.254.483	100,00	100,00	14	4.423.863.275	20,00	38,82	Dispora
	2 19 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	2.253.270.308	-	109.160.000	12	155.390.000	12	155.090.000	100,00	99,81	12	264.250.000	10,00	11,73	Dispora
	2 19 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**515.945.468**		**17.410.800**		**104.246.500**	**-**	**27.725.000**	**80,00**	**77,83**	**-**	**45.135.800**	**64,80**	**18,95**	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200	223.754.968	40	17.410.800	8	18.064.500	8	17.430.000	100,00	96,49	48	34.840.800	24,00	15,57	Dispora
	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11	11.925.000			11	11.925.000	11	11.050.000	100,00	92,66	11	11.050.000	100,00	0,00	
	2 19 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8	67.003.500			8	9.700.000	8	9.700.000	100,00	100,00	8	9.700.000	100,00	14,48	
	2 19 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8	73.262.000			8	47.400.000	8	47.400.000	100,00	100,00	8	47.400.000	100,00	64,70	
	2 19 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	140.000.000			2	17.157.000		-		0,00	-	-	0,00	0,00	
	2 19 01 2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**150.000.000**				**30.000.000**	**1**	**30.000.000**	**100**	**100**	**2**	**60.000.000**	100,00	40,00	
	2 19 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	2	150.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	**100**	2	60.000.000	100,00	40,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	16
			atau Bangunan Lainnya															
	2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.027.217.920**		**13.364.630**		**117.600.000**	-	**35.715.081**	100,00	85,39	**-**	**49.079.711**	88,08	25,00	
	2.19.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	117.217.920		13.364.630	12	16.400.000	12	11.608.260	100,00	70,78	12	24.972.890	80,00	21,30	Dispora
	2.19.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26	910.000.000	13	160.000.000	12	101.200.000	12	101.200.000	100,00	100,00	25	261.200.000	96,15	28,70	
	2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**1.141.966.891**		**176.099.795**		**270.016.000**	-	**16.500.000**	**100,00**	**6,11**	**-**	**192.599.795**	**20,00**	**16,87**	
	2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25	1.141.966.891		176.099.795	5	270.016.000	5	252.068.284	100,00	93,35	**5**	428.168.079	20,00	37,49	Dispora
											Rata-rata capaian kinerja (%)	92,50	70,54			50,73	27,60	
											Predikat Kinerja	ST	S			SR	SR	
2.	**2 19 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**3.907.796.365**	**-**	**267.200.000**	-	**456.402.000**	**-**	**49.250.000**		10,79	**-**	**316.450.000**		8,10	
	2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, WirausahabMuda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**							**37.452.000**			**60,00**	37,49			69,23	59,44	
	2.19.02.2.01.11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan	65	183.153.000	15	94.820.000	50	37.452.000	30	14.042.000	60,00	37,49	45	108.862.000	69,23	59,44	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	16
		Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota															
	2 19 02 2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**3.907.796.365**		**267.200.000**		**418.950.000**	**-**	**49.250.000**	100,00	77,41	**-**	**316.450.000**	0,20	8,10	
	2 19 02 2.02 0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1000	3.907.796.365		267.200.000	2	418.950.000	2	324.299.500	100,00	77,41	**2**	591.499.500	0,20	15,14	Dispora
											Rata-rata capaian kinerja (%)	80,00	57,45			34,72	33,77	
											Predikat Kinerja	T	R			SR	SR	
3	2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**1.007.341.500**	**-**	**1.165.100.000**	-	**629.716.000**	**-**	**100.000.000**		15,88	**-**	**1.265.100.000**			Dispora
	2 19 03 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			**183.153.000**		**25.000.000**		88.211.000	**-**	**-**	100,00	100,00	**-**	**25.000.000**	33,33	13,65	Dispora
	2 19 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	15	183.153.000		25.000.000	5	88.211.000	5	88.211.000	100,00	100,00	**5**	113.211.000	33,33	61,81	Dispora
	2 19 03 2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**			**192.310.650**		**1.140.100.000**		**458.671.000**	**-**	**100.000.000**	100,00	96,03	**-**	**1.240.100.000**		644,84	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	16
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	2 19 03 2.02 0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10	192.310.650		1.140.100.000	4	458.671.000	4	440.476.000	100,00	96,03	**4**	1.580.576.000	40,00	821,89	Dispora
	2 19 03 2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**631.877.850**		**-**		**82.834.000**	**-**	**-**	100,00	100,00	**-**	**-**		0,00	
	2 19 03 2.05 0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	10	631.877.850		-	2	82.834.000	2	82.834.000	100,00	100,00	**2**	82.834.000	20,00	13,11	Dispora
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	98,68			11,11	219,50	
											Predikat Kinerja	ST	ST			SR	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	3.081.430.983	-	999.257.141							
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)	90,83	75,56			85,95	80,33	
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)	ST	T			ST	ST	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	02.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**24.882.457.541**	**3.119.691.112**		**3.641.460.307**		**883.604.452**		**0,00**	**24,27**	0	**4.003.295.564**	**0,00**	**16,09**	**Dinas Perpustakaan Kearsipan**
	2.23.01.201	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**320.102.000**	**10**	**10.000.000**		**7.753.800**	**5**	**3.508.400**	**100,00**	**100,00**	15	**13.508.400**	**56,67**	**5,55**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	2.23.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	160.051.000	4	5.000.000	4	4.006.400	4	4.006.400	100,00	100,00	8	9.006.400	53,33	5,63	
	2.23.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	160.051.000	6	5.000.000	6	3.747.400	6	3.747.400	100,00	100,00	12	8.747.400	60,00	5,47	
	2.23.01.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**		**14.211.793.364**		**2.587.749.812**		**2.968.135.407**	**0**	**790.003.491**	**100,00**	**96,33**	0	**3.377.753.303**	**78,06**	**30,86**	
	2.23.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	Orang/Bulan	12.058.183.010	60	2.367.399.812	12	2.799.815.407	12	2.799.815.407	100,00	100,00	72	5.167.215.219	116,13	42,85	
	2.23.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai	60	Bulan	1.993.559.354	12	220.350.000	12	168.320.000	12	155.950.000	100,00	92,65	24	376.300.000	40,00	18,88	
	2.23.01.202.03	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30	Dokumen	160.051.000					0	-			0	-	0,00	0,00	
	2.23.01.205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**		**128.512.355**					**0**	**-**			0	**-**	**0,00**	**0,00**	
	2.23.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145	Stell	128.512.355					0	-			0	-	**0,00**	**0,00**	
	2.18.01.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**		**1.197.013.239**		**106.790.000**		**77.131.100**	**0**	**19.886.166**	**100,00**	**104,46**	0	**126.676.166**	**28,57**	**13,96**	
	2.23.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	160.051.000					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	2.23.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	122.102.000	12	10.500.000	12	8.464.500	12	8.463.700	100,00	99,99	24	18.963.700	40,00	15,53	
	2.23.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Bulan	160.051.000					0	-			0	-	0,00	0,00	
	2.23.01.206.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Bulan	160.051.000	12	10.130.000	12	3.662.000	12	3.662.000	100,00	100,00	24	13.792.000	40,00	8,62	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	2.23.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Bulan	160.051.000	12	10.000.000	12	5.927.000	12	5.927.000	100,00	100,00	24	15.927.000	40,00	9,95	
	2.23.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Bulan	160.051.000	12	10.000.000	12	44.000.000	12	42.200.000	100,00	95,91	24	52.200.000	40,00	32,61	
	2.23.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Bulan	274.656.239	12	66.160.000	12	15.077.600	12	19.058.759	100,00	126,40	24	85.218.759	40,00	31,03	
	2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**		**457.882.500**		**-**			**0**	**-**	0,00	0,00	0	**-**	**0,00**	**0,00**	
	2.23.01.207.06	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Tahun	457.882.500					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	2.23.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	Bulan						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	2.23.01.207.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	Bulan						0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**		**288.091.800**		**227.000.000**		**254.000.000**	**0**	**54.706.395**	100,00	**73,42**	0	**281.706.395**	**41,67**	**74,28**	
	2.23.01.208.02	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	JumlahPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bulan	288.091.800	12	84.000.000	12	123.000.000	12	71.694.641	100,00	58,29	24	155.694.641	40,00	54,04	
	2.23.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	bulan	274.000.000	13	143.000.000	13	131.000.000	13	116.000.000	100,00	88,55	26	259.000.000	43,33	94,53	
	2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**		**1.357.660.074**		**188.151.300**		**334.440.000**	**0**	**15.500.000**	100,00	93,00	0	**203.651.300**	115,00	36,77	
	2.23.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	Unit/bulan	1.357.660.074	57	188.151.300	12	334.440.000	12	311.038.000	100,00	93,00	69	499.189.300	115,00	36,77	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pemeliharaan Barang Milik DAerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah				**160.051.000**		**-**			**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	0	**-**	**0,00**	**0,00**	
	2.23.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara/rehabilitasi	60	Bulan	160.051.000					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%).	100,00	93,44	0	**-**	63,99	32,29	
												Pedikat kinerja.	ST	ST	0	**-**	R	SR	
	02.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**				**1.934.558.100**		**468.742.200**		**838.854.450**	**0**	**24.541.650**	0,00	**2,93**	0	**493.283.850**	**0,00**	**25,50**	
	2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**		**1.282.071.000**		**118.224.400**		**119.998.950**	**0**	**1.696.150**	100,00	**85,71**	0	**119.920.550**	**42,78**	**36,74**	
	2.23.02.2.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO								**0**	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	2.23.02.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai SNP	12		41.177.750	1	25.000.000	11	16.177.750	1	16.177.750	100,00	100,00	2	41.177.750	16,67	100,00	
	2.18.02.2.01.02	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendididkan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	55	Kecamatan	366.306.000	11	56.194.400	11	28.110.200	11	15.469.860	100,00	55,03	22	71.664.260	40,00	19,56	
	2.18.02.2.01.08	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	4.650	Buku	549.459.000					0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
	2.18.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	25676	Bulan	366.306.000	15676	37.030.000	10000	10.711.000	10000	10.711.000	100,00	100,00	25676	47.741.000	100,00	13,03	
	2.23.02.2.01.017.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	12	Bulan	65.000.000			12	65.000.000	12	57.080.000	100,00	87,82	12	57.080.000	100,00	87,82	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah kabupaten/Kota**		**100%**		**652.487.100**		**350.517.800**		**718.855.500**	**0**	**22.845.500**	**100,00**	**85,25**	0	**373.363.300**	**100,00**	**59,05**	
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	1. Jumlah lomba bercerita; 2. Jumlah lomba pidato bahasa lampung; 3. Pelayanan perpustakaan dengan mobil keliling;	5	Lokus	1.343.122.000	3	40.000.000	2	376.886.200	2	337.853.500	100,00	89,64	5	377.853.500	100,00	28,13	
	2.23.02.2.02.02.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4		652.487.100	2	310.517.800	2	341.969.300	2	276.514.300	100,00	80,86	4	587.032.100	100,00	89,97	
												Rata-rata capaian kinerja (%).	100,00	85,48	0	-	71,39	47,89	
												Pedikat kinerja.	SR	SR	0	-	SR	SR	
	02.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**				**4.826.793.109**		**156.500.000**		**58.485.900**	2	**13.284.200**	0,00	**22,71**	**2**	**169.784.200**	**0,00**	**3,52**	
	2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**		**1.032.664.000**		**40.000.000**		**17.496.000**	**0**	**3.052.000**	100,00	**100,00**	**0**	**43.052.000**	**100,00**	**5,57**	
	2.24.04.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000	0pd	1.032.664.000	400	40.000.000	600	17.496.000	600	17.496.000	100,00	100,00	1000	57.496.000	100,00	5,57	
	2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statris Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**		**1.032.664.000**		**36.000.000**		**16.097.000**	**0**	**4.951.000**	**100,00**	**100,00**	**0**	**40.951.000**	**31,43**	**5,04**	
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi,dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	7.000	Arsip	1.032.664.000	1500	36.000.000	700	16.097.000	700	16.097.000	100,00	100,00	2200	52.097.000	31,43	5,04	
	2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jarigan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		**100%**		**2.761.465.109**		**80.500.000**		**24.892.900**	**0**	**5.281.200**	**100,00**	**71,12**	**0**	**85.781.200**	**1,68**	**6,80**	
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7.000	Layanan Arsip	177.047.900	1	15.500.000	1	4.001.200	1	3.241.200	100,00	81,01	2	18.741.200	0,03	10,59	
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan	180	SDM	2.584.417.209	3	65.000.000	3	20.891.700	3	12.791.700	100,00	61,23	6	77.791.700	3,33	3,01	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota															
Rata-rata capaian kinerja (%).												100,00	90,37	0	0	44,37	5,80	
Pedikat kinerja.												ST	ST	0	0	SR	SR	
Jumlah anggaran dan realisasi seluruh program								4.538.800.657			921.430.302			0	921.430.302			
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh Program												100,00	89,77	0	0	91,53	81,51	
Predikat kinerja dari seluruh program												ST	T	0	0	ST	ST	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
	3 25	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		100%		92,44%	3.503.801.833	100%	3.713.913.080		3564150703							
1	3 25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Peningkatan penerapan kepatuhan pelayanan publik	100%	17.014.957.570	100%	3.241.386.833	100%	3.659.598.580	1	3.488.459.703	0,14	95,32	0,95	6.729.846.536	95,32	39,55	DINAS PERIKANAN
	3 25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	120.000.000		7.500.000		17.496.000	0	11.796.000	82,50	100,00	-	19.296.000	26,50	20,83	
	3 25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 dok	60.000.000	1	7.500.000	1	11.796.000	1	11.796.000	100,00	100,00	2	19.296.000	40,00	32,16	
	3 25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	100 lap	60.000.000			20	5.700.000	13	5.700.000	65,00	100,00	13	5.700.000	13,00	9,50	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3	**25**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**13.838.737.570**		**2.663.274.748**	**100**	**3.043.212.580**	**50**	**2.913.766.007**	**81,94**	**97,15**	**50**	**5.577.040.755**	**39,93**	**23,93**	
	3	25	Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72	bln	12.704.437.570	12	2.516.922.448	12	2.900.963.080	9	2.781.066.507	75,00	95,87	21	5.297.988.955	29,17	41,70	
	3	**25**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	60	dok	1.074.300.000	24	139.543.100	12	131.249.500	9	121.699.500	75,00	92,72	33	261.242.600	55,00	24,32	
	3	**25**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasin penyusunan keuangan akhir tahun	5	lap	60.000.000	2	6.809.200	1	3.000.000	1	3.000.000	100,00	100,00	3	9.809.200	60,00	16,35	
	3	25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumla Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	90	lap	60.000.000			18	8.000.000	14	8.000.000	77,78	100,00	14	8.000.000	15,56	13,33	
	3	**25**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**337.720.000**		**70.616.300**	**100**	**67.490.000**	**50**	**66.085.000**	**100,00**	**99,98**	**50**	**136.701.300**	**40,00**	**237,90**	
	3	**25**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	paket	60.000.000			12	3.000.000	12	3.000.000	100,00	100,00	12		20,00	0,00	
	3	**25**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kamtor yang disediakan	60	paket	133.000.000		34.859.300	12	22.669.200	12	22.669.200	100,00	100,00	12	57.528.500	20,00	43,25	
	3	**25**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksnaan makan dan minum rapat	11	bln	7.060.000			11	7.060.000	11	7.050.000	100,00	99,86	11		100,00	0,00	
	3	**25**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	paket	2.000.000		11.619.000	12	10.520.800	12	10.520.800	100,00	100,00	12	22.139.800	20,00	1106,99	
	3	**25**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60	dok	44.720.000		-	12	5.400.000	12	5.400.000	100,00	100,00	12	5.400.000	20,00	12,08	
	3	25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	60	lap	158.000.000		24.138.000	12	18.840.000	12	18.840.000	100,00	100,00	12	42.978.000	20,00	27,20	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	3	**25**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	1.427.000.000		314.719.836	100	310.000.000	31	293.995.595	**93,94**	**86,78**	**31**	**608.715.431**	**30,72**	**23,06**	
	3	**25**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	lap	67.000.000		6.719.836	12	9.000.000	12	5.995.595	100,00	66,62	12	12.715.431	20,00	18,98	
	3	**25**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60	lap	1.360.000.000		308.000.000	12	301.000.000	12	288.000.000	100,00	95,68	12	596.000.000	20,00	43,82	
	3	**25**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.291.500.000**		**185.275.949**	**100**	**221.400.000**	**31**	**202.817.101**	**90,91**	**89,59**	**31**	**388.093.050**	**31,00**	**30,05**	
	3	**25**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	unit	1.122.500.000		170.525.949	12	199.140.000	12	183.247.101	100,00	92,02	12	353.773.050	60,00	31,52	
	3	**25**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	15	unit	169.000.000		14.750.000	11	11.570.000	8	8.880.000	72,73	76,75	8	23.630.000	53,33	13,98	
	3	**25**	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bungan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	8.000.000			1	10.690.000	1	10.690.000	100,00	100,00			0,00	0,00	
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**89,86**	**94,70**			**34,29**	**76,43**	
													Predikat Kinerja	T	ST			SR	T	
2	**3**	**25**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman**	**100%**		**332.691.558**	**100%**	**113.160.000**	**100%**	**22.842.000**	**2**	**45.680.000**	**199,98**	**199,98**	**3**	**158.840.000**	**299,98**	**47,74**	**DINAS PERIKANAN**

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3	25	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DARAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Keterampilan Nelayan Kecil	3000	orang	332.691.558	1500	113.160.000	500	22.842.000	151	22.840.000	30,20	99,99	####	136.000.000	55,03	40,88	
	3	25	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang terinput ke database Kusuka dan nelayan yang terasuransikan serta jumlah tanah nelayan yang tersertipikasi	600	orang	332.691.558	500	113.160.000	500	22.842.000	350	22.840.000	70,00	99,99	850	136.000.000	141,67	40,88	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														70,00	99,99			98,35	40,88	
Predikat Kinerja														S	ST			ST	SR	
3	**3**	**25**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Produksi Perikanan**	**100%**		**149.000.000**	**100%**	**72.500.000**	**79**	**12.000.000**	**1**	**7.000.000**	**0,73**	**58,33**	**2**	**79.500.000**	**158,33**	**53,36**	**DINAS PERIKANAN**
	3	**25**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kecil**	**5**	**dok**	**149.000.000**	**3**	**72.500.000**	**1**	**12.000.000**		**12.000.000**	**0,00**	**100,00**	**3**	**84.500.000**	**60,00**	**56,71**	
	3	**25**	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	kel	149.000.000	3	72.500.000	2	7.000.000	2	7.000.000	100,00	100,00	5	79.500.000	100,00	53,36	
	3	**25**	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	dok	5.000.000			4	5.000.000	4	5.000.000	100,00	100,00	4	5.000.000	100,00	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														**100,00**	**100,00**			**100,00**	**53,36**	
Predikat Kinerja														ST	ST			ST	R	
5	**3**	**25**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Konsumsi Ikan**	**100%**		**515.080.000**	**100%**	**76.755.000**	**100**	**19.472.500**	**1**	**23.011.000**	**0,17**	**118,17**	**2**	**99.766.000**	**2,18**	**0,19**	**DINAS PERIKANAN**
	3	**25**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha**	Meningkatnya Penerbitan Tanda	**100**	**%**	85.000.000	**100**	12.500.000	**100**	1.610.000	2	1.010.000	**100,00**	**62,73**	**102**	**13.510.000**	**1,02**	**0,16**	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil																
	3	25	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasrkan skala usaha dan risiko	5	dok	85.000.000	2	12.500.000	1	1.610.000	1	1.610.000	100,00	100,00	3	14.110.000	60,00	16,60	
	3	**25**	**PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMAARAN SKALA MIKRO DAN KECIL**	**Meningkatnya pelaku usaha yang dibina dan dipantau jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanannya**	**100**	**%**	**150.000.000**	**100**	**9.080.000**	**100**	**1.300.000**	**2**	**1.300.000**	**100,00**	**100,00**	**102**	**10.380.000**	**102,00**	**6,92**	
	3	25	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	60	Pok lahsar	150.000.000	10	9.080.000	1	1.300.000	1	1.300.000	100,00	100,00	11	10.380.000	18,33	6,92	
	3	**25**	**Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**200**	**%**	**280.080.000**	**100**	**55.175.000**	**100**	**16.562.500**	**100**	**1.228.500**	**100,00**	**7,42**	**200**	**56.403.500**	**100,00**	**20,14**	
	3	25	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi ikan dan usaha pengolahan dalam 1 daerah kab/kota	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	1500	orang	280.080.000	300	55.175.000	200	16.562.500	200	16.562.500	100,00	100,00	500	71.737.500	33,33	25,61	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														**100,00**	**81,48**			**62,73**	**15,24**	
Predikat Kinerja														ST	T			R	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISSASI DARI SELURUH PROGRAM																				
TOTAL RATA-ATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														**89,96**	**94,04**			**86,18**	**78,49**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														T	ST			T	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	**3 26**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perkantoran**		**353**		**19.551.263.170**	**69**	**3.895.786.174**	**64**	**4.168.776.603**	**43**	**3.504.388.493**	**67,19**	**84,06**	**112**	**7.400.174.667**	**31,73**	**37,85**	DISPAR
	3 26	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**18**		**110.000.000**	**2**	**9.975.000**	**2**	**5.997.700**	**2**	**5.997.700**	**100,00**	**100,00**	**4**	**15.972.700**	**17,69**	**27,06**	DISPAR
	3 26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	dok	65.000.000	1	5.000.000	1	3.819.000	1	3.819.000	100,00	100,00	2	8.819.000	15,38	13,57	DISPAR
	3 26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Tersedianya anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	LAP	50.000.000	1	4.975.000	1	2.178.700	1	2.178.700	100,00	100,00	2	7.153.700	20,00	14,31	DISPAR
	3 26	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN**	**120**		**15844679420**	**24**	**2.935.079.046**	**27**	**3.344.364.423**	**27**	**3.221.673.619**	**100,00**	**102,23**	**51**	**6.156.752.665**	**30,00**	**22,13**	DISPAR
	3 26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	60	bulan	14.839.979.420	12	2.835.519.046	12	3.230.397.423	12	3.114.204.324	100,00	96,40	24	5.949.723.370	40,00	40,09	DISPAR
	3 26	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	dok	1.004.700.000	12	99.560.000	12	111.880.000	12	105.040.000	100,00	93,89	24	204.600.000	40,00	20,36	DISPAR
	3 26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Berupa Laporan Fungsional, Laporan Konsolidasi, Laporan Keuangan Per Semester	30	buah	41.000.000	0	-	3	2.087.000	3	2.429.295	100,00	116,40	3	2.429.295	10,00	5,93	DISPAR
	3 26	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Anggaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah**	**75**		**648.521.150**	**15**	**327.452.536**	**2**	**116.715.880**	**-**	**16.537.000**	**100,00**	**81,88**	**15**	**343.989.536**	**28,00**	**31,00**	DISPAR
	3 26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5	pkt	118.560.000	0	-	1	5.623.000	1	5.395.559	100,00	95,96	1	5.395.559	20,00	4,55	DISPAR
	3 26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5	pkt	37.778.850	0	-	1	2.506.900	1	2.506.900	100,00	100,00	1	2.506.900	20,00	6,64	DISPAR
	3 26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedianya Bahan Logistik Kantor	60	bulan	57.000.000	0	-	12	17.944.000	12	12.129.000	100,00	67,59	12	12.129.000	20,00	21,28	DISPAR
	3 26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5	pkt	98.343.200	1	4.628.400	1	27.671.500	1	24.251.500	100,00	87,64	2	28.879.900	40,00	29,37	DISPAR
	3 26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	lap	335.896.000	1	276.295.136	1	62.970.480	1	36.658.000	100,00	58,21	2	312.953.136	40,00	93,17	DISPAR

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	3	**26**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10**		**1.096.500.000**	**0**	**-**	**6**	**29.000.000**	**-**	**-**	**100,00**	**99,75**	**0**	**-**	**0,00**	**0,00**	DISPAR
	3	26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Unit	286.500.000	0	-	6	29.000.000	6	28.926.600	100,00	99,75	6	28.926.600	60,00	10,10	DISPAR
	3	**26**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**120**		**1.967.400.000**	**24**	**447.698.372**	**24**	**397.200.000**	**12**	**218.870.174**	**100,00**	**88,31**	**36**	**666.568.546**	**40,00**	**33,18**	DISPAR
	3	26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	lap	282.200.000	12	31.098.372	12	33.600.000	12	26.045.514	100,00	77,52	24	57.143.886	40,00	20,25	DISPAR
	3	26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	lap	1.685.200.000	12	416.600.000	12	363.600.000	12	360.350.000	100,00	99,11	24	776.950.000	40,00	46,10	DISPAR
	3	**26**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20**		**980.662.600**	**4**	**175.581.220**	**3**	**275.498.600**	**2**	**41.310.000**	**66,67**	**14,99**	**6**	**216.891.220**	**30,00**	**22,12**	DISPAR
	3	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	unit	980.662.600	4	175.581.220	3	275.498.600	3	270.804.081	100,00	98,30	7	446.385.301	35,00	45,52	DISPAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**94,44**	**81,19**	**21**	**1.486.960.511,40**	**24,28**	**22,58**	
													Predikat Kinerja	ST	T			SR	SR	
4	**3**	**26**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan**	5		**1.219.844.000**	**0**	**-**	**1**	**27.311.000**	**1**	**9.205.000**	**100,00**	**33,70**	**1**	**197.450.000**	**20,00**	**16,19**	DISPAR
	3	**26**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota**	**Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota**	5		**1.219.844.000**	**0**	**-**	**1**	**27.311.000**	**1**	**9.205.000**	**100,00**	**33,70**	**1**	**197.450.000**	**20,00**	**16,19**	DISPAR
	3	26	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi/ Kabupaten	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	4	dokumen	900.000.000	0	-	1	27.311.000	1	17.985.000	100,00	65,85	1	17.985.000	25,00	2,00	DISPAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	65,85	1	197.450.000,00	25,00	2,00	
													Predikat Kinerja	ST	S	SR	ST	SR	SR	
5	**3**	**26**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan**	**131**		**5.400.000.000**	**12**	**296.200.000**	**1**	**548.000.000**	**1**	**197.450.000**	**100,00**	**36,03**	**13**	**493.650.000**	**40,00**	**44,72**	DISPAR
	3	**26**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan**	**Jumlah Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi**	**131**		5.400.000.000	12	296.200.000	1	548.000.000	1	197.450.000	100,00	36,03	13	493.650.000	40,00	44,72	DISPAR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kawasan Srategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	**dan Kawasan Srategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**															
	3 26	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bahan dan sarana promosi pariwisata	5	dokumen	900.000.000	0	-	1	548.000.000	1	197.450.000	100,00	36,03	1	197.450.000	20,00	21,94	DISPAR
	3 26	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Jumlah sarana data dan informasi yang dikelola	6	dokumen	200.000.000	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DISPAR
	3 26	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen dan implementasi kerjasama dan kemitraan pariwisata	60	bln	3.000.000.000	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	DISPAR
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**36,03**	**3**	**123.412.500,00**	**6,67**	**7,31**	
												Predikat Kinerja	ST	SR	SR	ST	SR	SR	
6	3 26	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan**	10		**1.151.020.000**	**0**	**2.000.000**	**2**	**19.185.000**	**1**	**1.185.000**	**0,00**	**0,00**	**1**	**3.185.000**	**10,00**	**0,28**	DISPAR
	3 26	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	10		**1.151.020.000**	**0**	**2.000.000**	**2**	**19.185.000**	**1**	1.185.000	0,00	0,00	1	3.185.000	10,00	0,28	DISPAR
	3 26	Pengembangan Pendidikan	Jumlah pelaku sub sektor ekraf yang diberikan Pendidikan	10	DOK	1.151.020.000	0	2.000.000	2	19.185.000	2	19.075.000	100,00	99,43	2	21.075.000	20,00	1,83	DISPAR
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**99,43**	**1**	**3.185.000**	**20,00**	**1,83**	
												Predikat Kinerja	ST	ST	SR	ST	SR	SR	
6	3 26	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Peningkatan Persentase Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi**	450		**2.400.000.000**	**60**	**319.060.000**	**60**	**520.354.900**	**-**	**161.384.910**	**0,00**	**31,01**	**60**	**480.444.910**	**13,33**	**20,02**	DISPAR
	3 26	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	450		2400000000	60	319.060.000	60	520.354.900	-	68.861.800	**0,00**	**13,23**	60	387.921.800	13,33	16,16	DISPAR
	3 26	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tersedianya media pengembangan potensi, bakat, kreatifitas generasi muda dalam mempromosikan potensi wisata	450	orang	2.400.000.000	60	319.060.000	60	520.354.900	-	161.384.910	0,00	31,01	60	480.444.910	13,33	20,02	DISPAR
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**31,01**	**12**	**63.812.000,00**	**13,33**	**20,02**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											Predikat Kinerja	SR	SR	SR	ST	SR	SR	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**142**	**4.710.496.174**	**128**	**5.283.627.503**	**46**	**3.873.613.403**	**53,44**	**36,96**	**37**	**1.714.980.915**	**23,01**	**23,81**	
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SE;URUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM.....)								**78,89**	**62,70**	**27**	**8.574.904,58**	**86,74**	**80,41**	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM.....)								**T**	**R**	**SR**	**ST**	**T**	**T**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	**27**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah dengan maksimal**			**93.236.372.830**		**44.639.881.214**		**11.893.286.225**		**11.169.292.805**	**97,00**	**93,91**		**55.809.174.019**	**62,54**	**42,84**	
3	**27**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku**			**400.594.471**		**116.270.800**		**10.000.000**		**10.000.000**	**100,00**	**100,00**		**126.270.800**	**87,15**	**44,96**	
3	27	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	8	Dok	74.841.417	6	44.700.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100,00	100,00	8	49.700.000	100,00	66,41	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
3	27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, Dokumen SAKIP, Laporan DAK, Laporan Potensi Pertanian, Laporan Evaluasi dan Konsolidasi, serta Laporan SIAP	288	Laporan	325.753.054	155	71.570.800	59	5.000.000	59	5.000.000	100,00	100,00	214	76.570.800	74,31	23,51	DINAS TPH
											Rata-rata capaian kinerja (%)		**100,00**	**100,00**			**87,15**	**44,96**	
											Predikat kinerja		**ST**	**ST**			**T**	**SR**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	**27**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**73.010.487.602**		**36.379.895.256**		**9.955.244.725**		**9.402.750.220**	**100,00**	**94,45**		**45.782.645.476**	**87,50**	**63,72**	
3	27	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan TPP Pegawai Dinas Pertanian	4914	Bln, orang	71.109.239.275	3136	35.518.666.256	1778	9.753.564.725	1778	9.209.270.220	100,00	94,42	4914	44.727.936.476	100,00	62,90	
3	27	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72	Bln, dok	1.619.352.227	48	828.620.000			0	-			48	828.620.000	66,67	51,17	
3	27	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Dok	204.740.000			12	196.680.000	12	188.480.000	100,00	95,83	12	188.480.000	100,00	92,06	DINAS TPH
3	27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	Laporan	77.156.100	8	32.609.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100,00	100,00	10	37.609.000	83,33	48,74	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**96,75**			**87,50**	**63,72**	
												Predikat kinerja	**ST**	**ST**			**T**	**R**	
3	**27**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**233.011.422**		**60.400.000**		**-**		**-**	**0,00**			**60.400.000**	**33,33**	**25,92**	
3	27	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang dan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	72	Bln	233.011.422	24	60.400.000			0	-			24	60.400.000	33,33	25,92	DINAS TPH
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**				**33,33**	**25,92**	
												Predikat kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
3	**27**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**115.734.150**		**30.000.000**		**-**		**-**	**0,00**			**30.000.000**	**33,33**	**25,92**	
3	27	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Jabatan dan Kinerja ASN pada Dinas TPH	648	Pegawai	77.156.100	216	20.000.000			0	-			216	20.000.000	33,33	25,92	DINAS TPH
3	27	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Evaluasi Kinerja ASN Dinas TPH	648	Pegawai	38.578.050	216	10.000.000			0	-			216	10.000.000	33,33	25,92	DINAS TPH
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**				**33,33**	**25,92**	
												Predikat kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	**27**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**3.209.570.310**		**1.287.811.757**		**314.741.500**		**249.694.024**	**85,00**	**79,33**		**1.537.505.781**	**65,60**	**46,63**	
3	27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	73	Bln, paket	34.951.713	25	13.590.000			0	-			25	13.590.000	34,25	38,88	
3	27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	75	Bln, paket	430.450.024	39	176.827.200	12	33.991.900	9	33.991.900	75,00	100,00	48	210.819.100	64,00	48,98	
3	27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk Mendukung Kegiatan Kantor	73	Bln, paket	115.734.150	25	45.000.000			0	-			25	45.000.000	34,25	38,88	
3	27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu	66	Bln, paket	640.056.143	33	161.518.000			0	-			33	161.518.000	50,00	25,23	
3	27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedainya Cetak, Fotocopy dan Penjilidan	72	Bln, paket	355.662.616	48	157.717.800	12	21.684.600	12	21.498.800	100,00	99,14	60	179.216.600	83,33	50,39	DINAS TPH
3	27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Media Cetak	72	Bln	259.244.496	42	94.800.000	12	15.000.000	12	15.000.000	100,00	100,00	54	109.800.000	75,00	42,35	
3	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Keikutsertaan Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi	115	Bln, lap	814.861.003	103	286.108.757	12	74.065.000	6	34.203.324	50,00	46,18	109	320.312.081	94,78	39,31	
3	27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Informasi Pembangunan Pertanian Daerah	65	Informasi, dok	558.610.164	56	352.250.000	2	170.000.000	2	145.000.000	100,00	85,29	58	497.250.000	89,23	89,02	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**85,00**	**79,33**			**65,60**	**46,63**	
												Predikat kinerja	**T**	**T**			**S**	**SR**	
3	**27**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik**			**13.735.328.922**		**5.653.720.336**		**1.267.600.000**		**1.194.530.875**	**100,00**	**94,24**		**6.848.251.211**	**82,69**	**45,41**	
3	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Listrik Kantor	72	Bln, lap	277.761.960	48	91.120.336	12	36.000.000	12	22.130.875	100,00	61,47	60	113.251.211	83,33	40,77	
3	27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji THLS, Honorarium Operator Komputer, Sespri, dan Tenaga Supir	78	Bln, lap	13.457.566.962	51	5.562.600.000	13	1.231.600.000	13	1.172.400.000	100,00	95,19	64	6.735.000.000	82,05	50,05	DINAS TPH
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**94,24**			**82,69**	**45,41**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
												Predikat kinerja	ST	ST			T	SR	
3	**27**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.531.645.953**		**1.111.783.065**		**345.700.000**		**312.317.686**	**100,00**	**90,34**		**1.424.100.751**	**48,15**	**47,33**	
3	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Dana Service, BBM, Suku Cadang	81	Bln, unit	1.610.402.119	42	977.663.065	9	345.700.000	9	312.317.686	100,00	90,34	51	1.289.980.751	62,96	80,10	DINAS TPH
3	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	6	Unit	921.243.834	2	134.120.000			0	-			2	134.120.000	33,33	14,56	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**90,34**			**48,15**	**47,33**	
												Predikat kinerja	**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	
3	**27**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Tersedianya Sarana Pertanian**			**5.807.047.667**		**2.517.152.000**	**0**	**120.800.000**	**0**	**113.313.000**	**200,00**	**93,80**		**2.630.465.000**	**58,09**	**55,75**	
3	**27**	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian untuk semua komoditas**			**3.561.224.667**		**342.129.000**	**-**	**-**	**0**	**-**	**100,00**	**0,00**		**342.129.000**	**41,18**	**9,61**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokal	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	Laporan	501.500.000			1	501.500.000	1	368.045.975	100,00	73,39	1	368.045.975	100,00	73,39	
3	27	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pemeliharaan Tanaman Hortikultura di Hortipark Kab. Pesawaran, Tersedianya Demplot Percontohan Budidaya Jamur Tiram, Tersedianya Demplot Percontohan Kebun Hidroponik Tanaman Hortikultura, Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	34	Kegiatan, Demplot, Laporan	3.561.224.667	14	342.129.000				-	0,00	0,00	14	342.129.000	41,18	9,61	DINAS TPH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	73,39			70,59	41,50	
													Predikat kinerja	ST	S			S	SR	
3	27	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			2.245.823.000		2.175.023.000		120.800.000		113.313.000	100,00	93,80		2.288.336.000	75,00	101,89	
3	27	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Hortikultura, Pengembangan Padi Bebas Residu, Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, Tumbuhan, dan MikroOrganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	16	Komoditas, Demplot, Dokumen	2.245.823.000	11	2.175.023.000	1	120.800.000	1	113.313.000	100,00	93,80	12	2.288.336.000	75,00	101,89	DINAS TPH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	93,80			75,00	101,89	
													Predikat kinerja	ST	ST			S	ST	
3	27	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian			79.512.591.501		24.959.701.250		162.180.350		162.180.350	100,00	100,00		25.171.881.600	51,40	45,69	
3	27	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian			335.780.500		50.000.000		-		-	0,00			100.000.000	60,00	57,45	
3	27	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Penyusunan Perda LP2B	1	Perda	50.000.000	1	50.000.000			0	-	0,00	0,00	1	50.000.000	100,00	100,00	DINAS TPH
3	27	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B yang dikelola untuk pertanian	42260	Ha	335.780.500	8452	50.000.000			0	-			8452	50.000.000	20,00	14,89	DINAS TPH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			60,00	57,45	
													Predikat kinerja	SR	SR			R	R	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	**27**	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian dengan maksimal**			**79.176.811.001**		**24.909.701.250**		**162.180.350**		**162.180.350**	**100,00**	**100,00**		**25.071.881.600**	**42,81**	**33,93**	
3	27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Terlaksananya Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal, Terlaksananya rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK)	118	Lokasi, unit	30.479.232.656	48	8.685.410.000			0	-			48	8.685.410.000	40,68	28,50	DINAS TPH
3	27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Embung Pertanian (DAK)	29	Lokasi, unit	4.920.742.154	7	769.383.300			0	-		0,00	7	769.383.300	24,14	15,64	DINAS TPH
3	27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Prasarana Transportasi pada Kawasan Pertanian	111	Lokasi, unit	18.016.497.158	41	6.824.653.200	2	57.290.500	2	57.290.500	100,00	100,00	43	6.881.943.700	38,74	38,20	DINAS TPH
3	27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Terlaksananya Pembangunan DAM Parit	17	Lokasi, unit	4.919.796.992	7	801.582.500			0	-		0,00	7	801.582.500	41,18	16,29	DINAS TPH
3	27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Terlaksananya Pembangunan Long Storage	13	Lokasi	4.944.247.760	5	640.313.000			0	-		0,00	5	640.313.000	38,46	12,95	DINAS TPH
3	27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air	12	Lokasi	1.854.531.735	4	229.086.850			0	-		0,00	4	229.086.850	33,33	12,35	DINAS TPH
3	27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Pertanian, Terlaksananya rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) (DAK), Terlaksananya revitalisasi Jaringan Irigasi Desa, Terlaksananya Sarana Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan, Terlaksananya revitalisasi Jaringan Irigasi Tersier	355	Kegiatan, Lokasi, unit	14.004.893.046	89	6.959.272.400	3	68.998.350	3	68.998.350	100,00	100,00	92	7.028.270.750	25,92	50,18	DINAS TPH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK)	4	Lokasi	36.869.500			4	35.891.500	4	35.891.500	100,00	100,00	4	35.891.500	100,00	97,35	DINAS TPH
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**100,00**			**42,81**	**33,93**	
												Predikat kinerja	**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	
3	**27**	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Terlaksanya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**			**2.148.797.385**		**805.730.300**		**70.000.000**		**69.649.892**	**100,00**	**99,50**		**875.380.192**	**100,00**	**40,74**	
3	**27**	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian untuk semua komoditas**			**2.148.797.385**		**805.730.300**		**70.000.000**		**69.649.892**	**100,00**	**99,50**		**875.380.192**	**100,00**	**40,74**	
3	27	Pengendalian OrganismePengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman, Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	27504	Subsektor, Ha	2.148.797.385	17504	805.730.300	10000	70.000.000	10000	69.649.892	100,00	99,50	27504	875.380.192	100,00	40,74	DINAS TPH
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**99,50**			**100,00**	**40,74**	
												Predikat kinerja	**ST**	**ST**			**ST**	**SR**	
3	**27**	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Meningkatnya Kualitas Program Penyuluhan Pertanian**			**18.843.016.448**		**5.503.833.492**		**1.412.378.000**		**606.360.000**	**50,00**	**42,93**		**6.110.193.492**	**73,19**	**31,57**	
3	**27**	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian dengan maksimal**			**18.843.016.448**		**5.503.833.492**		**1.412.378.000**		**606.360.000**	**50,00**	**42,93**		**6.110.193.492**	**73,19**	**31,57**	
3	27	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terbayarnya BOP Penyuluh, Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh (IPDMIP), Terlaksananya Rekrutmen Staf Lapangan (IPDMIP), Terselenggaranya Pertemuan Bulanan Penyuluh Pertanian (IPDMIP), Terlaksananya dukungan operasional dalam mendukung terlaksananya konstratani (DAK non fisik),	763	Org, Kali, BPP, unit	6.155.899.439	393	2.100.648.000	132	630.320.000	132	606.360.000	100,00	96,20	525	2.707.008.000	68,81	43,97	DINAS TPH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Tersedianya peralatan pendukung manajemen IPDMIP, Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa															
3	27	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Forum Temu Tani (IPDMIP), Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi, Monitoring dan Supervisi Sekolah Lapang (IPDMIP), Terlaksananya Pelatihan bagi Ketua Kelompok menjadi Penyuluh Swadaya (IPDMIP), Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Petani (IPDMIP), Terlaksananya pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Petani, Terlaksananya pendampingan penyusunan RDK/RDKK, Partisipasi Rembug KTNA Nasional dan KTNA EXPO, Terselenggaranya kunjungan ke desa-desa per kecamatan (IPDMIP), Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	316	Keg, Kec, Peserta, Petani, Kunjungan, unit	3.287.806.596	237	1.073.397.792	5	782.058.000	0	-	0,00	0,00	237	1.073.397.792	75,00	32,65	
3	27	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya demonstrasi peralatan pertanian (IPDMIP), Terlaksananya demonstrasi peralatan pertanian lainnya (IPDMIP), Terlaksananya kegiatan lomba-lomba, Terlaksananya pameran hasil produksi pertanian, Terlaksananya pembinaan dan supervisi bagi penyuluh, Terlaksananya	1257	Unit, Keg, Kali, Pameran, Dok, Buku, BPP, unit	4.748.664.762	1147	1.010.059.100			0	-			1147	1.010.059.100	91,25	21,27	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			penyusunan programa penyuluhan tingkat desa kecamatan dan kabupaten, Tersedianya buku catatan usaha tani (IPDMIP), Terlaksananya dukungan operasional dalam mendukung terlaksananya konstratani (DAK non fisik), Tersedianya peralatan pendukung manajemen IPDMIP, Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian															
3	27	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya sekolah lapang bagi petani (IPDMIP), Terlaksananya Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Tani Tingkat Kabupaten/Kota	26	Keg, unit	4.650.645.652	15	1.319.728.600			0	-			15	1.319.728.600	57,69	28,38	
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,00	42,93			73,19	31,57	
Predikat kinerja													SR	SR			S	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									13.658.644.575			12.120.796.047							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													91,88	87,11			83,64	79,08	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													ST	T			T	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
	3	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN																
	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			76.251.625.649		21.176.023.523		4.691.911.585	1	4.434.399.338		94,51%		5.145.461.229	6,75%	6,75%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	3	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**		**100%**		**62.210.518.370**	**100%**	**16.923.570.908**	**100%**	**3.625.344.185**	**1**	**3.541.390.726**	**97,68%**	**97,68%**		**20.464.961.634**	**32,90%**	**32,90%**	**Dinas Perkebunan Peternakan**
1	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	84	bulan	60.929.179.982	56	16.248.341.208	14	3.460.144.185	13	3.388.310.726	92,86%	97,92%	69	19.636.651.934	82,14%	32,23%	
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen enatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	bulan	1.281.338.388	48	675.229.700	12	165.200.000	12	153.080.000	100,00%	92,66%	60	828.309.700	83,33%	64,64%	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**96,43%**	**95,29%**	**43**	**20.464.961.634**	**55,16%**	**32,29%**	
												Predikat Kinerja	ST	ST			R	SR	
	3	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**		**100%**		**1.472.537.909**	**100%**	**587.174.260**	**100%**	**362.267.400**	**1**	**349.430.350**	**96,46%**	**96,46%**		**936.604.610**	**63,60%**	**63,60%**	**DISBUNAK**
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya kegiatan tulis menulis kantor	72	laporan	340.600.476	36	207.174.700	12	326.002.400	12	316.018.350	100,00%	96,94%	48	523.193.050	66,67%	153,61%	
2	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan keperluan kantor	72	laporan	281.423.742	36	73.187.700	12	3.005.000	9	2.552.000	75,00%	84,93%	45	75.739.700	62,50%	26,91%	
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundangan	72	laporan	205.131.360	36	46.080.000	12	6.200.000	12	3.800.000	100,00%	61,29%	48	49.880.000	66,67%	24,32%	
	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Keikutsertaan Rapat / Rapat Koordinasi Konsultasi	72	laporan	645.382.331	36	260.731.860	12	27.060.000	12	27.060.000	100,00%	100,00%	48	287.791.860	66,67%	44,59%	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**93,75%**	**85,79%**	**95**	**936.604.610**	**65,63%**	**62,36%**	
												Predikat Kinerja	ST	T			R	R	
	3	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				**276.000.000**		**-**	**100%**	**138.000.000**	**1**	**137.755.589**	**99,82%**	**99,82%**		**137.755.589**	**49,91%**	**49,91%**	**DISBUNAK**
3	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	laporan	276.000.000			1	138.000.000	1	137.755.589	100,00%	99,82%	1	137.755.589	50%	49,91%	
												27	**100,00%**	**99,82%**	**1**	**137.755.589**	**50,00%**	49,91%	
												Predikat Kinerja	ST	ST			SR	SR	
2	**3**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN**		**100%**		**10.870.130.550**	**100%**	**2.869.376.355**	**100%**	**282.300.000**	**1**	**259.790.262**	**92,03%**	**92,03%**		**3.129.166.617**	**28,79%**	**28,79%**	**DISBUNAK**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PEMERINTAHAN DAERAH																
	3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	72	Bulan	219.783.600	36	63.414.355	12	18.000.000	12	8.490.262	100,00%	47,17%	48	71.904.617	66,67%	32,72%	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum	78	Bulan	10.650.346.950	39	2.805.962.000	13	264.300.000	13	251.300.000	100,00%	95,08%	52	3.057.262.000	66,67%	28,71%	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100,00%**	**71,12%**	**50**	**3.129.166.617**	**66,67%**	**30,71%**	
												Predikat Kinerja	ST	S			S	SR	
3	**3**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**100%**		**1.698.438.820**	**100%**	**795.902.000**	**100%**	**284.000.000**	**1**	**283.788.000**	**99,93%**	**99,93%**		**1.079.690.000**	**63,57%**	**63,57%**	**DISBUNAK**
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan dinas/operasional	72	Bulan	1.698.438.820	48	795.902.000	12	284.000.000	12	283.788.000	100,00%	99,93%	60	1.079.690.000	83%	63,57%	
												27	**100,00%**	**99,93%**	**60**	**1.079.690.000**	**83,33%**	63,57%	
												Predikat Kinerja	ST	ST			T	R	
4	3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				2.374.886.106	1	2.110.038.506		471.849.200	0	203.027.731		43,03%		2.313.066.237	**97,40%**	**97,40%**	
	3	**KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN**		**100%**		**1.435.496.806**	**100%**	**1.372.349.206**	**100%**	**270.149.200**	**0**	**8.679.800**	**3,21%**	**3,21%**		**1.381.029.006**	**96,21%**	**96,21%**	**DISBUNAK**
	3	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	5	laporan	1.435.496.806	3	1.372.349.206	1	63.147.600	1	8.679.800	100,00%	13,75%	4	1.381.029.006	80,00%	96,21%	
	3	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	terpeliharanya sarana pendukung pertanian	300	Ha	1.688.000.000	150	840.270.900	50	207.001.600	1	166.052.100	2,00%	80,22%	151	1.006.323.000	50,33%	59,62%	
	3	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**		**939.389.300**	**100%**	**737.689.300**	**100%**	**201.700.000**	**1**	**194.347.931**	**96,35%**	**96,35%**		**932.037.231**	**99,22%**	**99,22%**	**DISBUNAK**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	50	Ha	939.389.300	30	737.689.300	10	201.700.000	10	194.347.931	100,00%	96,35%	40	932.037.231	80,00%	99,22%	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**49,78%**	**49,78%**	**44**	**2.313.066.237**	**80,00%**	97,71%	
												Predikat Kinerja	SR	SR			T	ST	
	3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				5.719.375.823	1	5.502.330.223		86.593.800	1	85.983.243		99,29%		5.588.313.466		97,71%	**DISBUNAK**
5	3	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**100%**		**254.318.400**	**100%**	**84.772.800**	**100%**	**39.093.800**	**0**	**39.093.800**	**100,00%**	**100,00%**	**1**	**123.866.600**	**100,00%**	**48,71%**	**DISBUNAK**
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3	laporan	254.318.400	1	84.772.800	1	39.093.800	1	39.093.800	100,00%	100,00%	2	123.866.600	0,6666667	48,71%	
5	3	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**		**100%**		**5.465.057.423**	**100%**	**5.417.557.423**	**100%**	**47.500.000**	**1**	**46.889.443**	**100,00%**	**98,71%**	**2**	**5.464.446.866**	**198,71%**	**99,99%**	**DISBUNAK**
	3	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	10	Unit	5.465.057.423	7	5.417.557.423	1	47.500.000	1	46.889.443	100,00%	98,71%	8	5.464.446.866	80,00%	99,99%	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100,00%**	**99,36%**	**8**	**5.464.446.866**	**80,00%**	99,99%	
												Predikat Kinerja	ST	ST			T	ST	
	3	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				1.095.837.500	1	876.783.500		219.054.000	1	215.429.276		98,35%		1.092.212.776		99,67%	DISBUNAK
7	3	**KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATURIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA**		**100%**		**1.095.837.500**	**100%**	**876.783.500**	**100%**	**219.054.000**	**1**	**217.357.776**	**99,23%**	**99,23%**		**1.094.141.276**	**99,85%**	**99,85%**	**DISBUNAK**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah (periode Tahun 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terbayarnya BOP Petugas Paramedik & Petugas IB	96	Orang	1.095.837.500	78	876.783.500	20	219.054.000	20	217.357.776	100,00%	99,23%	98	1.094.141.276	102,08%	99,85%	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100,00%**	**99,23%**	**98**	**1.094.141.276**	**102,08%**	99,85%	
												Predikat Kinerja	ST	ST			ST	ST	
	3	**PROGRAM PENYULUH PERTANIAN**				289.715.000	1	169.293.503		132.860.500	1	79.352.900		59,73%		248.646.403		85,82%	DISBUNAK
8	3	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**100%**		**289.715.000**	**100%**	**169.293.503**	**100%**	**132.860.500**	**0**	**58.225.400**	**43,82%**	**43,82%**		**227.518.903**	**78,53%**	**78,53%**	**DISBUNAK**
	3	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	33	orang	148.457.000			11	74.228.500	11	74.007.000	100%	99,70%	11	74.007.000	33%	49,85%	
	3	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	16	unit	289.715.000	10	169.293.503	3	58.632.000	3	58.225.400	100%	99,31%	13	227.518.903	81%	78,53%	
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100,00%**	**99,50%**	**13**	**227.518.903**	**81%**	78,53%	
												Predikat Kinerja	ST	ST			T	T	
										Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program		**5.602.269.085**	**1**	**5.018.192.488**					
												TOTAL RATA-ATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**93,33%**	**88,87%**			**88,30**	**84,55**	
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST	T			ST	ST	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	3	**30**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penerapan Kepatuhan Pelayanan Publik**			**42.527.138.000**		**4.564.915.995**		**4.891.231.217**		**2.315.604.561**							**Dinas Perindag**

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	3	**30**	**Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten**				**2**	**10.000.000**	**2**	**10.000.000**	**2**	-	100,00%	96,65%	2	10.000.000	77,50%	26,44%	
	3	30	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	5	Dokumen	25.000.000	1	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100,00%	100,00 %	3	10.000.000	60,00%	40,00%	
	3	30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP, LKPJ, dan LPPD	20	Laporan	75.000.000	4	5.000.000	15	5.000.000	15	4.665.000	100,00%	93,30%	19	9.665.000	95,00%	12,89%	
	3	**30**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten**				**4**	**3.183.405.150**	**4**	**3.571.207.217**	**3**	**1.771.184.561**	**96,43%**	**87,87%**		**4.954.589.711**	19,58%	30,99%	
	3	30	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	18.397.150.000	14	3.033.855.150	14	3.381.727.217	13	3.189.905.201	92,86%	94,33%	27	6.223.760.351	45,00%	33,83%	
	3	30	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	Bulan	750.000.000	2	149.550.000	12	189.480.000	12	154.270.000	100,00%	81,42%	14	303.820.000	23,33%	40,51%	
			Koordinas dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Laporan	55.000.000					-	-	0,00%	0,00%	-	8.731.600	0,00%	15,88%	
	3	30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	20	Laporan	55.000.000					-	-	0,00%	0,00%	2	18.555.000	10,00%	33,74%	
	3	**30**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten**				**7**	**242.710.645**	**7**	**92.424.000**	**7**	**31.950.000**	**84,44%**	**71,81%**	**14**	**274.660.645**	**32,33%**	**51,94%**	
	3	30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan	60	Bulan	14.042.000			1	8.409.500	1	4.761.950	100,00%	56,63%	1	4.761.950	1,67%	33,91%	
	3	30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	305.255.000	4	66.560.700	2	15.226.800	2	15.220.000	100,00%	99,96%	6	81.780.700	10,00%	26,79%	
	3	30	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	Bulan	70.276.000					-	-	0,00%	0,00%	12	26.145.300	20,00%	37,20%	
	3	30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan konsumsi makanan minuman rapat dan tamu kantor	60	Bulan	406.905.000					-	-	0,00%	0,00%	12	53.457.500	20,00%	13,14%	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	3	30	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	Bulan	64.647.000	2	31.700.000	3	11.779.700	3	11.150.000	100,00%	94,65%	5	42.850.000	8,33%	66,28%	
	3	30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	60	Bulan	61.723.000	1	30.800.000	1	12.110.000	1	12.000.000	100,00%	99,09%	2	42.800.000	3,33%	69,34%	
	3	30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	60	Bulan	903.760.000	49	113.649.945	45	44.898.000	10	3.920.000	22,22%	8,73%	59	117.569.945	98,33%	13,01%	
	3	**30**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten**				**1**				**1**	-	0,00%	0,00%	**2**	-	5,00%	207,07 %	
	3	30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	20	Unit	366.306.000					-	-	0,00%	0,00%	1	758.500.000	5,00%	207,07 %	
	3	**30**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten**				**2**	**761.273.000**	**2**	**756.000.000**	**2**	**397.000.000**	100,00%	98,61%	4	1.158.273.000	23,33%	66,61%	
	3	30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet	60	Bulan	249.088.000	3	106.073.000	12	144.000.000	12	144.000.000	100,00%	100,00 %	15	250.073.000	25,00%	100,40 %	
	3	30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor THLS, Penjaga Malam dan Penjaga Kantor	60	Bulan	3.809.582.000	1	655.200.000	12	612.000.000	12	595.000.000	100,00%	97,22%	13	1.250.200.000	21,67%	32,82%	
	3	**30**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten**				**2**	**367.527.200**	**2**	**461.600.000**	**2**	**115.470.000**	100,00%	91,03%	4	482.997.200	30,48%	44,89%	
	3	30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	60	Bulan	2.000.000.000	16	357.947.200	12	448.780.000	12	433.353.000	100,00%	96,56%	28	791.300.200	46,67%	39,57%	
	3	30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	35	Unit	40.904.000	1	9.580.000	4	12.820.000	4	10.960.000	100,00%	85,49%	5	20.540.000	14,29%	50,22%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														**80,15%**	**74,33%**			**31,37%**	**71,32%**	
Predikat Kinerja														**T**	**S**			**SR**	**SR**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	3	30	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pasar yang di Revitalisasi**					**538.243.000**		**629.128.000**		**175.000.000**		**27,82%**	-	**713.243.000**		**-**	**Dinas Perindag**
	3	**30**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Terpenuhinya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**			**6.000.000.000**	**2**	**376.243.000**	**2**	**304.128.000**	**2**	**67.000.000**	100,00%	**91,97%**	**2**	**443.243.000**	**70,00%**	**37,26%**	
	3	30	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat	5	Pasar	5.000.000.000			2	178.828.000	2	176.923.739	100,00%	98,94%	1	1.312.670.000	20,00%	26,25%	
	3	30	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Tertata dan Sarana Kebersihan Pasar	5	Pasar	1.000.000.000	1	376.243.000	5	125.300.000	5	106.500.000	100,00%	85,00%	6	482.743.000	120,00%	48,27%	
													166.400.000							
	3	**30**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Terpenuhinya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**				**1**	**162.000.000**	**1**	**325.000.000**	1	**108.000.000**	**100,00 %**	**33,23%**	2	270.000.000	40,00%	44,10%	
	3	30	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbayarnya Honor THLS, Penjaga Kantor dan Penjaga Malam	60	Bulan	877.500.000	12	162.000.000	12	325.000.000	12	225.000.000	100,00%	69,23%	24	387.000.000	40,00%	44,10%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														**100,00 %**	**62,60%**			**55,00%**	**40,68%**	
Predikat Kinerja														**ST**	**R**			**SR**	**SR**	
	3	**30**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal**					**18.450.000**		**199.343.000**		**154.998.000**		**77,75%**	-	173.448.000	-	-	**Dinas Perindag**
	3	**30**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**			**1.800.000.000**	**2**	**18.450.000**	**2**	**199.343.000**	**2**	**154.998.000**	**100,00 %**	**92,43%**		**173.448.000**	**4,18%**	**10,22%**	
	3	30	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	24	Dok	300.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	13.800.000	100,00%	92,00%	2	25.800.000	8,33%	8,60%	
	3	30	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah KK Penerima Bantuan	7200	KK	1.500.000.000	1	6.450.000	1	184.343.000	1	171.198.000	100,00%	92,87%	2	177.648.000	0,03%	11,84%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														**100,00 %**	**92,43%**			**4,18%**	**10,22%**	
Predikat Kinerja														**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
													108.165.000							
	3	30	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**										-		**0,00%**		-			**Dinas Perindag**
	3	30	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**					3		3		3	-		**0,00%**	6	-			
	3	30	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		3200	Unit	428.000.000					-	-	0,00%	0,00%	-	47.820.000	0,00%	11,17%	
	3	30	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		2300	Orang	428.000.000					-	-	0,00%	0,00%	-	57.545.000	0,00%	13,45%	
	3	30	Penyidikan Metrologi Legal		18	Unit	79.600.000					-	-	0,00%	0,00%	-	2.800.000	0,00%	3,52%	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00%**	**0,00%**			**0,00%**	**9,38%**	
													Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
													473.611.300							
	3	30	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang di Bina**					**1.966.397.872**		**528.800.100**		**156.953.386**		**29,68%**	-	**2.123.351.258**	-	-	**Dinas Perindag**
	3	30	**Pelaksanaan Promosi ,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Terpenuhinya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri**			**571.111.000**	**2**	**1.966.397.872**	**2**	**528.800.100**	**2**	**156.953.386**		**29,68%**	**4**	**2.123.351.258**	-	-	
	3	30	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Promosi dan Pameran	37	Event	2.302.218.794	2	1.935.330.372	35	438.800.100	35	366.888.422	100,00%	83,61%	37	2.302.218.794	100,00%	100,00%	
	3	30	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pemasaran	72	Bulan	450.000.000	22	31.067.500	50	90.000.000	50	69.652.931	100,00%	77,39%	72	100.720.431	100,00%	22,38%	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00%**	**80,50%**			**100,00%**	**61,19%**	
													Predikat Kinerja	**ST**	**T**			**SR**	**ST**	
	3	31	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**					**1.324.493.100**		**1.100.907.400**		**84.000.000**		**7,63%**	-	**1.408.493.100**			**Dinas Perindag**
	3	31	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Perencanaan dan Pembangunan Industri**				**4**	**1.324.493.100**	**4**	**1.100.907.400**	**4**	**144.800.000**		**13,15%**	8	**1.469.293.100**			
	3	31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan		4	Dokumen	300.000.000					-	-	0,00%	0,00%	1	23.793.000	25,00%	7,93%	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																	
	3	31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		4	Dokumen	300.000.000					-	-	0,00%	0,00%	1	82.409.900	25,00%	27,47%	
	3	31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pelaksanaan Operasional Sarana dan Prasarana Industri	60	Bulan	2.500.000.000	4	489.468.500	12	604.067.400	12	549.035.000	100,00%	90,89%	16	1.038.503.500	26,67%	41,54%	
	3	31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku IKM dan Pengrajin	250	KUB	2.000.000.000	5	835.024.600	4	496.840.000	4	490.210.000	100,00%	98,67%	9	1.325.234.600	3,60%	66,26%	
Rata-rata capaian kinerja (%)														**100,00 %**	**94,78%**			**15,13%**	**53,90%**	
Predikat Kinerja														**ST**	**ST**			**SR**	**R**	
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**8.412.499.967**		**7.349.409.717**		**2.886.555.947**				**4.418.535.358**			
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											**96,03%**	**80,93%**			**83.81**	**79,70**	
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											**ST**	**T**			**T**	**T**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Peragkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan															
	4.01.02.2.01	**KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**																
1	4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya	78	2.844.667.500	29	610.838.000	3	95.270.000	3	95.270.000	100,00	100,00	32	706.108.000	41,03	24,82	**Bagian Tata Pemerintah Setdakab. Pesawaran**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Peragkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pelaksanaan Apkasi Kab. Pesawaran															
2	4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tersusunnya Peta Tematik, Peta Dasar dan Dokumen Penegasan Batas Wilayah	30	8.148.971.933	8	330.495.100	1	90.730.000	1	90.730.000	100,00	100,00	9	421.225.100	30,00	5,17	Bagian Tata Pemerintah Setdakab. Pesawaran
3	4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Buku LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), RLPPD, LKPJ, SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Memori Serah Terima Jabatan	25	1.953.240.000	10	407.920.836	5	946.636.100	5	946.636.100	100,00	100,00	15	1.354.556.936	60,00	69,35	Bagian Tata Pemerintah Setdakab. Pesawaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	100,00	19		43,68	33,11	
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**1.132.636.100**									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 2)												100,00	100,00			89,41	85,66	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 2)												ST	ST			T	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Terlaksananya Administrasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat															
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan PHBI, Pembinaan Qori-Qori'ah, MTQ Provinsi, Istighozah, Pelepasan dan Penyambutan Jamaah Haji, Hari Santri, Safari Ramadhan dan Pemberian Hibah)	78	117.336.350.426	13	10.945.308.828	14	10.509.597.900	14	10.509.597.900	100,00	100,00	27	21.454.906.728	34,62	18,28	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran
2		Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Pembinaan Himpunan Majelis Taklim, Festival Rebana, Pembinaan UKS dan Ponpes dan Operasional Hibah	12	4.387.867.407	3	315.747.200	4	314.350.300	4	314.350.300	100,00	100,00	7	630.097.500	58,33	14,36	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran
3		Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Peringatan Hari Nilai-Nilai Kebangsaan/PHBN dan Nilai-Nilai Kedaerahan	36	3.288.724.753	6	480.546.000	6	399.815.000	6	399.815.000	100,00	100,00	12	880.361.000	33,33	26,77	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Pesawaran
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												100,00	100,00	15		42,09	19,80	
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**11.223.763.200**									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 2)												100,00	100,00			92,49	81,11	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 2)												ST	ST			SR	SR	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Sekretariat Daerah**	**Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani**	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	3.290.649.700	100%	703.261.400	100%	1.125.328.800	162	769.243.422	16200,00	68,36	16300%	1.472.504.822	163,00	31,00	Bagian Hukum

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		**KEGIATAN BAGIAN HUKUM**	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	3.290.649.700	100%	322.155.000	100%	1.125.328.800	162	769.243.422	16200,00	68,36	16300%	1.091.398.422	163,00	20,00	Bagian Hukum
3		Sub Kegiatan 1: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	764	1.713.261.400	342	71.035.000	422	228.050.500	422	228.050.500	100,00	100,00	764	456.101.000	82,14%	16,00	Bagian Hukum
6		Sub Kegiatan 2: Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	1.200.000.000	3	106.810.000	8	664.200.000	8	663.440.000	100,00	99,89	11	1.327.640.000	50,00	68,00	Bagian Hukum
		Sub Kegiatan 3: Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2	377.388.300	2	144.310.000	422	233.078.300	422	233.021.322	100,00	99,98	424	377.331.322	78,88	69,00	Bagian Hukum
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,95	305,00	720.357.440,67	43,23	51,00	
											Predikat Kinerja	ST	ST			SR	R	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	100,00	99,95			87,05	82,00	
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	ST	ST			T	T	

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Pelayanan Publik**	**234**	**6.933.563.486**	**156**	**4.170.592.881**	**20**	**287.101.000**	**20**	**282.701.000**	**100,00**	**98,47**	**176**	**4.453.293.881**	**75,21**	**64,23**	BAGIAN PEREKONOMIAN

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Terlaksananya Kebijakan Perekonomian**															
1	4 01 03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	60	1.277.699.461	40	768.546.258	10	59.170.000	10	57.570.000	100,00	97,30	50	826.116.258	83,33	64,66	
2	4 01 03	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	24	2.299.256.101	16	1.383.020.599	5	142.931.000	5	140.131.000	100,00	98,04	21	1.523.151.599	87,50	66,25	
3	4 01 03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	72	1.200.764.953	48	722.269.548	5	85.000.000	5	85.000.000	100,00	100,00	53	807.269.548	73,61	67,23	
4	0 0 0	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Harga Bahan Pokok Strategis	Jumlah Data Bahan Pokok Strategis	72	1.229.969.771	48	739.836.476	-	-	-	-	0,00	0,00	48	739.836.476	66,67	60,15	
5	0 0 0	Penyusunan Inventarisasi Data, Identifikasi dan Publikasi Bidang Perekonomian	Jumlah Data Bidang Perekonomian	6	925.873.200	4	556.920.000	-	-	-	-	0,00	0,00	4	556.920.000	66,67	60,15	
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	98,45			75,56	63,69	
Predikat Kinerja												ST	ST			T	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
								20	**287.101.000**	**20**	**282.701.000**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)												100,00	98,45			75,56	63,69	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)												ST	ST			T	R	

Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (Periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Program Perekonomian dan Pembangunan																	
24			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		139	Buku,Laporan dan Kegiatan	6.000.000.000	21	1.704.721.500	**21**	255.110.000	6	95.957.300	28,57	37,61	27	1.800.678.800	19,42	30,01	
24	01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		24	Buku	2.256.210.000	8	615.729.500	**2**	131.172.000	2	105.449.800	100,00	80,39	10	721.179.300	41,67	31,96	Bagian Adbang
				Tersusunnya Pedoman Satuan Harga Barang Pemerintah (SSH) dan Standar Biaya masukan Pemerintah (SBM)	12	Buku		4		1										
				Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB)	12	Buku		4		1										
24	02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		**72**	Laporan	3.371.070.000	**50**	902.813.000	**12**	76.864.000	12	68.800.400	100,00	89,51	62	971.613.400	86,11	28,82	Bagian Adbang
				Terpelihara dan Tersedianya Sistem Laporan Realisasi Anggaran seta Pengawasan Realisasi Anggaran(TEPRA)	72	Laporan		48		12										
				Terlaksananya Kegiatan pameran expo tingkat provinsi lampung	2	Kegiatan		2												
24	03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		42	Buku dan Laporan	372.720.000	28	186.179.000	**7**	47.074.000	7	37.504.000	100,00	79,67	35	223.683.000	83,33	60,01	Bagian Adbang
				Tersedianya Buku Renja da Lakip Sekretariat Daerah	12	Buku		8		2										
				Tersusunnya Dokumen LKPJ Sekretariat Daerah	6	Buku		4		1										
				Tersusunnya LRFK Kabupaten Pesawaran	24	Laporan		16		4										
Rata rata Capaian Kinerja (%)														100,00	83,19			70,37	40,27	
Predikat Kinerja														ST	T			S	SR	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program											255.110.000									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														100,00	83,19			78,55	75,94	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														ST	T			T	T	

No	Kode		Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Kegiatan (Out put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
4	**01**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																
4	**01**	**01**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																
4	01	01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Audiensi Kepala Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Agama, Pimpinan/ Anggota dan Media	504	360.547.336	88	110.581.000	4	45.865.500	4	45.865.500	100,00	100,00	92	156.446.500	18,25	43,39	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	**01**	**01**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**																
4	01	01	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan acara dan Upacara Serta Bimbingan Teknis Guna Meningkatkan SDM ASN	9984	8.689.932.592	1660	2.448.260.600	4	1.371.534.600	4	1.371.534.600	100,00	100,00	1664	3.819.795.200	16,67	43,96	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	01	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Agenda Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9600	6.040.255.878	1604	1.982.453.900	4	716.112.500	4	651.461.100	100,00	90,97	1608	2.633.915.000	16,75	43,61	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	01	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Teraksananya Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan	9600	1.897.494.196	1604	814.128.500	4	472.288.500	4	383.519.000	100,00	81,20	1608	1.197.647.500	16,75	63,12	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
												2.452.380.200							
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)													100,00	93,04			17,11	48,52	
Predikat Kinerja													ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			
TOTAL JUMLAH RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	93,04			91,25	83,44	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM													ST	ST			ST	T	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun(2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**Meningkatnya penerapan kepatuhan pelayanan publik**	**1296**	**157.991.485.285**	**432**	**59.827.633.042**	**207**	**21.317.713.487**	**339**	**20.513.481.844**	**163,77**	**96,23**	**771**	**80.341.114.886**	**59,49**	**50,85**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daeerah	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**144**	**9.577.210.927**	**48**	**6.277.358.000**	**24**	**2.067.000.000**	**24**	**1.869.778.000**	**100,00**	**90,46**	**72**	**8.147.136.000**	**50,00**	**85,07**	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya tunjangan PKK,PPTK dan bendahara serta honorarium tim pelaksana kegiatan DIPA DAK	72	8.882.806.027	24	6.006.910.000	12	1.973.700.000	12	1.776.598.000	100,00	90,01	36	7.783.508.000	50,00	87,62	bagian umum
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya laporan tiap bulan dan akhir tahun	72	694.404.900	24	270.448.000	12	93.300.000	12	93.180.000	100,00	99,87	36	363.628.000	50,00	52,37	
									Rata-rata Capaian Kinerja	**100,00**	**94,94**			**50,00**	**69,99**	
									Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**SR**	**S**	
Administrasi Umum Perangkat Daeerah	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**288**	**28.098.052.671**	**96**	**9.885.380.313**	**39**	**2.178.957.200**	**39**	**2.322.426.626**	**100,00**	**106,58**	**135**	**12.207.806.939**	**46,88**	**43,45**	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor sekertariat dan kantor bupati	72	4.629.366.000	24	1.791.434.150	3	485.245.000	3	485.214.000	100,00	99,99	27	2.276.648.150	37,50	49,18	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Adanya pemenuhan kebutuhan makan dan minum kantor serta rumah dinas	72	5.805.996.525	24	2.553.611.500	12	817.250.000	12	829.432.500	100,00	101,49	36	3.383.044.000	50,00	58,27	
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Barang cetakan keperluan kantor	72	4.166.429.400	24	1.754.692.525	12	449.584.200	12	468.598.500	100,00	104,23	36	2.223.291.025	50,00	53,36	
Pemyelenggaraan apat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan konsultasi	72	13.496.260.746	24	3.785.642.138	12	426.878.000	12	539.181.626	100,00	126,31	36	4.324.823.764	50,00	32,04	
									Rata-rata Capaian Kinerja	**100,00**	**108,01**			46,88	48,21	
									Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**72**	**15.067.179.576**	**24**	**6.176.442.200**	**12**	**2.050.659.000**	**144**	**2.050.659.000**	**1200,00**	**100,00**	**168**	**8.227.101.200**	**233,33**	**54,60**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Auat Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor KDH / WKDH	72	15.067.179.576	24	6.176.442.200	12	2.050.659.000	12	2.050.659.000	100,00	100,00	36	8.227.101.200	50,00	54,60	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun(2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
									Rata-rata Capaian Kinerja	**100,00**	**100,00**			50,00	54,60	
									Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**SR**	**R**	
Penydiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**288**	**55.842.421.664**	**96**	**17.292.326.679**	**48**	**5.645.015.000**	**48**	**5.184.025.803**	**100,00**	**91,83**	**144**	**22.476.352.482**	**50,00**	**40,25**	
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	72	555.523.920	24	271.750.000	12	62.210.000	12	62.210.000	100,00	100,00	36	333.960.000	50,00	60,12	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	72	21.820.439.369	24	3.617.685.679	12	1.340.400.000	12	1.015.933.033	100,00	75,79	36	4.633.618.712	50,00	21,24	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya biaya spanduk untuk ucapan, Giant Banner,Komputer dan Printer kantor	72	1.639.567.125	24	773.042.000	12	276.005.000	12	276.005.000	100,00	100,00	36	1.049.047.000	50,00	63,98	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya biaya untuk gaji thls, keperluan sewa kantor, dan pemeliharaan rumah dinas	72	31.826.891.250	24	12.629.849.000	12	3.966.400.000	12	3.829.877.770	100,00	96,56	36	16.459.726.770	50,00	51,72	
									Rata-rata Capaian Kinerja	**100,00**	**93,09**			50,00	49,26	
									Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan layanan sarana dan prasarana gedung kantor dan gedung lainnya**	**144**	**9.420.142.561**	**48**	**4.352.819.777**	**24**	**2.547.267.000**	**24**	**2.547.267.000**	**100,00**	**100,00**	**72**	**6.900.086.777**	**50,00**	**73,25**	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laiinya	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	72	5.400.927.000	24	2.235.294.777	12	1.389.953.000	12	1.389.953.000	100,00	100,00	36	3.625.247.777	50,00	67,12	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terpeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	72	4.019.215.561	24	2.117.525.000	12	1.157.314.000	12	1.157.314.000	100,00	100,00	36	3.274.839.000	50,00	81,48	
									3	**100,00**	**100,00**			**50,00**	**74,30**	
									Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**SR**	**S**	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah**	**144**	**12.341.503.976**	**48**	**3.278.477.864**	**24**	**1.082.084.000**	**24**	**792.594.128**	**100,00**	**73,25**	**72**	**4.071.071.992**	**50,00**	**32,99**	bagian umum
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya jaminan kesehatan untuk Kepala Daerah	72	771.561.000	24	498.121.086	12	100.000.000	12	38.598.650	**100,00**	38,60	36	536.719.736	50,00	69,56	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun(2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Penyediaan Danan Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas Kepala Daerah ke luar daerah	72	11.569.942.976	24	2.780.356.778	12	982.084.000	12	753.995.478	**100,00**	76,78	36	3.534.352.256	50,00	30,55	
									Rata-rata Capaian Kinerja	**100,00**	**57,69**			**50,00**	**50,06**	
									Predikat Kinerja	**ST**	**R**			**SR**	**SR**	
Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	**Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah**	**216**	**27.644.973.909**	**72**	**12.564.828.209**	**36**	**5.746.731.287**	36	**5.746.731.287**	**100,00**	**100,00**	**108**	**18.311.559.496**	**50,00**	**66,24**	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas KDH	72	6.292.234.267	24	2.742.966.445	12	1.161.156.000	12	1.161.156.000	100,00	100,00	36	3.904.122.445	50,00	62,05	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas WKDH	72	5.117.764.113	24	2.255.305.502	12	808.396.100	12	808.396.100	100,00	100,00	36	3.063.701.602	50,00	59,86	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Penerima Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah non Departemen non Departemen / Luar negeri	72	16.234.975.529	24	7.566.556.262	12	3.777.179.187	12	3.777.179.187	100,00	100,00	36	11.343.735.449	50,00	69,87	
									Rata-rata Capaian Kinerja	**100,00**	**100,00**			**50,00**	**63,93**	
									Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**SR**	**R**	
									Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program	**21.317.713.487**	**20.513.481.844**					
									Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7)	**100,00**	**93,39**			**87,00**	**81,39**	
									Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7)	**ST**	**ST**			**T**	**T**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																**Bagian Perlengkapan**
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	24	1.064.118.930	16	645.180.819	4	125.455.000	4	110.724.557	100,00	88,26	20	755.905.376	83,33	71,04	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terdisdribusi dan tersimpannya BMD dengan baik	5728	675.188.650	3956	568.416.300	1836	169.808.300	1832	167.434.250	99,78	98,60	5788	735.850.550	101,05	108,98	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur	3084	2.616.340.500	2219	1.697.132.000	1124	753.650.000	1124	743.497.350	100,00	98,65	3343	2.440.629.350	108,40	93,28	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasional	320	10.704.682.300	55	6.639.651.000	10	5.012.465.829	10	5.012.465.829	100,00	100,00	65	11.652.116.829	20,31	108,85	
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeuler	1500	8.778.431.000	726	5.814.186.000	554	2.964.245.000	554	2.964.245.000	100,00	100,00	1280	8.778.431.000	85,33	100,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	824	8.456.972.907	310	5.786.457.050	148	2.670.515.857	148	2.670.515.857	100,00	100,00	458	8.456.972.907	55,58	100,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional	1000	34.009.962.500	622	20.900.927.218	149	6.379.449.493	76	6.371.776.147	51,01	99,88	698	27.272.703.365	69,80	80,19	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	92,97	97,91			74,83	94,62	
											Predikat Kinerja	ST	ST			S	ST	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**18.040.658.990**									
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 5)										92,97	97,91			90,11	88,52	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 5)										ST	ST			ST	T	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Sekretariat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**	Persentase Penerapan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	100	8.360.000.000	60,53	3.235.906.656	100	620.712.000	0,00	335.592.456	0,00	54,07	60,53	3.571.499.112	60,53	42,72	Bagian Organisasi
2		**KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI**	Persentase Peningkatan Penataan Organisasi	100	8.360.000.000	60,53	3.235.906.656	100	620.712.000	0,00	335.592.456	0,00	54,07	60,53	3.571.499.112	60,53	42,72	Bagian Organisasi
3		Sub Kegiatan 1: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45	2.280.000.000	30	831.678.200	38	191.039.400	38	191.039.400	100,00	100,00	68	1.022.717.600	151,11	44,86	Bagian Organisasi
4		Sub Kegiatan 2: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	1.965.000.000	3	654.768.800	1	80.343.100	1	80.343.100	100,00	100,00	4	735.111.900	66,67	37,41	Bagian Organisasi
5		Sub Kegiatan 3: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7	845.000.000	4	243.945.300	1	36.518.000	1	36.518.000	100,00	100,00	5	280.463.300	71,43	33,19	Bagian Organisasi
6		Sub Kegiatan 4: Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	1.290.000.000	3	813.285.080	1	193.957.000	1	193.957.000	100,00	100,00	4	1.007.242.080	66,67	78,08	Bagian Organisasi
7		Sub Kegiatan 5: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12	1.980.000.000	6	692.229.276	2	118.854.500	2	118.854.500	100,00	100,00	8	811.083.776	66,67	40,96	Bagian Organisasi
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00	30,01	771.323.731	84,51	46,90	

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											Predikat Kinerja	ST	ST			T	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	100,00	100,00	30,01	771.323.731	84,51	80,17	
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	ST	ST			T	T	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	4	**02**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	***Kecepatan, Ketetapan, dan keakuratan Pelayanan Administrasi Perkantoran***	**100 bulan**	**213.435.809.994**	**31.259.162.527**		**119.122.101.712**		**36.651.535.940,00**				**102.030.806.345**			
	4	**02**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100 %**		**150.789.812**		**351.750.582**		**351.750.582,00**	**100,00**	**100,00**			**49,29**	**48,98**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran	35 dokumen	309.300.000	11	97.620.000	6	60.341.000	6	60.341.000	100,00	100,00	17	157.961.000	48,57	51,07	Sekreatriat DPRD Kabupaten Pesawaran
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan triwulan dan keikut sertaan pameran pembangunan	30 laporan	1.110.458.000	10	229.248.212	5	291.409.582	5	291.409.582	100,00	100,00	15	520.657.794	50,00	46,89	
	4	**02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Adminsitrasi Keuangan OPD**	**100 %**		**3.102.904.948**		**3.638.567.472**		**3.585.734.272**	**100,00**	**95,51**			**37,06**	**43,55**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersediany gaji dan tunjangan ASN	198	Orang/Bulan	15.765.981.674	56	5.053.698.126	23	3.044.712.872	23	3.044.712.872	100,00	100,00	79	8.098.410.998	39,90	51,37	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terbayarnya honorarium tim penata usahaan pengelolaan keuangan	696	dokumen	3.745.311.800	232	1.144.121.100	116	585.269.600	116	532.656.400	100,00	91,01	348	1.676.777.500	50,00	44,77	
			koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Tersedianya dokumen LKPJ, CALK , LAKIP, LPPD	24	laporan	31.650.000	4	6.330.000	4	6.330.000	4	6.330.000	100,00	100,00	8	12.660.000	33,33	40,00	
			penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen prognosis	12	dokumen	11.275.000	1	2.255.000	2	2.255.000	2	2.035.000,00	100,00	90,24	3	4.290.000	25,00	38,05	
	4	**02**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah**	**100**	**%**			**0**		0	-	-					**16,67**	**26,49**	
			pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD dan unsur Sekretariat DPRD	6	paket	491.400.000	1	130.150.000		0	-	-			1	130.150.000	16,67	26,49	
	4	**02**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah**	**100**	**%**			**2.300.936.256**		**3.883.835.000**	-	**3.509.512.313**	**106,44**	**102,97**			**55,54**	**44,31**	
			Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.	Tersedianya instalasi komponen listrik.	72	paket	196.212.000,00	23	45.714.000	12	34.926.000	11	28.826.000	91,67	82,53	34	74.540.000	47,22	37,99	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas staf sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja alat kelengkapan DPRD Kab. Pesawaran	72	paket	383.053.000	24	56.350.800	12	24.000.000	12	24.000.000,00	100,00	100,00	36	80.350.800	50,00	20,98	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya sarana dan	72	paket	502.635.200	24	173.093.000	12	44.592.000	11	40.127.200	91,67	89,99	35	213.220.200	48,61	42,42	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				prasarana fasilitas staf sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja alat kelengkapan DPRD Kab. Pesawaran																
			Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya makan minum ketua, rata-rapat .	72	paket	756.340.000	24	158.000.000	12	152.065.000	11	152.065.000	91,67	100,00	35	310.065.000	48,61	41,00	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	72	paket	436.696.000	24	54.183.000	12	149.000.000	11	139.287.000	91,67	93,48	35	193.470.000	48,61	44,30	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .	198	dokumen	8.385.016.000,00	66	2.570.251.000	33	1.719.176.000	30	1.719.176.000	90,91	100,00	96	4.289.427.000	48,48	51,16	
			fasilitasi Kunjungan tamu	Tersedianya makan minum tamu	72	laporan	1.369.100.000,00	24	123.417.500	12	526.800.000	11	374.761.700	91,67	71,14	35	498.179.200	48,61	36,39	
			Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	144	laporan	11.246.353.000	47	3.008.680.956	24	1.233.276.000	23	1.031.269.413	95,83	83,62	70	4.039.950.369	48,61	35,92	
	4	**02**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**			**13.980.000**		**1.543.801.500**	-	**907.482.550,00**	**90,00**	**77,02**			**7,80**	**25,64**	
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler Kantor	192	unit	429.289.000			20	465.200.000	16	325.154.000	80,00	69,90					
			Pengadan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas staf sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja alat kelengkapan	410	unit	2.093.661.500	62	165.980.000	2	1.078.601.500	2	907.482.550	100,00	84,14	64	1.073.462.550	15,61	51,27	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				DPRD Kab. Pesawaran																
	4	**02**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD**	**100**	**%**			**1.918.531.801**		**2.606.160.000**	-	**2.304.682.762,00**	**94,44**	**87,25**			**48,61**	**46,72**	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materai.	72	laporan	44.800.000	24	14.400.000	12	8.000.000	12	8.000.000	100,00	100,00	36	22.400.000	50,00	50,00	
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik.	72	laporan	1.795.800.000	23	518.391.801	12	342.960.000	10	242.362.762	83,33	70,67	33	760.754.563	45,83	42,36	
			Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan, Sopir dan Keamanan	72	laporan	11.324.100.000	24	3.358.050.000	12	2.255.200.000	12	2.054.320.000	100,00	91,09	36	5.412.370.000	50,00	47,80	
	4	**02**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**			**1.001.108.017**		**2.856.200.000**	-	**1.992.218.204,00**	**88,15**	**64,56**			**39,73**	**39,24**	
			Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya,pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraaan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional,	90	unit	5.680.620.000	29	1.292.108.017	15	1.362.890.000	13	1.056.982.701	86,67	77,55	42	2.349.090.718	46,67	41,35	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor Sekretariat DPRD dan DPRD.	339	unit	1.366.980.000	107	344.000.000	9	225.570.000	7	116.210.000	77,78	51,52	114	460.210.000	33,63	33,67	
			Pemeliharaan /Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	18	unit	3.057.940.000	6	486.650.000	1	1.267.740.000	1	819.025.503	100,00	64,61	7	1.305.675.503	38,89	42,70	
	4	**02**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100**	**%**					**42.484.297.693**	-	**21.961.620.107,00**	**96,30**	**48,65**			**39,36**	**46,91**	
			Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	Tersedianya gaji dan tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD	260	Orang/Bulan	126.471.552.520	90	41.247.632.693	45	41.247.632.693	40	21.177.988.607	88,89	51,34	130	62.425.621.300	50,00	49,36	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD dan unsur Sekretariat DPRD	6	paket	3.596.940.000	2	1.115.165.000	1	1.115.165.000	1	750.439.500	100,00	67,29	3	1.865.604.500	50,00	51,87	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya kegiatan medichal chek up Pimpinan, Anggota	260	Paket	391.500.000	46	121.500.000	1	121.500.000	1	33.192.000	100,00	27,32	47	154.692.000	18,08	39,51	
	4	**02**	**Layanan Administrasi DPRD.**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas-tugas DPRD**	**100**	**%**			**1.780.648.000**		**2.372.313.900**	-	**2.038.535.150,00**	**99,00**	**84,84**			**49,72**	**47,16**	
			Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Tersedianya rapat-rapat alat kelengapan dewan.	900	laporan	5.255.845.300	298	1.615.280.200	150	1.097.313.900	147	771.335.150	98,00	70,29	445	2.386.615.350	49,44	45,41	
			Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kab. Pesawaran	24	paket	7.186.000.000	8	2.247.000.000	4	1.275.000.000	4	1.267.200.000	100,00	99,39	12	3.514.200.000	50,00	48,90	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	96,79	82,60			38,20	41,00	
													Predikat kinerja	**ST**	**T**			**SR**	**SR**	
4	**02**		**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	***Cakupan Layanan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.***	**100**	**persen**	**91.978.315.440**		**10.285.718.858**		**11.761.172.820**		**9.159.573.641**							
	4	**02**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	***Persentase Perda dan Perda Prakarsa Yang Disahkan***	**100**	**%**			**1.485.835.300**		**2.049.681.350**		**1.932.780.000**	96,67	94,46			**48,89**	**51,33**	
			Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Perda yang disahkan dan Perda Inisiatif DPRD	6	dokumen	7.491.164.070	2	2.318.837.100	1	1.231.765.850	1	1.153.356.000	100,00	93,63	3	3.472.193.100	50,00	46,35	Sek DPRD
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Disetujui dan disyahkan Ranperda Inisiatif Dewan menjadi Perda.	90	dokumen	3.230.079.000	29	1.039.330.500	15	817.915.500	14	779.424.000	93,33	95,29	43	1.818.754.500	47,78	56,31	
	4	**02**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pembahasan dan**	**100**	**%**			**107.550.000**		**135.000.000**	-	**95.199.000**	**100,00**	**69,40**			**50,00**	**30,73**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan Yang di Sahkan															
			Pembahasan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS	6 dokumen	201.753.000	2	40.000.000	1	25.000.000	1	20.224.000	100,00	80,90	3	60.224.000	50,00	29,85	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6 dokumen	204.566.000	2	40.000.000	1	25.000.000	2	24.290.000	200,00	97,16	4	64.290.000	66,67	31,43	
			Pembahasan APBD	Tersdianya Dokumen APBD	6 dokumen	394.533.000	2	151.065.000	1	30.000.000	1	28.405.000	100,00	94,68	3	179.470.000	50,00	45,49	
			Pembahasan Perubahan APBD	Tersdianya Dokumen Perubahan APBD	6 dokumen	292.724.000	2	57.550.000	1	30.000.000	1	22.280.000	100,00	74,27	3	79.830.000	50,00	27,27	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersdianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD	6 dokumen	204.156.000	2	40.000.000	1	25.000.000	-	-	0,00	0,00	2	40.000.000	33,33	19,59	
	4	**02**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Pembahasan dan Pengesahan Perda Pengelolaan Keuangan Yang Tepat Waktu**	**100** **%**			**19.777.600**		**25.000.000**	-	**25.000.000**	**100,00**	**100,00**			**50,00**	**29,61**	
			Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Tersedianya dokumen LKPJ Kepala Daerah	6 dokumen	234.353.900	2	44.397.900	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00	3	69.397.900	50,00	29,61	
	4	**02**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis**	**100** **%**			**2.416.296.030**		**2.938.808.940**	-	**1.963.555.142**	**86,92**	**75,04**			**26,94**	**55,10**	
			Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	**24** dokumen	4.320.234.800		393.524.800	1		-								
			Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya kegiatan kapasitas DPRD.	270 dokumen	7.727.555.840	8	3.411.718.230	4	2.153.858.940	3	1.236.011.392	75,00	57,39	11	4.647.729.622	4,07	60,14	
			Pubikasi dan dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan kehumasan DPRD.	516 dokumen	4.549.380.000	172	1.549.560.000	86	784.950.000	85	727.543.750	98,84	92,69	257	2.277.103.750	49,81	50,05	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
	4	**02**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100**	**%**			**1.075.465.000**		**1.862.720.000**	**-**	**1.644.430.500**	**77,08**	**69,33**			**45,14**	**42,88**	
			Kunjungan Kerja dalam daerah	Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD.	48	laporan	6.143.140.000	15	1.558.425.000	8	342.600.000	7	134.800.000	87,50	39,35	22	1.693.225.000	45,83	27,56	
			Pelaksanaan reses	Terserapnya aspirasi Masyarakat	18	dokumen	7.161.148.000	6	2.657.975.000	3	1.520.120.000	2	1.509.630.500	66,67	99,31	8	4.167.605.500	44,44	58,20	
	4	**02**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD**	**100**	**%**			**5.180.794.928**		**4.749.962.530**	**-**	**3.498.608.999**	**97,33**	**73,66**			**60,34**	**36,89**	
			Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD.	522	dokumen	49.823.527.830	169	14.883.346.428	150	4.749.962.530	146	3.498.608.999	97,33	73,66	315	18.381.955.427	60,34	36,89	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	93,00	80,31			46,89	41,09	
													Predikat kinerja	**ST**	**T**			**SR**	**SR**	
4	**01**	**03**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**	***Pengetahuan Dasar dan Kompetensi terhadap Aparatur meningkat.***	**100**	**persen**	**2.371.136.200**	**0**	**0**		**0**		**-**							
	01	02	Pendidikan dan peltihan Formal.	Terfasilitasinya pelaksanaan Bintek Bagi PNS diligkungan Sekretariat DPRD	186	0rang	2.371.136.200	145		0	0	-	-			145	-	77,96	0,00	Sek DPRD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			77,96	0,00	
													Predikat kinerja	SR	SR			T	SR	
4	**01**	**02**	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.**	***Cakupan Layanan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.***	**100**	**persen**	**1.183.805.850**		**63.347.500**	**100**	**0**		**-**				**63.347.500**			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Keikutsertaan pameran pembangunan	Terlaksananya Pameran DPRD.	10 kali	491.475.850	6	63.347.500							6	63.347.500	60,00	12,89	
		Penyebar luasan Informasi Pemerintah daerah.	Terpublikasinya Informasi Pembangunan Daerah.	kali	692.330.000					-	-	0,00	0,00	-	-		0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00			6,00	1,29	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									**130.883.274.532**		**45.811.109.581,00**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												94,90	81,46			85,01	81,04	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												**ST**	**T**			**T**	**T**	

No	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	**05**	***Program Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***			**15.602.849.300**		**8.221.556.528**		**3.194.771.393**		**3.070.188.818**				**11.291.745.346**			
1	**05**	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***			**200.000.000**		**8.560.000**		**3.542.000**		**3.542.000**	**0,00**	**0,00**		**12.102.000**	**0,00**	**0,00**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	100.000.000	2	4.000.000	4	1.482.000	4	1.482.000	100,00	100,00	6	5.482.000	30,00	5,48	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	100.000.000	2	4.560.000	3	2.060.000	3	2.060.000	100,00	100,00	5	6.620.000	33,33	6,62	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	100,00			31,67	6,05	
Predikat Kinerja												**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	

No	Kode		Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	1	**05**	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				**10.902.408.000**		**6.208.066.370**		**2.435.746.793**		**2.432.716.793**	**0,00**	**0,00**		**8.640.783.163**	**0,00**	**0,00**	
			Penyediaan Gaji ddan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72	Bulan	9.947.700.000	36	5.700.914.370	12	2.257.685.593	12	2.257.685.593	100,00	100,00	48	7.958.599.963	66,67	80,00	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	72	Bulan	899.708.000	36	507.152.000	12	175.561.200	12	172.531.200	100,00	98,27	48	679.683.200	66,67	75,54	BADAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	10	Laporan	55.000.000	-	-	2	2.500.000	2	2.500.000	100,00	100,00	2	2.500.000	20,00	4,55	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,42			51,11	53,36	
													Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**R**	**R**	
	1	**05**	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***				**683.410.000**		**305.547.404**		**52.506.300**		**27.954.300**	**0,00**	**0,00**	**-**	**333.501.704**	**0,00**	**0,00**	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	20.000.000	34	30.261.500	12	4.658.300	12	4.658.300	100,00	100,00	46	34.919.800	76,67	174,60	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	125.000.000	36	103.027.200	5	3.569.000	3	3.569.000	60,00	100,00	39	106.596.200	156,00	85,28	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bulan	61.000.000	36	28.200.000	10	6.240.000	10	5.200.000	100,00	83,33	46	33.400.000	76,67	54,75	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Kali	477.410.000	41	144.058.704	25	38.039.000	25	14.527.000	100,00	38,19	66	158.585.704	44,00	33,22	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	90,00	80,38			88,33	86,96	
													Predikat Kinerja	**T**	**T**			**T**	**T**	
	1	**05**	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				**110.000.000**				**10.000.000**		**-**				**-**			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	Unit	110.000.000	-	-	1	10.000.000	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,00			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	**SR**	**SR**			SR	SR	
	1	**05**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				**1.597.000.000**		**728.932.504**	**0**	**257.200.000**		**243.575.470**				**972.507.974**			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	128.000.000	36	55.932.504	36	28.800.000	36	24.075.470	100,00	83,60	72	80.007.974	120,00	62,51	BADAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	Bulan	1.469.000.000	36	673.000.000	35	228.400.000	30	219.500.000	85,71	96,10	66	892.500.000	91,67	60,76	

No	Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	92,86	89,85			105,83	61,63	
											Predikat Kinerja	**ST**	**T**			**ST**	**R**	
	1 05	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**2.110.031.300**		**970.450.250**	**0**	**435.776.300**		**362.400.255**				**1.332.850.505**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 Unit	2.110.031.300	28	970.450.250	11	435.776.300	9	362.400.255	81,82	83,16	37	1.332.850.505	82,22	63,17	BADAN
											Rata-rata capaian kinerja (%)	81,82	83,16			82,22	63,17	
											Predikat Kinerja	**T**	**T**			**T**	**R**	
	1 05	***Program Penanggulangan Bencana***			**4.693.145.000**		**1.050.436.200**		**450.881.800**		**349.882.843**							
	1 05	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***			**230.000.000**		**76.050.000**	**0**	**45.802.800**		**44.902.800**				**120.952.800**			
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota secara tatap muka	160 Orang	230.000.000	50	76.050.000	90	45.802.800	90	44.902.800	100,00	98,04	140	120.952.800	87,50	52,59	BADAN
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	98,04			87,50	52,59	
											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**			**T**	**R**	
	1 05	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***			**2.243.455.000**		**375.771.200**		**145.000.000**		**87.982.987**				**463.754.187**			
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	10 Kegiatan	750.000.000	3	140.000.000	250	20.000.000	-	-	0,00	0,00	3	140.000.000	30,00	18,67	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	39 Rakor	1.133.455.000	3	207.951.200	36	100.000.000	36	78.896.987	100,00	78,90	39	286.848.187	100,00	25,31	
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	4 Dokumen	360.000.000	1	27.820.000	1	25.000.000	1	9.086.000	100,00	36,34	2	36.906.000	50,00	10,25	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	66,67	38,41			60,00	18,08	
											Predikat Kinerja	**SR**	**SR**	-		**R**	**SR**	
	1 05	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***			**2.219.690.000**		**598.615.000**		**212.079.000**		**187.637.056**				**786.252.056**			
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari	90 Orang	1.207.565.000	54	421.410.000	18	148.500.000	18	145.779.992	100,00	98,17	72	567.189.992	80,00	46,97	

No	Kode			Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman																
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	407	Item	1.012.125.000	7	177.205.000	40 0	63.579.000	400	41.857.064	100,0 0	65,83	40 7	219.062.064	100,0 0	21,64	
														Rata-rata capaian kinerja (%)	100,0 0	82,00			90,00	34,31	
														Predikat Kinerja	**ST**	**T**			**T**	**SR**	
	1	**05**		***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***				**-**		**-**		**48.000.000**		**29.360.000**				**29.360.000**			
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-	Kegiatan	-	-	-	1	48.000.000	1	29.360.000	100,0 0	61,17	1	29.360.000	0,00	0,00	
														Rata-rata capaian kinerja (%)	100,0 0	61,17			0,00	0,00	
														Predikat Kinerja	**ST**	**R**			**SR**	**SR**	
														JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM :	3.645.653.193	3.420.071.661					
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	83,13	73,24			88,84	83,45	
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**T**	**S**			**T**	**T**	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100**	**persen**	**7.630.057.718**		3.418.876.115		**3.503.953.976**	**0**	**2.746.693.270**	**0,00**	**1089,05**	**0**	**6.165.569.385**	**0,00**	**0,00**	
		2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	60	laporan	169.537.500	30	20.380.800	12	30.761.000	12	30.208.000	100,0 0	98,20	42	50.588.800	70,00	29,84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta belanja tambahan penghasilan ASN	28	bulan	2.990.325.218		2.747.952.615	28	2.861.120.676	25	2.140.445.270	89,29	74,81	25	4.888.397.885	89,29	163,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	194	org	1.570.725.000	161	165.700.000	74	116.040.000	74	105.060.000	100,00	90,54	235	270.760.000	121,13	17,24	
		Penyediaan Persalatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	177	Jenis	144.750.000	122	41.492.500	18	29.981.000	18	29.944.500	100,00	99,88	140	71.437.000	79,10	49,35	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48	set	204.450.000	34	6.725.900	8	1.800.000	8	1.800.000	100,00	100,00	42	8.525.900	87,50	4,17	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan perundang-undangan	36	eksamplar	108.000.000	26	800.000	5	3.600.000	5	3.600.000	100,00	100,00	31	4.400.000	86,11	4,07	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat dan koordinasi konsultasi	2158	kali	773.445.000	1570	22.560.000	194	4.560.000	194	4.560.000	100,00	100,00	1764	27.120.000	81,74	3,51	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber daya air dan listrik	12	Jenis	126.000.000	10	13.583.300	2	12.000.000	2	4.249.500	100,00	35,41	12	17.832.800	100,00	14,15	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terpenuhinya honorarium pegawai honorer	13	bulan	117.000.000		151.000.000	13	123.400.000	13	116.400.000	100,00	94,33	13	267.400.000	100,00	228,55	
		Penyediaan Pemeliharaan,jasa pemeliharan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	36	Unit	1.180.200.000	24	188.461.000	12	267.081.300	12	256.826.000	100,00	96,16	36	445.287.000	100,00	37,73	
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan liannya	Jumlah penyediaan sewa gedung kantor	6	unit	150.000.000	4	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00	100,00	5	75.000.000	83,33	50,00	
		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	75	unit	95.625.000	41	35.220.000	3	3.610.000	3	3.600.000	100,00	99,72	44	38.820.000	58,67	40,60	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	99,11	90,75			88,07	53,56	
												Predikat kinerja	ST	ST			T	R	
02		**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100.00**	**persen**	**114.400.000**		**566.215.000**		**373.581.000**		**346.771.500**				**912.986.500**			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanganan ideologi radikalisme	203	Tim (anggota)	114.400.000		**197.380.000**	**2**	20.931.000	**2**	-	**100,00**	**0,00**	**2**	**20.931.100**	**0,99**	**18,30**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2025)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Ideologi Pancasila dan Karakter KebangsaanPelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dan jumlah sosialisasi wawasan kebangsaan															
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanPembentukan Paskibraka		10	5.355.000	**2**	2.705.000	2	2.650.000	0	-	0,00	0,00	2	2.705.000	20,00	50,51	
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah pelaksanaan pembinaan penanganan ideologi radikalisme dan jumlah sosialisasi wawasan kebangsaan	20	716.130.000	5	366.130.000	2	350.000.000	2	346.771.500	100,00	99,08	7	712.901.500	35,00	99,55	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	99,08			27,50	75,03	
											Predikat kinerja	SR	ST			SR	T	
03		**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**	**100.00**	**persen**	**1.015.184.000**		**22.318.729.100**		**21.023.589.739**		**358.904.000**							
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai					**44.950.000**		33.725.000		**1.304.000**							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
		Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya dan tersalurnya bantuan partai politikmdan monitoring,evaluasi serta pelaporan	60	bulan	43.263.643.839	42	22.273.779.100	12	20.989.864.739	12	357.600.000	100,00	1,70	54	22.631.379.100	90,00	52,31	
													Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00	1,70			90,00	52,31	
													Predikat kinerja				ST	SR			T	R	
04		**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100.00**	**persen**			**2.414.694.600**		**2.651.896.000**		**1.498.644.000**							
		Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah dan tersalurnya bantuan hibah pada ormas/lsm dan instansi vertikal	60	bulan	3.913.338.600	42	2.414.694.600	12	2.651.896.000	12	1.498.644.000	100,00	56,51	54	3.913.338.600	90,00	100,00	
													Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00	56,51			90,00	100,00	
													Predikat kinerja				ST	R			T	ST	
06		**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konfliks Sosial**	**100.00**	**persen**			**773.400.000**		**654.300.000**		**449.000.000**				**1.222.400.000**			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelegen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi dan komunikasi Pemerintahan Daerah dengan Unsur Intelegen dan elemen masyarakat {KOMINDA)	240	Tim (anggota)	1.797.000.000	125	104.600.000	12	167.900.000	12	145.000.000	100,00	86,36	137	249.600.000	57,08	13,89	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelegen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tercapainya koordinasi dengan aparatur POLRI dan TNI	62	kali	1.522.500.000	35	668.800.000	12	486.400.000	12	304.000.000	100,00	62,50	47	972.800.000	75,81	63,89	
													100,00	74,43			66,44	38,89	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**28.207.320.715**						**4.951.012.770**	ST	S			S	SR	
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)											89,82	64,50			89,60	83,29	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)											T	R			T	T	

No	Kode Rek		Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
7	**01**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2.028.049.213**		**1.908.114.417**							
7	**01**	**01**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**			**12.210.200**		**14.766.200**		**6.951.200**		**6.951.200**							
7	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	12.210.000	3	9.466.200	1	4.104.000	1	4.104.000	100,00	100,00	4	13.570.200	80,00	111,14	
7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	8.147.200	1	5.300.000	1	2.847.200	1	2.847.200	100,00	100,00	2	8.147.200	100,00	100,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**100,00**			**90,00**	**105,57**	
												Predikat kinerja	ST	ST			T	ST	
7	**01**	**01**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**			**9.309.848.762**		**6.278.545.956**		**1.616.138.113**		**1.555.403.317**							**Kecamatan Gedong Tataan**
7	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60	7.375.157.082	48	5.439.072.956	12	1.553.171.613	12	1.492.663.017	100,00	96,10	60	6.931.735.973	100,00	93,99	
7	01	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	1.934.691.680	48	839.473.000	12	62.966.500	12	62.740.300	100,00	99,64	60	902.213.300	83,33	46,63	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**97,87**			**91,67**	**70,31**	
												Predikat kinerja	ST	ST			ST	S	
7	**01**	**01**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**			**430.670.570**		**317.846.400**		**47.909.900**		**38.089.900**							
7	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	72	68.779.450	48	61.346.400	12	17.048.600	12	17.048.600	100,00	100,00	60	78.395.000	83,33	113,98	
7	01	01	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	72	21.315.300	36	9.000.000	12	5.365.900	9	5.365.900	75,00	100,00	45	14.365.900	62,50	67,40	
7	01	01	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	72	106.789.653	36	46.515.000	12	15.565.000	12	10.175.000	100,00	65,37	48	56.690.000	66,67	53,09	
7	01	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	72	37.161.651	48	27.535.000	12	8.130.400	12	8.130.400	100,00	100,00	60	35.665.400	83,33	95,97	
7	01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan	72	36.662.316	36	18.000.000			-	-			36	18.000.000	50,00	49,10	

No	Kode Rek		Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
				Peraturan Perundang-undangan															
7	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72	159.962.200	48	155.450.000	12	1.800.000	3	1.800.000	25,00	100,00	51	157.250.000	70,83	98,30	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**66,67**	**77,56**			**69,44**	**79,64**	
												Predikat kinerja	S	T			S	T	
4	**11**	**01**	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**51.156.720**		**7.000.000**											
4	11	01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	7.000.000	1	7.000.000			-	-			1	7.000.000	50,00	100,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**			**50,00**	**100,00**	
												Predikat kinerja	SR	SR			SR	ST	
4	**11**	**01**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**			**51.156.720**		**14.400.000**											
4	11	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN	24	51.156.720	24	14.400.000			-	-			24	14.400.000	100,00	28,15	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**			**100,00**	**28,15**	
												Predikat kinerja	SR	SR			ST	SR	
7	**01**	**01**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**285.625.020**		**358.338.390**		**241.200.000**		**191.900.000**							
7	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	12.789.180	36	4.750.000	12	800.000	12	800.000	100,00	100,00	48	5.550.000	66,67	43,40	
7	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	72	42.630.600	48	23.188.390	12	6.000.000	12	6.000.000	100,00	100,00	60	29.188.390	83,33	68,47	
7	01	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Petugas Tenaga Kontrak	72	230.205.240	48	330.400.000	12	234.400.000	12	185.400.000	100,00	79,10	60	515.800.000	83,33	224,06	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**93,03**			**77,78**	**111,98**	
												Predikat kinerja	ST	ST			T	ST	
7	**01**	**01**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**611.899.141**		**391.275.500**		**115.850.000**		**115.770.000**							**Kecamatan Gedong Tataan**

No	Kode Rek		Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
7	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	72	583.478.741	48	380.840.000	12	115.850.000	12	115.770.000	100,00	99,93	60	496.610.000	83,33	85,11	
7	01	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	6	28.420.400	3	10.435.500			-	-			3	10.435.500	50,00	36,72	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**99,93**			**66,67**	**60,92**	
												Predikat kinerja	ST	ST			S	R	
7	**01**	**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**21.055.400**		**14.733.000**							
7	**01**	**02**	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**			**83.029.360**		**31.761.000**		**18.800.400**		**12.478.000**							
7	01	02	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	JumlahKoordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	83.029.360	2	31.761.000	1	18.800.400	1	17.820.400	100,00	94,79	3	49.581.400	60,00	59,72	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**94,79**			**60,00**	**59,72**	**Kecamatan Gedong Tataan**
												Predikat kinerja	ST	ST			R	R	
7	**01**	**02**	**KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**			**13.736.475**		**12.810.000**		**2.255.000**		**2.255.000**							
7	01	02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	13.736.475	2	12.810.000	1	2.255.000	1	2.255.000	100,00	100,00	3	15.065.000	75,00	109,67	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**100,00**			**75,00**	**109,67**	
												Predikat kinerja	ST	ST			S	ST	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**2.049.104.613**		**1.922.847.417**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)									**95,24**	**94,74**			**75,62**	**80,66**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)									ST	ST			T	T	

No	Urusan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra RPJMD pada Tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Restra RPJMD s/d TAhun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	KEWILAYAHAN	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kot**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	1		2.722.786.149		535.261.330		522.919.400									
		Administrasi keuangan perangkat daerah																	
		penyediaan gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji ASN	72		1.338.478.542	48	1.185.982.433	14	1.288.557.347	12	1.208.582.138	85,71	93,79	60	2.474.539.780	83,33	184,88	
		Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja OPD																	
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	72	bln	12.210.200	48	12.251.500	12	10.516.000	12	10.516.100	100,00	100,00	60	22.767.500	83,33	186,46	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realsasi kinerja SKPD	6	dok	34.060.353	4	13.242.000	6	11.391.400	4	8.513.000	66,67	74,73	8	24.633.400	133,33	72,32	Kecamatan Tegineneng
		Administrasi keuangan perangkat Daerah																	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKBD	Tersedianya Penatausahaan dan pengujian dan verifikasi keuangan SKPD	6	dok	34.060.353	4	60.800.000	4	57.428.200	4	57.428.200	100,00	100,00	8	118.228.200	133,33	347,11	
		Administrasi umum perangkatdaerah											93,75	84,30			79,51	113,25	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	72	bln	9.888.168	48	19.719.500	12	12.024.000	12	12.124.000	100,00	100,83	60	31.843.500	83,33	322,04	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bln	17.762.250	48	5.601.500	4	3.309.800	4	3.309.800	100,00	100,00	52	8.911.300	72,22	50,17	

No	Urusan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra RPJMD pada Tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Restra RPJMD s/d TAhun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	JumlahPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	bln	17.053.240	48	4.400.000	12	4.800.000	12	4.800.000	100,00	100,00	60	9.200.000	83,33	53,95	
		penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah tersedianya dana penunjang perjalanan perjalanan dinas	72	bln	124.372.900	48	24.370.000	12	24.750.000	9	9.000.000	75,00	36,36	57	33.370.000	79,17	26,83	
		penyediaan jasapenunjang urusan pemerintah daerah											83,33	76,13			83,10	18,89	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	item	106.576.500	48	6.735.330	12	12.000.000	12	7.299.155	100,00	60,83	60	14.034.485	83,33	13,17	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa tenaga kontrak 18 orang , kebersihan	35	orang	2.055.761.565	17	267.000.000	18	261.400.000	12	239.000.000	66,67	91,43	29	506.000.000	82,86	24,61	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah											100,00	97,67			83,33	78,29	
		Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	jumlah terpeliharanya kendaraan dinas	72	bln	311.040.620	48	121.141.500	12	125.300.000	12	122.382.760	100,00	97,67	60	243.524.260	83,33	78,29	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	84,67	80,00			83,11	98,96	
												Predikat kinerja	T	T			T	ST	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1		185.595.040		78.788.600		54.133.300									
		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat kecamatan	6	kegiatan	100.123.640	4	47.485.200	1	19.853.300	1	11.740.000	100,00	59,13	5	67.338.500	83,33	67,26	Kecamatan Tegineneng

No	Urusan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra RPJMD pada Tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Restra RPJMD s/d TAhun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		daerah dan instansi vertikal lainnya																	
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah rekomendasi perizinan non usaha yang dikeluarkan	50	dok	42.735.700	20	17.168.000	10	17.220.000	9	9.188.500	90,00	53,36	29	34.388.000	58,00	80,47	
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinanan	Jumlah pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin usaha UMKM	350	Izin	42.735.700		14.135.400	50	17.060.000	30	9.867.000	60,00	57,84	30	31.195.400	8,57	73,00	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	83,33	56,78			49,97	73,57	
												Predikat kinerja	T	R			SR	S	
										577.052.700									
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 577.052.700							
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	84,00	68,39			89,04	86,26	
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	T	S			T	T	

No	KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	6	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.342.295.400**		**2.601.481.015**		**12.603.646.308**		**4.909.049.522**							
	6	**01**	**Perencanaan dan , Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**-**	**100 %**	**67.711.800**	**1**	**40.000.000**		**33.507.300**	**100,00**	**92,97**		101.219.100	128,87	77,14	Inspektorat

No	KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	42 Dokumen	126.989.805	32	67.711.800	15	40.000.000	15	33.507.300	100,00	83,77	47	101.219.100	111,90	79,71	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jumlah Evaluasi SPIP Jumlah Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah	146 OPD	423.075.200	146	92.955.200	0	-	0		0,00	0,00	146	92.955.200	100,00	21,97	
	6																		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat)	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1946 orang	51.155.826.275	1.036	29.735.635.538	742	9.682.978.732	742	9.462.728.769	100,00	97,73	1.778	39.198.364.307	91,37	76,63	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Inspektorat)	Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai	72 dokumen	3.013.431.000	48	1.398.521.000	12	207.920.000	12	202.520.000	100,00	97,40	60	1.601.041.000	83,33	53,13	
	6	**01**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**1.431.028.500**	**100 %**	**325.745.900**	**1**	**158.300.000**		**134.274.200**	**100,00**	**79,50**		460.020.100	88,31	46,86	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsI	Jumlah SDM APIP yang mengikuti diklat	172 Orang	1.236.428.500	49	294.945.900	12	58.500.000	12	34.574.000	100,00	59,10	61	329.519.900	35,47	26,65	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	192 stell	194.600.000	75	30.800.000	196	99.800.000	196	99.700.200	100,00	99,90	271	130.500.200	141,15	67,06	
	6	**01**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**1.883.370.600**	**100 %**	**872.811.341**	**1**	**370.323.076**		388.094.623	100,00	95,32			78,57	70,32	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	72 paket	68.725.000	36	40.279.400	12	34.693.000	12	34.889.300	100,00	100,57	48	75.168.700	66,67	109,38	
			Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	72 paket	306.772.000	48	153.188.876	12	70.163.876	12	70.163.876	100,00	100,00	60	223.352.752	83,33	72,81	

No	KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah tangga	72 paket	69.293.000	36	27.065.500	12	13.000.000	12	13.000.000	100,00	100,00	48	40.065.500	66,67	57,82	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor	72 paket	270.534.000	48	104.585.000	12	36.000.000	12	36.000.000	100,00	100,00	60	140.585.000	83,33	51,97	
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72 paket	276.766.600	48	150.019.200	12	41.250.000	12	39.058.300	100,00	94,69	60	189.077.500	83,33	68,32	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72 dokumen	212.850.000	48	112.750.000	12	55.200.000	12	43.941.600	100,00	79,60	60	156.691.600	83,33	73,62	
			Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	678.430.000	48	284.923.365	12	120.016.200	12	110.868.947	100,00	92,38	60	395.792.312	83,33	58,34	
	6	**01**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**667.390.000**	**100 %**	**310.370.000**	**1**	**829.374.500**		577.169.600	94,83	83,21			53,53	52,11	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Laninnya	140 unit	667.390.000	34	310.370.000	10	146.874.500	10	129.772.600	100,00	88,36	44	440.142.600	31,43	65,95	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	160 unit	2.293.389.599	17	344.758.000	116	682.500.000	104	532.774.000	89,66	78,06	121	877.532.000	75,63	38,26	
	6	**01**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**288.400.000**	**100 %**	**111.538.138**	**1**	**357.000.000**		**120.771.100**	**100,00**	**84,75**		232.309.238	73,72	55,36	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 laporan	288.400.000	48	111.538.138	12	54.000.000	12	39.845.100	100,00	73,79	60	151.383.238	83,33	52,49	

No	KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 laporan	1.013.400.000	13	300.000.000	12	303.000.000	12	290.000.000	100,00	95,71	25	590.000.000	64,10	58,22	
	6	**01**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**2.072.106.300**	**100 %**	**913.303.836**	**1**	**957.750.000**		**788.459.820**	**88,33**	**80,07**			66,57	73,89	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeilharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeilharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	42 unit	1.219.906.300	28	597.396.836	12	728.460.000	12	659.913.820	100,00	90,59	40	1.257.310.656	95,24	103,07	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110 unit	112.200.000	36	48.140.000	12	29.290.000	12	29.290.000	100,00	100,00	48	77.430.000	43,64	69,01	
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	740.000.000	3	267.767.000	1	200.000.000	1	99.256.000	65,00	49,63	3,65	367.023.000	60,83	49,60	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	97,19	85,97			81,59	62,61	
												Predikat kinerja	ST	T			T	R	
2	**6**	**1**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**		**100%**	**8.595.835.200**		**4.745.042.004**		**2.459.495.000**		**1.535.237.300**							
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal			8.595.835.200		4.745.042.004	**1**	**2.459.495.000**		**1.535.237.300**							
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	514 laporan	1.980.901.500	391	886.610.504	50	311.966.000	31	50.953.300	62,00	16,33	422	937.563.804	82,10	47,33	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah reviu LKPD Jumlah Reviu LAKIP, SSH,BMD,HSPK dan ASB/ SBM Jumlah Reviu PBJ	30 Laporan	168.067.000	30	167.967.000	0	-	0	-	0,00	0,00	30	167.967.000	100,00	99,94	

No	KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
				Jumlah Reviu RKA Jumlah Reviu RKPD Jumlah Reviu KUA dan PPAS Jumlah Reviu Renja OPD															
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 laporan	99.300.000	2	-	1	15.270.000	1	-	100,00	0,00	3	-	75,00	0,00	
			Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	494 Laporan	827.233.500	198	318.007.500	148	522.303.000	148	509.226.000	100,00	97,50	346	827.233.500	70,04	100,00	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	585 dokumen	907.935.500	295	505.865.500	165	534.331.300	165	402.070.000	100,00	75,25	460	907.935.500	78,63	100,00	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Audit ketaatan	558 Laporan	4.135.022.500	468	2.470.591.500	35	425.519.700	35	561.413.000	100,00	131,94	503	3.032.004.500	90,14	73,32	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 laporan	165.500.000	4	-	4	157.700.000	4	138.404.000	100,00	87,76	8	138.404.000	66,67	83,63	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	130 laporan	311.875.200	45	396.000.000	30	492.405.000	30	370.750.000	100,00	75,29	75	766.750.000	57,69	245,85	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	82,75	60,51	616	2.259.286.101	77,53	93,76	
												Predikat kinerja	T	R			T	ST	
3	6	01	**Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**			**1.155.867.000**		**901.607.000**		**579.521.000**		**82.630.000**							
			Pendampingan dan Assistensi		**100%**	**1.155.867.000**	**100 %**	**901.607.000**	**1**	**24.085.000**		**700.000**							

No	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		Pendampingan dan Assistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan pengelolaan Wistle Blowing System (WBS) Jumlah Penangangan Pengaduan Masyarakat Jumlah Tindak Lanjut antar APIP dan APH	41 Laporan	113.770.000	41	113.190.000	0	0	0	-	0,00	0,00	41	113.190.000	100,00	99,49	
		Pendampingan, Assistensi, Verifikasi dan Repormasi Birokrasi	Jumlah Tim Satgas Unit Pemberantasan Pungli Jumlah Unit Pengendalian Gratifikasi Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas Jumlah Zona Integritas Jumlah Koordinasi MCP (Monitoring Center Prevention)	224 OPD	1.042.097.000	159	788.417.000	34	24.085.000	34	700.000	100,00	2,91	193	789.117.000	86,16	75,72	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 kegiatan	1.701.472.400	3	487.595.500	3	504.315.000	3	211.027.000	100,00	41,84	6	698.622.500	66,67	41,06	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 OPD	414.100.000	7	78.150.000	7	51.121.000	3	6.865.000	42,86	13,43	10	85.015.000	22,22	20,53	
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**80,95**	**19,39**	**83**	**561.981.500**	**91,68**	**78,93**	
											Predikat kinerja	**T**	**SR**			**ST**	**T**	
								15.642.662.308		**6.526.916.822**	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	**86,97**	**55,29**	**233**	**940.422.534**	**83,60**	**82,11**	
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	**T**	**R**			**T**	**T**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Perangkat Daerah 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	c	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100	Persen	30.322.334.958	24	18.134.895.807	100	5.831.347.183	24,13	5.583.369.890	24,13	95,75	50,75	23.718.265.697	50,75	78,22	
2	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	102.346.180	88	45.842.600	100	11.564.000	88,00	10.454.000	100,00	90,57	75,00	56.296.600	75,00	55,01	Bappeda
3	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	36.076.180	9	19.781.100	3	4.328.000	3	3.948.000	100,00	91,22	12	23.729.100	75,00	65,77	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32	Laporan	66.270.000	16	26.061.500	8	7.236.000	8	6.506.000	100,00	89,91	24	32.567.500	75,00	49,14	
2	01	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	Persen	24.425.646.933	100	14.545.828.129	100	4.720.253.283	46,79	4.616.251.400	100,00	95,86	57,18	19.162.079.529	57,18	78,45	Bappeda
3	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS	180	Orang/bulan	23.520.445.133	86	13.997.265.729	35	4.594.592.883	35	4.498.361.000	100,00	97,91	121	18.495.626.729	67,22	78,64	
4	01	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1329	Dokumen	892.751.800	618	536.112.400	12	125.660.400	9	117.890.400	100,00	93,82	627	654.002.800	47,18	73,26	
5	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70	Laporan	12.450.000	40	12.450.000	0	-	0	-	0,00	0,00	40	12.450.000	57,14	100,00	
6	01	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	10.000.000	0	8.495.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	20,00	8.495.000	20,00	84,95	
7	01	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	10.000.000	12	8.495.000	0	-	0	-	0,00	0,00	12	8.495.000	20,00	84,95	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Perangkat Daerah 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	01	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	239.944.200	0	191.557.200	100	61.819.000	0,75	46.869.750	100,00	44,71	28,97	238.426.950	28,97	99,37	
9	01	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	781	Paket	113.528.200	121	113.128.200	3	52.410.000	3	46.869.750	100,00	89,43	124	159.997.950	15,88	140,93	
10	01	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	Dokumen	10.000.000	12	10.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	12	10.000.000	20,00	100,00	
11	01	01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60	Dokumen	27.000.000	24	27.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	24	27.000.000	40,00	100,00	
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	Orang	89.416.000	22	41.429.000	2	9.409.000	2	-	100,00	0,00	24	41.429.000	40,00	46,33	
12	01	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1.097.966.220	100	720.720.829	100	205.538.900	43,38	171.769.295	100,00	87,60	70,60	892.490.124	70,60	81,29	
13	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	565	Paket	9.150.000	191	9.150.000	0	-	0	-	0,00	0,00	191	9.150.000	33,81	100,00	
14	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9549	Paket	158.716.210	3216	107.775.500	12	19.652.500	12	17.942.500	100,00	91,30	3228	125.718.000	33,80	79,21	
15	01	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	651	Paket	38.854.000	622	30.752.800	0	-	0	-	0,00	0,00	622	30.752.800	95,55	79,15	
16	01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1680	Paket	51.034.500	1634	42.509.500	0	-	0	-	0,00	0,00	1634	42.509.500	97,26	83,30	
17	01	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	878	Paket	107.429.920	845	85.881.300	12	17.660.000	12	17.324.000	100,00	98,10	857	103.205.300	97,61	96,07	
18	01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1590	Dokumen	229.600.000	723	155.755.000	285	37.000.000	285	29.365.000	100,00	79,36	1008	185.120.000	63,40	80,63	
19	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411	Laporan	503.181.590	227	288.896.729	72	131.226.400	72	107.137.795	100,00	81,64	299	396.034.524	72,75	78,71	
20	01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	282.719.700	0	246.063.700	100	121.107.000	0,00	85.103.700	75,00	70,27	44,91	331.167.400	44,91	117,14	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Perangkat Daerah 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
20	01	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	Unit	222.833.700	21	186.582.700	4	121.107.000	3	85.103.700	75,00	70,27	24	271.686.400	53,33	121,92	
21	01	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	148	Unit	59.886.000	54	59.481.000	0	-	0	-	0,00	0,00	54	59.481.000	36,49	99,32	
22	01	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	2.420.799.000	100	1.385.201.947	100	402.555.000	28,00	355.443.528	100,00	83,65	60,65	417.233.434	86,47	17,24	
23	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	Laporan	762.900.000	60	372.179.548	12	80.100.000	12	60.814.639	100,00	75,92	72	432.994.187	75,00	56,76	
24	01	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	877	Laporan	1.657.899.000	847	1.013.022.399	12	322.455.000	12	294.628.889	100,00	91,37	859	1.307.651.288	97,95	78,87	
25	01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.742.912.725	100	991.186.402	100	308.510.000	50,00	297.478.217	100,00	87,79	47,15	1.288.664.619	47,15	73,94	
26	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	198	Unit	1.541.401.400	167	804.196.802	5	295.440.000	5	287.238.217	100,00	97,22	172	1.091.435.019	86,87	70,81	
27	01	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98	Unit	25.500.000	16	12.690.000	13	13.070.000	13	10.240.000	100,00	78,35	29	22.930.000	29,59	89,92	
28	01	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	176.011.325	3	174.299.600	0	-	0	-	0,00	0,00	3	174.299.600	25,00	99,03	
29													Rata-rata capaian kinerja (%)	96,43	80,06			53,79	75,92	
30													Predikat kinerja	ST	T			R	T	
31	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	Persen	7.337.528.612	19	4.781.530.969	100	348.744.500	18,98	269.560.764	18,98	77,29	83,23	5.051.091.733	83,23	68,84	
32	01	02	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	Persen	4.417.033.960	54	2.602.462.049	100	270.684.500	53,94	213.341.764	100,00	49,52	107,64	2.815.803.813	107,64	63,75	Bappeda

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Perangkat Daerah 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
32	01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8	Dokumen	1.032.953.460	7	603.895.708	4	174.184.500	4	135.775.764	100,00	77,95	11	739.671.472	137,50	71,61	
		02	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	6	Berita Acara	261.700.000	4	56.907.800	3	32.500.000	3	32.500.000	100,00	100,00	7	89.407.800	116,67	34,16	
33	01	02	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12	Berita Acara	1.259.609.000	8	1.071.980.000	3	4.000.000	3	-	100,00	0,00	11	1.071.980.000	91,67	85,10	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4	Berita Acara	710.520.000	3	253.239.000	2	42.000.000	2	42.000.000	100,00	100,00	5	295.239.000	125,00	41,55	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	44	Usulan	129.720.000	22	84.536.000	11	2.000.000	11	-	100,00	0,00	33	84.536.000	75,00	65,17	
34	01	02	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12	Dokumen	1.022.531.500	9	531.903.541	3	16.000.000	3	3.066.000	100,00	19,16	12	534.969.541	100,00	52,32	
35	01	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	1.649.138.152	100	1.221.394.658	100	61.981.000	1,00	49.150.000	66,67	57,76	86,11	1.270.544.658	86,11	77,04	
36	01	02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	21	Dokumen	810.130.000	17	613.711.278	1	56.950.000	1	44.350.000	100,00	77,88	18	658.061.278	85,71	81,23	
36	01	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28	Orang	190.000.152	25	174.790.000	0	-	0	-	0,00	0,00	25	174.790.000	89,29	91,99	
37	01	02	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6	Buku	649.008.000	4	432.893.380	1	5.031.000	1	4.800.000	100,00	95,41	5	437.693.380	83,33	67,44	
38	01	02	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	1.271.356.500	2	957.674.262	100	16.079.000	2,00	7.069.000	100,00	47,35	55,95	964.743.262	55,95	75,88	
39	01	02	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan	49	Laporan	702.940.500	10	518.046.410	4	7.078.500	4	5.357.000	100,00	75,68	14	523.403.410	28,57	74,46	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Perangkat Daerah 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	dan Pelaksanaan Pembangunan															
40	01	02	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24	Laporan	568.416.000	16	439.627.852	4	9.000.500	4	1.712.000	100,00	19,02	20	441.339.852	83,33	77,64	
41													Rata-rata capaian kinerja (%)	88,89	51,54			83,23	72,22	
42													Predikat kinerja	T	R			T	S	
43	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	Persen	8.778.841.167	14	6.375.722.783	100	437.794.000	13,99	328.645.013	13,99	75,07	87,81	6.704.367.796	87,81	76,37	
44	01	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	2.847.053.967	100	1.867.021.229	100	142.097.000	9,29	85.511.694	100,00	73,62	95,25	1.952.532.923	95,25	68,58	Bappeda
45	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24	Dokumen	218.993.540	22	150.995.160	2	6.870.000	2	4.970.000	100,00	72,34	24	155.965.160	100,00	71,22	
46	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	25	Laporan	56.342.700	17	38.320.848	4	4.657.000	4	4.657.000	100,00	100,00	21	42.977.848	84,00	76,28	
47	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6	Laporan	17.559.000	5	14.957.900	2	22.895.000	2,00	2.398.000	100,00	10,47	7	17.355.900	116,67	98,84	
48	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	19	Laporan	555.055.047	12	443.178.700	3	4.305.000	3	4.305.000	100,00	100,00	15	447.483.700	78,95	80,62	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Perangkat Daerah 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
49	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	1.011.207.320	10	516.629.379	2	45.544.000	2	33.255.694	100,00	73,02	12	549.885.073	100,00	54,38	
50	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	23	Laporan	56.099.600	17	34.949.100	4	4.768.000	4	3.528.000	100,00	73,99	21	38.477.100	91,30	68,59	
51	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	Laporan	27.178.000	8	24.554.900	2	2.550.000	2	2.550.000	100,00	100,00	10	27.104.900	111,11	99,73	
52	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	40	Laporan	904.618.760	25	643.435.242	7	50.508.000	7	29.848.000	100,00	59,10	32	673.283.242	80,00	74,43	
53	01	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen	2.664.551.800	100	1.897.555.200	100	131.974.000	4,13	107.183.900	100,00	82,03	70,65	2.004.739.100	70,65	75,24	Bappeda
54	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	40	Dokumen	214.786.500	12	212.478.200	2	3.040.000	2	2.280.000	100,00	75,00	14	214.758.200	35,00	99,99	
55	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	30	Laporan	80.898.700	10	82.152.250	0	-	4	-	0,00	0,00	14	82.152.250	46,67	101,55	
56	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	25	Laporan	277.399.000	13	280.543.000	2	14.760.000	2	13.550.000	100,00	91,80	15	294.093.000	60,00	106,02	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Perangkat Daerah 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Renstra/Renja Bidang Perekonomian																
57	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	7	Laporan	869.069.530	6	510.850.900	2	22.270.000	2	19.770.900	100,00	88,78	8	530.621.800	114,29	61,06	
58	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	40	Dokumen	237.109.700	12	235.692.100	2	13.300.000	2	10.350.000	100,00	77,82	14	246.042.100	35,00	103,77	
59	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	30	Laporan	317.835.630	20	173.280.600	4	13.846.000	4	12.596.000	100,00	90,97	24	185.876.600	80,00	58,48	
60	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	25	Laporan	357.758.030	18	171.408.550	2	30.800.000	2	21.799.800	100,00	70,78	20	193.208.350	80,00	54,01	
61	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	7	Laporan	309.694.710	6	231.149.600	2	33.958.000	2	26.837.200	100,00	79,03	8	257.986.800	114,29	83,30	
62	01	03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen	3.267.235.400	29	2.611.146.354	100	163.723.000	28,56	135.949.419	100,00	86,11	97,52	2.747.095.773	97,52	84,08	Bappeda
63	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	32	Dokumen	913.853.530	20	815.549.823	6	23.666.000	6	21.844.000	100,00	92,30	26	837.393.823	81,25	91,63	
64	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	35	Laporan	238.875.450	23	192.344.200	6	5.986.000	6	5.986.000	100,00	100,00	29	198.330.200	82,86	83,03	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Perangkat Daerah 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
65	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	32	Laporan	203.667.900	16	142.477.012	6	47.728.000	6	44.777.801	100,00	93,82	22	187.254.813	68,75	91,94	
66	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7	Laporan	621.883.650	6	515.219.048	2	31.935.000	2	24.709.442	100,00	77,37	8	539.928.490	114,29	86,82	
66	01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	39	Dokumen	772.364.580	34	656.532.827	11	6.439.000	11	6.439.000	100,00	100,00	45	662.971.827	115,38	85,84	
67	01	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	60	Laporan	111.581.300	38	80.726.000	11	5.820.500	11	5.440.500	100,00	93,47	49	86.166.500	81,67	77,22	
68	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	25	Laporan	174.567.700	23	112.235.600	11	11.598.500	11	8.298.500	100,00	71,55	34	120.534.100	136,00	69,05	
69	01	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7	Laporan	230.441.290	5	96.061.844	2	30.550.000	2	18.454.176	100,00	60,41	7	114.516.020	100,00	49,69	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	80,59			87,81	75,97	
Predikat kinerja														ST	T			T	T	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								29.292.149.559		6.617.885.683										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)														95,11	70,73			73,93	74,48	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)														ST	S			S	S	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
	5		**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**																	
	5	**02**	**Keuangan**																	
1	**5**	**02**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**% Penerapan Kepatuhan Pelayanan Publik**			178.672.887.674	**100**	**129.020.375.432**	**100**	**27.628.734.644**	**0**	**24.901.138.371**	**0,00**	**90,13**	**100**	**153.921.513.803**		**86,15**	
	5	**02**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Dokumen Perencanaan yang tersususn**			**521.909.700**	**100**	**441.826.100**	**100**	**32.544.600**	**0**	**32.544.600**	**0,00**	**100,00**	**100**	**474.370.700**		**90,89**	
	5	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	129.699.200	8	116.131.000	2	3.726.200	2	3.726.200	100,00	100,00	10	119.857.200	83,33	92,41	
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dokumen	65.111.200	4	51.444.000	2	4.740.000	2	4.740.000	100,00	100,00	6	56.184.000	75,00	86,29	
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	Dokumen	61.990.400	4	48.478.000	2	4.740.000	2	4.740.000	100,00	100,00	6	53.218.000	75,00	85,85	BPKAD
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	40.790.200	3	34.171.000	1	3.380.000	1	3.380.000	100,00	100,00	4	37.551.000	80,00	92,06	
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5	Dokumen	37.642.200	3	31.023.000	1	3.330.000	1	3.330.000	100,00	100,00	4	34.353.000	80,00	91,26	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
				Perubahan DPA-SKPD																
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33	Laporan	128.805.300	23	109.379.100	5	9.658.000	5	9.658.000	100,00	100,00	28	119.037.100	84,85	92,42	
	5	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	57.871.200	8	51.200.000	2	2.970.400	2	2.970.400	100,00	100,00	10	54.170.400	83,33	93,61	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			80,22	90,56	
													Predikat kinerja	SR	SR			R	T	
	5	**02**	**Administrasi Keuangan Parangkat Daerah**	**% Administrasi Keuangan Parangkat Daerah**			164.946.006.574	**100**	**119.739.607.332**	**100**	**25.269.055.644**	**0**	**22.576.950.942**	**0,00**	**89,35**	**100**	**142.316.558.274**		**86,28**	
	5	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1584	Orang/Bulan	161.150.780.024	###	117.044.024.732	29	24.738.384.694	24	15.445.454.595	82,76	62,44	1550	132.489.479.327	97,85	82,21	BPKAD
	5	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	356.900.000	48	344.700.000		-	0	-	0,00	0,00	48	344.700.000	66,67	96,58	
	5	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	Dokumen	3.299.818.750	48	2.239.082.600	12	518.997.150	9	392.427.150	75,00	75,61	57	2.631.509.750	79,17	79,75	
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	6	Laporan	90.468.000	4	70.400.000	1	10.034.000	1	10.034.000	100,00	100,00	5	80.434.000	83,33	88,91	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6	Laporan	48.039.800	4	41.400.000	1	1.639.800	1	1.639.800	100,00	100,00	5	43.039.800	83,33	89,59	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	89,44	84,51			82,07	87,41	
													Predikat kinerja	SR	SR			T	T	
	5	**02**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**412.888.650**	**100**	**189.008.650**	**100**	**79.680.000**	**0**	**79.150.000**	**0,00**	**99,33**	**100**	**268.158.650**		**64,95**	
	5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	340.730.000	4	166.850.000	1	79.680.000	1	79.150.000	100,00	99,33	5	246.000.000	83,33	72,20	BPKAD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,33			83,33	72,20	
													Predikat kinerja	ST	ST			T	S	
	5	**02**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**6.559.845.550**	**100**	**5.008.596.150**	**100**	**1.033.844.400**	**0**	**1.022.370.299**	**0,00**	**98,89**	**100**	**6.030.966.449**			
	5	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	301.797.000	4	241.533.000	1	32.274.000	1	32.115.500	100,00	99,51	5	273.648.500	83,33	90,67	BPKAD
	5	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	1.925.138.300	4	1.467.115.800	1	296.467.500	1	295.643.952	100,00	99,72	5	1.762.759.752	83,33	91,57	
	5	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	6	Paket	614.200.600	4	441.115.000	1	175.225.600	1	172.982.600	100,00	98,72	5	614.097.600	83,33	99,98	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
				Tangga yang Disediakan																
	5	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	372.084.200	3	372.084.200	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
	5	02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	624.734.450	4	548.011.150	1	57.872.300	1	57.227.725	100,00	98,89	5	605.238.875	83,33	96,88	
	5	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	603.910.000	24	339.910.000	6	160.600.000	6	158.100.000	100,00	98,44	30	498.010.000	83,33	82,46	
	5	02	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	707.485.000	48	459.150.000	12	165.263.000	12	164.747.000	100,00	99,69	60	623.897.000	83,33	88,19	
	5	02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	1.410.496.000	48	1.139.677.000	12	146.142.000	12	141.553.522	100,00	96,86	60	1.281.230.522	83,33	90,84	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	98,83			83,33	91,51	
													Predikat kinerja	ST	ST			T	ST	
	5	**02**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3.731.080.000**	**100**	**2.178.880.000**	**100**	**648.950.000**	**0**	**631.190.607**	**0,00**	**97,26**	**100**	**2.810.070.607**		**75,32**	
	5	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Laporan	103.600.000	48	67.600.000	12	48.800.000	12	31.753.088	100,00	65,07	60	99.353.088	83,33	95,90	BPKAD
	5	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	3.615.600.000	48	2.099.400.000	12	600.150.000	12	599.437.519	100,00	99,88	60	2.698.837.519	83,33	74,64	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	82,47			83,33	85,27	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
												Predikat kinerja		SR	SR			T	T	
	5	**02**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.501.157.200**	**100**	**1.462.457.200**	**100**	**564.660.000**	**0**	**558.931.923**	**0,00**	**98,99**	**100**	**2.021.389.123**		**80,82**	
	5	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54	Unit	1.658.237.200	36	980.467.200	9	331.450.000	9	328.726.923	100,00	99,18	45	1.309.194.123	83,33	78,95	BPKAD
	5	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	284	Unit	543.920.000	184	401.990.000	46	34.210.000	46	31.579.000	100,00	92,31	230	433.569.000	80,99	79,71	
	5	02	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	Unit	299.000.000	4	80.000.000	1	199.000.000	1	198.626.000	100,00	99,81	5	278.626.000	83,33	93,19	
												Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	97,10			82,55	83,95	
												Predikat kinerja		ST	ST			S	R	
2	**5**	**02**	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Meningkatanya Pengelolaan Keuangan Daerah**			1.449.125.390.157	**100**	**952.578.163.211**	**100**	**248.843.698.748**	**0**	**232.434.041.389**	**0,00**	**93,41**	**100**	**1.185.012.204.600**		**81,77**	
	5	**02**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**% Meningkatnya Penyusunan APBD tepat waktu sesuai dengan Sistem dan Prosedur Mekanisme dan Tahapan Penyusunan APBD**			**19.990.549.000**	**100**	**13.186.005.200**	**100**	**3.327.778.750**	**0**	**3.014.298.001**	**0,00**	**90,58**	**100**	**16.200.303.201**		**81,04**	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	14	Dokumen	1.601.120.200	10	1.040.206.800	2	283.135.000	2	250.036.650	100,00	88,31	12	1.290.243.450	85,71	80,58	
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	14	Dokumen	1.170.827.300	10	793.739.400	2	171.915.700	2	153.636.550	100,00	89,37	12	947.375.950	85,71	80,92	
	5	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	317	Dokumen	634.424.200	203	409.488.200	57	107.238.000	57	106.468.750	100,00	99,28	260	515.956.950	82,02	81,33	
	5	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	317	Dokumen	615.507.400	203	396.613.400	57	99.939.000	57	92.747.550	100,00	92,80	260	489.360.950	82,02	79,51	
	5	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	317	Dokumen	665.227.700	203	446.515.600	57	105.778.600	57	105.188.650	100,00	99,44	260	551.704.250	82,02	82,93	
	5	02	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	317	Dokumen	749.000.800	203	479.812.800	57	135.038.000	57	117.404.250	100,00	86,94	260	597.217.050	82,02	79,74	
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	18	Dokumen	8.664.772.400	12	5.790.991.000	3	1.432.741.450	3	1.409.398.044	100,00	98,37	15	7.200.389.044	83,33	83,10	BPKAD
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	18	Dokumen	1.828.088.400	12	1.286.980.800	3	304.428.300	3	245.590.000	100,00	80,67	15	1.532.570.800	83,33	83,83	
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	14	Dokumen	1.514.753.200	10	928.872.400	2	257.102.400	2	144.946.150	100,00	56,38	12	1.073.818.550	85,71	70,89	
	5	02	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	24	Dokumen	480.398.500	16	334.612.700	4	66.161.400	4	59.075.356	100,00	89,29	20	393.688.056	83,33	81,95	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
	5	02	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	24	Dokumen	580.060.300	16	431.076.500	4	64.134.400	4	57.766.300	100,00	90,07	20	488.842.800	83,33	84,27	
	5	02	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12	Dokumen	537.544.800	8	355.469.800	2	69.412.500	2	45.351.000	100,00	65,34	10	400.820.800	83,33	74,57	
	5	02	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	405	Orang	948.823.800	225	491.625.800	90	230.754.000	90	226.688.751	100,00	98,24	315	718.314.551	77,78	75,71	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	87,27			83,05	79,95	
Predikat kinerja														SR	SR			S	S	
	5	**02**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**% Meningkatnya jumlah Laporan OPD dalam Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu**			**7.165.578.850**	**100**	**4.886.604.000**	**100**	**1.224.536.850**	**0**	**1.179.939.024**	**0,00**	**96,36**	**100**	**6.066.543.024**		**84,66**	
	5	02	Koordinasin dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	178	Dokumen	3.883.699.000	123	2.710.060.000	12	539.049.000	12	529.813.506	100,00	98,29	135	3.239.873.506	75,84	83,42	BPKAD
	5	02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1732	Dokumen	649.669.000	688	323.470.000	528	155.654.500	528	145.079.343	100,00	93,21	1216	468.549.343	70,21	72,12	
	5	02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	72	Dokumen	801.518.400	48	485.233.200	12	145.592.600	12	127.038.375	100,00	87,26	60	612.271.575	83,33	76,39	
	5	02	Koordinasi, Fasilitas, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,	246	Dokumen	509.380.000	180	382.799.000	21	38.811.000	21	37.263.750	100,00	96,01	201	420.062.750	81,71	82,47	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
			Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	132	Laporan	904.015.450	96	732.301.800	12	270.442.750	12	265.857.550	100,00	98,30	108	998.159.350	81,82	110,41	
	5	02	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang daerah sebagai Optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	389	Dokumen	417.297.000	157	252.740.000	172	74.987.000	172	74.886.500	100,00	99,87	329	327.626.500	84,58	78,51	

No.	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
			Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	95,49			79,58	83,89	
												Predikat kinerja	ST	ST			T	T	
	5	**02**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**% Meningkatnya jumlah OPD dalam pengelolaan keuda berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**			**6.740.752.000**	**100**	**4.744.906.000**	**100**	**993.302.000**	**0**	**980.299.895**	**0,00**	**98,69**	**100**	**5.725.205.895**		**84,93**	
	5	02	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	134	Laporan	409.593.500	96	282.639.000	18	48.639.500	18	48.139.500	100,00	98,97	114	330.778.500	85,07	80,76	BPKAD
	5	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	102	Laporan	853.621.900	68	597.135.000	17	116.993.900	17	116.897.036	100,00	99,92	85	714.032.036	83,33	83,65	
	5	02	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	13	Laporan	1.619.125.700	8	975.924.000	3	400.039.700	3	397.584.209	100,00	99,39	11	1.373.508.209	84,62	84,83	
	5	02	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	24	Dokumen	1.683.539.800	16	1.144.776.000	4	233.348.800	4	232.399.200	100,00	99,59	20	1.377.175.200	83,33	81,80	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
			Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
	5	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	27	Dokumen	2.174.871.100	12	1.744.432.000	12	194.280.100	12	185.279.950	100,00	95,37	24	1.929.711.950	88,89	88,73	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	98,65			85,05	83,95	
													Predikat kinerja	ST	ST			T	T	
	5	**02**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**% Pengelolaan DBH, Transfer Ke Desa, BTT**			**1.415.228.510.307**	**100**	**929.760.648.011**	**100**	**243.298.081.148**	**0**	**227.259.504.469**	**0,00**	**93,41**	**100**	**1.157.020.152.480**		**81,76**	
	5	02	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	52	Laporan	1.339.574.838.012	32	885.452.661.272	8	227.725.238.370	8	218.459.824.154	100,00	95,93	40	1.103.912.485.426	76,92	82,41	BPKAD
	5	02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21	Laporan	16.955.583.086	12	7.155.583.086	3	4.800.000.000	3	4.792.909.092	100,00	99,85	15	11.948.492.178	71,43	70,47	
	5	02	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	Laporan	49.175.204.806	8	27.629.519.250	2	10.772.842.778	2	4.006.771.223	100,00	37,19	10	31.636.290.473	83,33	64,33	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	77,66			110,56	105,74	
													Predikat kinerja	SR	SR			ST	ST	
3	**5**	**02**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah**			**6.559.155.400**	**100**	**4.318.949.000**	**100**	**1.184.428.200**	**0**	**1.173.818.060**	**0,00**	**99,10**	**100**	**5.492.767.060**		**83,74**	
	5	**02**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**% Jumlah OPD yang**			**6.559.155.400**	**100**	**4.318.949.000**	**100**	**1.184.428.200**	**0**	**1.173.818.060**	**0,00**	**99,10**	**100**	**5.492.767.060**		**83,74**	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
				melaksanakan rekonsiliasi Data,RKBMD,Stok Opname dan sensus Aset Daerah																
	5	02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8	Dokumen	543.574.200	4	371.784.000	2	70.792.600	2	70.592.550	100,00	99,72	6	442.376.550	75,00	81,38	BPKAD
	5	02	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	72	Dokumen	186.169.700	48	120.043.400	12	41.186.100	12	41.185.950	100,00	100,00	60	161.229.350	83,33	86,60	
	5	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	260	Laporan	1.462.673.700	172	736.810.400	44	465.973.300	44	463.908.232	100,00	99,56	216	1.200.718.632	83,08	82,09	
	5	02	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	260	Laporan	245.607.700	172	160.307.400	44	50.846.600	44	50.846.450	100,00	100,00	216	211.153.850	83,08	85,97	
	5	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	264	Laporan	1.704.081.200	240	1.247.561.000	12	225.064.500	12	223.263.180	100,00	99,20	252	1.470.824.180	95,45	86,31	
	5	02	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	11	Laporan	265.364.100	4	181.238.900	6	30.389.200	6	30.389.200	100,00	100,00	10	211.628.100	90,91	79,75	
	5	02	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17	Dokumen	704.858.400	4	472.300.100	12	110.853.300	12	105.273.296	100,00	94,97	16	577.573.396	94,12	81,94	
	5	02	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka	328	Laporan	1.092.311.800	228	732.895.000	44	159.876.800	44	158.913.602	100,00	99,40	272	891.808.602	82,93	81,64	

No.	Kode Rekening		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	%	
			Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																
	5	02	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	218	Laporan	354.514.600	172	296.008.800	2	29.445.800	2	29.445.600	100,00	100,00	174	325.454.400	79,82	91,80	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,20			85,30	84,17	
													Predikat kinerja	ST	ST			T	T	
											JUMLAH ANGGARAN MURNI	277.656.861.592	REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	258.508.997.820						
													#REF!	258.508.997.820						
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	99,04	92,77			85,31	86,24	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)	ST	ST			T	T	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN								13.891.222.956									
5.	02.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100	Persen	63.113.164.633	564	16.178.281.166	324	11.092.602.606	13	12.937.416.441	4,01	116,63	577	29.115.697.607	577,00	46,13	Bapenda
5.	02.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan	100	persen	488.408.680	32	109.324.400	13	101.650.400,00	13	79.190.100	100,00	77,90	45	188.514.500	45,00	38,60	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah															
5.	02.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	Dokumen	124.696.750	5	16.050.000	1	25.855.000	1	25.354.800	100,00	98,07	6	41.404.800,00	23,08	33,20	
5.	02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	282	Dokumen	72.827.850	2	16.358.000	1	8.620.000	1	8.620.000	100,00	100,00	3	24.978.000,00	1,06	34,30	
5.	02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	282	Dokumen	30.910.230	2	8.358.600	1	7.612.000	1	7.611.900	100,00	100,00	3	15.970.500,00	1,06	51,67	
5.	02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumalh Dokumen DPA- SKPD	5	Dokumen	30.098.200	2	13.660.000	1	8.417.000	1	8.267.000	100,00	98,22	3	21.927.000,00	60,00	72,85	
5.	02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	25.116.600	2	13.235.800	1	8.681.400	1	8.681.400	100,00	100,00	3	21.917.200,00	60,00	87,26	
5.	02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	95	laporan	97.919.800	7	20.184.000	4	8.931.000	4	8.931.000	100,00	100,00	11	29.115.000,00	11,58	29,73	
5.	02.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	laporan	106.839.250	12	21.478.000	4	33.534.000	4	11.724.000	100,00	34,96	16	33.202.000,00	16,00	31,08	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	90,18			24,68	48,58	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
5.	**02.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan Badan Pendapatan Daerah**	**100**	**persen**	**42.587.630.706**	**128**	**11.085.163.885**	**94**	**8.240.278.742**	**64**	**7.743.845.403**	**68,09**	**93,98**	**192**	**18.829.009.288**	**192,00**	**44,21**	
5.	02.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	bulan	42.181.387.550	24	10.826.048.185	42	8.003.909.742	12	7.508.996.403	28,57	93,82	36	18.335.044.588	50,00	43,47	
5.	02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	laporan	138.085.300	24	26.805.900	12	12.403.000	12	12.023.000	100,00	96,94	36	38.828.900	60,00	28,12	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
5.	02.	Pelaksanaan Penataushaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penataushaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60	laporan	82.608.400	24	193.662.000	12	201.488.000	12	201.488.000	100,00	100,00	36	395.150.000	60,00	478,34	
5.	02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30	laporan	85.419.506	12	17.991.000	6	8.777.000	6	8.777.000	100,00	100,00	18	26.768.000	60,00	31,34	
5.	02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	110	laporan	100.129.950	44	20.656.800	22	13.701.000	22	12.561.000	100,00	91,68	66	33.217.800	60,00	33,17	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	85,71	96,49			58,00	122,89	
												Predikat kinerja	T	ST			R	ST	
5.	**02.**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**177.627.500,00**	**4**	**12.500.000,00**	**2**	**7.798.500,00**	**2**	**7.798.500,00**	**100,00**	**100,00**	**6**	**20.298.500**	**6,00**	**11,43**	
5.	02.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	177.627.500	4	12.500.000	2	7.798.500	2	7.798.500	100,00	100,00	6	20.298.500	50,00	11,43	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			50,00	11,43	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
5.	**02.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Pernerapan Kepatuhan Pelayan Publik**	**100**	**persen**	**130.448.800,00**	**10**	**26.097.000,00**	**5**	**7.431.500,00**	**5**	**7.431.500,00**	**100,00**	**100,00**	**15**	**33.528.500**	**15,00**	**25,70**	
5.	02.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	30	Laporan	130.448.800	10	26.097.000	5	7.431.500	5	7.431.500	100,00	100,00	15	33.528.500	50,00	25,70	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			50,00	25,70	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
5.	**02.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**5.673.839.200**	**168**	**1.740.440.829**	**86**	**995.515.400,00**	**86**	**907.345.744,00**	**100,00**	**91,14**	**254**	**2.647.786.573**	**254,00**	**46,67**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
5.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan	1.029.336.150	21	373.452.150	12	537.865.300	12	481.727.470	100,00	89,56	33	855.179.620	45,83	83,08	
5.	02.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	72	bulan	164.455.600	21	53.215.134	12	26.463.600	12	25.968.600	100,00	98,13	33	79.183.734	45,83	48,15	
5.	02.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	72	bulan	333.235.750	22	81.399.000	12	24.240.000	12	24.240.000	100,00	100,00	34	105.639.000	47,22	31,70	
5.	02.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	231.452.450	24	59.748.300	12	42.110.000	12	42.110.000	100,00	100,00	36	101.858.300	50,00	44,01	
5.	02.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian dan Buku Perundang-Undangan	72	bulan	375.433.550	24	84.100.000	12	57.600.000	12	57.150.000	100,00	99,22	36	141.250.000	50,00	37,62	
5.	02.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Rapat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	66	bulan	141.005.250	24	32.546.800	12	16.512.000	12	15.912.000	100,00	96,37	36	48.458.800	54,55	34,37	
5.	02.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Kepala Dinas,Sekretaris dan Sub Bagian Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan	1.094.587.950	24	103.629.445	12	66.587.000	12	36.800.174	100,00	55,27	36	140.429.619	50,00	12,83	
5.	02.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	Laporan	110.963.600	2	22.940.000	1	13.614.300	1	13.614.300	100,00	100,00	3	36.554.300	50,00	32,94	
5.	02.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem/ Aplikasi	24	Sistem/Aplikasi	2.193.368.900	6	929.410.000	1	210.523.200	1	209.823.200	100,00	99,67	7	1.139.233.200	29,17	51,94	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	93,13			20,41	14,68	
												Predikat kinerja	ST	ST			SR	SR	
5.	**02.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**8.785.292.987**	**48**	**2.189.324.712**	**24**	**1.194.268.064**	**24**	**962.502.254,00**	**100,00**	**80,59**	**72**	**3.151.826.966**	**72,00**	**35,88**	
5.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya jasa listrik pada	72	bulan	522.015.587	24	321.015.587	12	201.000.000	12	150.952.698	100,00	75,10	36	471.968.285	50,00	90,41	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi																
5.	02.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pelayanan Umum Kantor	72	bulan	8.263.277.400	24	1.868.309.125	12	993.268.064	12	811.549.556	100,00	81,70	36	2.679.858.681	50,00	32,43	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	78,40			25,00	45,21	
												Predikat kinerja	ST	T			SR	SR	
5.	**02.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah**	**100**	**persen**	5.120.634.650,00	**184**	**1.041.527.340**	**105**	**545.660.000,00**	**86**	**545.138.000,00**	**81,90**	**99,90**	**270**	**1.586.665.340**	**270,00**	**30,99**	
5.	02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	72	unit	4.022.634.650	46	792.265.340	23	439.340.000	20	439.128.000	86,96	99,95	66	1.231.393.340	91,67	30,61	
5.	02.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin	526	unit	549.000.000	134	99.911.000	81	26.320.000	65	26.320.000	80,25	100,00	199	126.231.000	37,83	22,99	
5.	02.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan	11	unit	549.000.000	4	149.351.000	1	80.000.000	1	79.690.000	100,00	99,61	5	229.041.000	45,45	41,72	
												Rata-rata capaian kinerja (%)	89,07	99,85			58,32	31,77	
												Predikat kinerja	T	ST			R	SR	
5.	**02.**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Meningkatnya Pengelolaan Barang**	**100**	**Persen**	**148.058.700,00**	**4**	**34.764.000,00**	**2**	**11.085.800,00**	**2**	**11.085.800,00**	**100,00**	**100,00**	**6**	**45.849.800**	**6,00**	**30,97**	
5.	**02.**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**148.058.700**	**4**	**34.764.000**	**2**	**11.085.800**	**2**	**11.085.800,00**	**100,00**	**100,00**	**6**	**45.849.800**	**6,00**	**30,97**	
5.	02.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Laporan	48.578.050	2	11.000.000	1	3.944.500	1	3.944.500	100,00	100,00	3	14.944.500	50,00	30,76	
5.	02.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	Laporan	99.480.650	2	23.764.000	1	7.141.300	1	7.141.300	100,00	100,00	3	30.905.300	12,50	31,07	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			Rata-rata capaian kinerja (%)									100,00	100,00			31,25	30,92	
			Predikat kinerja									ST	ST			SR	SR	
5.	**02.**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Meningkatnya Pendapatan Asli**	**7**	**Persen**	**1.223.410,00**	**27644**	**3.011.680.660**	**15796**	**2.787.534.550**	**10398**	**2.673.079.140**	**65,83**	**95,89**	**38042**	**5.684.759.800**	**558620**	**464665**	
5.	**02.**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**100**	**Persen**	**21.090.935.610**	**27644**	**3.011.680.660**	**15796**	**2.787.534.550**	**10398**	**2.673.079.140**	**65,83**	**95,89**	**38042**	**5.684.759.800**	**38042,00**	**26,95**	
5.	02.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	42	Dokumen	536460550	14	59.087.000	7	55.981.500	5	55.981.500	71,43	100,00	19	115.068.500	45,24	21,45	
5.	02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajaak Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	48	Dokumen	4182841850	15	290.219.900	8	87.640.400	6	87.640.400	75,00	100,00	21	377.860.300	43,75	9,03	
5.	02.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24	Kegiatan	536.460.550	8	82.300.000	4	127.109.000	3	124.788.330	75,00	98,17	11	207.088.330	45,83	38,60	
5.	02.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2256	Objek Pajak	1.236.657.000	752	97.520.000	376	98.980.500	210	98.950.500	55,85	99,97	962	196.470.500	42,64	15,89	
5.	02.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6	Dokumen	1.338.143.200	2	179.150.000	1	111.650.000	0	96.600.000	0,00	86,52	2	275.750.000	33,33	20,61	
5.	02.	Penilainan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak	38169	Objek Pajak	4.633.112.160	24169	1.207.211.060	14000	1.239.307.050	9360	1.219.034.830	66,86	98,36	33529	2.426.245.890	87,84	52,37	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
			atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																
5.	02.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah	2256	Objek Pajak	1.073.580.650	752	74.800.000	376	38.790.000	211	25.435.000	56,12	65,57	963	100.235.000	42,69	9,34	
5.	02.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	180	Dokumen	908.654.600	2	143.000.000	1	83.704.000	0	72.304.000	0,00	86,38	2	215.304.000	1,11	23,69	
5.	02.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114	Laporan	1.080.657.500	38	128.400.000	19	91.379.500	13	77.739.500	68,42	85,07	51	206.139.500	44,74	19,08	
5.	02.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	2400	Objek Pajak	1.385.494.500	788	124.800.000	400	153.352.000	255	149.096.000	63,75	97,22	1043	273.896.000	43,46	19,77	
5.	02.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Pajak Daerah	500		1.796.558.450	200	210.847.000	100	316.769.800	75	296.567.800	75,00	93,62	275	507.414.800	55,00	28,24	
5.	02.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3000	Objek Pajak	1.238.446.600	896	284.867.700	500	165.733.800	257	165.544.280	51,40	99,89	1153	450.411.980	38,43	36,37	
5.	02.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	JumlahLaporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	24	Laporan	1.143.868.000	8	129.478.000	4	77.329.000	3	63.929.000	75,00	82,67	11	193.407.000	45,83	16,91	
5.	02.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	JumlahLaporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	1		139.808.000			2	139.808.000	1	138.308.000	68,53	98,93	1	138.308.000	100,00	98,93	
Rata-rata capaian kinerja (%)													57,31	92,31			47,85	29,31	
Predikat kinerja													R	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**13.891.222.956**		**12.937.416.441**							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													92,45	94,49			80,73	79,14	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)													**ST**	**ST**			**SR**	**R**	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	**01**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
4	**01**	**01**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**				**137.800.000**		**27.560.000**		**-**		**-**							
4	01	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah konsultasi hukum anggota korpri dan tersedianya koordinasi kekecamatan	60	bln	137.800.000	12	27.560.000			0	-			12	27.560.000	20,00	20,00	BKPSDM
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	0,00			20,00	20,00	
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR	
5	**03**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
5	**03**	**01**	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**				**120.000.000**		**22.214.500**		**5.726.500**		**5.726.500**							
5	03	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dok	20.000.000	4	5.000.000	4	2.813.500	4	2.813.500	100,00	100,00	8	7.813.500	66,67	39,07	
5	03	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	18	lap	120.000.000	8	22.214.500	2	2.913.000	2	2.913.000	100,00	100,00	10	25.127.500	55,56	20,94	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	100,00			61,11	30,00	
Predikat kinerja														ST	ST			R	SR	
5	**03**	**01**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**				**19.220.083.950**		**12.323.103.910**		**3.844.116.790**		3.724.731.513							
5	03	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60	bln	18.293.083.950	48	11.611.622.910	12	3.658.616.790	12	3.540.591.513	100,00	96,77	60	15.152.214.423	100,00	82,83	
5	03	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	840.000.000	48	706.481.000	12	185.500.000	12	184.140.000	100,00	99,27	60	890.621.000	100,00	106,03	
5	03	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	10	dok	87.000.000	2	5.000.000			0	-			2	5.000.000	20,00	5,75	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	98,02			73,33	64,87	
													Predikat kinerja	ST	ST			S	R	
5	**03**	**01**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**				**165.300.000**		**107.201.000**		**9.442.800**		9.363.144								
5	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN	128	stel	44.300.000	64	22.150.000			0	-			64	22.150.000	50,00	50,00	
5	03	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS yang Pensiun	1500	Org	121.000.000	828	85.051.000	250	9.442.800	250	9.363.144	100,00	99,16	1078	94.414.144	71,87	78,03	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,16			60,93	64,01	
													Predikat kinerja	ST	ST			R	R	
5	**03**	**01**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**				**1.345.723.000**		**740.322.190**		**145.220.020**		145.220.007								
5	03	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75	jns	48.000.000	30	18.000.000			0	-			30	18.000.000	40,00	37,50	
5	03	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	388	jns	82.695.000	131	85.335.900	12	5.804.000	12	5.803.987	100,00	100,00	143	91.139.887	36,86	110,21	
5	03	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108	jns	30.000.000	54	23.009.150	12	2.543.100	12	2.543.100	100,00	100,00	66	25.552.250	61,11	85,17	
5	03	01	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60	Bln	195.270.000	36	61.960.000	12	8.950.000	12	8.950.000	100,00	100,00	48	70.910.000	80,00	36,31	
5	03	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	84	jns	124.000.000	53	43.130.100	12	2.410.000	12	2.410.000	100,00	100,00	65	45.540.100	77,38	36,73	
5	03	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bln	144.000.000	47	78.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	100,00	100,00	59	102.000.000	98,33	70,83	
5	03	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	187	kali	721.758.000	80	430.887.040	28	101.512.920	20	101.512.920	71,43	100,00	100	532.399.960	53,48	73,76	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	95,24	100,00			63,88	64,36	
													Predikat kinerja	ST	ST			R	R	
5	**03**	**01**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**3.834.400.000**		**1.920.928.188**		**420.000.000**		398.176.144								

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	03	01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bln	338.400.000	48	224.928.188	12	66.000.000	12	50.176.144	100,00	76,02	60	275.104.332	100,00	81,30	
5	03	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Petugas Tenaga Kontrak	60	Bln	3.496.000.000	48	1.696.000.000	12	354.000.000	12	348.000.000	100,00	98,31	60	2.044.000.000	100,00	58,47	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	87,16			100,00	69,88	
Predikat kinerja														ST	T			ST	S	
5	**03**	**01**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**1.293.487.800**		**673.393.740**		**297.350.000**		296.124.777							
5	03	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	24	Unit	1.104.787.800	16	636.003.740	5	297.350.000	5	296.124.777	100,00	99,59	21	932.128.517	87,50	84,37	
5	03	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	89	Unit	68.700.000	17	12.390.000			0	-			17	12.390.000	19,10	18,03	
5	03	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	6	pkt	120.000.000	2	25.000.000			0	-			2	25.000.000	33,33	20,83	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	99,59			46,64	41,08	
Predikat kinerja														ST	ST			SR	SR	
5	**03**	**02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**																	
5	**03**	**02**	**PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN**				**5.390.111.200**		**1.479.380.791**		**181.968.400**		87.648.700							
5	03	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Dokumen Kebutuhan Pegawai	6	Kgt	220.000.000	2	36.386.000			0	-			2	36.386.000	33,33	16,54	
5	03	02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Validasi Data Tenaga Kontrak Jumlah Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS	6	Kgt	3.558.121.200	4	1.186.201.967	1	173.459.000	1	79.139.300	100,00	45,62	5	1.265.341.267	83,33	35,56	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data/Informasi Kepegawaian yang Ter Update	60	Bln	1.245.890.000	48	209.345.824	12	8.509.400	12	8.509.400	100,00	100,00	60	217.855.224	100,00	17,49	
5	03	02	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	6	dok	320.500.000	2	47.447.000			0	-			2	47.447.000	33,33	14,80	
				Jumlah Kartu-kartu yang diterbitkan	769	krt	45.600.000	279				0	-			279	-	36,28	0,00	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	72,81			57,26	16,88	
													Predikat kinerja	ST	S			R	SR	
5	**03**	**02**	**MUTASI DAN PROMOSI ASN**				**4.109.980.400**		**1.795.830.202**		**587.002.300**		238.425.300							
5	03	02	Pengelolaan Mutasi ASN	Tersedianya Dokumen SK Alih Tugas yang diterbitkan	520	Org	298.566.400	77	69.525.200	12	13.796.400	12	16.081.400	100,00	116,56	89	85.606.600	17,12	28,67	
5	03	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	4500	SK	643.576.000	2469	197.973.354	500	15.015.500	494	20.015.500	98,80	133,30	2963	217.988.854	65,84	33,87	
				Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala	12000	SK		6541				1857	-			8398	-	69,98		
5	03	02	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Evaluasi Jabatan	36	kgt	3.167.838.000	16	1.528.331.648	4	558.190.400	1	202.328.400	25,00	36,25	17	1.730.660.048	47,22	54,63	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	74,60	95,37			11,81	13,66	
													Predikat kinerja	S	ST			SR	SR	
5	**03**	**02**	**PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN**				**1.564.690.000**		**423.676.198**		**82.704.200**		47.664.880							
5	03	02	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang profesional dan terampil dalam mengelola aset atau barang daerah	45	Org	347.800.000	27	58.395.000			0	-			27	58.395.000	60,00	16,79	
5	03	02	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK Ijin Belajar yang diterbitkan	720	SK	210.000.000	428	101.821.864	60	10.657.200	60	10.326.880	100,00	96,90	488	112.148.744	67,78	53,40	
5	03	02	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Peserta ASN Mengikuti Diklat	1125	Org	756.890.000	592	69.412.999	2	54.604.500	1	22.555.500	50,00	41,31	593	91.968.499	52,71	12,15	
5	03	02	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan	3000	SK	250.000.000	2231	194.046.335	500	17.442.500	138	14.782.500	27,60	84,75	2369	208.828.835	78,97	83,53	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	59,20	74,32			64,86	41,47	

No	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
													Predikat kinerja	R	S			R	SR	
5	**03**	**02**	**PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR**				**3.199.666.166**		**1.914.107.857**		**517.246.371**		500.889.148							
5	03	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan SKP dan Verifikasi Berkas Pembayaran TPP	27600	Org	2.101.762.166	8591	1.610.522.595	12	491.239.571	12	477.478.604	100,00	97,20	8603	2.088.001.199	31,17	99,35	
5	03	02	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Menerima SLKS	1044	Org	185.178.000	212	36.193.000			0	-			212	36.193.000	20,31	19,54	
5	03	02	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Peserta Wajib Lapor LHKPN dan Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisipilinan	594	Org	182.112.000	265	109.351.352	228	26.006.800	228	23.410.544	100,00	90,02	493	132.761.896	83,00	72,90	
				Jumlah Peserta Wajib Lapor LHKPN dan Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisipilinan	594	Org		227				0	-			227	-	38,22		
5	03	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang diberikan Sanksi Pelanggaran	48	Org	730.614.000	14	158.040.910			0	-	0,00	0,00	14	158.040.910	29,17	21,63	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	93,61			50,46	53,36	
													Predikat kinerja	ST	ST			R	R	
5	**04**	**02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**																	
5	**04**	**02**	**SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL**				**12.012.678.000**		**4.224.989.963**		**561.293.000**		384.705.178							
5	04	02	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,	Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Pim II, III, IV	900	Org	12.012.678.000	273	4.224.989.963	46	561.293.000	41	384.705.178	89,13	68,54	314	4.609.695.141	34,89	38,37	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Prajabatan				80												
					Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional				26												
Rata-rata capaian kinerja (%)															89,13	68,54			34,89	38,37	
Predikat kinerja															T	S			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**6.652.070.381**				**5.838.675.291**									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM/KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 12)															92,56	89,87			89,03	84,72	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM/KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 12)															ST	T			T	T	

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	***UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	***Terfasilitasinya Urusan Pemerintahan Daerah***	***100***	***%***	***16.969.676.000***	***317***	***9.301.942.892***	***109***	***2.701.101.070***	***109***	***2.644.150.389***	***1557,14***		***432***	***11.971.093.281***	***362,06***	***386,46***	***BALITBANG***
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***100***	***%***	***65.270.000***	***6***	***20.387.000***	***6***	***4.469.300***		***4.469.300***	***100,00***	***100,00***	***12***	***24.856.300***	***66,67***	***78,97***	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	13.270.000	2	11.374.000	***2***	1.896.000	*2*	*1.896.000*	100,00	100,00	4	13.270.000	80,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000					*0*	-			0	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	Dokumen	8.000.000					*0*	-			0	-	0,00	0,00	

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000					*0*	-			0	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000					*0*	-			0	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	20.000.000	4	9.013.000	***4***	2.573.300	*4*	*2.573.300*	100,00	100,00	8	11.586.300	53,33	57,93	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100***	***%***	***14.331.160.000***	***104***	***7.955.752.934***	***26***	***2.266.512.570***	***27***	***2.225.173.290***	***100,00***	***98,93***	***130***	***10.180.926.224***	***66,85***	***49,05***	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bulan	13.175.380.000	56	7.380.143.934	14	2.121.047.070	14	2.082.803.290	100,00	98,20	70	9.462.947.224	97,22	71,82	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	Dokumen	1.155.780.000	48	575.609.000	12	144.410.000	12	142.370.000	100,00	98,59	60	717.979.000	83,33	62,12	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	8.000.000			1	1.055.500	1	1.055.500	100,00	100,00	1	1.055.500	20,00	13,19	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Laporan	24.000.000					0	-			0	-	0,00	0,00	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	8.000.000					0	-			0	-	0,00	0,00	

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksana Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***100***	***%***	**24.600.000**				-	0	-			0	-	0,00	0,00	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	8.200.000					0	-			0	-	0,00	0,00	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	16.400.000					0	-			0	-	0,00	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**61.200.000**	**0**				0	-			0	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	Paket	61.200.000	0				0	-			0	-	0,00	0,00	s
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlaksananya Administrasi Umum SKPD***	***100***	***%***	***554.956.000***	***179***	***266.199.858***	***48***	***28.559.200***	***48***	***19.839.400***	***100,00***	***99,53***	***227***	***286.039.258***	***51,54***	***51,54***	
		Penyediaan Peralatan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	58.603.400	1	2.607.000			0	-			1	2.607.000	6,25	4,45	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	64.684.000	35	51.989.000	12	5.976.000	12	5.976.000	100,00	100,00	47	57.965.000	78,33	89,61	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	18.247.600	16	3.216.100			0	-			16	3.216.100	80,00	17,62	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55	Paket	93.680.000	22	27.054.000			0	-			22	27.054.000	40,00	28,88	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	95.679.000	33	33.134.900	12	4.863.200	12	4.863.200	100,00	100,00	45	37.998.100	75,00	39,71	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dokumen	21.476.000	36	34.220.000	12	6.320.000	12	6.320.000	100,00	100,00	48	40.540.000	80,00	188,77	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Laporan	20.000.000					0	-			0	-	0,00		

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	182.586.000	36	113.978.858	12	11.400.000	12	11.184.000	100,00	98,11	48	125.162.858	80,00	68,55	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**140.000.000**				**30.500.000**	**5**	**55.500.000**	**100,00**	**100,00**	**6**	**80.500.000**	**45,00**	**50,42**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	40.000.000					0	-			0	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	60.000.000			4	30.500.000	4	30.500.000	100,00	100,00	4	30.500.000	40,00	50,83	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SJumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	30.000.000					0	-			0	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10.000.000					0	-			0	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Unit	100.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00	2	50.000.000	50,00	50,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan***	***100***	***%***	***640.000.000***		***502.647.950***	***25***	***113.400.000***	***25***	***95.406.400***	**100,00**	**79,57**	**25**	**598.054.350**	100,00	87,01	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	120.000.000	48	81.047.950	12	15.000.000	12	11.006.400	100,00	73,38	60	92.054.350	100,00	76,71	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65	Laporan	520.000.000	52	421.600.000	13	98.400.000	13	84.400.000	100,00	85,77	65	506.000.000	100,00	97,31	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100***	***%***	***1.152.490.000***	***28***	***556.955.150***	**4**	***257.660.000***	***4***	***243.761.999***	100,00	94,61	32	800.717.149	32,00	69,48	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	15	Unit	1.098.590.000	12	494.175.150	4	257.660.000	4	243.761.999	100,00	94,61	16	737.937.149	106,67	67,17	

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5%	Unit	25.000.000	2	50.000.000			0	-			2	50.000.000	4000,00	200,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	Unit	28.900.000	14	12.780.000			0	-			14	12.780.000	51,85	44,22	
												Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	95,44			60,34	64,41	
												Predikat Kinerja	ST	ST			R	R	
2		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Meningkatnya hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti**	***100***	***%***	***4.568.295.100***	***0***	***906.016.199***	***2***	***79.855.800***	***0***	***77.305.900***	***0,00***	***96,81***	***0***	***983.322.099***	***21,52***	***21,52***	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	***100***	***%***	***1.069.100.000***		***258.815.844***	***1***	***33.189.900***	0	32.565.000	100,00	98,37	0	291.380.844	50,00	*41,90*	
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	4	Laporan	319.100.000	1	19.066.020			0	-			1	19.066.020	25,00	*5,97*	
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2	Laporan	100.000.000	*2*	*91.675.824*			0	-			2	91.675.824	100,00	*91,68*	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	Laporan	50.000.000	*1*	*44.951.500*			0	-			1	44.951.500	100,00	*89,90*	
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,	4	Laporan	400.000.000	*2*	*103.122.500*	1	33.189.900	1	32.565.000	100,00	98,12	3	135.687.500	75,00	*33,92*	

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1	Laporan	100.000.000									*0*	-	*0,00*	*0,00*	
		Fasilitasai dan Evaluasi Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Laporan	100.000.000									*0*	-	*0,00*	*0,00*	
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	2 Dok	Dokumen	150.000.000			*2*	*45.516.600*	2	44.891.700	100,00	98,63	*2*	44.891.700	*0,00*	*29,93*	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosisl dan Kependudukan	**Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	***100***	***%***	***300.000.000***				-						-			
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dok	Dokumen	100.000.000										-			
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatn	jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatn	1 Dok	Dokumen	100.000.000										-			
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangann Partisipasi Masyarakat	1 Dok	Dokumen	100.000.000										-			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	***100***	***%***	***819.100.000***				-						-	*50,00*	*16,04*	
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Dokumen	119.100.000	1	19.100.000				-			1	19.100.000	50,00	*16,04*	
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	1	Dokumen	100.000.000										-			

No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengembangan Pekerjaan Umum																
		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Dokumen	100.000.000										-			
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan PengembanganPerumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Dokumen	100.000.000										-			
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2	Dokumen	200.000.000										-			
		Penelitian dan Pengembangan Peantaan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangann Peantaan Ruang dan Pertanahan	2	Dokumen	200.000.000										-			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	***100***	***%***	***2.380.095.100***		***647.200.355***	***1***	***46.665.900***	***1***	***44.740.900***	***100,00***	***95,87***			***60,00***	***31,75***	
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	Laporan	1.100.000.000	4	628.306.255	1	46.665.900	1	44.740.900	100,00	95,87	5	673.047.155	100,00	*61,19*	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4	Laporan	461.000.000													
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5	Laporan	819.095.100	1	18.894.100							1	18.894.100	20,00	*2,31*	
												Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	97,12			53,33	29,89	
												Predikat Kinerja	ST	ST			R	SR	
						21.537.971.100	**317**	**10.207.959.091**	**111**	**2.780.956.870**		**97.145.300**				10.305.104.391			
			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)										100,00	96,28			87,04	82,33	
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)										ST	ST			T	T	

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian kinerja dan realisasi anggaran perangkat daerah, khususnya yang berada dalam lingkup sektor ekonomi, diketahui bahwa mayoritas dinas masih menunjukkan capaian yang tergolong Sangat Rendah (SR). Kondisi ini menandakan adanya ketimpangan antara rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi yang dicapai, baik dari sisi output maupun penggunaan anggaran. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran, mengingat sektor ekonomi memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah. Capaian kinerja yang rendah di sektor ini berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan RKPD. Adapun sejumlah faktor yang turut memengaruhi rendahnya capaian tersebut antara lain:

1. Terbatasnya kemampuan fiskal daerah;
2. Tingginya proporsi belanja wajib (mandatory spending) dari pemerintah pusat yang harus diakomodasi;
3. Kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang pada beberapa perangkat daerah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan penataan kembali terhadap struktur belanja daerah. Penataan ini bertujuan untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Langkah-langkah strategis yang akan diambil antara lain:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan kegiatan, baik dari aspek urgensi, manfaat, maupun keterkaitannya terhadap indikator kinerja utama;
2. Memilah dan menetapkan prioritas kegiatan yang bersifat wajib, mendesak, dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat;
3. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting);
4. Menguatkan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan program lintas sektor;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur dan memperbaiki sistem monitoring serta evaluasi program secara berkala.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat memperbaiki kinerja sektor ekonomi secara bertahap, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, serta tetap menjaga arah pembangunan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi pembangunan daerah yang tetuang pada RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

2.2.2 Evaluasi Indikator Kerja Utama Pembangunan Daerah

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagian besar telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026. IKU Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dalam suatu organisasi pemerintah daerah, yang merupakan miniatur dari organisasi pemerintah pusat di daerah, terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya.

Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja organisasi. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2021-2026, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

Tabel 2.97 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2025

SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TAHUN 2025		CAPAIAN (%)
					TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih dan melayani	1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	70,00 (BB)	65,30 (B)	93,29
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,41	3,64	106,74
		3	SPI KPK	Indeks	77,75	68,17	87,68
		4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	OPINI	WTP	WTP	100
		5	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	3,60	3,19	88,61
2	Meningkatknya akesesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	6	Tingkat akesesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	Persen	72,41	66,09	91,27
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	7	Indeks infrastruktur dasar	Persen	89,92	86,55	96,25
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,42	70,37	109,24
5	Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan yang merata	9	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Poin	8,5	8,01	92,24
		10	Angka Harapan Lama Sekolah	Poin	12,52	12,64	100,96
6	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	11	Angka harapan hidup	Rasio	70,24	74,30	105,78
7	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	12	Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	Ribu Rupiah	10.155,37	9.638,00	94,91
8	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah	13	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Milyar Rupiah	13.559,48	13.746,98	101,38
9	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	14	Persentase angka kemiskinan	Persen	11,64	10,93	106,50
		15	Tingkat pengangguran terbuka	Poin	3,44	4,17	82,49

SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TAHUN 2025		CAPAIAN (%)
					TARGET	REALISASI	
10	Meningkatnya nilai investasi	16	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA))	Juta / Rupiah	316.564,77	154.264,23	48,73
11	Meningkatnya kemandirian desa	17	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	30,56	64,19	210,05

Sumber : Bappeda, 2026

Pemerintah Kabupaten Pesawaran selaku pengemban amanah masyarakat Pesawaran melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

2.2.3 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator TPB yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota terdapat 220 indikator. Capaian setiap indikator akan dibandingkan dengan target nasional berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Penilaian capaian indikator TPB terbagi menjadi empat kategori, yaitu sebagai berikut:

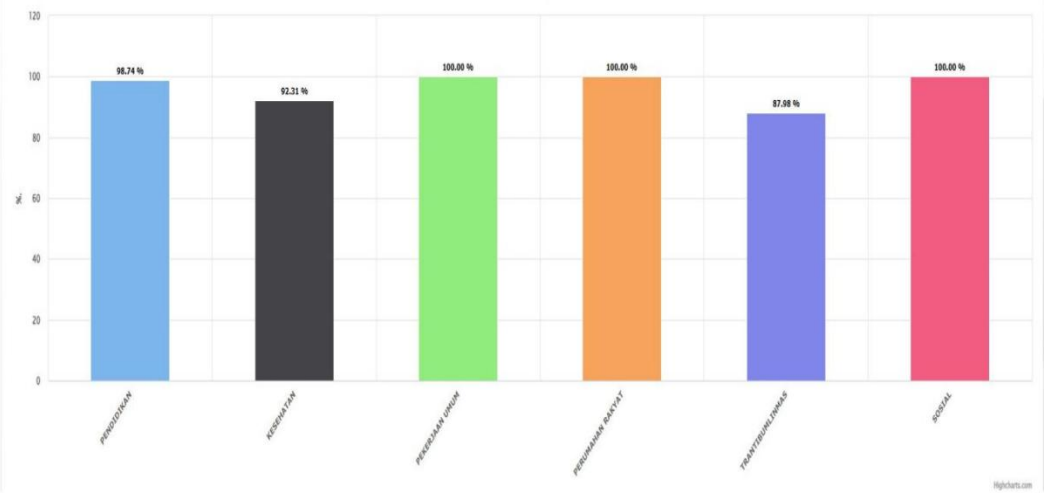
1. Indikator TPB sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS).
2. Indikator TPB sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB).
3. Indikator TPB tidak/belum memiliki data (NA).

2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, SPM bertujuan memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman umum, dan sosial terpenuhi dengan kualitas layak. Pemerintah Kabupaten Pesawaran melaksanakan SPM sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun capaian Penerapan SPM di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.69 Grafik Realisasi Capaian SPM Tahun 2025



Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Dari grafik diatas menunjukan bahwa 6 urusan SPM Kabupaten Pesawaran di tahun 2024 telah berada pada capaian tinggi. Kategori indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Tuntas Paripurna dengan capaian 100 persen dicapai pada urusan Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Sosial. Urusan Pendidikan mencapai tuntas utama dan untuk urusan Trantibumlinmas dan Kesehatan mencapai kategori Tuntas Madya.

Untuk mengatasi belum optimalnya capaian SPM khususnya di bidang trantibumlinmas dan kesehatan maka dilakukan upaya-upaya antara lain 1) Mengoptimalkan Sumber Daya, meliputi Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada, 2) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral serta 3) Penyusunan dan perencanaan anggaran sebaiknya sesuai dengan kebutuhan sehingga penyerapan dana /anggaran setiap sub kegiatan dapat dilakukan dengan maksimal dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait terus melakukan pemetaan kebutuhan, perencanaan program, dan evaluasi capaian SPM setiap tahunnya. Dengan pelaksanaan SPM yang optimal, diharapkan pelayanan dasar bagi masyarakat dapat terlaksana secara merata, bermutu, dan berkelanjutan.

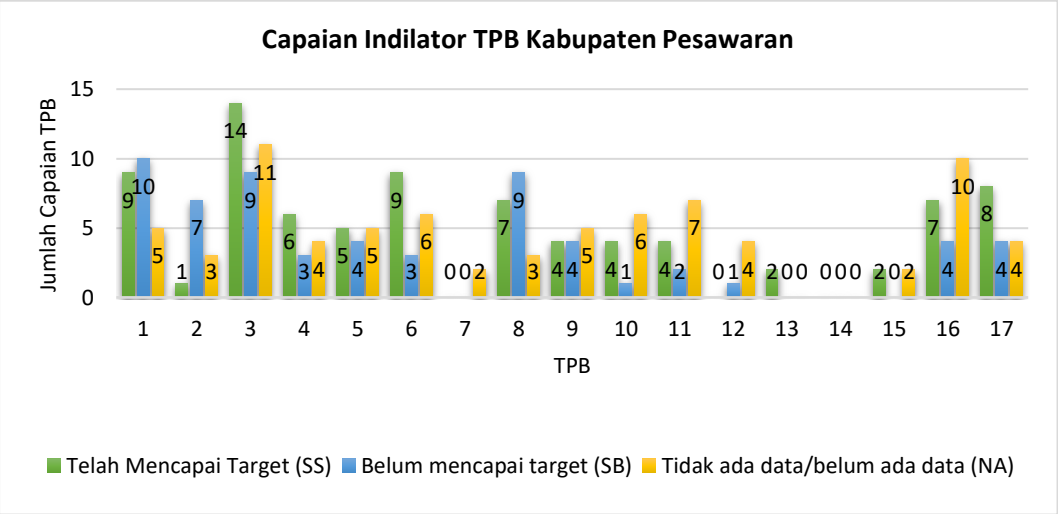
Tabel 2.98 Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025

No	TPB	Jumlah	Telah Mencapai Target (SS)	Belum mencapai target (SB)	Tidak ada data/belum ada data (NA)
1	Tanpa Kemiskinan	24	9	10	5
2	Tanpa Kelaparan	11	1	7	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	14	9	11
4	Pendidikan Berkualitas	13	6	3	4
5	Kesetaraan Gender	14	5	4	5
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	9	3	6
7	Menjamin Akses Energi	2	0	0	2
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	19	7	9	3
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	13	4	4	5
10	Mengurangi Kesenjangan	11	4	1	6
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	13	4	2	7
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	5	0	1	4
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	2	0	0
14	Ekosistem Laut	0	0	0	0
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	4	2	0	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	21	7	4	10
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	8	4	4
Total		220	82	61	77
Persentase		100%	37%	28%	35%

Sumber: Bappead, 2026

Berdasarkan rekapitulasi capaian indikator diatas, dari 220 indikator TPB di Kabupaten Pesawaran, terdapat 37% indikator yang sudah tercapai, 28% indikator belum tercapai, 35% indikator yang tidak memiliki data kajian Kabupaten Pesawaran, sehingga capaian TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional adalah sebanyak 82 indikator dengan persentase 37%.

Gambar 2.70 Grafik Capaian Indikator TPB Kabupaten Pesawaran



Sumber: Bappeda, 2026

Berdasarkan rekapitulasi grafik capaian indikator diatas, dari 220 indikator serta 17 TPB, dapat diketahui bahwa TPB 3 memiliki indikator paling banyak yang telah mencapai target nasional di Kabupaten Pesawaran dengan tujuan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Lampung serta RPJPD Kabupaten Pesawaran 2025-2045, serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional, nasional, regional dan Provinsi Lampung yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Pesawaran, beberapa isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya
   Beberapa permasalahan akan mempengaruhi sektor sosial budaya, antara lain:
   a. Terhubungnya informasi (internet) menghasilkan faham-faham keagamaan yang berbasis masuk ke masyarakat dan menimbulkan konflik horizontal.

b. Proyeksi penduduk tahun 2020-2035 menunjukan usia produktif yang tinggi menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian target menuju Indonesia Emas 2045.
c. Belum optimalnya pembagunan literasi masyarakat.
d. Kurangnya minat pengunjung perpustakaan.
e. Perlunya peningkatan kapasitas kelembanggan pemerintah desa dan program pembangunan desa untuk mewujudkan Desa Cerdas dan Desa Mandiri.
f. Belum Optimalnya penyelesaian penegasan batas wilayah.
g. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama antar daerah maupun dengan perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat.
h. Sumber Daya Manusia fungsional peneliti yang belum berpengalaman pada bidang penelitian dan pengembangan.
i. Belum optimalnya penurunan AKI-AKB, stunting & pengendalian penyakit AIDS, Tuberkolusis dan Malaria (ATM).
j. Belum optimalnya fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.
k. Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit.

2. Bidang Ekonomi

Beberapa permasalahan yang dimungkinkan akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran sehingga akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang ada seperti:

a. Adanya kapal-kapal besar dari luar Pesawaran yang menangkap ikan di wilayah laut Pesawaran.
b. Investasi berorientasi pada usaha yang memanfaatkan energi rendah karbon dan ramah lingkungan.
c. Pengembangan ekonomi biru melalui pemanfaatan sumberdaya laut yang berwawasan lingkungan.
d. Perluasan kawasan konservasi laut dan penataan pengelolaan perikanan.
e. Pemanfaatan teknologi untuk pertanian organik dalam merespon perubahan iklim yang akan terjadi.
f. Perlunya penyusunan regulasi untuk mengurangi alih fungsi lahan khususnya pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
g. Pemerataan dan penataan destinasi wisata melalui pembangunan SDM secara menyeluruh, pembangunan sarpras di destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi wisata dan produk ekonomi kreatif.
h. Pengembangan akomodasi di daerah wisata yang berpotensi pada bertambahnya pendapatan asli daerah.
i. Potensi perkembangan ekonomi digital masih perlu didorong dan dimaksimalkan.
j. Peluang pemanfaatan kawasan hutan dalam perdagangan karbon masih dalam pengembangan.

k. Pengembangan agrobisnis tanaman hortikultura dan perkebunan menjadi peluang peningkatan kesejahteraan petani.
l. Percepatan pembangunan kawasan industri perlu didorong dan kerjasama dengan berbagai pihak.
m. Pengembangan Panas Bumi Way Ratai sebagai alternatif sumber energi berkelanjutan.
n. Struktur ekonomi sangat didominasi oleh tiga sektor utama (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan; dan Konstruksi). Sektor-sektor jasa produktif, keuangan, dan industri pengolahan modern kontribusinya masih terlalu kecil.
o. Karena ekonomi bertumpu pada sektor primer (pertanian/perikanan), laju pertumbuhan ekonomi Pesawaran sangat sensitif terhadap guncangan eksternal seperti perubahan iklim, gagal panen, atau fluktuasi harga komoditas nasional.
p. Sektor akomodasi, penyediaan makan-minum, dan jasa perusahaan belum tumbuh optimal, padahal sektor-sektor ini memiliki value added (nilai tambah) yang tinggi untuk mendongkrak pendapatan daerah.
q. Koperasi pertanian dan Kelompok Tani (Poktan) di Pesawaran sebagian besar belum bertransformasi menjadi korporasi petani yang mandiri. Hal ini membuat posisi tawar petani rendah saat berhadapan dengan pasar.
r. Tekanan urbanisasi dan letak geografis Pesawaran yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung memicu tingginya angka alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan hunian atau komersial, yang mengancam ketahanan pangan daerah jangka panjang.
s. Adopsi teknologi pertanian (smart farming) dan modernisasi alat mesin pertanian (alsintan) masih terbatas pada wilayah tertentu, sehingga produktivitas per hektar belum mencapai batas maksimal.
t. Pesawaran sebagai Pemasok Bahan Mentah. Masalah terbesar adalah terbatasnya industri manufaktur/pengolahan skala menengah-besar di sentra produksi. Komoditas masih diolah di luar Pesawaran menyebabkan daerah kehilangan potensi retribusi dan lapangan kerja
u. Belum adanya kawasan industri yang terintegrasi dan didukung oleh utilitas memadai (listrik industri, pengelolaan limbah, air bersih) yang mampu menarik investor besar untuk mendirikan pabrik hilirisasi di Pesawaran.
v. Banyak destinasi wisata pulau atau pantai dikelola secara privat oleh investor luar. Interaksi dan perputaran uang dengan ekonomi masyarakat desa lokal (community-based tourism) masih rendah. Warga lokal sering kali hanya menjadi pekerja kasar atau penjaga parkir, bukan aktor utama ekonomi.
w. Wisatawan cenderung menjadikan Pesawaran sebagai destinasi wisata satu hari (one-day trip) dari Bandar Lampung. Keterbatasan akomodasi (hotel/homestay standar), minimnya atraksi wisata malam, dan

kurangnya integrasi paket wisata membuat wisatawan tidak membelanjakan uangnya lebih lama di Pesawaran.

x. Pengelolaan sampah di kawasan wisata pesisir dan pulau masih menjadi keluhan utama. Selain itu, kelembagaan seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di beberapa desa wisata masih memerlukan pendampingan intensif agar bisa mengelola amenitas secara profesional.

3. Bidang Infrastruktur

Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pada Bidang Infrastruktur, antara lain:

a. Tantangan pembangunan dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan berketahanan iklim harus menjadi perhatian berbagai pihak.
b. Ketersediaan air baku secara kuantitas berkurang dan secara kualitas menurun.
c. Lokus pekerjaan air minum banyak terdapat pada daerah rawan air dan sebagian besar daerah tersebut belum termasuk dalam lokasi stunting.
d. RDTR yang terealisasi menjadi peraturan bupati baru 2 dari 5 lokus yang telah ditentukan.
e. Belum tersusunnya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR).
f. Pelaksanaan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) melalui online (OSS) belum maksimal.
g. Belum adanya pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang tata ruang yang berfungsi menyelidiki adanya pelanggaran tata ruang.
h. Adanya perubahan RTRW Provinsi Lampung sehingga RTRW Kabupaten Pesawaran harus disesuaikan kembali.
i. Pengawasan dan pengendalian teknis pekerjaan terhadap mutu dan layanan infrastruktur yang dibangun belum optimal karena kurangnya staf teknis dan pelatihan teknis yang diselenggarakan.
j. Sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan sistem IMB ke PBG masih rendah.
k. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi izin mendirikan bangunan masih rendah.
l. Masih banyaknya bangunan perumahan dan tempat usaha yang belum memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan.
m. Infrastruktur terhadap ketahanan bencana di daerah rawan bencana belum optimal.
n. Pembangunan dan pemeliharaan embung yang menjangkau daerah pertanian terutama yang rawan banjir belum optimal.

4. Bidang Pemerintahan

Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dan memiliki pengaruh yang cukup besar pada Bidang Pemerintahan, antara lain:

a. Keterbatasan Kapasitas Fiskal
b. Belum Optimalnya Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa
c. Penerapan E-Goverment masih belum optimal.
d. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

2.3.1.2 Permasalahan Pembangunan Per-Urusan Pemerintahan

Identifikasi permasalahan pembangunan, dilakukan melalui pendekatan urusan wajib dan urusan pilihan, sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

a) Perlunya inovasi Perangkat Daerah dalam peningkatan komposit IPM sektor Pendidikan.
b) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
c) Sarana dan prasarana ekstrakurikuler yang dapat menunjang perkembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial dan kesehatan peserta didik perlu ditingkatkan.
d) Penerapan PAUD holistic integrated yang belum optimal.
e) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
f) Manajemen pendidikan di setiap jenjang pendidikan perlu ditingkatkan kembali.

2. URUSAN KESEHATAN

a) Belum terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai dengan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 dan maldistribusi SDM.
b) Perlunya inovasi perangkat daerah dalam peningkatan komposit IPM sektor kesehatan.
c) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
d) Akses dan mutu pelayanan kesehatan (peningkatan sarana, prasarana, sumber daya manusia).
e) Meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi dan diabetes mellitus).
f) Prevalensi gizi buruk dan optimalisasi penanganan stunting.
g) Tingginya angka penyebaran penyakit endemi baru akibat mutasi penyebab penyakit.
h) Kurangnya penanganan terhadap penderita human immunodeficiency (HIV), Tuberculosis (TB), Malaria.
i) Belum optimalnya penurunan AKI-AKB, stunting & pengendalian penyakit.

j) Belum optimalnya fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.
k) Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
b) Masih belum optimalnya jalan dalam kondisi mantap.
c) Optimalisasi dan penguatan kelembagaan Komisi Irigasi.
d) Percepatan dan penyelesaian penetapan Perkada RDTR Gedong Tataan dan RDTR Teluk Pandan.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
b) Kurangnya cakupan ketersediaan fasum dan fasos pada perumahan layak huni dan kebutuhan perumahan bagi masyarakt berpenghasilan rendah (MBR).
c) Penataan lingkungan kawasan perumahan.
d) Meminimalisir angka kejadian embrional kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
b) Kurangnya PPNS penegak perda dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
c) Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pemadam kebakaran.
d) Optimalisasi TRC dalam penanganan bencana daerah.
e) Belum optimalnya peningkatan kapasitas masyarakat pengurangan risiko bencana di desa rawan bencana.
f) Masih minimnya rambu-rambu peringatan ancaman bencana.
g) Penguatan desa tangguh bencana.

6. URUSAN SOSIAL

a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
b) Optimalisasi penurunan tingkat kemiskinan.
c) Belum optimalnya pemanfaatan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (P3KE).
d) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
e) Kurang optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

a) Pengembangan Ekonomi masyarakat berbasis Potensi kawasan perdesaan.
b) Terbatasnya kesempatan kerja dan peluang usaha.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a) Masih rentan permasalahan traficking terhadap perempuan dan anak.
b) Masih sering timbulnya KDRT dan kekerasaan pada perempuan dan anak.
c) Tingginya Pengaruh negatif dari globalisasi terhadap prilaku anak-anak dan remaja.
d) Optimalisasi Tim Pendamping Keluarga dalam penanganan dan pelaporan stunting.

3. URUSAN PANGAN

a) Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat.
b) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan dan pendataan daerah rawan pangan.
c) Kurangnya pengetahuan untuk pemanfaatan lahan pekarangan kosong.

4. URUSAN PERTANAHAN

a) Percepatan penyelesaian penetapan peraturan daerah tentang pertanahan.
b) Belum optimalnya sertifikasi pertanahan.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a) Peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara.
b) Advokasi kesadaran dan keperdulian masyarakat serta pihak swasta terhadap kelestarian lingkungan.
c) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan.
d) Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah perkotaan.
e) Kurangnya jumlah SDM pengelola persampahan.
f) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a) Tindak lanjut penginputan hasil pencacahan Regsosek.
b) Masih kurangnya fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
c) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
d) Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lebih dioptimalkan.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a) Penguatan BUMDes/BUMDesMa dalam pengelolaan dan advokasi program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG).
b) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.
c) Minimnya penggunaan dan pemanfaatan IPTEK Masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
d) Kurangnya kemampuan SDM aparatur desa dalam administrasi perencanaan pembangunan dan administrasi pengelolaan keuangan desa.
e) Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya keluarga berencana menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS);
b) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif data pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

9. URUSAN PERHUBUNGAN

a) Belum maksimalnya PAD sektor perhubungan.
b) Belum optimalnya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah.
c) Belum adanya rencana pengembangan trayek dan rute angkutan desa dan angkutan antar kota dalam provinsi.
d) Belum optimalnya penyediaan prasarana dan fasilitas transportasi darat dan laut.
e) Optimalisasi penyediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
f) Belum optimalnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
g) Belum optimalnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor.

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a) Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terpadu dalam Command Center Kabupaten Pesawaran.
b) Persiapan pembentukan Computer Security Response Team (CSRT) Kabupaten Pesawaran.

11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

a) Belum optimalnya pasar hasil UMKM.
b) Belum optimalnya pengembangan sistem pembiayaan dan jaringan bisnis dengan kemitraan pemerintah dan swasta.
c) Kurangnya infrastruktur produksi untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UKM.
d) Kualitas lembaga dan SDM koperasi belum optimal.
e) Masih banyak koperasi yang kurang sehat dalam operasionalnya.

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

a) Belum optimalnya dukungan regulasi terkait penanaman modal dan investasi.
b) Kurang intensifnya promosi potensi dan peluang investasi.
c) Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam melengkapi legalitas bangunan dan usaha.

13. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

a) Belum optimalnya pendataan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
b) Masih rendahnya kreatifitas, inovasi dan jiwa kewirausahaan pemuda.
c) Belum optimalnya memasyarakatkan budaya olahraga.
d) Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat Kabupaten.

14. URUSAN STATISTIK

a) Belum tersedianya portal Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Pesawaran.

15. URUSAN PERSANDIAN

a) Belum efektifnya Sistem Pelaporan Pemerintah Daerah (SP4N Lapor) yang terintegrasi.
b) Masih minimnya prasarana dan fasilitas dalam menunjang kegiatan persandian.

16. URUSAN KEBUDAYAAN

a) Kurangnya pendokumentasian dan penggalian budaya daerah.
b) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda.
c) Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri.

17. URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

a) Kurang melembaganya budaya literasi dalam kehidupan masyarakat.
b) Optimalnya SDM arsiparis dan pustakawan.
c) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Arsip dan Perpustakan.

C. URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PERTANIAN

a) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan optimalisasi industri hilir pengolahan hasil pertanian.
b) Tingginya angka kejadian alih fungsi lahan (peruntukan dan jenis komoditas).
c) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh pertanian, perkebunan, dan peternakan.
d) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas pengolahan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan.
e) Percepatan terbentuknya komisi pengawasan pupuk dan pestisida.
f) Belum optimalnya penanganan penyakit tanaman dan penyakit ternak.

2. URUSAN PARIWISATA

a) Belum maksimalnya PAD sektor pariwisata.

b) Belum tercapainya Target PDRB Sektor Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Perdagangan, serta Jasa Lainnya).
c) RIPPDA yang belum selaras dan optimal.
d) Konservasi terumbu karang belum ada revitalisasi terumbu karang.
e) Fasum fasos belum memiliki strandar pariwisata (toilet, mushola, dll).
f) Pokdarwis masih sedikit yang aktif.
g) Kesadaran masyarakat akan sapta pesona.
h) Belum ada mekanisme monev terkait kinerja internal pariwisata.

3. URUSAN PERIKANAN

a) Belum maksimalnya PAD sektor perikanan.
b) Belum optimalnya produksi perikanan air tawar.
c) Penguatan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan.
d) Belum optimalnya pengawasan terhada pencemaran akibat industri perikanan.

4. URUSAN PERDAGANGAN

a) Pentingnya pengendalian inflasi.
b) Belum maksimalnya sarana dan prasarana pasar-pasar tradisionl.
c) Tingginya tingkat pertumbuhan pasar modern dan waralaba.

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

a) Kurang optimalnya pembiayaan dan kemitraan antara industri kecil (home industry).
b) Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.

6. URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

a) Perlunya peningkatan suplai listrik di daerah pelosok dan pulau-pulau kecil.

7. URUSAN TRANSMIGRASI

a) Kurangnya kesempatan penduduk sebagai calon peserta transmigrasi.

D. UNSUR PENUNJANG

1. SEKRETARIAT DAERAH

a) Penguatan kesekretariatan TPID.
b) Pendampingan OPD dalam penilaian SAKIP dan RB.
c) Laporan evaluasi pemerintah daerah (LPPD, SPM dan LKPJ) yang tepat waktu.
d) Updating SSH, SBM dan HSPK.
e) Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah.
f) Percepatan perwujudan command center Kabupaten Pesawaran.
g) Penyelenggaraan rakor forkopimda (Coffee morning) secara berkala.
h) Fasilitas tindak lanjut MoU (kerjasama daerah).
i) Implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

j) Percepatan penyelesaian batas wilayah dan batas desa.

2. SEKRETARIAT DPRD

a) Harmonisasi agenda reses DPRD dalam proses perencanaan pembangunan kabupaten.
b) Harmonisasi agenda kerja DPRD dalam proses penganggaran (APBD) kabupaten.
c) Harmonisasi dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda).

3. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a) Penguatan koordinasi komunikasi intelijen daerah (KOMINDA).
b) Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan.
c) Munculnya hoax, perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamaan dan ketertiban masyarakat.
d) Terdapat potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik dan yang bernuansa Sara.
e) Tingginya angka penyalahgunaan/penguasaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).

4. PENGAWASAN

a) Penguatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP).
b) Optimalisasi pelaksanaan review terhadap dokumen perencanaan, pengangguran dan dokumen teknis lainnya.
c) Penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah desa.
d) Peningkatan indeks perspektif korupsi dan pendampingan MCP KPK.

5. PERENCANAAN

a) Harmonisasi agenda kerja perencanaan pembangunan kabupaten.
b) Percepatan implementasi satu data indonesia (SDI) Kabupaten Pesawaran.
c) Penguatan peran TKPK dalam penurunan angka kemiskinan.

6. KEUANGAN

a) KUA-PPAS dan APBD belum sepenuhnya mempedomani RKPD.
b) Belum optimalnya kerja tim koordinasi dalam penanganan TPTGR.
c) Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah.
d) Belum tersedianya data proyeksi sumber pendanaan pembangunan daerah dalam SIPD.
e) Optimalisasi kerjasama implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.
f) Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

7. KEPEGAWAIAN

a) Masih kurangnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.
b) Masih kurangnya jumlah ASN untuk memenuhi kebutuhan minimal pemerintah daerah.

8. PENELITIAN

a) Belum adanya road map pengembangan inovasi daerah.
b) Belum adanya rencana kelitbangan.
c) Optimalisasi pemanfaatan hasil kelitbangan.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

2.3.2.1 Penyelarasan Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran

Berdasarkan kajian terhadap RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, dan memperhatikan berbagai isu-isu internasional (global), nasional maupun regional yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.99 Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional (Provinsi Lampung)	Isu Daerah (Kabupaten Pesawaran
1. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan 2. Krisis Energi 3. Pemulihan Ekonomi pasca Covid-19 4. Perang dan Ketegangan Geopolitik 5. Isu Kesehatan Mental dan Kesejahteraan 6. Krisis Pengungsi dan Migrasi 7. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi 8. Transformasi Digital dan Keamanan Siber 9. Krisis Pangan Global	1. Rendahnya Produktivitas 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat 4. Kebutuhan Hidup Tingai pada Usia Produktif 5. Krisis Lingkungan 6. Dinamika Geopotitik dan Geoekonomi 7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Belum optimalnya hilirisasi pada kinerja sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah 2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi 3. Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan 4. Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. 5. Belum optimalnya ketahanan dan kemandirian energi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. 6. Belum optimalnya pengembangan kawasan ekonomi baru berbasis eco-city yang terintegrasi dan berkelanjutan. 7. Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara optimal 8. Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi 9. Belum optimalnya pelestarian nilai religi, budaya, dan nasionalisme sebagai modal sosial dalam mendukung	1. Belum optimalnya hilirisasi pada sektor industri pengolahan dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah. 2. Belum berkembangnya Kawasan Industri Tegineneng. 3. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah. 4. Basis ekonomi masih pada sektor primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan). 5. Tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di wilayah pedesaan. 6. Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. 7. Belum optimalnya pemanfaatan EBT dalam mendukung kemandirian energi. 8. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir dalam mempercepat pembangunan wilayah. 9. Penduduk usia produktif yang ada belum diimbangi dengan kualitas dan penyerapan tenaga kerja. 10. Belum optimalnya peran iptek

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional (Provinsi Lampung)	Isu Daerah (Kabupaten Pesawaran
		stabilitas, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 10. Belum optimalnya mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup 11. Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal 12. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok terlantar	dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 11. Mitigasi dan tanggap terhadap perubahan iklim dan kebencanaan belum optimal. 12. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang berintegritas dan melayani. 13. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. 14. Ancaman deforestasi kawasan lindung.

Sumber: Hasil analisis, 2025.

2.3.2.2 Isu Strategis Ekonomi Wilayah

A. Pengembangan Pariwisata

Kabupaten Pesawaran memiliki bentang alam yang beragam mulai dari wilayah pegunungan/perbukitan hingga pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sehingga berdampak pada tersebarnya potensi kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah mulai dari wisata alam, budaya, maupun buatan. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran 2017-2031 destinasi wisata yang diprioritaskan dalam pengembangannya adalah Kawasan Strategis Pengembangan Wisata Daerah (KSPD) yang terdiri dari 6 kawasan strategis. Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai (Marina Teluk Ratai) direncanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata seluas 647 Ha di Kecamatan Teluk Pandan yang terdiri dari Blok Pantai Queen Artha seluas 29 Ha, Pulau Tangkil seluas 12 Ha, Blok Pantai Mutun seluas 253 Ha, Pulau Lahu 2 Ha, Blok Pantai Ringgung seluas 186 Ha, Pulau Tegal seluas 120 Ha, Blok Mangrove Ketapang seluas 18 Ha, dan Blok Mahitam seluas 27 Ha.

Dalam upaya menangkap peluang tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan 50 desa wisata melalui Keputusan Bupati Nomor 320/IV.04/HK/2018 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran. Sejalan dengan kebijakan tersebut, untuk memperkuat kebijakan pengembangan pariwisata maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 telah ditetapkan kawasan pariwisata seluas kurang 2.193 hektar yang meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada dengan daya tarik wisata berupa wisata alam pesisir pantai, laut, air terjun, perbukitan, dan wisata buatan. Selain itu juga telah ditetapkan potensi wisata sesuai daya tarik objek wisata yang meliputi Wisata Air Terjun ditetapkan pada Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Sumber Jaya; Desa Ceringin Asri; Desa Poncorejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; dan Desa Wates Way Ratai. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Way Urang; Desa Paya; dan Desa Tambangan.

Selanjutnya Wisata Pantai, Kuliner Dan Ekonomi Kreatif ditetapkan pada Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Sukajaya Lempasing; Desa Sidodadi; Desa Batumenyan; Desa Hanura; Desa Hurun; Desa Cilimus; Desa Talangmulya; Desa Munca; dan Desa Tanjung Agung. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Sanggi; Desa Gebang; dan Desa Durian. Untuk Wisata Bahari dan Warisan Budaya ditetapkan pada Kecamatan Punduh Pidada, meliputi Desa Pagar Jaya; Desa Pulau Legundi; dan Desa Sidodadi. Kecamatan Marga Punduh, meliputi Desa Pulau Pahawang; Desa Kekatang; Desa Kampung Baru; Desa Pekon Ampai;Desa Kunyaiyan; Desa Cilimus; dan Desa Tajur. Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Batumenyan. Adapun untuk Wisata

Kerajinan Tangan Tapis, ditetapkan pada: Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan Ratu; Desa Negeri Katon; Desa Tanjung Rejo; Desa Halangan Ratu; dan Desa Pujo Rahayu.

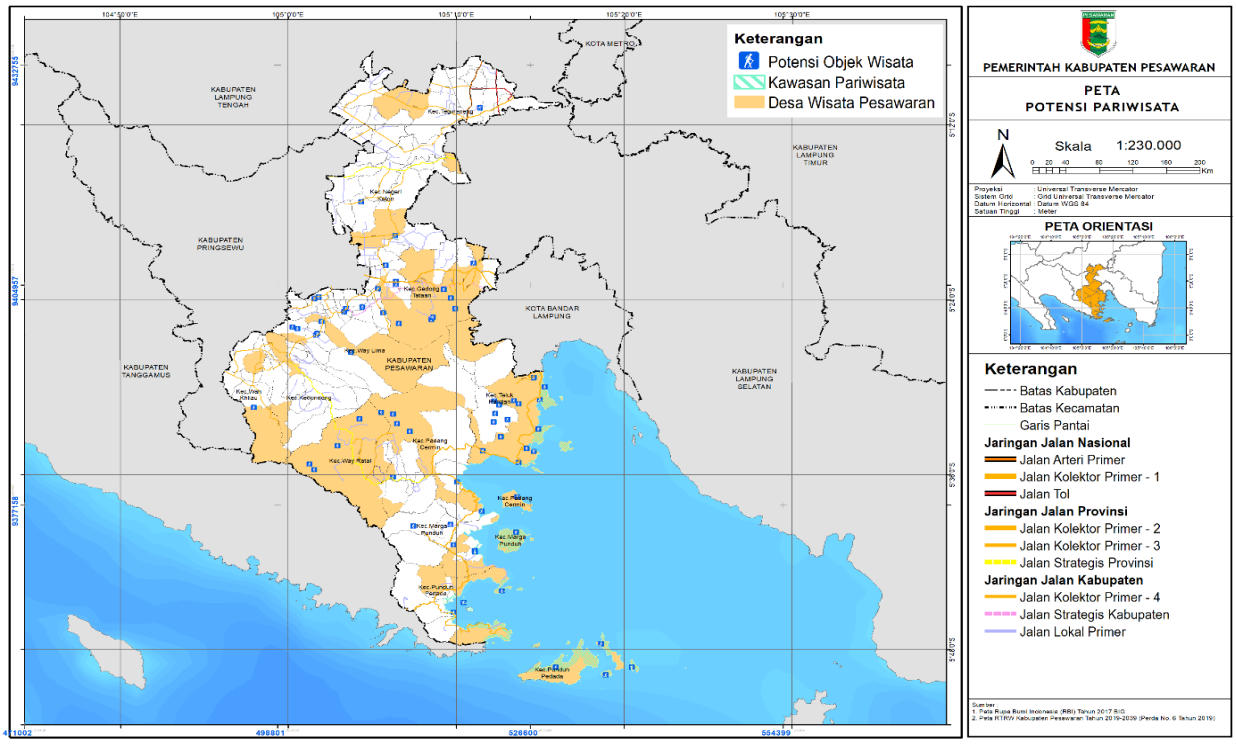
Tabel 2.100 Sebaran Desa Wisata

NO	KECAMATAN	NAMA OBYEK WISATA	OBYEK WISATA	DAYA TARIK
1.	Padang Cermin	Air Terjun Sinar Tiga	Alam	Panorama Alam Air Terjun
2.	Padang Cermin	Air Terjun Anglo	Alam	Panorama Alam Air Terjun
3.	Way Ratai	Air Terjun Mandiri	Alam	Panorama Alam Air Terjun
4.	Way Ratai	Air Terjun Kembar	Alam	Panorama Alam Air Terjun
5.	Padang Cermin	Air Terjun Ciupang	Alam	Panorama Alam Air Terjun
6.	Padang Cermin	Air Terjun Tundo Telu	Alam	Panorama Alam Air Terjun
7.	Hutan	Air Terjun Talang Rabun	Alam	Panorama Alam Air Terjun
8.	Padang Cermin	Air Terjun Tanah Longsor	Alam	Panorama Alam Air Terjun
9.	Hutan	Air Terjun Gunung Betung	Alam	Panorama Alam Air Terjun
10.	Padang Cermin	Air Terjun Penantian	Alam	Panorama Alam Air Terjun
11.	Way Ratai	Air Terjun Randu Kembar	Alam	Panorama Alam Air Terjun
12.	Padang Cermin	Muncak Teropong Laut/Tirtayasa	Alam	Panorama Keindahan Alam dari Puncak
13.	Padang Cermin	Pantai Mutun	Alam	Panorama Alam Pantai
14.	Padang Cermin	Ekowisata Mangrove Petengoran	Alam	Panorama Alam Pantai dan Wisata Edukasi
15.	Marga Punduh	Pulau Pahawang	Alam	Panorama Alam Pantai
16.	Padang Cermin	Pulau Tegal Mas Resort	Alam	Panorama Alam Pantai
17.	Teluk Pandan	Ekowisata Mangrove Cuku Nyinyi	Alam	Panorama Alam Pantai dan Wisata Edukasi
18.	Gedong Tataan	Islamic Center	Budaya	Tempat Ibadat dengan Arsitektur yang indah
19.	Negeri Katon	Wisata Embung Desa Purworejo	Alam	Panorama Alam Embung
20.	Padang Cermin	Pantai Tembikil	Alam	Panorama Alam Pantai
21.	Teluk Pandan	Pantai Sari Ringgung	Alam	Panorama Alam Pantai
22.	Teluk Pandan	Pantai Dewi Mandapa	Alam	Panorama Alam Pantai
23.	Padang Cermin	Pantai Klara	Alam	Panorama Alam Pantai
24.	Teluk Pandan	Pantai Bensam	Alam	Panorama Alam Pantai
25.	Punduh Pidada	Pantai Teluk Hantu	Alam	Panorama Alam Pantai
26.	Punduh Pidada	Pantai Pancur Permai	Alam	Panorama Alam Pantai
27.	Punduh Pidada	Pantai Centiqi	Alam	Panorama Alam Pantai
28.	Punduh Pidada	Pantai Kucing Riang	Alam	Panorama Alam Pantai
29.	Padang Cermin	Pulau Kelagian	Alam	Panorama Alam Pantai
30.	Punduh Pidada	Pulau Legundi	Alam	Panorama Alam Pantai
31.	Punduh Pidada	Pulau Lelangga	Alam	Panorama Alam Pantai
32.	Padang Cermin	Pulau Mahitam	Alam	Panorama Alam Pantai
33.	Padang Cermin	Pulau Lahu	Alam	Panorama Alam Pantai

NO	KECAMATAN	NAMA OBYEK WISATA	OBYEK WISATA	DAYA TARIK
34.	Punduh Pidada	Pulau Tanjung Putus	Alam	Panorama keindahan alam
35.	Punduh Pidada	Pulau Balak	Alam	Panorama Alam Pantai
36.	Punduh Pidada	Pulau Lok/Helok	Alam	Panorama Alam Pantai
37.	Punduh Pidada	Pulau Siuncal	Alam	Panorama Alam Pantai
38.	Padang Cermin	Wisata Villa Gardenia Lampung	Buatan	Panorama Alam Taman di Lereng Bukit
39.	Way Lima	Lamban Balak Bandar Agung	Budaya	Rumah Adat Sub-etnis Saibatin
40.	Hutan	Bukit Lantana	Alam	Panorama Alam Perbukitan
41.	Gedong Tataan	Desa Wisata Sungai Langka	Buatan	Panorama Alam Pertanian dan Perkebunan Durian dan Salak
42.	Negeri Katon	Taman Bukit Raya Pelayangan	Buatan	Panorama Keindahan Alam
43.	Way Lima	Destinasi Wisata Bronjong	Alam	Wahana Air River Tubing
44.	Way Ratai	Bukit Cendana	Alam	Panorama Alam Pegunungan
45.	Padang Cermin	Air Terjun Lubuk Lau	Alam	Panorama Alam Air Terjun
46.	Tegineneng	Kebun Jeruk Dieng Paris	Buatan	Perkebunan Jeruk
47.	Teluk Pandan	Hutan Mangrove	Alam	Panorama Hutan Mangrove
48.	Gedongtataan	Kolam Renang Pesawaran City	Buatan	Kolam renang dan rekreasi lainnya
49.	Punduh Pidada	Taman Nemo Pahawang	Alam	Panorama alam taman Nemo
50.	Negeri Katon	Embung Desa Purworejo	Buatan	Panorama waduk dan wahana rekreasi lainnya

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2023

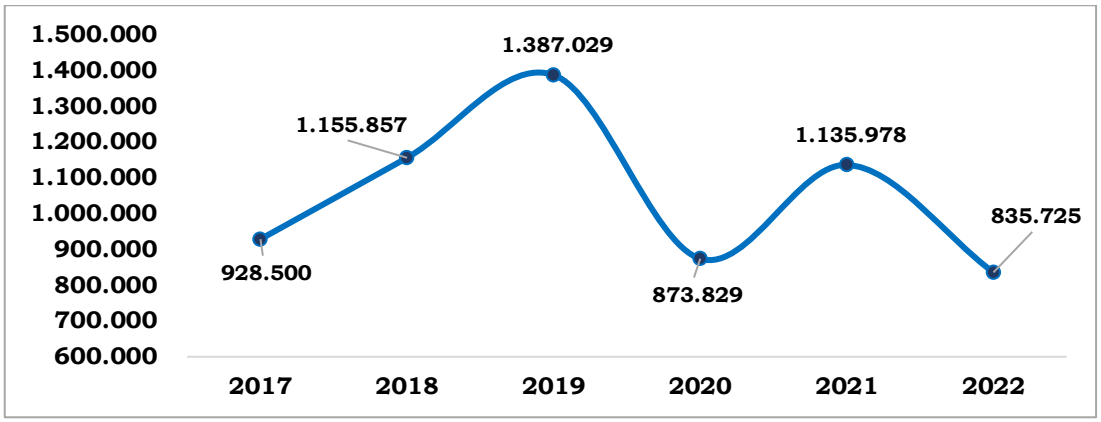
Gambar 2.71 Peta Sebaran Potensi Wisata



Sumber : Dinas Pariwisata, 2023, data diolah

Dari sejumlah lokasi wisata tersebut telah berkontribusi dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Pesawaran. Sepanjang periode Tahun 2017 hingga 2019 telah terjadi peningkatan kunjungan wisatawan dari 928.500 menjadi 1.387.029 orang. Pada periode Tahun 2020 hingga 2022 terjadi fluktuasi akibat Pandemi Covid-19 dimana pada akhir periode kunjungan wisatawan masih berada pada angka 835.725 orang.

Gambar 2.72 Grafik Kunjungan Wisatawan



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2023

B. Pengembangan Pertanian (Agribisnis)

sektor pertanian terbagi menjadi empat sub sektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Sebagai salah satu sektor yang menjadi poros ekonomi wilayah, diharapkan mampu menjadi sektor yang tangguh dan mampu mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai tukar petani.

1. TANAMAN PANGAN

   Komoditas di sektor pertanian khususnya tanaman pangan di Kabupaten Pesawaran terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu dimana komoditas unggulan utamanya berupa padi dan jagung . Untuk produksi komoditi tanaman pangan dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101 Luas Panen dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	**PADI**					
1	Luas Panen (Ha)	22.068	21.260	23.360	23.010	21.910
2	Produksi (Ton)	113.207	113.403	130.559	121.693	115.934
3	Produktivitas (Ton/Ha)	5,13	5,33	5,58	5,28	5,29
B	**JAGUNG**					
1	Luas Panen (Ha)	33.324	24.808	21.452	21.111	19.208

2	Produksi (Ton)	166.504	156.766	133.164	126.424	107.728
3	Produktivitas (Ton/Ha)	4,99	6,31	6,20	5,98	5,60

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel tersebut luas panen padi mengalami fluktuasi sepanjang periode Tahun 2020-2024 sehingga berdampak pada produksi padi yang juga berfluktuasi dari 113.207 ton pada Tahun 2020 menjadi 115.934 ton pada Tahun 2024. Sejalan dengan penurunan yang cukup besar, dari sisi produktivitas juga menunjukkan perkembangan yang fluktuasi sepanjang periode tersebut dari angka 4,99 menjadi 5,6 ton per hektar pada Tahun 2024. Dalam upaya mengantisipasi menurunnya luas panen padi di tahun-tahun berikutnya maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menetapkan lahan pertanian abadi seluas 8.452 hektar.

Disisi lain pada komoditas jagung selama periode Tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang menurun dimana terjadi penurunan luas panen yang berdampak pada menurunnya produksi jagung sebesar 166.504 ton pada awal periode menjadi 107.728 ton pada akhir periode. Namun secara produktivitas panen jagung selama periode tersebut mengalami fluktuasi dari angka 4,99 ton per hektar pada awal periode menjadi 6,20 ton per hektar pada Tahun 2022 dan menurun kembali ke angka 5,60 ton per hektar.

2. HORTIKULTURA

Komoditas di sektor pertanian khususnya hortikultura selama semusim di Kabupaten Pesawaran terdiri dari bawang daun, bawang (bawang merah dan bawang putih), kembang kol, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel, bayam, buncis, cabai (cabai besar/TW/teropong, cabai keriting, dan cabai rawit), jamur (jamur tiram, jamur merang, jamur lainnya), kacang panjang, kangkung, mentimun, labu siam, paprika, terong, tomat, melon, semangka, pisang, dan stroberi dengan komoditas unggulannya yakni cabai besar dan pisang. Untuk produksi komoditi pertanian hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102 Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	**CABAI BESAR**					
1	Luas Panen (Ha)	666	602	332	306	316
2	Produksi (Kwintal)	16.056	40.388	23.093	19.973	21.898
3	Produktivitas (Kwintal /Ha)	24,11	67,09	69,56	65,4	69,4

B	PISANG					
1	Luas Panen (Ha)	2.213.285	2.186.060	2.198.758	2.231.593	2.247.321
2	Produksi (Kwintal)	4.375.309	3.664.953	4.497.809	4.075.996	4.165.899
3	Produktivitas (Kwintal /Ha)	1,98	1,68	2,05	1,80	1,85

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel diatas terjadi fluktuasi luas panen yang berdampak pada produksi cabai besar selama periode Tahun 2020 sampai 2024. Pada Tahun 2021 produksi cabai besar berada pada titik tertinggi dengan capaian sebesar 40.388 kwintal dan menurun menjadi 21.898 kwintal pada Tahun. Adapun secara produktivitas terjadi fluktuasi selama periode tersebut, namun secara umum mengalami penurunan dari Tahun 2020-2024 dengan produktivitas 16.506 kwintal per hektar menjadi 69,56 kwintal per hektar.

Selanjutnya pada komoditas pisang juga menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada Tahun 2020 produksi pisang mencapai 4.375.309 kwintal dengan produktivitas pada angka 1,98 kwintal per hektar dan menurun pada Tahun 2024 dimana produksi pisang mencapai 4.165.899 kwintal dan produktivitas pada angka 1,85 kwintal per hektar.

3. PERKEBUNAN

Komoditas di sektor pertanian khususnya sektor perkebunan mencakup yakni tanaman kakao, kelapa, kopi, karet, kelapa sawit, cengkeh, lada, pala, tembakau, pinang, aren, kemiri, dan cabe jamu. Adapun komoditas kakao, kelapa dan kopi mendominasi sektor perkebunan di Kabupaten Pesawaran. Produksi dan luas areal tanaman perkebunan terbesar di Kabupaten Pesawaran berasal dari komoditi kakao dengan masing-masing sebesar 28.543,74 ton dan 23.974 Ha. Sedangkan produksi dan luas areal tanaman perkebunan terkecil di Kabupaten Pesawaran berasal dari komoditi Cabe Jamu dengan masing-masing sebesar 10,56 ton dan 33 Ha.

Hutan produksi dan kebun adalah modal yang cukup potensial di Kabupaten Pesawaran, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistemnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kondisi sumber daya alam yang telah rusak diantaranya dengan program rehabilitasi lahan dan program produktivitas usaha perkebunan melalui pengembangan tanaman perkebunan dan usaha agribisnis perkebunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.103 Luas Panen dan Produksi Komoditas Perkebunan

NO	KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	Kakao	23.974	28.543,74

NO	KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)
2	Kelapa	10.512	8.267,46
3	Kopi Robusta	2.714	1.358,76
4	Karet	1.077	1.099
5	Kelapa Sawit	681	681
6	Cengkeh	511	282,24
7	Lada	234	207,80
8	Pala	115	95,92
9	Tembakau	85	81
10	Pinang	29	20,44
11	Aren	63	20,01
12	Kemiri	26	18,88
13	Cabe Jamu	33	10,56

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran, 2025

4. PETERNAKAN

Dalam sektor peternakan terdiri dari beberapa jenis hewan ternak diantaranya sapi potong, kerbau, kuda, domba, dan jenis unggas, yaitu ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Dari beberapa jenis ternak terbanyak yang ada di Kabupaten Pesawaran adalah kambing dan ayam pedaging. Untuk jumlah populasi ternak dan unggas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104 Populasi dan Produksi Sektor Peternakan

NO	HEWAN	JUMLAH TERNAK / UNGGAS	PRODUKSI DAGING (Kg)	PRODUKSI TELUR (Kg)
HEWAN TERNAK				
1	Sapi Potong	23.082	254.572	-
2	Kerbau	958	929	-
3	Kuda	3	-	-
4	Kambing	54.079	47.791	-
5	Domba	5.439	995	-
HEWAN UNGGAS				
6	Ayam Kampung	210.567	226.992	291.067
7	Ayam Petelur	447.670	-	3.517.112
8	Ayam Pedaging	3.066.355	3.487.739	-
9	Itik/Itik Manila	30.865	19.352	115.199

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran, 2025

5. PERIKANAN

Berdasarkan jumlah rumah tangga perikanan dan produksi perikanan yang ada di Kabupaten Pesawaran, sektor perikanan terbagi menjadi tiga yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan produk olahan hasil perikanan.

Untuk jumlah rumah tangga perikanan terbesar terdapat pada perikanan budidaya dan produksi terbanyak diperoleh dari perikanan air tangkap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105 Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Sektor Perikanan

NO	JENIS	JUMLAH RUMAH TANGGA	PRODUKSI PERIKANAN (Ton)
1	Perikanan Tangkap	2.529	11.081,33
2	Perikanan Budidaya	3.474	6.388,15
3	Produksi Olahan Hasil Perikanan	29	45,80

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran, 2025

C. Pengembangan Perindustrian

Tabel 2.106 Progres Rencana Pembangunan Kawasan Industri

TAHUN	URAIAN
2016	Kawasan Industri Pesawaran telah masuk dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran 2016–2021.
2017	Bupati Pesawaran menginisiasi mengusulkan adanya Kawasan Industri di Kabupaten Pesawaran dengan mulai menyesuaikan rencana Kawasan industri dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran.
2018	Kementerian Perindustrian menyusun Masterplan Kawasan Industri Pesawaran.
2019	Kawasan Industri Pesawaran tertuang dalam RTRW Provinsi Lampung pada peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029. KI Pesawaran (lahan seluas 1.200 Ha) sudah dimasukan kedalam Materi RTRW Kabupaten Pesawaran (Perda No. 6 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Pesawaran tahun 2019 – 2039) sebagai Kawasan Peruntukan Industri (Core: Industri Agro, Makanan, dan Pakan Ternak). Pemda Kabupaten Pesawaran menghadap ke Kemenperin untuk menindaklanjuti Rencana KI Pesawaran. MoU Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan SDCP Holdings PTY LTD tentang Kerjasama Pengembangan Terpadu dan Berkelanjutan Kawasan Industri Tegineneng, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, Pertanian dan Budidaya Perikanan di Kabupaten Pesawaran No. 02/ Mou/ SDCP/ X/ 2019 (11/ MoU/ HK/ 2019). PT. SDCP Indonesia Maju melalui perwakilannya telah menandatangani MoU dengan Pemda Kab. Pesawaran bersedia menjadi pengelola KI Pesawaran dengan mekanisme PMA (Penanaman Modal Asing) pada 21 Desember 2019. Didalam kesepakatannya juga dinyatakan bahwa pada Bulan Juni 2020 akan dilakukan pembebasan lahan.

TAHUN	URAIAN
2020	Perpres No. 18/ 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, Kawasan Industri Pesawaran masuk kedalam salah satu Kawasan Industri yang akan dikembangkan di Provinsi Lampung. Awal pandemi COVID-19, PT. SDCP Indonesia Maju melalui perwakilannya menyatakan menunda rencana yang telah disepakati sebelumnya karena terkendala finansial. Telah disusun Perda No. 4 Tahun 2020 tentang RPIK Kabupaten Pesawaran 2020 – 2039.
2021	BKPM bersama Pemerintah Kab. Pesawaran melakukan Rapat Koordinasi Daerah Pengembangan Kawasan Industri Pesawaran dalam rangka penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada kawasan industri pesawaran tahun anggaran 2021 Kementerian ATR/ BPN, memberikan bantuan dalam penyusunan RDTR OSS Kawasan Sekitar Industri Pesawaran yang secara substansi sudah disetujui oleh Pemda dan Kementerian/ Lembaga terkait. Kawasan Industri Pesawaran masuk dalam Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021 – 2026 Terdapat lahan seluas ±40 Ha di lokasi KI Pesawaran milik Pemprov Lampung, saat ini, Pemkab Pesawaran sudah melakukan tindak lanjut dengan bersurat ke Gurbenur Provinsi Lampung (Februari 2021, No. 050/__/V.01/II/ 2021) yang pokok muatannya adalah memohon dukungan Gubernur untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri Pesawaran dengan memberikan Hibah Lahan tersebut. Saat ini lahan tersebut sebagian merupakan lahan produktif untuk pertanian.
2022	Telah terbit Perbup No. 53 Tahun 2022 RDTR Kawasan Perkotaan Tegineneng 2022 – 2042 yang didalamnya memuat mengenai Rencana Pengembangan KI Pesawaran. Awal tahun 2022, PT. SDCP Indonesia Maju melalui perwakilannya menghubungi Pemda Kab. Pesawaran dan menyatakan masih mencari alternatif pembiayaan untuk mengelola KI Pesawaran. Sedangkan pada Pertengahan Tahun 2022, PT SDCP Indonesia Maju telah menyatakan secara lisan mundur sebagai calon pengelola KI Pesawaran. Berdasarkan Materi yang disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR pada Rapat Koordinasi terkait Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Indsutri (tgl. 8 September 2022, di Hotel Orchardz Industri Jakarta), dukungan program untuk KI Pesawaran yang telah direncakan adalah: Tahun 2022, Ditjen Bina Marga, Preservasi Jalan dan Jembatan Rua Tegineneng – Sp. Tj. Karang – 10 Km; Terbanggi Besar Tegineneng – Sukadana (Pn). Tahun 2023, Ditjen Sumber Daya Air, Pemeliharaan Rutin Embung Kabupaten Pesawaran – Pemeliharaan berkalaJaringan Irigasi Air Tanah Kabupaten Pesawaran. Akhir 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sedang melakukan inisiasi kepada calon investor dari Negara Malaysia dan China.
2023	Kondisi s.d Maret 2023, sudah ada kunjungan dari Perusahaan Angelyeast (RRC) ke Kawasan Industri Pesawaran yang difasilitasi

TAHUN	URAIAN
	oleh kementerian Investasi/BKPM serta dinas penanaman modal Provinsi Lampung. Namun belum ada informasi perkembangan selanjutnya terkait dengan kunjungan tersebut. Target ini Bergantung pada calon investor yang akan masuk ke Kawasan Industri Pesawaran sehingga membutuhkan dukungan dari Kementerian Investasi / BKPM dan Kemenko Marves. Bulan Juli 2023 Kementerian Industri RI mengirimkan target Timeline untuk KI Pesawaran terkait data progres KI Pesawaran, setelah Target Time line dikirimkan Ke Kemenperin. Bulan Agustus 2023 sd Desember 2023 Kementerian Perindustrian mengadakan FGD Pemantauan Pengelola Kawasan Industri Prioritas RPJMN dan Proyek Startegis Nasional melalui Virtual zoom dan mengundang beberapa OPD tekhnis yang sesuai dengan tema FGD dengaan tujuan untuk dapat berdiskusi mengenai progres dan kendala apa saja dalam pengembangan KI Pesawaran. Dari Hasil FGD tesebut dapat disimpulkan bahwa : Untuk KI Pesawaran dalam Tahap Tinjau Ulang dikarenakan sampai saaat ini kendala utama nya adalah belum adanya Pengelola KI.

Sumber : Bapppeda Kabupaten Pesawaran, 2024

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Kawasan Industri Pesawaran, maka langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan yakni:

1. Mempertimbangkan bahwa aspek Tata Ruang KI Pesawaran telah disesuaikan (RTRW Provinsi Lampung pada peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029; Perda No. 6 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Pesawaran tahun 2019 – 2039; dan Perbup No. 53 Tahun 2022 RDTR Kawasan Perkotaan Tegineneng 2022 – 2042), menyatakan bahwa di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung akan dikembangkan Kawasan Industri Pesawaran, maka hal ini perlu diupayakan untuk didorong realisasinya. Potensi konektivitas lokasi KI Pesawaran yang mudah diakses dari beberapa exit tol, jalur lintas tengah, bandara Radin Inten II, Pelabuhan Panjang, beberapa stasiun dan jalur Kereta Api, serta kemudahan akses ke Kota Metro dan Kota Bandar Lampung menjadi potensi dari KI Pesawaran.
2. Permasalahan mengenai lahan pada lokasi KI Pesawaran yang sebagian dimiliki oleh Pemprov Lampung (±40 Ha) perlu ditindaklanjuti dan difasilitasi untuk dicarikan jalan keluar bersama demi pengembangan KI Pesawaran.
3. Dukungan untuk penyusunan FS, DED, dan beberapa dokumen pendukung lainnya perlu disusun untuk melengkapi syarat penerbitan Izin untuk Kawasan Industri.

2.4 TELAHAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD disusun dengan prinsip sinkronisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesawaran, RPJPD, kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah. DPRD menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran ini bukan daftar keinginan sektoral, melainkan masukan strategis untuk memperkuat kualitas RKPD Tahun 2027.

Adapun beberapa substansi utama Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut :

Pertama, peningkatan kualitas pelayanan dasar. DPRD menekankan pentingnya pemerataan dan peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah pesisir, perdesaan, dan daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses layanan dasar.

Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah. DPRD mendorong agar RKPD Tahun 2027 memprioritaskan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, dan drainase, dengan pendekatan yang berkeadilan antarwilayah serta memperhatikan aspek ketahanan dan mitigasi bencana.

Ketiga, penguatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. DPRD memandang perlu adanya penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata berbasis potensi lokal, disertai dengan dukungan peningkatan kapasitas, akses permodalan, dan pemasaran hasil produksi masyarakat.

Keempat, penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial. DPRD mendorong agar program pengentasan kemiskinan disusun secara terintegrasi lintas perangkat daerah, berbasis data yang akurat, serta berpihak kepada kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Kelima, penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.

Keenam, pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Dengan karakter geografis Kabupaten Pesawaran yang beragam, DPRD menegaskan agar setiap program pembangunan memperhatikan daya dukung lingkungan, perlindungan kawasan pesisir dan daerah rawan bencana, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.5 INOVASI DAERAH

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesawaran secara umum memiliki trend meningkat. Pada tahun 2020 Kabupaten Pesawaran mendapatkan kriteria sangat inovatif yaitu dengan nilai capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 2.454 dan sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Pesawaran tetap mendapatkan kriteria sangat inovatif yang tercatat memperoleh nilai capaian sebesar 66,51. Namun pada tahun 2025 kriteria yang diperoleh dalam capaian IID menjadi inovatif dengan nilai 54,82. Secara lebih lengkap, gambaran capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesawaran sampai dengan Tahun 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.107 Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2020-2025

Tahun	Nilai	Kriteria	Trend
2020	2.454	Sangat Inovatif	-
2021	48,71	Inovatif	Turun
2022	63,92	Sangat Inovatif	Naik
2023	65,13	Sangat Inovatif	Naik
2024	66,51	Sangat Inovatif	Naik
2025	54,82	Inovatif	Turun

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan, 2026

Dalam Rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 387 dijelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada prinsip:

a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak ada konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pada periode Tahun 2018-2025 Inovasi Daerah yang telah diterapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.108 Inovasi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH
1	*2*	*3*
1	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SI ANDAN Transformasi Sistem Layanan Administrasi dan Dokumentasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Di
2	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SIKP)
3	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) KORPRI
4	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	SIMTARI (Simpel Tanpa Ribet)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Desa tangguh Bencana (DESTANA)
6	Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Kanal Pembayaran Digital Pajak Daerah
7	Badan Penelitian dan Pengembangan	Pusaka Intan
8	Badan Penelitian dan Pengembangan	Rumah Inovasi Virtual RumVi
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SISTEM INFORMASI KOORDINASI DAN EVALUASI PERENCANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAE
10	Bagian Barang dan Jasa	Pendaftaran Produk Pelaku Usaha UMKM di E-Katalog Lokal Kabupaten Pesawaran
11	Bagian Organisasi	E-SKM DIGITAL (Survei Kepuasan Masyarakat Digital)
12	Bagian Organisasi	APLIKASI E SAKIP
13	Bagian Organisasi	Aplikasi Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja
14	Bagian Organisasi	POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DA
15	Bagian Organisasi	SISTEM LAYANAN BAGIAN ORGANISASI
16	Bagian Pembangunan	SISTEM SSH-ASB PESAWARAN
17	Bagian Perekonomian	AKUR (Aktualisasi dan Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat)
18	Bagian Perekonomian	Digitalisasi Arsip Data dan Dokumen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pesawaran
19	Bagian Perlengkapan	SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (SIDRAKOR)
20	Bagian Sumber Daya Alam	Perhutanan Sosial Masyarakat Pesawaran
21	Bagian Umum	Sistem Informasi Sewa Menyewa Gedung (SISMENDUNG) dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PAD Kab
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aplikasi Pelayanan Online E-dakduk (Data Kependudukan Elektronik)
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Admininistrasi Kependudukan Turun ke Bawah (PAK TUAH)
24	Dinas Kesehatan	Nasi Semur (Makanan Padat Bergizi Pendamping Asi sesuai Umur)
25	Dinas Kesehatan	DEDE IMAS (Datang Dilihat Intervensi Ke Masyarakat)

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH
1	*2*	*3*
26	Dinas Kesehatan	GERGAJI (Gerakan dan Giat Jauhi Komplikasi Diabetes Melitus dan Hipertensi)
27	Dinas Kesehatan	MAK TATI (Masyarakat Tanggap Bumil Resti)
28	Dinas Kesehatan	CANTOL KALEM (Cepat, Aman, Terkontrol Kanker Leher Rahim)
29	Dinas Kesehatan	CASTING REMATRI (Pencegahan Stunting Sejak Remaja Putri)
30	Dinas Kesehatan	CETING SENI (Cegah Stunting Sejak Dini)
31	Dinas Kesehatan	KECAP MANIS (Kelas Edukasi Calon Pengantin Menuju Keluarga Sehat Dan Harmonis)
32	Dinas Kesehatan	GELAS TOPCER (Gerakan Pelaksana Stop TB Secara Cepat Oleh Kader)
33	Dinas Kesehatan	HORE KURMA (Homecare Kunjungan Rumah)
34	Dinas Kesehatan	“DETIK HOTS COVID-19” (DATANGI EDUKASI DAN SUNTIK UNTUK HINDARKAN ORANG DARI T
35	Dinas Kesehatan	CHAT MINDER (change health mindset earlier)
36	Dinas Kesehatan	KARMILA (Kelompok Masyarakat Peduli Malaria)
37	Dinas Kesehatan	JANGAN BAPER (Jaring Dan Lawan TB Paru Bersama Kader)
38	Dinas Kesehatan	KASIH CINTA (Kelas Senam Ibu Hamil Cerdas Inovatif Dan Sehat Bayi)
39	Dinas Kesehatan	KELUARGA KUAT (KENALI UKUR AWASI TERUSKAN)
40	Dinas Kesehatan	Pusaka Padang Cermin (Kepedulian Saka Bakti Husada dan Masyarakat Padang Cermin Tanggulangi TB Paru
41	Dinas Kesehatan	PROLABA (Program Lansia Bahagia)
42	Dinas Kesehatan	PROSILANG (PRODUKSI OKSIGEN DAN ISI ULANG)
43	Dinas Kesehatan	CANTING PERMATA (PENCEGAHAN STUNTING DENGAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA BALITA BE
44	Dinas Kesehatan	Polantas Gemoy (Posyandu Lansia Sehat Gerakan Mobile)
45	Dinas Kesehatan	Kader ASIK (Aku Siap Informasikan tentang Kesehatan)
46	Dinas Kesehatan	PAKAR PENTING (Pemberdayaan Kader Peduli Stunting)
47	Dinas Ketahanan Pangan	PERANG (Pemanfaatan Pekarangan)
48	Dinas Ketahanan Pangan	Peminjaman Cadangan Pangan Kepada Masyarakat
49	Dinas Ketahanan Pangan	Arca Ketapang
50	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satu Data Pesawaran
51	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Manajemen Rapat (MRapat)
52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	FASILITASI PENERBITAN PERIZINAN BAGI PELAKU UMKM
53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	PELATIHAN PEMBUKUAN DIGITAL BAGI KOPERASI
54	Dinas Lingkungan Hidup	“SILAUAN” (Sistem Informasi, Layanan Pengaduan).
55	Dinas Lingkungan Hidup	Gerakan Kelola Sampah "GELASH"

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH
1	*2*	*3*
56	Dinas Pariwisata	Sulam Usus Dengan Memanfaatkan Limbah Kain Batik dibuat Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran
57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BUJANG (Badan Usaha Jejama Berkembang)
58	Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DEWI RAMAH MULIA (Desa Wisata Ramah Perempuan dan Peduli Anak)
59	Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS GARUDA DASHAT (PEMBANGUNAN KELUARGA DI RUMA
60	Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Transformasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM BERLIAN) Menjadi Lembaga Kema
61	Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PUSPAGA BANGGA KENCANA ANDAN JEJAMA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
62	Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PIKIRAN/ PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK R) PESAWARAN
63	Dinas Pemuda dan Olahraga	Bina PEKAT (Pembinaan Pemuda Berkarakter)
64	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pesawaran Digipreneurship (Kewirausahaan Digital Pemuda Pesawaran)
65	Dinas Pemuda dan Olahraga	JEBOL ATLET (Jemput Bola Atlet)
66	Dinas Pemuda dan Olahraga	Sehat Bugar Pasca Pandemi Covid 19
67	Dinas Perhubungan	PENGAWAS MATA (Pengelolaan Kawasan Maritim dan Pariwisata)
68	Dinas Perhubungan	SIGEPP (Sistem Geografis Prasarana Perhubungan)
69	Dinas Perhubungan	SIMARLA (Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas)
70	Dinas Perhubungan	SPAM-LALIN (Survey Pendataan Lampu Jalan dan Rambu Lalulintas)
71	Dinas Perhubungan	TRC (Tim Reaksi Cepat)
72	Dinas Perikanan	Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan
73	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	AL-QUR'AN DARI KAIN TAPIS
74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BIMBINGAN TEKNIS SHIBORI (Teknik Pewarnaan Kain Khas Jepang)
75	Dinas Perkebunan dan Peternakan	SULTAN (Sistem Lalu Lintas Peternakan)
76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	E Pusda Pesawaran
77	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SimPeka (Sistem Otomasi Perpustakaan Kabupaten)
78	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PENGANTAR OPD (Pengelolaan dan Penataan Arsip OPD)
79	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Baseline Permukiman Kumuh (Simbaku)

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH
1	*2*	*3*
80	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Rumah Bencana (Simacan)
81	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
82	Dinas Sosial	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) ANDAN JEJAMA
83	Dinas Sosial	KUBAYAM (Kelompok Usaha Bersama Budidaya Ternak Ayam)
84	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Inovasi Layanan Bank Materi Dgital (Bank Madi)
85	Inspektorat	Klinik Konsultasi BERISI (Bersama Inspektorat Mencari Solusi)
86	Inspektorat	SPTPD HUKDIS Mantap (Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Melalui Aplikasi)
87	Inspektorat	PATROLI (Pengawasan Dan Kontrol Pungutan Liar)
88	Inspektorat	SAPA Inspektorat (Sarana Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat)
89	Inspektorat	SI PANAS DEWI (Strategi Preventif Dalam Pembinaan, Pengawasan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran).
90	Satuan Polisi Pamong Praja	SILINTIK (SIAGA LINMAS CANTIK)

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil analisa terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029, identifikasi isu strategis, permasalahan strategis di tingkat Provinsi Lampung dan Nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya juga memperhatikan apa yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2027. Disisi yang lain, penyusunan prioritas dan sasaran dalam RKPD Tahun 2027 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah, secara rinci dituangkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027

Visi: **Mewujudkan Pesawaran CAKEP yang Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045**						
NO	**MISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2027**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Optimalisasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan demi Terwujudnya Generasi yang Unggul dan Sehat dengan Fasilitas yang Baik dan Merata	1.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	1.1.1 Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67
				Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,36
			1.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,39
				Prevalensi Stunting	Persen	11,37
2	Terciptanya Kondusifitas dalam Kehidupan untuk Terwujudnya Rasa Aman dan Bahagia Masyarakat Bumi Andan Jejama	2.1 Meningkatkan Kesejahteraan dan Kestabilan Daya Beli Masyarakat	2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Inflasi	Persen	1,00-3,00
				Tingkat Pengengguran Terbuka	Persen	3,51-4,05
				Tingkat Kemiskinan	Persen	10,00-9,00
		2.2 Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	2.2.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan	Kemantapan Jalan	Persen	61,28
				Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	85,52

Visi: Mewujudkan Pesawaran CAKEP yang Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045						
NO	**MISI**	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**SATUAN**	**TARGET 2027**
			2.2.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,10
				Indeks Resiko Bencana	Poin	176,27-180,27
		2.3 Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab	2.3.1 Meningkatnya Kerukunan Hidup antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74,90
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74,90
3	Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis Kearifan Lokal serta Pemberdayaan Generasi Milenial untuk Kesejahteraan Masyarakat	3.1 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	3.1.1 Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	7,4
			3.1.2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Pertumbuhan Sektor Pertanian	Persen	1,05
				Indeks Ketahanan Pangan	Poin	83,30
			3.1.3 Meningkatnya Ekonomi Daerah melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Persen	7,11-8,26
		3.2 Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Masyarakat Inklusif	3.2.1 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	Indeks Perlindungan Anak	Poin	63,75
				Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,317
4	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Cepat, Tepat, dan Transparan	4.1 Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	4.1.1 Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,59
5	Mewujudkan Masyarakat yang Produktif untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Desa	5.1 Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa	5.1.1 Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	35

4.1.1 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran

Pendekatan spasial dilakukan untuk menentukan lokus pembangunan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran untuk memaksimalkan hasil pembangunan. Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Lampung di Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut:

1. **Kawasan Strategis Nasional**
   Kawasan strategis Nasional berupa kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Komando Armada RI Kawasan Barat (KOARMABAR).
2. **Kawasan Strategis Provinsi**
   Kawasan strategis Provinsi meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya; dan
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

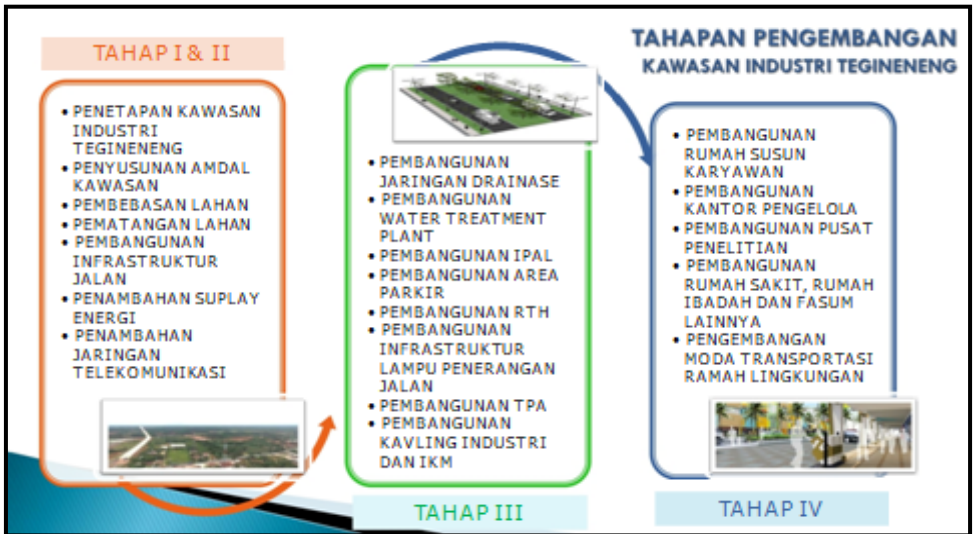
Gambar 4.1 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran



Sumber : Bappeda, 2026

1) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi:
   a. Kawasan Industri Tegineneng
      Kawasan Industri Tegineneng yang merupakan salah satu kawasan industri untuk mendukung Metropolitan Bandar Lampung, lokasinya sangat strategis yaitu di penghujung rencana jalan bebas hambatan (jalan tol) Terbanggi Besar- Pematang Panggang, dimana salah satu pintu keluar tol tersebut berada di Tegineneng. Selain itu juga terdapat dilintasi oleh jalan kereta api yang menghubungkan beberapa kota di Provinsi Lampung.

Gambar 4.2 Rencana Tahapan Pengembangan Kawasan Industri Tegineneng



Sumber : Bappeda, 2026

b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pidada

Kawasan Minapolitan; berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan yaitu suatu konsep kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Dengan panjang garis pantai ± 160 km yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Selain itu juga terdapat beberapa sungai dan berair sepanjang tahun (antara lain; Sungai danlainnya) dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat. Kawasan minapolitan di Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.

c. Kawasan Agropolitan Gedong Tataan

Kawasan Agropolitan di Kecamatan Gedongtataan adalah sebagai kawasan terpadu pertanian lahan basah dan lahan kering, yang ditetapkan sebagai lokasi ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian tipologi desa dalam kawasan agropolitan serta penentuan jenis komoditas unggulan, maka daerah pengembangan agribisnis adalah sebagai berikut;

1. Daerah Pengembangan Agribisnis (DPA) sebagai desa penghasil bahan baku berbasis tanaman perkebunan terutama tanaman kakao di Desa Way layap, Sungai Langka, Negeri sakti, Sukadadi, Kurungan Nyawa, Bogorejo, Pampangan, Cipadang, Padang ratu dan Taman Sari.
2. DPA untuk bahan baku berbasis tanaman pangan dan hortikultura terutama tanaman padi, jagung, pisang, tomat dan jahe, berlokasi di Desa Padang ratu, Karang Anyar, Kutoarjo, Way Layap, Bogorejo dan Taman Sari.
3. DPA untuk penghasil bahan baku berbasis peternakan terutama kambing, di Desa Sungai Langka, Bernung, Bogorejo dan Kebagusan.

d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

kawasan strategis pariwisata daerah, meliputi:

1. KSPD Teluk Pandan dan Marina Teluk Ratai;
2. KSPD Pulau Pahawang dan Pulau-Pulau Sekitarnya;
3. KSPD Padang Cermin, Way Ratai dan sekitarnya;
4. KSPD Marga Punduh, Punduh Pidada dan sekitarnya;
5. KSPD Gedong Tataan, Negeri Katon dan sekitarnya;dan
6. KSPD Way Lima, Kedondong dan sekitarnya.

e. Kawasan Perkotaan Gedong Tataan

Kawasan perkotaan Gedongtataan merupakan salah satu kota yang dipromosikan oleh Provinsi Lampung sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional serta fungsi lainnya. Lokasinya yang strategis di lintas Barat Pulau Sumatera menyebabkan Kota Gedongtataan akan berkembang pada masa mendatang.

f. Kawasan energi panas bumi di Kecamatan Padang Cermin, dan Kecamatan Way Ratai.
g. Kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan.

Gambar 4.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan

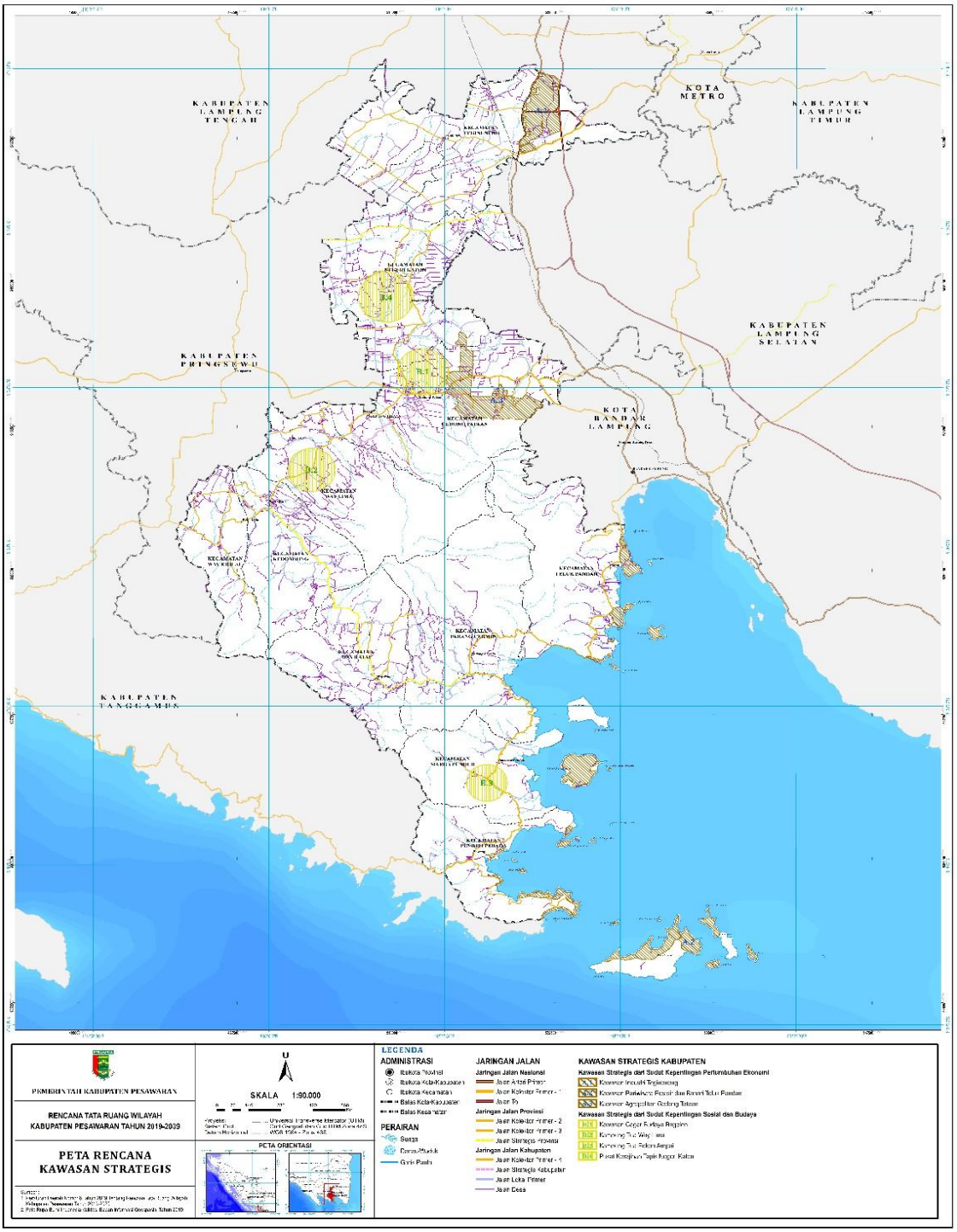


Sumber : Bappeda, 2025

2) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya

Kawasan strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya meliputi kawasan cagar budaya Bagelen, Kampung Tua Way Lima, Kampung Tua Pekon Ampai dan Pusat Kerajinan Tapis Negeri Katon. Kawasan Bagelen terletak di pusat Kota Gedongtataan merupakan lokasi pertama ditempatkan transmigrasi di tanah air. Dengan dibangunnya Musium Transmigrasi di Bagelen membuat kawasan ini mempunyai nilai yang tinggi sebagai kawasan bersejarah. Artinya bahwa kelestarian dari kawasan ini penting untuk dilakukan, sebagai daerah tujuan wisata bukan hanya mengunjungi musium saja tetapi juga dapat melihat situasi dari Kawasan Begelen secara keseluruhan.

Gambar 4.4 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran



Sumber : Bappeda, 2026

Rencana pengembangan desa wisata kabupaten meliputi:
a. 50 Desa Wisata
b. 16 Desa Wisata Event
c. 25 Desa Wisata Unggulan

Gambar 4.5 Peta Rencana Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran



Sumber : Dinas Pariwisata, 2026

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, *Suistainable Development Goal'S* (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ke-2 (kedua) RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2027 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Lampung tahun 2027. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pesawaran dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :

a. Arah Kebijakan Pembangunan Menengah Kabupaten Pesawaran sebagaimana RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029;
b. Isu Strategis, dan
c. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Lampung maupun Tingkat Nasional.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas

pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

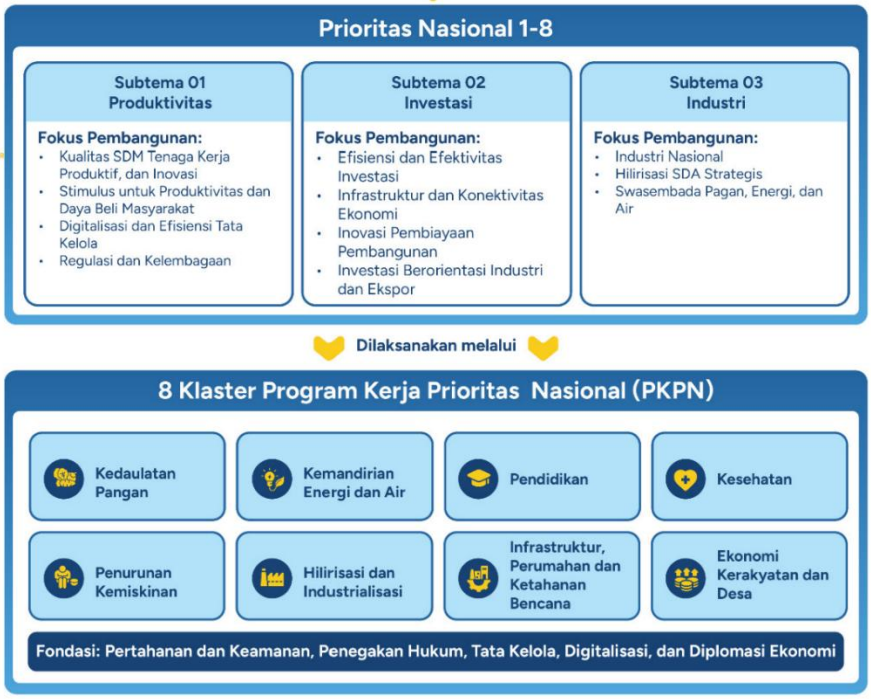
Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2027 mengangkat tema "***Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri***". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "***Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045***".

RKP Tahun 2027 merupakan perencanaan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada tiga kata kunci utama, yaitu produktivitas, investasi, dan industri yang dilaksanakan melalui sebelas fokus pembangunan sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan ketajaman arah kebijakan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

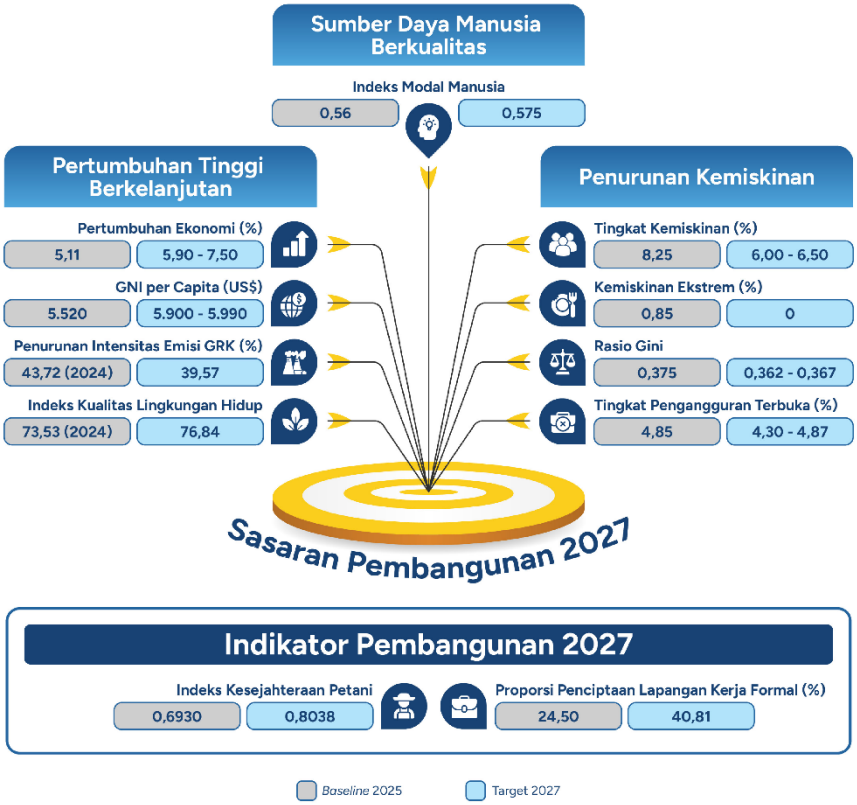
Gambar 4.6 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2027



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas, 2026

Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2027 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada sebagai berikut.

Gambar 4.7 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2026

4.2.1.1 Prioritas Nasional RKP Tahun 2027

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
   Peningkatan produktivitas menjadi kunci swasembada pangan, energi, dan air serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka peningkatan produktivitas diperlukan fondasi pembangunan yang kokoh, yaitu tatanan sosial yang stabil, demokratis, dan berkeadilan yang perlu diperkuat. Dalam RKP Tahun 2027, hal ini diwujudkan melalui Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan pembangunan yang adil, inklusif dan merata.

   Sasaran Utama dalam Prioritas Nasional 1, yaitu:

Gambar 4.8 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1



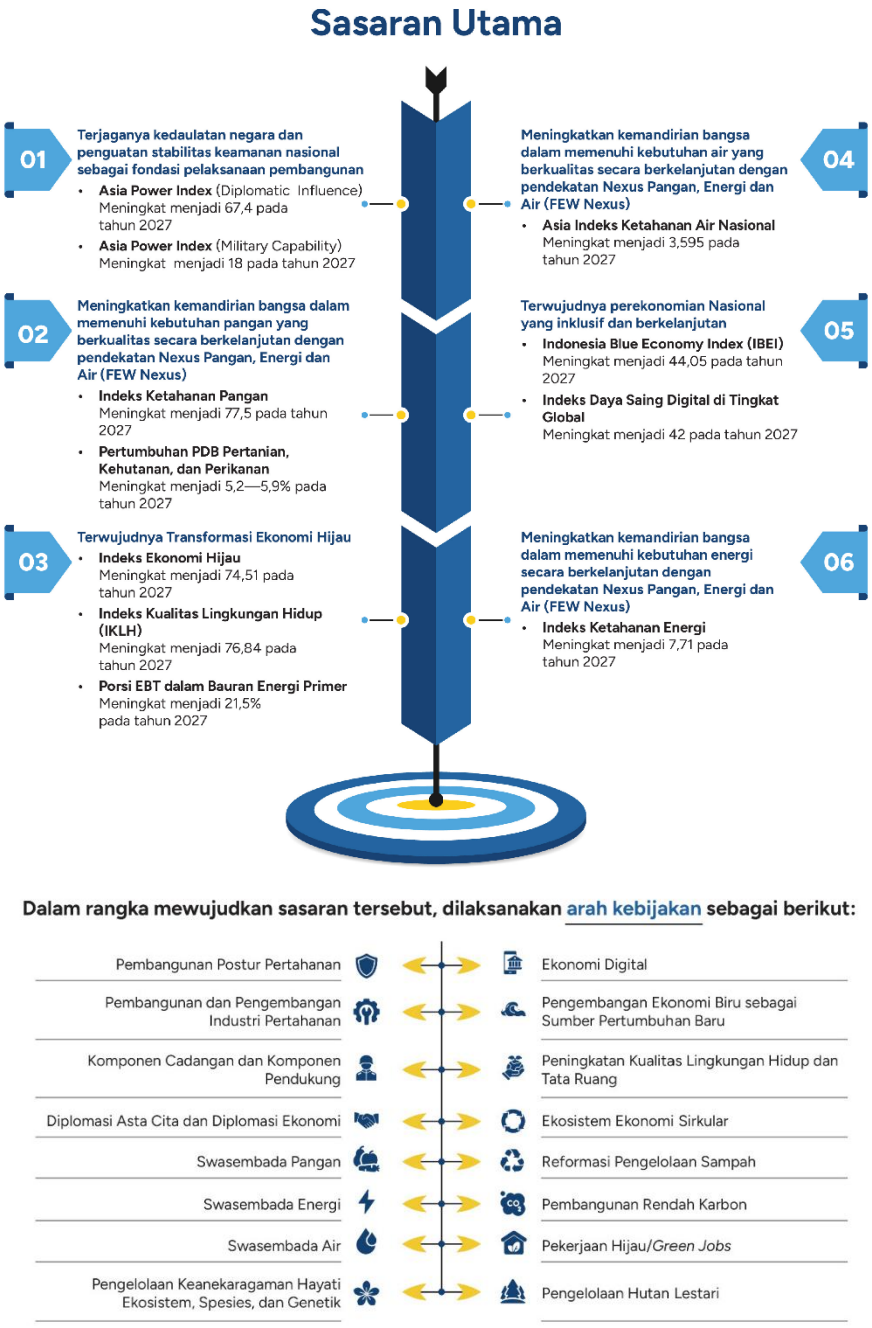
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2026

2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

   Negara yang tangguh ditandai dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjaga stabilitas serta menjamin perdamaian di dalam wilayahnya. Kemandirian bangsa menunjukkan kemampuan suatu negara untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Arah pembangunan nasional pada prioritas nasional ini menitikberatkan pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa di sejumlah sektor strategis terutama melalui peningkatan produktivitas guna mencapai swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang inklusif.

   Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2 yaitu:

Gambar 4.9 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2



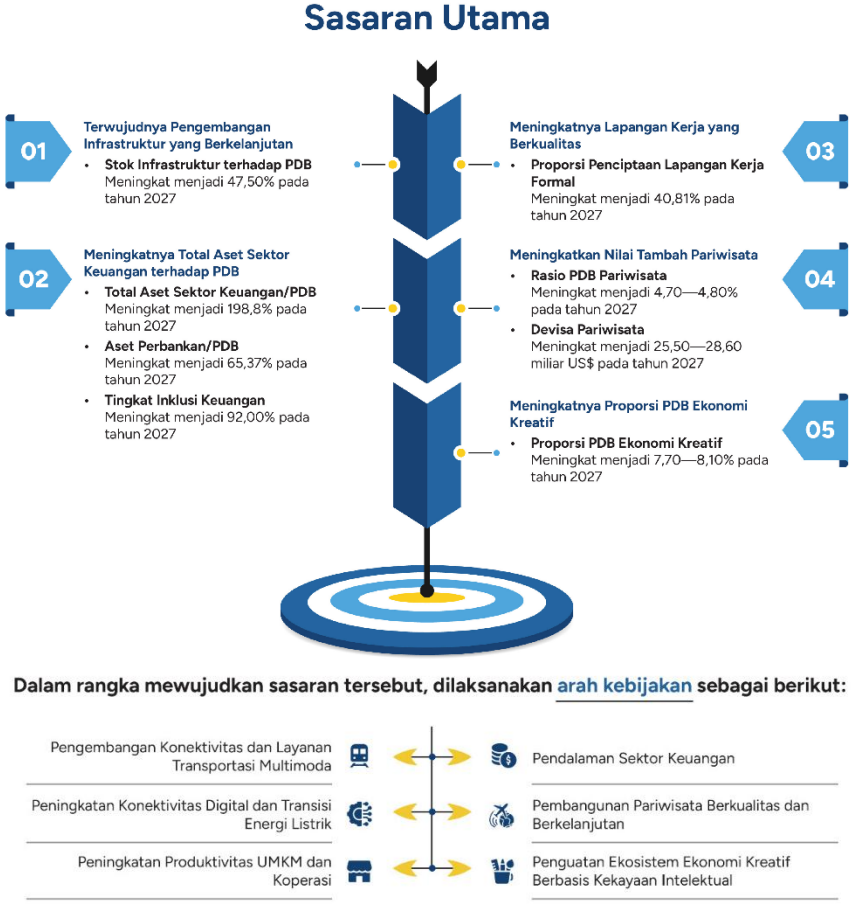
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026

3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan aset atau modal terbangun untuk menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya logistik, mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta mendukung penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan sektor keuangan serta kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan

koperasi.
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 yaitu:

Gambar 4.10 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3



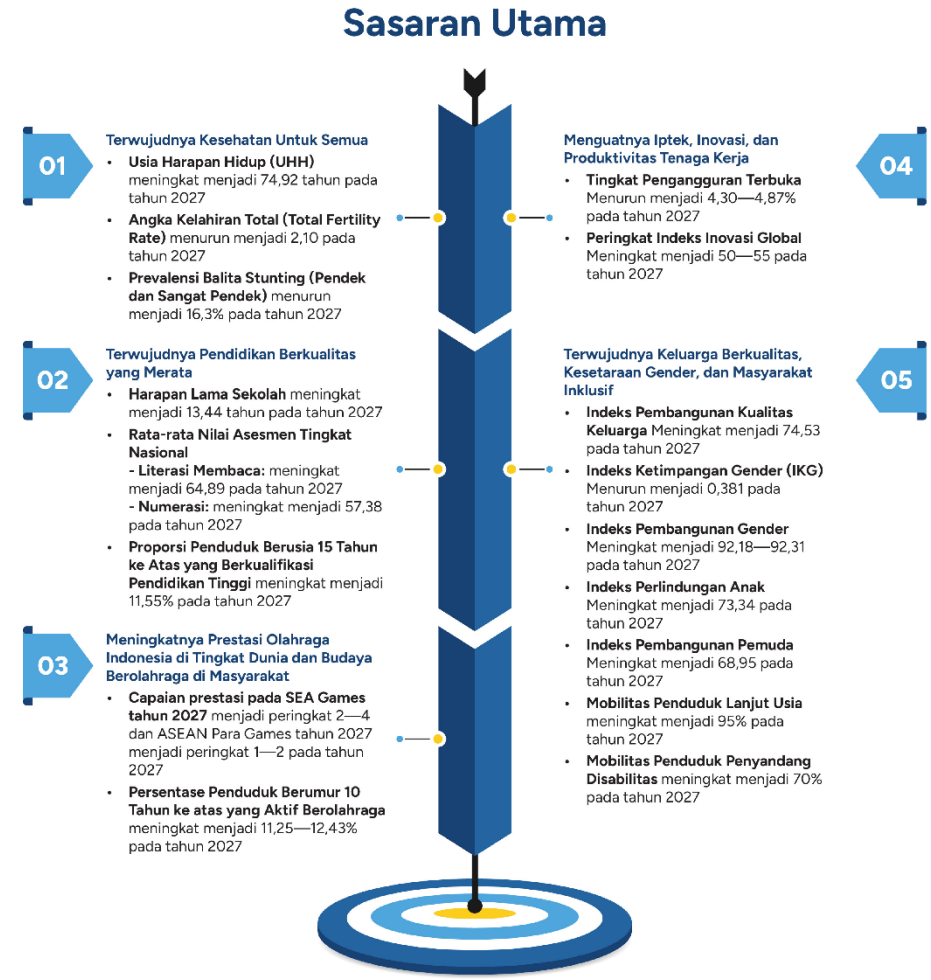
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2026

4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pembangunan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan cara memampukan manusia (human capabilities) agar dapat memanfaatkan modal sosial budaya yang dimiliki dalam memenuhi semua kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabatnya. Pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. SDM yang unggul memungkinkan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sektor strategis nasional. Oleh karena itu, literasi digital, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi terus diperkuat agar masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam industri berbasis sains dan teknologi. Dalam RKP Tahun 2027, pembangunan SDM dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan akses yang setara bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi lintas sektor dari berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, pembangunan keluarga, dan kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 yaitu:

Gambar 4.11 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4



Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2026

5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Pembangunan industri yang difokuskan pada peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Peningkatan produktivitas industri pada subsektor industri pengolahan pangan dan subsektor industri energi berbasis sumber daya terbarukan perlu didukung dengan adopsi teknologi canggih dan rendah karbon guna meningkatkan efisiensi produksi.

Selain itu, hilirisasi industri, termasuk yang berbasis sumber daya hayati, perlu diperkuat agar dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan ekosistem industri yang lebih berdaya saing. Dengan industri yang lebih efisien dan produktif, ketersediaan pangan dan energi serta produk olahan lainnya akan lebih stabil dan berkelanjutan.

Produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi yang meningkat juga akan membuka peluang ekspor yang lebih luas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tidak hanya di sektor industri pengolahan, tetapi juga pada sektor pendukung lainnya seperti jasa perdagangan, transportasi dan lainnya. Dengan demikian, pembangunan industri yang produktif dan berdaya saing, termasuk yang berbasis hilirisasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5 untuk mengawal keberhasilan pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sebagai berikut:

Gambar 4.12 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2026

6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai prioritas akan mendorong komunitas di tingkat desa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Salah satu persyaratan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah **pertumbuhan ekonomi yang inklusif**. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memperhatikan dan memberikan prioritas pada penguatan kemandirian, peningkatan kapasitas kerja dan daya saing usaha, peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan layanan dasar yang inklusif, pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan intensif, serta pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif.

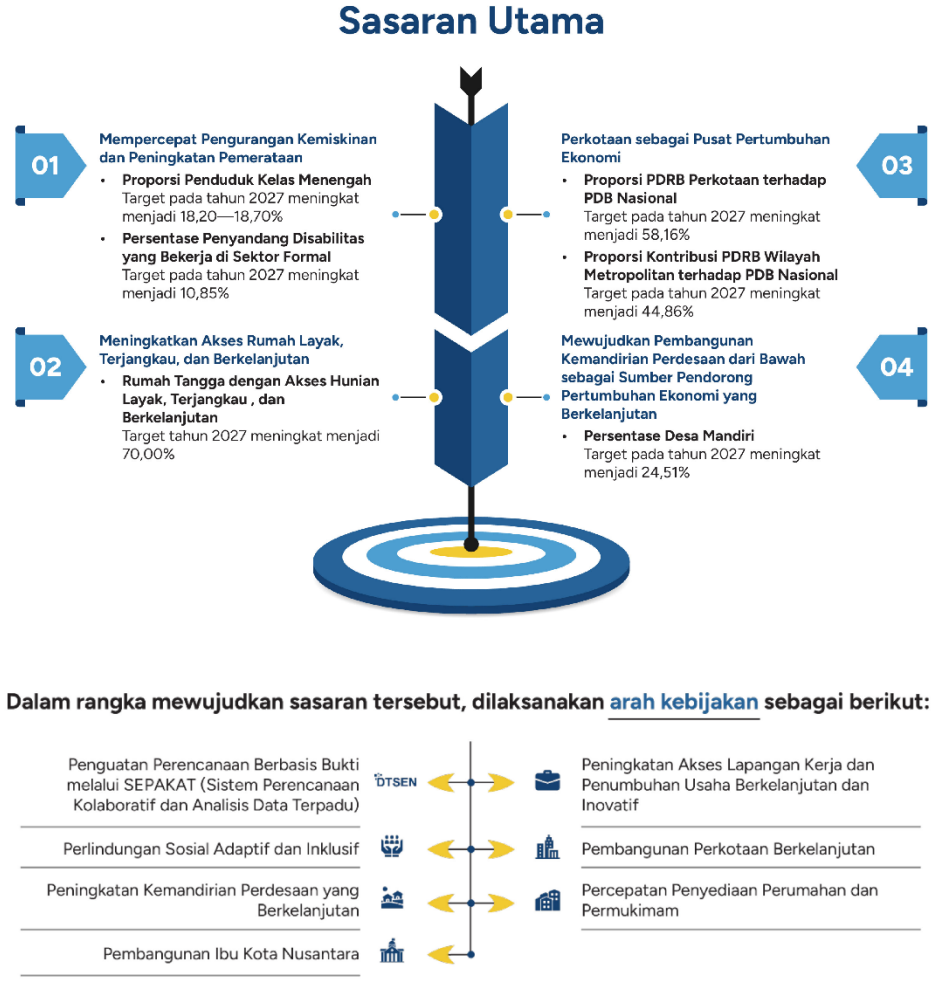
Perlindungan sosial adaptif merupakan perlindungan sosial yang menjawab dinamika ekonomi nasional maupun global, perubahan iklim, dan kerentanan terhadap bencana. Perlindungan sosial yang responsif dan inklusif dicapai melalui jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi yang terintegrasi, adaptif, dan inklusif sehingga sesuai dengan risiko, kerentanan, dan kedaruratan yang dihadapi seluruh penduduk. Perlindungan sosial termasuk didalamnya adalah rehabilitasi sosial, layanan sosial, dan perawatan yang diberikan kepada penduduk dengan kerentanan tertentu.

Pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional memungkinkan pemerintah mengidentifikasi dan menargetkan kelompok masyarakat miskin dan rentan dengan lebih akurat dan mendukung upaya digitalisasi penyaluran bantuan dan program yang transparan dan efisien.

Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi dan memperhatikan daerah tertinggal dan kawasan afirmasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6 yaitu:

Gambar 4.13 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2026

7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Deregulasi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Reformasi politik difokuskan pada penguatan sistem politik yang fungsional guna mewujudkan demokrasi yang lebih substansial, melalui perbaikan tata kelola partai politik agar lebih transparan dan profesional, serta penyempurnaan sistem pemilu untuk menjamin representasi yang adil dan berintegritas. Sementara itu, reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi bertujuan menciptakan regulasi yang adaptif, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta membangun sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif. Dengan lingkungan politik dan hukum yang stabil, sektor prioritas seperti pangan, energi dan industri dapat berkembang lebih optimal guna mendukung ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan efisiensi birokrasi dan penguatan kebijakan fiskal menjadi pilar utama dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Reformasi birokrasi diarahkan pada digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi, serta perbaikan tata kelola migrasi untuk mendukung pelindungan

Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kebijakan fiskal berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Stabilitas makroekonomi juga dijaga melalui pengendalian inflasi yang didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk mendorong swasembada pangan nasional.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

Gambar 4.14 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2026

8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Upaya untuk meningkatkan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif harus didukung oleh masyarakat yang kuat secara sosial dan budaya, serta lingkungan alam yang terjaga dan lestari. Agama dan kebudayaan berperan penting sebagai landasan moral dan basis etika

dalam pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berikhtiar menjaga kelestarian lingkungan dengan berpedoman pada nilai nilai agama dan kearifan lokal, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Etika lingkungan yang bersumber dari agama dan budaya juga menjadi panduan dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mencegah eksploitasi berlebihan, serta menguatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Selaras dengan itu, optimalisasi pemanfaatan lingkungan secara produktif dan berkelanjutan perlu terus didorong antara lain dengan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati. Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi telah terbukti mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lestari, termasuk dalam sistem pertanian berbasis ekologi, konservasi hutan, serta perlindungan ekosistem laut. Tradisi keagamaan dan budaya juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, memastikan bahwa peningkatan produktivitas tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada prinsip keberlanjutan yang menciptakan kesejahteraan jangka panjang.

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8 yaitu:

Gambar 4.15 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas 2026

4.2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan RKP Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027 : "***Akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri***

berbasis Potensi Daerah".

Tema tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2027, sebagai berikut :

1. **Penguatan ekonomi inklusif, mandiri, dan inovatif** melalui Penguatan Program Desaku Maju melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas SDM, Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah Produksi, Kemandirian Desa & Kerjasama Lembaga Ekonomi di Desa, Penanganan infrastruktur jalan, jembatan, beserta fasilitas keselamatannya dan irigasi kewenangan provinsi, Mendukung program strategis nasional 3 juta rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Memperkuat ketahanan pangan dengan harga terkendali dan sertifikasi halal, Pengembangan simpul transportasi kewenangan provinsi (terminal tipe B dan pelabuhan pengumpan regional), Penguatan Tata Kelola Perkoperasian (KDKMP) dalam bentuk Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen dan Standarisasi.

2. **Percepatan penanggulangan kemiskinan** melalui Pemanfaatan dan Pemuktahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN); Prioritas penanganan infrastruktur dan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) untuk penduduk miskin, Bantuan Pasang Baru Listrik untuk masyarakat miskin, Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Peningkatan Program Bantuan Sosial yang Responsif dan Pemberian bantuan iuran JKN bagi peserta PBI dan PBPU, Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Pelatihan Vokasi, pelatihan kewirausahaan, Bantuan Alat Usaha Ekonomi Produktif, pendampingan akses modal usaha dan bantuan pengurusan izin usaha.

3. **Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia** melalui Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun (pendidikan PAUD 1 tahun, SD, SMP dan SMA sederajat) dengan memastikan tidak ada anak yang putus sekolah untuk setiap jenjangnya (kolaborasi dengan Kab/Kota sesuai kewenangannnya) dan Penguatan literasi, Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) sebagai pengganti uang komite bagi seluruh siswa Sekolah Menengah (SMA, SMK dan SLB) di Provinsi Lampung, Pembangunan sekolah unggul Garuda dan dukungan pembangunan sekolah rakyat, Perluasan pelaksanaan Kelas Vokasi dan Perlindungan Pekerja Migran, Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan siswa/i daerah 3T, Mendorong pembangunan Sekolah Rakyat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga serta dukungan event-event olahraga nasional, dan Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

4. **Penurunan prevalensi stunting dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat** melalui peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan primer, Meningkatkan status gizi masyarakat (Dukungan MBG) dan percepatan penurunan stunting, Penguatan peran Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga, Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Meningkatkan budaya dan pola hidup sehat serta aktivitas fisik, Pemerataan tenaga kesehatan khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Peningkatan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pendampingan dan Pelayanan terhadap Pengaduan Kekerasan pada Perempuan dan Anak.

5. **Pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan bencana** melalu.Rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan sesuai kewenangan, Peningkatan luasan kawasan hijau, Pemantauan kualitas air sungai, pemantauan air laut dan pemantauan onlimo (online monitoring) di sungai-sungai besar, Pengelolaan sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3

Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan Rehabilitasi Ringan Rumah Tipe B., Pemberian bimbingan usaha peternakan melalui pengembangan teknologi pakan, pemanfaatan limbah ternak, pengelolaan kotoran menjadi energi terbarukan, dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan berbasis potensi lokal.

6. **Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas** melalui Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur digital untuk informasi publik (Lampung-In), Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Tata Kelola Data melalui Forum satu Data Provinsi Lampung, Peningkatan pengelolaan arsip statis dan dinamis, Perluasan Pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama antar Perangkat Daerah di Provinsi Lampung, Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil, Penguatan sistem pengawasan intern pemerintah daerah yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan, melalui penguatan MCSP KPK dan pendampingan pembangunan Zona Integritas, Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana, Penguatan regulasi dan Penyusunan standar Pelayanan serta pengembangan inovasi layanan dan menyediakan fasilitas publik yang ramah dan dapat diakses oleh kelompok rentan.

7. **Pemantapan ketahanan sosial budaya dan harmonisasi masyarakat** melalui Penyuluhan terhadap masyarakat, Pelaku Usaha dan Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menambah jumlah warisan budaya benda dan tak benda daerah Lampung yang bersertifikat Nasional dan pengembangan serta pelestarian warisan budaya, Penyelenggaraan event/festival seni dan budaya Lampung (LASQI), Dukungan Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah dan pengembangan desa budaya, Penguatan koordinasi lintas agama, lembaga, dan ormas, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional maka ditetapkan sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2027. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan pembahasan dengan Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kemendagri). Penetapan target indkator makro pembangunan ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga menjadi pertimbangan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027, diasumsikan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Asumsi Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,20-5,70	5,30-6,10
2.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	55,01	60,10	65,30
3.	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2,20 (2024)	2,20	2,20

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	TARGET TAHUN 2027
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,66	8,90-9,90	8,20-9,00
5.	Rasio Gini (Indeks)	0,287	0,274-0,290	0,273-0,287
6.	- Indeks Modal Manusia (Indeks) - Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	0,52 (2023) 73,98	0,55	0,56-0,57
7.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	60,64 (2024)	64,03	66,73
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73,11 (2024)	71,20	71,41
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	3,51-4,05	3,56-4,14

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2026

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2025-2029, fokus pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 ditujukan untuk ***"Akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik untuk pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan".*** Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan kondisi dan arahan serta rangkaian perencanaan yang bersifat *holistik*, *integratif*, *tematik*, dan *spasial,* prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPJMD Kabupaten Pesawaran 2025-2029 maka pada tahun 2027 Pembangunan Kabupaten Pesawaran diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan sehat dengan fasilitas yang baik dan merata.
2. Pemerataan infrastruktur untuk mewujudkan kondusifitas dalam kehidupan yang aman dan bahagia.
3. Optimalisasi SDA untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan generasi milenial.
4. Mewujudkan tata kelola pemerinahan yang transparan.
5. Mewujudkan desa yang mandiri dan masyarakat yang produktif.

Sasaran pembangunan pada tahun 2027 berdasarkan Dokumen RPJMD Pesawaran Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sasaran pembangunan tahun 2027 berdasarkan Dokumen RPJMD Pesawaran Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
1	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,36

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2027
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,39
		Prevalensi Stunting	Persen	11,37
3	Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Inflasi	Persen	1,00-3,00
		Tingkat Pengengguran Terbuka	Persen	3,51-4,05
		Tingkat Kemiskinan	Persen	10,00-9,00
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan	Kemantapan Jalan	Persen	61,28
		Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	85,52
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,10
		Indeks Resiko Bencana	Poin	162,27-166,27
6	Meningkatnya Kerukunan Hidup antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74,90
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74,90
7	Meningkatnya Hilirisasi Komoditas Unggulan	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	4.0-7.2
8	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Pertumbuhan Sektor Pertanian	Persen	1,05
		Indeks Ketahanan Pangan	Poin	83,30
9	Meningkatnya Ekonomi Daerah melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PDRB Sektor Pariwisata	Persen	7.11-8.26
10	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga serta Pemenuhan Hak Perlindungan Anak dan Perempuan	Indeks Perlindungan Anak	Poin	63,75
		Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,317
11	Terwujudnya Birokrasi Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,59
12	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	35,14

Persandingan Pencapaian Target Indikator Makro, Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung serta Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Gambaran keselarasan sasaran indikator makro antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2027	TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-6,1	5,50-6,00	5,50-6,00
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,20-9,00	9,00-10,00	9,00-10,00
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,4-3,85	3,70-4,00	3,70-4,00
4.	Rasio Gini	0,237-0,287	0,290-0,295	0,290-0,295
5.	Indeks Modal Manusia	0,56-0,57	0,56-0,57	0,56-0,57

Sumber : SIPD-RI Kemendagri, 2026

Tabel 4.5 Penyandingan Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027

TEMA PEMBANGUNAN 2027		
NASIONAL	**PROVINSI LAMPUNG**	**KABUPATEN PESAWARAN**
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri berbasis Potensi Daerah	Akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik untuk pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan

Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran Tahun 2027

ASTA CITA PRESIDEN (PRIORITAS NASIONAL)	PRIORITAS PROVINSI LAMPUNG	PRIORITAS KABUPATEN PESAWARAN
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.	Mewujudkan tata kelola pemerinahan yang transparan.
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Penguatan ekonomi inklusif, mandiri, dan inovatif.	Optimalisasi SDA untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan generasi milenial.
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan bencana.	Pemerataan infrastruktur untuk mewujudkan kondusifitas dalam kehidupan yang aman dan bahagia.
Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.	Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan sehat dengan fasilitas yang baik dan merata.
	Penurunan prevalensi stunting dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan ekonomi inklusif, mandiri, dan inovatif.	Optimalisasi SDA untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan generasi milenial.
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberatasan kemiskinan.	Percepatan penanggulangan kemiskinan.	Mewujudkan desa yang mandiri dan masyarakat yang produktif.

ASTA CITA PRESIDEN (PRIORITAS NASIONAL)	PRIORITAS PROVINSI LAMPUNG	PRIORITAS KABUPATEN PESAWARAN
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.	Mewujudkan tata kelola pemerinahan yang transparan.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan harmonisasai masyarakat.	Pemerataan infrastruktur untuk mewujudkan kondusifitas dalam kehidupan yang aman dan bahagia.

Agenda pembangunan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 terkait dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan *trigger* pertumbuhan ekonomi wilayah. Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten Pesawaran Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan sehat dengan fasilitas yang baik dan merata** dengan agenda:
   a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah yang merata.
   b. Memberikan dukungan dan kesejahteraan dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
   c. Memberikan Bantuan dan Bea Siswa bagi Siswa yang Berprestasi, Tidak Mampu dan Difabel dari Tingkat PAUD/TK, SD/MIN, SMP/MTs dan untuk melanjutkan ke SMA/SMK dan Perguruan Tinggi.
   d. Menyediakan tenaga kesehatan dan pusat layanan kesehatan yang berstandar layanan minimal.
   e. Bantuan Kepada keluarga pendamping pasien rujukan.
   f. Meningkatkan kualitas dan pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas.
   g. Memastikan bantuan dan jaminan kesehatan tepat sasaran dan tepat waktu.
   h. Melaksanakan program nasional pemberian makanan gratis untuk peningkatan gizi masyarakat dan penanggulangan stunting secara tepat sasaran dan tepat waktu.
2. **Pemerataan infrastruktur untuk mewujudkan kondusifitas dalam kehidupan yang aman dan bahagia** dengan agenda:
   a. Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.
   b. Mewujudkan keadilan pembangunan Prasarana dan Sarana Wilayah dan Infrastruktur Jalanyang berkualitas dan Berkelanjutan.
   c. Memelihara Prasarana dan Sarana Wilayah dan Infrastruktur jalan .
   d. Pemerataan pembangunan Informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
   e. Mewujudkan Desa Tangguh Bencana.
   f. Peningkatan capaian akses layak air minum dan akses sanitasi layak serta pengurangan Kawasan kumuh.
   g. Menyalurkan program bantuan kepada masyarakat miskin secara tepat waktu dan tepat sasaran, dan memantau kondisi masyarakat yang membutuhkan dan melakukan mitigasi sesuai kebutuhan.
   h. Sinergitas TNI, Polri, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, dengan Pemerintah Daerah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
3. **Optimalisasi SDA untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berabasis kearifan lokal dan pemberdayaan generasi milenial** dengan agenda:
   a. Pemberian bantuan sarana dan prasarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
   b. Menciptakan Pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan.

c. Memberikan akses dan meningkatkan peran perempuan dan generasi milenial di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.
d. Mendorong Perempuan dan Generasi Milineal menjadi Pelaku Usaha dan Agen Perubahan di Desa.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dengan agenda:
a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, dan Akuntabel.
b. Memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan.
c. Mewujudkan pengelolaan APBD secara tertib, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur

5. Mewujudkan desa yang mandiri dan masyarakat yang produktif dengan agenda:
a. Penguatan BUMDes.
b. Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kesejahteraan Aparatur Desa.
c. Penguatan pembangunan.

Tabel 4.7 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2027

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Penguatan Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengarusutamaan, Pemajuan dan Penegakkan HAM	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pembangunan Industri Pertahanan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Komponen Cadangan dan Pendukung	-	-
		Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Keamanan Siber, Sandi dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Keamanan Laut dan Hidro-Oseanologi	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Keamanan dan Keteriban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	-	-

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	-	-
		Swasembada Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
			Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Swasembada Energi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Swasembada Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Ekonomi Syariah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Ekosisem Ekonomi Sirkular	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies dan Genetik	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Pembangunan Renda Karbon	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Pekerjaan Hijau/ Green Jobs	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Hutan Lestari	-	
		Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Argo Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Bekelajutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan,	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art and Mathematic* (STEAM)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Penelitian Pengembangan Daerah
		Pengembangan Manajeman Talenta Nasional (MTN)	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA serta Pengendalian Penduduk dan KB
		Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Ketangguhan Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA serta Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		]Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA serta Pengendalian Penduduk dan KB

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA serta Pengendalian Penduduk dan KB
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA serta Pengendalian Penduduk dan KB
		Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Peningkatan Perdagangan, Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Optimalisasi Investasi Strategis Negara	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan	Sistem Pendapatan Sosial Ekonomi Terintegrasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	Pemberantasan Kemiskinan		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Hubungan Industrial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-	-
		Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Memperkuat Reformasi Publik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidkan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Penguatan Kelembagaan Pelayanan dan Penegakan Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Transformasi Sistem Penuntutan dan Advokat General	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		Pemerintah Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Peningkatan Produktivitas BUMN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Optimalisasi Belanja Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pengendalian Inflasi	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Sosial
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk	Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
	Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : SIPD-RI, Kabupaten Pesawaran 2026

Tabel 4.8 Keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2027

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	Dukungan Terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA, serta Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Perkebunan dan Peternakan
4	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Pehubungan
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
6	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan di Desa	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber : SIPD-RI, Kabupaten Pesawaran 2026

4.2.4 Program Prioritas Kabupaten Pesawaran Tahun 2027

Program Prioritas Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 dirancang sebagai bagian integral dari upaya pembangunan jangka menengah daerah yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan global, nasional, dan regional. Pelaksanaan Program prioritas ini bertujuan untuk menciptakan akselerasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pendekatan terintegrasi yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menempatkan visi pembangunan daerah sebagai landasan dalam menyusun prioritas program, yakni "***Mewujudkan Pesawaran CAKEP yang Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045***".

Seluruh program prioritas Kabupaten Pesawaran tahun 2027 dirancang dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Sistem informasi berbasis elektronik akan diperluas dalam berbagai sektor layanan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, serta layanan pendidikan dan kesehatan, guna meningkatkan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pendekatan holistik dan partisipatif ini, Program Prioritas Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta kelestarian lingkungan. Sinergi antarpemangku kepentingan, komitmen politik yang kuat, serta dukungan masyarakat menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi program-program strategis ini dalam mendorong Pesawaran menuju masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing tinggi.

4.2.4.1 Program Prioritas Daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program prioritas daerah Kabupaten Pesawaran dilaksanakan untuk mewujudkan 8 (delapan) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran pada RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9 Program Prioritas Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2027

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
PD-1. Optimalisasi sektor pendidikan dan kesehatan demi terwujudnya generasi yang unggul dan sehat dengan fasilitas yang baik dan merata	S-1. Meningkatnya kualitas daya saing pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Dinas pendidikan dan kebudayaan
		Program pengendalian perizinan pendidikan	Dinas pendidikan dan kebudayaan
		Program pembinaan perpustakaan	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	S-2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas kesehatan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas kesehatan
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinas kesehatan
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas kesehatan
		Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Dinas PPPA & PPKB
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Dinas PPPA & PPKB
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas kepemudaan dan olahraga
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas kepemudaan dan olahraga
PD-2. Terciptanya kondusifitas dalam kehidupan untukterwujudnya rasa aman dan bahagia masyarakat bumiandan jejama	S-3. Meningkatnya kesejahteraan dan kestabilan daya beli masyarakat	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas perindustrian dan perdagangan
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas perindustrian dan perdagangan
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Dinas perindustrian dan perdagangan
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas perindustrian dan perdagangan
		Program penanganan kerawanan pangan	Dinas ketahanan pangan
		Program pemberdayaan sosial	Dinas sosial
		Program rehabilitasi sosial	Dinas sosial
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas sosial
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
		Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas PMPTSP
		Program perekonomian dan pembangunan	Sekretariat daerah
		Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Dinas perindustrian dan perdagangan
		Program penempatan tenaga kerja	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Program hubungan industrial	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Dinas PMPTSP
	S-4. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan	Program penyelenggaraan jalan	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program pengelolaan sumber daya air	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program penataan bangunan gedung	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program kawasan permukiman	Dinas PRKP
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas PRKP
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas PRKP
		Program pengembangan jasa konstruksi	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
		Program pengembangan perumahan	Dinas PRKP
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Dinas perhubungan
		Program pengelolaan pelayaran	Dinas perhubungan
	S-5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas pertanahan dan lingkungan hidup
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Dinas pertanahan dan lingkungan hidup
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan	Dinas pertanahan dan lingkungan hidup

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	
		Program penanggulangan bencana	Badan penanggulangan bencana daerah
		Program penanggulangan bencana	Badan penanggulangan bencana daerah
		Program penanggulangan bencana	Badan penanggulangan bencana daerah
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
		Program penanganan bencana	Dinas sosial
		Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas pertanahan dan lingkungan hidup
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Dinas pertanahan dan lingkungan hidup
		Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Dinas pertanahan dan lingkungan hidup
		Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah asentee	Dinas pertanahan dan lingkungan hidup
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan kesatuan bangsa dan politik
	S-6. Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama	Program pengembangan kebudayaan	Dinas pendidikan dan kebudayaan
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas pendidikan dan kebudayaan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Dinas perpustakaan dan kearsipan
		Program pengembangan kesenian tradisional	Dinas pendidikan dan kebudayaan
		Program pengelolaan arsip	Dinas perpustakaan dan kearsipan
		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Badan kesatuan bangsa dan politik
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Badan kesatuan bangsa dan politik
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan kesatuan bangsa dan politik
		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat daerah
PD-3. Pemanfaatan sumber daya alam berbasis kearifan lokalserta pemberdayaan generasi milenial untukkesejahteraan masyarakat	S-7. Meningkatnya hilirisasi komoditas unggulan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas perindustrian dan perdagangan
		Program pengendalian izin usaha industri	Dinas perindustrian dan perdagangan
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Dinas kelautan
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas kelautan
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas kelautan
		Program pengendalian izin usaha industri	Dinas perindustrian dan perdagangan
	S-8. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian pendukung lumbung pangan nasional	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Dinas tanaman pangan dan hortikultura; Dinas peternakan dan perkebunan
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Dinas tanaman pangan dan hortikultura; Dinas peternakan dan perkebunan
		Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas ketahanan pangan

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas ketahanan pangan
		Program penyuluhan pertanian	Dinas tanaman pangan dan hortikultura; Dinas peternakan dan perkebunan
		Program pengawasan keamanan pangan	Dinas ketahanan pangan
	S-9. Meningkatnya ekonomi daerah melalui pariwisata dan ekonomi kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas pariwisata
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Dinas koperasi, UMKM dan tenaga kerja
		Program pengembangan umkm	Dinas koperasi, UMKM dan tenaga kerja
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas pariwisata
		Program pemasaran pariwisata	Dinas pariwisata
		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Dinas pariwisata
	S-10. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga sertapemenuhan hak perlindungan anak dan perempuan	Program perlindungan khusus anak	Dinas PPPA & PPKB
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Dinas PPPA & PPKB
		Program peningkatan kualitas keluarga	Dinas PPPA & PPKB
		Program pemenuhan hak anak (PHA)	Dinas PPPA & PPKB
		Program perlindungan perempuan	Dinas PPPA & PPKB
PD-4. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat,dan transparan	S-11. Terwujudnya birokrasi berintegritas	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Bappeda
		Program pengelolaan keuangan daerah	BPKAD
		Program pengelolaan barang milik daerah	BPKAD
		Program pengelolaan pendapatan daerah	Bapenda

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Program kepegawaian daerah	BKPSDM
		Program pengembangan sumber daya manusia	BKPSDM
		Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
		Program pendaftaran penduduk	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
		Program pencatatan sipil	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
		Program penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas kominfotiksan
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Seluruh perangkat daerah
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
		Program penelitian dan pengembangan daerah	Balitbangda
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas kominfotiksan
		Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas kominfotiksan
		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas kominfotiksan
PD-5. Mewujudkan masyarakat yang produktif untuk kesejahteraan dan kemandirian desa	S-12. Terwujudnya ekosistem ekonomiberbasis desa	Program penataan desa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
		Program administrasi pemerintahan desa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		masyarakat hukum adat	
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Dinas koperasi, UMKM dan tenaga kerja
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Dinas koperasi, UMKM dan tenaga kerja
		Program pembangunan kawasan transmigrasi	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
		Program pengembangan kawasan transmigrasi	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Sumber : SIPD-RI, Kabupaten Pesawaran, 2026

Tabel 4.10 Gambaran konsistensi program antara RPJMD dan RKPD tahun 2027

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH PROGRAM/ OUTCOME YANG KONSISTEN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	2	2
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	4	3	3
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	9	9
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	4	4
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2	2	2
6		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1
7	Sosial	Dinas Sosial	4	4	4
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	5	5
9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	3	3
10	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	4	4	4
11	Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	3	3	3
12	Lingkungan Hidup		7	7	7
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	3
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	3
15	Transmigrasi		2	2	2
16	Perhubungan	Dinas Perhubungan	2	2	2
17	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2	2	2
18	Statistik		1	1	1
19	Persandian		1	1	1
20	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	3	3	3
21	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		5	4	4
22	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3	3
23	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2	2	2
24	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	3	3
25	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2	2
26	Kearsipan		1	1	1
27	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	4	4	4

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH PROGRAM/ OUTCOME YANG KONSISTEN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
28	Pariwisata	Dinas Pariwisata	4	4	4
29	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Peternakan	5	5	5
30	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	6	6
31	Perindustrian		2	2	2
32	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2	2	2
33	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	1	1	1
34	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	2
35	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah	3	3	3
36	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	1
37	Pendidikan dan Pelatihan		1	1	1
38	Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	1	1
39	Inspektorat Daerah	Inspektorat	2	2	2
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	4
41	Kecamatan	Kecamatan	2	2	2
42	Urusan Pemerintahan Bidang XX (Program Penunjang)	Seluruh Perangkat Daerah	1	1	1
JUMLAH			**122**	**120**	**120**

Sumber : SIPD-RI Kemendagri, Kabupaten Pesawaran, 2026

Tabel 4.11 Keselarasan Outcome Prioritas Mendukung Asta Cita pada RKPD Tahun 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
1	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0010 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	40 Orang	50 Orang	50 Orang
2	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0013 - Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	0 Laporan	0 Lembaga	0 Lembaga

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
3	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0016 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	40 Orang	50 Orang	50 Orang
4	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0015 - Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
7	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	75 Orang	30 Orang
8	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	75 Orang	30 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							
9	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen
10	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		yang adil dan makmur.							
11	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	0 Objek	2 Objek	2 Objek
12	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	0 Objek	2 Objek	2 Objek

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
13	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	0 Objek	3 Objek	2 Objek
14	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	0 Objek	3 Objek	2 Objek
23	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian	2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kencana yang Berkualitas	KELUARGA BERENCANA (KB)	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Hamil dan Ibu Pasca Persalinan			
24	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0033 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
25	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memperkuat pembangunan	Terwujudnya Penyelenggaraa	2.14.04 - PROGRAM	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan	2.14.04.2.01.0033 - Pengelolaan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n Program Bangga Kencana yang Berkualitas	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)			
26	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Penyelenggaraa n Program Bangga Kencana yang Berkualitas	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	0 Laporan	0 Laporan	0 laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
27	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0020 - Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	120 Orang	120 Orang
28	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0006 - Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	2 Organisasi	2 Organisasi

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		penyandang disabilitas.							
29	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0011 - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0 Orang	300 Orang	300 Orang
30	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0013 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	0 Orang	60 Orang	60 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
37	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan	22 Perpustakaan	22 Perpustakaan
38	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan	22 Perpustakaan	22 Perpustakaan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		penyandang disabilitas.							
39	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	10 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan
40	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	10 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
41	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	20 Orang	20 Orang	20 Orang
42	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	20 Orang	20 Orang	20 Orang
43	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan	1 Eksemplar	1 Eksemplar	2 Eksemplar

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Literasi Masyarakat	KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
44	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	1 Eksemplar	2 Eksemplar
45	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	5 Lembaga	20 Lembaga	5 Lembaga

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Kabupaten/Kota	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
46	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	20 Lembaga	5 Lembaga
47	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	0	0 Orang	0 Orang
48	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di	0	0 Orang	0 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi			
49	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	200 Orang	500 Orang	100 Orang
50	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	200 Orang	500 Orang	100 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
51	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	500 Usulan	300 Usulan	600 Usulan
52	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	500 Usulan	300 Usulan	600 Usulan
53	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangka	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis	42 Laporan	15 Laporan	42 Laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	n Memori Kolektif Bangsa		Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota			
54	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna	6 Pengguna	1 Pengguna
59	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	0	0 Unit	0 Unit

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
60	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	0	1 Unit	0 Unit
61	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	100 item	1 Paket	8 Paket

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Kabupaten/Kota				
62	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0005 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	12 Bulan	514 Orang	330 Orang
63	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban	4 Laporan	2 Laporan	12 Laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kependudukan berbasis digital			Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
64	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
65	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan	12 Laporan	2 laporan	12 Laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemanfaatan data kependudukan berbasis digital			Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			
66	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
93	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi,	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman	1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks	0	0 Dokumen	12 Dokumen

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT	hak asasi manusia (HAM).	pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	DAN KETERTIBAN UMUM	dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota			
94	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	0	0 Dokumen	12 Dokumen
95	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
96	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan	Terwujudnya manajemen bencana yang	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			
97	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0 Laporan	12 Laporan
98	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0 Laporan	12 Laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		masyarakat yang adil dan makmur.							
99	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
100	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen
113	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	200 Orang	100 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
114	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100 Orang	20 Orang	20 Orang
115	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	80 Orang	130 Orang	130 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Bidang Pendidikan						
116	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	2 Paket	2 Paket	2 Paket
134	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,	100 Orang	1450 Orang	1450 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		hak asasi manusia (HAM).	demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
135	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	1450 Orang	1450 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
					Pemantauan Situasi Politik				
136	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	1450 Orang	1450 Orang
137	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	0	90 Orang	90 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
			kewaspadaan nasional		Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
138	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	90 Orang	90 Orang
139	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	0	90 Orang	90 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
140	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	177 Orang	176 Orang	176 Orang
141	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan,	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	177 Orang	176 Orang	176 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
			ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
142	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	177 Orang	176 Orang	176 Orang
143	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	200 Orang	200 Orang
144	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat penyelarasan	Meningkatnya kualitas	8.01.06 - PROGRAM	8.01.06.2.01 - Perumusan	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan	0	200 Orang	200 Orang

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
145	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	200 Orang	200 Orang
170	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	Ada di sub kegiatan yg mendukung : Pembinaan dan pemberdayaan bimdesa dan lembaga kerjasama antar desa (Target 148 Bumdes)	sub kegiatan tidak ada

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							
171	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0	Ada di sub kegiatan yg mendukung : Pembinaan dan pemberdayaan bimdesa dan lembaga kerjasama antar desa (Target 148 Bumdes)	sub kegiatan tidak ada
172	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.3.01.0004 - Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	0	Ada di sub kegiatan yg mendukung : Pembinaan dan pemberdayaan bimdesa dan lembaga kerjasama antar desa (Target 148 Bumdes)	sub kegiatna tidak ada
173	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2.13.03.3.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.3.01.0004 - Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan	0	Ada di sub kegiatan yg mendukung : Pembinaan dan pemberdayaan bimdesa dan lembaga	sub kegiatan tidak ada

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemerintahan Desa			pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota		kerjasama antar desa (Target 148 Bumdes)	
174	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	296 Orang	100 orang	100 Orang
175	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	296 Orang	100 orang	100 Orang
176	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	PEMERINTAHAN DESA	n Administrasi Pemerintahan Desa				
177	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
178	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		dan penyandang disabilitas.							
179	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan
180	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			
181	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006 Fasilitas Terkait Pencattan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
182	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai		0 Km	0 Km
183	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada	Pembangunan Tanggul Sungai		0 Km	0 Km

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Andal Dan Berkelanjutan		Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
184	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		1 Dokumen	1 Dokumen
185	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		100 SR	100 SR
186	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan		0 Orang	0 Orang
187	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1 Unit	0 Unit

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			Kabupaten/Kota				
188	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		0 Unit	4 Unit
189	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		1 Dokumen	1 Dokumen
190	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		1,5 Km	1,5 Km
191	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		3,5 Km	3,5 Km

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.							
192	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		0 Lembaga	4 Lembaga
193	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen	0 Dokumen
194	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		50 unit rumah	50 unit rumah
195	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas		12 unit rumah	12 unit rumah

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		pemberantasan kemiskinan				di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
196	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		1 Lokasi	1 Lokasi
197	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		40 Lokasi	40 Lokasi
198	LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		2 Lokasi	2 Lokasi
199	LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah		1 Dokumen	1 Dokumen

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
200	LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		40 Dokumen	40 Dokumen
201	LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan		60 Badan Usaha	60 Badan Usaha

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
						dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
202	PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen
203	PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		19 Unit	19 Unit

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		melalui peran aktif koperasi.	melalui peran aktif koperasi.						
204	PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		0 Unit	0 Unit
205	PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		0 Unit	0 Unit

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		melalui peran aktif koperasi.	melalui peran aktif koperasi.						
206	PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		0 Unit	0 Unit
207	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik		180.000 orang	180.000 orang
208	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		1 Dokumen	1 Dokumen
209	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi	Memperkokoh ideologi	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan E-government di	Penyediaan Akses Internet		56 Titik	56 Titik

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	APLIKASI INFORMATIKA	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi		1 Layanan	1 Layanan
211	STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral		100%	100%
212	STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional		100%	100%
213	PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan	Menguatnya keamanan siber dan sandi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	Penyelenggaraan Persandian untuk	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan		1 Dokumen	1 Dokumen

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	lingkungan Pemerintah Daerah	UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			
214	PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Laporan	1 Laporan
215	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya produksi pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	2 laporan	1 Laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
216	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya produksi pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	0 Ton	36 Ton	36 Ton
217	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya produksi pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
218	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi	Meningkatnya produksi pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru							
219	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya Ketahanan Pangan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	150 keluarga	150 Keluarga
220	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya Ketahanan Pangan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	1 laporan
221	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Meningkatnya Ketahanan Pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru				(satu) Daerah Kabupaten/Kota			
222	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru	Meningkatnya Ketahanan Pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kot a	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
223	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	0 Unit	1 Unit	1 Unit
224	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Terwujudnya Tata Kelola kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru				Pembudidayaan Ikan di Darat			
225	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	10 pelaku usaha	10 Pelaku Usaha
226	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air ekonomi kreatif, eko nomi hijau dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	10 pelaku usaha	10 Pelaku Usaha
227	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan	3.26.03 - PROGRAM	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran	0 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PEMASARAN PARIWISATA	Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
228	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Promosi	1 promosi	1 promosi
229	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona	3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi	0 unit	3 unit	3 unit

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota 58 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	Prasarana Kota Kreatif			
230	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi	3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	0 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
231	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangka	Meningkatnya Perdagangan melalui	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang	0 Laporan	12 Laporan	12 laporan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		n industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
232	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha
233	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Meningkatnya Produktivitas	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40 Unit Usaha	148 unit usaha	148 unit usaha

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
234	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Meningkatnya Produktivitas	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0018 - Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	0 Orang	150 orang	150 orang
235	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Meningkatnya Produktivitas	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0023 - Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	0 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
236	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	0 Kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha
237	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0007 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	0 Kegiatan usaha	4 kegiatan usaha	4 kegiatan usaha
238	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
239	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyaraka	4 Dokumen	5 Dokumen	5 dokumen

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
240	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	0 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen
241	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0009 - Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	100 Orang	14 orang	14 orang
242	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0009 - Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
243	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	0 Perusahaan	15 perusahaan	15 perusahaan
244	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	0 Perusahaan	15 perusahaan	15 perusahaan

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	CAPAIAN (TARGET TAHUN SEBELUMNYA)	TARGET SUBKEGIATAN HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD TAHUN 2027
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	9	10
		penyandang disabilitas.							
245	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang	630 orang	630 orang
246	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang	630 orang	630 orang

Sumber : SIPD-RI Kemendagri, Kabupaten Pesawaran, 2026

Tabel 4.12 Keselarasan Pro-SN/Tematik Pembangunan Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1.	DIGITALISASI PEMBELAJARAN								
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran							
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	240	100.00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	0	50.00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	Orang	100	175.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Bidang Pendidikan	Pendidikan yang dilaksanakan			
2.	EKONOMI SYARIAH								
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	5 laporan	0.00
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	20 pelaku usaha	20.00
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	1 dokumen	1.00
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Unit Usaha	50 unit usaha	50.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33 orang	33.00
3.	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN								
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)							
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0	0.00
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0	0.00
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	2	1.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0.4	1.00
4.	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)								
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional							
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	50	600.00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.00
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	1.00
5.	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH								
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih							
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan	Unit	5	6.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
			KELAUTAN DAN PERIKANAN		Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Usaha Nelayan Skala Kecil			
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	2	0.00
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	200.00
6.	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH								
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih							
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	148	148.00
7.	MAKAN BERGIZI GRATIS								
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis							
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan	Dokumen	1	1.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	200	100.00
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1.00
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan	Unit Usaha		20.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			
8.	MASYARAKAT ADAT								
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	0.00
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	0.00
9.	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)								

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)							
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	1.00
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	10	10.00
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1	1.00
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	unit	0	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
10.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM								
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan							
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	33.00
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100.00
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan	Orang	0	730.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
					bagi Pekerja Rentan Miskin	Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota			
11.	PANGAN AKUATIK								
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik							
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	1	
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	1.00
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	6	6.00
12.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA								
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota							

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	0.00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	514	330.00
13.	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH								
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah							
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	12	12.00
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	60	60.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	3	3.00
14.	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS								
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis							
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	1	1.00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	1	1.00
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
			PENCATATAN SIPIL						
15.	PENANGGULANGAN BENCANA								
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1.00
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	15	
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	0	
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
16.	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING								
	Kesehatan untuk Semua	Stunting							
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	100	150.00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	50	0.00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1.00
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	0	0.10
			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	laporan	0	

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
					Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
17.	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN								
	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian							
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	Unit	11	11.00
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	Unit	11	11.00
18.	PENGARUSUTAMAAN GENDER								
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	110	110.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1.00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	20	175.00
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	50.00
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Lembaga	0	
19.	PENGENDALIAN INFLASI								
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi							
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan	laporan	1	1.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
					Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00
			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	12.00
20.	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)								
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC							
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	8365	8365.00
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	220	100.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1.00
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1550	1550.00
21.	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH								
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah							
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1.00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Dokumen	1	1.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
					Layanan di Bidang Pendidikan	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1.00
22.	PERLINDUNGAN ANAK								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	60.00
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	40	40.00

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1.00
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	2.00
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	60.00
23.	SEKOLAH RAKYAT								
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat							
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	40	600.00
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	40	40.00

Tabel 4.13 Daftar Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

KODE	RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A1	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (A2) *Cakupan Regional: Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Tanggamus, Kota Metro*	Preservasi jalan ruas Bandar Lampung Gedong Tataan Pringsewu Kota Agung dan Bandar Lampung Metro Sukadana;	Ruas Jalan Branti - Gedong Tataan, Desa Pejambon, Kecamatan Negeri Katon	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** • Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	
		A1 Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (A2) *Cakupan Regional: Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Tanggamus, Kota Metro* Preservasi jalan ruas Bandar Lampung Gedong Tataan Pringsewu Kota Agung dan Bandar Lampung Metro Sukadana;	Ruas Jalan Lempasing - Padang Cermin, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** • Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	
		A1 Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (A2) *Cakupan Regional: Kota Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Tanggamus, Kota Metro* Preservasi jalan ruas Bandar Lampung Gedong Tataan Pringsewu Kota Agung dan Bandar Lampung Metro Sukadana;	Ruas Jalan Bandar Lampung - Padang Cermin, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** • Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan: Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan Fasilitas Penerangan Jalan	
B2	Kawasan Komoditas Unggulan Perkebunan Lampung	Kawasan Aneka Cabai pada Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; Kawasan Kelapa pada Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, dan Kab. Pesisir Barat; Prasarana	Dusun Muntilan, Desa Margo Rejo, Kec. Tegineneng; Desa Tanjung Rejo , Kec. Negeri Katon	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** • Kegiatan: Pengembangan Prasarana Pertanian • Sub Kegiatan: Kawasan Pertanian	

KODE	RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengolahan Tanaman Perkebunan pada Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, dan Kab. Pringsewu;			
C2	Seputih Sekampung: Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus	Kawasan Swasembada Pangan dan Air; Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; Sarana Pakan/Bahan Pakan pada Kab. Pesawaran;	Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** • Kegiatan: Pengelolaan Sarana Pertanian • Sub Kegiatan: Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian / Pasca Panen	
		C2 Seputih Sekampung: Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus Kawasan Swasembada Pangan dan Air; Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; Sarana Pakan/Bahan Pakan pada Kab. Pesawaran;	Jalan Raya Kedondong, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** • Kegiatan: Pengelolaan Sarana Pertanian • Sub Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Sarana Produksi Pertanian	
		C2 Seputih Sekampung: Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus Kawasan Swasembada Pangan dan Air; Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; Sarana Pakan/Bahan Pakan pada Kab. Pesawaran;	Sungai Way Sukajaya Pidada, Desa Sukajaya Pidada, Kecamatan Punduh Pidada	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** • Kegiatan: Perbaikan Sungai, Danau, Embung dan Struktur Pengendalian Banjir • Sub Kegiatan: Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Sungai Way Sukajaya Pidada	
		C2	Sungai Way Lipang, Desa	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	

KODE	RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Seputih Sekampung: Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus Kawasan Swasembada Pangan dan Air; Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; Sarana Pakan/Bahan Pakan pada Kab. Pesawaran;	Gunung Sari dan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Way Khilau	• Kegiatan: Perbaikan Sungai, Danau, Embung dan Struktur Pengendalian Banjir • Sub Kegiatan: Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Sungai Way Lipang	
		C2 Seputih Sekampung: Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus Kawasan Swasembada Pangan dan Air; Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; Sarana Pakan/Bahan Pakan pada Kab. Pesawaran;	Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** • Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Relatif Miskin • Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
		C2 Seputih Sekampung: Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus Kawasan Swasembada Pangan dan Air; Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; Sarana Pakan/Bahan Pakan pada Kab. Pesawaran;	Seluruh PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN** • Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat • Sub Kegiatan: Edukasi, Intervensi, dan Penurunan Angka Stunting Kewilayahan	

KODE	RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		C2 Seputih Sekampung: Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pringsewu, Kab. Pesawaran, Kab. Tanggamus Kawasan Swasembada Pangan dan Air; Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; Sarana Pakan/Bahan Pakan pada Kab. Pesawaran;	Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** • Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh • Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Kawasan Permukiman)	

Sumber : SIPD-RI Kemendagri, Kabupaten Pesawaran, 2026

4.3 SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN PESAWARAN

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada tahun 2027 Kabupaten Pesawaran tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan). Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan Mutu pelayanan dasara adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

1. Bidang Pendidikan

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan anak usia dini; usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;

b. Pendidikan dasar; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
c. Pendidikan kesetaraan; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

2. Bidang Kesehatan

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2027 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (Malaria, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah Kabupaten Pesawaran terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. pelayanan kesehatan balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2027 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik,

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten Pesawaran terdiri atas :
a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran terdiri atas :
a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Pesawaran; dan
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dengan ketentuan :
a. korban bencana Kabupaten Pesawaran yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Pesawaran; dan
b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, innformasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah Kabupaten Pesawaran terdiri atas:
a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. pelayanan informasi rawan bencana;
c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dengan ketentuan:
a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran dan peraturan kepala Daerah Kabupaten Pesawaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana,
c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. Bidang Sosial

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2027 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah Kabupaten Pesawaran terdiri atas :
a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Pesawaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
c. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
f. Korban bencana Kabupaten Pesawaran untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Pesawaran.

Tabel 4.14 Program Pembangunan Daerah pendukung SPM Tahun 2027

No	Bidang	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Pendidikan	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Sosial	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
4	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	• Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum • Program Penanggulangan Bencana • Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		• Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
		• Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sumber : SIPD-RI, Kabupaten Pesawaran, 2026

4.4 POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN PESAWARAN

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesawaran memiliki peran yang sangat penting dan strategis dari sisi muatan substansi materi yang disampaikan kepada Bupati Pesawaran. Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesawaran, diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesawaran yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesawaran, baik dari unsur Komisi A dan Komisi B maupun Bapemperda dalam forum FGD, dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/ akademisi, serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain hasil reses/serap aspirasi masyarakat dan laporan hasil kunjungan kerja serta lain-lain.
Pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPJMD menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Pesawaran, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Pesawaran dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya.

Setelah RKPD dapat disepakati melalui Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Pesawaran, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, berkesinambungan dan berjenjang, yang berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesawaran harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyelarasannya saja.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pesawaran tahun 2027 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Pesawaran, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di daerah pemilihan yang meliputi 11 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Pesawaran lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2027, KUA-PPAS dan APBD tahun 2027.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakatberdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2027. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027.

Berikut disajikan dalam tabel gambaran kesesuaian pokok pikiran DPRD dengan sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten Pesawaran.

Tabel 4.15 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1	Rehab Ruang Kelas	Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Rehab Ruang Kelas	UPTD SDN 7 MargaPunduh, jalan sidodadi maja ujung Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Rehab Ruang Kelas	UPTD SDN 14 Way Ratai, CandisariDesaGunungrejo, Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Rehab Ruang Kelas	Dusun Teluk Asuk, desa Penyandingan, kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Bantuan untuk Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren	Dusun Hilir, Desa Kekatang, kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekretariat Daerah Kabupaten
6	Pembangunan Pagar Sekolah	Sekolah Dasar (SD) 34 Dusun Ciwangi Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Bantuan untuk Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren	Dusun Kunyayan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah Kabupaten
8	Bantuan untuk Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren	Dusun Kunyayan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah Kabupaten
9	Bantuan untuk Rumah Ibadah, TPA, Pondok Pesantren	Dusun Peninjauan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah Kabupaten
10	Pembangunan Pagar Sekolah	Desa Sungai Langka Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Pemasangan Paving Halaman Sekolah	Desa Sungai Langka Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Pemasangan Paving Halaman Sekolah	SDN 5 Sungai Langka Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Pembangunan Pagar Sekolah	SDN 5 Sungai Langka Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Windu Mulyo - Rengas Desa Margo Mulyo Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
15	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Gedung Gumanti - Margo Mulyo Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
16	Bantuan bahan dan peralatan kelompok IKM agro	Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17	Pembangunan Embung	Desa Gedong Gumanti Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
18	Pembangunan Embung/Irigasi	Dusun Kesugihan Desa Karang Anyar Kec. Gedong Tataan , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
19	Pembangunan Embung/Irigasi	Desa Karang Anyar Kec.Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
20	Pembangunan DAM Parit	Dusun Candiwulan Desa Karang Anyar Kec.Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
21	Pembangunan Rehab Jaringan Irigasi	Dusun Cibalong, desa Bunut, kecamatan Way Ratai., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
22	Pengadaan Bibit Kambing dan Domba	Dusun Talang Padang, desa Bangun Rejo, kecamatan Punduh Pidada., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
23	Pengadaan Bibit Kambing dan Domba	Dusun Taman Sari, desa Pulau Legundi, kecamatan Punduh Pidada., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
24	Pembangunan Embung/Irigasi	Desa Batu Menyan Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
25	Pembangunan Embung/Irigasi	Di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
26	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
27	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Malang Tengah Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
28	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Baturaja Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
29	Pengadaan Bibit Kambing dan Domba	Dusun Simpang, Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
30	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
31	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Pejambon RK III , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
32	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Tanjung Ladan Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
33	Bantuan bibit ikan dan pakan	pengajian Nurul Huda, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan
34	Pengadaan Bibit Kambing dan Domba	Desa Negeri Sakti Dusun Banjar Negri, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
35	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Desa Bernung, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
			PRASARANA PERTANIAN	
36	Pengadaan Bibit Kambing dan Domba	Dusun Kunyayan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
37	Peralatan	Dusun Kunyayan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
38	Bantuan bahan dan peralatan kelompok IKM non agro	Dusun Peninjauan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
39	Bantuan bahan dan peralatan kelompok IKM non agro	Dusun Kunyayan Desa Bumi AgungKec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
40	Pengadaan Bibit Kambing dan Domba	Desa Kresno Widodo Kec.Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
41	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Jl. Pramuka Desa Sukaraja Dusun 7, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
42	Pengadaan Bibit Kambing dan Domba	Desa Negeri Sakti Dusun Banjar Negri Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
43	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Desa Bernung Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
44	Bantuan bahan dan peralatan kelompok IKM agro	Desa Kresno Widodo Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
45	Bantuan bahan dan peralatan kelompok IKM agro	Desa Kresno Widodo Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
46	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
47	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sinar Harapan Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
48	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sungai Langka Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
49	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Desa Ceraingin Asri, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
50	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Dusun Taman Baru, Desa Wates Way Ratai, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
51	Bantuan bahan dan peralatan kelompok IKM agro	Desa Kresno Widodo Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
52	Pengadaan Bibit Kambing dan Domba	Desa Trirahayu Dusun 1, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
53	Bantuan bahan dan peralatan kelompok IKM non agro	Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
54	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Desa Bagelen Kec. Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
55	Pembangunan Rehab Jaringan Irigasi	Dusun Suka Mandi Desa Suka Maju, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
56	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Sumil Desa Pagar Jaya, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
57	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Dusun Jaya Tani Desa Pagar Jaya, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
58	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Way Bawang Kec. Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
59	JIDES/Revitalisasi Jaringan Irigasi	Ringin Sari dan Kupang Rejo Kec. Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
60	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT.01 RW.02 Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
61	Pembangunan Jalan	RT.02 RW.01 Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
62	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Tresno Maju Dusun Sidorejo RT.02 RW.06. Kecamatan Negeri Katon, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
63	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pujodadi Kecamatan Negeri Katon , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
64	Rekonstruksi Jalan	Desa Babakan Loa kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
65	Rekonstruksi Jalan	Desa Pesawaran Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
66	Pembangunan Jalan	Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
67	Bantuan Tempat sampah dan Timbangan sampah	Desa Pasar Baru kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
68	Pembangunan Jalan	Dusun Serba Maju ke Dusun Kali Bungur Desa Tri Mulyo Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
69	Pembangunan Jalan	Desa Sri Rezeki - ke Desa Gerning Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
70	Rekonstruksi Jalan	DUSUN RAWA SUBUR/RAWA TUNGGAL DESA PADANG CERMIN KEC.PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
71	Rekonstruksi Jalan	DUSUN LUBUK BAKAK RT 03 DESA PADANG CERMIN KEC. PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
72	Rehabilitasi Tanggul Sungai	DUSUN RAWA SUBUR DESA PADANG CERMIN KEC. PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
73	Rekonstruksi Jalan	DUSUN LUBUK BAKAK RT 05 DESA PADANG CERMIN KEC.PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
74	Rekonstruksi Jalan	DUSUN KECAPI GANG IMPRES RT 01 DESA PADANG CERMIN KEC.PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
75	Pembangunan Jalan	Desa Margo Mulyo Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
76	Rekonstruksi Jalan	DUSUN KECAPI RT.03 LEGOK DESA PADANG CERMIN KEC.PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
77	Pembangunan Jalan	Desa Margo Rejo Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
78	Existing Tanah Peningkatan Onderlagh untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	DUSUN DANTAR DESA DANTAR KEC. PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
79	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Pesawaran III desa Pesawaran Kec Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
80	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Sukajaya Lempasing, Dusun Mutun Kec.Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
81	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Huru - Desa Munca Hurun Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
82	Pembangunan Jalan	Desa Hanura Kec. Teluk Pandan, , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
83	Rekonstruksi Jalan	dusun Pacitan Way Harong - Dusun Tanjung Lom Kecamatan Way Lima, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
84	Rekonstruksi Jalan	Desa Kota Dalom - Batu rajake kantor kecamatan Way Lima., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
85	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	UPTD SDN 22 WAY RATAI Jl. Kalirejo, Desa Wates Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
86	Pembangunan Jalan	Dusun Cibalong RT.001 Desa Bunut Kec. Way ratai Kabupaten Pesawaran, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
87	Rekonstruksi Jalan	Desa Banjaran Kec. Padang Cermin , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88	Pembangunan Jalan	Desa Banjaran Kec. Padang Cermin , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
89	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Banjaran , Kec. Padang Cermin , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
90	Pembangunan Jalan	Desa Hurun, Kec Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
91	Pembangunan Jembatan	Dusun Padasuka RT 001 RW003 Desa penyandingan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
92	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Way Harong ke Desa Cipanas Sumber Agung Kecamatan Way Lima , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
93	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	dusun Ngadirejo Desa Gunung Rejo kec Wayratai .kabupten pesawaran, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
94	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Way Salak desa - Desa Way Harong - Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Lima , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
95	Pemasangan Paving untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Mulyosari kec Wayratai pesawaran, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
96	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Lebak Sari Desa Mulyosari kec Wayratai , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
97	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	dusun totoharjo 1 Desa poncorejo kec Wayratai , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
98	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Tangkil Rejo Desa sumber jaya kecamatan Wayratai , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
99	Pemasangan Paving untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Candiwulan Desa Karang Anyar Kec.Gedong Tataan , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
100	Pembangunan Jalan	Dusun Cukuh Cambai, desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
101	Pembangunan Jalan	Dusun Umbul Salak - Pancur - Suakmalu - Fajar Harapan. Desa Sukarame, kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
102	Pembangunan Jalan	Dusun Suka Tenang, desa Sumber Jaya, kecamatan Way Ratai., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	Rekonstruksi Jalan	Desa Pahawang, kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
104	Pemeliharaan Tanggul atau Tebing Sungai	Desa Maja, Desa Umbul Limus, Desa Kekatang, kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
105	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Sukajaya, kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
106	Rekonstruksi Jalan	Dusun Wonosari, Desa Sumber Jaya, kecamatan Way Ratai., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107	Jembatan Gantung	Dusun Pardasuka, desa Penyandingan ke desa Maja. Kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
108	Pembangunan Jalan	Desa Gunung Sugih Baru Kac.Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
109	Pembangunan Jalan	Desa Negara Ratu Wates Kec.Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
110	Pembangunan Jalan	Desa Kota Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
111	Pembangunan Jalan	Desa Rejo Aggung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
112	Rekonstruksi Jalan	jalan H. Ali udin tempelrejo - MtsN 2km Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
113	Rekonstruksi Jalan	Desa Tempel Rejo Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
114	Pembangunan Jalan	Desa Cilimus Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
115	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
116	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Hanau Berak Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
117	Pembangunan Jalan	Desa Hanura Kec.Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
118	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Hanau Berak Dusun Duakha Kec. P.Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
119	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Rante Rejo 2 Desa Banjaran Kec.P.Cermin , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
120	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 2 Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
121	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Gunung Rejo Desa Wiyono Ke. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
122	Pembangunan Jalan	Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
123	Pembangunan Jalan	Desa Sanggi Dusun Piabung Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
124	Pembangunan Jalan	Dusun Kecapi Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125	Pembangunan Jalan	Dusun Lubuk Baku Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
126	Pembangunan Jalan	Dusun Padang Cermin Kec. Padang Cermin , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
127	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Dusun Piabung Desa Sangii Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
128	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) di perumahan dan kawasan permukinan kumuh	Desa Padang Cermin Desa Gayau, Desa Sanggi Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
129	Pembangunan Jalan	Desa Kota Dalam ke Desa Sindang Garut Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
130	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Baturaja Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
131	Pembangunan Jalan	Desa Margo Mulyo Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
132	Pembangunan Jalan	Desa Margo Rejo Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
133	Pembangunan Jalan	Desa Gedong Gumanti, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
134	Pembangunan Jalan	Dusun Bayu Rampit Desa Baturaja, Kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
135	Pembangunan Jalan	usun Curup Jaya Desa Baturaja Kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
136	Pembangunan Jalan	Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
137	Pembangunan Jalan	Desa Pager Jaya Kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
138	Pembangunan Jalan	Desa Maja Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
139	Pembangunan Jalan	Desa Sukajya Punduh Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
140	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
141	Pembangunan Jalan	Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
142	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Umbul Limus Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
143	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Sukajaya Pedada Kec Punduh Pedada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
144	Pembangunan Jalan	Desa Banding Agung Baturaja Kec Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
145	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Baturaja Kec Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
146	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sukajaya Punduh Kec Marga Punduh, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
147	Pemeliharaan Tanggul atau Tebing Sungai	Desa Sukajaya Punduh Kec Marga Punduh , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
148	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kampung Baru Kec Marga Punduh, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
149	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Maja Kec Marga Punduh, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
150	Pembangunan Jalan	Dusun Lububaka Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
151	Drainase Type 60 untukPenyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Simpang, Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
152	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	DusunTrimulyo 2 Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
153	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Dusun 1 Sinar Bandung, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
154	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Dusun 1 Sinar Bandung, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
155	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 1 RT/RW 01/01 Sinar Bandung, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
156	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 1 Sinar Bandung, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
157	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 6 RT 01 Bangun Sari, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
158	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 6 RT 02 Bangun Sari, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
159	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Sri Nusa Bangsa Timur, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
160	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 5 RT II Tri Rahayu, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
161	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 6 RT 12, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
162	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Pujodadi Barat, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
163	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Halangan Ratu, Desa Negri Katon, Desa Grujugan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
164	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Halangan Ratu – Tugu Sari, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	untuk Menunjang Fungsi Hunian		UTILITAS UMUM (PSU)	
165	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pejambon – Tugu Sari, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
166	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Trisno Maju dan Jalan Lumbi Rejo, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
167	Pemeliharaan Tanggul atau Tebing Sungai	Desa Negara Saka – Wairab, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
168	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Negeri Katon Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
169	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Lumbi Rejo Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
170	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sido Mulyo Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
171	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Tresno Maju Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
172	Pembangunan Jalan	Dusun Induk-Dusun Pagar Banyu-Dusun Padang Terang, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
173	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Simpang Kayu Minyak-Dusun Gunung Batu Desa Pampangan Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
174	Pembangunan Jalan	Dusun Gunung Batu-Binong Desa Pampanagan Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
175	Bantuan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu jalan (Connector)	Dusun Gunung Batu Desa Pampangan Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
176	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Ciwangi Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
177	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Sumber Sari Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
178	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Solo Tigo - Bulak Rejo Atas , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
179	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pesawaran PTPN ke arah Desa Cimanuk Kec Way Lima , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
180	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 1 Dusun Pesawaran Induk , Dusun 2 dan 4 Desa Pesawaran Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
181	Pembangunan Jalan	Desa Pejambon Negara Saka Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
182	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 3 Desa Kutoarjo, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
183	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kutoarjo Dusun Dua, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
184	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kutoarjo Dusun Dua, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
185	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kutoarjo, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
186	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Negri Sakti Dusun Negri Ampai, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
187	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Negeri Sakti Dusun Banjar Negri, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
188	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana,	Desa Bayas Jaya, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
189	Pembangunan Jembatan	Desa Bayas Jaya, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Bayas Jaya, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
191	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kota Dalom, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
192	Bantuan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu jalan (Connector)	Dusun Peninjauan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
193	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Gedung Gumanti dan Desa Kresno Widodo , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
194	Bantuan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu jalan (Connector)	Desa Bumi Agung Kec.Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
195	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
196	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Hanura, RK A, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
197	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Hanura, RK C, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
198	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Hanura, RK B , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
199	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Hanura rk C, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
200	Bantuan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu jalan (Connector)	Desa Sukaraja Dusun 7, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Dinas Perhubungan

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
			ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
201	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Negeri Sakti Dusun Banjar Negri Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
202	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Desa Pejambon Negara Saka, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
203	Drainase Type 60 untukPenyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
204	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kresno Widodo Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
205	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 6 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
206	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Negeri Sakti – Sungai Langka Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
207	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 1, Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
208	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Bernung - Sukoharjo Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
209	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Negeri Sakti – Markasi – Sungai Langka, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
210	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Way Layap II Desa Kebagusan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
211	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
212	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Paguyuban – Batas Pringsewu, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
213	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	dusun Sediamaju desa Sidodadi, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
214	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Padang Manis Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
215	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
216	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sinar Harapan Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
217	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Margodadi Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
218	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Bernung Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
219	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
220	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
221	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sungai Langka Dusun 9 Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
222	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana,	Jl. Tamtama Dusun I Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
223	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl Bakti Remaja sampai Jl. Karang Sari Dusun II dan III Desa Bagelen, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
224	Pembangunan Jembatan	Desa Tulang Tabak RT 005 Dusun III Desa Bagelen, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
225	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Sastro Sumarno Dusun III Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
226	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Suhada Dusun IV Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
227	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Museum Dusun IV & V Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
228	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Bagelen Kecamatan GedongTataan , Kab. Pesawaran	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
229	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Sidomulyo Desa Wates Way Ratai, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
230	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Ceringin Asri, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
231	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Wates Way Ratai, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
232	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kagungan Ratu., Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
233	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Purworejo dan Desa Karang Rrejo, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	untuk Menunjang Fungsi Hunian		UTILITAS UMUM (PSU)	
234	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pujo Rahayu, Desa Kalirejo dan Desa Lumbir Rejo , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
235	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Roworejo dan Negeri katon, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
236	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sidomulyo dan Desa Grujugan Baru, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
237	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
238	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
239	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jalan Pasar Baru – Gunung Sari Kecamatan Kedondong – Kecamatan Way Khilau , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
240	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Way Lipang Desa Gunung Sari, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
241	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Way Lipang Desa Gunung Sari Kecamatan Wat Khilau, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
242	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Trirahayu Dusun 1, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
243	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DesaTrirahayu Dusun 3, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
244	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	DESA TRIRAHAYU DUSUN 2, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	untuk Menunjang Fungsi Hunian		UTILITAS UMUM (PSU)	
245	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 3 sampai Dusun 7 Desa . Trirahayu, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
246	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Poncokreno sampai Desa Pujo Dadi, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
247	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sido Mulyo sampai Desa Lumbir Rejo , Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
248	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Gunung Rejo Desa Wiyono Kecamatan Gedomg Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
249	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Wiyono – Dusun Way Liati Kecamatan Gedomg Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
250	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Way Layap I - Kampung Sawah II Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
251	Pembangunan Jembatan	Desa Way Layap satu dan Dusun Wiyono)Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
252	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Bagelen Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
253	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Markasi menuju Dusun GudangDusun Markasi menuju Dusun Gudang, Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
254	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Sukadadi 4 Desa Sukadadi tembus Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
255	Pembangunan Jembatan	Dusun Sukadadi 4 ke Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
256	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana,	Bawang s/d Suka maju Kecamatan Punduh Pidadah, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

NO	POKIR DPRD	LOKASI POKIR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
257	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Suka Maju, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
258	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pagar jaya, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
259	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	ruas Bawang s/d Suka Maju, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
260	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Ringin Sari dan Porwodadi Kec. Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
261	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Penyandingan, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
262	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kampung Baru, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
263	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jl bawang-sokamaju Sokamaju-Pagarjaya Desa penyandingan Sukajya Pidada, Kab. Pesawaran	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sumber : SIPD-RI, Kabupaten Pesawaran, 2026

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2025, perkiraan Tahun 2026, proyeksi Tahun 2027, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui kebijakan yang bersifat inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju “Indonesia Emas 2045” dan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029 serta keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029. Kebijakan ekonomi daerah tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan, transformasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas, dan hilirisasi produk pertanian. Kebijakan ini dipadukan dengan pengembangan kawasan pesisir melalui pendekatan ekonomi biru guna mendorong Lampung sebagai pusat pertumbuhan pangan akuatik di kawasan barat Indonesia. Dalam bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengalokasikan prioritas pada pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, irigasi pertanian, serta pemantapan konektivitas antarwilayah dan efisiensi rantai pasok. Kebijakan ini didukung oleh peningkatan iklim investasi dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, sebagai bagian dari strategi untuk memperluas basis ekonomi lokal. Selaras dengan prinsip pembangunan berkeadilan, kebijakan ekonomi tahun 2027 juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan menjadi kunci penguatan daya saing daerah, dengan dukungan sistem informasi pembangunan berbasis data statistik yang akurat dan real-time.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran menempatkan partisipasi publik sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, arah kebijakan ekonomi Lampung tahun 2027 diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, mempersempit ketimpangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Perekonomian daerah tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam.

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global serta memperhatikan kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Kabupaten Pesawaran. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan asumsi dasar ekonomi makro 2027 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal dalam RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027.

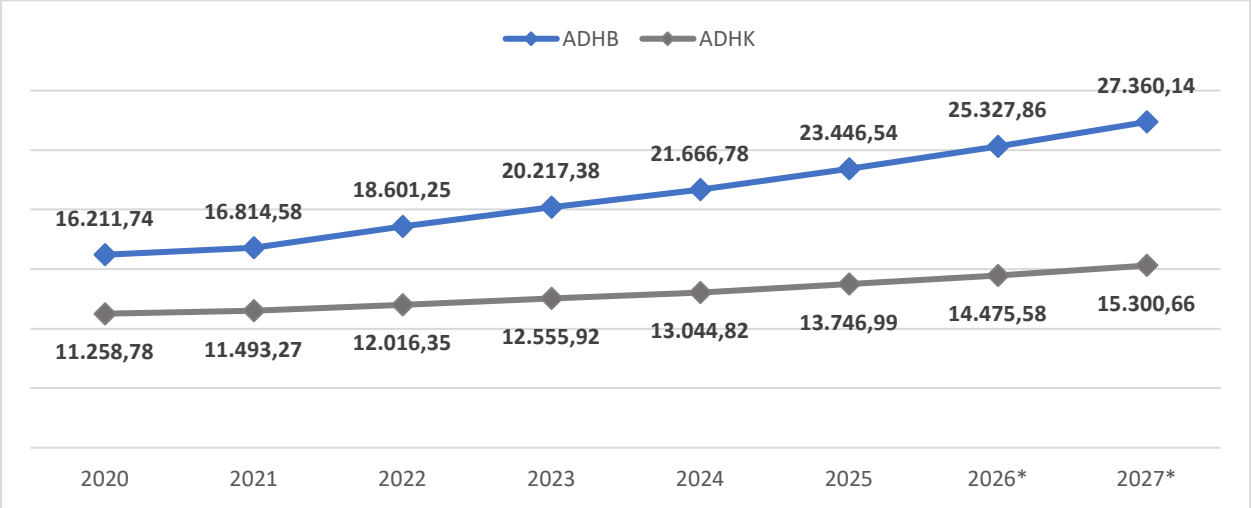
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 mengalami pertumbuhan selama periode 2020-2025. Pada tahun 2020 PDRB ADHK berada pada posisi 11.258,78 miliar rupiah yang kemudian meningkat senilai 2.488,21 miliar atau sebesar 22,10% sepanjang periode tersebut hingga mencapai 13.746,99 miliar rupiah pada tahun 2025. Sejalan dengan tren tersebut, Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) juga mengalami pertumbuhan pada periode yang sama. Pada Tahun 2020 PDRB ADHB berada pada posisi 16.211,74 miliar rupiah yang kemudian meningkat senilai 7.234,80 miliar atau

sebesar 44,63% sepanjang periode tersebut hingga mencapai 23.446,54 miliar rupiah pada tahun 2025.

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan PDRB Tahun 2020-2027 (dalam miliar)



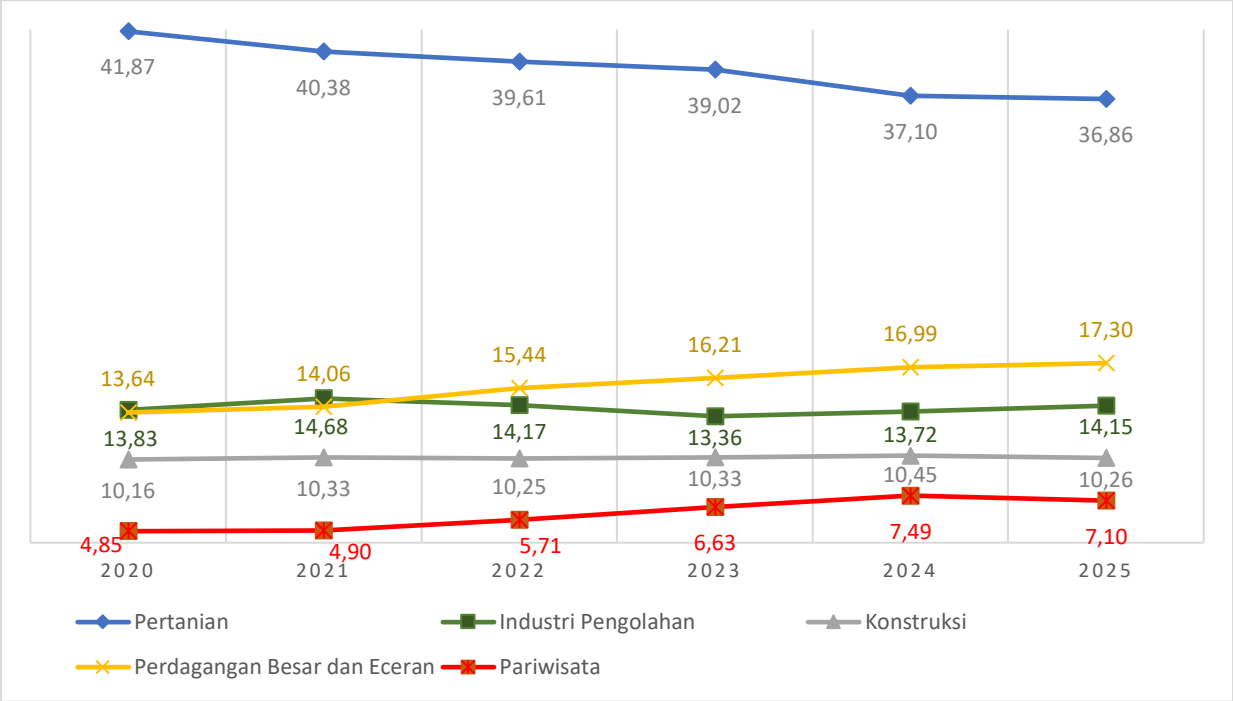
Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026
**Proyeksi Pemkab Pesawaran Tahun 2026-2027*

Seiring dengan pertumbuhan PDRB yang terus meningkat disepanjang periode tahun 2020-2025, kedepan pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Pesawaran diproyeksikan dapat mencapai nilai antara 25.269,25 sampai 25.386,48 miliar rupiah dengan nilai median 25.327,86 miliar rupiah pada tahun 2026. Selanjutnya, PDRB ADHB pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai nilai antara 27.296,82 sampai 27.423,46 miliar dengan nilai median 27.360,14 miliar. Disisi lain, berdasarkan PDRB ADHK diproyeksikan mencapai nilai antara 14.441,21 sampai 14.509,95 dengan nilai median 14.475,58 miliar rupiah pada tahun 2026 dan mencapaia nilai antara 15.264,49 sampai 15.336,83 miliar rupiah dengan nilai median 15.300,66 miliar rupiah pada tahun 2027. Kenaikan ini didapati dari semakin berkembangnya aktivitas pariwisata yang berdampak pada sektor akomodasi makan dan minum, dan transportasi dan pergudangan, jasa lainnya serta berkembangnya Kawasan Industri Pesawaran yang mendongkrak sektor industri pengolahan. Selain itu sektor pertanian yang berkontribusi besar terhadap perekonomian juga masih akan memberikan kontribusi positifnya.

Sepanjang periode tahun 2020-2025 struktur perekonomian di Kabupaten Pesawaran selalu didominasi oleh 4 sektor lapangan usaha yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi serta satu sektor gabungan yakni sektor pariwisata yang merupakan komposit sektor akomodasi makan minum, sektor transportasi dan sektor jasa lainnya. Terdapat satu sektor yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB yakni sektor pertanian dengan kontribusi 41,87% pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2025 menjadi 35,86%. Selanjutnya sektor perdagangan menyusul dengan kontribusi sebesar

13,64% pada awal periode dan meningkat menjadi 17,30% pada akhir periode. Sektor industri pengolahan menyumbang 12,83% pada awal periode dan meningkat menjadi 14,15% pada akhir periode. Lebih lanjut sektor konstruksi cenderung bertahan pada kisaran kontribusi 10% lebih disepanjang periode. Adapun pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Pesawaran menyumbang 4,85% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 7,10% pada tahun 2025.

Gambar 3.2 Grafik Kontribusi Sektor Utama PDRB Tahun 2020-2025



Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026

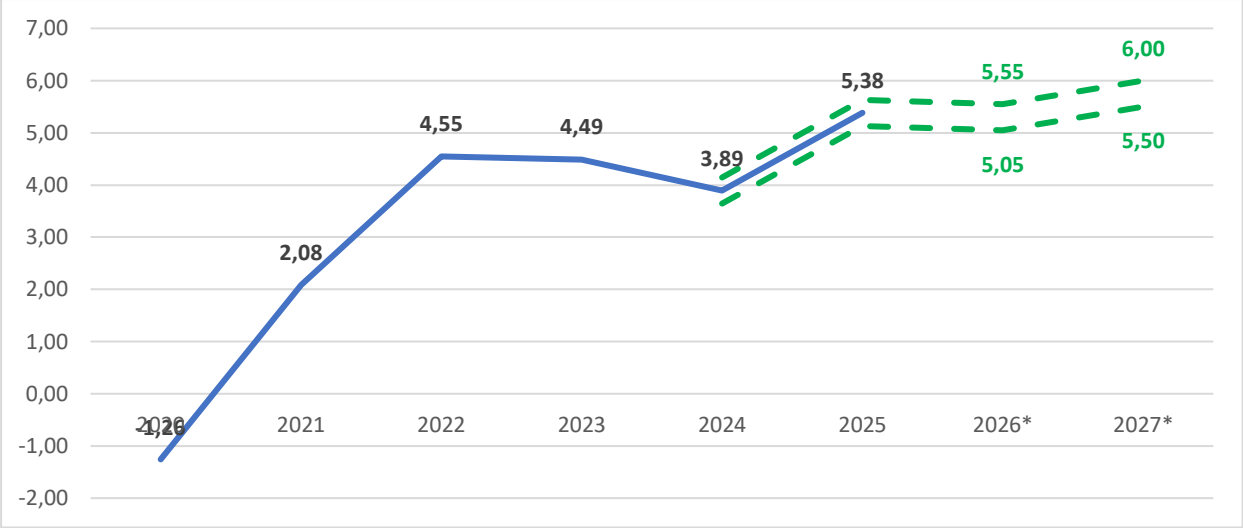
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya jika negatif menunjukkan adannya penurunan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi pada sepanjang periode tahun 2020-2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada awal periode pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga -1,26% akibat Pandemi Covid-19, namun pada tahun berikutnya berhasil tumbuh mencapai 2,08% dan terus meningkat hingga tahun 2022 berada pada nilai 4,55%. Pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan masing-masing pada angka 4,49% dan 3,89%. Pada akhir periode yakni tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai puncak tertinggi sejak pandemi pada angka 5,38%. Berdasarkan historis capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, diproyeksikan pada tahun 2026 akan tumbuh

diantara 5,05-5,50% dan pada tahun 2027 akan tumbuh pada rentang 5,50-6,00%.

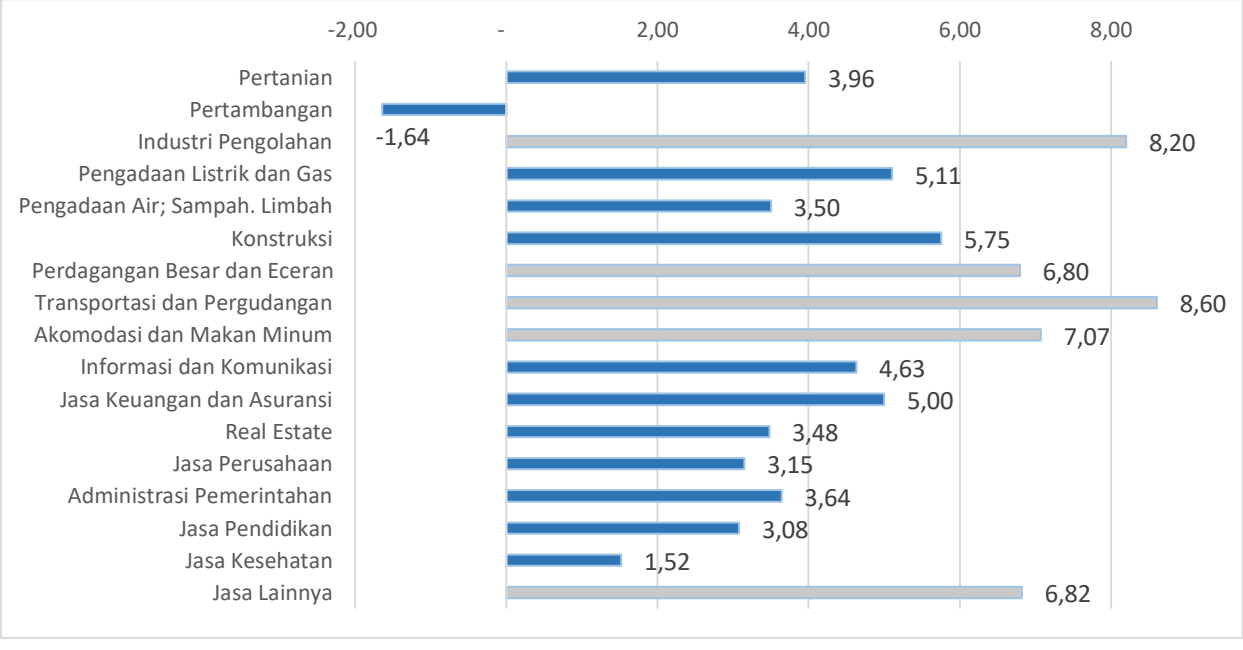
Gambar 3.3 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2027



Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026
**Proyeksi Pemkab Pesawaran Tahun 2026-2027*

Pertumbuhan ekonomi yang baik pada tahun 2025 ditopang oleh 16 sektor ekonomi yang tumbuh positif sepanjang tahun tersebut, sebaliknya hanya satu sektor yang mengalami kontraksi sebesar -1,64% yakni sektor pertambangan dan penggalian. Adapun sektor lima sektor yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yakni sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,60%, dilanjutkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 8,20%, sektor akomodasi dan makan minum sebesar 7,07%, sektor jasa lainnya sebesar 6,82%, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 6,80%.

Gambar 3.4 Grafik Pertumbuhan Sektor Ekonomi Tahun 2025



Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026

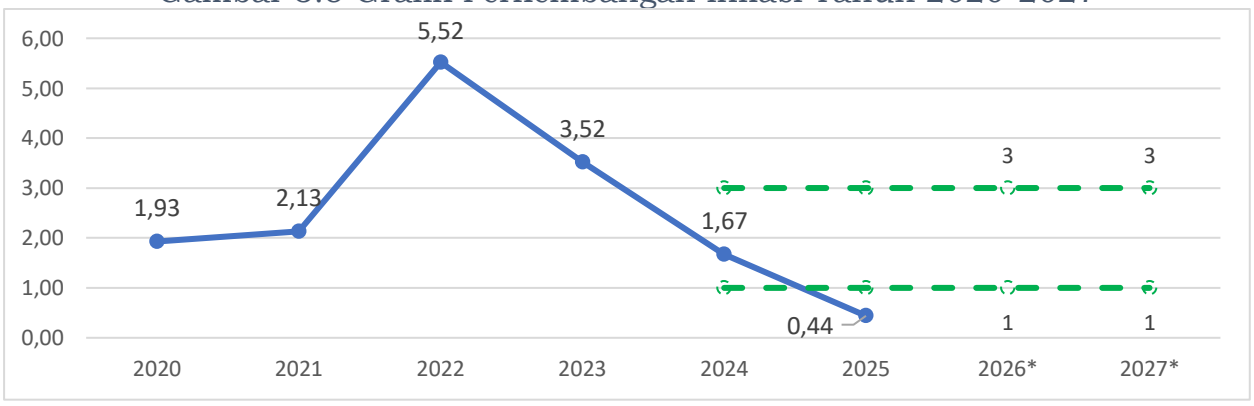
Jika kita memperhatikan lebih lanjut sektor-sektor yang tumbuh besar tersebut juga merupakan sektor ekonomi yang berkontribusi besar dalam membentuk struktur perekonomian Kabupaten Pesawaran. Pertama yakni 3 sektor gabungan yang merupakan komposit sektor pariwisata berupa sektor transportasi dan pergudangan, sektor akomodasi dan makan minum, dan sektor jasa lainnya. Kedua yakni sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran yang juga berkinerja baik terhadap kontribusi struktur dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya sektor yang berkontribusi besar terhadap struktur ekonomi namun memiliki pertumbuhan yang juga cukup baik yakni sektor konstruksi yang berhasil tumbuh sebesar 5,75% dan sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,96%.

3.1.3 Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Mengingat tidak tersedianya data inflasi Kabupaten Pesawaran maka dilihat dari inflasi wilayah terdekat yakni Kota Bandar Lampung. Laju inflasi sepanjang periode tahun 2020-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat bahwa inflasi sebesar 1,93%, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 2,13%. Selanjutnya tahun 2022 mengalami peningkatan tertinggi yang juga dialami di daerah lainnya di Provinsi Lampung pada angka 5,52%. Namun kemudian pada tahun 2023 sampai tahun 2025 terus menurun hingga pada angka 0,44%. Dengan demikian, dapat dikatakan pada tahun 2024 dan 2025, inflasi Kabupaten Pesawaran masih dalam ambang batas 1-3 persen.

Tingkat inflasi yang terkendali dapat menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang juga mendukung stabilitas perekonomian regional khususnya insentif pada sisi suplai produksi (produsen). Namun, disisi yang lain juga dapat mengindikasikan masih lemahnya daya beli masyarakat yang sekaligus mencerminkan lambatnya pertumbuhan ekonomi regional daerah. Kedepan target angka inflasi masih ditetapkan pada batas 1-3 persen (garis putus-putus warna hijau) sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Gambar 3.5 Grafik Perkembangan Inflasi Tahun 2020-2027



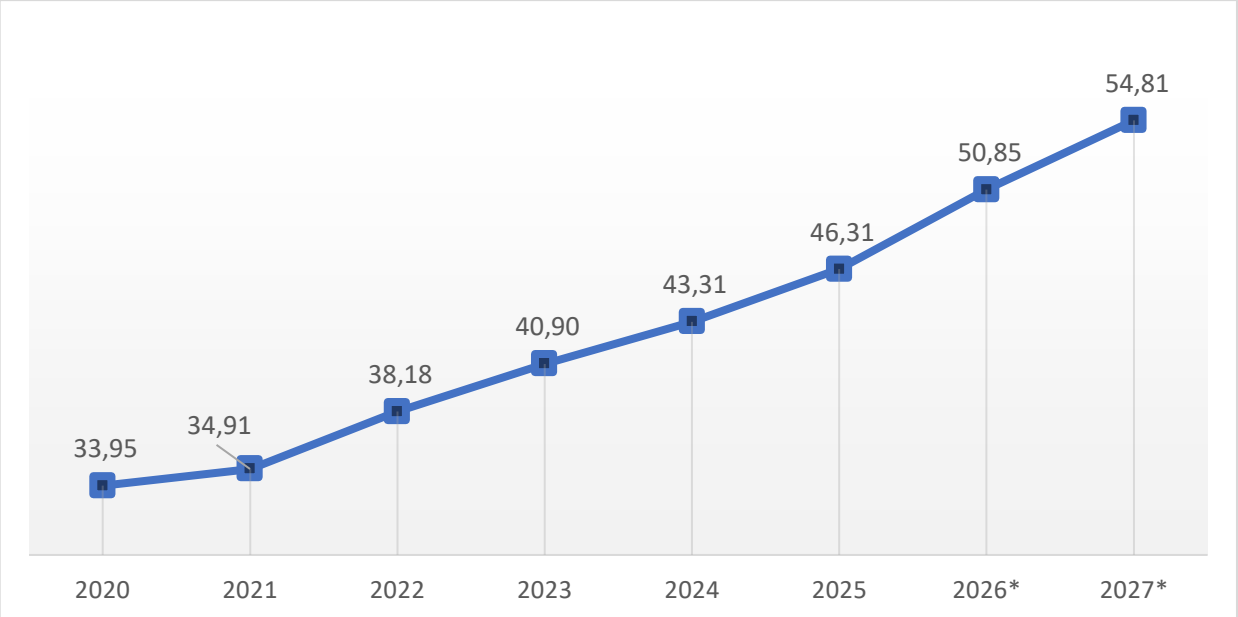
Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026

Upaya strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesawaran yaitu; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga; 2). Menjaga ketersediaan pasokanbahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusi melalui kerja sama perdagangan antardaerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data.

3.1.4 PDRB per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, namun PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah yang mana besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB. Adapun besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Gambar 3.6 Grafik Perkembangan PDRB per Kapita Tahun 2020-2027 (dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026

PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran selama periode tahun 2020-2025 mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2020 pendapatan per kapita berada pada angka 33,95 juta rupiah per tahun dan meningkat menjadi 46,31 juta rupiah per tahun pada tahun 2025. Pencapaian ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi berfluktuasi tetapi tetap

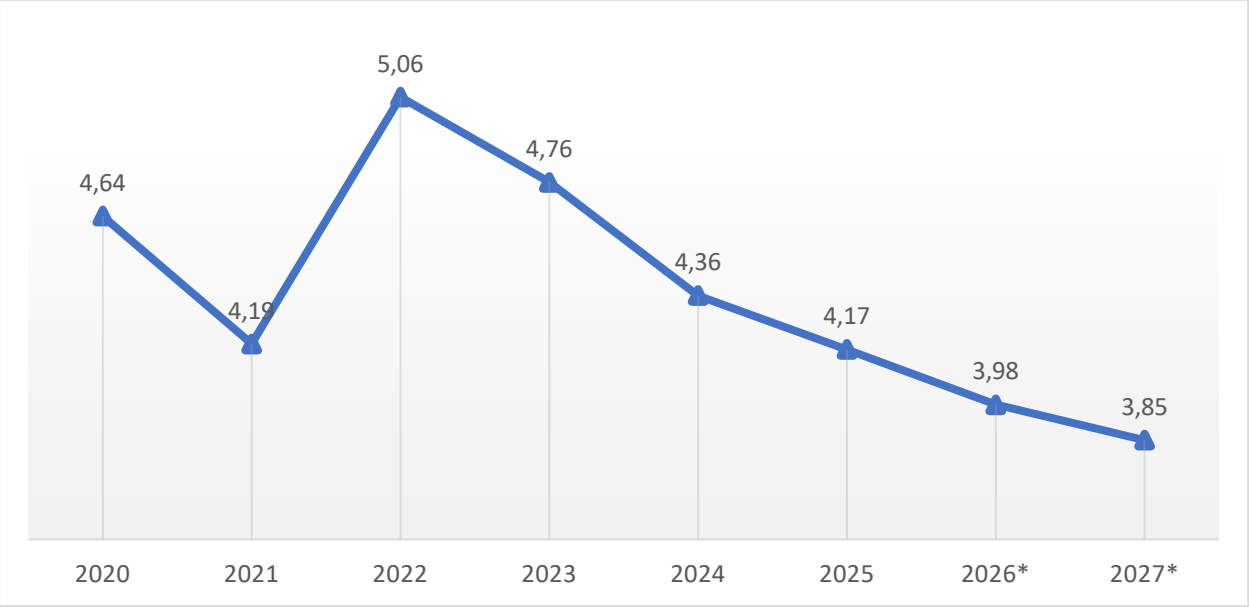
memberikan dampak positif terhadap penilaian makro yakni pendapatan masyarakat yang terwujud dari peningkatan pendapatan yang hampir mencapai lebih dari 10 juta selama periode tersebut. Kedepan, seiring dengan proyeksi perekonomian daerah yang meningkat, juga berdampak pada peningkatan PDRB per Kapita di Kabupaten Pesawaran yang diharapkan dapat mencapai nilai 50,85 juta rupiah per tahun pada tahun 2026 dan 54,81 juta rupiah per tahun pada tahun 2027.

3.1.5 Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja maupun penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Pada sepanjang periode tahun 2020 sampai 2025 terjadi fluktuasi perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran berada di angka 4,64%, dimana pada tahun berikutnya berhasil menurun ke angka 4,19% namun mencapai titik tertinggi selama periode tahun 2020-2025 pada angka 5,06% pada tahun 2022. Seiring dengan membaiknya perekonomian pasca Covid-19, angka tingkat pengangguran terus mengalami penurunan sejak 2022 sampai tahun 2025 pada posisi 4,17%. Berdasarkan historis capaian tingkat pengangguran tersebut, diprediksi pada tahun 2026 akan terus menurun mencapai angka antara 3,80-4,15% dengan angka median pada 3,98% dan pada tahun 2027 akan turun diantara angka 3,70-4,00% dengan angka median pada 3,85%.

Gambar 3.7 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Tahun 2020-2027

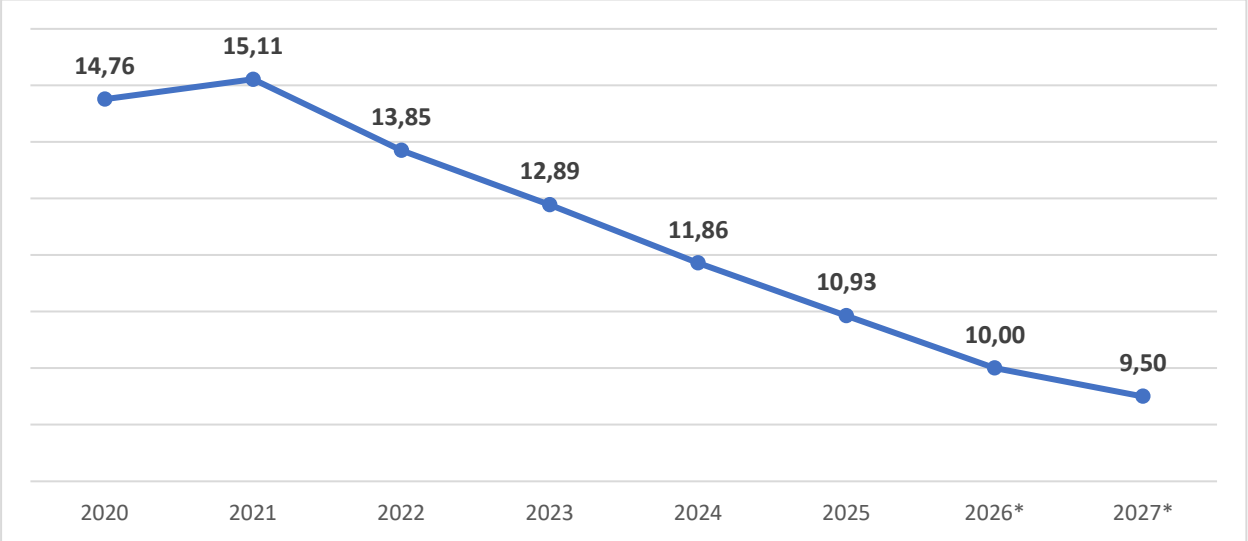


Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026

3.1.6 Kemiskinan

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Selanjutnya garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Gambar 3.8 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2027



Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026

Sepanjang periode tahun 2020-2025 tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi pada awal periode dan menunjukkan tren yang baik pada akhir periode. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Pesawaran berada pada angka 14,76%, kemudian mengalami peningkatan pada titik tertinggi pada sepanjang periode tersebut pada angka 15,11% di tahun 2021. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami penurunan hingga mencapai 10,93%. Berdasarkan historis capaian tingkat pengangguran tersebut, diprediksi pada tahun 2026 akan terus menurun mencapai angka antara 10,25-9,75% dengan angka median pada 10,00% dan pada tahun 2027 akan turun diantara angka 10,00-9,00% dengan angka median pada 9,50%.

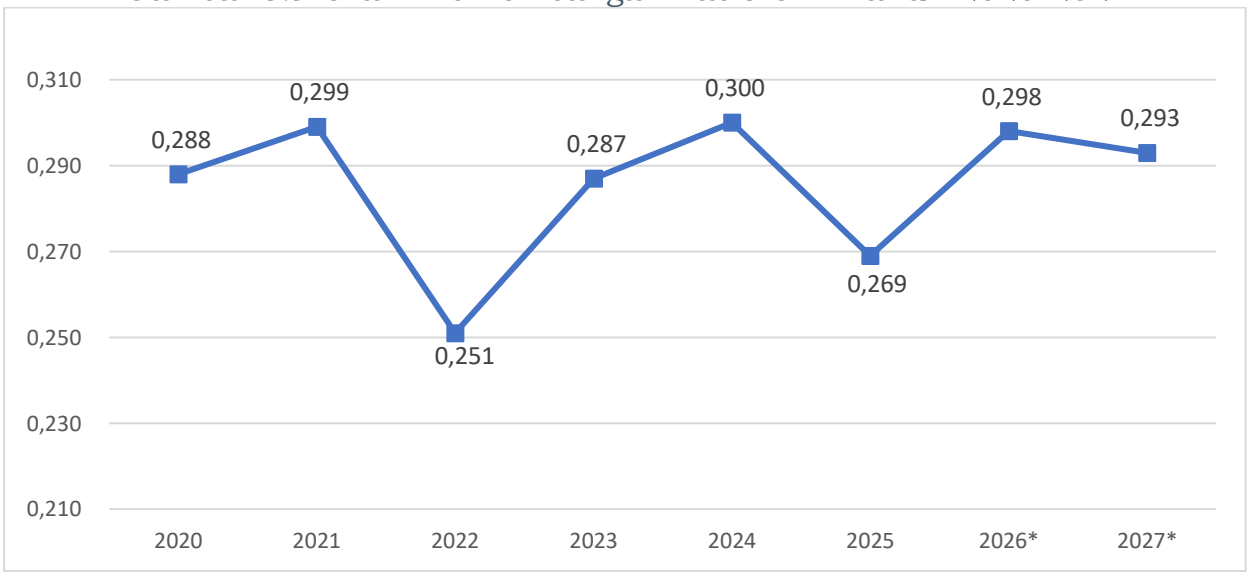
3.1.7 Ketimpangan Pendapatan

Rasio gini adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpagan pengeluaran maupun pendapatan dalam suatu wilayah. Secara umum interpretasi rasio gini dibagi dalam ketiga kelompok yang mencakup skor 0 sampai 0,3 dimaknai sebagai ketimpangan rendah (relatif

merata), skor 0,3 sampai 0,5 dimaknai sebagai ketimpangan sedang, dan skor 0,5 sampai 1 dimaknai sebagai ketimpangan tinggi.

Sepanjang periode tahun 2020-2025 nilai rasio gini di Kabupaten Pesawaran perkembangannya berfluktuasi yang secara umum masuk pada kategori ketimpangan rendah. Pada awal periode rasio gini berada pada angka 0,288 dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 di angka 0,299. Selanjutnya pada tahun 2022 menurun pada titik terendah sepanjang periode pada angka 0,251 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai titik tertinggi pada angka 0,300. Pada akhir periode angka rasio gini berada pada posisi 0,269. Sejalan dengan peguatan pada sisi ekonomi yang terindikasi dengan pertumbuhan positif diharapkan pada semua pelaku ekonomi dapat meningkatkan pengeluarannya sehingga tingkat ketimpangan antar kelompok masyarakat dapat menurun. Oleh karena itu pada tahun 2026 proyeksi angka rasio gini diharapkan dapat berkisar antara 0,295-0,300 dengan nilai tengah pada posisi 0,298 dan pada tahun 2027 dapat mencapai posisi antara 0,290-0,295 dengan nilai tengah 0,293. Proyeksi angka tersebut jika kita melihat secara grafik akan terlihat naik namun secara umum masih dalam kategori batas ketimpangan rendah.

Gambar 3.9 Grafik Perkembangan Rasio Gini Tahun 2020-2027



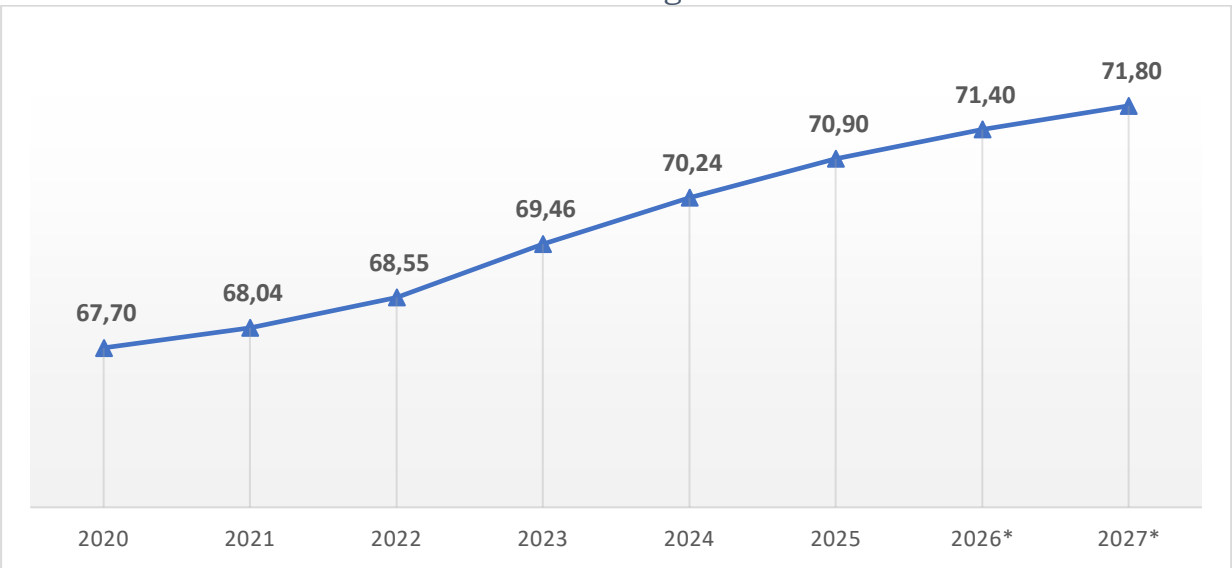
Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026

3.1.8 Pembangunan Sumber Daya Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indikator yang mampu merangkum berbagai aspek dan dimensi dalam pembangunan manusia secara berkelanjutan yang diperlukan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan, khususnya pembangunan manusia antarwilayah dan antarnegara maupun perkembangan antarwaktu. *United Nation Development Programme* (UNDP) merilis *Human Development Index* (HDI) sebagai ukuran untuk menilai dan menganalisis keberhasilan atau kinerja pembangunan

manusia dalam suatu wilayah sejak tahun 1990. Selanjutnya secara berkala, indeks tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia antarwilayah di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), HDI diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi kesehatan atau peluang hidup, dimensi pendidikan serta dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak.

Gambar 3.10 Grafik Perkembangan IPM Tahun 2020-2027



Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran Tahun 2026

Sepanjang periode tahun 2020-2025 perkembangan nilai IPM di Kabupaten Pesawaran selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebanyak 0,64 poin. Pada awal periode capaian IPM berada pada angka 67,70 dan meningkat menjadi 70,90 pada akhir periode. Kedepan nilai IPM diproyeksikan dapat mencapai 71,40 pada tahun 2026 dan pada posisi 71,80 pada tahun 2027.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang merupakan perwujudan siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa hal yakni keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan relevansi program dan kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah
   Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.
2. Disiplin Anggaran
   Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan Anggaran
   Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah segala hal sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang

menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan upaya diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Potensi pajak daerah yang rendah dipengaruhi masih kecilnya lapangan usaha pada sektor tersier.
b. Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap kewajiban pajak daerah.
c. Masih terbatasnya amenitas di obyek wisata.
d. Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi.
e. Belum optimalnya pembaharuan data wajib pajak dan obyek pajak sesuai kondisi sebenarnya.
f. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta dengan memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan penyetorannya.
2. Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi/digitalisasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif.
3. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan terhadap wajib pajak.
4. Peningkatan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi.
5. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata).
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja pada BUMD.
7. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
8. Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan menginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat.
9. Optimalisasi kinerja perangkat daerah dan tertib administrasi sebagai upaya peningkatan pendapatan transfer daerah.

Dengan strategi tersebut maka kebijakan daerah yang akan ditempuh dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi.
3. Peningkatan edukasi kepada masyarakat wajib pajak dan retribusi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pemungutan serta sistem informasi perpajakan dan retribusi.

5. Peningkatan pemanfaatan aset daerah
6. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD

Optimalisasi Opsen Pajak, untuk mendukung optimalisasi PAD kabupaten/kota pada sektor PKB dan BBNKB maka diperlukan sinergi dan upaya sebagai berikut :

1. Paling sedikit menganggarkan sebanyak 1% dari rencana penerimaan opsen PKB dan BBNKB tahun berjalan untuk mendukung optimalisasi Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya
2. Melakukan pendataan dan penagihan tunggakan PKB sampai ke tingkat desa/kelurahan dan RT
3. Meningkatkan peran BUMDesa dalam pembayaran PKB
4. Sosialisasi layanan dan kemudahan pembayaran PKB dan BBNKB melalui Aplikasi Signal dan E-Samdes
5. sosialisasi secara masif kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung seperti program keringanan PKB
6. Mendukung upaya perluasan dan penambahan layanan kesamsatan
7. Menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dinas
8. Memastikan ASN, Perusahaan, Yayasan dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran taat Pajak Kendaraan Bermotor termasuk anggota keluarganya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2024 ini terdapat penyesuaian terhadap nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun komponen sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari:
   a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
   b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
   d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi,

Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.

2. **Pendapatan Transfer**, terdiri dari:
   a. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana desa.
      - DAU adalah pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - DAK adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini digunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
      - Dana Insentif Fiskal adalah pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
      - DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
      - Dana Desa adalah pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Transfer antar Daerah, terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
      - Pendapatan Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

- Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, terdiri dari:
   a. Pendapatan Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel *3.1* Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2024–2028

KODE	URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025	APBD 2026	PROYEKSI RKPD 2027	PROYEKSI RKPD 2028	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.281.124.851.225,30**	**1.204.089.276.299,72**	**1.076.613.224.072,00**	**1.072.136.873.312,00**	**1.080.301.895.429,15**	**1,639,019,239,402.00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**88.449.173.425,29**	**116.845.474.496,72**	**145.966.292.603,00**	**140.359.710.603,00**	**147.377.696.133,15**	**188,272,341,279.00**
4.1.1	Pajak Daerah	43.632.865.497,34	75.346.446.402,29	91.189.000.000,00	87.800.000.000,00	92.190.000.000,00	
4.1.2	Retribusi Daerah	3.512.228.524,00	18.080.346.276,00	20.697.925.000,00	20.480.343.000,00	21.504.360.150,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.277.507.547,46	1.200.266.471,11	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	39.026.571.856,49	22.218.415.347,32	32.079.367.603,00	30.079.367.603,00	31.583.335.983,00	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.192.703.600.800,00**	**1.085.107.162.207,00**	**930.646.931.469,00**	**931.777.162.709,00**	**932.924.199.296,00**	**1,450,746,898,123.00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.093.233.280.836,00	1.035.317.871.732,00	854.634.062.000,00	854.634.062.000,00	854.634.062.000,00	
4.2.1.1	Dana Perimbangan	939.966.771.836,00	0,00	731.593.588.000,00	731.593.588.000,00	731.593.588.000,00	
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.709.857.689,00	19.944.520.230,00	7.686.587.000,00	7.686.587.000,00	7.686.587.000,00	
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	672.883.939.339,00	687.468.347.100,00	549.439.486.000,00	549.439.486.000,00	549.439.486.000,00	
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.800.132.162,00	14.935.853.766,00	2.706.006.000,00	2.706.006.000,00	2.706.006.000,00	
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	173.572.842.646,00	172.591.836.632,00	171.761.509.000,00	171.761.509.000,00	171.761.509.000,00	
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1.5	Dana Desa	147.612.573.000,00	133.025.673.004,00	123.040.474.000,00	123.040.474.000,00	123.040.474.000,00	
4.2.1.6	Insentif Fiskal	5.653.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.470.319.964,00	49.789.290.475,00	76.012.869.469,00	77.143.100.709,00	78.290.137.296,00	
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	99.470.319.964,00	49.789.290.475,00	76.012.869.469,00	77.143.100.709,00	78.290.137.296,00	
4.2.2.2.	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**2.132.639.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.132.639.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.132.639.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait angsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Pesawaran yang cukup dinamis khususnya di kawasan strategis pariwisata dan daerah kawasna militer menuntut adanya percepatan di berbagai bidang baik penyiapan SDM, infrastruktur pendukung hingga antisipasi dampak pembangunan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga harus mengantisipasi agar masyarakat dapat berperan serta melalui produk-produk UMKM lokal yang berkualitas sehingga masyarakat pada kawasan tersebut dapat berkembang dan terangkat bersamaan dengan pengembangan wilayah yang terjadi.

Berdasarkan dinamika dan konstelasi wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana tahun anggaran 2027 adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Penggunaan Dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya dan belanja modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai masing-masing belanja sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:
   a. Belanja Pegawai, yang meliputi Gaji pokok, tunjangan ASN struktural/ fungsional, THR dan gaji ketigabelas ASN, serta penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai tersebut juga meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah dan DPRD, serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran jaminan

kesehatan baik bagi ASN, Kepala Daerah, maupun DPRD. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Akurasi perencanaan anggaran belanja pegawai dengan memperhatikan dua poin krusial:

1. dua kategori PPPK:
   Memastikan alokasi anggaran tidak hanya untuk PPPK penuh waktu,tetapi juga sudah mengantisipasi formasi PPPK paruh waktu untuk tahun anggaran 2027.
2. Kecukupan proyeksi belanja:
   Memastikan bahwa nominal yang diplot dalam proyeksi belanja pegawai sudah dihitung secara matang agar tidak terjadi deficit atau kurang anggaran ditengah tahun berjalan nantinya

b. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
c. Belanja Hibah, dianggarkan secara selektif sesuai dengan kebutuhan daerah, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
d. Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

2. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2027.

3. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran kas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Tabel *3.2* Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2024-2028

KODE	URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025	APBD 2026	PROYEKSI RKPD 2027	PROYEKSI RKPD 2028	PROYEKSI RKPD 2029
5	**BELANJA DAERAH**	**1.227.608.811.607,00**	**1.198.036.646.122,49**	**1.080.592.724.072,00**	**1.057.184.835.525,00**	**1.062.041.026.429,00**	**1,638,019,239,402.00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**846.747.316.847,00**	**882.051.005.940,49**	**819.102.320.039,00**	**813.205.153.039,00**	**817.073.828.161,00**	**1,134,162,944,949.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	465.299.138.789,00	505.222.747.797,00	529.185.325.039,00	529.185.325.039,00	532.407.717.139,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.671.467.138,00	339.361.905.663,49	273.935.633.300,00	264.625.527.100,00	264.625.527.100,00	
5.1.03	Belanja Bunga	4.491.189.320,00	0,00	0,00	3.412.939.200,00	4.059.222.222,00	
5.1.05	Belanja Hibah	35.285.521.600,00	37.260.797.480,00	15.481.261.700,00	15.481.261.700,00	15.481.261.700,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	205.555.000,00	500.100.000,00	500.100.000,00	500.100.000,00	
5.2	**BELANJA MODAL**	**160.708.909.188,00**	**87.620.507.136,00**	**50.119.712.340,00**	**32.608.990.793,00**	**32.608.990.793,00**	**213,470,954,816.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.110.928.821,00	27.126.227.107,00	7.498.934.510,00	7.498.934.510,00	7.498.934.510,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.525.548.167,00	17.681.013.908,00	16.661.706.570,00	16.661.706.570,00	16.661.706.570,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.436.432.700,00	34.270.966.215,00	25.959.071.260,00	8.448.349.713,00	8.448.349.713,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.473.629.500,00	8.542.299.906,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	162.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**463.375.000,00**	**5.289.441.669,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**6,200,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	463.375.000,00	5.289.441.669,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**219.689.210.572,00**	**223.075.691.377**,00	**206.370.691.693,00**	**206.370.691.693,00**	**207.358.207.475,00**	**284,185,339,637.00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.298.636.723,00	4.006.771.223,00	10.381.920.233,00	10.381.920.233,00	11.369.436.015,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	214.390.573.849,00	219.068.920.154,00	195.988.771.460,00	195.988.771.460,00	195.988.771.460,00	
	SURPLUS/DEFISIT (PENDAPATAN-BELANJA)	**53.516.039.618,30**	**6.048.630.177,23**	**(3.979.500.000,00)**	**14.952.037.787,00**	**18.260.869.000,15**	**1.000.000.000,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. **Penerimaan Pembiayaan**
   a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
      - Pelampauan penerimaan PAD;
      - Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
      - Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
      - Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
      - Penghematan belanja;
      - Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
      - Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

      Selanjutnya, SiLPA dimaksud akan diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2026.
   b. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang dihitung berdasarkan ketentuan pemberian pinjaman daerah dan telah dilakukan kajian terkait Pinjaman Daerah sebagai berikut:
      - Batas Maksimal Pembiaayaan Utang Daerah
        Sisa pembiaayaan utang daerah ditambah jumlah pembiayaan utang daerah yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.
      - *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)
        Kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah ditetapkan paling sedikit 2,5.
      - Batas Maksimal Defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah.
        Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri mengenai batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan jumlah kumulatif Pembiayaan Utang Daerah

2. **Pengeluaran Pembiayaan,** Proyeksi pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2027 diasumsikan sebesar Rp25.000.000.000,00; yang diperuntukan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00-; serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 24.000.000.000,00-.

3. **Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**, Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2027 bersaldo nol.

Tabel *3.3* Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2029

KODE	URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025	APBD 2026	PROYEKSI RKPD 2027	PROYEKSI RKPD 2028	PROYEKSI RKPD 2029
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**23.366.794.119,30**	**7.232.104.649,96**	**3.979.500.000,00**	**(14.952.037.787,00)**	**(18.260.869.000,00)**	**(1,000,000,000.00)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**51.958.619.184,30**	**7.232.104.649,96**	**3.979.500.000,00**	**3.308.831.213,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.472.811.584,30	7.232.104.649,96	3.979.500.000,00	3.308.831.213,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	43.485.807.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**28.591.825.065,00**	**0,00**	**0,00**	**18.260.869.000,00**	**18.260.869.000,00**	**1,000,000,000.00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	28.591.825.065,00	0,00	0,00	18.260.869.000,00	18.260.869.000,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**8.421.748.037,97**	**13.280.734.827,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

Selanjutnya secara lebih lengkap tabel proyeksi keuangan daerah tahun 2027 disandingkan dengan pagu RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun 2027 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel *3.4* Tabel Persandingan Pagu RPJMD Tahun 2025-2029 pada Tahun 2027 dan Proyeksi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2027

KODE	URAIAN	PAGU RPJMD 2025-2029 PADA TAHUN 2027	REALISASI APBD 2024	REALISASI APBD 2025	APBD 2026	PROYEKSI RKPD 2027	PROYEKSI RKPD 2028	SELISIH PAGU RKPD 2027 DENGAN RPJMD	SELISIH PAGU RKPD 2027 DENGAN APBD 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 7-3*	*10 = 7-6*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.354.561.354.477,00**	**1.281.124.851.225,30**	**1.204.089.276.299,72**	**1.076.613.224.072,00**	**1.072.136.873.312,00**	**1.080.301.895.429,00**	**(282.424.481.165,00)**	**(4.476.350.760,00)**
04.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**155.596.975.863,00**	**88.449.173.425,29**	**116.845.474.496,72**	**145.966.292.603,00**	**140.359.710.603,00**	**147.377.696.133,00**	**(15.237.265.260,00)**	**(5.606.582.000,00)**
04.01.01	Pajak Daerah	95.907.900.000,00	43.632.865.497,34	75.346.446.402,29	91.189.000.000,00	87.800.000.000,00	92.190.000.000,00	(8.107.900.000,00)	(3.389.000.000,00)
04.01.02	Retribusi Daerah	20.606.771.500,00	3.512.228.524,00	18.080.346.276,00	20.697.925.000,00	20.480.343.000,00	21.504.360.150,00	(126.428.500,00)	(217.582.000,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.750.000.000,00	2.277.507.547,46	1.200.266.471,11	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	(750.000.000,00)	0,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.332.304.363,00	39.026.571.856,49	22.218.415.347,32	32.079.367.603,00	30.079.367.603,00	31.583.335.983,00	(6.252.936.760,00)	(2.000.000.000,00)
04.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.198.964.378.614,00**	**1.192.703.600.800,00**	**1.085.107.162.207,00**	**930.646.931.469,00**	**931.777.162.709,00**	**932.924.199.296,00**	**(267.187.215.905,00)**	**1.130.231.240,00**
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.134.612.015.900,00	1.093.233.280.836,00	1.035.317.871.732,00	854.634.062.000,00	854.634.062.000,00	854.634.062.000,00	(279.977.953.900,00)	0,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	978.101.532.100,00	939.966.758.836,00	894.940.557.728,00	731.593.588.000,00	731.593.588.000,00	731.593.588.000,00	(246.507.944.100,00)	0,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.699.926.600,00	21.709.857.689,00	19.944.520.230,00	7.686.587.000,00	7.686.587.000,00	7.686.587.000,00	(14.013.339.600,00)	0,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	735.878.102.300,00	672.883.939.339,00	687.468.347.100,00	549.439.486.000,00	549.439.486.000,00	549.439.486.000,00	(186.438.616.300,00)	0,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.950.673.554,00	71.800.132.162,00	14.935.853.766,00	2.706.006.000,00	2.706.006.000,00	2.706.006.000,00	(44.244.667.554,00)	0,00
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	173.572.829.646,00	173.572.829.646,00	172.591.836.632,00	171.761.509.000,00	171.761.509.000,00	171.761.509.000,00	(1.811.320.646,00)	0,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	156.510.483.800,00	147.612.573.000,00	133.025.673.004,00	123.040.474.000,00	123.040.474.000,00	123.040.474.000,00	(33.470.009.800,00)	0,00
4.2.1.6	Insentif Fiskal	0,00	5.653.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	PAGU RPJMD 2025-2029 PADA TAHUN 2027	REALISASI APBD 2024	REALISASI APBD 2025	APBD 2026	PROYEKSI RKPD 2027	PROYEKSI RKPD 2028	SELISIH PAGU RKPD 2027 DENGAN RPJMD	SELISIH PAGU RKPD 2027 DENGAN APBD 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 7-3*	*10 = 7-6*
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.352.362.714,00	99.470.319.964,00	49.789.290.475,00	76.012.869.469,00	77.143.100.709,00	78.290.137.296,00	12.790.737.995,00	1.130.231.240,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	64.352.362.714,00	99.470.319.964,00	49.789.290.475,00	76.012.869.469,00	77.143.100.709,00	78.290.137.296,00	12.790.737.995,00	1.130.231.240,00
4.2.2.2.	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**2.132.639.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.03.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	2.132.639.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**BELANJA DAERAH**	**1.306.161.354.477,00**	**1.227.608.811.607,00**	**1.198.036.646.122,49**	**1.080.592.724.072,00**	**1.057.184.835.525,00**	**1.062.041.026.429,00**	**(248.976.518.952,00)**	**(23.407.888.547,00)**
05.01	**BELANJA OPERASI**	**944.688.569.052,00**	**846.747.316.847,00**	**882.051.005.940,49**	**819.102.320.039,00**	**813.205.153.039,00**	**817.073.828.161,00**	(131.483.416.013,00)	(5.897.167.000,00)
05.01.01	Belanja Pegawai	509.910.851.170,00	465.299.138.789,00	505.222.747,80	529.185.325.039,00	529.185.325.039,00	532.407.717.139,00	19.274.473.869,00	0,00
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	396.611.607.456,00	341.671.467.138,00	339.361.905.663,49	273.935.633.300,00	264.625.527.100,00	264.625.527.100,00	(131.986.080.356,00)	(9.310.106.200,00)
05.01.03	Belanja Bunga	0,00	4.491.189.320,00	0,00	0,00	3.412.939.200,00	4.059.222.222,00	3.412.939.200,00	3.412.939.200,00
05.01.05	Belanja Hibah	37.846.348.807,00	35.285.521.600,00	37.260.797.480,00	15.481.261.700,00	15.481.261.700,00	15.481.261.700,00	(22.365.087.107,00)	0,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	319.761.619,00	0,00	205.555.000,00	500.100.000,00	500.100.000,00	500.100.000,00	180.338.381,00	0,00
05.02	**BELANJA MODAL**	**118.946.156.813,00**	**160.708.909.188,00**	**87.620.507.136,00**	**50.119.712.340,00**	**32.608.990.793,00**	**32.608.990.793,00**	**(86.337.166.020,00)**	**(17.510.721.547,00)**
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.845.868.478,00	20.110.928.821,00	27.126.227.107,00	7.498.934.510,00	7.498.934.510,00	7.498.934.510,00	(21.346.933.968,00)	0,00
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.862.295.012,00	46.525.548.167,00	17.681.013.908,00	16.661.706.570,00	16.661.706.570,00	16.661.706.570,00	(6.200.588.442,00)	0,00
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.753.144.956,00	84.436.432.700,00	34.270.966.215,00	25.959.071.260,00	8.448.349.713,00	8.448.349.713,00	(50.304.795.243,00)	(17.510.721.547,00)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.445.331.986,00	9.473.629.500,00	8.542.299.906,00	0,00	0,00	0,00	(8.445.331.986,00)	0,00

KODE	URAIAN	PAGU RPJMD 2025-2029 PADA TAHUN 2027	REALISASI APBD 2024	REALISASI APBD 2025	APBD 2026	PROYEKSI RKPD 2027	PROYEKSI RKPD 2028	SELISIH PAGU RKPD 2027 DENGAN RPJMD	SELISIH PAGU RKPD 2027 DENGAN APBD 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 7-3*	*10 = 7-6*
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	39.516.381,00	162.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.516.381,00)	0,00
								-	0,00
05.03	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.800.000.000,00**	**463.375.000,00**	**5.289.441.669,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**(800.000.000,00)**	**0,00**
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	5.800.000.000,00	463.375.000,00	5.289.441.669,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(800.000.000,00)	0,00
								-	
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**236.726.628.612,00**	**219.689.210.572,00**	**223.075.691.377,00**	**206.370.691.693,00**	**206.370.691.693,00**	**207.358.207.475,00**	**(30.355.936.919,00)**	**0,00**
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	11.150.093.131,00	5.298.636.723,00	4.006.771.223,00	10.381.920.233,00	10.381.920.233,00	11.369.436.015,00	(768.172.898,00)	0,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.576.535.481,00	214.390.573.849,00	219.068.920.154,00	195.988.771.460,00	195.988.771.460,00	195.988.771.460,00	(29.587.764.021,00)	0,00
								-	
	SURPLUS/DEFISIT (PENDAPATAN-BELANJA)	**48.400.000.000,00**	**53.516.039.618,30**	**6.048.630.177,23**	**(3.979.500.000,00)**	**14.952.037.787,00**	**18.260.869.000,00**	**(33.447.962.213,00)**	**18.931.537.787,00**
								-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**48.400.000.000,00**	**23.366.794.119,30**	**7.232.104.649,96**	**3.979.500.000,00**	**(14.952.037.787,00)**	**(18.260.869.000,00)**	**(63.352.037.787,00)**	**(18.931.537.787,00)**
06.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**51.958.619.184,30**	**7.232.104.649,96**	**3.979.500.000,00**	**3.308.831.213,00**	**0,00**	**3.308.831.213,00**	**(670.668.787,00)**
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	8.472.811.584,30	7.232.104.649,96	3.979.500.000,00	3.308.831.213,00	0,00	3.308.831.213,00	(670.668.787,00)
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	43.485.807.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								-	0,00
06.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**48.400.000.000,00**	**28.591.825.065,00**	**0,00**	**0,00**	**18.260.869.000,00**	**18.260.869.000,00**	**(30.139.131.000,00)**	**18.260.869.000,00**
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	47.400.000.000,00	28.591.825.065,00	0,00	0,00	18.260.869.000,00	18.260.869.000,00	(29.139.131.000,00)	18.260.869.000,00

KODE	URAIAN	PAGU RPJMD 2025-2029 PADA TAHUN 2027	REALISASI APBD 2024	REALISASI APBD 2025	APBD 2026	PROYEKSI RKPD 2027	PROYEKSI RKPD 2028	SELISIH PAGU RKPD 2027 DENGAN RPJMD	SELISIH PAGU RKPD 2027 DENGAN APBD 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 7-3*	*10 = 7-6*
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	8.421.748.037,97	13.280.734.827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2026

3.3 PENDANAAN NON-APBD

Pembangunan infrastruktur strategis merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Provinsi Lampung, termasuk Kabupaten Pesawaran, memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang didukung oleh potensi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi. Namun demikian, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan dalam percepatan penyediaan infrastruktur berskala besar dan berdampak luas.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan memanfaatkan skema pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis. Sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pembiayaan kreatif melalui kemitraan dengan sektor swasta serta pemanfaatan pembiayaan dan hibah dari lembaga internasional. Adapun arah kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang dapat dikembangkan meliputi:

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
   Mendorong penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Public-Private Partnership/PPP) dalam pembangunan infrastruktur strategis, seperti jaringan jalan, pelabuhan, bandar udara, serta sistem transportasi. Melalui skema ini, pembiayaan proyek dapat dilakukan oleh pihak swasta, sementara pemerintah daerah berperan dalam pengaturan, pengawasan, serta penjaminan manfaat sosial dan keberlanjutan layanan publik.
2. Penerbitan Obligasi Daerah
   Mempertimbangkan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki kelayakan ekonomi dan potensi pendapatan jangka panjang, seperti pengembangan kawasan industri, jaringan jalan berbayar, dan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Filantropi
   Memperkuat sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta perusahaan swasta melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan sumber filantropi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
4. Pemanfaatan Pinjaman Daerah secara Terukur dan Berkelanjutan
   Mengakses sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), bank pembangunan daerah, maupun lembaga keuangan lainnya, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian,

pengelolaan risiko yang baik, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang.

5. Penguatan Sinergi dengan BUMN dan BUMD
   Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, khususnya pada sektor energi, air bersih, dan transportasi, guna mendukung pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
6. Pengembangan Pembiayaan Hijau (Green Finance)
   Mendorong pemanfaatan skema pembiayaan hijau yang diarahkan pada proyek-proyek ramah lingkungan, antara lain melalui mekanisme perdagangan karbon (carbon trading), yaitu sistem jual beli kredit karbon antara pihak yang mampu menurunkan emisi dan pihak yang memiliki emisi lebih tinggi, sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim.
7. Skema Pembiayaan Alternatif Lainnya dan Partisipasi Masyarakat
   Mengembangkan berbagai bentuk pembiayaan alternatif lainnya serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, melalui kemitraan publik-swasta, kontribusi swadaya, dan inovasi pembiayaan berbasis komunitas yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.

Tabel 3.5 Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis beserta Sumber Pendanaannya

No	Infrastruktur	Sumber Pendanaan	Calon Mitra	Perkiraan Anggaran	PD Terkait	Kesiapan
1	Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis	APBN, APBD, Pinjaman Daerah, CSR	Investor Dalam dan Luar Negeri	Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah)	Dinas PUPR, Dinas PRKP	Telah tersusun DED, FS
2	Pembangunan Kawasan Industri Tegineneng	APBN, APBD, Investasi	Investor Dalam dan Luar Negeri	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Termuat dalam RTRW, Termuat dalam RDTR, Telah disusun FS dan Masterplan
3	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Pandan	APBN, APBD, Investasi	Investor Dalam dan Luar Negeri	-	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata	Telah disusun FS dan Masterplan
4	Pembangunan Panas Bumi Way Ratai	APBN, APBD, Investasi	Investor Dalam dan Luar Negeri	-	Dinas PUPR	Telah Disusun Master Plan dan FS

No	Infrastruktur	Sumber Pendanaan	Calon Mitra	Perkiraan Anggaran	PD Terkait	Kesiapan
5	Pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Kawasan Pesisir	APBN, APBD, Investasi	Investor Dalam dan Luar Negeri	110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah)	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan	-
6	Pembangunan Stadion	APBN, APBD, Investasi	Investor Dalam dan Luar Negeri	500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah)	Dinas PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga	Telah disusun FS dan Master Plan
7	Pembangunan Terminal Tipe C	APBN, APBD, Investasi	Investor Dalam dan Luar Negeri	50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	Telah disusun FS dan Master Plan
8	Pembangunan TPST	APBN, APBD, KPBU	Investor Dalam dan Luar Negeri	-	Dinas Pertanahan dan LH, Dinas PUPR	Termuat dalam RTRW

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesawaran, 2025-2029

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN BERDASARKAN PRIORITAS KABUPATEN TAHUN 2027

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan pada pada tahun 2027 pada dasarnya merupakan program prioritas yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP; evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Elemen-elemen utama Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 bahwa Provinsi Lampung tercantum sebagai lokasi prioritas lainnya sebagai kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan. Kabupaten Pesawaran yang secara struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian memiliki pelung kontribusi yang besar untuk menyokong Provinsi Lampung sebagai kawasan sentra produksi pangan.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2027 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 memuat kewenangan urusan sebagai berikut:

1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.1 Urusan Pendidikan

1.2 Urusan Kesehatan

1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1.6	Urusan Sosial
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2.1	Urusan Tenaga Kerja
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Urusan Pangan
2.4	Urusan Pertanahan
2.5	Urusan Lingkungan Hidup
2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.9	Urusan Perhubungan
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12	Urusan Penanaman Modal
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.14	Urusan Statistik
2.15	Urusan Persandian
2.16	Urusan Kebudayaan
2.17	Urusan Perpustakaan
2.18	Urusan Kearsipan
3	**URUSAN PILIHAN**
3.1.	Urusan Perikanan dan Kelautan
3.2	Urusan Pariwisata
3.3	Urusan Pertanian
3.4	Urusan Perdagangan
3.5	Urusan Perindustrian
3.6	Urusan Ketransmigrasian
4	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*)**
4.1	Perencanaan
4.2	Keuangan
4.3	Kepegawaian dan Diklat
4.4	Pendidikan dan Pelatihan
4.5	Penelitian dan Pengembangan
4.6	Pengawasan
4.7	Kecamatan
5	**PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN*)**
5.1	Sekretariat DPRD
5.2	Sekretariat Daerah
6	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*)**
6.1	Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 terdapat 122 program pembangunan pemerintah daerah. Seiring dengan berkembangnya dinamika kebijakan pemerintah, maka pada Tahun Perencanaan 2027 Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak menginputkan dua program yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 ke dalam RKPD Tahun 2027 yakni Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan dalam rangka efisiensi anggaran dan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi pada Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja atas hasil Rakortekrenbang Tahun 2026.

5.2 RENCANA PAGU INDIKATIF BELANJA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..

Penyediaan Pagu Indikatif yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total Pagu Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar **Rp1.057.184.835.525,00** sebagai berikut:

1. Pagu indikatif belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan, uang representasi dan lainnya di-*accres* sebesar 2,5% dan secara akumulatif sebesar 30% dari total belanja dalam RKPD Tahun Anggaran 2027. Jumlah pagu anggaran untuk gaji dan tunjangan, uang representasi dan lainnya sebesar Rp529.185.325.039,00 atau 50,06% dari total belanja dalam RKPD Tahun Anggaran 2027.

2. Pagu indikatif belanja bidang pendidikan minimal sebesar 20%. Jumlah pagu anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp344.658.506.334,00 atau 32,60% dari total belanja daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2027.

Tabel 5.1 Pagu Indikatif Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Pagu (Rp)
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	337.333.195.019,00
2	Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.794.642.856,00
3	Belanja pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	3.530.668.459,00
	Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2+3)	344.658.506.334,00

No	Komponen Perhitungan	Pagu (Rp)
	Total Belanja Daerah	1.057.184.835.525,00
	Persentase Rasio Pagu Anggaran Fungsi Pendidikan	32,60%

Sumber : SIPD RI Kabupaten Pesawaran, 2026

Telah memenuhi pagu indikatif fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pesawaran.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

a) Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp337.333.195.019,00 antara lain diuraikan dalam:
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp265.759.741.619,00.
   - Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp71.441.453.400,00.
   - Program Pengendalian Perizinan Pendidikan sebesar Rp10,000,000.00.
   - Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp40.000.000,00.
   - Program Pengembangan Kesenian Tradisional Rp25.000.000,00.
   - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Rp57.000.000,00.
b) Program pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp3.794.642.856,00 antara lain diuraikan dalam:
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.295.506.856,00
   - Program Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp481.075.000,00.
   - Program Pengelolaan Arsip sebesar Rp11.061.000,00.
   - Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sebesar Rp7.000.000,00.
c) Program pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.530.668.459,00, antara lain diuraikan dalam:
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.105.923.459,00.
   - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp220.000.000,00.
   - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp204.745.000,00.

Pagu indikatif belanja bidang kesehatan minimal sebesar 10% dari belanja daerah setelah dikurangi belanja pegawai. Jumlah pagu anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp162.413.382.444,00 atau 30,21% dari total belanja daerah setelah dikurangi Gaji ASN sebesar Rp527.999.510.486,00 dalam RKPD Tahun Anggaran 2027.

Tabel 5.2 Pagu Indikatif Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Pagu (Rp)
1	Belanja pada Dinas Kesehatan	159.510.279.544,00
2	Belanja pada Dinas PPPA & PPKB	2.903.102.900,00
	Anggaran Fungsi Kesehatan (1+2)	162.413.382.444,00
	Total Belanja Daerah	1.057.184.835.525,00
	Gaji ASN	529.185.325.039,00
	Total Belanja dikurangi Gaji ASN	527.999.510.486,00
	Persentase Rasio Pagu Anggaran Fungsi Kesehatan	30,21%

Sumber : SIPD RI Kabupaten Pesawaran, 2026

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai ketentuan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Pesawaran.

Pagu indikatif bidang kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

a) Program pada Dinas Kesehatan (termasuk RSUD dan Puskesmas) sebesar Rp159.510.279.544,00, antara lain diuraikan dalam:
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp101.392.701.894,00.
   - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp47.766.734.750,00.
   - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp7.879.811.900,00.
   - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp2.471.031.000,00.

b) Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.903.102.900,00, antara lain diuraikan dalam:
   - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp2.714.878.800,00.
   - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar Rp170.229.100,00

- Program Pengendalian Penduduk Rp17.995.000,00.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menganggarkan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan *prevalensi* kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita.

3. Pagu indikatif belanja untuk infrastruktur pelayanan publik dialokasikan Rp63.860.144.102,00 atau sebesar 18,76% dari total dana transfer pemerintah diluar transfer ke daerah bawahan dan desa atau sebesar Rp850.814.143.832,00.

Tabel 5.3 Pagu Indikatif Fungsi Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Pagu (Rp)
1	Belanja Daerah	1.057.184.835.525,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:	
	a. belanja bagi hasil	10.381.920.233,00
	b. bantuan keuangan	195.988.771.460,00
	Jumlah (a+b)	206.370.691.693,00
3.	Selisih (1-2)	850.814.143.832,00
4.	Minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40% x Selisih)	340.325.657.532,80
5.	Belanja infrastruktur pelayanan publik yang dialokasikan	63.860.144.102,00
6.	Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik yang dialokasikan (5/3*100%)	18,76%

Sumber : SIPD RI Kabupaten Pesawaran, 2026

Belum memenuhi ketentuan 40% dari minimal belanja infrastruktur pelayanan publik, mengingat hal tersebut bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan : “Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027”.

4. Pagu indikatif anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran sebesar Rp11.445.421.130,00 atau 1,08% dari total belanja daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesawaran sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah, antara lain tercantum pada:
   a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.352.219.530,00.
   b) Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp1.086.601.600,00.
   c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar

Rp6.600.000,00.

Program tersebut dianggarkan untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- Kegiatan pengawasan, yaitu:
  1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
  2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
  3) Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Kepala Daerah, dan evaluasi pelayanan publik;
  4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
- Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
- Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

5. Pagu indikatif untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp5.658.758.831,00 atau 0,54% dari total belanja daerah dalam RKPD Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, antara lain tercantum pada:
   a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp4.657.227.331,00.
   b) Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp764.355.000,00.
   c) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp237.176.500,00.

6. Pagu indikatif belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa dalam RKPD Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp8.780.000.000,00 atau 10% dari total Pendapatan Pajak Daerah, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

7. Pagu indikatif belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa dalam RKPD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp2.048.034.300,00 atau 10% dari total Pendapatan Retribusi Daerah, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

8. Pagu indikatif belanja alokasi dana desa (ADD) kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dalam RKPD Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp195.988.771.460,00 atau 35,186% dari total Pendapatan Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), telah memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Tabel 5.4 Pagu Indikatif Belanja Alokasi Dana Desa

No	Komponen Perhitungan	Pagu (Rp)
1	Dana Perimbangan	731.593.588.000,00
2	Dana Alokasi Khusus	
	a. DAK Fisik	2.706.006.000,00
	b. DAK Non Fisik	171.761.509.000,00
	Jumlah (a+b)	174.467.515.000,00
3.	Selisih (1-2)	557.126.073.000,00
4.	Minimal belanja anggaran dana desa (10% x Selisih)	55.712.607.300,00
5.	Belanja alokasi dana desa yang diproyeksikan pada belanja bantuan keuangan	195.988.771.460,00
6.	Persentase belanja alokasi dana desa yang dialokasikan (5/3*100%)	35,18

Sumber : SIPD Kabupaten Pesawaran, 2025

9. Pagu indikatif dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam RKPD Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp22.853.127.300,00 atau 79,64% dari total pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp28.694.810.940,00, yang tercantum di Dinas Kesehatan pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,5% dari pendapatan pajak rokok.

10. Pagu indikatif dalam rangka penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB) dalam RKPD Tahun Anggaran 2027 dialokasikan sebesar Rp9.509.809.882,00 atau 0,90% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dan telah mendekati pemenuhan proporsi 0,99% dari amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

11. Pagu indikatif Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,06% sebesar Rp634.310.901,32 dan Jaminan Kematian (JKM) dengan tarif 0,15% sebesar Rp1.057.184.835.525,00 yang dikalikan gaji pokok yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pagu Indikatif Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebesar Rp1.057.184.835.525,00 yang dilaksanakan oleh 46 Perangkat Daerah yang terdiri dari 30 Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD, 11 kecamatan dan 1 rumah sakit umum daerah serta 15 puskesmas, sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rencana Pagu Indikatif Belanja Per Perangkat Daerah Tahun 2027

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2027
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	337.333.195.019,00
2	Dinas Kesehatan	83.725.686.338,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	37.482.018.603,00
4	BLUD Puskesmas	38.302.574.603,00
4.a	*BLUD Puskesmas Gedong Tataan*	3.458.395.609,00
4.b	*BLUD Puskesmas Roworejo*	2.825.598.535,00
4.c	*BLUD Puskesmas Bernung*	2.587.101.035,00
4.d	*BLUD Puskesmas Trimulyo*	2.154.253.065,00
4.e	*BLUD Puskesmas Tegineneng*	2.470.529.618,00
4.f	*BLUD Puskesmas Kedondong*	2.889.635.000,00
4.g	*BLUD Puskesmas Kota Dalam*	2.511.934.020,00
4.h	*BLUD Puskesmas Bunut*	3.076.630.947,00
4.i	*BLUD Puskesmas Padang Cermin*	3.049.063.663,00
4.j	*BLUD Puskesmas Hanura*	3.541.769.226,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2027
4.k	*BLUD Puskesmas Pedada*	2.375.454.525,00
4.l	*BLUD Puskesmas Kalirejo*	2.834.515.000,00
4.m	*BLUD Puskesmas Maja*	1.889.902.541,00
4.n	*Puskesmas Gunung Sari*	1.301.555.000,00
4.o	*Puskesmas Kota Jawa*	1.336.236.819,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.822.724.665,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.567.680.839,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16.976.778.476,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.728.212.100,00
9	Dinas Sosial	3.834.445.444,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.395.249.458,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.747.627.699,00
12	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.954.584.288,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.705.425.387,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.267.724.175,00
15	Dinas Perhubungan	9.165.109.334,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.621.832.876,00
17	Dinas Koperasi, dan UMKM dan Tenaga Kerja	4.219.617.713,00
18	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.745.960.128,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.530.668.459,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.794.642.856,00
21	Dinas Perikanan	3.612.350.264,00
22	Dinas Pariwisata	4.439.541.486,00
23	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	12.584.044.222,00
24	Dinas Perkebunan dan Peternakan	5.292.807.496,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.231.004.436,00
26	Sekretariat Daerah Kabupaten	44.876.737.522,00
27.a	*Bagian Tata Pemerintahan*	*255.703.200,00*
27.b	*Bagian Kesejahteraan Rakyat*	*3.422.881.700,00*

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF 2027
27.c	*Bagian Hukum*	*585.827.050,00*
27.d	*Bagian Kerja Sama*	*94.276.850,00*
27.e	*Bagian Perekonomian*	*77.235.000,00*
27.f	*Bagian Administrasi Pembangunan*	*128.494.000,00*
27.g	*Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*	*183.002.000,00*
27.h	*Bagian Sumber Daya Alam*	*103.697.850,00*
27.i	*Bagian Umum*	*29.268.879.578,00*
27.j	*Bagian Organisasi*	*693.390.000,00*
27.k	*Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	*2.322.675.200,00*
27.l	*Bagian Perlengkapan*	*7.740.675.094,00*
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.242.661.685,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.970.516.619,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	257.617.769.265,00
31	Badan Pendapatan Daerah	11.555.452.495,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.658.758.831,00
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.028.743.949,00
34	Inspektorat	11.445.421.130,00
35	Kecamatan Gedongtataan	1.846.341.957,00
36	Kecamatan Negeri Katon	1.732.283.318,00
37	Kecamatan Tegineneng	1.666.307.026,00
38	Kecamatan Way Lima	1.651.608.103,00
39	Kecamatan Padang Cermin	1.506.756.122,00
40	Kecamatan Punduh Pedada	1.441.546.359,00
41	Kecamatan Kedondong	1.620.676.594,00
42	Kecamatan Marga Punduh	1.536.702.130,00
43	Kecamatan Way Khilau	1.559.815.022,00
44	Kecamatan Teluk Pandan	1.603.264.845,00
45	Kecamatan Way Ratai	1.455.038.007,00
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.086.928.182,00
JUMLAH		**1.057.184.835.525,00**

Sumber : SIPD RI Kabupaten Pesawaran, 2027

Adapun rencana program dan kegiatan prioritas daerah dijabarkan pada Rekapitulasi Daftar Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027 sebagaimana dibawah ini.

5.2.1 PAGU PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tabel 5.6 Rekapitulasi Daftar Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					265.759.741.619,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**PRIORITAS**				**1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					71.441.453.400,00
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APS)	%	99,93	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (APS)	%	99,14	99,93	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	0,00		Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	0,00	0,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	%	82,94		Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	%	77,60	82,94	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	%	99,93		Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	%	99,14	99,93	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**PRIORITAS**				**1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**					10.000.000,00
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan		Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	100,00	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	100,00	100,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					101.392.701.894,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0002 - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0003 - BLUD Puskesmas Gedong Tataan

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD Puskesmas Roworejo
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0005 - BLUD Puskesmas Bernung
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0006 - BLUD Puskesmas Trimulyo
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0007 - BLUD Puskesmas Tegineneng
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0008 - BLUD Puskesmas Kedondong
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0009 - BLUD Puskesmas Kota Dalam
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0010 - BLUD Puskesmas Bunut
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0011 - BLUD Puskesmas Padang Cermin
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0012 - BLUD Puskesmas Hanura
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0013 - BLUD Puskesmas Pedada
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0014 - BLUD Puskesmas Kalirejo
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0015 - BLUD Puskesmas Maja
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Gunung Sari
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Kota Jawa
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	**PRIORITAS**				**1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN**					47.766.734.750,00

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0002 - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0002 - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0003 - BLUD Puskesmas Gedong Tataan
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0003 - BLUD Puskesmas Gedong Tataan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD Puskesmas Roworejo
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD Puskesmas Roworejo
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0005 - BLUD Puskesmas Bernung
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0005 - BLUD Puskesmas Bernung
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0006 - BLUD Puskesmas Trimulyo
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0006 - BLUD Puskesmas Trimulyo
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0007 - BLUD Puskesmas Tegineneng
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0007 - BLUD Puskesmas Tegineneng
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0008 - BLUD Puskesmas Kedondong
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0008 - BLUD Puskesmas Kedondong

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0009 - BLUD Puskesmas Kota Dalam
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0009 - BLUD Puskesmas Kota Dalam
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0010 - BLUD Puskesmas Bunut
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0010 - BLUD Puskesmas Bunut
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0011 - BLUD Puskesmas Padang Cermin
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0011 - BLUD Puskesmas Padang Cermin
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0012 - BLUD Puskesmas Hanura
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0012 - BLUD Puskesmas Hanura
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0013 - BLUD Puskesmas Pedada
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0013 - BLUD Puskesmas Pedada
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0014 - BLUD Puskesmas Kalirejo
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0014 - BLUD Puskesmas Kalirejo
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0015 - BLUD Puskesmas Maja
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0015 - BLUD Puskesmas Maja
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Gunung Sari
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Gunung Sari
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000	7,00	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000	8,00	7,00	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Kota Jawa

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
			Kelahiran Hidup				Kelahiran Hidup			
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,37		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,80	11,37	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Kota Jawa
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**PRIORITAS**				**1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**					7.879.811.900,00
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	86,00	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	82,00	86,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					1.02.0.00.0.00.01.0002 - BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**PRIORITAS**				**1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**					0,00
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	%	100,00	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	%	100,00	100,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**PRIORITAS**				**1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**					2.471.031.000,00
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	35,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	25,00	35,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	94,76	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	92,98	94,76	1.02.0.00.0.00.01.0003 - BLUD Puskesmas Gedong Tataan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100,00	100,00	1.02.0.00.0.00.01.0004 - BLUD Puskesmas Roworejo
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	90,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	90,00	90,00	1.02.0.00.0.00.01.0005 - BLUD Puskesmas Bernung
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	95,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	95,00	95,00	1.02.0.00.0.00.01.0006 - BLUD Puskesmas Trimulyo
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%			1.02.0.00.0.00.01.0008 - BLUD Puskesmas Kedondong
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100,00	100,00	1.02.0.00.0.00.01.0009 - BLUD Puskesmas Kota Dalam
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	85,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	75,00	85,00	1.02.0.00.0.00.01.0010 - BLUD Puskesmas Bunut
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	85,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	80,00	85,00	1.02.0.00.0.00.01.0011 - BLUD Puskesmas Padang Cermin
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	70,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	60,00	70,00	1.02.0.00.0.00.01.0012 - BLUD Puskesmas Hanura

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100,00		1.02.0.00.0.00.01.0013 - BLUD Puskesmas Pedada
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	90,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	90,00	90,00	1.02.0.00.0.00.01.0014 - BLUD Puskesmas Kalirejo
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100,00	100,00	1.02.0.00.0.00.01.0015 - BLUD Puskesmas Maja
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	0,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	0,00	0,00	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Gunung Sari
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	93,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	91,00	93,00	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Kota Jawa
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100,00	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	100,00	100,00	1.02.0.00.0.00.01.0007 - BLUD Puskesmas Tegineneng
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					6.964.442.170,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**PRIORITAS**				**1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					2.050.000.000,00
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	90,50	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	88,50	90,50	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	%	26,12		Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	%	23,62	26,12	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	12,31		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	9,81	12,31	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**PRIORITAS**				**1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					700.000.000,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	87,50	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	86,50	87,50	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**PRIORITAS**				**1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**					50.000.000,00
Meningkatnya layanan persampahan regional		Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	47,78	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	37,78	47,78	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**PRIORITAS**				**1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**					350.000.000,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	88,00	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	86,00	88,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**PRIORITAS**				**1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**					3.225.000.000,00
Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	100,00	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	100,00	100,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**PRIORITAS**				**1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**					75.000.000,00
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100,00	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100,00	100,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**PRIORITAS**				**1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					10.242.045.077,00
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Kemantapan Jalan	%	61,28	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	%	55,28	61,28	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**PRIORITAS**				**1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**					166.237.418,00
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	100,00	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	100,00	100,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**PRIORITAS**				**1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**					1.000.000.000,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	%	100,00	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	%	100,00	100,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.967.547.262,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**PRIORITAS**				**1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**					178.241.500,00
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	58,91	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	52,91	58,91	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	%	59,97	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	%	53,97	59,97	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
memperoleh fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni		pemerintah kabupaten/kota			fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	pemerintah kabupaten/kota				
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**PRIORITAS**				**1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					1.883.364.480,00
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	2,80	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0,79	2,80	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**PRIORITAS**				**1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**					1.422.286.000,00
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh		Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	3,81	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	1,80	3,81	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**PRIORITAS**				**1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**					5.116.241.597,00
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	98,95	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	98,85	98,95	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					19.478.454.176,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PRIORITAS**				**1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					596.136.400,00
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada		Persentase penegakan PERDA	%	100,00	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase penegakan PERDA	%	100,00	100,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase kasus yang diselesaikan	%	100,00	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase kasus yang diselesaikan	%	100,00	100,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	100,00	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	100,00	100,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS					Meningkatnya kapasitas SDM PPNS					
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**PRIORITAS**				**1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**					367.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100,00	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100,00	100,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100,00	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100,00	100,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100,00	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100,00	100,00	1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**PRIORITAS**				**1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**					263.400.000,00
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran			%		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran		%			
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100,00	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100,00	100,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.173.044.444,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**PRIORITAS**				**1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**					68.766.000,00
Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PPKS	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penanganan PPKS	%	100,00	100,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**PRIORITAS**				**1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**					366.760.000,00
Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100,00	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100,00	100,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**PRIORITAS**				**1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**					94.655.000,00
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%			1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**PRIORITAS**				**1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA**					131.220.000,00
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100,00	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100,00	100,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PRIORITAS**				**2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**					21.301.700,00

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	60,00	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	50,00	60,00	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PRIORITAS**				**2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**					53.975.900,00
Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	80,00	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	80,00	80,00	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**PRIORITAS**				**2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**					146.562.850,00
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	%	70,00	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	%	50,00	70,00	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**PRIORITAS**				**2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**					217.236.900,00
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55,82	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	55,30	55,82	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	0,01		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	0,01	0,01	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**PRIORITAS**				**2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**					164.468.000,00
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**PRIORITAS**				**2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**					14.780.000,00
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	100,00	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	0,00	100,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**PRIORITAS**				**2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**					76.615.000,00
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	61,09	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	60,59	61,09	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**PRIORITAS**				**2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**					265.060.000,00
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	65,82	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	65,32	65,82	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
dan perlakuan salah lainnya terhadap anak					perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.246.347.699,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	**PRIORITAS**				**2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**					60.000.000,00
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	15,00	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	5,00	15,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**PRIORITAS**				**2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					393.780.000,00
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,50	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,00	94,50	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**PRIORITAS**				**2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**					32.500.000,00
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2,00	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2,00	2,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**PRIORITAS**				**2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**					15.000.000,00
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	95,00	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	94,00	95,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**PRIORITAS**				**2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**					18.000.000,00
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**PRIORITAS**				**2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**					10.000.000,00
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	100,00	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	100,00	100,00	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**PRIORITAS**				**2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**					23.300.000,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100,00	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100,00	100,00	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.204.968.288,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**PRIORITAS**				**2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**					146.000.000,00
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100,00	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**PRIORITAS**				**2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**					82.000.000,00
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air	Indeks	71,54	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,34	71,54	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	72,02		Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,62	72,02	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**PRIORITAS**				**2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**					360.000.000,00
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase RTH	%	58,43	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	%	58,29	58,43	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**PRIORITAS**				**2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**					10.000.000,00
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	70,00	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	60,00	70,00	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**PRIORITAS**				**2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN**					30.000.000,00

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
Meningkatnya kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100,00	Meningkatnya kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100,00	100,00	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**PRIORITAS**				**2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**					10.000.000,00
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**PRIORITAS**				**2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					2.060.316.000,00
Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	1,14	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	1,10	1,14	2.10.2.11.0.00.03.0000 - Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					4.548.179.387,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.12.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**PRIORITAS**				**2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**					115.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	15,00	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3,00	15,00	2.12.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	85,00		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	75,00	85,00	2.12.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**PRIORITAS**				**2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL**					17.246.000,00
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	100,00	2.12.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	100,00	2.12.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	100,00	2.12.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	100,00	2.12.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**PRIORITAS**				**2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**					25.000.000,00

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	%	95,00	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	%	85,00	95,00	2.12.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.557.070.131,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	**PRIORITAS**				**2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA**					4.668.500,00
Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100,00	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	0,00	100,00	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**PRIORITAS**				**2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**					4.509.557.294,00
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100,00	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100,00	100,00	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100,00		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100,00	100,00	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**PRIORITAS**				**2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**					179.337.950,00
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100,00	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100,00	100,00	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100,00		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100,00	100,00	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.753.986.658,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**PRIORITAS**				**2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**					2.714.878.800,00
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PRIORITAS	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	68,81	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	68,41	68,81	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,60		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,80	9,60	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**PRIORITAS**				**2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**					170.229.100,00
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	PRIORITAS	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	97,60	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	97,50	97,60	2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					5.226.218.792,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**PRIORITAS**				**2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					3.845.303.042,00
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Konektivitas Darat	%	100,00	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	%	100,00	100,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	22,59		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	21,75	22,59	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**PRIORITAS**				**2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**					93.587.500,00
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut		Konektivitas Laut (Unit)	Unit	100,00	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Unit)	Unit	100,00	100,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					4.529.324.876,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**PRIORITAS**				**2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					2.248.180.000,00
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	100,00	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	100,00	100,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**PRIORITAS**				**2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					756.177.000,00
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Indeks SPBE	Poin	3,91	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Poin	3,69	3,91	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.538.241.613,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**PRIORITAS**				**2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					0,00
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	70,00	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	50,00	70,00	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**PRIORITAS**				**2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**					120.186.300,00
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	100,00	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	100,00	100,00	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**PRIORITAS**				**2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**					58.426.000,00
Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	100,00	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	30,00	100,00	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**PRIORITAS**				**2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					81.369.600,00
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	70,00	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	60,00	70,00	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Pertumbuhan Wirausaha	%	70,00		Pertumbuhan Wirausaha	%	60,00	70,00	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**PRIORITAS**				**2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					199.553.750,00
Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	15,00	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	10,00	15,00	2.17.2.07.0.00.06.0000 - Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.394.766.128,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**PRIORITAS**				**2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					5.037.000,00
Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100,00	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100,00	100,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**PRIORITAS**				**2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					314.682.000,00

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100,00	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100,00	100,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**PRIORITAS**				**2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					31.475.000,00
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100,00	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100,00	100,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.105.923.459,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**PRIORITAS**				**2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**					204.745.000,00
Meningkatnya daya saing kepemudaan		Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,00	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,00	0,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**PRIORITAS**				**2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**					220.000.000,00
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga		Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Tingkat Provinsi	%	8,93	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Tingkat Provinsi	%	6,67	8,93	2.19.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**PRIORITAS**				**2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					74.500.000,00
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,52	4,02	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3,52	3,52	4,02	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**PRIORITAS**				**2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					13.651.000,00
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	%	100,00	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	%	100,00	100,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**PRIORITAS**				**2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					40.000.000,00
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**PRIORITAS**				**2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					25.000.000,00
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100,00	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100,00	100,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**PRIORITAS**				**2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					57.000.000,00
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	100,00	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	100,00	100,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	66,67		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	50,00	66,67	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.295.506.856,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100,00	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100,00	100,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**PRIORITAS**				**2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**					481.075.000,00
Meningkatnya kualitas Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	65,00	Meningkatnya kualitas Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	57,00	65,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	8,50		Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	6,37	8,50	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**PRIORITAS**				**2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**					7.000.000,00
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	7,00	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	0,00	7,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**PRIORITAS**				**2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**					11.061.000,00
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	40,00	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	25,00	40,00	2.23.2.24.0.00.02.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.556.663.664,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**PRIORITAS**				**3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					28.386.600,00
Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	15.866,40	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	14.300,20	15.866,40	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**PRIORITAS**				**3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					9.500.000,00
Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	7.435,20	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	6.744,00	7.435,20	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**PRIORITAS**				**3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**					8.300.000,00
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati		Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	85,00	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	83,00	85,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**PRIORITAS**				**3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**					9.500.000,00
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/KAP/TH	24,00	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/KAP/TH	23,94	24,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					4.248.810.986,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					**3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					83.165.500,00
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	%	5,00	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	%	5,00	5,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					**3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					35.815.000,00
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Persentase Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	%	100,00	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	%	100,00	100,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					**3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**					53.115.000,00
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	100,00	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	100,00	100,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**PRIORITAS**				**3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**					18.635.000,00
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	100,00	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	100,00	100,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					15.545.203.068,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00	3.27.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**PRIORITAS**				**3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					609.012.100,00

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	5,00	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	5,00	5,00	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1,50		Peningkatan Produksi Hortikultura	%	1,50	1,50	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	1,08	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	1,06	1,08	3.27.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**PRIORITAS**				**3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					1.241.199.800,00
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	8.452,00	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	8.452,00	8.452,00	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	8.452,00	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	8.452,00	8.452,00	3.27.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**PRIORITAS**				**3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**					94.615.400,00
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	3,00	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	3,00	3,00	3.27.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	10,00		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	5,00	10,00	3.27.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**PRIORITAS**				**3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					100.000.000,00
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	77,00	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	75,00	77,00	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	52,00		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	50,00	52,00	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**PRIORITAS**				**3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					286.821.350,00
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	70,00	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	50,00	70,00	3.27.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	1,00	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	1,00	1,00	3.27.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	60,00		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	50,00	60,00	3.27.0.00.0.00.05.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					4.855.217.686,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Predikat Sakip (Angka)	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Predikat Sakip (Angka)	Angka	B	B	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**PRIORITAS**				**3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**					20.000.000,00
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100,00	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	0,00	100,00	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**PRIORITAS**				**3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					689.860.800,00
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	100,00	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	100,00	100,00	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					**3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**					167.170.000,00
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100,00	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100,00	100,00	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					**3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**					146.164.000,00
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Barang	Nilai	3,45	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Nilai	3,38	3,45	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					**3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**					54.250.000,00
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100,00	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100,00	100,00	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					**3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**					66.667.650,00
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	100,00	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	100,00	100,00	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**PRIORITAS**				**3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**					221.449.300,00
Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	100,00	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	100,00	100,00	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**PRIORITAS**				**3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**					10.225.000,00
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	100,00	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	100,00	100,00	3.30.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**PRIORITAS**				**3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					13.129.300,00
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi		Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%			2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**PRIORITAS**				**3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**					3.961.000,00

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	100,00	100,00	2.13.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					40.025.619.872,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten
Meningkatnya kualitas layanan administrasi, protokoler, dan kehumasan pimpinan daerah		Daerah Persentase acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/Wakil Bupati/Sekda yang terlaksana tepat waktu, sesuai protokol, dan memenuhi standar SOP	%	100,00	Meningkatnya kualitas layanan administrasi, protokoler, dan kehumasan pimpinan daerah	Daerah Persentase acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/Wakil Bupati/Sekda yang terlaksana tepat waktu, sesuai protokol, dan memenuhi standar SOP	%	100,00	100,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	34,00	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	33,00	34,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**PRIORITAS**				**4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					4.358.688.800,00
Meningkatnya fasilitasi kerjasama antar daerah dan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat		Nilai LPPD Kabupaten	Poin	2,70	Meningkatnya fasilitasi kerjasama antar daerah dan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	Nilai LPPD Kabupaten	Poin	2,60	2,70	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	100,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan		Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%	100,00	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%	100,00	100,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					**4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**					492.428.850,00
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	85,00	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	80,00	85,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	3,00	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	2,00	3,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Kabupaten
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					32.440.461.185,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**PRIORITAS**				**4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					7.802.200.500,00
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100,00	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100,00	100,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100,00		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100,00	100,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100,00	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100,00	100,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					5.393.771.119,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**PRIORITAS**				**5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**					240.745.500,00
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100,00	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100,00	100,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100,00		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100,00	100,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**PRIORITAS**				**5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					336.000.000,00
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	100,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	100,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100,00	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100,00	100,00	5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					42.050.705.897,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**PRIORITAS**				**5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					224.316.239.093,00
Meningkatnya tata kelola anggaran		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	30,00	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	30,00	30,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	27,80		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	27,80	27,80	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	100,00	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	100,00	100,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Penurunan SILPA	%	0,00		Persentase Penurunan SILPA	%	0,00	0,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100,00	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**PRIORITAS**				**5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					944.996.700,00
Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	100,00	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	66,00	100,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	100,00	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	100,00	100,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**PRIORITAS**				**5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					1.861.280.070,00
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	11,49	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,13	11,49	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	100,00	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	100,00	100,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100,00	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100,00	100,00	5.02.0.00.0.00.03.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					4.657.227.331,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**PRIORITAS**				**5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**					764.355.000,00
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	85,00	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	60,00	85,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	13,14	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	10,29	13,14	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	54,20	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	53,96	54,20	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	100,00	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	100,00	100,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**PRIORITAS**				**5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					237.176.500,00
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional		Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	20,45	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	20,24	20,45	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	100,00	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	82,86	100,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	1,60	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	1,40	1,60	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis		Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	19,57	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	19,45	19,57	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					2.959.434.349,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**PRIORITAS**				**5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					69.309.600,00
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	51,00	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	0,00	51,00	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	51,00	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	0,00	51,00	5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah					Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah					5.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					10.352.219.530,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**PRIORITAS**				**6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**					1.086.601.600,00
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	75,00	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	70,00	75,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**PRIORITAS**				**6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**					6.600.000,00
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,00	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,00	3,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					17.548.602.992,00
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Gedongtataan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Negeri Katon
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tegineneng
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Way Lima
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Padang Cermin
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Punduh Pedada
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Kedondong

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Marga Punduh
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Way Khilau
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Teluk Pandan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Way Ratai
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PRIORITAS**				**7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					28.068.476,00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Negeri Katon
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Way Lima
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Padang Cermin
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Punduh Pedada
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Kedondong
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Marga Punduh
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Way Khilau
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Teluk Pandan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Way Ratai
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Gedongtataan

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik					
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik		Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan Dengan Baik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tegineneng
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PRIORITAS**				**7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					43.668.015,00
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Gedongtataan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Negeri Katon
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tegineneng
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Way Lima
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Padang Cermin
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Punduh Pedada
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Kedondong
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Marga Punduh
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Way Khilau
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Teluk Pandan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	%	100,00	100,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Way Ratai
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PRIORITAS**				**8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					3.191.189.532,00

RPJMD 2027					RKPD 2027					PAGU / PERANGKAT DAERAH
PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS/TIDAK PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Angka	B	B	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**PRIORITAS**				**8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**					322.282.650,00
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100,00	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100,00	100,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**PRIORITAS**				**8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**					1.069.856.000,00
Meningkatnya etika dan budaya politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100,00	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100,00	100,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**PRIORITAS**				**8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**					770.000.000,00
Meningkatnya Ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	75,00	Meningkatnya Ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	50,00	75,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**PRIORITAS**				**8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**					733.600.000,00
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100,00	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100,00	100,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH BELANJA										1.057.184.835.525,00

Sumber : SIPD RI Kabupaten Pesawaran, 2026

5.2.2 PAGU PROGRAM TEMATIK PEMBANGUNAN

Tabel 5.7 Rekapitulasi Daftar Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2027

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Revitalisasi Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Ya	1 Dokumen	46.431.000,00
2	MBG	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Ya	100 orang	48.300.000,00
3	Revitalisasi Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Ya	1 Dokumen	40.000.000,00
4	Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Ya	2 Kegiatan	15.000.000,00
5	Digitalisasi Pembelajaran, Pengarusutamaan Gender	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL	Ya	175 orang	38.190.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kapasitas Bidang Pendidikan	Kapasitas Bidang Pendidikan	untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
6	Revitalisasi Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Ya	1 Dokumen	15.000.000,00
7	Digitalisasi Pembelajaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Ya	100 orang	51.720.000,00
8	Digitalisasi Pembelajaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Ya	50 orang	30.000.000,00
9	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit	Ya	1 Rumah Sakit	98.000.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
10	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	ya	403 orang	43.350.000,00
11	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	868 orang	20.100.000,00
12	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	574 orang	11.400.000,00
13	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	281 orang	14.700.000,00
14	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	Ya	815 orang	27.300.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota			Pelayanan Sesuai Standar			
15	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	345 orang	30.300.000,00
16	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	501 orang	27.900.000,00
17	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	254 orang	21.300.000,00
18	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	583 orang	17.400.000,00
19	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	454 orang	12.150.000,00
20	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	519 orang	27.150.000,00
21	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	Ya	8365 orang	890.000.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang Terduga Tuberkulosis	Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
22	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	468 orang	10.800.000,00
23	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	644 orang	30.300.000,00
24	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	675 orang	69.750.000,00
25	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Ya	472 orang	21.900.000,00
26	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	114.365.000,00
27	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	ya	4715 Dokumen	142.830.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	126.010.000,00
29	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	118.785.000,00
30	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	128.790.000,00
31	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	12 Dokumen	115.960.000,00
32	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	108.235.000,00
33	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	134.330.000,00
34	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	12 Dokumen	133.275.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota						
35	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	12 Dokumen	141.100.000,00
36	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	117.950.000,00
37	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	118.200.000,00
38	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	139.780.000,00
39	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	142.220.000,00
40	Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Ya	1 Dokumen	116.865.000,00
41	Pemeriksaan Kesehatan Gratis,	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	Ya	1 Dokumen	22.853.127.300,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jaminan Kesehatan Nasional	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kesehatan Masyarakat			
42		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ya	1 Dokumen	75.000.000,00
43		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Ya	15 Unit	56.700.000,00
44	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Ya	1550 orang	25.010.000,00
45		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Ya	6 orang	8.520.000,00
46		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Ya	980 orang	465.067.880,00
47	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	umlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	359.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Dokumen	600.000,00
49	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	490.000,00
50	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	600.000,00
51	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	300.000,00
52	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	umlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	350.000,00
53	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	umlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	150.000,00
54	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	umlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	150.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota						
55	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	umlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	12 Dokumen	310.000,00
56	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	umlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	1.050.000,00
57	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	27.700.000,00
58	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	700.000,00
59	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	900.000,00
60	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Ya	1 Dokumen	665.000,00
61	Pengarusutamaan Gender, Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan	Ya	1 Dokumen	620.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			upaya kesehatan ibu dan anak			
62	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Laporan	10.857.000,00
63	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Laporan	22.125.000,00
64	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Laporan	22.500.000,00
65	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Laporan	24.450.000,00
66	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	12 Laporan	17.850.000,00
67	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	12 Laporan	28.200.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	33 Laporan	40.200.000,00
69	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Laporan	18.000.000,00
70	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Laporan	19.800.000,00
71	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	12 Laporan	20.550.000,00
72	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Laporan	24.225.000,00
73	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Dokumen	28.275.000,00
74	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan	Ya	1 Laporan	35.350.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota			Kesehatan Penyakit Menular			
75	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Laporan	24.450.000,00
76	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Ya	1 Dokumen	22.800.000,00
77	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Laporan	50.175.000,00
78	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Laporan	78.750.000,00
79	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Laporan	53.850.000,00
80	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Ya	1 Laporan	53.400.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyakit Tidak Menular			
81	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Laporan	40.050.000,00
82	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	12 Laporan	60.225.000,00
83	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	12 Laporan	47.025.000,00
84	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	33 Laporan	74.350.000,00
85	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Laporan	49.650.000,00
86	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan	Ya	1 Laporan	44.100.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota			Kesehatan Penyakit Tidak Menular			
87	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	12 Laporan	91.950.000,00
88	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Laporan	42.000.000,00
89	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Laporan	72.750.000,00
90	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Laporan	6.300.000,00
91	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Ya	1 Laporan	48.015.000,00
92	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan	Ya	1 Laporan	179.400.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyakit Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular			
93	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Ya	330 orang	4.354.999.900,00
94	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Ya	140 orang	3.229.500.000,00
95	Perlindungan Anak	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Ya	60 orang	30.000.000,00
96	Perlindungan Anak	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Ya	60 orang	40.000.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kewenangan Kabupaten/Kota			
97	Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Syariah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Ya	33	45.830.000,00
98	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Ya	100 orang	20.000.000,00
99	Jaminan Kesehatan Nasional, Sekolah Rakyat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Ya	600 orang	22.245.000,00
100	Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terfasilitasinya Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ya	730 orang	6.580.000,00
101	Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang	Ya	40 orang	18.815.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.			
102	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	TIDAK		
102	Masyarakat Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Ya	0 dokumen	10.000.000,00
103	Masyarakat Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Ya	0 dokumen	10.000.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
104	Ekonomi Syariah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Ya	5 laporan	28.456.000,00
105	Perlindungan Anak	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	umlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Ya	1 Berita Acara	27.988.000,00
106	EKONOMI SYARIAH	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
107		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Ya	50 Unit Usaha	-
108		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan	Ya	20 Pelaku Usaha	20.000.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata			
109		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Ya	1 Dokumen	5.000.000,00
110		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Ya	5 Laporan	28.456.000,00
111	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Ya	148 Unit Usaha	43.858.000,00
112	MAKAN BERGIZI GRATIS	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
113		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta			

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
114		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Ya	1 Dokumen	10.000.000,00
115		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Ya	20 Unit Usaha	2.886.000,00
116	PENGENDALIAN INFLASI	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ya	1 Laporan	30.000.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PANGAN MASYARAKAT	dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Konsumen di Kabupaten/Kota	dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			
117		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Ya	1 Dokumen	10.000.000,00
118		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Ya	12 Laporan	5.000.000,00
119	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
120		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kewenangan Kabupaten/Kota			
121		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota			
122		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ya	1 Dokumen	10.000.000,00
123	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
124		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
125		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun			

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Ya	150 Keluarga	110.000.000,00
127		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			
128	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Ya	200 Orang	9.000.000,00
129		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Ya	2 Kelompok	6.000.000,00
130		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Ya	6 Unit	10.386.600,00
131	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota			

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)		(RRTR) Kabupaten/Kota						
132		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Ya	1 Unit	60.000.000,00
133		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Tidak	0 Unit	
134		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ya	10 Ha	16.000.000,00
135		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ya	1 Dokumen	13.000.000,00
136	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	Ya	11 Unit	81.846.000,00
137		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Ya	11 Unit	110.000.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara			
138	PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
139		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
140		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Tidak		
141		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota			

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	Ya	2,5	500.000.000,00
143				Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM	Ya	1	500.000.000,00
144			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	Ya	3	650.000.000,00
145				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	Ya	1	400.000.000,00
146		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	Ya	100	450.000.000,00
147		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	Ya	1	250.000.000,00
148		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	Ya	1,5	3.200.000.000,00
149				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	Ya	2	950.000.000,00
150				Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	Ya	3,5	5.692.045.077,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	Km	Ya	1,5	250.000.000,00
152				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	Ya	10	200.000.000,00
153		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Ya	1	930.000.000,00
154									
155	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	Ya	50	1.065.000.000,00
156				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	Ya	0,5	139.334.480,00
157		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Ya	60	1.292.686.000,00
158				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang	Unit Rumah	Ya	3	126.600.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				
159		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	Ya	40	4.997.936.697,00
160									
161	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Ya	19	81.000.000,00
162				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Ya	135	3.453.158.042,00
163									
164	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Ya	400	60.000.000,00
165			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Ya	1	10.000.000,00
166									
167	PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar	Dokumen	Ya	12	1.226.316.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				
168				Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	Ya	13.849,56	189.000.000,00
169				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	Ya	4.500	320.000.000,00
170				Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	Ya	4.500	15.000.000,00
171									
172	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	Ya	100	69.780.000,00

NO	PROSN	SUBKEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
	PROYEK/KEGIATAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					
173				Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	Ya	180.000	1.965.000.000,00

Sumber : SIPD RI Kabupaten Pesawaran, 2026

5.2.3 PAGU PROGRAM SPM

Tabel 5.8 Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Tahun 2027

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	TIDAK		-
2	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	TIDAK		-
3	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	YA	17 Unit	1.984.963.400
4	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	TIDAK		-
5	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	TIDAK		-
6	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	YA	650 Orang	300.000.000
7	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	YA	15 Satuan Pendidikan	10.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	YA	301 Satuan Pendidikan	38.014.998.133
9	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	YA	200 Orang	78.376.200
10	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	TIDAK		-
11	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	TIDAK		-
12	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	YA	1 Dokumen	46.431.000
13	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	YA	5 Dokumen	52.204.500
14	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	YA	1 Komunitas Belajar	10.000.000
15	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					kekerasan, dan intoleransi					
16	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	TIDAK		-
17	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	TIDAK		-
18	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	YA	730 Paket	547.500.000
19	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	TIDAK		-
20	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	YA	5 Unit	1.054.000.000
21	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	YA	100 Orang	48.300.000
22	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	YA	300 Satuan Pendidikan	50.000.000
23	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	TIDAK		-
25	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	TIDAK		-
26	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	TIDAK		-
27	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	TIDAK		-
28	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	YA	1 Unit	95.000.000
29	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TIDAK		-
30	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TIDAK		-
31	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	TIDAK		-
32	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	YA	342 Peserta Didik	1.028.100.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	YA	50 Peserta Didik	111.950.000
34	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	TIDAK		-
35	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	YA	200 Orang	69.550.000
36	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	YA	70 Satuan Pendidikan	70.000.000
37	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	TIDAK		-
38	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	TIDAK		-
39	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	YA	1 Dokumen	40.000.000
41	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	YA	5 Dokumen	51.314.500
42	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	TIDAK		-
43	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	YA	2 Kegiatan	15.000.000
44	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	YA	70 Satuan Pendidikan	50.000.000
45	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	TIDAK		-
46	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	YA	175 Orang	38.190.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	TIDAK		-
48	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	YA	530 Paket	530.000.000
49	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0065 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	TIDAK		-
50	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0066 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	TIDAK		-
51	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	TIDAK		-
52	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	TIDAK		-
53	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	TIDAK		-
54	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	TIDAK		-
55	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	YA	100 Orang	19.523.800

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Satuan Pendidikan PAUD	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
56	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	YA	150 Satuan Pendidikan	71.060.000
57	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	TIDAK		-
58	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	TIDAK		-
59	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	YA	1 Dokumen	15.000.000
60	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	YA	1 Dokumen	15.000.000
61	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	TIDAK		-
62	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	TIDAK		-
63	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan,	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kekerasan, dan intoleransi	pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
64	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	YA	100 Orang	51.720.000
65	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	TIDAK		-
66	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	TIDAK		-
67	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	TIDAK		-
68	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0043 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	TIDAK		-
69	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0044 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	TIDAK		-
70	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	YA	7 Paket	60.000.000
72	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TIDAK		-
73	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	YA	7 Peserta Didik	17.000.000
74	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	TIDAK		-
75	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	TIDAK		-
76	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	YA	14 Satuan Pendidikan	1.377.880.000
77	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	TIDAK		-
78	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04.0025 Pengembangan	Terlaksananya konten digital untuk	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DAN KEBUDAYAAN		Nonformal/Kesetaraan	konten digital untuk pendidikan	pendidikan yang dikembangkan				
79	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	TIDAK		-
80	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	TIDAK		-
81	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	TIDAK		-
82	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	TIDAK		-
83	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	TIDAK		-
84	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	TIDAK		-
85	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Nonformal/Kesetaraan		Buku Teks dan Non Teks				
86	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	TIDAK		-
87	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TIDAK		-
88	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	YA	50 Orang	30.000.000
89	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	TIDAK		-
90	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	TIDAK		-
91	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	TIDAK		-
92	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	TIDAK		-
94	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0054 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	TIDAK		-
95	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	TIDAK		-
96	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TIDAK		-
98	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kota Jawa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	304 orang	39.600.000
99	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Gedong Tataan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	1025 orang	32.340.000
100	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Hanura	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	811 orang	34.200.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Ibu Hamil Sesuai Standar				
101	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Kedondong	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	665 orang	38.880.000
102	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Gunung Sari	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	337 orang	46.800.000
103	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Roworejo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	614 orang	32.400.000
104	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Maja	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	268 orang	60.300.000
105	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Bernung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	871 orang	28.320.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Ibu Hamil Sesuai Standar				
106	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Kota Dalam	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	661 orang	19.200.000
107	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Pedada	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	271 orang	38.280.000
108	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Padang Cermin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	509 orang	53.280.000
109	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Kalirejo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	633 orang	37.620.000
110	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	9253 orang	7.500.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Ibu Hamil Sesuai Standar				
111	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Trimulyo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	526 orang	25.920.000
112	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Bunut	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	725 orang	42.240.000
113	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	BLUD Puskesmas Tegineneng	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	530 orang	28.800.000
114	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	8832 orang	7.500.000
115	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan	YA	8411 orang	474.358.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
116	Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	53760 orang	7.500.000
118	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Kota Jawa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	4516 orang	18.600.000
119	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Gedong Tataan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	9270 orang	52.800.000
120	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Hanura	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	4115 orang	27.450.000
121	Pelayanan Kesehatan Pada	BLUD Puskesmas Maja	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	YA	2361 orang	17.250.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Usia Pendidikan Dasar		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pada Usia Pendidikan Dasar	pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
122	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Roworejo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	5541 orang	31.500.000
123	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Puskesmas Gunung Sari	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	3501 orang	18.600.000
124	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Bernung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	8077 orang	28.800.000
125	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Kota Dalam	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	7518 orang	46.050.000
126	Pelayanan Kesehatan Pada	BLUD Puskesmas Pedada	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	YA	2367 orang	36.300.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Usia Pendidikan Dasar		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pada Usia Pendidikan Dasar	pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
127	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Padang Cermin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	4781 orang	29.850.000
128	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Kalirejo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	5868 orang	36.600.000
129	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	96064 orang	7.500.000
130	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Trimulyo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	5178 orang	53.550.000
131	Pelayanan Kesehatan Pada	BLUD Puskesmas Bunut	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	YA	7775 orang	22.200.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Usia Pendidikan Dasar		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pada Usia Pendidikan Dasar	pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
132	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Kedondong	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	6904 orang	47.850.000
133	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	BLUD Puskesmas Tegineneng	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	5656 orang	35.100.000
134	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	293524 orang	9.975.000
135	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	31451 orang	7.500.000
136	Pelayanan kesehatan pada	DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang	YA	97964 orang	7.500.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	penderita hipertensi		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
137	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	YA	3427 orang	7.500.000
139	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Kota Jawa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	26 orang	18.900.000
140	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Gedong Tataan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	106 orang	13.500.000
141	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Hanura	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	63 orang	11.400.000
142	Pelayanan kesehatan orang dengan	BLUD Puskesmas Maja	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	YA	28 orang	6.300.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gangguan jiwa berat		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
143	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Puskesmas Gunung Sari	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	30 orang	26.100.000
144	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Bernung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	90 orang	5.700.000
145	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Roworejo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	64 orang	22.500.000
146	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Kota Dalam	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	69 orang	17.100.000
147	Pelayanan kesehatan orang dengan	BLUD Puskesmas Pedada	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	YA	28 orang	25.200.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gangguan jiwa berat		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
148	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Padang Cermin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	53 orang	15.300.000
149	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Kalirejo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	65 orang	11.250.000
150	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	7777 orang	7.500.000
151	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Trimulyo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	51 orang	2.700.000
152	Pelayanan kesehatan orang dengan	BLUD Puskesmas Bunut	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	YA	71 orang	22.950.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	gangguan jiwa berat		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
153	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Kedondong	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	69 orang	15.750.000
154	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	BLUD Puskesmas Tegineneng	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	YA	52 orang	18.000.000
156	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Kota Jawa	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	403 orang	43.350.000
157	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Gedong Tataan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	868 orang	20.100.000
158	Pelayanan kesehatan orang	BLUD Puskesmas Hanura	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	YA	574 orang	11.400.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terduga tuberkulosis		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang Terduga Tuberkulosis	Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
159	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Maja	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	281 orang	14.700.000
160	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Bernung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	815 orang	27.300.000
161	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Puskesmas Gunung Sari	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	345 orang	30.300.000
162	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Roworejo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	501 orang	27.900.000
163	Pelayanan kesehatan orang	BLUD Puskesmas Pedada	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	YA	254 orang	21.300.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terduga tuberkulosis		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang Terduga Tuberkulosis	Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
164	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Kota Dalam	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	583 orang	17.400.000
165	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Padang Cermin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	454 orang	12.150.000
166	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Kalirejo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	519 orang	27.150.000
167	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	8365 orang	890.000.000
168	Pelayanan kesehatan orang	BLUD Puskesmas Trimulyo	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	YA	468 orang	10.800.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terduga tuberkulosis		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang Terduga Tuberkulosis	Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
169	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Bunut	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	644 orang	30.300.000
170	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Kedondong	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	675 orang	69.750.000
171	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	BLUD Puskesmas Tegineneng	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	472 orang	21.900.000
172	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	YA	9589 orang	178.500.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	TIDAK		-
174	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	TIDAK		-
175	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	TIDAK		-
176	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0026 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	TIDAK		-
177	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)					
178	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0014 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	TIDAK		-
179	Pelayanan Perlindungan Masyarakat	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	TIDAK		-
180	Pelayanan Perlindungan Masyarakat	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	TIDAK		-
181	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	TIDAK		-
182	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	YA	12 Laporan	122.400.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				dalam Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota				
183	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	YA	1 Laporan	91.000.000
184	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	TIDAK		-
185	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	TIDAK		-
186	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi	DINAS SATPOL PP DAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	1.05.04.2.01.0028 Penyusunan SOP Penanggulangan	Tersedianya Dokumen SOP penanggulangan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	korban kebakaran	PEMADAM KEBAKARAN	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran dan Penyelamatan	kebakaran dan penyelamatan				
187	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	TIDAK		-
188	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	TIDAK		-
189	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0005 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	TIDAK		-
190	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0006 Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	TIDAK		-
192	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	TIDAK		-
193	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	TIDAK		-
194	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Membahayakan Manusia	Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			
195	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0006 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	TIDAK		-
196	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	YA	270 orang	250.000.000
197	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	YA	15 orang	6.760.000
198	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	YA	16 orang	40.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
199	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
200	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	YA	60 orang	30.000.000
201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	YA	60 orang	40.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota			
202	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
203	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
204	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Luar Panti Sosial									
205	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
206	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
207	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
209	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
210	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
211	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana	DINAS SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	YA	24 orang	131.220.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	daerah kabupaten/kota									
212	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
213	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	DINAS SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	TIDAK		-
214	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	Ya	1	250.000.000
215					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	Ya	100	450.000.000
216	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Ya	4	100.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kabupaten/Kota									
217	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Ya	3	75.750.000
218				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Ya	1	-
219	Pelayanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	Ya	30	10.000.000
220	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis	Orang	Ya	400	15.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUB KEGIATAN ARAHAN PUSAT					RKPD		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TERDAPAT DALAM RKPD MURNI (YA/TIDAK)	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ancaman) Kabupaten/Kota				
221					Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Ya	1	10.000.000
222					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Ya	1	75.000.000
223	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Ya	18	111.000.000
224					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Ya	400	60.000.000
225					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	Ya	3	36.000.000

Sumber : SIPD RI Kabupaten Pesawaran, 2026

5.2.4 PAGU PROGRAM PENDUKUNG POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Tabel 5.9 Daftar Program Pendukung Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	RT.01 RW.02 Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon, Kab. Pesawaran	12-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
2	Pembangunan Jalan	RT.02 RW.01 Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon, Kab. Pesawaran	12-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
3	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Tresno Maju Dusun Sidorejo RT.02 RW.06. Kecamatan Negeri Katon, Kab. Pesawaran	12-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
4	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pujodadi Kecamatan Negeri Katon , Kab. Pesawaran	12-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
5	Rekonstruksi Jalan	Desa Babakan Loa kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Rekonstruksi Jalan	Desa Pesawaran Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
7	Pembangunan Jalan	Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
8	Bantuan Tempat sampah dan Timbangan sampah	Desa Pasar Baru kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Ya	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	33,46	30.000.000
9	Pembangunan Jalan	Dusun Serba Maju ke Dusun Kali Bungur Desa Tri Mulyo Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
10	Pembangunan Jalan	Desa Sri Rezeki - ke Desa Gerning Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
11	Rekonstruksi Jalan	DUSUN RAWA SUBUR/RAWA TUNGGAL DESA PADANG CERMIN KEC.PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
12	Rekonstruksi Jalan	DUSUN LUBUK BAKAK RT 03 DESA PADANG CERMIN KEC. PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
13	Rehabilitasi Tanggul Sungai	DUSUN RAWA SUBUR DESA PADANG CERMIN KEC. PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km	1	500.000.000
14	Rekonstruksi Jalan	DUSUN LUBUK BAKAK RT 05 DESA PADANG CERMIN KEC.PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Rekonstruksi Jalan	DUSUN KECAPI GANG IMPRES RT 01 DESA PADANG CERMIN KEC.PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
16	Pembangunan Jalan	Desa Margo Mulyo Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
17	Rekonstruksi Jalan	DUSUN KECAPI RT.03 LEGOK DESA PADANG CERMIN KEC.PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
18	Pembangunan Jalan	Desa Margo Rejo Kecamatan Tegineneng, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
19	Existing Tanah Peningkatan Onderlagh untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	DUSUN DANTAR DESA DANTAR KEC. PADANG CERMIN, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
20	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Pesawaran III desa Pesawaran Kec Kedondong, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
21	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Sukajaya Lempasing, Dusun Mutun Kec.Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
22	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk	Desa Huru - Desa Munca Hurun Kec. Teluk	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Pandan, Kab. Pesawaran			Kawasan Pemukiman	UTILITAS UMUM (PSU)								
23	Pembangunan Jalan	Desa Hanura Kec. Teluk Pandan, , Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
24	Rekonstruksi Jalan	dusun Pacitan Way Harong - Dusun Tanjung Lom Kecamatan Way Lima, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
25	Rekonstruksi Jalan	Desa Kota Dalom - Batu rajake kantor kecamatan Way Lima., Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
26	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	UPTD SDN 22 WAY RATAI Jl. Kalirejo, Desa Wates Kec. Way Ratai, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
27	Pembangunan Jalan	Dusun Cibalong RT.001 Desa Bunut Kec. Way ratai Kabupaten Pesawaran, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
28	Rekonstruksi Jalan	Desa Banjaran Kec. Padang Cermin , Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
29	Pembangunan Jalan	Desa Banjaran Kec. Padang Cermin , Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
30	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Banjaran , Kec. Padang Cermin , Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km	1	500.000.000

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Pembangunan Jalan	Desa Hurun, Kec Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
32	Pembangunan Jembatan	Dusun Padasuka RT 001 RW003 Desa penyandingan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tidak	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	Meter	0	-
33	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Way Harong ke Desa Cipanas Sumber Agung Kecamatan Way Lima , Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
34	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	dusun Ngadirejo Desa Gunung Rejo kec Wayratai .kabupten pesawaran, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
35	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Way Salak desa - Desa Way Harong - Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Lima , Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
36	Pemasangan Paving untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Mulyosari kec Wayratai pesawaran, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
37	Talud Type 60 untuk Penyediaan	Dusun Lebak Sari Desa Mulyosari	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	kec Wayratai , Kab. Pesawaran			Kawasan Pemukiman	SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
38	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	dusun totoharjo 1 Desa poncorejo kec Wayratai , Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
39	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Tangkil Rejo Desa sumber jaya kecamatan Wayratai , Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
40	Pemasangan Paving untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Candiwulan Desa Karang Anyar Kec.Gedong Tataan , Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
41	Pembangunan Jalan	Dusun Cukuh Cambai, desa Kampung Baru, Kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
42	Pembangunan Jalan	Dusun Umbul Salak - Pancur - Suakmalu - Fajar Harapan. Desa Sukarame, kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
43	Pembangunan Jalan	Dusun Suka Tenang, desa Sumber Jaya, kecamatan Way Ratai., Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
44	Rekonstruksi Jalan	Desa Pahawang, kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Penataan Ruang									
45	Pemeliharaan Tanggul atau Tebing Sungai	Desa Maja, Desa Umbul Limus, Desa Kekatang, kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	2,5	500.000.000
46	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Sukajaya, kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km	1	500.000.000
47	Rekonstruksi Jalan	Dusun Wonosari, Desa Sumber Jaya, kecamatan Way Ratai., Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
48	Jembatan Gantung	Dusun Pardasuka, desa Penyandingan ke desa Maja. Kecamatan Marga Punduh., Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
49	Pembangunan Jalan	Desa Gunung Sugih Baru Kac.Tegineneng, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
50	Pembangunan Jalan	Desa Negara Ratu Wates Kec.Tegineneng, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
51	Pembangunan Jalan	Desa Kota Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
52	Pembangunan Jalan	Desa Rejo Aggung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
53	Rekonstruksi Jalan	jalan H. Ali udin tempelrejo - MtsN 2km Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	Rekonstruksi Jalan	Desa Tempel Rejo Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	13-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	3,5	5.692.045.077
55	Pembangunan Jalan	Desa Cilimus Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
56	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
57	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Hanau Berak Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
58	Pembangunan Jalan	Desa Hanura Kec.Teluk Pandan, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
59	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Hanau Berak Dusun Duakha Kec. P.Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
60	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Rante Rejo 2 Desa Banjaran Kec.P.Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 2 Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
62	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Gunung Rejo Desa Wiyono Ke. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
63	Pembangunan Jalan	Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
64	Pembangunan Jalan	Desa Sanggi Dusun Piabung Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
65	Pembangunan Jalan	Dusun Kecapi Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
66	Pembangunan Jalan	Dusun Lubuk Baku Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
67	Pembangunan Jalan	Dusun Padang Cermin Kec. Padang Cermin , Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
68	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Dusun Piabung Desa Sangii Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km	1	500.000.000

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) di perumahan dan kawasan permukinan kumuh	Desa Padang Cermin Desa Gayau, Desa Sanggi Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Ya	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit Rumah	3	126.600.000
70	Pembangunan Jalan	Desa Kota Dalam ke Desa Sindang Garut Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
71	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Baturaja Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Ya	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit Rumah	3	126.600.000
72	Pembangunan Jalan	Desa Margo Mulyo Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
73	Pembangunan Jalan	Desa Margo Rejo Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
74	Pembangunan Jalan	Desa Gedong Gumanti, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
75	Pembangunan Jalan	Dusun Bayu Rampit Desa Baturaja, Kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
76	Pembangunan Jalan	usun Curup Jaya Desa Baturaja Kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
77	Pembangunan Jalan	Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
78	Pembangunan Jalan	Desa Pager Jaya Kecamatan Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	Pembangunan Jalan	Desa Maja Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
80	Pembangunan Jalan	Desa Sukajya Punduh Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
81	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km	1	500.000.000
82	Pembangunan Jalan	Desa Pekon Ampai Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
83	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Umbul Limus Kecamatan Marga Punduh, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km	1	500.000.000
84	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Desa Sukajaya Pedada Kec Punduh Pedada, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km	1	500.000.000
85	Pembangunan Jalan	Desa Banding Agung Baturaja Kec Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
86	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	Desa Baturaja Kec Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Menunjang Fungsi Hunian													
87	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sukajaya Punduh Kec Marga Punduh, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
88	Pemeliharaan Tanggul atau Tebing Sungai	Desa Sukajaya Punduh Kec Marga Punduh , Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	2,5	500.000.000
89	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kampung Baru Kec Marga Punduh, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
90	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Maja Kec Marga Punduh, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
91	Pembangunan Jalan	Dusun Lububaka Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
92	Drainase Type 60 untukPenyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Simpang, Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	DusunTrimulyo 2 Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
94	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Dusun 1 Sinar Bandung, Kab. Pesawaran	16-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Ya	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit Rumah	3	126.600.000
95	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Dusun 1 Sinar Bandung, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Ya	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit Rumah	3	126.600.000
96	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 1 RT/RW 01/01 Sinar Bandung, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
97	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 1 Sinar Bandung, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
98	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	Dusun 6 RT 01 Bangun Sari, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Menunjang Fungsi Hunian													
99	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 6 RT 02 Bangun Sari, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
100	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Sri Nusa Bangsa Timur, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
101	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 5 RT II Tri Rahayu, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
102	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 6 RT 12, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
103	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Pujodadi Barat, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	untuk Menunjang Fungsi Hunian													
104	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Halangan Ratu, Desa Negri Katon, Desa Grujugan, Kab. Pesawaran	17-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
105	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Halangan Ratu – Tugu Sari, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
106	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pejambon – Tugu Sari, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
107	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Trisno Maju dan Jalan Lumbi Rejo, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
108	Pemeliharaan Tanggul atau Tebing Sungai	Desa Negara Saka – Wairab, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	2,5	500.000.000

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Kabupaten/Kota						
109	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Negeri Katon Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
110	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Lumbi Rejo Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
111	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sido Mulyo Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
112	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Tresno Maju Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
113	Pembangunan Jalan	Dusun Induk-Dusun Pagar Banyu-Dusun Padang Terang, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
114	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix	Simpang Kayu Minyak-Dusun Gunung Batu Desa Pampangan	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran			Kawasan Pemukiman	UTILITAS UMUM (PSU)								
115	Pembangunan Jalan	Dusun Gunung Batu-Binong Desa Pampanagan Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
116	Bantuan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu jalan (Connector)	Dusun Gunung Batu Desa Pampangan Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ya	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	135	3.453.158.042
117	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Ciwangi Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
118	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Sumber Sari Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
119	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Solo Tigo - Bulak Rejo Atas , Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
120	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan	Desa Pesawaran PTPN ke arah Desa Cimanuk Kec Way Lima , Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					UTILITAS UMUM (PSU)								
121	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 1 Dusun Pesawaran Induk , Dusun 2 dan 4 Desa Pesawaran Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
122	Pembangunan Jalan	Desa Pejambon Negara Saka Kec. Negeri Katon, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Ya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	1,5	3.200.000.000
123	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 3 Desa Kutoarjo, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
124	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kutoarjo Dusun Dua, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
125	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kutoarjo Dusun Dua, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kutoarjo, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
127	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Negri Sakti Dusun Negri Ampai, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
128	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Negeri Sakti Dusun Banjar Negri, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Ya	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit Rumah	3	126.600.000
129	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Bayas Jaya, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
130	Pembangunan Jembatan	Desa Bayas Jaya, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tidak	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	Meter	0	-
131	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Bayas Jaya, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Ya	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit Rumah	3	126.600.000

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kota Dalom, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
133	Bantuan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu jalan (Connector)	Dusun Peninjauan Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ya	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	135	3.453.158.042
134	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Gedung Gumanti dan Desa Kresno Widodo , Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
135	Bantuan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu jalan (Connector)	Desa Bumi Agung Kec.Tegineneng, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ya	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	135	3.453.158.042
136	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
137	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Hanura, RKA, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Hanura, RK C, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
139	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Hanura, RK B , Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
140	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Hanura rk C, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
141	Bantuan rehabilitasi dan pemeliharaan lampu jalan (Connector)	Desa Sukaraja Dusun 7, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Ya	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	135	3.453.158.042
142	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Negeri Sakti Dusun Banjar Negri Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Ya	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit Rumah	3	126.600.000
143	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Desa Pejambon Negara Saka, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tidak	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	0	-

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	Drainase Type 60 untukPenyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Rejo Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
145	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kresno Widodo Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
146	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 6 Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
147	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Negeri Sakti – Sungai Langka Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
148	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 1, Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Bernung - Sukoharjo Kecamatan Gedong tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
150	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Negeri Sakti – Markasi – Sungai Langka, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
151	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Way Layap II Desa Kebagusan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
152	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
153	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	Desa Paguyuban – Batas Pringsewu, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Menunjang Fungsi Hunian													
154	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	dusun Sediamaju desa Sidodadi, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
155	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Padang Manis Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
156	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
157	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sinar Harapan Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
158	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Margodadi Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
159	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Bernung Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
160	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
161	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
162	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sungai Langka Dusun 9 Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
163	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Tamtama Dusun I Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
164	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk	Jl Bakti Remaja sampai Jl. Karang Sari Dusun II dan	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	III Desa Bagelen, Kab. Pesawaran			Kawasan Pemukiman	SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
165	Pembangunan Jembatan	Desa Tulang Tabak RT 005 Dusun III Desa Bagelen, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tidak	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	Meter	0	-
166	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Sastro Sumarno Dusun III Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
167	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Suhada Dusun IV Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
168	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jl. Museum Dusun IV & V Desa Bagelen Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
169	Pembangunan Rumah Layak Huni (Baru) kawasan permukiman	Desa Bagelen Kecamatan GedongTataan , Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Ya	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit Rumah	3	126.600.000

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Sidomulyo Desa Wates Way Ratai, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
171	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Ceringin Asri, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
172	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Wates Way Ratai, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
173	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kagungan Ratu., Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
174	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Purworejo dan Desa Karang Rrejo, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
175	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk	Desa Pujo Rahayu, Desa Kalirejo dan Desa	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lumbir Rejo , Kab. Pesawaran			Kawasan Pemukiman	SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
176	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Roworejo dan Negeri katon, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
177	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sidomulyo dan Desa Grujugan Baru, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
178	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
179	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
180	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana,	jalan Pasar Baru – Gunung Sari Kecamatan Kedondong – Kecamatan Way	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Khilau , Kab. Pesawaran												
181	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Way Lipang Desa Gunung Sari, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ya	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	3	650.000.000
182	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Way Lipang Desa Gunung Sari Kecamatan Wat Khilau, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
183	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Trirahayu Dusun 1, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
184	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	DesaTrirahayu Dusun 3, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
185	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	DESA TRIRAHAYU DUSUN 2, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Menunjang Fungsi Hunian													
186	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun 3 sampai Dusun 7 Desa . Trirahayu, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
187	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Poncokreno sampai Desa Pujo Dadi, Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
188	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Sido Mulyo sampai Desa Lumbir Rejo , Kab. Pesawaran	18-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
189	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Gunung Rejo Desa Wiyono Kecamatan Gedomg Tataan, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
190	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	Dusun Wiyono – Dusun Way Liati Kecamatan Gedomg Tataan, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Menunjang Fungsi Hunian													
191	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Way Layap I - Kampung Sawah II Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
192	Pembangunan Jembatan	Desa Way Layap satu dan Dusun Wiyono)Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tidak	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	Meter	0	-
193	Talud Type 60 untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Bagelen Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
194	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Markasi menuju Dusun GudangDusun Markasi menuju Dusun Gudang, Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
195	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dusun Sukadadi 4 Desa Sukadadi tembus Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
196	Pembangunan Jembatan	Dusun Sukadadi 4 ke Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tidak	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	Meter	0	-
197	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk	Bawang s/d Suka maju Kecamatan	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Punduh Pidadah, Kab. Pesawaran			Kawasan Pemukiman	SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
198	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Suka Maju, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
199	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Pagar jaya, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
200	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	ruas Bawang s/d Suka Maju, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
201	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix untuk Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Ringin Sari dan Porwodadi Kec. Punduh Pidada, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
202	Existing Onderlagh Peningkatan Hotmix Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di	Desa Penyandingan, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

No.	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN	TANGGAL PELAKSANAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (YA/TIDAK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
203	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Desa Kampung Baru, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697
204	Existing Tanah Peningkatan Rabat untuk Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jl bawang-sokamaju Sokamaju-Pagarjaya Desa penyandingan Sukajya Pidada, Kab. Pesawaran	19-05-2026	13/03/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Ya	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	40	4.997.936.697

Sumber : SIPD RI Kabupaten Pesawaran, 2026

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2027

Dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran diperlukan interkoneksi perencanaan pembangunan, dimana didalam dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029, terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesawaran. Makna selaras dan sejalan bahwa sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah atau IKU Kabupaten didalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 menjadi acuan didalam penyusunan sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didalam perhitungan indikator Renstra-PD memuat angka-angka yang memiliki hubungan linier maupun komposit dengan indikator Kabupaten Pesawaran.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET	
				2026	2027
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,66	12,67
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,01	8,25	8,36
3	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,30	74,25	74,39
4	Prevalensi Stunting	Persen	15,50 (2024)	12,22	11,37
5	Inflasi	Persen	0,44	1,00-3,00	1,00-3,00
6	Tingkat Pengengguran Terbuka	Persen	4,17	4,15-3,80	4,00-3,70
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,93	10,5-9,50	10,00-9,00
8	Kemantapan Jalan	Persen	55,28	58,28	61,28
9	Tingkat Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar	Persen	81,02 (2024)	84,02	85,52
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,37	68,84	69,10
11	Indeks Resiko Bencana	Poin	152,79	168,27-172,27	162,27-166,27
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,90 (2024)	74,50	74,90
14	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persen	8,20	4.0-7.0	4.0-7.2
15	Pertumbuhan Sektor Pertanian	Persen	3,96	0,80	1,05
16	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	72,62	82,44-85,26	83,30
17	PDRB Sektor Pariwisata	Persen	7,10	6,68-7,64	7.11-8.26
18	Indeks Perlindungan Anak	Poin	61,59 (2024)	63,03	63,75
19	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,434	0,345	0,317
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,28	77,29	77,59

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET	
				2026	2027
21	Persentase Desa Mandiri	Persen	61,05	34,46	35,14

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesawaran 2025-2029

6.2 SASARAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2027

Sasaran pembangunan di Kabupaten Pesawaran yang dijabarkan kedalam sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agenda prioritas tahunan pada periode 5 (lima) tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Pesawaran. Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Kunci pada Tahun 2027

	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	
		2025	2026	2027
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Ketahanan Pangan	72,62	82.44-85.26	83.3-86.73
2	Prevalensi Ketidak Cukupan kosumsi Pangan	10,23	7.2-9.8	6.0-8.7
3	Konsumsi Listrik Per kapita	211,62 (2024)	231,03	250,44
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	60,25 (2024)	62,25	64,25
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,59 (2024)	68,84	69,10
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	3,72 (2024)	3,82	3,92
7	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolaan Sampah	4654,5 (2024)	5854,5	7054,5
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan sampah	46,01 (2024)	51,01	56,01
9	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	49.188,71 (2024)	53.158,01	57.623.32
10	Indeks Resiko Bencana	152,79	141,79 - 144,79	136,79 - 139,79
11	Laju pertumbuhan Penduduk	2,73	1,06	1,06
12	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	447.235,44 (2024)	447.235,44	447.235,44
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,38	5,01	5,5-6,0
2	Tingkat Kemiskinan	10,93	10,5-9,50	10,00-9,00
3	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	46,31	47,94	50,26
4	Nilai investasi (Juta Rupiah)	154.265	275995,05	289752,8
5	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	8	95	95
6	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	24,50	30,52	30,68
7	Persentase koperasi Sehat	9,09	100	100
8	Return on Aset (ROA) BUMD (%)**	4,06 (2024)	4,11	4,17
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17	4,15-3,80	3,51-4,05
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)*	55,30 (2024)	55,56	55,82
11	Indeks Gini	0,269	0,293-0,290	0,292-0,286

	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	
		2025	2026	2027
12	Indeks Pembangunan Manusia	70,90	71,40	72,05
13	Usia Harapan Hidup	74,10	74,25	74,39
14	Indeks Pembangunan Keluarga	64,2	65,4	66,6
15	Angka Kematian Ibu	5	8	7
16	Prevalensi Stunting	15,50 (2024)	12,22	11,37
17	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	1190	1388	1199
18	Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate (%)	57,06%	90%	90%
19	Rata - Rata Lama Sekolah	8,01	8,25	8,36
20	Harapan Lama Sekolah	12,64	12,65	12,67
21	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	5.5-5.6 (2024)	5.5-5.7	5.5-5.8
22	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%)	53.0-58.6 (2024)	54.0-59.0	55.0-60.0
23	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	23,19	29,50	36,80
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100 (2024)	100	100
25	Persentase Penyandang Disabilitas yang terlatih (%)	1,33 (2024)	1,33	1,33
26	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*			
	i) Literasi			
	SD	54,79	59,98	62,48
	SMP	65,68	65,26	66,36
	ii) Numerasi			
	SD	48,34	54,71	57,61
	SMP	63,78	63,46	64,96
27	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk			
	i) Literasi	77,21 (2024)	77,70	78,20
	ii) Numerasi	67,53 (2024)	68,53	69,53
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama **	73,90 (2024)	74,5	74,9
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,50 (2024)	59,50	60,80
30	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100 (2024)	100	100
31	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100 (2024)	100	100
32	Tingkat kriminalitas	108	64	60
33	Persentase pemajuan kebudayaan daerah	64 (2024)	65	66
34	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	50 (2024)	58,33	66,67
35	Persentase cagar budaya peringkat kabupaten	50 (2024)	58,33	66,67
36	Indeks Perlindungan Anak	62,31 (2024)	63,03	63,75
37	Indeks Ketimpangan Gender	0,434	0,345	0,317
38	Indeks Pembangunan Pemuda	53,51 (2024)	53,68	53,85
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	14,15	14,1	14,4
2	PDRB Akomodasi Makan dan Minum	1,61	1.57-1.68	1.70-1.83
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	1,99	1,48	1,71
4	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif (%)	5.0-10.0 (2024)	6.0-11.0	7.0-12.0
5	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	4,48	4,44	4,44

	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	
		2025	2026	2027
6	Rasio Kewirausahaan**	2,90 (2024)	2,93	2,96
7	Indeks Inovasi Daerah	54,82	65,51	65,95
8	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer	36,00 (2024)	36,36	36,72
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Kominikasi	6,12 (2024)	6,22	6,32
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	30,12	30.7-32.7	30.9-33.1
11	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB ADHB)	1,10	3,41	3,45
12	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Inflastruktur	82,52 (2024)	84,02	85,52
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	77,53 (2024)	79,31	81,01
14	Presentase Desa Mandiri	61,05	34,46	35,14
15	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,202	0,22	0,23
16	Tingkat Inflasi	0,44	1.00-3.00	1.00-3.00
17	Proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit (%)	40 (2024)	40	40
18	Persentase fasilitasi dokumen kerja sama daerah (%)	50 (2024)	50	50
19	Indeks Zakat Nasional	0,50 (2024)	0,53	0,56
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Indeks Reformasi Hukum	96,66	88,5	89,0
2	Indeks Sistem Pemeritahan	3,49 (2024)	4,30	4,50
3	Indeks Pelayanan Publik	4,32 (2024)	4,37	4,42
4	Indeks Integritas Nasional	68,17	72,66	73,22
5	Persentase Capaian Aksi HAM	78 (2024)	80	82
6	Indeks reformasi birokrasi	76,28	77,29	77,59
7	Indeks Demokrasi Indonesia	78,12	80,50	80,50
8	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	79,50 (2024)	80,50	80,50
9	Indeks Daya Saing Daerah	3,50 (2024)	3,55	3,60
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**			
1	Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	77,60 (2024)	80,27	82,94
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,52	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	77,29	99,54	99,93
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	16,74 (2024)	20,84	24,94
2	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota			
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,21	0,21	0,21
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	3	3	3
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100

	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	
		2025	2026	2027
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100
3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota			
	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	9,81	11,06	12,31
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	23,62	24,87	26,12
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	75,00	76,50	78,00
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	65,79	67,29	68,79
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,90	91,40	92,90
	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	89,90	91,40	92,90
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	55,28	58,28	61,28
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	80	82	84
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	10	15	20
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	15,6	20,6	25,6
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	200	200	200
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota			
	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.100	1.100	1.100

	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	
		2025	2026	2027
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.100	1.100	1.100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6.516	5.516	4.516
6	Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota			
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	25 (2024)	30	35
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Jumlah angkatan kerja yng dilatih / jumlah angkatan kerja x 100 %)	90,37	15	17
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	74,26	30	35
7	Urusan Pangan Kabupaten/Kota			
	Persentase Cadangan Pangan	5,9	10	15
8	Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	68,59	68,84	69,10
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	100	100	100
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	80	80	90
9	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			
	Persentase penduduk yang menggunakan identitas kependudukan digital (IKD) bagi penduduk wajib ktp	75	80	85
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	90	90	90
	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	100	100	100
	Persentasi penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	100	100	100
	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	100	100	100
10	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota			
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	3,38	3,38	3,38
11	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota			
	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,8	1,8	1,8
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,41	68,61	68,81
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,7	9,6	9,5
12	Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota			
	Rasio konektivitas	9,09	9,09	9,09
13	Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota			
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	100	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui	9,88	10,86	11,85

	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	
		2025	2026	2027
	Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
14	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota			
	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	9,74	30	35
	Meningkatnya jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha	50	13	15
15	Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota			
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	-36,31	5	5
16	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Prestasi Olahraga	6,00	6,67	7,72
17	Urusan Statistik Kabupaten/Kota			
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100
18	Urusan Persandian Kabupaten/Kota			
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	100	100
19	Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota			
	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	100	100
20	Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota			
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67	68	69
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57	58	59
21	Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota			
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43	45	48
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	48	50	52
22	Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota			
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	18.598,27	22.192	23.301,6
23	Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	-19,70	5	5
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-50,60	5	5
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	7,10	6.68	7.11
24	Urusan Pertanian Kabupaten/Kota			
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1,07	3,16	3,30
25	Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota			
	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	558	647	711
	Persentase kinerja realisasi pupuk (Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan	93	94	95

	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	
		2025	2026	2027
	Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%)			
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	411	470	490
26	Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota			
	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	43,62	48,62	53,62
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50	60	70
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	4,10	6,50	8,30
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	4,90	60	70
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	89	100	100
27	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota			
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	15,52	1:2,17	1:2,17
	Rasio PAD	10,34	1:7,38	1:8,71
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3
	Survei Penilaian Integritas	68,17	70	72
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	81,38	69	69,5
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
28	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota			
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	70	80	80
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80	100	100
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	50	60	70
29	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota			
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00%	100,00%	100,00%
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,25%	15,70%	16%
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	32,77	36,41	38,83
30	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota			
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	89,34	0,032	0,016
	Assets Management	100	100	100

	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	
		2025	2026	2027
	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,000	0,004	0,004
31	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota			
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan *(Information on resources available to frontline service delivery units)*	Ada	Ada	Ada
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Ada	Ada	Ada

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesawaran 2025-2029

BAB VII PENUTUP

Bahwa salah satu aspek keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan serta diikuti dengan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan didukung oleh peran aktif masyarakat dan kalangan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, untuk bersama-sama masyarakat secara sungguh-sungguh melaksanakan dan saling bersinergi dalam mendukung program-program pembangunan sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Pesawaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 bahwa RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 beserta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2029 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis, tantangan, dan permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia, RKPD yang disusun telah menetapkan 5 (lima) prioritas daerah rencana pembangunan Tahun 2027. Dalam rangka menjamin terlaksananya program/kegiatan yang direncanakan dan mewujudkan sinergi pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027, perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Berkaitan dengan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, peran serta dan kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan aktif sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. RKPD Tahun 2027 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.

4. Dalam rangka integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap perangkat daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2027.
5. Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda sebagai dasar pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027.
6. BAPPEDA wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap laporan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari Renja PD dan RKPD Kabupaten Pesawaran yang hasilnya disampaikan kepada Bupati.

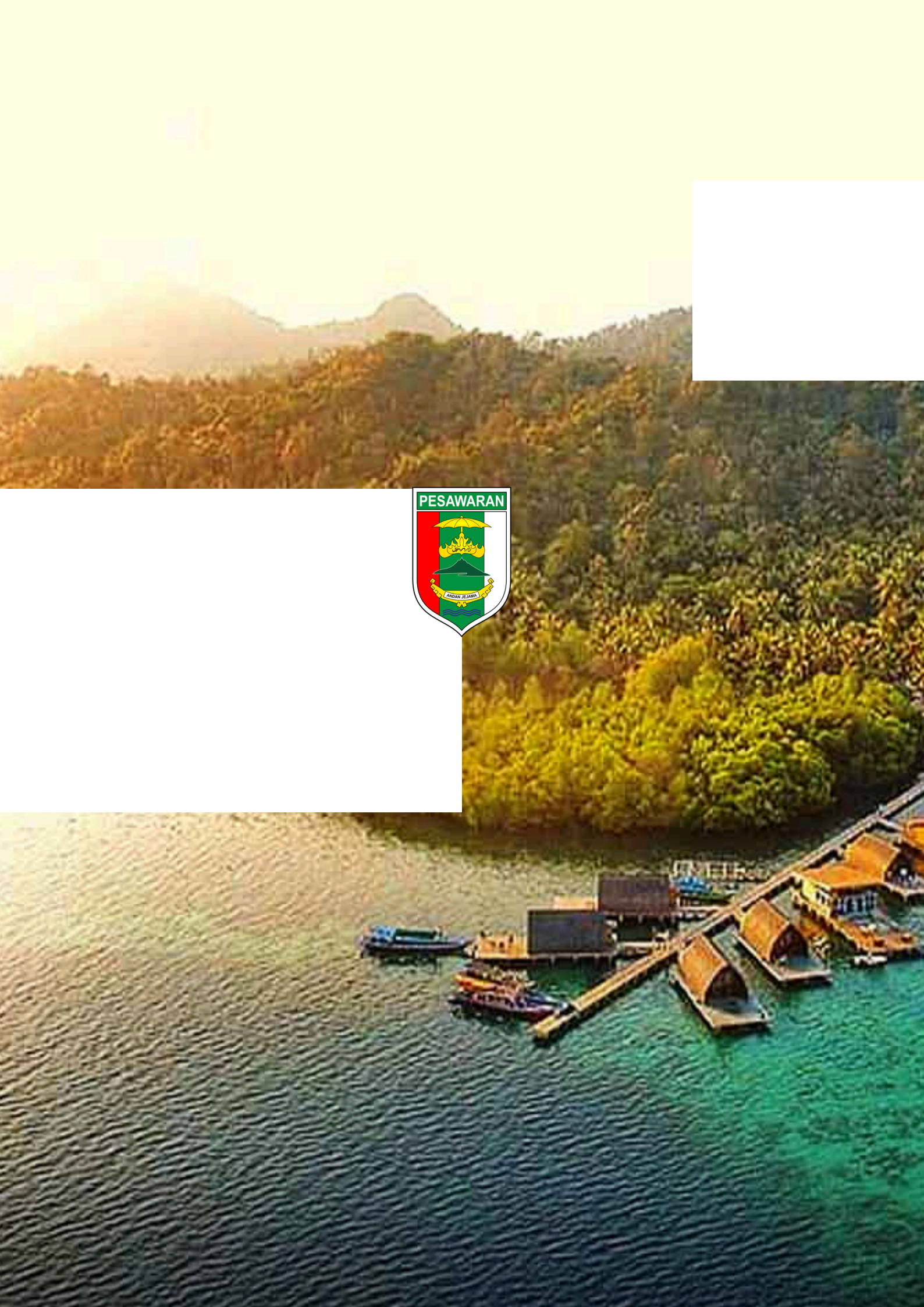
Penyusunan RKPD ini telah melalui proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi. Melalui RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, dan sinergi antarprogram serta lintas sektor. Seluruh rencana yang tertuang di dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara nyata.

Akhir kata, dengan ditetapkannya RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2027, diharapkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam implementasi dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan, demi terwujudnya "*Mewujudkan Pesawaran CAKEP yang Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045*".

BUPATI PESAWARAN,

dto

NANDA INDIRA B.


PESAWARAN
ANDAN JEJAMA